



Kantor Pusat
Gedung Menara BTN
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, Indonesia
P.O. BOX 3198 / JKT 10130
Tel: (021) 633-6789 Ext: 2003 Fax: (021) 633-6719
E-mail: csd@btn.co.id Website: www.btn.co.id

Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015

PROSPEKTUS

JADWAL PENAWARAN UMUM					
Tanggal Efektif	:	30 Juni 2015	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	8 Juli 2015
Masa Penawaran	:	1 – 3 Juli 2015	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	9 Juli 2015
Tanggal Penjatahan	:	6 Juli 2015			

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK.

Kegiatan Usaha
Jasa Perbankan

Kantor Pusat
Gedung Menara BTN
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, Indonesia
P.O. BOX 3198 / JKT 10130
Tel.: (021) 633-6733, 633-6789 Fax.: (021) 633-6737
E-mail: csd@btn.co.id Website: www.btn.co.id

Dengan 65 Kantor Cabang, 223 Kantor Cabang Pembantu, 479 Kantor Kas, 22 Kantor Cabang Syariah, 21 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 7 Kantor Kas Syariah, 2.951 Kantor Pos Online, 10 Mobil Kas Keliling, 22 Payment Point, 1.830 ATM

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK BTN DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 4 (empat) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,625% (sembilan koma enam dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah).
- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,875% (sembilan koma delapan tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).
- Seri C : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,000% (sepuluh persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah).
- Seri D : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,500% (sepuluh koma lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah).

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2015 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 8 Juli 2018 untuk Obligasi Seri A, 8 Juli 2020 untuk Obligasi Seri B, 8 Juli 2022 untuk Obligasi Seri C, dan 8 Juli 2025 untuk Obligasi Seri D.

Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.
HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHT PADA BAB XVII PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka Penawaran Umum berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):

AA (Double A)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVIII Prospektus ini.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT Recapital Securities

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT SEHUBUNGAN DENGAN KELANCARAN PEMBAYARAN KEMBALI POKOK PINJAMAN DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN, YANG APABILA JUMLAH KREDIT YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN CUKUP MATERIAL, DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHT PADA BAB V PROSPEKTUS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. selanjutnya disebut Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 kepada OJK dengan surat No. 166/DIR/IBD/CM/IV/2015 tanggal 24 April 2015, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 dengan nilai pokok sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dari jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Obligasi No. SP-005/BEI.PNG/04-2015 tanggal 24 April 2015 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, kecuali PT Danareksa Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang terafiliasi melalui kepemilikan saham Negara Republik Indonesia. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/35/DPNP tanggal 31 Desember 2009 perihal Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru, penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 telah mendapat penegasan oleh OJK (d.h. Bank Indonesia) melalui surat No. S.24/PB.312/2015 tanggal 16 April 2015.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	viii
I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TAHAP I	8
III. PERNYATAAN HUTANG	9
IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	15
A. Umum	15
B. Kebijakan Akuntansi Yang Signifikan	17
C. Keuangan	18
D. Prinsip-Prinsip Perbankan yang Sehat	26
V. RISIKO USAHA	31
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	36
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	37
1. Riwayat Singkat Perseroan	37
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	38
3. Pengawasan dan Pengurusan Perseroan	38
4. Sumber Daya Manusia	46
5. Transaksi dengan Pihak Terafiliasi	49
6. Transaksi dan Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga	50
7. Perkara yang Dihadapi Perseroan	51
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	53
1. Umum	53
2. Kebijakan Umum Perseroan dan Manajemen	53
3. Kegiatan Usaha Perseroan	53
4. Jaringan Distribusi dan Pelayanan	63
5. Aset Tetap	66
6. Pemasaran	67
7. Kerjasama Kelembagaan	68
8. Prospek Usaha Dan Keunggulan Kompetitif Perseroan	68
9. Persaingan Usaha	70
10. Strategi Perseroan	70
11. Manajemen Risiko	74
12. Kepatuhan	78
13. Audit Internal	80
14. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>)	82
15. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	84
16. Teknologi Informasi	86
17. Tingkat Kesehatan Bank	87
18. Pertanggungjawaban Asuransi	90
19. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	91

IX. INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA	92
X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	101
XI. EKUITAS	103
XII. PERPAJAKAN	105
XIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	106
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	107
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	109
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	133
XVII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI	369
1. Umum	369
2. Jumlah Pokok obligasi, Bunga Obligasi dan jatuh tempo obligasi	369
3. Jaminan	370
4. Hak Senioritas Atas Hutang	370
5. Dana Pelunasan Obligasi (<i>Sinking Fund</i>)	370
6. Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan	371
7. Kelalaian Perseroan	372
8. Pembelian Kembali Obligasi	373
9. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)	374
10. Hak-hak Pemegang Obligasi	377
11. Pemberitahuan	377
12. Hukum yang berlaku	377
XVIII. KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN OBLIGASI	378
XIX. ANGGARAN DASAR	381
XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	410
XXI. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	413
XXII. AGEN PEMBAYARAN	422
XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN OBLIGASI	423

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau dewan Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agan Pembayaran	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
ATM	: Berarti Anjungan Tunai Mandiri (<i>Automated Teller Machine</i>).
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Bapepam dan LK	: Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Bunga Obligasi	: Berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Bursa Efek	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya..
Daftar Pemegang Rekening	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI.
Denda	: Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	: Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Obligasi, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang. Unit Penyertaan kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 yaitu: a. atas dasar lewatnya waktu yakni: i. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap; atau

- ii. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 - b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK, yaitu bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan oleh OJK.
- Emisi : Berarti penawaran umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
- GNPSR : Berarti Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah
- Hari Bursa : Berarti hari-hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
- Hari Kalender : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan *Gregorius Calendar* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- Jumlah Terhutang : Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
- Kejadian Kelalaian : Berarti salah satu atau lebih dari kejadian yang disebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan yang tercantum dalam Bab XVII mengenai Keterangan Tentang Obligasi.
- Konfirmasi Tertulis : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
- Konfirmasi Tertulis untuk RUPO atau KTUR : Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
- KPR : Berarti Kredit Pemilikan Rumah
- KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
- Kustodian : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- Masyarakat : Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
- Obligasi : Berarti surat berharga bersifat hutang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, yang merupakan penerbitan tahap I dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan II, yang terdiri dari :
 - Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,625% (sembilan koma enam dua lima persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar Rupiah);

- Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,875% (sembilan koma delapan tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah);
 - Obligasi Seri C dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,000 % (sepuluh koma nol nol persen) per tahun berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah);
 - Obligasi Seri D dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,500% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah);
- dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Pemegang Obligasi	:	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: a. Rekening Efek pada KSEI; atau b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemeringkat	:	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau pemeringkat lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPM.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum	:	Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tatacara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penawaran Umum Berkelanjutan	:	Berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Pengakuan Hutang	:	Berarti Pengakuan Hutang Perseroan sebagaimana ternyata dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 No. 55 tanggal 22 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Penjamin Emisi Obligasi	:	Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Emisi Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	:	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi) dan PT Trimegah Securities Tbk, semuanya berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4	:	Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2	:	Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11	:	Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 tertanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Perjanjian Agen Pembayaran	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI No. 29 tertanggal 23 April 2015 dan Akta Perubahan I Perjanjian Agen Pembayaran No. 57 tanggal 23 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 No. 28 tanggal 23 April 2015, Akta Addendum I Perjanjian Emisi Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 No. 43 tanggal 21 Mei 2015, dan Akta Addendum II Perjanjian Emisi Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 No. 56 tanggal 22 Juni 2015, yang ketiganya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Perwaliamanatan	:	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 No. 27 tanggal 23 April 2015, Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 No. 42 tanggal 21 Mei 2015, dan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 No. 54 tanggal 22 Juni 2015 yang ketiganya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0022/PO/KSEI/0415 tanggal 23 April 2015 dan Akta Perubahan I Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0017/PI-PO/KSEI/0615 tanggal 23 Juni 2015, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Obligasi	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia perihal pencatatan efek, No. SP-005/BEI.PNG/04-2015 tanggal 24 April 2015, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi	:	Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN No. 26 tanggal 23 April 2015, Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN No. 41 tanggal 21 Mei 2015, dan Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN No. 53 tanggal 22 Juni 2015, yang ketiganya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh Perseroan yang bersangkutan di kemudian hari.
Perseroan	:	Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara, disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, beserta penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia	:	Berarti badan atau badan hukum yang mempunyai hubungan Afiliasi karena: (i) Kepemilikan atau pernyataan modal Negara Republik Indonesia baik langsung maupun tidak langsung; atau (ii) dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tidak termasuk Entitas Anak Perseroan
Pokok Obligasi	:	Berarti jumlah pokok pinjaman Emiten kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Emiten melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) yang terdiri dari : – Obligasi Seri A dalam jumlah pokok sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar Rupiah); – Obligasi Seri B dalam jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah); – Obligasi Seri C dalam jumlah pokok sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah);

- Obligasi Seri D dalam jumlah pokok sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah);
 Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan

- Prospektus : Berarti berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan emisi obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.2 lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-51/PM/1996 tanggal 17-01-1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum, dan dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 dan Peraturan OJK No.36.

- Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.

- RUPO : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

- Satuan Pemindahbukuan : Berarti satuan jumlah Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah), atau kelipatannya, yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya.

- Sertifikat Jumbo Obligasi : Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

- Tanggal Emisi : Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Emisi Obligasi kepada Perseroan yaitu tanggal 8 Juli 2015.

- Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi : Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

- Tanggal Penjataan : Berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi, yaitu tanggal 6 Juli 2015.

- Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi : Berarti tanggal di mana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh-tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

- Undang-Undang Perbankan : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- UUPM : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

- Wali Amanat : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana di maksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT. Bank Mega Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1972. Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang- Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.

Pendirian Perusahaan Persero BTN dilakukan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara "PT Bank Tabungan Negara (Persero)" No. 136 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No.603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A ("Akta Pendirian").

Perseroan memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan ijin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir seluruh Anggaran Dasar dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.51 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No.AHU-AH.01.03-0926094 tanggal 21 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3495340.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 21 April 2015 ("**Akta PKR No.51/2015**"), yang berisikan mengenai penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dimana dilakukannya perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.25 tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No.AHU-AH.01.03-0932022 tanggal 13 Mei 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3504879.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 13 Mei 2015 ("**Akta PKR No.25/2015**") yang berisikan mengenai perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 anggaran dasar mengenai modal ditempatkan dan modal setor Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat, 65 kantor cabang, 223 kantor cabang pembantu, 479 kantor kas, 22 payment point, 22 Kantor Cabang Syariah, 21 kantor cabang pembantu syariah, 7 kantor kas Syariah, 2.951 Kantor Pos Online, 10 Mobil Kas Keliling, 1.830 ATM di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Akta PKR No.51/2015 jo Akta PKR No.25/2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	6.353.999.999	3.176.999.999.500	60,13
2. Masyarakat			
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	4.213.720.500	2.106.860.250.000	39,87
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.567.720.500	5.283.860.250.000	100,00
Saham Dalam Portepel	9.910.711.500	4.955.355.750.000	

Susunan pemegang saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, pada tanggal 31 Maret 2015, adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	%
Negara Republik Indonesia		
	1 saham seri A Dwiwarna	60,13
	6.353.999.999 saham seri B	
Maryono (Direktur Utama)	98.500 saham seri B	0,00
Mansyur S. Nasution (Direktur)	375.000 saham seri B	0,00
Irman A. Zahiruddin (Direktur)	4.922.650 saham seri B	0,05
Adi Setianto (Direktur)	1.750.000 saham seri B	0,02
Masyarakat	4.206.549.850 saham seri B	39,80
Jumlah		
	1 saham seri A Dwiwarna	100,00
	10.567.695.999 saham seri B	

3. PENAWARAN UMUM

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah)
Harga Penawaran	: 100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi
Seri Obligasi	Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,625% (sembilan koma enam dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah). Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,875% (sembilan koma delapan tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). Seri C : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,000% (sepuluh persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah). Seri D : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,500% (sepuluh koma lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah).

Periode Pembayaran Bunga	: 3 (tiga) bulan
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Penggunaan Dana	: Dana yang diperoleh dari hasil emisi Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai sumber pembiayaan kredit.
Peringkat Efek	: <i>id</i> AA dari Pefindo
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk.
Dana pelunasan Obligasi (<i>Sinking Fund</i>)	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana.
Pembelian Kembali	: Pembelian Kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan Pembelian Kembali atas Obligasi yang belum jatuh tempo, baik seluruhnya atau sebagian sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan, selanjutnya disebut juga "Pembelian Kembali". Pembelian Kembali dapat dilakukan apabila Perseroan tidak dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

4. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Risiko Kredit
 - a) Risiko ketidakmampuan mempertahankan kualitas portofolio kredit milik Perseroan
 - b) Risiko terjadinya peningkatan penyisihan kerugian untuk menutup kerugian portofolio kredit yang terjadi di masa mendatang
 - c) Risiko konsentrasi kredit pada sektor dan daerah tertentu
2. Risiko Likuiditas
 - a) Risiko kesulitan likuiditas akibat *mismatch* antara jatuh tempo aktiva dengan kewajiban
 - b) Risiko berkurangnya likuiditas
3. Risiko Pasar
4. Risiko Operasional
 - a) Jaminan yang diberikan untuk menjamin kredit yang diberikan oleh Perseroan mungkin tidak mencukupi dan Perseroan tidak bisa merealisasikan secara penuh nilai jaminan yang diberikan
 - b) Risiko sistem teknologi informasi
5. Risiko Hukum
6. Risiko Reputasi
7. Risiko Strategik
 - a) Risiko kegagalan penerapan rencana strategi Perseroan
 - b) Risiko Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan
8. Risiko Kepatuhan

Selain dari risiko-risiko yang telah disebutkan di atas, Obligasi Perseroan juga mengandung risiko investasi bagi para Pemegang Obligasi. Risiko yang mungkin dihadapi investor pembeli Obligasi adalah tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan pada Penawaran umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.

Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

5. RINGKASAN DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011, dan 2010 berdasarkan laporan keuangan Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah kecuali ROA, ROE, LDR, dan CAR dalam persentase)

Keterangan	31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010
Total Aset	144.575.961	131.169.730	111.748.593	89.121.459	68.385.539
Total Liabilitas	132.369.555	119.612.977	101.469.722	81.799.816	61.938.261
Total Ekuitas	12.206.406	11.556.753	10.278.871	7.321.643	6.447.278
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	12.807.328	10.782.877	8.818.579	7.556.104	6.498.752
Beban Bunga dan Bonus	(7.342.747)	(5.129.554)	(4.091.760)	(3.770.231)	(3.143.934)
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - neto	5.464.581	5.653.323	4.726.819	3.785.873	3.354.818
Pendapatan Operasional Lainnya	894.820	763.983	571.494	512.017	487.890
Beban Operasional Lainnya	(4.041.294)	(3.849.042)	(3.213.561)	(2.720.117)	(2.247.211)
Laba Operasional	1.546.212	2.135.909	1.870.969	1.525.749	1.263.717
Laba Tahun Berjalan	1.115.592	1.562.161	1.363.962	1.118.661	915.938
ROA (%)	1,12	1,79	1,94	2,03	2,05
ROE (%)	10,66	16,05	18,23	17,65	16,56
LDR (%)	108,86	104,42	100,90	102,56	108,42
CAR untuk risiko kredit dan risiko operasional (%)	14,68	15,69	17,75	15,08	16,83
CAR untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar (%)	14,64	15,62	17,69	15,03	16,74

Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

6. KEBIJAKAN DAN PROSPEK USAHA

Sejalan dengan visi perusahaan yaitu menjadi bank yang terkemuka dan menguntungkan dalam pembiayaan perumahan serta untuk lebih memfokuskan usahanya di bidang pembiayaan perumahan tanpa subsidi, maka Perseroan berusaha untuk senantiasa mengupayakan peningkatan pemberian kredit baru non subsidi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking practice*).

Meskipun dihadapkan pada persaingan langsung maupun tidak langsung yang semakin ketat dari bank-bank nasional serta lembaga pembiayaan lainnya, Perseroan tetap optimis akan prospek usaha yang dilakukan. Dengan mengandalkan pada basis nasabah ritel yang besar dan loyal (4,8 juta rekening nasabah simpanan dan 1,2 juta rekening nasabah kredit), jaringan cabang yang luas dan dukungan dari produk perbankan yang ditawarkan, Perseroan berkeyakinan akan tetap mampu menghadapi persaingan dalam industri.

7. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- Menerima pelunasan Pokok dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- Yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi menerima pembayaran denda untuk setiap ketiadaan pembayaran sebesar 1% (satu persen) per tahun diatas Bunga Obligasi yang berlaku atas jumlah yang terhutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Nilai denda dihitung perhari, terhitung sejak tanggal pembayaran sehingga jumlah terhutang terbayar sepenuhnya, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.
- e. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - i. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan ketentuan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LKNo. VI.C.4;
 - ii. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - iii. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - iv. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4;
 - v. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK BTN DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini terdiri dari 4 (empat) seri Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,625% (sembilan koma enam dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah).
- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,875% (sembilan koma delapan tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).
- Seri C : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,000% (sepuluh persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah).
- Seri D : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,500% (sepuluh koma lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah).

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2015 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 8 Juli 2018 untuk Obligasi Seri A, 8 Juli 2020 untuk Obligasi Seri B, 8 Juli 2022 untuk Obligasi Seri C, dan 8 Juli 2025 untuk Obligasi Seri D.

Dalam rangka Penawaran Umum berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dari Pefindo:

idAA (Double A)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVIII Prospektus ini.



PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK.

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat

Gedung Menara BTN

Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, Indonesia

P.O. BOX 3198 / JKT 10130

Tel.: (021) 633-6733, 633-6789 Fax.: (021) 633-6737

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT SEHUBUNGAN DENGAN KELANCARAN PEMBAYARAN KEMBALI POKOK PINJAMAN DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN, YANG APABILA JUMLAH KREDIT YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN CUKUP MATERIAL, DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1972. Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang- Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.

Pendirian Perusahaan Persero BTN dilakukan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara "PT Bank Tabungan Negara (Persero)" No. 136 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Muhandis Salim, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No.603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A ("Akta Pendirian").

Perseroan memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan ijin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir seluruh Anggaran Dasar dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.51 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No.AHU-AH.01.03-0926094 tanggal 21 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3495340.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 21 April 2015 ("**Akta PKR No.51/2015**"), yang berisikan mengenai penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dimana dilakukannya perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.25 tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No.AHU-AH.01.03-0932022 tanggal 13 Mei 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3504879.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 13 Mei 2015 ("**Akta PKR No.25/2015**") yang berisikan mengenai perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 anggaran dasar mengenai modal ditempatkan dan modal setor Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat, 65 kantor cabang, 223 kantor cabang pembantu, 479 kantor kas, 22 payment point, 22 Kantor Cabang Syariah, 21 kantor cabang pembantu syariah, 7 kantor kas Syariah, 2.951 Kantor Pos Online, 10 Mobil Kas Keliling, 1.830 ATM di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah), Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 36 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan, sebagai berikut:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan PUB Obligasi terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka PUB Obligasi.
2. Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit 2 (dua) tahun.
3. Selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% dari modal disetor. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan tanggal 24 April 2015 dan oleh Akuntan dengan Surat Pernyataan No. RPC-1246/PSS/2015/DAU tanggal 24 April 2015.
4. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dan memiliki hasil pemingkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemingkatan Efek.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah "Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015".

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Obligasi ini tidak memiliki hak untuk didahulukan pembayarannya dibandingkan dengan pinjaman lain yang dimiliki oleh Perseroan dikarenakan Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan, Perseroan mempunyai kewajiban untuk menjaga jumlah aktiva yang tidak diagunkan secara khusus minimal sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari utang Perseroan yang tidak ada jaminan khusus yang belum dibayar lunas (*outstanding*) dalam bentuk obligasi yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau Bursa Efek Luar Negeri dan surat utang jangka menengah / *Medium Term Notes* (MTN).

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang terdiri dari:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,625% (sembilan koma enam dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah).
- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,875% (sembilan koma delapan tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).
- Seri C : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,000% (sepuluh persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah).
- Seri D : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,500% (sepuluh koma lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah).

Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan.

Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga Ke	Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Seri A	Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Seri B	Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Seri C	Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Seri D
1	8 Oktober 2015	8 Oktober 2015	8 Oktober 2015	8 Oktober 2015
2	8 Januari 2016	8 Januari 2016	8 Januari 2016	8 Januari 2016
3	8 April 2016	8 April 2016	8 April 2016	8 April 2016
4	8 Juli 2016	8 Juli 2016	8 Juli 2016	8 Juli 2016
5	8 Oktober 2016	8 Oktober 2016	8 Oktober 2016	8 Oktober 2016
6	8 Januari 2017	8 Januari 2017	8 Januari 2017	8 Januari 2017
7	8 April 2017	8 April 2017	8 April 2017	8 April 2017
8	8 Juli 2017	8 Juli 2017	8 Juli 2017	8 Juli 2017
9	8 Oktober 2017	8 Oktober 2017	8 Oktober 2017	8 Oktober 2017
10	8 Januari 2018	8 Januari 2018	8 Januari 2018	8 Januari 2018
11	8 April 2018	8 April 2018	8 April 2018	8 April 2018
12	8 Juli 2018	8 Juli 2018	8 Juli 2018	8 Juli 2018
13	-	8 Oktober 2018	8 Oktober 2018	8 Oktober 2018
14	-	8 Januari 2019	8 Januari 2019	8 Januari 2019
15	-	8 April 2019	8 April 2019	8 April 2019
16	-	8 Juli 2019	8 Juli 2019	8 Juli 2019
17	-	8 Oktober 2019	8 Oktober 2019	8 Oktober 2019
18	-	8 Januari 2020	8 Januari 2020	8 Januari 2020
19	-	8 April 2020	8 April 2020	8 April 2020
20	-	8 Juli 2020	8 Juli 2020	8 Juli 2020
21	-	-	8 Oktober 2020	8 Oktober 2020
22	-	-	8 Januari 2021	8 Januari 2021
23	-	-	8 April 2021	8 April 2021
24	-	-	8 Juli 2021	8 Juli 2021
25	-	-	8 Oktober 2021	8 Oktober 2021
26	-	-	8 Januari 2022	8 Januari 2022
27	-	-	8 April 2022	8 April 2022
28	-	-	8 Juli 2022	8 Juli 2022
29	-	-	-	8 Oktober 2022
30	-	-	-	8 Januari 2023
31	-	-	-	8 April 2023
32	-	-	-	8 Juli 2023
33	-	-	-	8 Oktober 2023
34	-	-	-	8 Januari 2024
35	-	-	-	8 April 2024
36	-	-	-	8 Juli 2024
37	-	-	-	8 Oktober 2024
38	-	-	-	8 Januari 2025
39	-	-	-	8 April 2025
40	-	-	-	8 Juli 2025

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

HAK SENIORITAS ATAS HUTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana Emisi.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, serta pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, maka tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (dimana ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar oleh Wali Amanat, dan jika Wali Amanat tidak memberikan jawaban dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan ijin tersebut oleh Wali Amanat dan Wali Amanat menganggap dokumen yang dibutuhkan telah lengkap selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak surat permohonan permintaan dokumen tersebut diterima oleh Perseroan, maka persetujuan tersebut dianggap telah diberikan), Perseroan berjanji serta mengikat diri antara lain untuk tidak mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang diikat secara khusus lebih dari 50% dari seluruh jumlah kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf t Perjanjian Perwaliamanatan.

Perseroan berkewajiban antara lain untuk: (i) memenuhi semua ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; (ii) mengupayakan mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong "Cukup Baik", sesuai penilaian internal berdasarkan peraturan perbankan yang berlaku; (iii) mempertahankan bidang usaha utama Perseroan; (iv) menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dan/atau Denda (jika ada) selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran; (v) melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11, berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipenuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan; dan (vi) menjaga jumlah aktiva yang tidak diagunkan secara khusus minimal sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari hutang Perseroan yang tidak ada jaminan khusus yang belum dibayar lunas (*outstanding*) dalam bentuk obligasi yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau Bursa Efek Luar Negeri dan surat hutang jangka menengah/*Medium Term Notes* (MTN).

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 Nomor: Kep-42/PM/2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. 601/PEF-Dir/IV/2015 tanggal 17 April 2015, hasil pemeringkatan atas Penawaran Umum Berkelanjutan ini untuk periode 17 April 2015 sampai dengan 1 April 2016 adalah:

idAA
(Double A)

Peringkat tersebut mencerminkan kuatnya dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) selaku pemegang saham pengendali, posisi usaha yang kuat di pembiayaan perumahan dan membaiknya kualitas aset Perseroan. Namun peringkat tersebut dibatasi oleh profitabilitas Perseroan yang moderat dan persaingan yang ketat pada segmen pembiayaan perumahan non-subsidi.

Perseroan akan menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan.

Perusahaan pemeringkat dalam penawaran umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVIII Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi.

WALI AMANAT

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk yang beralamat di:

Menara Bank Mega Lantai 16
Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A
Jakarta 12790
Telp : (021) 79175000
Faks : (021) 7990720

KEJADIAN KELALAIAN

Sesuai dengan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan kejadian kelalaian adalah bilamana Wali Amanat menyatakan Perseroan lalai karena terjadinya salah satu atau lebih dari hal-hal yang tercantum dalam pasal tersebut.

Penjelasan lebih lanjut dari kejadian kelalaian dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prosedur pemesanan pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XX Prospektus ini mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

PERPAJAKAN

Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab XII Prospektus ini.

TAMBAHAN HUTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA YANG AKAN DATANG

Tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh hutang baru di masa mendatang di dalam ketentuan Perjanjian Perwalianan.

OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN

Sebelum Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah 19 (sembilan belas) kali menerbitkan Obligasi dan 1 (satu) kali menerbitkan Obligasi Subordinasi.

Adapun obligasi-obligasi yang telah jatuh tempo dan dilunasi Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Obligasi	Seri	Jumlah Nominal (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat Bunga	Jangka Waktu	Peringkat Pada Saat Emisi	Tanggal Efektif OJK	Jatuh Tempo	Tanggal Pencatatan di Bursa
1.	Obligasi Bank Tabungan Negara I Tahun 1989 Dengan Tingkat Bunga Tetap	—	50.000	18,75%	5 (lima) tahun	—	29 Juni 1989	25 Juli 1994	10 Agustus 1989
2.	Obligasi Bank Tabungan Negara II Tahun 1990 Dengan Tingkat Bunga Tetap	—	50.000	16,25%	5 (lima) tahun	—	21 April 1990	1 Juni 1995	18 Juni 1990
3.	Obligasi Bank Tabungan Negara III Tahun 1991 Dengan Tingkat Bunga Tetap	—	50.000	20,00%	5 (lima) tahun	—	25 Nopember 1991	11 Nopember 1996	25 Nopember 1991
4.	Obligasi Bank Tabungan Negara IV Tahun 1992 Dengan Tingkat Bunga Tetap	—	100.000	17,00%	5 (lima) tahun	—	31 Desember 1992	23 Januari 1998	15 Pebruari 1993
5.	Obligasi Bank Tabungan Negara V Tahun 1993 Dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang	—	150.000	15,25%	5 (lima) tahun	—	29 Januari 1993	31 Juli 1998	31 Agustus 1993
6.	Obligasi Bank Tabungan Negara Tahun 1995 Dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang	VI-A	150.000	17,25%, ATD 6 bulan ditambah 1% per tahun	5 (lima) tahun	—	8 Desember 1995	21 Desember 2000	28 Desember 1995
		VI-B	200.000	17,25%, IRSOR 6 bulan ditambah 1,25% per tahun	5 (lima) tahun	—	8 Desember 1995	21 Desember 2000	28 Desember 1995

No.	Nama Obligasi	Seri	Jumlah Nominal (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat Bunga	Jangka Waktu	Peringkat Pada Saat Emisi	Tanggal Efektif OJK	Jatuh Tempo	Tanggal Pencatatan di Bursa
7.	Obligasi Bank Tabungan Negara Tahun 1996 Dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang	VII-A	182.000	17,125%, ATD 6 bulan ditambah 1% per tahun	5 (lima) tahun	–	27 Juni 1996	22 Juli 2001	5 Agustus 1995
		VII-B	18.000	17,125%, IRSOR 6 bulan ditambah 1,25% per tahun	5 (lima) tahun	–	27 Juni 1996	22 Juli 2001	5 Agustus 1995
8.	Obligasi Bank Tabungan Negara VIII Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap	–	400.000	14,15%	5 (lima) tahun	idAA-	27 Juni 1997	18 Juli 2002	4 Agustus 1997
9.	Obligasi IX Bank BTN Tahun 2003	–	750.000	12,50%	5 (lima) tahun	idBBB	18 September 2003	2 Oktober 2008	3 Oktober 2003
10.	Obligasi X Bank BTN Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap	–	750.000	12,20%	5 (lima) tahun	idBBB+	10 Mei 2004	25 Mei 2009	25 Mei 2004
11.	Obligasi XI Bank BTN Tahun 2005	–	750.000	12,00%	5 (lima) tahun	idA-	28 Juni 2005	6 Juli 2010	7 Juli 2005
12.	Obligasi Subordinasi I Bank BTN Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap*)	–	250.000	12,60% (1 – 5 tahun)	10 (sepuluh) tahun	idBBB	10 Mei 2004	25 Mei 2014, call option 25 Mei 2009	25 Mei 2004
13.	Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009	XIII-A	300.000	11,75%	3 (tiga) tahun	idAA-	19 Mei 2009	29 Mei 2012	1 Juni 2009
14.	Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009	XIII-B	300.000	12,00%	4 (empat) tahun	idAA-	19 Mei 2009	29 Mei 2013	1 Juni 2009
15.	Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009	XIII-C	900.000	12,25%	5 (lima) tahun	idAA-	19 Mei 2009	29 Mei 2009	29 Mei 2014

*) Pada tanggal 25 Mei 2009, Perseroan telah melaksanakan haknya berupa pelunasan lebih awal atas seluruh Obligasi Subordinasi I Bank BTN Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap yang terhutang.

Adapun obligasi-obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan yang jumlah pokoknya belum dilunasi seluruhnya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Obligasi	Seri	Jumlah Nominal (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat Bunga	Jangka Waktu	Peringkat Pada Saat Emisi	Peringkat Pada Saat Ini	Jatuh Tempo	Total Nilai Yang Masih Terhutang (dalam jutaan Rupiah)
1.	Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006	-	1.000.000	12,75%	10 (sepuluh) tahun	idA	idAA	19 September 2016	1.000.000
2.	Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010	-	1.650.000	10,25%	10 (sepuluh) tahun	idAA-	idAA	11 Juni 2020	1.650.000
3.	Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011	-	1.300.000	9,50%	10 (sepuluh) tahun	idAA	idAA	28 Juni 2021	1.300.000
4.	PUB I Tahap I Bank BTN Tahun 2012	-	2.000.000	7,90%	10 (sepuluh) tahun	idAA	idAA	5 Juni 2022	2.000.000
5.	PUB I Tahap II Bank BTN Tahun 2013	-	2.000.000	7,90%	10 (sepuluh) tahun	idAA	idAA	27 Maret 2023	2.000.000
TOTAL									7.950.000

Hingga Prospektus ini diterbitkan jumlah nilai obligasi Perseroan yang masih terhutang adalah sebesar Rp7.950.000.000.000,- (tujuh triliun sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah).

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TAHAP I

Dana yang diperoleh dari hasil emisi Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai sumber pembiayaan kredit.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Obligasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi digunakan sesuai Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor: Kep-27/PM/2003 tanggal 17-07-2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat, Bursa Efek dan KSEI.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari hasil penawaran umum, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar kurang lebih 0,2671% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

1. Biaya untuk jasa Penjamin Emisi Obligasi sebesar 0,0300%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (management fee) 0,0150% biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 0,0075%, biaya jasa penjualan (selling fee) 0,0075%;
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0499%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan publik sebesar 0,0371%; biaya jasa Notaris sebesar 0,0015%; biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,0113%;
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0448% yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,0200% dan biaya jasa Pemingkatan Efek sebesar 0,0248%;
4. Biaya OJK sebesar 0,0250%;
5. Biaya lain-lain sebesar 0,1174% yang terdiri dari biaya pencatatan di bursa sebesar 0,0450%; biaya Kustodian sebesar 0,0391%; biaya penyelenggaraan *due diligence* dan *public expose* sebesar 0,0112%; biaya audit penjabatan sebesar 0,0017%; biaya percetakan prospektus, formulir-formulir, biaya iklan koran Prospektus ringkas dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sebesar 0,0204%.

Berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor: Kep-27/PM/2003 tanggal 17-07-2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi, Perseroan telah melakukan penyampaian laporan realisasi untuk Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 dengan surat Perseroan No. 375/S/CSD/IR/VI/2013 tertanggal 9 Juli 2013. Sehubungan dengan hal tersebut, maka seluruh dana hasil Penawaran Umum tersebut telah dipergunakan sesuai dengan rencana penggunaannya yaitu sebagai sumber pembiayaan kredit.

III. PERNYATAAN HUTANG

Pernyataan hutang berikut diambil dari laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Pada tanggal 31 Desember 2014 Perseroan mencatat jumlah liabilitas sebesar Rp132.369.555 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas segera	1.835.807
Simpanan dari nasabah:	
Giro	22.001.200
Giro Wadiah	1.421.418
Tabungan	25.230.736
Tabungan Wadiah dan Mudharabah	937.178
Deposito berjangka	50.491.284
Deposito berjangka Mudharabah	6.388.861
Simpanan dari bank lain	1.179.269
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.817.603
Surat-surat berharga yang diterbitkan	8.519.884
Pinjaman yang diterima	6.998.213
Bunga yang masih harus dibayar	308.996
Liabilitas pajak tangguhan	152.422
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	7.198
Liabilitas lain-lain	3.079.486
Total Liabilitas	132.369.555

Komponen liabilitas Perseroan terutama berasal dari simpanan nasabah yaitu dalam bentuk deposito berjangka sebesar 38,14%, tabungan sebesar 19,06%, giro sebesar 16,62%, surat-surat berharga yang diterbitkan - neto sebesar 6,44%, dan pinjaman yang diterima sebesar 5,29% dari jumlah liabilitas.

Sedangkan jumlah liabilitas komitmen adalah sebesar Rp11.224.658 juta dan jumlah tagihan kontinjensi bersih adalah sebesar Rp289.592 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	11.224.658
Total Liabilitas Komitmen	11.224.658
Tagihan kontinjensi	
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	1.644.444
Total tagihan kontinjensi	1.644.444
Liabilitas kontinjensi	
Garansi yang diterbitkan	1.354.852
Tagihan Kontinjensi - neto	289.592

LIABILITAS SEGERA

Liabilitas segera pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.835.807 juta dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Kewajiban kepada pihak ketiga	1.609.899
Hutang pajak	
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	64.671
Pasal 21	16.640
Pasal 29	105.943
Pajak Pertambahan Nilai	2.455
Deposito Berjangka Jatuh Tempo	7.982
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	17.778
Bunga Atas Deposito Berjangka Namun Belum Diambil Nasabah	3.172
Lain-lain	7.267
Total Liabilitas Segera	1.835.807

SIMPANAN DARI NASABAH

Simpanan pada tanggal 31 Desember 2014 yang berhasil dihimpun Perseroan adalah sebesar Rp106.470.677 juta sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
- Giro	21.771.807
- Giro Wadiah	1.421.418
- Tabungan	25.230.736
- Tabungan Wadiah dan Mudharabah	937.178
- Deposito berjangka	50.467.082
- Deposito berjangka Mudharabah	6.388.861
Total simpanan dari nasabah dalam Rupiah	106.217.082
Dolar Amerika Serikat	
- Giro	229.393
- Deposito berjangka	24.202
Total simpanan dari nasabah dalam Dolar Amerika Serikat	253.595
Total Simpanan dari Nasabah	106.470.677

GIRO

Saldo giro dan giro wadiah pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp23.422.618 juta, yang terdiri dari giro yang didasarkan pada prinsip konvensional sebesar Rp22.001.200 juta dan giro yang didasarkan pada prinsip syariah sebesar Rp1.421.418 juta. Berdasarkan denominasi mata uang, saldo giro Perseroan terdiri dari Rp23.193.225 juta dalam mata uang Rupiah dengan suku bunga rata-rata per tahun sebesar 2,56% dan sebesar Rp229.393 juta dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan suku bunga rata-rata per tahun sebesar 0,00%. Pada tanggal 31 Desember 2014 giro yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank adalah sebesar Rp350 juta.

TABUNGAN

Saldo tabungan termasuk tabungan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp26.167.914 juta, dengan saldo tabungan yang didasarkan pada prinsip konvensional adalah sebesar Rp25.230.736 juta. Sedangkan saldo tabungan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah adalah sebesar Rp937.178 juta, yang semuanya dalam Rupiah. Suku bunga rata-rata per tahun untuk tabungan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah 3,73%.

Tabungan yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp251.707 juta.

DEPOSITO BERJANGKA

Saldo deposito berjangka dan deposito berjangka *mudharabah* pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp56.880.145 juta yang terdiri dari deposito berjangka yang didasarkan pada prinsip konvensional sebesar Rp50.491.284 juta dan deposito berjangka dengan prinsip syariah sebesar Rp6.388.861 juta. Berdasarkan denominasi mata uang, saldo deposito berjangka Perseroan dalam Rupiah adalah sebesar Rp56.855.943 juta dan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sebesar Rp24.202 juta.

Rincian saldo deposito berjangka berdasarkan mata uang dan jangka waktu adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Suku Bunga Rata-rata Per Tahun (%)	Jumlah
Rupiah		
1 bulan	6,18	27.477.500
3 bulan	6,84	14.869.297
6 bulan	6,74	2.342.478
12 bulan	6,87	5.387.525
24 bulan	6,44	6.779.143
Sub Total		56.855.943
Dolar Amerika Serikat		
1 bulan	0,05	23.855
3 bulan	0,05	241
6 bulan	0,05	-
12 bulan	0,05	106
Sub Total		24.202
Total		56.880.145

Deposito berjangka yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp812.912 juta.

SIMPANAN DARI BANK LAIN

Total simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.179.269 juta dalam Rupiah, berupa tabungan, giro, deposito sebagaimana berikut ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
- Deposito	1.163.117
- Giro	13.472
- Tabungan	2.680
Total Simpanan dari Bank Lain	1.179.269

EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

Total efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp3.817.603 juta, yang berasal dari kontrak penjualan obligasi pemerintah seperti dibawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Nasabah	Jenis Surat Berharga	Nilai Nominal	Tanggal Dimulai	Tanggal pembelian Kembali	Nilai Pembelian Kembali	Beban Bunga Yang Belum Diamortisasi	Nilai Bersih
Deutsche Bank AG	VR0020	300.000	28 Maret 2005	23 April 2015	260.000	-	260.000
Deutsche Bank AG	VR0020	450.000	29 Maret 2005	23 April 2015	390.000	-	390.000
Deutsche Bank AG	VR0031	575.000	14 Februari 2011	23 Juli 2020	500.000	-	500.000
Deutsche Bank AG	VR0021	345.000	1 Maret 2011	23 November 2015	300.000	-	300.000
Standard Chartered Bank	VR0031	500.000	18 Januari 2011	22 Juli 2020	435.000	-	435.000
Standard Chartered Bank	VR0027	495.000	2 Maret 2011	23 Juli 2018	450.000	-	450.000
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Limited.	VR0023	806.922	25 September 2014	25 September 2015	649.999	-	649.999
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Limited.	VR0028	438.530	25 September 2014	25 September 2015	350.000	-	350.000
PT BPD Sumatera Utara	IDBI100415273S	100.000	24 Oktober 2014	22 Januari 2015	88.580	345	88.235
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	IDSD220515182S	300.000	5 Desember 2014	5 Januari 2015	263.093	180	262.913
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	IDSD220515182S	150.000	5 Desember 2014	5 Januari 2015	131.546	90	131.456
Total		4.460.452			3.818.218	615	3.817.603

SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN - Neto

Saldo surat-surat berharga yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp8.519.884 juta yang semuanya dalam Rupiah, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	1.997.883
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	1.996.787
Obligasi BTN XV	1.297.341
Obligasi BTN XIV	1.647.458
Obligasi BTN XII	999.139
Negotiable Certificate of Deposits (NCD)	581.276
Neto	8.519.884

Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II Tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.000.000 juta yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 7,90% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2023. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan BTN I tahun 2013 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-6349/BL/2012 tanggal 28 Mei 2012.

Pada tanggal 17 April 2015, Obligasi Berkelanjutan I BTN tahap II mendapat penilaian peringkat **AA**, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo). Harga rata-rata tertimbang obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar 88,20%. Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan I BTN tahap II adalah PT Bank Mega Tbk.

Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap I Tahun 2012 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.000.000 juta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 7,90% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2022. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan BTN I tahun 2012 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-6349/BL/2012 tanggal 28 Mei 2012.

Pada tanggal 17 April 2015, Obligasi Berkelanjutan I BTN tahap I mendapat penilaian peringkat **AA**, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo). Harga rata-rata tertimbang obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap I pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar 90,52%. Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan I BTN tahap I adalah PT Bank Mega Tbk.

Perseroan menerbitkan Obligasi BTN XV Tahun 2011 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.300.000 juta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 9,50% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2021. Penerbitan Obligasi BTN XV tahun 2011 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-6928/BL/2011 tanggal 21 Juni 2011.

Pada tanggal 17 April 2015, Obligasi BTN XV mendapat penilaian peringkat **AA**, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo). Harga rata-rata tertimbang obligasi BTN XV pada tahun yang berakhir pada tanggal 14 Mei 2014 adalah sebesar 99,20%. Bertindak sebagai wali amanat Obligasi BTN XIV adalah PT Bank Mega Tbk.

Perseroan menerbitkan Obligasi BTN XIV Tahun 2010 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.650.000 juta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 10,25% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Juni 2020. Penerbitan Obligasi BTN XIV tahun 2010 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua Bapepam dan LK No. S-4916/BL/2010 tanggal 3 Juni 2010.

Pada tanggal 17 April 2015, Obligasi BTN XIV mendapat penilaian peringkat **AA** dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo). Harga rata-rata tertimbang obligasi BTN XIV pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar 102,51%. Bertindak sebagai wali amanat Obligasi BTN XIV adalah PT Bank Mega Tbk.

Perseroan menerbitkan Obligasi BTN XII Tahun 2006 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.000.000 juta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 12,75% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 September 2016. Penerbitan Obligasi BTN XII tahun 2006 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua Bapepam dan LK No. S-1844/BL/2006 tanggal 8 September 2006.

Pada tanggal 17 April 2015, Obligasi BTN XII mendapat penilaian peringkat **AA** dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo). Harga rata-rata tertimbang Obligasi BTN XII pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 adalah 104,64%. Bertindak sebagai wali amanat Obligasi BTN XII adalah PT Bank Mega Tbk.

Perjanjian perwaliamanatan memuat beberapa pembatasan terhadap Perseroan dan Perseroan telah memenuhi ketentuan yang ada dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman yang diterima Perseroan merupakan pinjaman dalam bentuk Rupiah yang sebagian besar diterima dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan PT Bank Central Asia Tbk. Pada tanggal 31 Desember 2014, pinjaman yang diterima Perseroan adalah sebesar Rp6.998.213 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Bank Indonesia	
- Penyaluran kredit program	877.271
- Fasilitas kredit likuiditas	44.361
Pemerintah	
- Rekening dana investasi	79.813
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	3.999.217
PT Bank Centra Asia Tbk	1.997.551
Total	6.998.213

Bank Indonesia

Saldo pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp921.632 juta terdiri dari penyalur kredit program sebesar Rp877.271 juta dan fasilitas kredit likuiditas sebesar Rp44.361 juta. Suku bunga rata-rata per tahun Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar 0,24%. Pinjaman ini akan jatuh tempo dalam 10 sampai 20 tahun.

Pemerintah

Pinjaman yang diterima Perseroan dari Pemerintah berasal dari Rekening Dana Investasi (RDI) yang digunakan untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah-Rumah Sederhana (KPR-RSS) dan Kredit Pemilikan Rumah-Rumah Sederhana (KPR-RS).

Pinjaman pada tanggal 31 Desember 2014 dari Pemerintah adalah sebesar Rp79.813 juta yang berupa RDI. Pinjaman RDI tersebut dibebani suku bunga rata-rata sebesar 4,19%, dengan jangka waktu pinjaman 10, 15 dan 20 tahun serta akan jatuh tempo dalam berbagai tanggal sampai tahun 2016.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("SMF")

Pinjaman dari SMF terdiri dari Fasilitas Pinjaman *Refinancing* X, IX, VII, VI, dan V, *Term Purchase Program* V, dan III, dan Pembiayaan yang diperoleh dari PT SMF yang ditujukan untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada debitur Perseroan.

Plafon pinjaman untuk Fasilitas Pinjaman *Refinancing* IX adalah Rp1.000.000 juta dengan jangka waktu pinjaman adalah 12 bulan. Plafon pinjaman untuk Fasilitas Pinjaman *Refinancing* X, VII, VI, dan V masing-masing sebesar Rp500.000 juta dengan jangka waktu pinjaman untuk Fasilitas Pinjaman *Refinancing* X, VII, VI, dan V masing-masing adalah 12 bulan, 60 bulan, 60 bulan dan 120 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2015, 20 Juni 2018, 14 Desember 2017 dan 20 Juni 2022. Plafon pinjaman untuk *Term Purchase Program* tahap V dan III masing-masing sebesar Rp500.013 juta dan Rp500.000 juta dengan jangka waktu pinjaman masing-masing adalah 36 bulan dan 60 bulan yang akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal-tanggal 20 Juni 2016 dan 20 Februari 2017.

Suku bunga per tahun atas Fasilitas Pinjaman *Refinancing* X, IX, VII, VI, dan V, ini masing-masing adalah sebesar 9,63%, 9,69% tetap selama 1 tahun, 7,60%, 7,75% tetap selama 5 tahun, dan 7,85% tetap selama 10 tahun. Pokok Fasilitas Pinjaman *Refinancing* X, IX, VII, VI, dan V dibayar pada tanggal jatuh tempo. Suku bunga *Term Purchase Program* (Repo KPR) tahap V dan III sebesar 7,50% tetap selama 3 tahun dan 7,36% tetap selama 5 tahun. Pembayaran pokok pinjaman Tahap V dan III dilakukan pada akhir periode. Jaminan atas Fasilitas Pinjaman *Refinancing* X, IX, VII, VI, dan V dan *Term Purchase Program* (Repo KPR) adalah tagihan KPR dengan kriteria tertentu. Hak agunan yang melekat atas tagihan tersebut dengan jumlah minimum masing-masing sebesar 125%, 100%, 110%, 125%, 125%, dan 100% dari nilai plafon pinjaman pada saat penandatanganan perjanjian dan wajib dikelola minimum sebesar analisa 100% dari baki debit pinjaman sampai jatuh tempo.

Fasilitas Pembiayaan dari SMF merupakan fasilitas pembiayaan *mudharabah murabahah* dan *mudharabah muqayyadah* dengan plafon pembiayaan masing-masing sebesar Rp200.000 juta dan telah jatuh tempo pada tanggal 13 November 2014 dan 16 Desember 2013. Pada tanggal 31 Desember 2013 fasilitas pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dengan nominal Rp200.000 juta telah jatuh tempo dan diperpanjang dengan penambahan pinjaman menjadi Rp230.000 juta sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 dan telah dilunasi pada tanggal jatuh temponya.

Porsi Nisbah yang disepakati untuk tahun pertama atas fasilitas pembiayaan *mudharabah murabahah* adalah sebesar 65,59% untuk SMF dan 34,41% untuk Perseroan dan atas fasilitas pembiayaan *mudharabah muqayyadah* sebesar 67,37% untuk SMF dan 32,63% untuk Perseroan. Nisbah tersebut bersifat tetap selama tahun pertama. Besarnya Nisbah akan ditinjau setiap tahun. Sedangkan porsi nisbah untuk perpanjangan fasilitas pembiayaan *mudharabah muqayyadah* adalah 75,48% untuk SMF dan 24,52% untuk Perseroan. Pembayaran pokok atas kedua fasilitas pembiayaan ini dibayar pada tanggal jatuh tempo.

Jaminan atas ketiga fasilitas pembiayaan ini adalah tagihan KPR dengan kriteria tertentu dengan jumlah minimum sebesar 125% dari nilai fasilitas pembiayaan pada saat penandatanganan akad dan wajib dikelola minimum sebesar 100% dari nilai fasilitas pembiayaan sampai jatuh tempo.

PT Bank Central Asia Tbk

Sesuai dengan perubahan Atas Akta Perjanjian Kredit antara PT. Bank Central Asia Tbk dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Nomor 311/Add-KCK/2013 tanggal 6 Desember 2013, Bank memperoleh fasilitas perpanjangan *Refinancing* dari PT Bank Central Asia dengan plafon kredit sebesar Rp2.000.000 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2015. Fasilitas pinjaman tersebut memiliki suku bunga tetap sebesar 8,75% per tahun tetap selama 2 tahun. Pokok pinjaman akan dibayarkan pada tanggal jatuh tempo.

Nilai jaminan pada saat penandatanganan perjanjian tersebut adalah setara dengan setidaknya 125% dari nilai pokok kredit dan harus dipertahankan minimal sebesar 110% dari saldo pokok kredit sampai dengan jatuh tempo.

BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Saldo bunga yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp308.996 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Deposito berjangka	222.744
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	31.027
Surat-surat berharga yang diterbitkan	27.842
Pinjaman yang diterima	22.528
Simpanan dari bank lain	4.855
Total	308.996

ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Estimasi kerugian atas transaksi komitmen dan kontinjensi dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat yang berasal dari garansi yang diterbitkan dan fasilitas kredit yang belum ditarik pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp7.198 juta.

LIABILITAS LAIN-LAIN

Saldo liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp3.079.486 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Dana jaminan pengembang	2.272.756
Pendapatan diterima di muka	427.105
Bonus dan tantiem	226.843
Imbalan kerja jangka panjang	121.483
Biaya yang masih harus dibayar	8.427
Setoran jaminan	7.402
Kewajiban ATM bersama	5.090
Cadangan litigasi	4.232
Nota kredit dalam penyelesaian	2.731
Lain-lain	3.417
Total	3.079.486

Pernyataan Manajemen

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan hak-hak pemegang saham publik dan pemegang obligasi.

Seluruh liabilitas Perseroan pada tanggal laporan keuangan terakhir telah disajikan dan diungkapkan di dalam Prospektus dan laporan keuangan. Selain informasi tersebut di atas, Perseroan tidak mempunyai liabilitas-liabilitas lain yang material yang belum diungkapkan dalam Prospektus ini.

Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aktiva dan liabilitas serta peningkatan hasil operasi di masa yang akan datang, manajemen Perseroan memiliki kesanggupan untuk dapat menyelesaikan keseluruhan liabilitas.

Setelah tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki liabilitas-liabilitas lain kecuali liabilitas-liabilitas yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan serta liabilitas-liabilitas yang telah dinyatakan di dalam Prospektus ini dan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Prospektus ini.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI, TERMASUK LIABILITAS YANG BERKAITAN DENGAN PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP I DAN II, OBLIGASI BTN XV, OBLIGASI BTN XIV, DAN OBLIGASI BTN XII YANG TELAH DITERBITKAN OLEH PERSEROAN.

IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan pada bagian ini harus dibaca bersamaan dengan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (*member Ernst & Young Global*) yang juga disajikan dalam Prospektus ini.

Menurut pendapat Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (*member Ernst & Young Global*), laporan keuangan Perseroan yang seluruhnya mendapat opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan tersebut telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia.

A. UMUM

Perseroan ditunjuk Pemerintah sebagai Lembaga pembiayaan Kredit Perumahan untuk membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam menyalurkan KPR Subsidi berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor B-49/MK/IV/1/1974 tanggal 29 Januari 1974 perihal Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Hal ini terus dilanjutkan dalam pelaksanaan penyaluran program-program KPR Subsidi khususnya KPR Subsidi Selisih Bunga dan Subsidi Uang Muka.

Sesuai peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.20/PRT/M/2014 Tanggal 10 Desember 2014 tentang fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dalam rangka perolehan rumah melalui kredit/pembiayaan pemilikan Rumah Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta MoU antar Perseroan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.001/MoU/DIR/2015 Tanggal 6 Januari 2015 tentang penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dalam rangka perolehan rumah melalui kredit/pembiayaan pemilikan Rumah Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Perseroan ditunjuk menjadi salah satu bank penyalur KPR Sejahtera dengan bantuan FLPP. Dengan demikian, lembaga yang memberikan pembiayaan ini tidak hanya terbatas untuk Perseroan, tetapi juga dapat dilakukan oleh Bank BUMN lainnya, Bank-Bank Swasta dan Bank-Bank Pembangunan Daerah, sehingga sifat usahanya adalah persaingan bebas.

Nature of Business Perseroan lebih memfokuskan bidang usahanya kepada pemberian kredit perumahan yang tidak terbatas kepada kredit subsidi dengan tetap memperhatikan azas kehati-hatian (*prudential banking practices*) yang didukung oleh peningkatan pengumpulan dana ritel. Atas dasar *nature of business* tersebut, Perseroan membagi produk dan layanan menjadi tiga bagian besar, yaitu: Perbankan Konsumer, Perbankan Komersial, serta Perbankan Syariah.

Perseroan telah memisahkan *mortgage & consumer lending* dan *retail funding* pada level direktorat dalam upaya untuk lebih memperkuat bisnis *mortgage* yang merupakan *core bisnis* Perseroan. Pemisahan *mortgage* dan *consumer lending* juga dilakukan pada level divisi melalui pembentukan *subsidized mortgage* yang terpisah dengan *non-subsidized*. Untuk menunjang peningkatan portofolio UMKM pada level divisi dilakukan melalui pembentukan *small & micro* yang terpisah dengan *commercial lending*.

Setiap bidang menjalankan bisnis lewat pemberian kredit, pendanaan, serta jasa yang terkait dengan ruang lingkupnya. Namun demikian, bisnis inti Perseroan adalah di bidang penyaluran kredit perumahan. Hal ini ditunjukkan lewat portofolio kredit tahun 2014 yang sebesar 8,52% di sektor perumahan. Hingga akhir 2014, Perseroan tetap merupakan bank penyalur kredit perumahan terbesar di Indonesia. Pangsa pasar Perseroan sebagai *market leader* kredit perumahan (KPR) di Indonesia mencapai 25%. Hal ini menunjukkan keberhasilan Perseroan meningkatkan pangsa pasar di tengah persaingan yang ketat dalam industri KPR di Indonesia.

Sedangkan pada segmen kredit subsidi Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pangsa pasar Perseroan sangatlah dominan, yaitu mencapai 95% dengan jumlah kredit yang disalurkan sepanjang tahun 2014 mencapai Rp7,96 triliun. Hingga 31 Desember 2014, Perseroan berhasil meningkatkan posisinya sebagai bank peringkat 9 terbesar di Indonesia berdasarkan jumlah aset dan kredit. Aset Perseroan mencapai Rp144,58 triliun di tahun 2014, atau tumbuh 10,22% dari Rp131,17 triliun pada tahun 2013. Sedangkan posisi kredit yang disalurkan Perseroan pada tahun 2014 mencapai Rp115,92 triliun, meningkat 15,38% dibandingkan tahun sebelumnya.

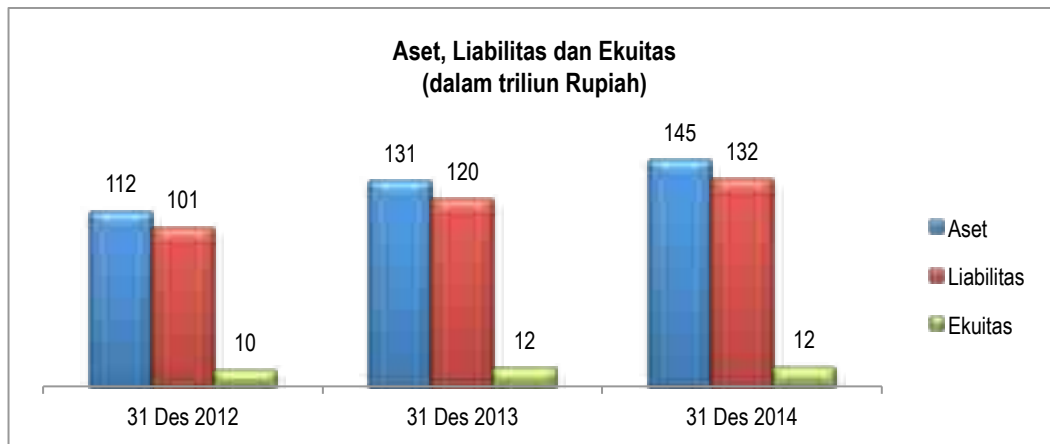
Perseroan juga terus berinovasi dan menghasilkan produk-produk baru yaitu di dalam penerbitan produk baru kredit/pembiayaan syariah dalam bentuk pelayanan ekspor-impor, perdagangan dan transaksi luar negeri, anjak piutang dan kepemilikan logam mulia. Penerbitan produk baru dana juga dilakukan dengan meluncurkan skema Tabungan BTN Perumahan dan Tabungan BTN Cermat untuk Laku Pandai.

Perseroan sangat menyadari bahwa semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat perlu diakomodir oleh produk khusus yang dapat memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dengan demikian, inovasi produk perbankan pun menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan telah membangun arsitektur bisnis yang fokus dengan segmen pasar yang dibidik sehingga dapat lebih kompetitif di pasaran.

Arsitektur bisnis yang dikembangkan Perseroan memiliki tujuan utama antara lain fokus pada segmen pasar untuk meraih pertumbuhan berkelanjutan, meraih *market share* dan *mind share* yang lebih baik, meningkatkan tingkat kepuasan dan kesetiaan pelanggan, serta meningkatkan nilai dan positioning merek.

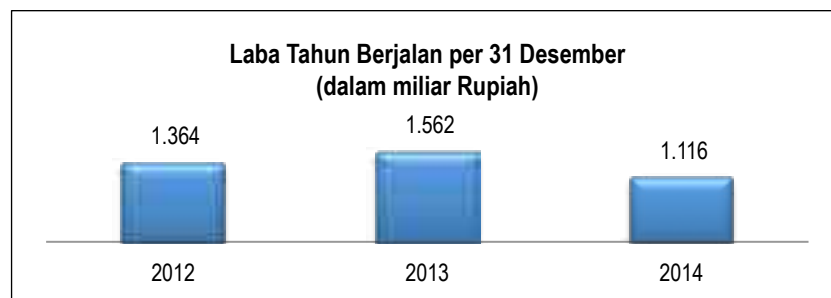
Sampai dengan 31 Desember 2014, Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat, 65 kantor cabang, 223 kantor cabang pembantu, 479 kantor kas, 22 Kantor Cabang Syariah, 21 kantor cabang pembantu syariah, 7 kantor kas Syariah, 2.951 Kantor Pos Online, 10 Mobil Kas Keliling, 22 *Payment Point*, 1.830 ATM di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.

Total aset Perseroan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp13.406.231 juta atau 10,22% dibanding jumlah aset pada 31 Desember 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan kredit yang diberikan, pembiayaan/piutang syariah dan efek-efek – neto. Dengan peningkatan aset tersebut, Perseroan dapat tetap mempertahankan posisinya di jajaran 10 bank dengan aset terbesar di Indonesia. Sesuai dengan peningkatan aset, liabilitas Perseroan juga meningkat per tahun 2014 sebesar Rp12.756.578 juta atau 10,66%, dibanding pada 31 Desember 2013 yang disebabkan oleh meningkatnya simpanan dari nasabah seiring dengan tumbuhnya bisnis Perseroan. Sementara itu peningkatan ekuitas Perseroan di tahun 2014 terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba ditahan tahun berjalan Perseroan sebesar 14,95% dibandingkan tahun 2013 dan setoran modal baru dari eksekusi MESOP.



Selama tahun 2013-2014 suku bunga acuan (*BI rate*) mengalami kenaikan signifikan. Hal ini menyebabkan persaingan memperebutkan Dana Pihak Ketiga (DPK) semakin ketat dan mengakibatkan naiknya suku bunga simpanan di masing-masing bank. Bagi Bank BTN kenaikan tersebut berdampak pada kenaikan *Cost of Fund* (CoF) secara signifikan sehingga menekan pertumbuhan Pendapatan Bersih (*Net Income*) Perseroan selama tahun 2014.

Perseroan mencetak laba tahun berjalan sebesar Rp1.115.592 juta pada tahun 2014 yang mengalami penurunan sebesar Rp446.569 juta atau 28,59%, dibandingkan laba tahun berjalan Perseroan tahun 2013. Penurunan ini disebabkan karena peningkatan beban bunga dan bonus yang melebihi kenaikan pendapatan bunga dan bagi hasil Perseroan pada tahun 2014.



Gambaran umum tentang kinerja keuangan Perseroan disusun dengan mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja (*member Ernst & Young Global*) berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), masing-masing dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Berpengaruh Signifikan

Untuk mencegah dampak negatif terjadinya persaingan suku bunga dana perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan untuk memperebutkan DPK melalui persaingan pemberian suku bunga dana yang wajar. Hal ini untuk menghindari terjadinya *high cost economy*, perlambatan ekspansi kredit, peningkatan risiko kredit, penurunan aktivitas perekonomian dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, pada 30 September 2014, OJK melalui *supervisory action* menetapkan pemberian maksimum suku bunga DPK sebagai berikut:

- Memberikan suku bunga simpanan maksimum sebesar suku bunga penjaminan LPS yang saat ini sebesar 7,75% untuk nominal simpanan sampai dengan Rp 2 miliar dengan telah memperhitungkan seluruh insentif yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana;

- BUKU 4 : maksimum suku bunga 200 bps di atas BI rate atau saat ini maksimum sebesar 9,50% termasuk seluruh insentif yang diberikan secara langsung kepada nasabah penyimpan dana;
- BUKU 3 : maksimum suku bunga 225 bps di atas BI rate atau saat ini maksimum sebesar 9,75% termasuk seluruh insentif yang diberikan secara langsung kepada nasabah penyimpan dana; dan
- Untuk optimalisasi penerapan suku bunga maksimum ini, maka pengawas juga akan melakukan monitoring dan supervisory action terhadap bank-bank BUKU 1 dan 2 untuk turut serta mendukung penurunan suku bunga DPK. Dengan demikian, diharapkan penerapan pengawasan suku bunga maksimum ini dapat berlaku secara efektif di seluruh industri perbankan.

Dengan ditetapkannya Batas Atas Suku Bunga Simpanan Perbankan oleh OJK, khususnya bank-bank pada kategori BUKU 3 dan 4, berdampak terhadap penurunan biaya beban bunga simpanan Bank BTN mulai Oktober 2014. Dengan demikian, kebijakan ini berdampak positif kepada kinerja Perseroan pada akhir tahun 2014.

Prospek Industri Perbankan

Menurut prediksi Bank Indonesia (BI), perekonomian Indonesia akan semakin membaik pada tahun 2015. Meski perekonomian global masih diselubungi ketidakpastian, namun BI optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada kisaran 5,4-5,5%. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada sektor perbankan. Seperti diketahui, tahun 2014 dianggap sebagai tahun yang sulit bagi sejumlah pelaku bisnis tidak terkecuali sektor perbankan. Namun dengan sejumlah kepiawaian perbankan nasional dalam meracik strategi bisnis, sektor perbankan optimis menatap potensi bisnis di 2015 yang lebih baik.

Kebijakan Pemerintah untuk merelokasi subsidi BBM akan berdampak positif terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015. BI memprediksi permintaan domestik akan meningkat dan kinerja ekspor membaik seiring dengan perbaikan yang terjadi di tataran ekonomi global. BI juga memprediksi penyaluran kredit perbankan akan mengalami pertumbuhan sebesar 16,46%. Angka tersebut merupakan asumsi yang relevan dengan potensi pertumbuhan industri perbankan, dan didukung perkembangan positif makro ekonomi setelah berjalannya reformasi struktural.

Menyikapi hal tersebut, industri perbankan harus memacu pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) agar mampu mengimbangi pertumbuhan kredit yang terus tumbuh. Upaya untuk menarik lebih banyak dana murah masih realistis dilakukan. Sayangnya, komposisi deposito yang dominan justru kerap merepotkan bank lantaran beban bunga yang besar. Kendati demikian, secara umum industri perbankan pada tahun 2015 masih memiliki peluang dan prospek yang sangat baik.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Bank menerapkan perubahan PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan Bank.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan

Bank menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa kredit yang diberikan dan piutang dan investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo telah mengalami penurunan nilai. Kredit yang diberikan dan piutang dan investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan Bank lain diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penanaman dana pada Bank Indonesia dan bank lain berupa deposito berjangka termasuk deposito berjangka *mudharabah*, tabungan *mudharabah* dan *inter-bank call money*. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Efek-efek dan obligasi Pemerintah

Efek-efek terdiri dari surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi dan penyertaan reksadana sementara. Obligasi Pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia. Setelah pengakuan awal, efek-efek dan obligasi Pemerintah dicatat sesuai kategorinya, yaitu dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual atau nilai wajar melalui laba rugi.

Efek-efek dan obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Bank tidak diperkenankan mengklasifikasikan efek-efek dan obligasi Pemerintah dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya Bank telah menjual atau mereklasifikasi efek-efek dan obligasi Pemerintah dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan (*more than insignificant*) yang belum mendekati tanggal jatuh tempo selain dari pada penjualan atau reklasifikasi yang telah dijelaskan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2011) yang dapat diaplikasikan dalam periode yang relevan.

Efek-efek dan obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi komprehensif menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas efek-efek dan obligasi Pemerintah diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Perubahan nilai wajar lainnya diakui langsung dalam ekuitas sampai efek-efek dan obligasi Pemerintah dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana akumulasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Efek-efek dan obligasi Pemerintah dalam kategori nilai wajar melalui laba rugi dinyatakan pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun berjalan. Pendapatan bunga dari efek-efek dan obligasi Pemerintah dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif sesuai dengan persyaratan dalam kontrak. Atas penjualan portofolio efek-efek dan obligasi Pemerintah untuk nilai wajar melalui laba rugi, perbedaan antara harga jual dengan nilai pasar wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan pada tahun dimana efek-efek dan obligasi Pemerintah tersebut dijual.

Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan dengan pihak penerima kredit dan mewajibkan pihak penerima kredit untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Kredit yang diberikan (termasuk kredit yang diberikan dalam pinjaman sindikasi) pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut. Setelah pengakuan awal kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Dalam rangka sekuritisasi atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah ("kumpulan tagihan"), Bank telah melakukan penjualan atas kumpulan tagihan kepada pihak ketiga (sekuritisasi KPR). Perlakuan akuntansi atas sekuritisasi KPR mengacu kepada PSAK No. 55 (Revisi 2011).

Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah

Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, yang timbul dari transaksi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil antara bank dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu. Piutang tersebut meliputi piutang *murabahah*, piutang *istishna*, piutang *qardh*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Aset tetap

Penyusutan bangunan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) sedangkan peralatan kantor dan kendaraan bermotor dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*double-declining balance method*) berdasarkan taksiran masa manfaat bangunan selama 10-20 tahun dan untuk peralatan kantor dan kendaraan bermotor selama 4-8 tahun. Bank menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap" dan ISAK No. 25, "Hak atas Tanah".

Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank melakukan penilaian apakah terdapat indikasi bahwa aset non-keuangan mungkin mengalami penurunan nilai sesuai dengan PSAK No. 48 (Revisi 2009) tentang "Penurunan Nilai Aset". Ketika sebuah indikator penurunan nilai ada atau ketika sebuah pengujian penurunan nilai tahunan untuk aset diperlukan, Bank membuat estimasi resmi atas jumlah terpulihkan.

Imbalan kerja

Bank menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja", yang mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas imbalan kerja, baik jangka pendek (misalnya pembayaran cuti tahunan, pembayaran cuti sakit) dan jangka panjang (misalnya, pembayaran cuti besar, manfaat kesehatan pasca-kerja). Bank telah memilih metode koridor 10% untuk pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial. Bank juga diharuskan untuk mengakui kewajiban dan beban pada saat karyawan telah memberikan jasa serta entitas telah menerima manfaat ekonomi dari jasa tersebut.

C. KEUANGAN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dibawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan mengacu pada, laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, yang tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

1. Pertumbuhan Pendapatan, Beban, dan Laba

a. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember					
	2014		2013		2012	
	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta	%
Bunga						
- Kredit yang diberikan	11.352.218	88,64	9.605.046	89,08	7.900.961	89,60
- Giro pada Bank Indonesia	53.634	0,42	49.760	0,46	36.134	0,41
- Giro pada bank lain	3.125	0,02	1.278	0,01	167	0,00
- Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	100.573	0,79	189.917	1,76	195.405	2,22
- Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	37	0,00	-	-	2.679	0,03
- Obligasi pemerintah	459.525	3,59	395.583	3,67	283.209	3,21
- Efek-efek	425.452	3,32	151.202	1,40	62.763	0,71
Bagi hasil secara syariah	412.764	3,22	390.091	3,62	337.261	3,82
Total pendapatan bunga dan bagi hasil	12.807.328	100,00	10.782.877	100,00	8.818.579	100,00

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Total pendapatan bunga dan bagi hasil pada tahun 2014 adalah sebesar Rp12.807.328 juta, naik sebesar Rp2.024.451 juta atau 18,77%, dibanding Rp10.782.877 juta untuk tahun 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada pendapatan bunga kredit yang diberikan karena meningkatnya saldo yang diberikan.

Pinjaman/kredit yang diberikan kepada nasabah tersebut terdiri dari kredit konsumsi dan kredit komersial. Pada tahun 2014, kisaran suku bunga rata-rata per tahun kredit konsumsi adalah sebesar 12,01%, meningkat jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga kredit konsumsi tahun 2013 menjadi 11,03%. Sedangkan suku bunga rata-rata per tahun untuk kredit komersial pada tahun 2014 adalah sebesar 12,13%, meningkat dari tingkat suku bunga kredit komersial tahun 2013 menjadi 11,61%.

Kisaran tingkat suku bunga ini ditentukan berdasarkan jenis permintaan pembiayaan dan alokasi sumber pendanaan Perseroan dengan tetap berpaku pada strategi margin pendapatan bunga bersih di atas 5%. Dengan strategi penetapan yang demikian, Perseroan dapat mempertahankan perolehan margin bunga bersih pada level di atas 5% per tahun, dimana pada tahun 2014, Bank mencapai margin bunga bersih sebesar 4,47% sedikit lebih rendah dari margin pendapat bunga bersih tahun 2013 yang sebesar 5,44%.

Selain kenaikan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan, pendapatan bunga dari efek-efek juga meningkat 181,38% atau sebesar Rp274.250 juta dari tahun 2013 yang terutama didorong oleh meningkatnya suku bunga dan posisi efek-efek yang dimiliki Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Total pendapatan bunga dan bagi hasil pada tahun 2013 adalah sebesar Rp10.782.877 juta, naik sebesar Rp1.964.298 juta atau 22,27%, dibanding Rp8.818.579 juta pada tahun 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada pendapatan bunga kredit yang diberikan karena adanya peningkatan jumlah penyaluran kredit yang dilakukan oleh Perseroan dan konsistensi perolehan margin bunga bersih selama tahun 2013.

Selama tahun 2013, pendapatan bunga yang diperoleh dan dihitung dari transaksi investasi pada obligasi pemerintah juga mengalami peningkatan sebesar 39,68% lebih tinggi dari tahun 2012 karena pemanfaatan alokasi dana selama tahun 2013 yang lebih banyak dialokasikan pada Obligasi Pemerintah dimana saldo portofolio penempatan pada Obligasi Pemerintah.

Selain itu, pendapatan bunga dari penempatan dana pada Bank Indonesia dan bank lain dan efek-efek juga meningkat yang didorong oleh peningkatan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia, yang merupakan salah satu dampak intervensi Bank Indonesia untuk dapat menjaga kestabilan moneter Indonesia, yang sempat bergejolak selama kuartal terakhir tahun 2013.

b. Beban Bunga dan Bonus

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember					
	2014		2013		2012	
	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta	%
Bunga						
- Deposito berjangka	4.600.203	62,65	2.728.481	53,19	2.151.842	52,59
- Tabungan	880.815	12,00	721.244	14,06	507.929	12,41
- Surat-surat berharga yang diterbitkan	787.244	10,72	825.783	16,10	673.625	16,46
- Pinjaman yang diterima	494.989	6,74	418.877	8,17	372.176	9,09
- Giro	249.439	3,40	225.481	4,40	196.316	4,80
- Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	200.505	2,73	157.259	3,06	159.189	3,89
- Simpanan dari bank lain	82.538	1,12	38.062	0,74	19.526	0,48
Beban pendanaan lainnya	36.685	0,50	5.656	0,11	5.159	0,13
Bonus	10.329	0,14	8.711	0,17	5.998	0,15
Total Beban bunga dan bonus	7.342.747	100,00	5.129.554	100,00	4.091.760	100,00

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Total beban bunga dan bonus pada tahun 2014 adalah Rp7.342.747 juta, naik sebesar Rp2.213.193 juta atau 43,15%, dibanding Rp5.129.554 juta untuk tahun 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada beban bunga deposito berjangka dan beban bunga tabungan yang disebabkan oleh kenaikan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh Perseroan.

Beban bunga produk Deposito Berjangka yang merupakan pos terbesar dalam komponen beban bunga Perseroan. Tahun 2014, beban meningkat 68,60% atau sebesar Rp1.871.722 juta dibandingkan beban bunga Deposito Berjangka tahun 2013 karena meningkatnya saldo portofolio simpanan deposito berjangka dari nasabah sebesar 7,62% dan kenaikan kisaran tingkat suku bunga deposito berjangka selama tahun 2014 dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, Beban bunga dari Tabungan yang dibukukan tahun 2014 meningkat 22,12% dibandingkan beban bunga tabungan tahun 2013 yang disebabkan oleh peningkatan posisi tabungan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Total beban bunga dan bonus pada tahun 2013 adalah sebesar Rp5.129.554 juta, naik sebesar Rp1.037.794 juta atau 25,36%, dibanding Rp4.091.760 juta pada tahun 2012. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan saldo liabilitas per tahun 2013 dan kenaikan tingkat suku bunga simpanan yang didorong oleh kenaikan suku bunga Bank Indonesia.

Peningkatan saldo liabilitas disebabkan oleh sejalan dengan pertumbuhan aset Perseroan, khususnya pertumbuhan kredit pada tahun 2013, saldo liabilitas, yang merupakan sumber pendanaan Perseroan, mengalami peningkatan yang signifikan pada tingkat 17,88% lebih tinggi pada tahun 2013. Di samping itu, kenaikan tingkat suku bunga simpanan yang didorong oleh kenaikan suku bunga Bank Indonesia dari rata-rata 5,75% pada kuartal pertama tahun 2013 menjadi 7,50% pada kuartal terakhir tahun 2013, yang disebabkan dari dampak intervensi Bank Indonesia untuk dapat menjaga kestabilan moneter yang sempat bergejolak menjelang kuartal terakhir tahun 2013. Dengan kondisi demikian, secara langsung, beban bunga yang dihitung dari saldo liabilitas dan tingkat suku bunga mengalami peningkatan yang signifikan selama tahun 2013.

Sebagian besar kenaikan beban bunga dan bonus berasal dari kenaikan beban bunga dari deposito berjangka yang mengalami peningkatan di tahun 2013 sebesar Rp576.639 juta atau 26,80% dibandingkan tahun 2012. Hal ini karena peningkatan saldo portofolio simpanan deposito berjangka dari nasabah sebesar 15,25% lebih tinggi dan kenaikan kisaran tingkat suku bunga deposito berjangka selama tahun 2013. Kenaikan tingkat bunga rata-rata giro juga menjadi penyebab meningkatnya beban bunga dan bonus. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun giro meningkat, untuk giro Rupiah adalah sebesar 3,01% dan untuk giro Dolar Amerika Serikat 0,01% daripada tahun 2012 suku bunga rata-rata per tahun giro Rupiah adalah sebesar 2,97% dan untuk giro Dolar Amerika Serikat adalah sebesar 0,00%. Saldo giro per tahun 2012 meningkat signifikan sebesar 43,57% pada tahun 2013. Sama halnya seperti dengan tabungan, peningkatan saldo giro yang signifikan dan peningkatan tingkat suku bunga tabungan, beban bunga dari sumber pendanaan giro dari nasabah meningkat signifikan dari Rp196.316 juta menjadi Rp225.481 juta atau meningkat 14,86% selama tahun 2013.

Faktor lain yang mempengaruhi kenaikan beban bunga dan bonus Perseroan adalah beban bunga dari surat-surat berharga yang diterbitkan meningkat 22,59% lebih tinggi pada tahun 2013 yang terutama disebabkan oleh peningkatan saldo yang terutang dari surat-surat berharga yang diterbitkan pada tahun 2013, yakni saldo portofolio yang meningkat 23,82% lebih tinggi. Peningkatan saldo portofolio surat-surat berharga yang diterbitkan disebabkan oleh penerbitan Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II yang diterbitkan efektif pada tanggal 27 Maret 2013 sebesar Rp2 triliun dengan tingkat bunga sebesar 7,90% setahun yang berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan liabilitas Bank dan mempengaruhi peningkatan beban bunga selama tahun 2013.

c. Pendapatan Operasional Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember					
	2014		2013		2012	
	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta	%
Pungutan administrasi dan denda simpanan dan kredit yang diberikan	468.951	52,41	392.856	51,42	355.287	62,17
Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah – neto	47.406	5,30	22.528	2,95	8.551	1,50
Keuntungan penjualan efek-efek – neto	61.696	6,90	9.061	1,19	8.288	1,45
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai efek-efek untuk nilai wajar – neto	999	0,11	12.063	1,58	8.620	1,51
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai obligasi pemerintah – neto	5.571	0,62	-	-	501	0,09
Pendapatan dari penerimaan hapus buku	187.578	20,96	191.429	25,05	106.570	18,64
Lain-lain	122.619	13,70	136.046	17,81	83.677	14,64
Total	894.820	100,00	763.983	100,00	571.494	100,00

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pendapatan operasional lainnya untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp894.820 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp130.837 juta atau 17,13% dibanding Rp763.983 juta untuk tahun 2013. Kenaikan ini terutama terutama didorong oleh keuntungan dari penjualan Obligasi Pemerintah serta Pungutan Administrasi dan Denda Simpanan dan Kredit yang Diberikan.

Pendapatan dari pungutan administrasi dan denda simpanan dan kredit yang diberikan tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 19,37%. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan simpanan dan kredit yang diberikan Perseroan yang masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 10,67% dan 15,38%, sehingga meningkatkan frekuensi transaksi penagihan biaya administrasi kepada nasabah. Pendapatan dari penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp191.429 juta tahun 2013 menjadi Rp187.578 juta pada akhir tahun 2014.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan operasional lainnya pada tahun 2013 adalah sebesar Rp763.983 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp192.489 juta atau 33,68%, dibanding Rp571.494 juta pada tahun 2012. Pertumbuhan pendapatan ini terutama didorong oleh peningkatan pendapatan yang diakui dari pungutan administrasi dan denda terhadap simpanan dan dan kredit yang diberikan dan peningkatan penerimaan dari kredit yang telah dihapusbukukan.

Peningkatan pungutan administrasi dan denda simpanan dan kredit yang diberikan sebesar 10,57% dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit sebesar 23,49% dan simpanan sebesar 19,26% selama tahun 2013, yang juga menyebabkan peningkatan jumlah nasabah dan jumlah rekening kredit dan simpanan sehingga meningkatkan frekuensi transaksi penagihan biaya administrasi kepada nasabah. Pendapatan dari penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan meningkat dari Rp106.570 juta selama tahun 2012 menjadi Rp191.429 juta selama tahun 2013. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kiat manajemen untuk memperbaiki kualitas kredit macet sehingga meningkatkan aktivitas kolektor untuk melakukan *follow up* penyelesaian atas kredit yang sudah berstatus macet.

d. Beban Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember					
	2014		2013		2012	
	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta	%
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Non Produktif	771.166	16,02	430.289	10,05	212.624	6,20
Beban Estimasi Kerugian Penurunan Nilai Komitmen dan Kontijensi	729	0,02	2.066	0,05	1.159	0,03
Umum dan administrasi	2.122.830	44,10	1.784.062	41,67	1.462.757	42,68
Gaji dan tunjangan karyawan	1.595.409	33,15	1.613.152	37,68	1.486.938	43,38
Premi program penjaminan pemerintah	203.451	4,23	175.419	4,10	134.876	3,94
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai obligasi pemerintah - neto	-	-	138.689	3,24	-	-
Lain - lain	119.604	2,48	137.720	3,22	128.990	3,76
Jumlah	4.813.189	100,00	4.281.397	100,00	3.427.344	100,00

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Beban usaha untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp4.813.189 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp531.792 juta atau 12,42%, dibanding Rp4.281.397 juta untuk tahun 2013. Peningkatan beban usaha tersebut terutama didorong oleh beban umum dan administrasi serta beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif yang masing-masing meningkat 18,99% dan 79,22%.

Selama tahun 2014, kredit meningkat sebesar 15,38% lebih tinggi dari tahun 2013. Sebagai bentuk komitmen manajemen dalam memitigasi risiko kredit yang diberikan, Perseroan meningkatkan nilai estimasi penyisihan kerugian penurunan aset produktif dan non produktif, yang mengakibatkan peningkatan beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Non-Produktif sebesar 79,22% lebih tinggi dibandingkan tahun 2013.

Peningkatan beban umum dan administrasi didorong oleh kenaikan biaya perbaikan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana kantor, serta peningkatan biaya promosi pada tahun 2014. Selain itu, jumlah ATM BTN juga terus bertambah. Sepanjang tahun 2014, Perseroan menambah 289 ATM BTN, sehingga mengakibatkan peningkatan beban perbaikan dan pemeliharaan pada tahun 2014.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Beban usaha pada tahun 2013 adalah sebesar Rp4.281.397 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp854.053 juta atau 24,92%, dibanding Rp3.427.344 juta pada tahun 2012. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan penyisihan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif sebesar 102,37%. Selain itu, kenaikan beban usaha sejalan dengan program pengembangan bisnis Perseroan yang menuntut bertumbuhnya sumber daya manusia dan jaringan distribusi Perseroan, yang berpengaruh pada kenaikan pada beban gaji dan tunjangan karyawan sebesar Rp126.214 juta atau 8,49% dan beban umum dan administrasi sebesar Rp321.305 juta atau 21,97%.

Selama tahun 2013, kredit meningkat sebesar 24% lebih tinggi dari tahun 2012. Berdasarkan analisis kolektibilitas kredit, 84% dari kredit dalam kondisi lancar; 12% dari kredit dalam kondisi dalam perhatian khusus dan kurang lancar dan sisanya dalam kondisi diragukan dan macet. Per tahun 2013, tingkat kolektibilitas kredit yang berada dalam kondisi "kurang lancar" dan "kredit bermasalah" mengalami peningkatan dari Rp2,98 milyar pada tahun 2012 menjadi Rp3,54 milyar pada tahun 2013. Dengan demikian, sebagai bentuk komitmen manajemen dalam memitigasi risiko kolektibilitas fasilitas kredit yang diberikan, Perseroan meningkatkan nilai estimasi penyisihan kerugian penurunan aset produktif dan non produktif.

Peningkatan gaji dan kesejahteraan karyawan didorong oleh peningkatan karyawan tetap dari 6.048 pegawai di tahun 2012 menjadi 6.869 karyawan di tahun 2013. Selain itu, Perseroan juga telah meningkatkan gaji pokok dan segala tunjangan pegawai serta mendistribusikan bonus pada tahun 2013 yang didasarkan pada kinerja mereka yang meningkatkan biaya gaji.

Kenaikan beban umum dan administrasi disebabkan oleh kenaikan biaya perbaikan dan pemeliharaan yang terkena dampak dari peningkatan kantor cabang dengan tambahan 64 kantor pada tahun 2013. Di samping itu, Perseroan telah menambahkan 100 ATM pada tahun 2013 yang juga mengakibatkan peningkatan beban perbaikan dan pemeliharaan pada tahun 2013. Penambahan kantor cabang dan ATM dilakukan dalam rangka meningkatkan jaringan perbankan untuk tujuan pertumbuhan aset dan kewajiban Perseroan.

Di samping itu selama tahun 2013, Perseroan telah menggunakan jasa profesional untuk kegiatan operasional sebesar Rp15,15 miliar yang dicatat sebagai bagian dari beban umum dan administrasi. Selain itu, selama tahun 2013, Perseroan telah mencatat biaya audit untuk penyusunan Laporan Keuangan yang sudah diaudit dan Laporan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) untuk periode 31 Desember 2013 dengan jumlah Rp1,65 miliar, sudah termasuk pajak-pajak dan out of pocket expenses yang merupakan bagian dari jasa profesional.

e. Laba Operasional

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Laba operasional untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp1.546.212 juta, mengalami penurunan sebesar Rp589.697 juta atau 27,61%, dibanding Rp2.135.909 juta untuk tahun 2013. Penurunan ini terutama disebabkan oleh terkoreksinya laba operasional Perseroan karena peningkatan beban bunga dan bonus yang disebabkan kenaikan beban bunga deposito berjangka sebesar 68,60%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Laba operasional pada tahun 2013 adalah sebesar Rp2.135.909 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp264.940 juta atau 14,16%, dibanding Rp1.870.969 juta pada tahun 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan akibat adanya ekspansi kredit sebesar 22,51%. Hal ini berarti bahwa dalam kondisi perekonomian moneter Indonesia yang sangat bergejolak, Perseroan berhasil mempertahankan kestabilan margin bunga bersih.

f. Pendapatan (beban) bukan operasional – neto

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember					
	2014		2013		2012	
	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta	%
Pendapatan sewa gedung	289	14,74	223	4,57	246	(3,17)
Pendapatan (beban) lainnya - neto	1.671	95,26	4.639	95,43	(8.013)	103,17
Jumlah	1.960	100,00	4.862	100,00	(7.767)	100,00

Pendapatan (beban) bukan operasional – neto terdiri dari pendapatan sewa gedung yang merupakan komponen terpentingnya. Pendapatan (beban) lainnya terdiri dari keuntungan atau kerugian dari penjabaran mata uang asing aset dan kewajiban, denda atas kelebihan likuiditas di cabang dan biaya yang terkait dengan kegiatan *Corporate Social Responsibility*.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pendapatan bukan operasional – neto pada tahun 2014 adalah sebesar Rp1.960 juta, mengalami penurunan sebesar 59,69% atau Rp2.902 juta dibandingkan pada tahun 2013 yang adalah sebesar Rp4.862 juta. Pendapatan sewa gedung pada tahun 2014 mengalami peningkatan 29,59% atau sebesar Rp66 juta dibandingkan tahun 2013.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan bukan operasional – neto pada tahun 2013 adalah sebesar Rp4.862 juta, mengalami kenaikan sebesar 162,60% atau Rp12.629 juta dibandingkan pada tahun 2012 yang adalah sebesar Rp(7.767) juta. Pendapatan sewa gedung pada tahun 2014 mengalami penurunan 9,35% atau sebesar Rp23 juta dibandingkan tahun 2013.

g. Laba Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Laba tahun berjalan untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp1.115.592 juta, mengalami penurunan sebesar Rp446.569 juta atau 28,59%, dibanding Rp1.562.161 juta untuk tahun 2013. Penurunan ini terutama disebabkan karena peningkatan beban bunga dan bonus yang disebabkan kenaikan beban bunga deposito berjangka sebesar 68,60%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Laba tahun berjalan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp1.562.161 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp198.199 juta atau 14,53%, dibanding Rp1.363.962 juta pada tahun 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan karena pertumbuhan bisnis utama Perseroan yang ditandai dengan peningkatan aset khususnya portofolio kredit sehingga pendapatan bunga dan bagi hasil – neto mengalami peningkatan yakni dari Rp4.726.819 juta di tahun 2012 menjadi Rp5.653.323 juta di tahun 2013 atau mengalami peningkatan Rp926.504 juta.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

a. Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember					
	2014		2013		2012	
	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta	%
Kas	920.482	0,64	924.451	0,71	694.941	0,62
Giro pada Bank Indonesia	9.371.509	6,48	9.858.758	7,52	7.297.835	6,53
Giro pada bank lain – neto	1.093.393	0,76	400.215	0,31	161.993	0,14
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	1.496.455	1,03	4.839.268	3,69	11.466.296	10,26
Efek-efek- neto	5.436.970	3,76	4.201.682	3,20	1.013.796	0,91
Obligasi Pemerintah	8.238.065	5,70	8.384.960	6,39	7.468.930	6,68
Kredit yang diberikan – neto	104.905.865	72,56	91.378.847	69,66	74.621.792	66,78
Pembiayaan/piutang syariah – neto	9.433.361	6,52	7.951.367	6,06	5.808.257	5,20
Aset tetap – neto	1.488.383	1,03	1.522.724	1,16	1.582.812	1,42
Bunga yang masih akan diterima	1.183.489	0,82	923.688	0,70	871.985	0,78
Aset lain-lain	1.007.989	0,70	783.770	0,60	759.956	0,68
Total Aset	144.575.961	100,00	131.169.730	100,00	111.748.593	100,00

31 Desember 2014 dibandingkan dengan 31 Desember 2013

Total aset pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp144.575.961 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp13.406.231 juta atau 10,22%, dibanding Rp131.169.730 juta pada 31 Desember 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan kredit yang diberikan, pembiayaan/piutang syariah dan efek-efek – neto masing-masing sebesar 14,80%, 18,64% dan 29,40%. Dengan peningkatan aset tersebut, Perseroan dapat tetap mempertahankan posisinya di jajaran 10 bank dengan aset terbesar di Indonesia.

Kenaikan kredit yang diberikan sebagian besar merupakan kontribusi kenaikan pinjaman KPR subsidi yang meningkat 19,86% sepanjang tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 dan peningkatan pinjaman KPR non subsidi sebesar 14,47% pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Peningkatan portofolio KPR subsidi tahun 2014 disebabkan masih tingginya permintaan akan rumah sederhana dan kenaikan KPR non subsidi disebabkan oleh upaya pemasaran yang lebih baik yang dilakukan Perseroan.

31 Desember 2013 dibandingkan dengan 31 Desember 2012

Total aset pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp131.169.730 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp19.421.137 juta atau 17,38%, dibanding Rp111.748.593 juta pada 31 Desember 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh karena adanya peningkatan yang signifikan atas saldo kredit yang diberikan akibat dari ekspansi kredit Perseroan dari KPR subsidi dan pinjaman KPR non subsidi. Peningkatan portofolio kredit per tahun 2013 disebabkan oleh program pembiayaan rumah sangat sederhana yang dicanangkan pada awal tahun 2013, yang meningkatkan transaksi penarikan pembiayaan KPR Subsidi dan inovasi program pinjaman KPR non subsidi yang menarik dan memotivasi masyarakat untuk melakukan kegiatan pembiayaan KPR non subsidi dengan Bank.

Selain itu, realisasi efek-efek dan obligasi pemerintah pada tanggal 31 Desember 2013 meningkat dibandingkan dengan realisasi pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp4.103.916 juta atau naik sebesar 48,38%. Hal ini terutama disebabkan adanya tambahan investasi pada instrumen keuangan berupa sertifikat Bank Indonesia sehubungan dengan adanya kelebihan likuiditas yang berasal dari pemasukan dana pihak ketiga. Hal ini merupakan bagian dari implementasi langkah efektivitas pengelolaan dana yang diterima guna mencapai optimalisasi profitabilitas dan bentuk realisasi atas komitmen manajemen dalam memitigasi risiko likuiditas Bank.

Aset Likuid

Aset likuid dimaksudkan untuk memenuhi komitmen kepada nasabah dan pihak lainnya, baik untuk kebutuhan uang tunai (transaksi melalui ATM), pembayaran kembali dana pihak ketiga, pemberian kredit dan memenuhi kebutuhan likuiditas lainnya. Adapun komposisi aset likuid Perseroan terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain - bruto, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bruto, efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi - bruto dan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar laporan laba rugi.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2014	2013	2012
Rupiah	13.290.836	18.651.856	19.988.773
Valuta Asing	332.894	166.574	115.101

31 Desember 2014 dibandingkan dengan 31 Desember 2013

Jumlah aset likuid pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp13.623.730 juta, mengalami penurunan sebesar Rp5.194.700 juta atau 27,60%, dibanding Rp18.818.430 juta pada 31 Desember 2013. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain dan penurunan efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi - bruto.

Selama tahun 2014, jumlah kas Perseroan mencapai Rp920.482 juta, sedikit lebih rendah dibandingkan kas tahun 2013 yang mencapai Rp924.451 juta, sebagai dampak dari pengelolaan kas untuk transaksi harian nasabah.

Rekening giro pada bank lain mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 173,20% dari saldo tahun 2013 menjadi Rp1.093.393 juta. Peningkatan tersebut sebagai dampak dari kegiatan pengelolaan likuiditas Perseroan.

31 Desember 2013 dibandingkan dengan 31 Desember 2012

Total aset likuid pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp18.818.430 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.285.444 juta atau 6,39%, dibanding Rp20.103.874 juta pada 31 Desember 2012. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sebesar Rp6.633.028 juta dibandingkan 31 Desember 2012. Penurunan ini disebabkan oleh Perseroan telah mengalokasikan peningkatan dana yang diterima dari pihak ketiga selama tahun 2013 dalam bentuk kredit perumahan dan investasi jangka pendek dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia pada tahun 2013. Tindakan Perseroan yang demikian merupakan bagian dari implementasi langkah efektivitas pengelolaan dana yang diterima guna mencapai optimalisasi profitabilitas dan realisasi komitmen manajemen dalam memitigasi risiko likuiditas Perseroan.

b. Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember					
	2014		2013		2012	
	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta	%
Liabilitas segera	1.835.807	1,39	1.284.306	1,07	1.201.499	1,18
Simpanan dari nasabah	106.470.677	80,43	96.207.622	80,43	80.667.983	79,50
Simpanan dari Bank Lain	1.179.269	0,89	275.257	0,23	706.703	0,70
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.817.603	2,88	2.652.730	2,22	2.335.000	2,30
Surat-surat berharga yang diterbitkan - neto	8.519.884	6,44	8.836.711	7,39	7.136.776	7,03
Pinjaman yang diterima	6.998.213	5,29	7.073.032	5,91	6.737.260	6,64
Bunga yang masih harus dibayar	308.996	0,23	241.370	0,20	193.280	0,19
Liabilitas pajak tangguhan - neto	152.422	0,12	152.777	0,13	45.009	0,05
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	7.198	0,00	6.469	0,01	4.403	0,00
Liabilitas lain-lain	3.079.486	2,33	2.882.703	2,41	2.441.809	2,41
Total Liabilitas	132.369.555	100,00	119.612.977	100,00	101.469.722	100,00

31 Desember 2014 dibandingkan dengan 31 Desember 2013

Total liabilitas pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp132.369.555 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp12.756.578 juta atau 10,66%, dibanding Rp119.612.977 juta pada 31 Desember 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya simpanan dari nasabah sebesar 10,67% seiring dengan tumbuhnya bisnis Perseroan.

Kenaikan liabilitas juga didorong oleh meningkatnya efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar 43,91% dari saldo tahun 2013 yang disebabkan oleh penjualan obligasi Pemerintah kepada Standard Chartered Bank. Hal ini ditambahkan dengan adanya penambahan simpanan dari bank lain selama tahun 2014 akibat kegiatan manajemen treasury Perseroan.

Bunga yang masih harus dibayar pada tahun 2014 meningkat 28,02% atau Rp67.626 juta dibanding pada tahun 2013. Hal ini sejalan dengan meningkatnya simpanan dari nasabah Perseroan. Peningkatan ini paling banyak disebabkan oleh peningkatan bunga yang masih harus dibayar yang berasal dari deposito berjangka, dimana pada tahun 2014 adalah sebesar Rp222.744 juta, meningkat 43,32% atau Rp67.326 juta dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp155.418 juta.

Namun tingkat suku bunga dan perubahannya tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam mengembalikan pinjaman, baik pokok maupun bunganya. Seluruh hutang Perseroan memiliki suku bunga yang telah ditentukan ditentukan.

31 Desember 2013 dibandingkan dengan 31 Desember 2012

Total liabilitas pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp119.612.977 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp18.143.255 juta atau 17,88%, dibanding Rp101.469.722 juta pada 31 Desember 2012. Kenaikan realisasi pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan realisasi pada tanggal 31 Desember 2012 terutama terjadi pada akun simpanan dari nasabah yang sejalan dengan peningkatan kredit pada tahun 2013.

Peningkatan liabilitas disebabkan juga kenaikan jumlah liabilitas surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima. Kenaikan realisasi liabilitas atas surat berharga yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan realisasi pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.699.935 juta atau naik sebesar 23,82%. Hal ini disebabkan adanya penerbitan obligasi berkelanjutan Bank tahap II pada tahun 2013 untuk memperoleh tambahan dana untuk kebutuhan ekspansi kredit.

Bunga yang masih harus dibayar pada tahun 2013 meningkat 24,88% atau Rp48.090 juta dibanding pada tahun 2012. Hal ini sejalan dengan meningkatnya simpanan dari nasabah Perseroan. Peningkatan ini paling banyak disebabkan oleh peningkatan bunga yang masih harus dibayar yang berasal dari deposito berjangka, dimana pada tahun 2013 adalah sebesar Rp155.418 juta, meningkat 43,28% atau Rp46.944 juta dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp108.474 juta.

c. Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember					
	2014		2013		2012	
	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta	%
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.283.848	43,29	5.282.427	45,71	5.178.220	50,38
Tambahan modal disetor	2.028.136	16,61	2.025.764	17,53	1.793.503	17,45
Opsi Saham	9.483	0,08	10.600	0,09	103.054	1,00
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan - neto	(90.013)	(0,74)	(90.046)	(0,78)	29.058	0,28
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	3.859.360	31,62	2.765.847	23,93	1.811.074	17,62
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	1.115.592	9,14	1.562.161	13,52	1.363.962	13,27
Total Ekuitas	12.206.406	100,00	11.556.753	100,00	10.278.871	100,00

31 Desember 2014 dibandingkan dengan 31 Desember 2013

Jumlah ekuitas pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp12.206.406 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp649.653 juta atau 5,62%, dibanding Rp11.556.753 juta pada 31 Desember 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba tahun berjalan Perseroan sebesar 14,95% dibandingkan tahun 2013 dan setoran modal baru dari eksekusi MESOP.

31 Desember 2013 dibandingkan dengan 31 Desember 2012

Total ekuitas pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp11.556.753 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.277.882 juta atau 12,43%, dibanding Rp10.278.871 juta pada 31 Desember 2012. Kenaikan realisasi pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan realisasi pada tanggal 31 Desember 2012 terutama disebabkan oleh pertumbuhan modal saham sebesar 2% dan pertumbuhan agio saham sebesar 13%, yang berasal dari eksekusi opsi saham sebesar Rp104,21 miliar yang telah disetor penuh dan pertumbuhan laba sebesar 15%. Untuk merealisasikan eksekusi opsi saham tersebut, Perseroan telah menerbitkan 208.413.000 lembar saham biasa atas nama seri B dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham dasar. Dengan penambahan saham baru akibat opsi saham dan pertumbuhan laba bersih, ekuitas meningkat sebesar 12% lebih tinggi pada tahun 2013.

D. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

1. Transaksi Derivatif

Perseroan terekspos pada risiko pasar terutama perubahan tingkat bunga, dan penggunaan instrumen derivatif sehubungan dengan aktivitas manajemen risiko Perseroan. Perseroan tidak memegang atau menerbitkan instrumen keuangan derivatif untuk tujuan perdagangan. Perseroan percaya bahwa penyisihan kerugian adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian pada piutang swap suku bunga.

2. Peraturan Kecukupan Modal

Persyaratan kecukupan modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, terutama didasarkan pada kesepakatan kecukupan modal berdasarkan *Basel Committee* dari *Bank of International Settlements* tahun 1988.

Modal minimum untuk rasio aset tertimbang menurut risiko untuk bank-bank di Indonesia adalah 8% untuk risiko kredit dan risiko pasar. Peraturan Bank Indonesia mengharuskan rasio kecukupan modal disajikan tanpa perhitungan pajak penghasilan yang ditangguhkan. Bank yang tidak dapat memenuhi persyaratan ini akan ditempatkan di bawah pengawasan khusus. Mulai tahun 2010, Bank Indonesia mengharuskan Perseroan memperhitungkan risiko operasional, di samping risiko kredit dan risiko pasar, dalam menentukan rasio kecukupan modal.

Tabel berikut merangkum modal dan rasio kecukupan modal Perseroan yang diukur sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, untuk tanggal-tanggal sebagaimana diindikasikan:

		(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)		
		31 Desember		
Keterangan		2014	2013	2012
Modal inti	a	10.735.782	9.878.541	9.038.283
Modal pelengkap (maksimal 100% dari modal inti)	b	435.676	474.464	394.879
Modal pelengkap tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi risiko pasar	c	-	-	-
Jumlah modal inti dan modal pelengkap	d=a+b	11.171.458	10.353.005	9.433.162
Jumlah modal inti, modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi risiko pasar	e=c+d	11.171.458	10.353.005	9.433.162
nyertaan	f	-	-	-
Jumlah modal untuk risiko kredit	g=d-f	11.171.458	10.353.005	9.433.162
Jumlah modal untuk risiko kredit dan risiko pasar	h=e-f	11.171.458	10.353.005	9.433.162
Aset tertimbang menurut risiko (ATMR) kredit	i	66.250.928	57.748.566	46.581.762
Aset tertimbang menurut risiko (ATMR) pasar	j	226.010	283.944	182.400
Aset tertimbang menurut risiko (ATMR) operasional	k	9.855.703	8.229.190	6.557.227
Jumlah ATMR untuk risiko kredit dan risiko operasional	l= i+k	76.106.631	65.977.756	53.138.989
Jumlah ATMR untuk risiko kredit dan risiko operasional dan risiko pasar	m=i+j+k	76.332.641	66.261.700	53.321.389
CAR untuk risiko kredit dan risiko operasional	n=g/l	14,68%	15,69%	17,75%
CAR untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar	o=g/m	14,64%	15,62%	17,69%
CAR minimum yang diwajibkan		9,00%	10,00%	8,00%

Jika peraturan rasio ini dihitung sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, maka modal Tier II termasuk semua ketentuan umum yang dimuat dalam laporan keuangan GAAP Indonesia untuk menghindari potensi kerugian kredit di masa depan. Dibutuhkan modal tambahan untuk mendukung pertumbuhan, untuk mempertahankan rasio kecukupan modal Perseroan dalam pedoman Bank Indonesia, dan untuk mempertahankan likuiditas.

3. Kualitas Aset (Asset Quality Ratio)

Kualitas Aset dinilai berdasarkan rasio-rasio, yaitu:

Tahun	Rasio Aset Produktif Bermasalah	Rasio NPL – bersih*	Rasio NPL - bruto**
31 Desember 2014	3,57%	2,79%	4,01%
31 Desember 2013	3,60%	3,04%	4,05%
31 Desember 2012	3,68%	3,12%	4,09%

*) NPL bersih pembiayaan syariah pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 masing-masing adalah sebesar 0,95%, 0,70%, dan 0,41%

**) NPL bruto pembiayaan syariah pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 masing-masing adalah sebesar 2,06%, 1,16%, dan 2,38%

Kualitas Aset (dalam hal ini sebagai Kualitas Aset Produktif) merupakan tingkat/ukuran kemampuan aset atau aset yang dapat menghasilkan. Aset Produktif terdiri atas giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek dan obligasi Negara Republik Indonesia, pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah, efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, kredit yang diberikan, tagihan derivative dan komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit. Kualitas Aset Produktif digolongkan atas Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Aset Produktif Bermasalah terdiri dari Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Penggolongan ini ditentukan berdasarkan evaluasi manajemen Perseroan, terutama terhadap prestasi dan kemampuan bayar nasabah (untuk Kredit Perumahan) serta evaluasi terhadap prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan bayar (untuk Kredit Lainnya dan Aset Produktif Lainnya). Berdasarkan penggolongan atas Kualitas Aset Produktif tersebut dilakukan pembentukan Penyisihan Kerugian atas Aset Produktif yang diatur dengan Surat Edaran BI No. 31/148/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 yang umum disebut Pembentukan Penyisihan Aset Produktif (PPAP) Yang Wajib Dibentuk. Dari tabel tersebut di atas, Rasio Aset Produktif Bermasalah dari tahun ke tahun semakin berkurang, sehingga Kualitas Aset Produktif nya semakin membaik. Dan Rasio PPAP Tersedia terhadap PPAP Wajib Dibentuk di atas 100%, sehingga cukup aman bagi Perseroan dalam mengantisipasi kerugian atas Aset Produktif Bermasalah.

4. Rentabilitas/Profitabilitas (Earnings)

Profitabilitas dinilai berdasarkan rasio-rasio sebagai berikut:

Tahun	Rasio Laba terhadap Rata-Rata Aset (ROA)	Rasio Laba terhadap Ekuitas (ROE)	NIM	Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
31 Desember 2014	1,12%	10,66%	4,47%	89,19%
31 Desember 2013	1,79%	16,05%	5,44%	82,19%
31 Desember 2012	1,94%	18,23%	5,83%	80,74%

Rentabilitas/profitabilitas merupakan kemampuan Perseroan dalam meraih laba. Rasio yang digunakan secara umum adalah ROA (Rasio Laba terhadap Rata-Rata Aset), ROE (Rasio Laba terhadap Ekuitas), NIM (Rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap Pendapatan Bunga) serta BOPO (Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional). ROA pada 31 Desember 2014 mengalami penurunan yang disebabkan penurunan laba sebelum pajak sebesar 27,68% dan ROE pada 31 Desember 2014 mengalami penurunan yang disebabkan disebabkan penurunan laba setelah pajak sebesar 28,59%. Penurunan pada rasio NIM terjadi karena peningkatan biaya dana sebesar 43,15% serta peningkatan beban cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebesar 79,22% dari Rp430.289 juta di tahun 2013 menjadi Rp771.166 juta di tahun 2014.

5. Likuiditas (Liquidity)

Likuiditas dinilai berdasarkan rasio sebagai berikut:

Tahun	Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)
31 Desember 2014	108,86%
31 Desember 2013	104,42%
31 Desember 2012	100,90%

Likuiditas merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas sewaktu-waktu melalui pengelolaan atas simpanan dan hutang lainnya untuk dijadikan aset produktif. Bank Indonesia melalui Surat Edaran No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum memberikan ketentuan pokok penilaian Likuiditas, di mana salah satu ukuran Likuiditas adalah LDR (Rasio Pinjaman Yang Diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga). Dalam tabel di atas, tingkat posisi LDR Perseroan secara berturut-turut pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 adalah 108,86%, 104,42%, dan 100,90%, di mana berdasarkan Lampiran 2e Surat Edaran tersebut, LDR Perseroan secara berturut-turut pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 diklasifikasikan pada peringkat 4 ($100\% < \text{Rasio} \leq 120\%$). Ini menunjukkan bahwa realisasi kredit Perseroan yang semakin meningkat tidak berdampak pada likuiditas karena sumber pembiayaan kredit tersebut juga berasal dari dana di luar Dana Pihak Ketiga antara lain obligasi yang diterbitkan, KLBI dan RDI.

Perseroan memiliki LDR dengan rasio yang cukup tinggi mengingat Perseroan dalam melakukan penyaluran kredit dibiayai tidak hanya oleh dana pihak ketiga berupa deposito, giro dan tabungan namun juga oleh sumber dana jangka panjang seperti obligasi yang diterbitkan. Sementara itu dalam perhitungan Rasio LDR menurut ketentuan Bank Indonesia tidak memperhitungkan obligasi yang diterbitkan Perseroan sebagai komponen dana pihak ketiga. Dengan demikian, tingkat LDR yang optimal bagi Perseroan berkisar di atas 100%.

Perseroan menjaga likuiditas Perseroan dengan beberapa strategi diantaranya dengan melakukan transaksi sekuritisasi, mengembangkan produk kredit yang berjangka waktu pendek dan meningkatkan core nominal produk dana pihak ketiga retail.

6. Analisa Laporan Arus Kas

Tabel berikut memuat ikhtisar Laporan Arus Kas Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2014	2013	2012
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(2.052.765)	(1.433.889)	2.191.566
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(3.328.723)	(2.120.823)	(730.296)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	301.463	2.185.910	2.175.751
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	(5.080.025)	(1.368.802)	3.637.021

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasional di tahun 2014 sebesar Rp2.052.765 juta terutama berasal dari arus kas keluar dari kredit yang diberikan sebesar Rp14.199.296 juta dan pembayaran bunga dan bonus, provisi dan komisi sebesar Rp7.269.328 juta, yang dikompensasi dengan arus kas masuk berupa penerimaan bunga dan bagi hasil sebesar Rp 12.548.940 juta dan giro sebesar Rp4.040.235 juta.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di tahun 2014 sebesar Rp3.328.723 juta terutama berasal dari arus kas keluar berupa kenaikan efek-efek tersedia untuk dijual sebesar Rp3.003.080 juta dan pembelian efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp199.672 juta.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan di tahun 2014 sebesar Rp301.463 juta terutama berasal dari arus kas masuk berupa penerimaan dari efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar Rp5.146.854 juta dan penerimaan dari surat-surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp577.381 juta, yang dikompensasi dengan pembayaran atas jatuh tempo efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar Rp3.981.981 juta.

7. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki dan modal sendiri, yang diukur dengan perbandingan seluruh liabilitas dengan ekuitas atau dengan seluruh asetnya.

Rasio liabilitas terhadap jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 masing-masing adalah sebesar 91,56%, 91,19%, dan 90,80%.

Rasio liabilitas terhadap jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 masing-masing adalah sebesar 1.084,43%, 1.035,01%, dan 987,17%.

Peningkatan rasio solvabilitas di tahun 2014 disebabkan oleh implementasi strategi pendanaan Perseroan untuk mengurangi liabilitas dalam bentuk deposito nasabah lembaga yang berbunga tinggi. Efek kenaikan rasio solvabilitas berarti meningkatnya pula kebutuhan likuiditas Perseroan untuk membayar biaya bunga.

8. Maturity Gap

Masalah *maturity gap* adalah kondisi yang secara umum menjadi masalah bagi perbankan nasional karena dominasi dana yang berasal dari deposito jangka waktu pendek yaitu 1 bulan dan 3 bulan, demikian juga halnya dengan kondisi Perseroan yang rata-rata masih didominasi oleh deposito yang berjangka pendek. Sementara itu sebagian dana diinvestasikan pada aset produktif yang berjangka menengah. Kondisi *mismatch* ini oleh Perseroan akan menjadi perhatian dan prioritas dari waktu ke waktu untuk diminimalkan.

Beberapa upaya yang ada saat ini dan akan terus dilakukan adalah:

1. Memonitor dengan ketat "gapping maturity" oleh ALCO meeting untuk melakukan tindak lanjut agar risiko dapat dikelola secara optimal.
2. Meningkatkan sumber dana yang lebih murah dan tidak *volatile* dari produk-produk tabungan dengan berbagai macam hadiah, yang diharapkan akan dapat menarik dana tabungan dengan basis nasabah yang besar.
3. Menerbitkan obligasi dengan jangka waktu yang panjang, disesuaikan dengan jangka waktu kredit perumahan yang disalurkan.
4. Memenuhi pendanaan jangka panjang melalui sekuritisasi aset.
5. Pemberian kredit perumahan komersial dan kredit beragunan rumah.
6. Menjaga kolektibilitas/penerimaan kembali pokok kredit yang telah disalurkan.

7. Melakukan pendekatan dengan para deposan, sehingga tercipta saling percaya antara bank dengan nasabah. Lebih jauh, walaupun sebagian besar tenor deposito 1 bulan, namun sebagian besar dilakukan atas dasar *roll over*, dimana akan selalu diperpanjang apabila jatuh tempo

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank. Bank Indonesia melakukan pembatasan persentase pemberian kredit kepada satu pihak atau satu kelompok terhadap total modal yang dimiliki bank, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk pihak-pihak tidak terkait dengan bank untuk satu peminjam maupun keseluruhan adalah sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Dana kepada 1 (satu) Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari Modal Bank.
 - b. Penyediaan Dana kepada 1 (satu) kelompok Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima per seratus) dari Modal Bank.
2. Untuk pihak-pihak yang terkait dengan bank untuk satu peminjam maupun keseluruhan setinggi-tingginya 10% dari modal bank.

Dari segi BMPK, Perseroan berusaha untuk menjaga BMPK agar selalu sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia.

10. Giro Wajib Minimum (GWM)

Untuk menjaga kestabilan moneter, bank-bank di Indonesia diwajibkan untuk memenuhi persyaratan minimum cadangan wajib yang disebut dengan Giro Wajib Minimum (GWM). GWM rupiah terdiri atas :

- (i) GWM primer, dimana simpanan minimum wajib dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK,
- (ii) GWM Sekunder, dimana cadangan minimum wajib berupa SBI, SUN, SBSN, dan/atau *Excess Reserve* yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK, dan
- (iii) GWM LDR, dimana simpanan minimum wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara LDR yang dimiliki oleh Bank dengan LDR Target, yaitu kisaran rasio LDR yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pemenuhan GWM dalam rupiah ditetapkan sebagai berikut:

- a. GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam rupiah.
- b. GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam rupiah.
- c. GWM LDR dalam rupiah sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antara KPMM Bank dan KPMM Insentif.

Selain GWM dalam mata uang rupiah, Bank yang bertindak sebagai Bank Devisa juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing. GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam valuta asing.

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dihitung berdasarkan PBI No.15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Mata Uang Asing bagi bank umum konvensional. Sedangkan Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2012 dihitung berdasarkan PBI No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang Perubahan atas PBI No.12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Mata Uang Asing.

Perhitungan rasio GWM berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dihitung berdasarkan PBI No. 15/16/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2012 perhitungan rasio GWM berdasarkan prinsip syariah didasarkan pada PBI No. 6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang diamandemen dengan PBI No. 8/23/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan PBI No. 10/23/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008. Setiap bank diwajibkan memelihara GWM dalam rupiah dan mata uang asing yang besarnya ditetapkan sebesar 5% dan 1% dari dana pihak ketiga dalam rupiah dan mata uang asing.

Selama ini Perseroan selalu memenuhi Giro Wajib Minimum atas dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Perseroan. Berikut adalah tingkat GWM Perseroan (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012:

(dalam persentase)

Keterangan	31 Desember		
	2014	2013	2012
GWM Rupiah*			
GWM Utama	8,09	9,29	8,15
GWM Sekunder	7,85	9,07	2,50
GWM Dolar Amerika Serikat	8,39	8,03	8,03
GWM Rupiah Syariah	5,09	8,10	8,00

*) Tidak termasuk GWM yang berdasarkan prinsip perbankan syariah

11. Posisi Devisa Neto (PDN)

Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN laporan posisi keuangan dan secara keseluruhan maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam Rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing.

Tahun	Posisi Devisa Neto
31 Desember 2014	1,92%
31 Desember 2013	1,07%
31 Desember 2012	0,70%

12. Capital Expenditure

Perseroan berkomitmen dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung fungsi dan peranan Perseroan sebagai lembaga keuangan bagi masyarakat. Di samping itu, sarana dan prasarana tersebut sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan Perseroan guna implementasi dan realisasi pertambahan jumlah nasabah dan pada akhirnya mencapai pertumbuhan aset. Sarana dan Prasarana tersebut adalah pembangunan Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Kas yang nyaman dan berkualitas bagi nasabah; ATM dan kantor pos on line yang memberikan kemudahan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan bersama Perseroan dan sarana integrasi dan infrastruktur yang aman dan terpercaya guna meningkatkan kredibilitas Perseroan di antara masyarakat.

Selama tahun 2013, Perseroan telah mendirikan 3 Kantor Wilayah, 65 Kantor Cabang, 223 Kantor Cabang Pembantu dan 479 Kantor Kas, 22 Kantor Cabang Syariah, 21 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 7 Kantor Kas syariah, 1830 unit mesin ATM, 2951 Kantor Pos on Line untuk tujuan ekspansi jaringan pelayanan Bank di Indonesia. Sebagai hasilnya, selama tahun 2014, Perseroan telah melakukan rincian belanja modal hingga menghasilkan jaringan Bank BTN seperti terlampir dalam Bab VIII Sub-bab 4.

Jumlah investasi belanja modal (*capital expenditure*) berdasarkan Laporan Arus Kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 adalah sebagaimana dirinci dalam tabel di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2014	2013	2012
Tanah	-	158	5.141
Bangunan	92.854	117.776	82.688
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	98.546	101.425	264.433
Jumlah	191.400	219.359	352.262

Belanja modal dilakukan Perseroan dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas usaha Perseroan dalam bentuk pengembangan jaringan kerja, pengembangan produk baru, peningkatan pelayanan konsumen dan peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan laba Perseroan. Sampai saat ini Perseroan tidak mempunyai masalah yang berkaitan dengan ketidaksesuaian pembelian barang modal dan tujuannya karena Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penerapan transaksi belanja modal.

Sumber pendanaan atas belanja modal berasal dari penerimaan surplus aktivitas operasional Perseroan. Seluruh transaksi tersebut dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga Perseroan tidak memiliki risiko mata uang asing dalam transaksi belanja modal. Seluruh belanja modal Perseroan dibayar dan didanai dengan mata uang Rupiah, sehingga Perseroan tidak memerlukan transaksi lindung nilai dalam transaksi-transaksi tersebut. Belanja modal Perseroan ini didominasi oleh aset tetap yang digunakan Perseroan untuk menunjang kegiatan operasional dan memperluas jangkauan pelayanan.

V. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik penghimpunan dana, pemberian pinjaman maupun penyediaan jasa perbankan lainnya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha. Pelaksanaan kegiatan usaha tersebut dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan dan telah disusun berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan.

A. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN

Risiko-risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan antara lain:

1. Risiko Kredit

a) Risiko ketidakmampuan mempertahankan kualitas portofolio kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah milik Perseroan

Hasil usaha Perseroan akan terpengaruh secara negatif oleh kredit bermasalah dan kesinambungan pertumbuhan Perseroan akan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif atas risiko kredit dan mempertahankan kualitas dari portofolio kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah Perseroan.

Agregat kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah bermasalah atau *Non Performing Loan/Financing* atau NPL/F Perseroan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp4.650.288 juta (bruto) dan Rp3.229.778 juta (bersih), atau setara dengan 4,01% (NPL/F bruto) atau 2,79% (NPL/F bersih) dari total keseluruhan kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah oleh Perseroan. Walaupun Perseroan secara berkesinambungan aktif mengelola dan menjalankan program manajemen risiko dan memonitor portofolio kredit yang dimiliki oleh Perseroan serta terus menyempurnakan kebijakan prosedur dan sistem manajemen risiko kredit yang telah ada, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kebijakan, prosedur dan sistem tersebut sempurna. Kegagalan atas kebijakan, prosedur dan sistem manajemen risiko kredit Perseroan dapat mengakibatkan bertambahnya NPL yang dimiliki Perseroan sehingga akan berdampak negatif atas kualitas portofolio kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah Perseroan. Lebih lanjut, kualitas portofolio kredit Perseroan dapat juga memburuk akibat berbagai alasan lainnya, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan. Apabila hal ini terjadi, maka menurunnya kualitas portofolio kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah Perseroan tersebut dapat berdampak secara negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

b) Risiko terjadinya peningkatan penyisihan kerugian untuk menutup kerugian portofolio kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang terjadi di masa mendatang

Per tanggal 31 Desember 2014, persentase perbandingan kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah bermasalah atau NPL/F Perseroan terhadap total kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebesar 4,01% (bruto) dan 2,79% (bersih). Jumlah penyisihan akan ditentukan berdasarkan penilaian terkini atas portofolio kredit Perseroan dan ekspektasi terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas portofolio kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah Perseroan berdasarkan peraturan Bank Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi keuangan, itikad dan kemampuan melakukan pembayaran oleh debitur, nilai jaminan yang bisa direalisasikan dan kemampuan penjamin untuk memenuhi kewajiban mereka serta keadaan ekonomi Indonesia, kebijakan ekonomi makro Pemerintah, tingkat suku bunga, nilai tukar valuta asing dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Faktor-faktor di atas berada di luar kekuasaan Perseroan. Apabila penilaian dan ekspektasi atas faktor-faktor tersebut di atas berbeda dari keadaan yang sesungguhnya atau apabila kualitas dari portofolio kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah Perseroan memburuk, penyisihan yang telah dilakukan oleh Perseroan mungkin tidak cukup untuk menutupi kerugian yang terjadi, sehingga Perseroan perlu untuk melakukan penyisihan tambahan untuk kerugian tersebut. Kebutuhan untuk melakukan penyisihan tambahan untuk kerugian atas kredit yang diberikan dapat berdampak secara negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

c) Risiko konsentrasi kredit pada sektor dan daerah tertentu

Per tanggal 31 Desember 2014, sekitar 80% dari portofolio kredit (bruto) Perseroan adalah kredit (di luar pembiayaan syariah) yang terkait dengan sektor properti termasuk kredit yang dijamin dengan bangunan dan tanah. Mayoritas kredit yang diberikan untuk sektor properti adalah kredit perumahan sebesar 97% sedangkan sisanya diberikan untuk kredit non-perumahan. Kredit perumahan ini diberikan dengan proporsi terbesar KPR Non Subsidi sebesar 44,2% dan KPR Subsidi 34,0% dari total kredit perumahan.

Per tanggal 31 Desember 2014 sebesar 39,24% dari total kredit yang diberikan oleh Perseroan berasal dari jaringan usaha Perseroan di wilayah Jabodetabek, 30,38% berasal dari wilayah Jawa selain Jabodetabek, dan sisanya berasal dari wilayah Sumatera dan lainnya.

Karena portofolio kredit Perseroan terkonsentrasi dalam sektor dan daerah tertentu, maka apabila timbul masalah dalam sektor properti atau di daerah-daerah di mana kredit yang diberikan oleh Perseroan terkonsentrasi, maka hal ini dapat berdampak secara negatif pada kualitas dari total portofolio aset, dan kondisi keuangan serta kinerja operasional Perseroan.

2. Risiko Likuiditas

Sebagian besar dari pendanaan Perseroan berasal dari sumber pendanaan jangka pendek dan menengah, terutama dalam bentuk deposito, tabungan dan giro. Sebagian besar dari deposito tersebut memiliki jangka waktu satu bulan atau tiga bulan. Akan tetapi sebagian besar dari aset Perseroan (seperti sebagian besar dari KPR dan obligasi Pemerintah milik Perseroan), memiliki jangka waktu jatuh tempo yang panjang antara 10 sampai dengan 15 tahun, sehingga menciptakan risiko likuiditas. Secara historis, Perseroan dapat melakukan perpanjangan (*roll over*) terhadap sebagian besar deposito yang dimilikinya pada saat jatuh tempo, akan tetapi tidak ada jaminan Perseroan dapat terus melakukan hal itu di masa yang akan datang.

Walaupun Perseroan tidak memiliki sejarah kesulitan likuiditas di masa yang lalu, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat mempertahankan likuiditas yang cukup untuk menutup penarikan yang dilakukan oleh nasabah Perseroan di kemudian hari, terutama apabila terjadi krisis ekonomi. Apabila sebagian besar nasabah Perseroan yang memiliki deposito tidak melakukan perpanjangan atas dana yang telah didepositokan pada saat jatuh tempo, atau memutuskan untuk menarik tabungan mereka, maka hal ini akan berdampak negatif terhadap posisi likuiditas Perseroan. Apabila hal ini terjadi, Perseroan terpaksa harus bergantung terhadap pinjaman dari Bank Indonesia atau sumber-sumber pendanaan lainnya yang mungkin pada saat itu tidak tersedia atau tersedia dengan persyaratan komersial yang sangat tidak menarik. Kegagalan untuk mendapatkan pendanaan akan berdampak negatif terhadap likuiditas, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Walaupun Perseroan telah berusaha untuk mengurangi *mismatch* waktu jatuh tempo pendanaan yang dimiliki Perseroan dengan (i) terus menerbitkan obligasi dengan jangka waktu 5 sampai dengan 10 tahun sejak tahun 1989, (ii) melakukan transaksi sekuritisasi dari aset KPR Perseroan yang dimulai sejak awal tahun 2009; (iii) *refinancing*/pinjaman beragam KPR, dan (iv) menawarkan produk tabungan jangka panjang, seperti produk tabungan *bancassurance* dan produk tabungan yang terkait dengan pendidikan, namun Perseroan tidak dapat menjamin bahwa strategi yang dijalankan Perseroan untuk memitigasi atau mengurangi *mismatch* waktu jatuh tempo pendanaan yang dimiliki Perseroan akan berhasil dalam waktu yang cukup singkat.

3. Risiko Pasar

Per tanggal 31 Desember 2014, Perseroan memiliki Rp8,238,065 juta obligasi Pemerintah yang merupakan 5,70% dari total aset Perseroan. Penerimaan bunga dari obligasi Pemerintah milik Perseroan mewakili 3,59% dari seluruh pendapatan bunga dan bagi hasil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Apabila terjadi keterlambatan atau wanprestasi atas pembayaran bunga atau pokok oleh Pemerintah pada saat jatuh tempo, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, likuiditas dan hasil kegiatan usaha Perseroan.

Walaupun sejak tahun 2002 Pemerintah telah membuat kebijakan untuk menstimulasi pasar sekunder yang likuid untuk obligasi Pemerintah, harga obligasi di Indonesia masih dapat berfluktuasi secara signifikan. Hal ini tergantung pada berbagai faktor seperti arah kebijakan tingkat suku bunga, peringkat kredit Pemerintah, jumlah obligasi Pemerintah yang tersedia di pasar, dan tingkat suku bunga serta ketersediaan investasi berpendapatan tetap lainnya. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat menjual obligasi Pemerintah milik Perseroan tanpa mengalami kerugian yang signifikan. Lebih lanjut tidak ada jaminan bahwa peringkat kredit Pemerintah dan nilai dari obligasi Pemerintah yang dimiliki Perseroan tidak akan turun di masa yang akan datang.

Pengurangan yang signifikan atas nilai atau likuiditas dari obligasi Pemerintah atau surat-surat berharga milik Perseroan, perubahan atas peraturan yang berlaku terhadap obligasi atau surat-surat berharga Pemerintah, atau perubahan persyaratan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia untuk melakukan perhitungan berdasarkan harga pasar (*mark to market*) dan menyimpan efek obligasi atau surat-surat berharga Pemerintah sampai dengan jatuh tempo (*held to maturity*) dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, likuiditas dan hasil usaha Perseroan atau terhadap surat-surat berharga yang dimiliki oleh Perseroan.

Risiko suku bunga juga terjadi apabila terdapat perubahan pada tingkat bunga sumber dana. Meskipun karena sifatnya yang *adjustable*, Perseroan dapat menyesuaikan tingkat bunga kredit, akan tetapi penyesuaian tingkat bunga KPR khususnya tidak serta merta dapat dilakukan bersamaan dengan perubahan tingkat bunga dana pihak ketiga, sehingga dalam hal terjadi kecenderungan kenaikan tingkat suku bunga, Perseroan menghadapi risiko suku bunga.

4. Risiko Operasional

a) Jaminan yang diberikan untuk menjamin kredit yang diberikan oleh Perseroan mungkin tidak mencukupi dan Perseroan tidak bisa merealisasikan secara penuh nilai jaminan yang diberikan

Sebagian besar dari kredit yang diberikan oleh Perseroan pada umumnya dijamin dengan jaminan dalam bentuk tanah dan bangunan dan uang tunai. Nilai dari jaminan yang diberikan dapat berfluktuasi atau turun secara signifikan akibat berbagai faktor yang berada di luar kendali Perseroan, termasuk faktor makro ekonomi. Sebagai contoh, menurunnya keadaan ekonomi Indonesia dapat mengakibatkan menurunnya harga pasar perumahan yang mengakibatkan turunnya nilai properti yang dipergunakan untuk menjamin kredit yang diberikan oleh Perseroan apabila dibandingkan dengan nilai pokok kredit yang diberikan. Setiap penurunan dari nilai jaminan yang terjadi dapat mengurangi jumlah yang dapat direalisasikan oleh Perseroan pada saat melakukan eksekusi atas jaminan tersebut dan meningkatkan nilai penyisihan yang harus disediakan oleh Perseroan. Perseroan melakukan revaluasi secara periodik terhadap jaminan yang dimiliki oleh Perseroan. Akan tetapi Perseroan tidak selalu melakukan revaluasi atas properti yang telah dinilai oleh penilai independen. Dengan demikian, Perseroan tidak selalu memiliki informasi terkini atas nilai jaminan yang dimilikinya dan hal ini dapat berdampak atas ketepatan penilaian yang dilakukan atas kredit yang dijamin oleh jaminan tersebut.

Lebih lanjut, dalam situasi tertentu, pada saat terjadi proses likuidasi, hak Perseroan atas jaminan tersebut memiliki prioritas yang lebih rendah dibandingkan dengan hak pihak lainnya.

Sebagai tambahan, prosedur untuk merealisasikan nilai dari jaminan berbentuk aset tetap di Indonesia adalah tidak mudah dan dapat menghalangi proses eksekusi dari jaminan tersebut. Kesulitan mengeksekusi jaminan menyebabkan Perseroan mengalami kesulitan untuk merealisasikan nilai jaminan apabila debitur mengalami wanprestasi.

b) Risiko Sistem Teknologi Informasi

Indikator utama bagi kesuksesan TI dalam sebuah organisasi adalah sejauh mana dukungan dan kontribusinya bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Sehingga penyelarasan antara TI dengan strategi bisnis merupakan hal yang sentral dan sangat penting demi kesuksesan TI dan bisnis itu sendiri. Perseroan telah menetapkan Pedoman Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi 2013-2015. Pedoman tersebut merupakan pedoman bagi pengembangan dan operasi Teknologi Informasi yang mencakup manusia, proses dan teknologi untuk memastikan tercapainya tujuan dan strategi bisnis Bank dengan memanfaatkan teknologi yang paling tepat sesuai dengan kemampuan dan rencana pengembangan Bank.

Dari sisi governance dan manajemen risiko, Perseroan telah menerapkan dan mengintegrasikan model kecukupan dan kelengkapan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia 9/15/PBI tahun 2007 perihal Manajemen Risiko TI. Dalam menjalankan bisnis Perseroan, infrastruktur Teknologi Informasi yang handal dikembangkan dan dibangun sedemikian rupa untuk dapat memproses transaksi dalam jumlah besar secara cepat dan akurat di seluruh wilayah Indonesia, tersedianya dual data center secara realtime, instalasi jaringan komunikasi utama dan cadangan untuk minimalisasi risiko downtime, dan penerapan SLA level premium yang dapat mencapai 99,8% dengan pihak ketiga untuk menjamin ketersediaan layanan dan jaringan.

Dari sisi keamanan, untuk menjamin integritas data dan melindungi sistem dari akses ilegal dan serangan, Perseroan menerapkan standart sistem keamanan yang selalu dimonitor dan diperbaharui. Audit Teknologi Informasi yang mencakup aplikasi, sistem dan keamanan informasi, dari auditor internal dan eksternal juga rutin dilakukan untuk memastikan proses manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi telah berjalan dengan baik.

Akan tetapi Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kegiatan operasional Perseroan tidak akan terganggu secara material apabila terjadi kegagalan atas sebagian atau seluruh sistem teknologi informasi atau jaringan informasi milik Perseroan antara lain akibat masalah dengan perangkat lunak, serangan virus, kesalahan konversi akibat system update, kebakaran, bencana atau peristiwa lainnya yang tak terduga.

c) Risiko Sumber Daya Manusia

Dalam usaha meningkatkan kinerja perusahaan, Perseroan terus mengembangkan organisasi, mengembangkan produk baru maupun pemanfaatan teknologi yang terus diperbaharui. Perkembangan tersebut apabila tidak dibarengi dengan pengembangan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang memadai, Perseroan akan menghadapi risiko operasional karena ketidakmampuan SDM untuk mengimbangi perkembangan bank.

5. Risiko Hukum

Sebagai perusahaan yang berdiri dalam sebuah negara hukum, Perseroan harus selalu tunduk terhadap segala peraturan hukum yang berlaku. Kegagalan Perseroan dalam mengikuti peraturan hukum yang berlaku akan mengakibatkan pada timbulnya tuntutan hukum yang akan ditujukan kepada Perseroan. Semakin banyak tuntutan hukum yang muncul maka semakin besar biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan. Apabila kondisi ini dialami oleh Perseroan dan bersifat material maka hal ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja Perseroan.

Dalam situasi tertentu, pada saat terjadi proses likuidasi, hak Perseroan atas suatu jaminan memiliki prioritas yang lebih rendah dibandingkan dengan hak pihak lainnya. Prosedur untuk merealisasikan nilai dari jaminan berbentuk aset tetap di Indonesia adalah tidak mudah dan dapat menghalangi proses eksekusi dari jaminan tersebut. Kesulitan mengeksekusi jaminan menyebabkan Perseroan mengalami kesulitan untuk merealisasikan nilai jaminan apabila debitur mengalami wanprestasi.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Dalam usaha mempertahankan dan menjaring nasabah, Perseroan membutuhkan citra dan publikasi yang baik mengenai kegiatan usaha dan kinerja Perseroan sehingga nasabah tetap dan calon nasabah dapat tertarik untuk menggunakan berbagai produk dan layanan perbankan yang dimiliki oleh Perseroan.

Kegagalan Perseroan dalam menjaga reputasinya dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap Perseroan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya hilangnya kepercayaan nasabah dan berdampak langsung terhadap penurunan jumlah nasabah yang pada akhirnya akan memberikan dampak pada penurunan pendapatan dan volume aktivitas Perseroan.

7. Risiko Strategik

a) Risiko kegagalan penerapan rencana strategi Perseroan

Pada tahun 2008, Perseroan mengadopsi sebuah rencana strategis yang baru dengan nama Vision 2012. Rencana ini dibuat dengan maksud agar Perseroan dapat mencapai kenaikan yang signifikan dalam nilai kredit non perumahan. Ekspansi dari kegiatan usaha Perseroan pada bidang bisnis ini dapat menyebabkan munculnya risiko-risiko dan tantangan tertentu bagi Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- Perseroan tidak memiliki pengalaman atau keahlian pada produk dan layanan baru tertentu dan tidak dapat bersaing secara efektif dalam hal ini; atau Perseroan mungkin tidak dapat melaksanakan rencana ini dengan efektif;
- Produk dan layanan baru Perseroan tidak diterima oleh nasabah Perseroan atau memenuhi ekspektasi keuntungan Perseroan;
- Perseroan perlu untuk merekrut personil tambahan yang mungkin tidak tersedia pada saat itu;
- Perseroan gagal mendapatkan persetujuan berdasarkan peraturan yang berlaku atas produk atau layanan baru Perseroan;
- Perseroan tidak berhasil dalam meningkatkan kapabilitas manajemen risiko dan sistem teknologi informasi Perseroan untuk mendukung produk dan layanan yang lebih luas; dan
- Rasio kredit bermasalah Perseroan dalam portofolio kredit Perseroan dapat meningkat akibat meningkatnya rasio dari kredit bermasalah dalam portofolio kredit non perumahan, karena secara historis rasio kredit bermasalah atas kredit non perumahan lebih tinggi dari portofolio kredit kepemilikan rumah.

Apabila Perseroan tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan atas produk dan layanan baru yang diluncurkan, maka akan berdampak secara negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan juga telah merevisi strateginya untuk mempersempit target pasar dan fokus kepada kredit yang diberikan Perseroan kepada debitur pada industri tertentu, seperti industri telekomunikasi, infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan dan industri yang berhubungan dengan perumahan. Sektor-sektor ini memiliki risiko yang unik. Portofolio kredit Perseroan dapat terkena dampak negatif apabila sebagian besar dari kreditur Perseroan pada sektor-sektor tersebut di atas terkena dampak buruk akibat risiko-risiko unik tersebut.

Perseroan memulai kegiatan usaha perbankan syariah pada tahun 2004. Per tanggal 31 Desember 2013, Perseroan telah membuka 22 cabang syariah, 21 kantor cabang pembantu syariah dan 207 kantor layanan syariah dan Perseroan bermaksud untuk terus memperluas jaringan syariah Perseroan. Kegiatan usaha perbankan syariah memerlukan keahlian dan pengawasan yang berbeda dibandingkan dengan kegiatan usaha perbankan konvensional dan Perseroan telah membentuk dewan pengawas tersendiri untuk mengawasi kegiatan usaha ini. Pesaing Perseroan termasuk beberapa bank besar dengan kegiatan perbankan syariah yang telah mapan.

Ketidakmampuan Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha baru milik Perseroan pada bidang ini dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, likuiditas dan hasil kegiatan usaha Perseroan.

Dalam beberapa tahun ini, kegiatan usaha Perseroan telah tumbuh dengan pesat. Aset Perseroan telah tumbuh dari Rp111.748.593 juta pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp131.169.730 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Pertumbuhan tersebut akan memberikan tekanan terhadap kemampuan Perseroan untuk mengelola dan mengontrol risiko-risiko yang pernah terjadi dan risiko yang akan muncul di kemudian hari. Kemampuan Perseroan untuk mempertahankan pertumbuhan tergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengelola masalah-masalah penting seperti rekrutmen dan mempertahankan pekerja yang terampil, mempertahankan landasan program Teknologi Informasi yang efektif dan dapat diperbaharui terus menerus secara berkesinambungan, mengembangkan pengetahuan untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang timbul dan mempertahankan kualitas pelayanan nasabah yang tinggi. Ketidakmampuan untuk melakukan hal-hal tersebut di atas dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan kegiatan usaha Perseroan sehingga berakibat negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa yang akan datang.

b) Risiko Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan

Mayoritas saham Perseroan saat ini dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah secara historis mempengaruhi dan kemungkinan besar akan terus mempengaruhi strategi dan kegiatan usaha Perseroan. Pemerintah juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan mengendalikan badan usaha lainnya yang berada di bawah kontrol Pemerintah, yang beberapa diantaranya merupakan pesaing Perseroan dan Pemerintah dapat mengarahkan kesempatan yang ada kepada pesaing Perseroan atau lebih mengutamakan kepentingan mereka daripada Perseroan.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Pemerintah tidak akan melakukan pengendalian atas Perseroan dan tidak akan mempengaruhi kepentingan bisnis Perseroan atau pemegang saham minoritas Perseroan. Sebagai contoh, Pemerintah berwenang untuk menetapkan kebijakan dan persyaratan KPR bersubsidi. Apabila Pemerintah mengubah kebijakan dan persyaratan tersebut, hal tersebut dapat mempengaruhi Perseroan secara negatif. Walaupun secara historis pertumbuhan kredit Perseroan hanya terbatas pada kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan dan Perseroan yakin dapat menggantikan kredit bersubsidi dengan kredit tanpa subsidi, namun Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan tidak akan terkena dampak negatif apabila dikemudian hari terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan komposisi portofolio kredit Perseroan.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat menjadi independen dari Pemerintah sebagai pemegang saham Perseroan, atau walaupun Perseroan menjadi independen, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat melakukan tindakan independen tersebut secara efektif dalam membuat keputusan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan. Apabila Perseroan diharuskan bertindak untuk kepentingan Pemerintah dan kepentingan tersebut berbeda dari kepentingan Perseroan, maka tindakan Perseroan tersebut dapat berdampak secara negatif pada kondisi keuangan, likuiditas dan hasil usaha Perseroan, di mana akan membatasi kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif dan untuk mengembangkan kegiatan usaha Perseroan.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan Perseroan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan harus selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang dari waktu ke waktu terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan kondisi perbankan nasional. Di samping itu, Perseroan juga tunduk kepada peraturan yang mengatur Perseroan Terbatas, Peraturan BUMN, peraturan di bidang pasar modal (OJK dan Bursa Efek).

Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Perseroan yang terkait pada perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit yang terkait dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM); Kualitas Aset; Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset; Penyisihan Penghapusan Aset (PPA); Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); Posisi Devisa Neto (PDN), serta risiko strategis yang terkait dengan Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dan lain sebagainya. Ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi peraturan dan ketentuan dapat berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

B. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa risiko-risiko di atas adalah seluruh risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja , akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam laporannya bertanggal 21 Mei 2015 memberikan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1972. Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang- Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.

Pendirian Perusahaan Persero BTN dilakukan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara "PT Bank Tabungan Negara (Persero)" No. 136 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No.603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A ("Akta Pendirian").

Perseroan memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan ijin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir seluruh Anggaran Dasar dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.51 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No.AHU-AH.01.03-0926094 tanggal 21 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3495340.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 21 April 2015 ("**Akta PKR No.51/2015**"), yang berisikan mengenai penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dimana dilakukannya perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.25 tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No.AHU-AH.01.03-0932022 tanggal 13 Mei 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3504879.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 13 Mei 2015 ("**Akta PKR No.25/2015**") yang berisikan mengenai perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 anggaran dasar mengenai modal ditempatkan dan modal setor Perseroan.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang perbankan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Perseroan telah memiliki ijin-ijin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu:

1. Surat Menteri Keuangan No. B-49/MK/IV tanggal 29 Januari 1974 yang menunjuk Perseroan sebagai wadah pembiayaan proyek pembangunan perumahan rakyat dengan cara membiayai pembayaran berupa pinjaman kepada para pembeli rumah.
2. Surat Direksi Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989 yang memberikan izin kepada Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Mei 1989 untuk menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam kliring.
3. Surat Bank Indonesia No.23/674/UD/Adv tanggal 16 Januari 1991 *juncto* surat No. 23/675/UD/Adv tanggal 16 Januari 1991 yang memberikan Perseroan izin usaha untuk menjadi pedagang valuta asing yang berlaku sejak tanggal 16 Januari 1991 dan setiap waktu dapat dicabut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
4. Surat Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994 berkenaan dengan penunjukkan Perseroan menjadi Bank Devisa.
5. Surat Bank Indonesia No.22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989 mengenai pemberian izin kepada Perseroan sebagai Bank Umum.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak Perseroan didirikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 telah disampaikan pada informasi tambahan Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 yang diterbitkan tanggal 21 Maret 2013. Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Perseroan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Akta PKR No.51/2015 jo Akta PKR No.25/2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	6.353.999.999	3.176.999.999.500	60,13
2. Masyarakat			
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	4.213.720.500	2.106.860.250.000	39,87
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.567.720.500	5.283.860.250.000	100,00
Saham Dalam Portepel	9.910.711.500	4.955.355.750.000	

3. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.9 tanggal 13 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.AHU-23917.40.22.2014 tanggal 13 Agustus 2014 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan di bawah No.AHU-0081351.40.80.2014 tanggal 13 Agustus 2014 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.26 tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No.AHU-AH.01.03-0932027 tanggal 13 Mei 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3504886.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 13 Mei 2015 (**Akta PKR No.26/2015**), adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama *)	: Sukardi Rinakit
Komisaris Independen	: Amanah Abdulkadir
Komisaris Independen **)	: Kamaruddin Sjam
Komisaris Independen **)	: Catherinawati Hadiman
Komisaris Independen **)	: Arie Coerniadi
Komisaris	: Agung Kuswandono
Komisaris **)	: Lucky Fathul Aziz H.

*) Sukardi Rinakit telah mengundurkan diri dari jabatannya selaku komisaris utama Perseroan dengan berdasarkan surat pribadi Sukardi Rinakit tertanggal 1 Juni 2015 yang ditujukan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, Ibu Rini Soemarmo.

**) Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 24 Maret 2015 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Direksi:

Direktur Utama	: Maryono
Direktur	: Irman A. Zahiruddin
Direktur	: Mansyur Syamsuri Nasution
Direktur	: Iman Nugroho Soeko
Direktur	: Adi Setianto
Direktur	: Sis Apik Wijayanto
Direktur	: Sulis Usdoko
Direktur	: Oni Febriarto

Berdasarkan hasil Rapat Direksi tanggal 27 Maret 2015, Irman A. Zahiruddin telah ditunjuk selaku Direktur Kepatuhan (*Managing Director Risk, Compliance & Strategy*) dan telah dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan surat Perseroan No. 147/DIR/CSD/IV/2015 tanggal 6 April 2015.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:

KOMISARIS

Sukardi Rinakit, Komisaris Utama *)

*) Berdasarkan surat pribadi Sukardi Rinakit tertanggal 1 Juni 2015 yang ditujukan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, Ibu Rini Soemarno, dinyatakan bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatannya selaku komisaris utama Perseroan..



Amanah Abdulkadir, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 53 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Depok pada tahun 1986, meraih gelar Master of Business Administration dari University of Oregon Eugene, Amerika pada tahun 1990, dan meraih gelar Doctor of Philosophy Economic International dari Oklohoma State University, Amerika pada tahun 1998.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2012 sampai saat ini. Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, jabatan lainnya adalah Anggota Komite Informasi dan Risiko lembaga Penjamin Simpanan (2011 - 2012), Konsultan *Technical Assistance* Asian Development Bank (2012), Ketua Komite Audit dan Komisaris Independen PT Wijaya Karya Tbk (2007 - 2012), dan Staf khusus Kementerian BUMN (2007 - 2009).



Kamaruddin Sjam, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 68 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tanjungpura, Pontianak pada tahun 1972, dan meraih gelar Master of Management dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI, Jakarta pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 24 Maret 2015 sampai saat ini. Sebelum menjabat Komisaris Independen Perseroan, jabatan lainnya adalah anggota DPR Komisi XI (2009 – 2014), dan Direktur Pengawasan Instansi BPKP (2002 – 2007) .



Catherinawati Hadiman, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 50 tahun.

Meraih gelar Sarjana Administrasi Bisnis dari Universitas Atma Jaya pada tahun 1988 dan Sarjana Ekonomi/Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 24 Maret 2015 sampai saat ini. Selain menjabat Komisaris Perseroan, jabatan lainnya adalah sebagai *Managing Director* PT. Diaspora Saraswati Gemilang (2013 – sekarang), sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Bank CIMB Niaga (2009 – 2012) dan Direktur Corporate Banking CIMB Niaga (2008 – 2012).



Arie Coerniadi, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 47 tahun.

Meraih gelar Insinyur di Jurusan Teknik Elektro dari Universitas Indonesia pada tahun 1991.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 24 Maret 2015 sampai saat ini. Selain menjabat Komisaris Perseroan, jabatan lainnya adalah sebagai CFO PT Sarana Global Indonesia (2011 – 2015), sebelumnya *Vice President* NISP Sekuritas (2010 – 2015), *Group Head* Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2000 – 2014), dan *Vice President* Kustodian Sentral Efek Indonesia (1998 – 2000).



Agung Kuswandono, Komisararis

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 47 tahun.

Meraih gelar Sarjana di Jurusan Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1990 dan meraih gelar *Master of Science* dari *University Of Colorado*, Amerika pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Komisararis Perseroan sejak tahun 2012 sampai saat ini. Selain menjabat sebagai Komisararis Perseroan, jabatan lainnya adalah sebagai Direktur Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (2011 - saat ini), telah bergabung dalam Kementerian Keuangan sejak tahun 2011 dengan beberapa jabatan antara lain Direktur Fasilitas Kepabeanan (2010 - 2011), Direktur Teknis Kepabeanan (2008 - 2010), dan Kepala KPU BC (2007 - 2008).



Lucky Fathul Aziz H, Komisararis

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 58 tahun.

Meraih gelar Sarjana di Jurusan Peternakan dari Universitas Padjajaran pada tahun 1980 dan meraih gelar MA(COA) dari Boston University pada tahun 1985 serta gelar MS dari Universitas Hasanudin pada tahun 1991.

Menjabat sebagai Komisararis Perseroan sejak 24 Maret 2015 sampai saat ini. Selain menjabat Komisararis Perseroan, jabatan lainnya adalah sebagai Direktur Utama Dana Pensiun OJK (setingkat deputy Komisioner) (2015 – Sekarang), Deputy Komisioner Manajemen Strategis 1B OJK (2012 – 2014), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI (2010 – 2012), Kepala Perwakilan Bank Indonesia New York (2007 – 2010) dan Pemimpin Bank Indonesia / Koordinator Wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (2005 – 2007).

DIREKSI



Maryono, President Director

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 58 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro tahun 1981 dan memperoleh gelar MBA pada tahun 1998.

Menjabat sebagai Direktur Utama Bank BTN sejak 28 Desember 2012.

Sebelum menjadi Direktur Utama Perseroan, pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mutiara mulai November 2008 sampai dengan Desember 2012. Memiliki pengalaman berkarir di bidang Perbankan sejak tahun 1982 di Bank Pembangunan Indonesia sampai dengan tahun 1999. Pada tahun 2008 pernah menjabat sebagai Komisararis Utama di PT Mandiri Manajemen Investasi dan sebagai *Executive Vice President* di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.



Irman A. Zahiruddin, Managing Director Retail Funding & Distribution

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 51 tahun.

Memperoleh gelar AA Degree di Jurusan *General Business* tahun 1985 dari San Joaquin Delta College, Stockton, California, BA Degree tahun 1987 di Jurusan *General Business* di University of The Pacific, Stockton, California, MBA Degree tahun 1988 di Jurusan Finance & Investment dari Golden Gate University, San Fransisco, California.

Menjabat sebagai *Managing Director Retail Funding & Distribution* Perseroan sejak bulan Desember 2007 dan saat ini juga merangkap sebagai *Managing Director Mortgage & Consumer Lending* dan *Managing Director Commercial Banking*.

Sebelum menjadi Direktur Perseroan, pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Polyrama Propindo (Oktober 2007 – Desember 2007), Direktur Eksekutif di Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (PERBANAS) (Juli 2007 – Desember 2007), *Managing Director Consumer Group* di PT Bank Permata Tbk (2002 - 2006), *Representative Director* di GE Capital (1999 - 2002), *Senior Director Business Development* di GE Capital (1998), *Director of Quality Leader* di GE Capital (1998 - 1999), *Managing Director* di PT GE Astra Finance (1997 - 1998), *Chief Operating Officer* di PT GE Astra Finance (1994 - 1997), *Assistant Vice President Card Area Director* bagian Indonesia Timur di Citibank N.A. (1993 - 1994), *Assistant Vice President Card Area Manager* Surabaya di Citibank N.A. (1991 – 1993), *Manager Central Production Head* di Citibank N.A. (1990 – 1991), *Assistant Manager* di Citibank N.A. (1989 – 1990), *Management Development Program* (Februari 1989-Juli 1989).



Mansyur Syamsuri Nasution, Direktur *Managing Director Risk, Compliance & Strategy*

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 55 tahun.

Meraih gelar Sarjana di Jurusan Peternakan dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1981, dan meraih gelar *Master of Science* di Jurusan *Resources Economics* dari *Colorado State University*, Amerika pada tahun 1991.

Menjabat sebagai Direktur *Managing Director Risk, Compliance & Strategy* Perseroan sejak tahun 2012 sampai saat ini. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, jabatan lainnya adalah Presiden Komisaris Mandiri AXA General Insurance (2012 - saat ini), selain itu pernah bekerja di PT Bank Mandiri Tbk (1997 - 2012) dengan jabatan terakhir sebagai *EVP Coordinator - Consumer Finance*, dan Bank Bumi Daya (1983 - 1997) dengan jabatan terakhir sebagai *Professional Staff - Credit Portfolio*.



Iman Nugroho Soeko, Direktur

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 59 tahun.

Meraih gelar Insinyur Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1979 dan meraih gelar Master dari *Birmingham UK University* pada tahun 1989.

Jabatan terakhir adalah sebagai *Chief Executive* di Bank Mandiri (Europe) Ltd. (BMEL) pada tahun 2010 hingga 2013. Sejak tahun 1982 sampai dengan 1999 pernah bekerja di PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) dengan jabatan terakhir Wakil Kepala Urusan Keuangan & Jasa Bank dan kemudian sejak Agustus 1999 hingga April 2010 menduduki berbagai posisi jabatan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jabatan terakhir *Group Head International Banking & Capital Market Services Group* (IBCMS).



Adi Setianto, Direktur

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 54 tahun.

Meraih gelar Sarjana di Jurusan Akuntansi dari Universitas Narotama pada tahun 1989 dan meraih gelar MBA di Jurusan *Finance / Banking* dari *University of Drexel* pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 24 Maret 2015 sampai saat ini. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, jabatan lainnya adalah Direktur Jaringan dan Layanan Bank BNI (2014 - 2015), Direktur Tresuri dan IF Bank BNI (2010 - 2014), dan Pemimpin Divisi Jasa Keuangan dan Dana Institusi bank BNI (2008 - 2010).



Sis Apik Wijayanto, Direktur

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 53 tahun.

Meraih gelar Sarjanadi Jurusan Administrasi Niaga dari Universitas Brawijaya pada tahun 1988 dan meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Airlangga pada tahun 2007.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 24 Maret 2015 sampai saat ini. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, jabatan lainnya adalah Pemimpin Cabang Khusus pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta (2012 - 2014), Pemimpin Wilayah pada Bank BRI Kantor Wilayah Banjarmasin (2014), serta Pemimpin Wilayah pada Bank BRI Kantor Wilayah Jakarta 2 (2014 - 2015).



Sulis Usdoko, Direktur

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 55 tahun.

Meraih gelar Sarjana pada Jurusan Teknik Sipil dari Universitas Brawijaya pada tahun 1985 dan meraih gelar Master pada Jurusan Ekonomi/Manajemen dari Universitas Brawijaya pada tahun 2003

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 24 Maret 2015 sampai saat ini. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, jabatan lainnya adalah Kepala *Retail Funding & Services Division* pada Perseroan (2013 - 2015), Kepala *Consumer Funding & Services Division* pada Perseroan (2011 - 2013) dan Kepala *Information & Communication Technology Division* (2008 - 2011).



Oni Febriarto, Direktur

Meraih gelar Sarjana pada Jurusan Teknik Kimia dari Universitas Diponegoro pada tahun 1994 dan meraih gelar Master pada Jurusan Manajemen dari Sekolah Tinggi PPM Manajemen

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 24 Maret 2015 sampai saat ini. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, jabatan lainnya adalah Kepala *Small & Micro Lending Division* pada Perseroan (2013 – 2015) dan Kepala Cabang pada Perseroan (2012 – 2013).

Pengangkatan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan pemenuhan Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik *juncto* Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No. I-A.,, dimana berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.233/DIR/2015 tanggal 22 April 2015, Perseroan telah menunjuk Eko Waluyo sebagai Kepala Divisi Corporate Secretary.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 5. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisaris dibantu oleh komite-komite yaitu:

Komite Audit

Dalam rangka memenuhi ketentuan Surat Edaran Bapepam No.SE-03/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000 *juncto* Peraturan Bapepam No.IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit *juncto* Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 *juncto* Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut dengan telah dibentuk suatu komite audit berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. 35/KOM/BTN/IV/2015 tanggal 13 April 2015 perihal Susunan Keanggotaan Komite PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Amanah Abdulkadir *
Wakil Ketua : Sondang Gayatri
Anggota : Waldy Gutama

*) Efektif sejak penutupan RUPS tahunan Bank BTN tahun 2015 tanggal 24 Maret 2015

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit :

Waldy Gutama

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 59 tahun.

Meraih gelar Sarjana di STIA-LAN RI pada 1988 dan memperoleh gelar Magister Management dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – IWI Jakarta pada tahun 2000. Pelatihan yang telah diikutinya antara lain *Basel 2 Implementation in Bank Indonesia & Bank of Thailand* pada 2010, *Regulation & Supervision of Cooperatives Insurance Companies and Other Non Bank Financial Institution* (SEACEN Center) di Malaysia pada 1983.

Beberapa jabatan yang pernah dipegang dan masih dipegang antara lain:

- Anggota Komite Audit sejak 26 September 2013.
- Anggota Komite Audit Woory Bank sejak bulan Mei 2012 sampai dengan saat ini.
- Berkarir di Bank Indonesia sejak 1989 dengan jabatan terakhir Pengawas Bank Madya.

Sondang Gayatri

Wakil Ketua Komite Audit

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 57 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi Management pada tahun 1983 dan diikuti dengan berbagai pelatihan diantaranya Sertifikat Uji Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat IV pada 2012, Sertifikat Manajemen Risiko Tingkat 4 serta Sertifikasi Internasional (CWMA and IBI) pada 2011.

Beberapa jabatan yang pernah dipegang dan masih dipegang antara lain:

- Anggota Komite Audit BTN sejak 26 September 2013.
- CEO Region Wilayah 15 Jakarta Kemayoran sejak 1 September 2010 sampai dengan 31 Maret 2013.
- Aktif di BNI sejak 1982 sampai dengan Maret 2013 dengan jabatan terakhir sebagai Pemimpin Wilayah.

Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan surat Dewan Komisaris No. 35/KOM/BTN/IV/2015 tanggal 13 April 2015 perihal Susunan Keanggotaan Komite PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, susunan struktur organisasi Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Ketua : Amanah Abdulkadir
Anggota : Agung Kuswandono
Anggota : Achmadi
Anggota : Sri Widodo

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan surat Dewan Komisaris No. 35/KOM/BTN/IV/2015 tanggal 13 April 2015 perihal Susunan Keanggotaan Komite PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Komite Remunerasi dan Nominasi ditiadakan untuk sementara sampai ada dua lagi Komisaris Independen yang telah memenuhi syarat efektif. Fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi akan dilaksanakan langsung oleh Dewan Komisaris dengan bantuan dari pihak independen dan anggota dari pejabat BTN/ ex officio) seperti yang berlaku sekarang. Penyesuaian akan dilakukan ketika RPOJK tentang Tata RPOJK tentang Tata Kelola Yang Baik Dalam Pemberian Remunerasi Berdasarkan Kinerja dan Risiko Bagi Bank Umum telah menjadi POJK atau sebelumnya dan melalui pembahasan lanjutan setelah lebih banyak Komisaris yang aktif.

Komite Eksekutif

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas-tugasnya dan memfokuskan diskusi untuk pengambilan keputusan dan hal-hal lain yang penting dan strategis bagi Perseroan, Direksi telah membentuk beberapa Komite Eksekutif sebagai pendukungnya, antara lain:

a. Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan Ketetapan Direksi No.01/DIR/DPP/2010 tentang Komite Manajemen Risiko Perseroan tanggal 18 Januari 2010, maka susunan struktur organisasi komite manajemen risiko adalah sebagai berikut:

1. Koordinator : *Managing Director Risk, Compliance & Strategy*
2. Sekretaris : Kepala Divisi Manajemen Risiko
3. Anggota : a. Seluruh Direksi kecuali Direktur Utama
b. Seluruh Kepala Divisi

Tugas dan kegiatan Komite Manajemen Risiko adalah untuk memastikan bahwa Perseroan pada setiap waktu telah memiliki kerangka manajemen risiko yang lengkap serta efektif dan penuh kehati-hatian (*prudential principle*) untuk melindungi baik kepentingan pemegang saham maupun nasabah.

b. Komite Aset dan Liabilitas

Berdasarkan Peraturan Direksi No.34/PD/TRSD/2010 tentang *Asset Liability Committee* (ALCO) Perseroan tanggal 23 Desember 2010, maka susunan struktur personil ALCO adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Direktur Utama
2. Sekretaris merangkap anggota : Direktur *Financial, Strategic & Treasury*
3. Anggota : 1. Seluruh Direksi kecuali Direktur Utama
2. Seluruh Kepala Divisi

Komite ALCO bertugas untuk mengelola aset dan kewajiban Perseroan. Dalam aspek yang lebih luas, ALCO juga memiliki tugas mengelola likuiditas, pengelolaan perbedaan waktu (*management gap*), pengelolaan valuta asing, manajemen suku bunga, manajemen investasi dan pendapatan.

c. Komite Kebijakan Perkreditan dan Komite Kredit

Berdasarkan Peraturan Direksi No.10/PD/DKPB/2009 tentang Komite Kebijakan Perkreditan dan Komite Kredit Perseroan tanggal 27 Agustus 2009, maka susunan struktur Organisasi Komite Kebijakan Perkreditan adalah sebagai berikut:

1. Ketua	:	Direktur Utama
2. Wakil Ketua	:	Direktur <i>Housing & Commercial Banking</i>
3. Sekretaris	:	Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Bisnis
4. Anggota	:	1. Wakil Direktur Utama 2. Direktur <i>Financial, Strategic & Treasury</i> 3. Direktur <i>Mortgage & Consumer Banking</i> 4. Direktur <i>Risk, Compliance & Human Capital</i> 5. Kepala Divisi Pengelolaan Kredit 6. Kepala Divisi Pembinaan dan Penyelamatan Kredit 7. Kepala Desk Kepatuhan 8. Kepala Divisi Manajemen Kredit 9. Kepala Divisi Treasuri 10. Kepala Divisi Penelitian dan Perencanaan 11. Kepala Divisi Pemasaran Ritel;
		12. Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan
		13. Kepala Divisi Akuntansi

Sedangkan susunan struktur organisasi Komite Kredit:

1. Ketua	:	Direktur Utama
2. Wakil Ketua	:	Direktur <i>Housing & Commercial Banking</i>
3. Sekretaris	:	Kepala Divisi Pengelolaan Kredit dan Kepala Divisi Pembinaan dan Penyelamatan Kredit
4. Anggota	:	1. Wakil Direktur Utama 2. Direktur <i>Mortgage & Consumer Banking</i> 3. Direktur <i>Financial, Strategic & Treasury</i> 4. Kepala Divisi Pengelolaan Kredit 5. Kepala Divisi Pembinaan dan Penyelamatan Kredit 6. Kepala Divisi Treasuri 7. Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Bisnis

Komite Kebijakan Perkreditan dan Komite Kredit bertugas untuk memberikan pengarahan dan pertimbangan tentang kebijakan perkreditan Perseroan.

d. Komite Produk

Berdasarkan Peraturan Direksi No.04/DIR/DPRT/0202 tentang Komite Produk Perseroan tanggal 22 Februari 2002, maka susunan struktur Organisasi Komite Produk adalah sebagai berikut:

1. Ketua	:	Direktur <i>Mortgage & Consumer Banking</i>
2. Anggota	:	1. Seluruh Direksi, kecuali Direktur Utama 2. Seluruh Kepala Divisi

Komite Produk bertugas memberikan pengarahan dan pertimbangan atas rencana pengembangan produk Perseroan sehingga produk Perseroan yang akan dikeluarkan memenuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku serta mempunyai daya saing dan daya tarik terhadap kompetisi pasar.

e. Komite Teknologi

Berdasarkan Peraturan Direksi (PD) No.05/PD/ICTD/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi 18/PD/CMO/2011 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi (ITSteering Committee) tanggal 2 Juli 2014 maka susunan struktur Organisasi Komite Teknologi adalah sebagai berikut:

1. Ketua	:	Information and Technology Director (ex-officio). Dalam hal Presiden Director menghadiri Rapat KPTI, maka ketua KPTI adalah Presiden Director
2. Sekretaris	:	Information And Communication Technology Division Head(ex-officio).
3. Anggota Tetap	:	1. Managing Director Risk, Compliance and Strategy (ex-officio) 2. Managing Director Retail Funding & Distribution (ex-officio) 3. Managing Director Mortgage & Consumer Lending (ex-officio) 4. Risk Management Division Head (ex-officio) 5. Operation & Business Support Division Head (ex-officio) 6. Sharia Division Head (ex-officio) 7. Regional Office I Head (ex-officio)

3. Anggota Tidak Tetap	:	Anggota Tidak Tetap terdiri dari Direktur lainnya dan Division Head lainnya yang diundang berdasarkan keperluan

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi:

Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mencakup :

1. Rencana Strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Perseroan.

Dalam memberikan rekomendasi, Komite hendaknya memperhatikan faktor efisiensi, efektifitas serta hal-hal sebagai berikut :

- a. Rencana pelaksanaan (road-map) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. Road map terdiri dari kondisi saat ini (current state), kondisi yang ingin dicapai (future state) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai future state;
 - b. Sumber daya yang dibutuhkan;
 - c. Keuntungan / manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
 2. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank;
 3. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI. Komite juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian core Banking application, server production dan topologi jaringan;
 4. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek (project charter) yang disepakati dalam service level agreement. Komite hendaknya melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan direksi mengambil keputusan secara efisien;
 5. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank;
 6. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
 7. Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
- f. Komite Personalia
- Berdasarkan Peraturan Direksi No.15/PD/DSDM/2008 tentang Komite Personalia Perseroan tanggal 28 Juli 2008, maka susunan struktur Organisasi Komite Personalia adalah sebagai berikut:
1. Ketua : Direktur *Risk, Compliance & Human Capital*
 2. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
 3. Anggota :
 1. Kepala Divisi Audit Internal
 2. Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Bisnis
 3. Kepala Divisi Pembinaan dan Penyelamatan Kredit
 4. Kepala Divisi Pengelolaan Kredit
 5. Kepala Divisi Pemasaran Ritel
- Komite Personalia bertugas untuk menetapkan dan memutuskan strategi, kebijakan dan sistem pengelolaan SDM, kenaikan dan variabel imbal jasa, insentif dan kemaslahatan serta memantau dan mengawasi pelaksanaan program SDM dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SDM.

Piagam Audit dan Audit Internal

Perseroan Tbk dalam rangka menerapkan standar audit yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.KEP-496/BL/2008 beserta lampiran Peraturan No.IX.1.7 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum sebagai ukuran minimal yang harus dipatuhi oleh Bank sebagai perusahaan publik serta untuk memastikan terselenggaranya fungsi audit internal Bank yang efektif melalui kesamaan pemahaman dan dukungan komitmen mengenai visi, misi, struktur dan kedudukan, kewenangan, fungsi, tugas, tanggungjawab, independensi dan ruang lingkup pekerjaan audit internal Perseroan, maka Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menetapkan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*).

Piagam Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.1.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 03/DEKOM-DIR/BTN/IAD/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011 tentang "Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) PT Bank Tabungan Nasional (Persero) Tbk".

Piagam Audit Intern ini dimaksudkan sebagai pedoman standar yang memuat ukuran minimal tentang fungsi Audit Intern yang perlu diselenggarakan oleh Bank serta aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Internal. Piagam Audit Intern ini ditujukan pula untuk terciptanya kesamaan pemahaman dan landasan mengenai tingkat perneliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan Bank.

Hal-hal yang diatur dalam Piagam Audit Internal BTN adalah visi dan misi Internal Audit Division, struktur dan kedudukan Internal Audit Division dalam organisasi bank, ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan IAD, wewenang fungsi tugas dan tanggungjawab IAD, pernyataan dukungan dan independensi IAD, tanggung jawab *auditee*, kode etik dan persyaratan auditor internal, pertanggungjawaban dan pelaporan hasil audit, tindak lanjut hasil audit.

Divisi Audit Internal Perseroan dipimpin oleh Bapak Dadang Eka Jatnika sebagai Kepala Internal Audit Division, dibantu oleh, 1 orang *auditor coordination head*, 3 orang *department head*, 1 orang *audit superintendent*, 6 orang *senior associated auditor*, 9 orang *associated auditor*, 6 *senior auditor*, 39 orang *auditor*.

Tujuan adanya divisi ini adalah untuk menjadi mitra kerja yang independen, obyektif, profesional, terpercaya dan tanggap untuk mendukung tugas Direksi dan jajaran manajemen dalam usaha mencapai sasaran perusahaan dengan cara:

- i. Melaksanakan peran sebagai mitra strategis manajemen dalam memberikan nilai tambah pada proses bisnis bank melalui kegiatan audit dengan pendekatan konsultatif dan pro aktif;
- ii. Membantu manajemen mendapatkan penilaian yang obyektif dan berkualitas terhadap pelaksanaan kegiatan Bank;
- iii. Mendorong manajemen meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- iv. Mendorong efektifitas pengelolaan risiko (*risk management*) dan pengendalian internal Bank agar dapat memberi nilai tambah serta meningkatkan kualitas pengelolaan Bank dalam rangka mewujudkan bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar sehingga kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya dapat terpenuhi.

Divisi Audit Internal Perseroan bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan melaporkan setiap hasil audit yang bersangkutan dengan temuan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Dan juga dimungkinkan untuk melaporkan temuannya kepada Komisaris dan Komite Audit Perseroan agar dapat ditindak lanjuti untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan di kemudian hari.

4. SUMBER DAYA MANUSIA

Karyawan dan Sumber Daya Manusia

Human Capital Division bertugas untuk membuat kebijakan tentang manajemen sumber daya manusia, membuat pedoman untuk mengevaluasi kinerja karyawan dan menangani kompensasi serta manfaat lain bagi karyawan Perseroan. Divisi ini juga bertanggung jawab atas proses penerimaan, penempatan karyawan pada berbagai departemen, pelatihan dan pengembangan dan manajemen karir, serta pemeliharaan hubungan yang baik antara Perseroan dengan karyawan.

Sebagai bagian dari usaha Perseroan untuk memperkuat budaya perusahaan, Perseroan telah mengadopsi nilai-nilai budaya Perseroan BTN TERDEPAN GCG RUMAHKOE yaitu:

- *Profesionalism,*
- *Competitiveness,*
- *Integrity,*
- *Lean,*
- *Innovation,* dan
- *Strive for Excellence.*

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan Perseroan kepada Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 adalah sebesar Rp54.590 juta, Rp71.867 juta, dan Rp68.713 juta. Gaji dan kompensasi lainnya tersebut didasarkan pada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Komposisi Jumlah Pegawai

Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah pegawai Perseroan sebanyak 8.582 karyawan, tidak termasuk Direksi dan Komisaris Perseroan, terdiri atas pegawai tetap sebanyak 7.513 karyawan dan calon pegawai tetap sebanyak 1.069 karyawan. Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Tabel-tabel berikut dibawah ini menggambarkan komposisi pegawai tetap Perseroan berdasarkan masing-masing segmen.

Tabel Komposisi Pegawai Tetap Menurut Level Manajerial

Keterangan	31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010
Kepala Divisi dan kepala cabang utama	48	41	41	34	33
Wakil Kepala Divisi sampai dengan Kepala Bagian	359	345	275	490	171
Pembantu Pimpinan Cabang, Kepala Seksi	478	477	560	342	699
Staf	1.880	1.762	1.807	974	802
Karyawan	5817	5.386	4.523	3.295	2.526
Total	8.582	8.011	7.206	5.135	4.231

Tabel Komposisi Pegawai Tetap Menurut Klasifikasi Kantor

Keterangan	31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010
Kantor pusat	1.714	1.276	867	736	667
Cabang dan kantor cabang pembantu	6.868	6.735	6.339	4.399	3.564
Total	8.582	8.011	7.206	5.135	4.231

Tabel Komposisi Pegawai Tetap Menurut Jenjang Kepangkatan

Keterangan	31 Desember	
	2011	2010
Direktur Muda	2	1
Staf Utama	62	53
Staf Madya	763	700
Staf Muda	336	378
Pengatur	3.229	2.524
Pengatur Muda	743	575
Total	5.135	4.231

Keterangan	31 Desember		
	2014	2013	2012
22 – Executive Vice President (EVP)	5	6	-
21 – Senior Vice president (SVP)	16	24	26
20 – Vice President (VP)	27	25	22
19 – Vice President (VP)	41	46	40
18 – Assistance Vice President (AVP)	103	101	71
17 – Senior Manager (SM)	215	208	175
16 – Manager (M)	311	343	386
15 – Manager (M)	167	151	193
14 – Assistance Manager (AM)	941	782	129
13 – Assistance Manager (AM)	939	922	1.633
12 – Senior Staff (SS)	1.442	1.491	950
11 – Senior Staff (SS)	2.715	2.357	2.111
10 – Staff (S)	204	250	277
09 – Staff (S)	1.411	1.262	1.147
08 – Junior Staff (JS)	45	43	46
Total	8.582	8.011	7.206

Tabel Komposisi Pegawai Tetap Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010
Doktor	2	-	-	-	-
Pasca Sarjana	272	272	288	291	249
Sarjana	4.138	2.999	2.841	2.618	1.955
Sarjana Muda	1.903	2.207	1.586	1.166	866
SLTA	1.198	1.390	1.332	1.059	1.160
SLTP	-	1	1	1	1
Total	7.513	6.869	6.048	5.135	4.231

Tabel Komposisi Pegawai Tetap Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010
> 51 – 55 tahun	577	538	414	424	344
> 46 – 50 tahun	764	780	814	670	806
> 41 – 45 tahun	1.134	1.207	1.128	1.136	855
> 36 – 40 tahun	140	243	458	738	1.007
> 31 – 35 tahun	554	452	329	216	182
> 26 – 30 tahun	2.597	1.978	1.465	985	686
> 21 – 25 tahun	1.747	1.671	1.440	966	351
Total	7.513	6.869	6.048	5.135	4.231

Pegawai Perseroan menerima paket kompensasi yang mencakup gaji pokok, bonus, cuti tahunan, tunjangan hari tua dan program pensiun, kredit karyawan dengan bunga yang lebih rendah (termasuk kredit perumahan, mobil dan kredit untuk tujuan lain-lain), asuransi kesehatan dan untuk karyawan di posisi senior tertentu mendapat tunjangan rumah dan transportasi. Skema bonus yang diberikan Perseroan terdiri atas 3 komponen: (i) bonus untuk karyawan dengan kinerja terbaik, (ii) bonus dengan persentase tertentu berdasarkan keuntungan/laba dan (iii) insentif yang dibayarkan tengah-tahunan berdasarkan beban yang dianggarkan yang didasarkan pada kinerja korporasi dan individu. Karyawan Perseroan yang sudah bekerja sebelum September 2004, fasilitas kesehatan ditanggung secara penuh oleh Perseroan sedangkan karyawan yang diterima sejak tahun 2004, ditanggung oleh Perseroan melalui program asuransi kesehatan

PT Askes (Persero). Sesuai dengan SE No.11/DIR/HCD/2013 tanggal 31 Mei 2013 index 184/P/HC-REW/2011 tentang Bantuan Pengobatan Pegawai Perseroan bahwa fasilitas kesehatan seluruh pegawai dan calon pegawai serta keluarga pegawai ditanggung langsung oleh Perseroan. Dalam hal fasilitas sosial yang diterima karyawan Perseroan, upah yang diterima karyawan Perseroan telah sesuai dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) yang berlaku.

Perseroan memiliki dua program pensiun untuk karyawan. Karyawan Perseroan yang sudah bekerja sebelum September 2004 akan diberikan manfaat pensiun yang dikelola oleh Yayasan Dana Pensiun - Perseroan sedangkan karyawan yang bekerja pada Perseroan setelah September 2004 ditanggung oleh dana iuran pensiun yang dikelola oleh Lembaga Keuangan dan Dana Pensiun - BNI. Rasio kontribusi untuk program pensiun adalah 1:3 yang berarti 25,0% berasal dari gaji karyawan dan 75,0% dari Perseroan.

Seluruh pegawai adalah anggota dari serikat pekerja. Hubungan antara Perseroan dengan pegawai dan serikat pekerja sangat baik yang ditandai dengan tidak adanya pemogokan kerja dari karyawan selama ini.

Pelatihan dan Pengembangan

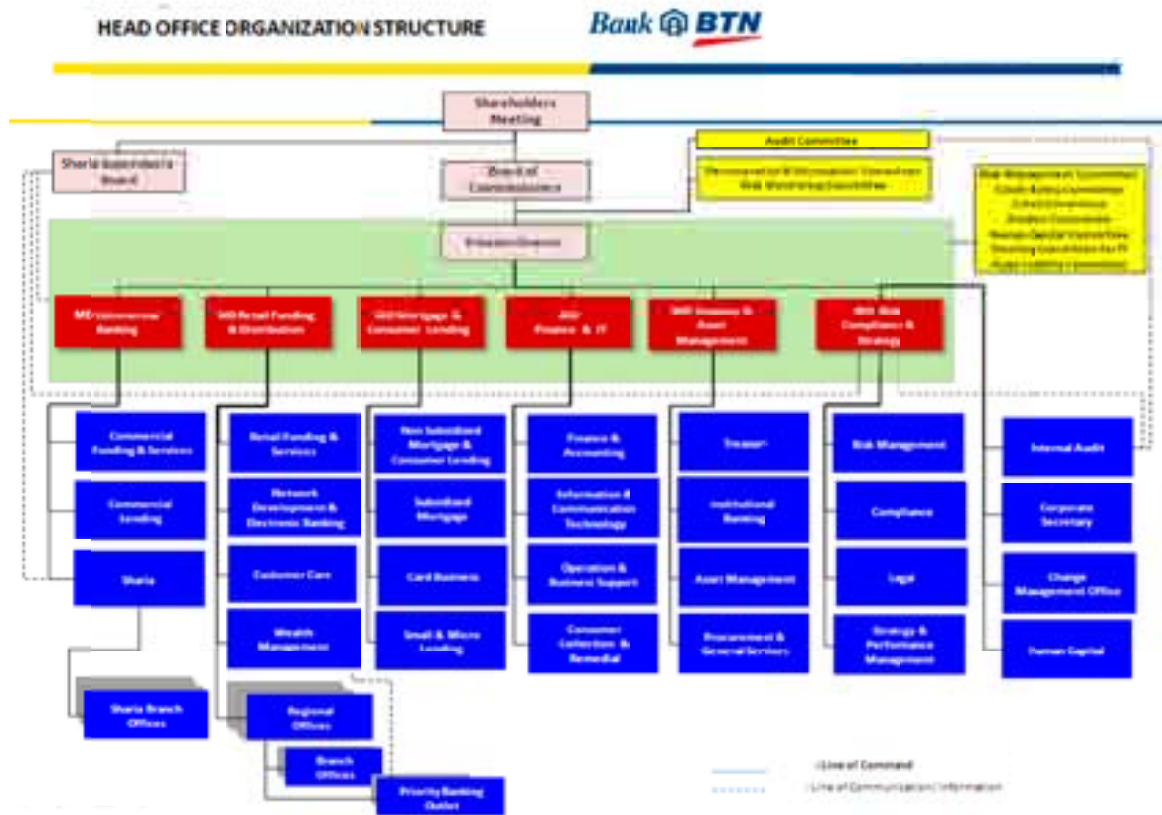
Perseroan menawarkan berbagai macam program pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan lama, yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan (*training need analysis*). Misalnya, Perseroan menawarkan pelatihan manajemen, pelatihan atas keahlian teknis dasar, pelatihan tentang produk, operasional dan jasa Perseroan dan pelatihan pengembangan pribadi yang dimaksudkan untuk mengembangkan efektivitas individu.

Tabel dibawah ini menggambarkan program-program pelatihan yang diberikan oleh Perseroan dan jumlah peserta untuk setiap program per tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012.

Jenis Pogram	Jumlah Peserta per 31 Desember		
	2014	2013	2012
Pendidikan Karir	306	4.416	2.505
Pendidikan Teknis	11.638	13.091	13.375
Pendidikan yang Berhubungan dengan Bisnis		301	155
Pendidikan Akademis	-	-	20
Lainnya	1.535	4.043	5
Total	13.479	21.851	16.060

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Perseroan saat ini digambarkan dalam diagram berikut:



5. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi. Transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi tersebut dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, kecuali untuk kredit yang diberikan pada para karyawan kunci, yang diberikan dengan jangka waktu berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan tingkat suku bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011, dan 2010, adalah masing-masing sebesar 6,31%; 5,71%; 5,74%; 8,10%, dan 7,30% per tahun dengan pembayaran melalui pemotongan gaji setiap bulan. Kredit yang diberikan kepada Direksi dan Karyawan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp39.903 juta.

Berikut adalah transaksi dengan pihak terafiliasi karena hubungan kepemilikan dan/atau pengelolaan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 2014:

Keterangan	Nilai Transaksi (Rp juta)	Persentase terhadap akun terkait
Aset	8.602.222	5,95% terhadap total aset
Liabilitas	55.750.035	42,12% terhadap total liabilitas
Pendapatan bunga dan bagi hasil	505.987	3,95% terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil
Beban bunga dan bonus	1.833.474	24,97% terhadap total beban bunga dan bonus
Komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif	82.573	2,66% terhadap total beban bunga dan bonus

6. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian penting yang dibuat Perseroan dengan pihak ketiga, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia

- a. Perjanjian Pinjaman Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS/RS Tahun Anggaran 1999/2000) No.RDI-376/DP3/1999 tanggal 20 Desember 1999 *juncto* Persetujuan Perubahan terhadap Perjanjian No.AMA-121/RDI-376/DP3/2001 tanggal 30 Mei 2001.
Pinjaman senilai maksimal Rp321.158.648.686,- ditujukan untuk pembiayaan program Pembiayaan Program Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPR-RSS) dan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPR-RS) Tahun Anggaran 1999/2000 dengan jangka waktu 15 tahun termasuk masa tenggang 3 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian.
- b. Perjanjian Pinjaman Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS/RS Tahun Anggaran 2000 No.RDI-391/DP3/2001 tanggal 20 Pebruari 2001.
Pinjaman senilai maksimal Rp437.459.466.700,- ditujukan untuk pembiayaan program Pembiayaan Program Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPR-RSS) dan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPR-RS) Tahun Anggaran 2000 (April sampai Desember 2000) dengan jangka waktu 15 tahun termasuk masa tenggang 3 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian.
- c. Perjanjian Pinjaman Dalam Rangka Penyediaan Dana Tambahan Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS/RS Tahun Anggaran 2000) No.RDI-392/DP3/2001 tanggal 30 Mei 2001.
Pinjaman senilai maksimal Rp167.221.250.000,- ditujukan untuk pembiayaan program Pembiayaan Program Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPR-RSS) dan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPR-RS) Tahun Anggaran 2000 (April sampai Desember 2000) dengan jangka waktu 15 tahun termasuk masa tenggang 3 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian.

2. Perjanjian dengan Bank Indonesia

Perjanjian	Jumlah Pinjaman	Jangka Waktu
No.32/213/UK,Indek No.0004-KPR, tanggal 12 Mei 1999 untuk pembiayaan KPR jenis rumah sederhana dan rumah sangat sederhana tahun 1999	Rp380.029.000.000,-	21 tahun
No.29/108/UK/Pmk2,Indek No.0001, tanggal 12 Agustus 1996 untuk pembiayaan kredit pemilikan kavling siap bangun/rumah sangat sederhana dan KPR jenis rumah sederhana <i>juncto</i> Perjanjian Tambahan No.1/29/108/UK/Pmk2 pada Perjanjian tanggal 12 Nopember 1996 <i>juncto</i> Perjanjian Tambahan No.2/29/108/UK/Pmk2 pada Perjanjian tanggal 7 Maret 1997	Rp272.910.395.250,- untuk KPR rumah sangat sederhana dan Rp270.290.223.250,- untuk KPR rumah sederhana	20 tahun
No.31/303/UK,Indek No.0003-KPR, tanggal 16 Juli 1998 untuk pembiayaan KPR rumah sangat sederhana dan KPR jenis rumah sederhana <i>juncto</i> Perjanjian Tambahan No.1/31/303/UK, pada Perjanjian tanggal 7 Oktober 1998 <i>juncto</i> Perjanjian Tambahan No.2/31/303/UK pada Perjanjian tanggal 3 Maret 1999 <i>juncto</i> Perjanjian Tambahan No.3/31/303/UK pada Perjanjian tanggal 10 Juni 1999	Rp575.432.685.325,-	20 tahun
No.30/135/UK, Indek No.0002-KPR, tanggal 19 Mei 1997 untuk pembiayaan KPR rumah sangat sederhana dan KPR jenis rumah sederhana <i>juncto</i> Perjanjian Tambahan No.1/30/135/UK, pada Perjanjian tanggal 8 Juli 1997 <i>juncto</i> Perjanjian Tambahan No.2/30/135/UK pada Perjanjian tanggal 24 Oktober 1997 <i>juncto</i> Perjanjian Tambahan No.3/30/135/UK pada Perjanjian tanggal 31 Oktober 1997 <i>juncto</i> Perjanjian Tambahan No.4/30/135/UK pada Perjanjian tanggal 22 Januari 1998 <i>juncto</i> Perjanjian Tambahan No.5/30/135/UK pada Perjanjian tanggal 7 Mei 1998 <i>juncto</i> Perjanjian Tambahan No.6/30/135/UK pada Perjanjian tanggal 30 Juni 1998	Rp683.735.799.950,-	20 tahun
No.32/213/UK,Indek No.0004-KPR, tanggal 12 Mei 1999 untuk pembiayaan KPR rumah sangat sederhana dan KPR jenis rumah sederhana	Rp380.029.000.000,-	21 tahun

3. Perjanjian Terkait Dengan Kegiatan Perbankan

- a. Perjanjian dengan PT Master System Infotama ("MSI") No.85/PKS/DIR/2010 tanggal 21 September 2010.
Perseroan menunjuk MSI untuk melaksanakan Pekerjaan Sewa 200 (dua ratus) Unit mesin ATM *Merk* Diebold opteva peruntukan Perseroan. Perseroan bermaksud menyewa 200 unit mesin ATM *Merk* Diebold dari PT MSI dengan total sewa mesin ATM 5 tahun adalah Rp 29.100.000.000,- dengan jangka waktu perjanjian berlaku selama 5 tahun sejak ditandatanganinya berita acara masa sewa

- b. Perjanjian dengan PT Master System Infotama ("MSI") No.10/PKS/CEBD/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011.
 Perseroan menunjuk MSI untuk melaksanakan Pekerjaan Sewa 500 (lima ratus) Unit mesin ATM, Merk Diebold peruntukan Perseroan. Perseroan bermaksud menyewa 500 unit mesin ATM Merk Diebold dari PT MSI dengan total sewa mesin ATM 5 tahun adalah Rp. 59.990.000.000,- dengan jangka waktu perjanjian berlaku selama 5 tahun sejak ditandatanganinya berita acara masa sewa
- c. Perjanjian dengan PT Sigma Cipta Caraka ("SCC") No.19/PKS/CEBD/IX/2012 tanggal 10 September 2012
 Perseroan menunjuk SCC untuk melaksanakan Pekerjaan Sewa 262 (dua ratus dua) Unit mesin ATM, Merk Wincor Nixdorf peruntukan Perseroan. Perseroan bermaksud menyewa 262 unit mesin ATM Merk Wincor Nixdorf dari PT Sigma Cipta Caraka dengan total sewa mesin ATM 5 tahun adalah Rp. 30.625.000.000,- dengan jangka waktu perjanjian berlaku selama 5 tahun sejak ditandatanganinya berita acara masa sewa
- d. Perjanjian dengan PT Insan Teknologi Semesta ("ITS") No.20/PKS/CEBD/IX/2012 tanggal 10 September 2012
 Perseroan menunjuk ITS untuk melaksanakan Pekerjaan Sewa 10 (sepuluh) Unit mesin ATM Non Tunai, Merk Wincor Nixdorf peruntukan Perseroan. Perseroan bermaksud menyewa 10 unit mesin ATM Non Tunai Merk Wincor Nixdorf dari PT Insan Teknologi Semesta dengan total sewa mesin ATM 5 tahun adalah Rp.840.000.000,- dengan jangka waktu perjanjian berlaku selama 5 tahun sejak ditandatanganinya berita acara masa sewa.
- e. Perjanjian dengan PT Intikom Berlian Mustika ("IBM") No.18/PKS/CEBD/IX/2012 tanggal 10 September 2012
 Perseroan menunjuk IBM untuk melaksanakan Pekerjaan Sewa 10 (sepuluh) Unit mesin CDM, Merk IBM peruntukan Perseroan. Perseroan bermaksud menyewa 10 unit mesin CDM Merk IBM dari PT Insan Teknologi Semesta dengan total sewa mesin CDM 5 tahun adalah Rp.2.880.000.000,- dengan jangka waktu perjanjian berlaku selama 5 tahun sejak ditandatanganinya berita acara masa sewa
- f. Perjanjian dengan PT Sigma Cipta Caraka ("SCC") No.01/NEBD/PKS/ND/X/2013 tanggal 20 September 2013
 Perseroan menunjuk SCC untuk melaksanakan Pekerjaan Sewa 500 (lima ratus) Unit mesin ATM, Merk Wincor Nixdorf peruntukan Perseroan. Perseroan bermaksud menyewa 500 unit mesin ATM Merk Wincor Nixdorf dari PT Sigma Cipta Caraka ("SCC") dengan total sewa mesin ATM 5 tahun adalah Rp.71.100.000.000,- dengan jangka waktu perjanjian berlaku selama 5 tahun sejak ditandatanganinya berita acara masa sewa.

4. Perjanjian Kredit dari Pihak Swasta

Perjanjian dengan PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.09 tanggal 7 Desember 2011, yang dibuat dihadapan Siti Rayhana, SH, Notaris di Kabupaten Tangerang, *juncto* Perubahan Atas Perjanjian Kredit No 311/Add-KCK/2013 tanggal 16 Desember 2013. Fasilitas *Time Loan* ini bersifat *revolving* sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Fasilitas ini akan disalurkan oleh Perseroan untuk fasilitas Kredit Pemilikan Rumah bagi konsumen, dengan bunga sebesar 8,75% per tahun, yang berlaku sampai dengan 7 Desember 2015.

5. Perjanjian Terkait dengan Pihak Lain

- a. Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU)
 Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit / Pembiayaan Atas Kredit / Pembiayaan Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah No.120/PKS/ DIR/2007 tanggal 1 Nopember 2007. SPU memberikan jaminan terhadap kredit/Pembiayaan untuk usaha produktif (investasi (KI) atau modal kerja (KMK)) yang mendukung semua sektor ekonomi yang layak untuk dibiayai berdasarkan azas perkreditan/Pembiayaan yang sehat yang tidak dibiayai oleh fasilitas kredit/pembiayaan bank lain yang dibuktikan dengan BI checking kecuali untuk kredit / pembiayaan sampai Rp50.000.000,-. Pembiayaan disini adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Perjanjian ini berakhir berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- b. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
 - Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Pembiayaan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) No. 012/PP/SMF-BTN/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013. SMF memberikan refinancing atas kredit pemilikan rumah yang disalurkan BTN dengan jumlah Rp500 miliar dengan bunga 7,60% per tahun yang berlaku sampai tanggal 20 Juni 2018.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) terkait perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga, yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham dan obligasi.

7. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara tata usaha negara, arbitrase, pajak maupun perkara kepailitan, namun Perseroan sedang terlibat dalam beberapa perkara perdata baik sebagai tergugat maupun turut tergugat, yang berada di wilayah kantor-kantor cabang Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan terlibat dalam 21 perkara perdata dan 1 perkara hubungan industrial yang sedang dalam proses di badan peradilan di Indonesia, keterangan mengenai perkara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perkara Perdata

No	No. Perkara	Posisi Perseroan	Pihak Lawan	Materi Perkara	Nilai Gugatan (Rp)	Status Perkara
1	97/Pdt.G/2014/PN.Bks	Tergugat	M. Sardi Prasetyo, MBA	PMH	Materiil 15.000.000.000,00,- Immateriil 20.000.000.000,00,-	Tingkat I
2	573/Pdt.G/2012/PN.JktPst	Tergugat	PT Bina Ardi Abadi	PMH	1.980.000.000,-	Tingkat I
3	175/PDT.G/2014/MLG	Tergugat 2	Rosuli Hambali	PMH	Materiil 86.000.000,00,- Immateriil 5.000.000.000,00,-	Tingkat I
4	85/Pdt.G/2013/PN.Yk. Ttg	Tergugat 1	PT Prima Daya Mandiri	PMH	14.500.000.000,-	Banding
5	205/Pdt.G/2013/PN.JktPst	Tergugat	Arifah Soeryono	PMH	40.000.000.000,-	Tingkat I
6	505/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst	Tergugat	Mario Joseph Eduardus Sjahrudin	PMH	182.000.000.000,-	Banding
7	28/Pdt.G/2012/PN.BB	Tergugat	Meddy Marcella Mamesah	PMH	Tidak ada	Banding
8	119/Pdt.G/2011/PN.Bwi	Tergugat	Nelya Dewi Kartiningtyas	PMH	0,-	Banding
9	672/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel	Tergugat	Prof Dr Soebagio	PMH	750.000.000,-	Banding
10	117/Pdt.G/2011/PN.Pdg	Tergugat	Hafni	PMH	8.000.000,-	Banding
11	251/Pdt.G/2009/PN.Bks	Tergugat	Florentina cs	PMH	0,-	Kasasi
12	03/Pdt.G/2015/PN.Bpp	Tergugat	Rahayu Juairiya	PMH	600.000.000,-	Tingkat I
13	98/Pdt/2007/Pdt.G/PT.Pdg	Tergugat	Gus Hefni Reni dkk	PMH	0,-	Kasasi
14	328/Pdt.G/2012/PA.Btl	Tergugat I	P-I: Budi Legowo,SP P-II : Akhadina N	PMH	400.000.000,-	Kasasi
15	377/Pdt.G/2011/PN.Bdg	Tergugat	Bank Jakarta (Pemberesan)	Wanprestasi	6.000.000.000,-	Banding
16	29/Pdt.G/2002/PN.Prm.	Tergugat	Drs. Sofyan Manan	PMH	132.618.086,-	Kasasi
17	3041/Pdt.G/2001/PN.Sby	Tergugat	Nyoman Sukanada / Luh Supeni	PMH	91.000.000,-	Kasasi
18	45/Pdt.G/2005/PN.Crb	Tergugat	Ny Hj Sairah	PMH	0,-	Kasasi
19	772/Pdt.G/2002/PN.Sby	Tergugat	PT Unbuttonnindo	PMH	5.900.000.000,-	Kasasi
20	31/Pdt.G/2005/PN.PL	Tergugat	Diostrhenes MM	PMH	1.580.000,-	Kasasi
21	14/Pdt.G/2013/PN.WT	Tergugat 1	P-I: Budi Legowo,SP P-II : Akhadina N	PMH	100.000.000,-	Kasasi

PMH = Perbuatan Melawan Hukum

2. Perkara Hubungan Industrial

No	No. Perkara	Posisi Perseroan	Pihak Lawan	Materi Perkara	Nilai Gugatan (Rp)	Status Perkara
1	48/Pdt.Sus-PHI/G/2014/ PN.Smg	Tergugat	Dicky Usriyanto	Pemutusan Hubungan Kerja	Tidak ada	Tingkat I

Perkara yang sedang dihadapi Perseroan tersebut berdasarkan substansi gugatan tidak mempunyai pengaruh negatif secara signifikan/material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat somasi dari pihak ketiga yang berpotensi menjadi perkara.

Perseroan menyatakan bahwa seluruh perkara material telah diungkapkan dan tidak ada lagi perkara material yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan merupakan pemberi kredit perumahan terbesar di Indonesia dari segi total jumlah kredit perumahan dan merupakan bank terbesar ke-9 di Indonesia dari segi jumlah aset (berdasarkan data Bank Indonesia per 31 Desember 2014). Kredit perumahan yang dimiliki Perseroan adalah sebesar Rp102.614 miliar per tanggal 31 Desember 2014, yang mewakili sekitar 25,00% dari jumlah seluruh kredit perumahan di Indonesia (berdasarkan data yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan diolah oleh Perseroan).

Per tanggal 31 Desember 2014, Perseroan memiliki total aset sebesar Rp144.575.961 juta, termasuk kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - neto sejumlah Rp114.339.226 juta serta Rp106.470.677 juta simpanan dari nasabah. Per tanggal 31 Desember 2014 kredit perbankan yang berhasil disalurkan sebesar Rp3.707 Triliun, naik 11,64% dibandingkan periode yang sebelumnya yang meraih Rp3.320 Triliun.

Perseroan memiliki tujuan untuk mempertahankan posisi Perseroan sebagai bank yang terkemuka dalam pembiayaan kredit perumahan serta untuk memberikan produk dan jasa yang terbaik kepada nasabah. Saat ini Perseroan mendukung program Pemerintah yang akan membangun 1 juta rumah rakyat, dengan adanya program ini merupakan peluang bagi Perseroan untuk menunjukkan kapasitasnya, khususnya dalam penyaluran KPR Subsidi maupun KPR Non Subsidi.

Walaupun pada sejarahnya fokus Perseroan dititikberatkan pada pemberian kredit perumahan, saat ini Perseroan sedang mengembangkan portofolio kredit sehingga persentase kredit non-perumahan terhadap total kredit Perseroan mengalami peningkatan, dan juga meningkatkan persentase kredit perumahan serta kredit lainnya pada peminjam yang memiliki kemampuan lebih. Walaupun secara historis deposito nasabah merupakan mayoritas pendanaan Perseroan, Perseroan juga telah menerbitkan obligasi sejak tahun 1989 dan pada tahun 2009 Perseroan menerbitkan sekuritisasi aset perumahan pertama di Indonesia untuk membantu mendiversifikasi sumber pendanaan Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2014, Perseroan telah melakukan sekuritisasi melalui KIK EBA sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu sekuritisasi pertama sejumlah Rp111.111 juta dengan peringkat *Aaa_id* dari PT Moody's Indonesia, sekuritisasi kedua sejumlah Rp391.305 juta dengan peringkat *idAAA* dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), sekuritisasi ketiga sejumlah Rp750.000 juta dengan peringkat *idAAA* dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), sekuritisasi keempat sejumlah Rp703.450 juta dengan peringkat *idAAA* dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), sekuritisasi kelima sejumlah Rp1.000.000 juta dengan peringkat *idAAA* dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), sekuritisasi keenam sejumlah Rp1.000.000 juta dengan peringkat *idAAA* dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), sekuritisasi ketujuh sejumlah Rp1.500.000 juta dengan peringkat *idAAA* dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

2. KEBIJAKAN UMUM PERSEROAN DAN MANAJEMEN

Sebagai landasan kerja operasional yang akan digunakan dalam usaha mencapai visi dan misi Perseroan, maka Direksi menetapkan arah kebijakan umum Perseroan dan Manajemen, yaitu Transformasi bisnis, budaya kerja dan infrastruktur yang didukung oleh implementasi GCG untuk pencapaian bisnis yang berkualitas Untuk menunjang hal tersebut, telah disusun fokus bisnis dan inisiatif utama yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan program kerja dan anggaran tahun 2015.

Melalui kerja keras serta komitmen maupun kebersamaan seluruh jajaran manajemen dan karyawan, Perseroan terus berupaya untuk dapat meningkatkan kinerjanya di masa mendatang sehingga kebutuhan nasabah dapat terpenuhi di tengah persaingan perbankan yang semakin kompetitif.

3. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Layanan Perseroan terdiri atas tiga bagian, *consumer banking*, *commercial banking* dan perbankan Syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, Perseroan menyediakan pinjaman, pendanaan dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut. Perseroan telah mengimplementasikan struktur organisasi baru pada awal tahun 2010, di mana Perseroan memiliki 3 segmen usaha berbeda, yaitu segmen *consumer*, *commercial* dan Syariah, di mana setiap segmen akan fokus dalam pemberian pinjaman, pendanaan, serta jasa dalam bisnis utama masing-masing.

Layanan *consumer banking* Perseroan termasuk kredit perumahan, apartemen dan kredit lainnya kepada individu. Meskipun secara historis Perseroan berfokus pada kredit perumahan kepada nasabah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, saat ini Perseroan sedang meningkatkan persentase kredit perumahan dan kredit lainnya kepada para nasabah dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. Perseroan juga menawarkan produk pendanaan seperti giro, tabungan dan deposito berjangka.

Layanan *commercial banking* Perseroan termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit komersial lainnya, serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Perseroan juga menawarkan produk pendanaan seperti giro, tabungan dan deposito berjangka.

Grup Perbankan Syariah Perseroan menawarkan produk jasa, pembiayaan dan pendanaan komersial maupun konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Tabel berikut menunjukkan perkembangan posisi jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun Perseroan:

Sumber Dana	31 Desember									
	2014		2013		2012		2011		2010	
	Rp juta	Δ (%)	Rp juta	Δ (%)	Rp juta	Δ (%)	Rp juta	Δ (%)	Rp juta	Δ (%)
Rupiah										
Tabungan	25.230.736	7,90	23.383.447	11,99	20.879.423	44,89	14.410.554	36,06	10.591.260	21,18
Tabungan Wadiah dan Mudharabah	937.178	9,68	854.446	29,27	661.002	63,07	405.359	46,67	276.367	37,74
Jumlah Tabungan	26.167.914	7,96	24.237.893	12,52	21.540.425	45,39	14.815.913	36,33	10.867.627	21,55
Giro	21.771.807	21,42	17.931.186	43,64	12.483.320	0,15	12.464.174	159,28	4.807.284	(33,48)
Giro Wadiah	1.421.418	23,04	1.155.231	51,87	760.694	75,22	434.125	214,08	138.223	28,33
Deposito Berjangka	50.467.082	4,57	48.262.577	16,26	41.512.269	33,85	31.015.163	5,12	29.504.785	29,62
Deposito Berjangka Mudharabah	6.388.861	39,41	4.582.900	5,72	4.334.756	45,60	2.977.115	49,58	1.990.320	74,80
Simpanan dari bank lain	1.179.269	328,42	275.257	(61,05)	706.703	(10,88)	792.970	42,04	558.271	10,60
Surat Berharga yang diterbitkan - neto	8.519.884	(3,59)	8.836.711	23,82	7.136.776	31,23	5.438.382	31,36	4.139.934	28,49
Sub-Jumlah	115.916.235	10,10	105.281.755	19,00	88.474.943	30,23	67.937.842	30,63	52.006.444	18,70
Mata uang asing										
Giro	229.393	670,32	29.779	9,43	27.213	(89,17)	251.288	9,89	228.668	657,13
Deposito Berjangka	24.202	200,42	8.056	(13,43)	9.306	(23,95)	12.237	33,88	9.140	(1,35)
Simpanan dari bank lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Jumlah	253.595	570,27	37.835	3,60	36.519	(86,14)	263.525	10,81	237.808	84,75
Jumlah	116.169.830	10,30	105.319.590	18,99	88.511.462	29,78	68.201.367	30,54	52.244.252	18,99

Tabel berikut menunjukkan perkembangan posisi kredit (tidak termasuk piutang/pembiayaan syariah) yang telah disalurkan Perseroan:

Jenis Kredit	31 Desember									
	2014		2013		2012		2011		2010	
	Rp juta	Δ (%)	Rp juta	Δ (%)	Rp juta	Δ (%)	Rp juta	Δ (%)	Rp juta	Δ (%)
A. Kredit Perumahan	95.956.065	17,12	81.931.206	22,75	66.744.724	25,22	53.302.180	17,47	45.375.222	22,00
1. Consumer Loan	83.021.519	16,45	71.294.069	22,81	58.050.827	24,48	46.632.935	16,56	40.006.709	19,00
1.1. KPR Subsidi	32.667.989	14,44	28.545.837	9,20	26.140.790	7,33	24.356.467	15,08	21.165.053	12,00
KPR RSH KLBI	645.896	2.697,42	23.089	(38,32)	37.436	(97,35)	1.414.342	(15,21)	1.668.151	(11,00)
KPR RSH APBN	9.892.556	123.975,71	7.973	(27,47)	10.993	(99,93)	16.554.663	(10,87)	18.574.563	12,00
KPR Sejahtera	22.129.537	(22,39)	28.514.775	0,09	26.092.361	308,49	6.387.462	592,53	922.339	100,00
1.2. KPR Non Subsidi	42.419.932	18,20	35.887.862	37,52	26.097.116	45,87	17.890.101	18,67	15.075.815	26,00
KPR Komersial (KGU)	41.482.245	24,69	33.269.526	38,86	23.959.776	38,64	17.282.521	19,11	14.509.481	26,00
KPR Ruko	813.906	(67,54)	2.507.169	22,70	2.043.294	281,04	536.235	6,95	501.382	29,00
Kredit Swagriya	121.601	9,39	111.167	18,21	94.046	34,20	70.080	9,04	64.268	31,00
Kredit Griya Sembada	2.180	100,00	-	-	-	(100,00)	1.265	84,94	684	3,00
1.3. Non KPR	7.933.598	15,64	6.860.370	18,02	5.812.921	32,52	4.386.367	16,48	3.765.841	31,00
Kredit Griya Multi	7.412.552	14,91	6.450.585	17,20	5.503.711	32,49	4.154.195	15,01	3.611.957	29,00
Pinjaman Uang Muka – Bapertarum	28.289	(92,37)	371.001	34,32	276.217	109.946,43	251	(99,83)	152.075	80,00
Lainnya	492.757	1.170,52	38.784	17,55	32.993	(85,77)	231.921	12.720,40	1.809	181,00
2. Commercial Loan	12.934.546	21,60	10.637.137	22,35	8.693.897	30,36	6.669.245	24,23	5.368.513	48,00
2.1. Kredit Yasa Griya	12.934.546	21,60	10.637.137	22,35	8.693.897	30,36	6.669.245	24,23	5.368.513	48,00
B. Kredit Non Perumahan	10.315.212	(1,34)	10.455.102	20,65	8.665.981	43,58	6.035.576	81,37	3.327.698	84,00
1. Consumer Loan	2.415.944	14,55	2.109.014	37,37	1.535.236	0,15	1.532.889	37,79	1.112.444	51,00
1.1. Kredit Ringan Batara	1.144.431	1,80	1.124.177	17,45	957.174	31,30	728.990	7,99	675.054	83,00
1.2. Kredit Real Cash	40	100,00	-	-	-	-	-	(100,00)	66	(45,00)
1.2. Swadana	756.119	72,65	437.941	0,51	290.630	(30,78)	419.856	109,38	200.521	119,00
1.3. Kredit Pegawai	515.354	(5,76)	546.856	-	287.389	(47,78)	194.447	(17,89)	236.803	(14,00)
1.4. Lainnya	-	(100,00)	40	(6,98)	43	(99,98)	189.596	(100,00)	-	-
2. Commercial Loan	7.899.268	(5,35)	8.346.088	17,04	7.130.745	58,37	4.502.687	103,26	2.215.254	105,57
2.1. UMKM (<Rp5 miliar)	4.350.974	(47,47)	8.283.376	16,65	7.101.140	105,88	3.449.082	59,21	2.166.372	111,00
- KUR	1.178.618	(29,88)	1.680.837	(5,11)	1.771.369	61,75	1.095.144	158,40	423.810	92,00
- Terkait Perumahan	-	(100,00)	154	(99,95)	294.833	(35,10)	454.274	64,96	275.391	77,00
- Kredit Investasi	893.566	(65,89)	2.619.881	25,66	2.084.914	289,17	535.739	(7,29)	577.863	146,00
- KUMKL	363.543	70,56	213.152	25,63	169.669	30,32	130.195	51,21	86.101	26,00
- KUMK (MK)	278.344	30,62	213.091	0,26	169.579	96,55	86.278	36,16	63.365	23,00
- KUMK (KI)	85.199	139.570,49	61	(32,20)	90	(99,79)	43.917	93,16	22.736	34,00
- KMK Kontraktor	448.166	(61,47)	1.163.151	6,86	1.088.514	126,03	481.586	2,37	470.450	77,00
- Linkage Program	537.334	(28,09)	747.216	33,70	558.896	1,68	549.656	200,32	183.026	131,00
- Kredit Modal Kerja	929.747	(49,99)	1.858.985	64,08	1.132.945	459,52	202.486	35,23	149.729	9.213,00
- Kum-LTA	-	-	-	-	-	(100,00)	2	-	2	(98,00)
2.2 Korporasi (>Rp 5 miliar)	3.548.294	5.558,08	62.712	111,83	29.605	(97,19)	1.053.605	2.055,40	48.882	100,00
- Kredit Modal Kerja	737.096	100,00	-	-	-	(100,00)	113.044	100,00	-	-
- Kredit Investasi	2.118.304	100,00	-	-	-	(100,00)	592.948	100,00	-	-
- KMK Kontraktor	615.916	100,00	-	-	-	(100,00)	298.731	100,00	-	-
- Kredit Sindikasi / Club Deal	76.978	22,75	62.712	111,83	29.605	(39,43)	48.882	-	48.882	100,00
Jumlah Kredit	106.271.277	15,03	92.386.308	22,51	75.410.705	27,09	59.337.756	21,84	48.702.920	25,37

Pendapatan

Pendapatan Perseroan sebagian besar berasal dari kredit perumahan dan kredit jenis lainnya, obligasi pemerintah, surat-surat berharga, penempatan di bank lain dan Bank Indonesia, serta pendapatan bagi hasil dari segmen syariah. Pendapatan bunga dan bagi hasil yang diterima Perseroan mencapai Rp10.782.877 juta, dan pendapatan operasi lainnya sebesar Rp763.983 juta pada 31 Desember 2013 dan pada 31 Desember 2014 pendapatan bunga dan bagi hasil yang diterima Perseroan meningkat sebesar 18,77% menjadi Rp12.807.328 juta dan pendapatan operasi lainnya naik 17,13% menjadi Rp894.820 juta.

Seluruh kredit perumahan Perseroan (kecuali pembiayaan Syariah) merupakan kredit bersuku bunga mengambang. Untuk kredit perumahan non-subsidi, Perseroan menetapkan tingkat suku bunga berdasarkan biaya pendanaan ditambah premi risiko, biaya *overhead* dan margin keuntungan. Untuk kredit rumah bersubsidi, tingkat suku bunga ditentukan oleh pemerintah dengan menambahkan margin, untuk saat ini sebesar 5,0% dari tingkat suku bunga Bank Indonesia. Tingkat suku bunga dapat diubah tergantung negosiasi yang dilakukan Perseroan dengan pemerintah.

A. Consumer Banking

Sebagai bagian dari bisnis *consumer banking*, Perseroan menjalin dan mengembangkan hubungan dengan para nasabah individu. Selain kredit perumahan, Perseroan menawarkan variasi produk kredit, dana dan jasa kepada nasabah individu. Perseroan melayani nasabah melalui jaringan kantor cabang dan *call center*. Perseroan juga mendirikan jaringan elektronik melalui teknologi *Host-to-Host* dengan 2.922 kantor pos di seluruh Indonesia, yang memudahkan nasabah Perseroan untuk mengecek saldo rekening dan membayar kredit. Saat ini Perseroan telah menyediakan layanan Kartu Debit BTN VISA dan Kartu Kredit BTN yang telah diluncurkan pada akhir tahun 2010.

Perseroan telah memperluas pangsa pasar kredit perumahan pada sektor perumahan untuk masyarakat kelas menengah ke atas. Untuk mencapai tujuan ini, Perseroan akan mengambil langkah-langkah seperti: (i) menambah lebih banyak kantor cabang, (ii) implementasi "layanan 1-5-1", (iii) memperbaiki sistem IT untuk pemberian kredit dan (iv) menawarkan tingkat suku bunga khusus kepada nasabah segmen kelas menengah atas melalui produk pinjaman khusus seperti KPR Platinum.

Pinjaman yang diberikan kepada nasabah *consumer banking* Perseroan, tidak termasuk pembiayaan syariah, berjumlah sebesar Rp. 73.403.182,031 juta, atau 73,06% dari total jumlah pinjaman Perseroan per 31 Desember 2014. Dari jumlah ini, sekitar 38,69% adalah pinjaman perumahan bersubsidi, 48,77% adalah pinjaman perumahan non-subsidi dan 12,53% % adalah jenis pinjaman lain-lain. Seluruh pinjaman perorangan Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah.

Produk-produk penyaluran dana

1. Kredit Perumahan Bersubsidi

Nasabah berpenghasilan menengah ke bawah yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh KPR Sejahtera dengan bunga rendah dan tetap selama jangka waktu kredit dimana program sebelumnya mendapatkan subsidi kredit perumahan yang disediakan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Negara Perumahan. Program sebelumnya, Pemerintah menyediakan 2 jenis subsidi kredit perumahan, yaitu subsidi selisih bunga (SSB) dan subsidi uang muka (SUM). Dalam hal kredit perumahan bersubsidi untuk rumah susun sederhana milik (rusunami), nasabah dapat menerima subsidi selisih bunga dan subsidi uang muka sedangkan nasabah kredit rumah sederhana sehat (RSH) hanya dapat menerima satu jenis subsidi.

Saat ini program dimaksud adalah KPR Bersubsidi Pola FLPP Rumah Tapak dan KPR Bersubsidi Pola FLPP Rumah Susun. Program ini diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penghasilan pokok paling banyak Rp3.500.000,- per bulan untuk KPR Bersubsidi Pola FLPP Rumah Tapak dan Masyarakat Berpenghasilan Menengah bawah (MBM) paling banyak Rp4.500.000,- per bulan untuk KPR Bersubsidi Pola FLPP Rumah Susun. KPR Bersubsidi Pola FLPP ini sangat membantu masyarakat karena selain bunga dan angsurannya rendah juga tetap sesuai jangka waktu kredit. Pengenaan bunga/margin dilakukan berjenjang sesuai dengan maksimal kredit, dengan ketentuan sebagai berikut :

KPR Bersubsidi Pola FLPP Rumah Tapak ditetapkan Maksimal Harga Jual Rp70.000.000,- dengan uang muka 10% sehingga maksimal kreditnya Rp63.000.000,- diberlakukan suku bunga 7,25% pertahun dan luas lantai minimal 36m².

KPR Bersubsidi Pola FLPP Rumah Susun ditetapkan Maksimal Harga Jual Rp144.000.000,- dengan uang muka 12,50% sehingga maksimal kreditnya Rp126.000.000,- diberlakukan suku bunga 7,25% pertahun dan luas lantai minimal 36m².

Sampai dengan 31 Desember 2014, Perseroan menyalurkan kredit perumahan bersubsidi untuk pembeli rumah pertama dan untuk skema tahun 2011 Harga Jual tidak dibatasi hanya maksimal kreditnya saja yang dibatasi untuk Rumah Tapak Rp 80.000.000,- dan Rumah Susun Rp 135.000.000,- dengan suku bunga tetap selama masa kredit sebagaimana tertulis dalam Peraturan Kementerian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

2. Kredit Perumahan Non Subsidi dan Konstruksi

- **KPR BTN Platinum**
 Perseroan menyediakan kredit perumahan non-subsidi (rumah siap huni, indent maupun take over dari Bank Lain) kepada nasabah individu dengan pembiayaan sampai 80% atau harga pembelian rumah atau nilai ditentukan oleh perusahaan penilai independen, yang mana yang lebih rendah. KPR BTN Platinum merupakan kredit kepemilikan property dimana penentuan maksimal kredit berdasarkan nilai agunan mengacu pada ketentuan LTV Bank Indonesia yang mengatur tentang maksimal LTV dan urutan fasilitas kredit. Kredit ini biasanya memiliki masa jatuh tempo sampai dengan 25 (dua puluh lima tahun) dengan jaminan dijamin oleh rumah yang dibiayai. Kredit ini memiliki tingkat suku bunga mengambang.
- **Kredit Bangun Rumah BTN**
 Perseroan memberikan kredit kepada nasabah untuk membiayai konstruksi perumahan yang tanahnya telah dimiliki oleh nasabah dengan jumlah sampai 70,0% dari biaya konstruksi. Kredit ini umumnya memiliki jatuh tempo sampai 10 (sepuluh) tahun dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang sedang dibiayai. Kredit ini memiliki tingkat suku bunga mengambang, dan umumnya lebih tinggi daripada tingkat suku bunga kredit perumahan.
- **Pinjaman Lunak Konstruksi (PLK) – Bapertarum PNS**
 Perseroan menawarkan kredit kepada pengembang untuk tujuan pembangunan rumah untuk pegawai negeri sipil dengan jumlah nominal maksimum sampai 70,0% dari biaya konstruksi. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) menyediakan pendanaan untuk kredit ini dengan menempatkan sejumlah dana di rekening giro Perseroan pada tingkat suku bunga yang rendah sehingga Perseroan dapat menyalurkan kredit tersebut kepada pengembang dengan ketentuan yang lunak. Kredit ini umumnya memiliki jatuh tempo sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dan dapat diperpanjang atas permintaan debitur dengan persetujuan Bapertarum PNS, dan pada umumnya dijamin dengan agunan tanah dan properti yang hendak dibangun. Kredit ini memiliki tingkat suku bunga mengambang berdasarkan tingkat suku bunga deposito Perseroan.
- **Pinjaman Uang Muka untuk Pembelian Rumah dan Apartemen bagi Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS)**
 Perseroan melakukan kerja sama dengan Bapertarum PNS untuk menyediakan kredit uang muka untuk pembelian rumah dan apartemen bagi pegawai negeri sipil. Berdasarkan perjanjian tersebut, Bapertarum PNS akan membuka dua rekening giro pada Perseroan dan akan menyimpan dananya pada rekening tersebut. Setiap rekening tersebut akan digunakan untuk menempatkan dana yang akan digunakan untuk menyediakan kredit uang muka pembelian rumah dan apartemen. Kemudian Perseroan akan menyalurkan kredit tersebut kepada PNS yang mengajukan kredit perumahan kepada Perseroan. Maksimum jumlah uang muka untuk kredit perumahan (Kredit PUM-KPR) adalah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan maksimum uang muka untuk kredit apartemen (Kredit SARUSUN-KPR) adalah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah).
- **Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank PUM-KB BTN Jamsostek**
 Perseroan bekerja sama dengan Jamsostek untuk menawarkan kredit pinjaman uang muka untuk pembelian rumah atau apartemen. Jamsostek, yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang ruang lingkup usaha utamanya adalah mengelola dana jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia, menempatkan dananya dalam jumlah tertentu dalam rekening giro Perseroan pada tingkat suku bunga yang rendah sehingga Perseroan dapat memberikan kredit ini dengan tingkat suku bunga yang rendah. Teknisnya, setiap bulan Jamsostek menempatkan dana pada Perseroan sejumlah nominal realisasi PUMP-KB bulan sebelumnya. Kredit ini memiliki tingkat suku bunga tetap berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) yang disepakati.
- **Kredit Ruko BTN**
 Perseroan menyalurkan pinjaman untuk membeli Ruko (Rumah Toko), yang diartikan sebagai toko, kantor ataupun dalam bentuk lain yang digunakan untuk bisnis, dengan jumlah sampai dengan 70,0% dari harga beli atau nilai pasar, tergantung mana yang lebih rendah. Kredit ini pada umumnya memiliki jangka waktu sampai dengan 15 (lima belas) tahun dengan jaminan berupa properti yang sedang dibiayai. Suku bunga kredit ini bersifat mengambang dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi daripada suku bunga kredit perumahan.

3. Kredit Consumer Lainnya

- **Kredit Agunan Rumah BTN**
 Perseroan menyediakan kredit kepada nasabah yang dapat digunakan untuk kepentingan apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan dijamin dengan agunan berupa tanah dan rumah. Dalam hal kredit dijamin dengan rumah dan tanah, jumlah kredit tidak melebihi 75,0% dari nilai yang diberikan oleh penilai, dan apabila kredit dijamin dengan tanah dan rumah digunakan untuk kepentingan komersial, nilai kredit tersebut tidak boleh melebihi 60,0% dari nilai appraisal. Kredit ini memiliki jatuh tempo sampai dengan 10 (sepuluh) tahun. Kredit ini memiliki tingkat suku bunga mengambang dengan nilai yang lebih tinggi daripada tingkat suku bunga kredit perumahan.
- **Kredit Swadana BTN**
 Perseroan menyalurkan kredit kepada nasabah yang dijamin dengan menggunakan deposito. Perseroan menawarkan kredit ini kepada nasabah individual dan lembaga/institusi. Jumlah pinjaman ini maksimal 90,0% dari jumlah deposito. Jangka waktu kredit ini umumnya antara 1 (satu) sampai 12 (dua belas) bulan (sebelum jatuh temponya deposito). Kredit ini bersuku bunga mengambang sebesar 2,0% di atas suku bunga deposito.

- **Kring BTN**
Kredit ini bernilai sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Kredit ini ditawarkan kepada karyawan dari perusahaan di mana Perseroan menangani sistem penggajian di perusahaan tersebut. Perseroan akan memotong gaji karyawan untuk pembayaran cicilan. Jatuh tempo dari kredit ini berkisar antara 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tingkat suku bunga kredit ini berkisar 9,5%-11,25% flat per tahun.
 - **Kring BTN Pensiunan**
Kredit ini bernilai sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Kredit ini ditawarkan kepada pensiunan PNS, BUMN, BUMD dimana Perseroan menangani uang pensiunannya. Perseroan akan memotong uang pensiun untuk pembayaran cicilan. Jatuh tempo dari kredit ini berkisar antara 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
4. **Kredit Usaha Mikro, Kecil & Menengah**
Perseroan menawarkan kredit usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) untuk pembiayaan modal kerja / investasi kepada sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan jangka waktu untuk KUMKM modal kerja maksimal 3 tahun dan KUMKM investasi maksimal 5 tahun. Di mana maksimal kredit yang diberikan adalah Rp 100 juta untuk Kredit Usaha Mikro, Rp 500 juta untuk Kredit Usaha Kecil dan Rp 5 milyar untuk Kredit Usaha Menengah. Perseroan menawarkan pembiayaan KUMKM sebesar maksimum 75,0% dari total nilai investasi (KUMKM Investasi) dan maksimal 80,0% dari total kebutuhan modal kerja perusahaan (KUMKM Modal Kerja).

Kartu Debit BTN VISA

Sampai dengan tahun 2014, perseroan telah mengembangkan berbagai jenis Kartu ATM, baik ATM Non Visa maupun Kartu Debit BTN Visa. Khusus untuk Kartu Debit BTN Visa, pada tahun 2014 telah diluncurkan Kartu Debit BTN Visa Syariah, sehingga saat ini nasabah Syariah Bank BTN dapat menggunakan dan menikmati fasilitas menggunakan Kartu Debit. Dengan bertambahnya jenis Kartu Debit BTN Visa, hingga tahun 2014 terdapat berbagai jenis Kartu Debit BTN Visa, yaitu Kartu Debit BTN Visa *Gold*, *Platinum*, *Classic*, Kartu Debit BTN Visa Juara, Kartu Debit BTN Visa eBatara Pos dan Kartu Debit BTN Visa Syariah.

Pada tahun 2014 juga dikembangkan Kartu Debit BTN Visa dengan design Piala Dunia Brasil 2014, hal ini sebagai bentuk keikutsertaan perseroan dalam memeriahkan dan apresiasi kepada nasabah dalam menyambut pesta Piala Dunia di Brasil. Adapun fasilitas terbaru dari Kartu Debit BTN Visa yang dikembangkan pada tahun 2014 adalah fasilitas *Verified by Visa (VbV)*, dengan fasilitas ini nasabah pemegang Kartu BTN Debit Visa dapat melakukan transaksi belanja *online (ecommerce)* diberbagai *merchant online* seperti Bhineka.com, BiliBili.com, Lazada serta berbagai *merchant online* lainnya. Fasilitas ini melengkapi fasilitas Kartu Debit BTN Visa yang sebelumnya telah ada seperti dapat digunakan untuk berbelanja diberbagai *merchant/toko* diseluruh dunia yang berlogo Visa, dapat digunakan di ATM BTN untuk berbagai transaksi seperti penarikan uang tunai, transfer keseluruhan bank, melakukan pembayaran dan pembelian seperti tagihan KPR, tagihan telepon, PLN (pasca bayar maupun pra bayar), pembayaran tiket, pembayaran kartu kredit, pembelian voucher pulsa, dan berbagai fitur lainnya.

Selain dapat digunakan di mesin ATM BTN, Kartu Debit BTN Visa juga dapat digunakan di seluruh mesin ATM yang berlogo Link, ATM Bersama, Prima, Alto, Meps dan Visa. Untuk terus meningkatkan jumlah pemegang Kartu dan jumlah transaksi, kegiatan promosi melalui kerjasama dengan berbagai *merchant* terus dilakukan, beberapa program promo yang dilakukan pada tahun 2014 antara lain program promo dengan KFC, Superindo, Snow Bay Waterpark, Bugis Waterpark, 7Eleven, TipTop dan berbagai *merchant* lainnya. Dari pengembangan berbagai jenis Kartu Debit BTN Visa dan ditunjang dengan program promo yang berkelanjutan telah meningkatkan jumlah pemegang Kartu, dimana sampai dengan tahun 2014 jumlah Kartu Debit BTN Visa mencapai 1.7 juta sementara untuk Kartu ATM Non Visa mencapai 1.1 juta kartu. Pada tahun 2015, perseroan akan terus menambah fasilitas Kartu Debit BTN Visa diantaranya fasilitas *recurring* dan menambah jenis Kartu Debit BTN Visa design Suka-Suka, dimana nasabah dapat memilih gambar/foto yang dapat dijadikan design Kartu Debit BTN Visa .

Kartu Kredit BTN

Kartu Kredit BTN adalah kartu kredit *Co-Brand* yang bekerjasama dengan PT. Bank Mandiri (Persero),Tbk. Pada program *Co-Brand* ini Bank Mandiri bertindak sebagai penerbit dan pemilik sedangkan Perseroan sebagai partner *Co-Branding*. Kartu Kredit BTN ditujukan kepada perorangan yang mengajukan aplikasi dan telah mendapatkan persetujuan Bank Mandiri untuk memperoleh fasilitas Kartu Kredit BTN. Kartu Kredit BTN diterbitkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu: Kartu Kredit BTN *Silver* dengan pagu kredit minimal Rp.2 juta dan maksimal Rp.10 juta, Kartu Kredit BTN *Gold* dengan pagu kredit minimal Rp.10 juta dan maksimal Rp.300 juta dan Kartu Kredit BTN *Platinum* dengan pagu kredit minimal Rp.40 juta dan maksimal Rp.1 Miliar. Kartu yang diluncurkan pada tanggal 20 Desember 2010, telah mengalami pertumbuhan jumlah kartu sampai dengan akhir tahun 2014 sebanyak 18.606 kartu. Terkait dengan ketatnya ketentuan penerbitan kartu kredit oleh Bank Indonesia, Perseroan memfokuskan kegiatan akuisisi kartu pada channel internal, khususnya melalui program *bundling* dengan pemasaran KPR. Dalam hal meningkatkan transaksi belanja dan meningkatkan loyalitas pemegang kartu terhadap Kartu Kredit BTN, Perseroan akan meningkatkan kerjasama dengan *merchant-merchant* strategis .

BTN Shop

BTN Shop/*Merchandising* merupakan aktifitas bisnis Perseroan yang berbasis data *base* nasabah eksisting untuk membina hubungan yang lebih baik dengan debitur eksisting dengan kriteria 5 tahun ke atas dengan kolektibilitas lancar pada 6 bulan terakhir. Perseroan akan bermegosiasi dengan produsen (*manufacture/wholesaler*) yang menjual barang-barang rumah tangga dengan harga khusus (*discount price*). Perseroan tidak bertindak sebagai penjual barang, tetapi menghubungkan antara nasabah Perseroan dengan produsen, di mana Perseroan akan mendapatkan *fee based income* dari selisih harga yang diberikan oleh produsen dan pendapatan bunga kredit (Kring Batara).

Jenis barang yang dijual dalam produk ini adalah *Brown goods (furniture)*, *White goods (Home appliance, electronics)* dan *House related goods (Generator Set, Pompa air)*. Daya tarik bagi konsumen antara lain adalah harga barang lebih rendah dibandingkan harga pasar dan pembelian dapat dilakukan dengan fasilitas kredit cicilan jangka panjang (maksimal 5 tahun) dari Perseroan dengan menggunakan kredit Kring Batara.

Produk-produk penghimpunan dana

Perseroan menawarkan giro, tabungan dan deposito berjangka untuk nasabah *consumer banking*. Sebagai tambahan, untuk mengatasi biaya pendanaan dan ketidakcocokan jatuh tempo dan untuk meningkatkan pendapatan *fee-based*, Perseroan berencana untuk memperkenalkan produk-produk baru yang ditujukan untuk menarik nasabah individual agar melakukan investasi jangka panjang pada Perseroan, termasuk rekening tabungan jangka panjang dan produk *bancassurance*. Pada bulan Februari 2010, Perseroan tergabung bersama-sama dengan 41 bank nasional lainnya telah menerbitkan produk Tabunganku yang merupakan tabungan bebas biaya administrasi yang bertujuan menumbuhkan budaya menabung di masyarakat.

Perseroan menawarkan produk-produk pendanaan sebagai berikut:

1. Tabungan BTN Batara

Merupakan tabungan multiguna di mana penarikan dapat dilakukan di seluruh kantor cabang dan ATM Perseroan, sementara untuk penyeteroran selain dapat dilakukan di kantor cabang Perseroan juga dapat dilakukan di kantor pos yang telah *online* dengan Perseroan. Selain itu nasabah secara otomatis juga dilindungi oleh fasilitas asuransi jiwa bebas premi.

2. Tabungan BTN e-Batara Pos

Merupakan tabungan yang pembukaannya dilakukan di kantor pos yang telah *online* dengan Perseroan, di mana penarikan dan penyeteroran selain dapat dilakukan di kantor pos juga dapat dilakukan di seluruh jaringan kantor dan mesin ATM Perseroan. Selain itu nasabah secara otomatis juga dilindungi oleh fasilitas asuransi jiwa bebas premi.

3. Tabungan BTN Prima

Merupakan tabungan investasi dengan suku bunga lebih tinggi dari tabungan biasa dan bonus bunga serta *point reward* yang dapat ditukarkan dengan *voucher* belanja dan berbagai hadiah langsung. Selain itu nasabah secara otomatis juga dilindungi oleh fasilitas asuransi jiwa bebas premi.

4. Tabungan BTN Junior

Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi anak – anak sampai dengan pelajar umur 12 tahun dengan tujuan mendidik, memperkenalkan dan menumbuhkan budaya menabung sejak dini. Tabungan ini merupakan tabungan bebas biaya administrasi, dengan setoran awal dan setoran lanjutan yang cukup ringan sesuai dengan segmentasinya.

5. Tabungan BTN Juara

Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar usia lebih dari 12 tahun sampai dengan mahasiswa usia maksimal 23 tahun dengan tujuan mengedukasi, menunjang kebutuhan para remaja dalam hal prestasi, kreasi dan kreatifitas. Tabungan ini merupakan tabungan bebas biaya administrasi, dengan setoran awal dan setoran lanjutan yang cukup ringan sesuai dengan segmentasinya.

6. Tabungan BTN Haji

Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi calon jemaah haji dalam rangka persiapan biaya perjalanan ibadah haji. Tidak dikenakan biaya administrasi dan apabila saldo mencapai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) atau sesuai ketentuan Departemen Agama akan secara otomatis mendapatkan nomor porsi.

7. Tabungan BTN Haji Plus

Merupakan tabungan yang khusus diperuntukkan kepada calon jemaah haji yang akan menjalankan ibadah haji dengan program penyelenggaraan Haji Khusus yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama. Tidak dikenakan biaya administrasi dan apabila saldo mencapai \$4.000,- (Empat Ribu US Dollar) atau sesuai ketentuan Departemen Agama akan secara otomatis mendapatkan nomor porsi.

8. Tabunganku

Merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

9. Tabungan Haji Pos

Merupakan tabungan Haji Perseroan yang sudah ada yang direncanakan untuk launching melalui outlet Kantor Pos. Sampai saat ini dengan mempertimbangkan kesiapan IT pada divisi terkait direncanakan tabungan tersebut akan dilakukan launching di kantor pos pada semester 2 tahun 2012.

Jasa

Perseroan menyediakan jasa *fee-based* seperti Bank Garansi, pengiriman (*remittance*), *payment point* dan *collection* berbagai macam pembayaran, termasuk pembayaran biaya pendidikan, tagihan telepon selular dan pembayaran rutin seperti listrik dan air. Pada semester kedua tahun 2014 Perseroan menawarkan beberapa produk berikut ini.

a. Bancassurance:

Produk hasil kerja sama dengan perusahaan asuransi yang dijual oleh Bank BTN melalui kantor cabang yang dimilikinya, baik kantor cabang regular maupun *Outlet* BTN Prioritas.

Bank BTN berencana untuk menjual produk *Bancassurance* berupa *Unit Link* dan Asuransi Jiwa, karena kedua produk tersebut dianggap sesuai dengan profil kebutuhan nasabah Bank BTN.

Di dalam penjualan produk *Bancassurance* ini, Bank BTN bertindak sebagai agen penjual yang berpotensi untuk menghasilkan *Fee Based Income*.

b. Reksa Dana:

Reksa Dana merupakan produk investasi yang dikeluarkan oleh manajer investasi dimana Bank BTN bertindak selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana yang dijual melalui kantor cabang yang dimilikinya, baik kantor cabang regular maupun *Outlet* BTN Prioritas.

Sama halnya dengan Produk *Bancassurance*, produk Reksa Dana ini juga berpotensi di dalam menghasilkan *Fee Based Income* melalui skim kerja sama yang dijalin dengan manajer investasi di dalam menjual produk tersebut.

c. Obligasi Ritel Indonesia (ORI)

ORI adalah Surat Utang Negara yang dikeluarkan secara ritel oleh Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Keuangan RI dan dijual dengan sistem keagenan kepada masyarakat luas.

Di dalam penjualan ORI, Bank BTN akan bertindak selaku agen penjual yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dan memperoleh benefit berupa *Fee Based Income*.

d. Sukuk Ritel (Sukri)

Sama halnya dengan ORI, Sukri adalah Surat Utang Negara yang dijual secara ritel dengan berpegang pada prinsip – prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Keuangan RI.

Di dalam penjualan Sukri ini, Bank BTN juga bertindak selaku agen penjual yang menerima benefit berupa *Fee Based Income*.

No.	Produk	Jadwal Launching
a.	<i>Bancassurance</i> :	Semester II Tahun 2014
	i. <i>Unit Link</i>	
	ii. Asuransi Jiwa	
b.	Reksa Dana	Semester II Tahun 2014
c.	Obligasi Ritel Indonesia	Tahun 2014
d.	Sukuk Ritel	Tahun 2014

B. Commercial Banking

Sebagai bagian dari bisnis *commercial banking*, Perseroan menyediakan sejumlah produk pendanaan dan pembiayaan yang bervariasi kepada para nasabah *commercial banking*-nya – yang utamanya adalah kepada unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dengan berbagai produk pembiayaan dan pendanaan, seperti kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi serta bank garansi. Produk pendanaan Perseroan bagi nasabah *commercial banking* meliputi giro, rekening tabungan, deposito berjangka, dan produk perbankan lainnya termasuk *Operational Development Assistance Program*, atau Program Pengembangan Operasional, di mana di dalamnya Perseroan menyediakan sejumlah aset untuk kepentingan komersil, di mana para nasabah yang mengikuti program ini dapat menjaga saldo minimum dalam bentuk rekening koran bersama Perseroan selama 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun. Nasabah untuk program ini umumnya terdiri atas universitas dan rumah sakit.

Produk-produk penyaluran dana

1. Kredit Konstruksi BTN

Merupakan fasilitas kredit Perseroan yang diberikan kepada pengembang perumahan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam rangka pembiayaan pembangunan perumahan dan apartemen dengan persentase maksimal kredit yang dapat diberikan setinggi-tingginya 80,0% dari biaya pembangunan (biaya konstruksi). Jangka waktu kredit ini didasarkan pada perkiraan lamanya pembangunan dan perkiraan arus kas yang akan dihasilkan dari proyek tersebut setelah selesai pembangunan, dan kredit ini umumnya dijamin dengan tanah dan properti yang dibangun dengan pembiayaan ini. Kredit ini memiliki tingkat suku bunga mengambang yang umumnya lebih tinggi daripada tingkat suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR).

2. Kredit Pembelian Lahan (KPL)

Perseroan menyalurkan kredit konstruksi perumahan untuk pembelian lahan yang diperuntukkan khusus bagi pembangunan perumahan KPR bersubsidi atau perumahan sederhana dengan persentase maksimal kredit yang dapat diberikan adalah 50,0% dari total biaya pembelian lahan (atau, jika lebih rendah, dari nilai pasar wajar) dan nilai setinggi-tingginya Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) yang dijamin dengan lahan terkait. Kredit ini memiliki jatuh tempo 3 (tiga) tahun dan dijamin dengan tanah yang dibeli. Kredit ini memiliki tingkat suku bunga mengambang yang umumnya lebih tinggi daripada tingkat suku bunga kredit pemilikan rumah.

3. Kredit Investasi

Perseroan menawarkan pembiayaan proyek jangka panjang sebesar maksimum 70,0% dari total biaya proyek atau maksimal 75,0% dari total kebutuhan modal kerja perusahaan yang ditujukan untuk lima industri, yaitu industri telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan industri yang terkait dengan perumahan. Jangka waktu kredit ditetapkan berdasarkan proyeksi tanggal penyelesaian atas proyek tersebut dan proyeksi arus kas dengan ketentuan seluruh jangka waktu kredit tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. Jaminan kredit investasi adalah proyek yang bersangkutan. Kredit ini memiliki tingkat suku bunga mengambang yang umumnya lebih tinggi daripada tingkat suku bunga kredit perumahan.

4. Kredit Modal Kerja

Fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada badan usaha berbadan hukum maupun non badan hukum dan perorangan dalam rangka untuk mendanai kebutuhan belanja modal kerja seperti belanja persediaan barang dagangan, pengadaan piutang usaha, dan/atau persediaan lain yang habis dalam satu siklus perputaran kas. Pembiayaan kebutuhan modal kerja bagi usaha dibidang industri, perdagangan dan jasa atau yang berhubungan dengan pengadaan maupun proses produksi sampai dengan barang tersebut dijual.

5. Kredit Modal Kerja Kontraktor (KMK Kontraktor)

Perseroan menawarkan kredit modal kerja kepada kontraktor atau pemborong untuk membantu pemenuhan kebutuhan modal kerja dalam menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan kontrak kerja dalam jumlah maksimal kredit yang dapat diberikan adalah 60,0% dari nilai kontrak. Maksimal jangka waktu kredit yang dapat diberikan tidak melebihi jangka waktu penyelesaian proyek dan pada umumnya dijamin dengan nilai kontrak dan jaminan tetap lainnya. Kredit ini memiliki tingkat suku bunga mengambang yang umumnya lebih tinggi daripada tingkat suku bunga kredit perumahan.

6. Kredit Linkage Program (KLP)

Perseroan menyalurkan pinjaman yang diberikan Bank kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Koperasi dalam rangka pembiayaan (untuk diteruskan) kepada nasabah mikro dan kecil. Pinjaman tersebut oleh Bank akan dicatat sebagai pinjaman kepada BPR dan pencatatan di BPR sebagai pinjaman ke UMK (*executing*)

Perseroan adalah salah satu bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai administrator kredit *channeling* dari Pemerintah dalam Rupiah dan berbagai mata uang asing. Penyaluran kredit adalah komitmen dari Pemerintah kepada perusahaan yang memenuhi syarat untuk mendanai proyek pembangunan, umumnya sarana publik dan proyek-proyek yang disponsori pemerintah se-Indonesia. Berbagai institusi finansial bilateral, multilateral, dan internasional menyediakan kredit ini. Kredit ini merupakan perjanjian langsung antara pemerintah dan nasabah di mana Perseroan bukan merupakan salah satu pihak sehingga Perseroan tidak menanggung risiko kredit. Oleh karena itu, pinjaman ini tidak dimasukkan dalam laporan keuangan Perseroan namun hanya imbal jasanya yang diterima oleh Perseroan untuk jasa administratif yang disediakan. Tanggung jawab Perseroan mencakup pengumpulan pokok pinjaman, suku bunga, dan biaya lainnya atas nama Departemen Keuangan, serta menjaga pencatatan akuntansi yang layak untuk kredit ini. Untuk pelayanan jasa ini Perseroan menerima imbalan jasa administrasi tahunan yang merupakan persentase dari nilai pokok pinjaman kredit yang bersangkutan 0,5% untuk kredit mata uang asing dan 0,5% kredit dalam Rupiah.

Jasa

Mulai tahun 2013 Perseroan melakukan diversifikasi bisnis perbankan komersial yang dimiliki dengan menyediakan *fee based services* sebagai berikut :

a. *Virtual Account*

Virtual account merupakan nomor identifikasi yang diberikan kepada pelanggan suatu lembaga yang bekerjasama dengan Perseroan. Virtual account dibuat oleh Perseroan untuk selanjutnya diberikan oleh lembaga kepada pelanggannya sebagai identifikasi penerimaan dan/atau pembayaran sesuai dengan kebutuhan lembaga. Pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui seluruh *channel* Perseroan. Lembaga dapat merekonsiliasi hasil pembayaran tagihan dengan cepat dan akurat.

b. *Cash Management System*

Cash Management System merupakan saluran elektronik bagi nasabah lembaga untuk melakukan transaksi perbankan terhadap rekeningnya di Perseroan melalui koneksi internet menggunakan browser dengan aman, cepat dan mudah. Fitur yang terdapat pada Cash Management System meliputi Inquiry mutasi rekening, *Transfer*, *Payroll*, dan *Payment*.

c. *Business to Business (B to B)*

Business to Business merupakan kerjasama antara Perseroan dengan lembaga dalam pemanfaatan produk dan jasa layanan Perseroan untuk pengelolaan keuangan lembaga/perusahaan dari sisi hulu sampai hilir (*Supply Chain Management*). Melalui *B to B*, Perseroan dapat memberikan layanan *one stop service* bagi lembaga.

Selain itu Perseroan juga menyediakan pelayanan seperti bank garansi, jasa wali amanat, serta berperan sebagai *servicer* pada transaksi sekuritisasi dan sebagai administrator kredit *chanelling* dari Pemerintah.

C. Perbankan Syariah

Perseroan mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2005 untuk menawarkan pembiayaan dan pendanaan serta pelayanan yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan memiliki Rp9.644.524 juta pembiayaan syariah dan Rp8.747.457 juta pendanaan syariah, dibandingkan 31 Desember 2013 yaitu sebesar Rp8.081.083 juta dan Rp6.592.577 juta. Per tanggal 31 Desember 2014, Perseroan memiliki 22 kantor cabang syariah (KCS), 21 Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) dan 7 Kantor Kas Syariah (KKS) dan 240 kantor layanan syariah (KLS) serta memiliki 73.194 rekening nasabah untuk produk pembiayaan syariah dan 255.831 rekening nasabah untuk produk pendanaan syariah. Para nasabah syariah Perseroan pada umumnya didominasi oleh kalangan individu.

Unit Usaha Syariah Bank BTN meminta opini kepada Dewan Pengawas Syariah dalam menciptakan produk dan jasa syariah. Dewan Pengawas Syariah terdiri atas satu orang ketua dan dua anggota, yang merupakan perwakilan dari Dewan Syariah Nasional. Sebagai pemenuhan terhadap hukum Islam dan prinsip perbankan syariah, seluruh pembiayaan syariah yang dimiliki Unit Usaha Syariah berasal dari sumber pendanaan syariah, termasuk rekening tabungan syariah dan deposito berjangka syariah.

Produk-produk Syariah

Produk-produk pembiayaan Syariah

1. KPR BTN Sejahtera iB
Adalah pembiayaan kepada Nasabah perorangan yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan akad Murabahah (jual beli) dalam rangka pemilikan rumah
2. KPR BTN Indent iB
Fasilitas KPR BTN Indent iB hanya diberlakukan untuk fasilitas kredit/pembiayaan pemilikan properti pertama bagi nasabah yang diterima di Bank maupun Bank lain
3. Pembiayaan KPR BTN Platinum iB (Islamic Banking)
Pembiayaan ini didasarkan atas prinsip jual/beli (*Murabahah*), di mana Perseroan membeli rumah, apartemen yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah dalam tingkat harga dan margin yang telah disepakati bersama. Pembayaran oleh nasabah dilakukan secara periodik sama halnya dengan angsuran rumah di Bank konvensional pada umumnya.
4. KPR BTN Sejahtera Tapak iB & KPR BTN Sejahtera Susun iB
Pembiayaan ini didasarkan atas prinsip jual/beli (*Murabahah*), di mana Perseroan membeli rumah atau rumah susun yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan margin dan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah, mengingat pembiayaan KPR ini di dukung dengan fasilitas pembiayaan dari Kementerian Perumahan Rakyat. Pembayaran oleh nasabah dilakukan secara periodik sama halnya dengan pencicilan rumah konvensional pada umumnya.
5. Pembiayaan KPR BTN Indent iB
Merupakan pembiayaan yang diberikan Perseroan kepada nasabah untuk membeli rumah dari pengembang berdasarkan pesanan dari nasabah dengan kondisi sedang dalam tahap pembangunan dengan akad *istishna*.
6. Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB
Pembiayaan ini didasarkan atas prinsip jual/beli (*Murabahah*), di mana Perseroan membantu pembiayaan pembangunan rumah atau rumah toko oleh nasabah dengan membeli rumah atau rumah toko yang dibangun tersebut dan menjualnya kepada nasabah dalam tingkat harga dan margin yang telah disepakati bersama. Pembayaran oleh nasabah dilakukan secara periodik sama halnya dengan pencicilan kendaraan atau rumah konvensional pada umumnya.
7. Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB
Pembiayaan ini didasarkan atas prinsip jual/beli (*Murabahah*), di mana Perseroan membeli rumah, apartemen atau kendaraan bermotor yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah dalam tingkat harga dan margin yang telah disepakati bersama. Pembayaran oleh nasabah dilakukan secara periodik sama halnya dengan pencicilan kendaraan atau rumah konvensional pada umumnya.
8. Pembiayaan KUR BTN iB
Pembiayaan ini didasarkan pada prinsip jual/beli (*Murabahah*) atau Musyarakah, dimana perseroan memberikan fasilitas pembiayaan modal kerja atau investasi yang diberikan kepada debitur yang bergerak dalam bidang usaha produktif. Pembiayaan ini ditujukan untuk usaha dengan skala usaha mikro, kecil dan menengah.

9. **Pembiayaan Multijasa BTN iB**
 Pembiayaan ini didasarkan pada prinsip sewa menyewa (*Ijarah*), dimana perseroan bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan obyek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan.
10. **Pembiayaan Multi Manfaat BTN iB**
 Pembiayaan konsumtif perorangan yang ditujukan khusus bagi para pegawai dan para pensiunan yang manfaat pensiunnya dibayarkan melalui jasa *Payroll* BTN iB,
11. **Pembiayaan Gadai BTN iB**
 Pembiayaan ini berdasarkan harta nasabah berupa emas sebagai jaminan. Perseroan mengenakan imbal jasa atas penyimpanan emas.
12. **Pembiayaan Talangan Haji BTN iB**
 Pembiayaan ini didasarkan pada prinsip pinjaman tanpa imbalan (*Qardh*), dimana perseroan memberikan dana talangan haji bagi nasabah Tabungan BTN Haji iB yang membutuhkan dana tambahan untuk pergi haji. Pembayaran oleh nasabah dilakukan secara periodik atau sekaligus.
13. **Pembiayaan Modal Kerja BTN iB**
 Pembiayaan yang diberikan Perseroan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dengan akad *mudharabah* di mana nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
14. **Pembiayaan Konstruksi BTN iB**
 Perseroan menyediakan pembiayaan ini untuk pengembang *real estate* dan bisnis sejenis untuk menyediakan modal kerja untuk membiayai konstruksi proyek perumahan, termasuk infrastruktur terkait. Bagi hasil yang diperoleh Perseroan berasal dari bagi hasil pendapatan debitur yang dihasilkan dari bisnis yang dibiayai.
15. **Pembiayaan Investasi BTN iB**
 Merupakan pembiayaan yang diberikan Perseroan kepada nasabah dengan akad *murabahah* atau *musyarakah* untuk mendanai kebutuhan pembelian atau pengadaan barang investasi dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan dan peningkatan kapasitas usaha nasabah.

Produk-produk pendanaan Syariah

1. **Giro BTN iB**
 Giro ini berdasarkan prinsip *wadiah* atau titipan. Nasabah dapat menarik dana dari rekening kapan saja. Nasabah tidak menerima imbalan kecuali dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan.
2. **Tabungan BTN Prima iB**
 Produk ini adalah rekening tabungan yang didasarkan atas prinsip *mudharabah*. Produk ini dibuat sebagai sebuah investasi, di mana nasabah akan menerima pembagian bagi hasil sesuai nisbah (*rasio*) yang disepakati dari Perseroan, yang akan dibayarkan ke rekening nasabah secara bulanan.
3. **Tabungan BTN Batara iB**
 Produk ini merupakan rekening tabungan yang didasarkan atas prinsip *wadiah* atau titipan. Pada tabungan Batara iB ini, Perseroan tidak diwajibkan untuk memberikan tambahan kepada nasabah kecuali dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan (*athaya*). Pemberian bonus bersifat sukarela. Saat ini Perseroan membuat kebijakan adanya pemberian bonus secara bulanan.
4. **Tabungan BTN Haji iB**
 Produk ini merupakan tabungan yang didasarkan pada prinsip *mudharabah*. Tabungan ini akan digunakan untuk kebutuhan naik haji. Nasabah akan menerima pembagian bagi hasil sesuai nisbah (*rasio*) yang disepakati dari Perseroan, yang akan dibayarkan ke rekening secara bulanan.
5. **TabunganKu iB**
 Produk ini merupakan tabungan yang didasarkan atas prinsip *wadiah* atau titipan. Tabungan ini khusus untuk nasabah perorangan dengan persyaratan mudah & ringan yang diterbitkan secara bersama bank-bank di Indonesia dengan tidak ada Imbalan yg disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian bonus (*'athaya*) yang bersifat sukarela guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. **Deposito BTN iB**
 Produk ini merupakan deposito yang dibuat sebagai investasi. Nasabah dapat menarik rekening ini hanya pada saat tertentu, berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan nasabah. Deposito ini menggunakan prinsip *mudharabah*, yang merupakan bentuk kemitraan bisnis antara kedua pihak di mana pihak nasabah, sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), menyediakan dana, dan bank, sebagai pengelola dana (*mudharib*), bertanggung jawab untuk mengelola dana. Hasil investasi akan dibagi antara nasabah dan bank berdasarkan nisbah (*rasio*) bagi hasil yang telah disepakati bersama.

7. Deposito On Call BTN iB

Produk ini merupakan deposito yang dibuat sebagai investasi dengan jangka waktu maksimal 28 hari. Deposito nasabah hanya dapat dicairkan apabila telah jatuh tempo sesuai jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan Bank berdasarkan prinsip *Mudharabah*.

4. JARINGAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN

Sampai dengan 31 Desember 2014, Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat, 65 kantor cabang, 223 kantor cabang pembantu, 479 kantor kas, 22 Kantor Cabang Syariah, 21 kantor cabang pembantu syariah, 7 kantor kas Syariah, 2.951 Kantor Pos Online, 10 Mobil Kas Keliling, 22 Payment Point, 1.830 ATM di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.

Berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan jaringan distribusi Perseroan selama lima tahun terakhir:

(dalam unit)

Keterangan	31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010
Kantor Cabang (kecuali Cabang Syariah)	65	65	65	65	65
Kantor Cabang Pembantu (kecuali Cabang Pembantu Syariah)	223	223	223	226	218
Kantor Kas	486	486	422	422	316
Kantor Cabang dan Cabang Pembantu Syariah ⁽¹⁾	43	43	43	43	39
Total Cabang	817	817	753	756	286
Jumlah ATM	1.830	1.504	1.404	1.243	745
Kantor Pos yang secara elektronik terhubung dengan Perseroan	2.951	2.922	2.922	2.922	2.735
Outlet pembayaran	22	12	12	10	7

⁽¹⁾ Belum termasuk Kantor Layanan Syariah yang terletak di kantor cabang dan cabang pembantu konvensional

Tabel berikut ini memperlihatkan informasi mengenai penyebaran lokasi kantor cabang Perseroan termasuk Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, ATM dan kantor layanan setingkat kantor kas (KLSKK) sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:

(dalam unit)

Wilayah	Kantor Wilayah	Kantor Cabang	KC Pembantu	Kantor Kas	Kantor Syariah	Kantor Pos	ATM
Jawa	2	38	158	375	40	1.624	1.345
Sumatera	1	11	34	58	6	700	240
Kalimantan	-	5	10	18	2	299	85
Bali & Nusa Tenggara	-	3	5	8	-	141	46
Sulawesi	-	5	13	18	2	126	92
Papua & Maluku	-	3	3	2	-	61	22

Tabel berikut ini memperlihatkan rencana Perseroan untuk mengembangkan jaringan usaha:

(dalam unit)

Keterangan	Rencana pengembangan
Kantor Wilayah	-
Kantor Cabang	-
Kantor Cabang Syariah	-
Kantor Cabang Pembantu	-
Kantor Cabang Pembantu Syariah	-
kantor Layanan setingkat Kantor Cabang Pembantu	-
Kantor Kas	-
Kantor Kas Syariah	-
Kantor Layanan setingkat Kantor Kas	-
Kantor Layanan setingkat Kantor Kas	29
Layanan Payment Point (PP)	38
Mesin ATM	467
Layanan Gerai UMKM	6
Layanan Priority Banking	9
Branchles Banking	202
Peningkatan Status Kantor Cabang Devisa	50

Kantor Pusat

Kantor pusat Perseroan merupakan pusat dari organisasi Perseroan dan terletak di Menara Bank BTN, Jalan Gajah Mada No.1, Jakarta Pusat 10130, Indonesia.

Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor kas

Kantor cabang Perseroan dibagi menjadi empat tingkatan: cabang utama, cabang kelas pertama, cabang kelas kedua dan cabang kelas ketiga. Setiap cabang beroperasi secara independen. Akan tetapi, setiap cabang memiliki tingkat otoritas kredit yang berbeda tergantung klasifikasi masing-masing. Klasifikasi dilakukan berdasarkan beberapa faktor, seperti jumlah nasabah, tingkat kepentingan strategi dari tiap lokasi, jumlah kantor cabang pembantu di bawah suatu kantor cabang dan saldo rekening keseluruhan. Setiap klasifikasi akan dievaluasi kembali secara reguler dan akan dilakukan penyesuaian ke atas atau ke bawah.

Sejak tahun 1994, Perseroan telah memperoleh izin sebagai bank devisa. Saat ini terdapat 16 kantor cabang yang dimiliki Perseroan dapat menerima simpanan dalam mata uang asing (baik giro maupun tabungan) dan menyediakan pelayanan *remittance* serta penukaran mata uang.

Tiap cabang pembantu diawasi oleh setiap kantor cabang induknya. Kantor cabang pembantu menawarkan produk-produk yang sama dengan yang dimiliki kantor cabang dengan tingkat kewenangan persetujuan kredit yang terbatas.

Berbeda dengan kantor cabang pembantu kantor kas hanya memberikan pelayanan kas kepada nasabah. Fokus kantor kas memberikan pelayanan kas kepada nasabah, mendukung peningkatan penghimpunan dana ritel, serta meningkatkan cakupan layanan bank dan mendekatkan pelayanan kepada nasabah.

Kantor Pos On-line

Hingga prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki jaringan kantor di Kantor Pos yang terhubung secara *on-line* dengan kantor Perseroan berjumlah 2.951 *outlet* dan tersebar di seluruh Indonesia di mana para nasabah dapat mengakses jasa Perseroan. Pada tahun 2005, Perseroan memperbaharui hubungan kerja sama yang telah dijalin bersama PT Pos Indonesia (Persero) dan meluncurkan produk dan jasa tabungan baru (tabungan BTN e-Batara Pos). Di Kantor Pos *on-line*, nasabah dapat membuka rekening tabungan atau menarik uang dari rekening tabungan. Kantor Pos *on-line* juga berfungsi sebagai *payment point*, di mana nasabah dapat bertransaksi dengan mentransfer dana mereka dari rekening tabungan ke rekening pinjaman untuk keperluan pembayaran cicilan, pembayaran uang sekolah, telepon seluler dan lainnya. Dengan menggunakan komunikasi berteknologi informasi *Host-to-Host* (H2H), sistem pusat Perseroan terhubung secara *on-line* dengan sistem pusat PT Pos Indonesia (Persero). Karyawan Kantor Pos *on-line* menangani seluruh transaksi di bawah perjanjian kerja sama yang akan diperbaharui setiap 2 (dua) tahun sekali.

Perseroan merupakan satu-satunya bank yang memiliki perjanjian kerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk produk perbankan konvensional. Untuk mendukung pengembangan distribusi melalui Kantor Pos *on-line*, Perseroan secara aktif mengembangkan strategi yang bervariasi, termasuk mengubah struktur imbal jasa berdasarkan transaksi menjadi pola bagi hasil dengan PT Pos Indonesia (Persero), menyewa 207 *passbook printers* untuk seluruh Kantor Pos *on-line*. Untuk menjaga dan meningkatkan kerja sama, Perseroan dan Kantor Pos telah membentuk unit organisasi khusus yang memfokuskan diri pada pengembangan bisnis antara kedua belah pihak. Dalam tiap wilayah operasional PT Pos Indonesia (Persero), Perseroan menempatkan *Relationship Manager* yang bertugas untuk memperkuat kerja sama bisnis.

Kantor Cabang Syariah

Setiap Kantor Cabang Syariah (KCS) menawarkan seluruh produk perbankan Syariah yang dimiliki oleh Perseroan dan memiliki kewenangan yang setara dengan kantor cabang kelas 3. Nasabah juga dapat menerima pelayanan perbankan Syariah di Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) milik Perseroan. KCPS juga berlokasi di dalam kantor cabang dan cabang pembantu Perseroan. Di lokasi tersebut, baik produk perbankan konvensional maupun Syariah sama-sama tersedia untuk para nasabah. Hingga 31 Desember 2014, Perseroan telah memiliki 22 KCS dan 21 KCPS serta 7 KKS.

ATM dan Kartu ATM

Hingga prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki 1.830 mesin ATM dan telah menerbitkan kartu ATM lebih dari 3 Juta pemegang kartu termasuk 1,75 Juta kartu debit atm dan 1,26 Juta kartu non debit ATM. Jumlah tersebut mengalami pertumbuhan lebih dari 11% dibandingkan akhir tahun lalu.

Untuk memperluas jangkauan penggunaan Kartu Debit BTN, meningkatkan kemudahan transaksi, serta meningkatkan dana pihak ketiga, Perseroan bekerjasama dengan perusahaan penyedia jaringan ATM. Selain dapat digunakan di lebih dari 43 ribu jaringan ATM Bersama dan LINK, Kartu Debit BTN juga dapat digunakan di lebih dari 37 ribu jaringan ATM berlogo Prima, dan ATM berlogo ALTO. Dengan demikian, kartu ATM BTN dapat digunakan bertransaksi di mesin ATM semua bank yang ada di Indonesia, sekaligus mesin ATM BTN dapat menerima kartu ATM dari seluruh Bank yang beroperasi di Indonesia.

Selain itu, Perseroan terus menambah jumlah ATM BTN serta meluncurkan layanan baru, yaitu ATM BTN Setoran Tunai. Saat ini ATM setoran tunai dapat dilayani di 12 Kantor Cabang Bank BTN yaitu Medan, Surabaya, Makassar, Bandung, Jakarta Harmoni, Bogor, Bekasi, Cikarang, Kelapa Gading, Kebon Jeruk, Semarang dan Tangerang.

Di samping itu, layanan baru lainnya adalah ATM BTN Non Tunai. Melalui layanan ini, nasabah dapat melakukan transaksi pembayaran dengan mudah dan cepat. Pembayaran tagihan listrik, telepon, telepon seluler, televisi berlangganan, kartu kredit, biaya pendidikan, tiket pesawat, tersedia di menu ATM BTN Non Tunai. Selain itu juga tersedia menu isi ulang pulsa telepon seluler dan pembelian pulsa prabayar listrik. Bank BTN akan terus menambah ATM Non Tunai dan ATM Setoran Tunai untuk melayani nasabah di Kantor Cabang lainnya di seluruh Indonesia.

Tabel berikut memperlihatkan jumlah dan rata-rata transaksi pembayaran ATM Perseroan.

Keterangan	31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010
Total transaksi melalui ATM	38.346.561	32.287.022	25.400.870	13.056.291	9.460.232
Total Nominal transaksi (Rp)	20.314.006.510.975	14.885.005.976.095	12.536.419.223.456	7.856.751.279	5.985.309.230

SMS Banking

SMS Banking adalah transaksi perbankan secara mobile yang dapat diakses melalui telepon seluler. Perseroan meluncurkan jasa SMS Banking pada tahun 2004. Jasa SMS Banking dapat diakses melalui telepon seluler apa saja dengan menggunakan pesan SMS yang sederhana dan dapat juga dengan menggunakan aplikasi *Java menu*. Sejumlah layanan yang disediakan meliputi pemindahan dana ke rekening BTN, pembayaran tagihan dan isi ulang pulsa telepon seluler.

Jaringan Kantor Cabang

Tabel di bawah ini menunjukkan jaringan kantor cabang Perseroan hingga 31 Desember 2013:

No Urut	Kantor Cabang	Kelas Cabang	CAPEM	KANKAS	Payment Point	Kantor Pos On-line	ATM
1	Jakarta Kuningan	Utama	9	19	1	35	59
2	Surabaya	Utama	8	19	1	80	63
3	Medan	Utama	10	14	1	187	50
4	Makassar	Utama	12	11	4	61	55
5	Yogyakarta	II	4	6	-	81	28
6	Bandung	Utama	10	17	-	113	56
7	Denpasar	II	4	7	-	69	30
8	Palembang	I	4	8	-	49	23
9	Padang	II	4	3	-	107	18
10	Banjarmasin	I	4	6	-	87	30
11	Manado	II	1	4	1	16	12
12	Malang	I	6	10	-	84	43
13	Semarang	Utama	14	13	-	241	63
14	Jakarta Harmoni	Utama	8	24	1	22	67
15	Bogor	Utama	7	16	-	35	68
16	Bekasi	Utama	7	18	2	20	82
17	Jayapura	III	3	1	-	30	10
18	Bandar Lampung	III	2	6	-	89	18
19	Kendari	III	-	2	-	21	9
20	Samarinda	II	3	3	1	63	16
21	Mataram	II	1	1	-	40	11
22	Kupang	III	-	-	-	32	5
23	Ambon	III	-	1	-	14	7
24	Palu	III	-	-	-	19	6
25	Palangkaraya	III	1	2	-	40	10
26	Batam	I	6	4	-	19	44
27	Bangkalan	II	1	4	-	39	17
28	Madiun	III	1	2	-	39	10
29	Jember	III	1	4	-	68	12
30	Solo	II	5	6	-	102	23
31	Pekalongan	III	1	4	-	82	16
32	Purwokerto	III	2	2	-	62	17
33	Tasikmalaya	III	-	4	-	45	13
34	Cirebon	II	3	7	-	74	28
35	Purwakarta	II	2	4	-	28	18
36	Bengkulu	III	-	1	-	36	9
37	Jambi	II	2	5	-	59	19
38	Pekanbaru	I	5	11	-	51	33
39	Banda Aceh	III	1	2	-	78	12
40	Pontianak	II	1	4	1	87	15
41	Tangerang	Utama	3	16	-	32	57

42	Ciputat	I	6	14	-	12	42
43	Balikpapan	III	1	3	-	22	14
44	Kediri	III	2	4	-	47	18
45	Cilegon	II	2	6	-	44	27
46	Depok	I	7	11	-	18	48
47	Gresik	III	2	5	-	39	18
48	Sidoarjo	II	1	6	-	17	22
49	Cimahi	III	3	4	-	55	17
50	Gorontalo	III	-	1	-	9	10
51	Jakarta Kebon Jeruk	II	6	21	-	27	52
52	Cikarang	II	4	10	-	15	36
53	Tanjung Pinang	III	-	2	-	9	8
54	BSD	III	1	10	-	4	31
55	Cibubur	II	4	15	-	4	46
56	Karawang	II	1	4	1	18	23
57	Pangkal Pinang	III	-	2	-	16	6
58	Ternate	III	-	-	-	17	5
59	Kelapa Gading Square	I	7	20	-	12	52
60	Jakarta Cawang	I	6	17	-	30	44
61	Karawaci	III	2	11	-	-	33
62	Harapan Indah - Bekasi	III	3	10	-	-	39
63	Surabaya Bukit Darmo	III	4	5	-	-	21
64	Bandung Timur	III	5	3	-	-	20
65	Jakarta Melawai	II	-	4	-	-	16
SUB TOTAL			223	479	14	2.951	1.830
1	Jakarta Harmoni	Syariah	5	-	1	-	-
2	Bandung	Syariah	1	2	-	-	-
3	Surabaya	Syariah	3	2	-	-	-
4	Yogyakarta	Syariah	1	-	-	-	-
5	Makassar	Syariah	1	-	2	-	-
6	Malang	Syariah	2	1	3	-	-
7	Solo	Syariah	-	-	-	-	-
8	Batam	Syariah	1	-	-	-	-
9	Medan	Syariah	-	-	-	-	-
10	Tangerang	Syariah	1	-	-	-	-
11	Bogor	Syariah	1	1	-	-	-
12	Bekasi	Syariah	1	-	2	-	-
13	Pekanbaru	Syariah	-	1	-	-	-
14	Semarang	Syariah	1	-	-	-	-
15	Banjarmasin	Syariah	-	-	-	-	-
16	Cirebon	Syariah	-	-	-	-	-
17	Palembang	Syariah	-	-	-	-	-
18	Balikpapan	Syariah	-	-	-	-	-
19	Cilegon	Syariah	-	-	-	-	-
20	Jakarta Pasar Minggu	Syariah	3	-	-	-	-
21	Tasikmalaya	Syariah	-	-	-	-	-
22	Tegal	Syariah	-	-	-	-	-
SUB TOTAL SYARIAH			21	7	8	-	-
TOTAL			244	486	22	2.951	1.830

5. ASET TETAP

Berikut ini adalah ringkasan daftar aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014:

Aset Tetap	Nilai Perolehan dalam jutaan Rupiah	Akumulasi Penyusutan dalam jutaan Rupiah	Nilai Buku dalam jutaan Rupiah	Keterangan
Tanah	537.974	-	537.974	Dengan total luas 341.355 m ²
Bangunan	991.617	341.596	650.021	-
Peralatan Kantor dan Kendaraan Bermotor	1.448.684	1.170.903	277.781	Terdiri dari komputer, perabot kantor, perabot rumah dinas dan kendaraan dinas.
Aktiva dalam Penyelesaian	22.607	-	22.607	Terdiri dari gedung dalam pembangunan dan peralatan kantor dalam penyelesaian
Total	3.000.882	1.512.499	1.488.383	

Properti

Per tanggal 31 Desember 2014, Perseroan menggunakan lahan milik Perseroan seluas total 135.960 m² yang terdiri atas sekitar 10.147 m² untuk kantor pusat, sekitar 99.154 m² digunakan untuk kantor cabang dan sekitar 26.059 m² untuk kantor cabang pembantu.

6. PEMASARAN

Strategi pertumbuhan bisnis korporat perlu didukung oleh pengelolaan *selling* dan komunikasi *marketing* yang baik. Secara umum promosi dan komunikasi produk-produk dana ritel lebih diarahkan kepada *up selling* dan *cross selling* nasabah eksisting melalui promosi dan akuisisi nasabah baru melalui penjualan oleh *funding officer*. Sedangkan promosi produk-produk kredit difokuskan kepada penguatan *brand* dan *repositioning* produk kredit perumahan pada segmen menengah-atas.

Fungsi *marketing communication* akan dioptimalkan dalam mengelola komunikasi pemasaran baik dari sisi peningkatan *brand image* korporat maupun informasi produk dan layanan, khususnya untuk *above the line*, agar dicapai hasil yang lebih efektif.

Adapun kegiatan program promosi dan komunikasi produk-produk Bank BTN yang akan dilakukan pada tahun 2015 diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Program promosi:
 1. Program undian berhadiah Tabungan BTN Batara Homebassis.
 2. Program hadiah langsung yang ditujukan kepada nasabah sebagai daya tarik untuk melakukan *up selling*.
 3. Promosi KPR melalui *Gimmick Marketing Program* antara lain penawaran suku bunga murah, diskon provisi, dan bebas biaya administrasi, serta penawaran produk KPR Digital yang merupakan *bundling* produk KPR dan Digihome Telkom.
 4. *Customer gathering*.
 5. *Customer loyalty program*.
- b. Promosi melalui media cetak dan elektronik secara terintegrasi baik untuk produk *funding*, *lending*, layanan prioritas, *elektronik payment* dan ATM.
- c. Advertising melalui *above the line* dan *below the line*.
- d. Penyelenggaraan BTN Property Expo skala nasional dan regional.
- e. Pengelolaan *selling* yang komprehensif untuk penjualan produk consumer banking oleh tenaga penjualan.
- f. Marketing dana komersial secara integrasi yang melibatkan kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor cabang baik *up selling* terhadap nasabah lembaga eksisting maupun akuisisi nasabah lembaga baru.
- g. Program *Business to Business/B2B (one stop service)* dalam mengelola dana komersial

Berikut ini adalah keterangan mengenai nasabah dan strategi pemasaran untuk masing-masing bisnis utama Perseroan:

Consumer Banking

Perseroan berusaha untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan nasabah melalui penyediaan jasa berkualitas tinggi melalui saluran-saluran yang mudah untuk dijangkau. Perseroan telah melanjutkan upaya untuk menyederhanakan proses persetujuan kredit dengan mengambil langkah-langkah seperti meningkatkan kewenangan persetujuan kredit pada kantor-kantor cabang dan kantor-kantor cabang pembantu Perseroan dan melalui model penilaian kredit Perseroan serta layanan 1-5-1.

Aktivitas pemasaran yang berorientasi nasabah dilakukan melalui program penarikan undian, pemasangan iklan pada media cetak maupun elektronik, *sponsorship* bagi pengembang perumahan dan pameran, pembukaan outlet perbankan tambahan di mall-mall, program promosi dengan pengembang-pengembang tertentu di mana Perseroan memberikan kredit sampai dengan 90,0% dari harga beli serta tingkat suku bunga kredit untuk peminjam, promosi khusus untuk kredit perumahan dengan tingkat suku bunga khusus untuk karyawan badan usaha milik negara, serta program promosi khusus seperti pemberian hadiah untuk nasabah lama, dan karyawan yang membawa nasabah baru bagi Perseroan.

Perseroan memfokuskan pemasaran perbankan retail serta upaya ekspansi pada enam kota terbesar di Indonesia. Perseroan juga melakukan ekspansi bisnis perbankan pada kota-kota dan propinsi di seluruh Indonesia, dengan meningkatkan efisiensi operasional kantor-kantor cabang regional Perseroan serta mempekerjakan tambahan sumber daya manusia untuk mengembangkan produk yang secara spesifik menjangkau nasabah berpendapatan menengah ke bawah serta keluarga-keluarga di daerah yang kurang berkembang di seluruh Indonesia.

Perseroan memiliki jaringan pelayanan dengan jangkauan yang luas melalui kantor cabang dan jaringan ATM, serta jasa perbankan melalui telepon dan SMS serta jaringan *online* dengan kantor pos sebanyak 2.951 *outlet* di seluruh Indonesia. Perseroan sedang berusaha untuk meningkatkan layanan Perseroan dengan memperluas jasa perbankan melalui telepon, menambah jaringan ATM, serta menambah jumlah outlet Kantor Pos yang terhubung secara *online* dengan Perseroan.

Commercial Banking

Perseroan melayani nasabah umum melalui *relationship manager lending* dan *funding* yang berada di kantor pusat, kantor wilayah dan kantor cabang Perseroan. *Relationship manager lending* Perseroan memiliki spesialisasi pada produk pembiayaan Perseroan dan fokus untuk membangun hubungan dan memberikan solusi keuangan kepada nasabah Perseroan. *Relationship manager funding* Perseroan terspesialisasi pada produk pendanaan, penyaluran solusi investasi, serta memantau pendanaan dan portofolio investasi untuk nasabah umum. Saat ini Perseroan memiliki target nasabah *commercial lending* yang beroperasi dalam sektor telekomunikasi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan industri yang terkait dengan perumahan. Sedangkan target nasabah *commercial funding* meliputi sektor BUMN/BUMD, perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, institusi pendidikan dan institusi lainnya.

Perbankan Syariah

Pada tanggal 17 November 2013 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pencaanangan Gerakan Ekonomi Syariah (Gres!) sebagai agenda Nasional yang merupakan sejarah baru bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pencaanangan tersebut tidak hanya untuk memberdayakan ekonomi umat, tetapi juga diharapkan dapat semakin menumbuhkan dan meningkatkan pemerataan perekonomian di Indonesia. Hal tersebut juga merupakan upaya untuk lebih mengoptimalkan penerapan ekonomi syariah di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, wirausaha, perbankan, investasi, asuransi, dan sektor pembangunan ekonomi lainnya, sehingga dapat mewujudkan sistem perekonomian yang lebih adil dan menyejahterakan rakyat. Melalui gerakan ini pula, diharapkan masyarakat di seluruh Tanah Air berperan lebih aktif dalam pengembangan ekonomi syariah. Lebih jauh lagi, kita juga ingin menjadikan negeri kita sebagai Pusat Keuangan Syariah Dunia, yang terintegrasi dengan sistem internasional berbasis syariah, dan merupakan salah satu esensi dari perwujudan Islam sebagai *rahmat bagi semesta alam*.

Pencaanangan Gres! Sebagai Agenda Nasional tersebut memberikan peluang bagi perkembangan bisnis syariah perseroan, sampai dengan 31 Desember 2014 unit bisnis syariah Perseroan telah memiliki 22 Kantor Cabang Syariah, 21 kantor cabang pembantu syariah, dan 7 Kantor Kas Syariah serta didukung dengan 240 Kantor Layanan Syariah yang merupakan perwujudan sinergi antara UUS Perseroan dengan unit bisnis konvensional, sehingga asset UUS Perseroan pada 31 Desember 2014 memberikan kontribusi sebesar 7,71% terhadap total asset Perseroan.

7. KERJASAMA KELEMBAGAAN

Di samping kegiatan usaha yang telah disebutkan di atas, sampai dengan 31 Maret 2015 Perseroan juga melakukan kerjasama dengan beberapa badan dan perusahaan, seperti:

1. Kerjasama dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat dalam rangka pelaksanaan program pembiayaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan.
2. Kerjasama dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat, TNI (Mabes TNI Cilangkap) dan Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur tentang pengadaan perumahan bagi anggota TNI.
3. Kerjasama dengan Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perindustrian, Kementerian Negara Koperasi dan UKM dalam rangka pemberian fasilitas kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
4. Kerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero) tentang Pelaksanaan Transaksi Tabungan, Penerimaan Pembayaran Angsuran dan Denda Kredit, Transaksi Produk dan Jasa Perbankan Lainnya di Kantor Pos Secara *Online*.
5. Kerjasama dengan PT Taspen (Persero) dalam rangka pelaksanaan pembayaran tabungan hari tua, tabungan hari tua multi guna, dan uang pensiun.
6. Kerjasama dengan PT PLN (Persero) sebagai tempat pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya bagi pelanggan PLN.
7. Kerjasama dengan Kementerian Agama sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Haji.
8. Kerjasama dengan Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan (YKPP Dephan) dalam rangka pemberian KPR dan penyaluran dana Bantuan Uang Muka bagi pensiunan Dephan, anggota TNI-POLRI dan peserta ASABRI.
9. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dalam rangka penyediaan fasilitas pelayanan dan produk-produk barang jasa perbankan.
10. Kerjasama dengan PT Jamsostek (Persero) dalam rangka penyaluran pinjaman uang muka perumahan untuk peserta program Jamsostek.
11. Kerja sama dengan HIMBARA dan Telkom untuk HIMBARA LINK.
12. *Non Housing Department* yang meliputi perjanjian kerjasama Bank Garansi dengan ASEI, perjanjian kerjasama Bank Garansi dengan PT Binasentra Purna dan MOU III Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat dengan Kementerian BUMN.
13. *Housing Department* yang meliputi perjanjian kerjasama KMK Kontraktor dengan PT Utama Karya, perjanjian kerjasama KMK Kontraktor dengan PT Wijaya Karya, perjanjian kerjasama KMK Kontraktor dengan PT Pembangunan Perumahan dan perjanjian kerjasama KMK Kontraktor dengan PT Wijaya Karya Realty.

8. PROSPEK USAHA DAN KEUNGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Prospek usaha

Perekonomian Indonesia tahun 2015 diprediksi akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan Pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM ke sektor produktif akan menjadi stimulus bagi pergerakan perekonomian nasional. Hal ini akan menjadi angin segar bagi industri perbankan nasional.

Industri properti tahun 2015 juga akan terus berkembang. Kebutuhan akan rumah dan produk properti lainnya masih relatif tinggi. Hal ini dikarenakan masih rendahnya rasio kepemilikan rumah dibandingkan jumlah penduduk Indonesia. Selain itu, pertambahan jumlah keluarga baru juga turut mendorong meningkatnya kebutuhan akan produk properti, terutama rumah.

Di segmen kredit bersubsidi, diperkirakan pada tahun 2015 akan mengalami peningkatan seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk membangun 1 juta rumah rakyat. Perseroan sebagai bank yang ditunjuk Pemerintah untuk membantu menyalurkan kredit bersubsidi akan memperoleh peluang yang besar dari kebijakan tersebut.

Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Dewan Komisaris telah memberikan arahan terhadap RBB tersebut dimana Perseroan akan tetap fokus dalam pembiayaan perumahan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris berpandangan bahwa prospek usaha Perseroan sangat baik dan menjanjikan untuk terus tumbuh dan berkembang secara sustainable.

Keunggulan Kompetitif Perseroan

Keunggulan kompetitif Perseroan adalah sebagai berikut:

- Pemberi kredit perumahan terbesar di Indonesia

Perseroan adalah perusahaan pemberi kredit perumahan terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 25% dari jumlah kredit perumahan yang beredar di Indonesia per 31 Desember 2014 (berdasarkan data yang dipublikasi oleh Bank Indonesia). Posisi Perseroan sebagai pemimpin pasar dalam kredit perumahan telah terbentuk sejak tahun 1976 di mana fokus Perseroan adalah pada kredit perumahan. Kredit perumahan Perseroan terdiri atas kredit bersubsidi dan kredit non-subsidi. Lihat bagian "Kegiatan Usaha - *Consumer Banking* - Kredit Perumahan Bersubsidi" di bawah ini. Dalam segmen kredit perumahan bersubsidi di Indonesia, Perseroan memiliki pangsa pasar sebesar 95% dari jumlah kredit perumahan bersubsidi yang baru diterbitkan pada tahun 2013 (berdasarkan data publikasi Kementerian Negara Perumahan Rakyat per 31 Desember 2014).

Posisi Perseroan sebagai pemimpin dalam pasar kredit perumahan telah membentuk citra perusahaan yang kuat, sehingga membantu Perseroan dalam meraih pasar kelompok masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas. Per tanggal 31 Desember 2014, *outstanding* kredit perumahan mencapai jumlah Rp102.614 miliar yang terdiri dari 33,47% kredit bersubsidi, 44,44% kredit non-subsidi dan non KPR dan KYG sebesar 22,09%.

- Basis nasabah dan jaringan yang luas

Perseroan memiliki basis nasabah yang luas, dengan rekening kredit sekitar 1,5 juta serta sekitar 5,4 juta rekening simpanan per tanggal 31 Desember 2014. Basis nasabah Perseroan (termasuk di antaranya kredit *consumer* dan *commercial*) menjadi dasar yang kuat untuk memasarkan produk dan jasa Perseroan dalam rangka meningkatkan bisnis kredit non-perumahan. Selain itu, setelah penandatanganan kerjasama Perseroan dengan Kantor Pos yang dilakukan pada Desember 2005, hingga 31 Desember 2014 Perseroan telah memiliki 2.951 jaringan kantor di Kantor Pos seluruh Indonesia yang terhubung secara *online*. Pada outlet Perseroan di Kantor Pos, nasabah dapat membuka rekening tabungan, melakukan pencairan saldo, serta melakukan pembayaran cicilan. Kerjasama Perseroan dengan PT Pos Indonesia (Persero) telah memperluas jaringan Perseroan secara signifikan pada nasabah dan konsumen potensial.

- Portofolio kredit serta kualitas aset yang kuat

Perseroan menjaga rasio kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diklasifikasikan *non-performing* (NPL/F) pada tingkat yang relatif rendah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rasio NPL bersih pada tingkat 3,12%, 3,04%, dan 2,79% secara berturut-turut untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2013, dan 2014.

Perseroan sangat memperhatikan kualitas manajemen risiko dan telah membentuk sistem organisasi dan sistem informasi terpusat yang ditujukan untuk memberikan informasi secepatnya atas risiko operasi, sehingga meningkatkan manajemen risiko Perseroan dan sistem kontrol internal. Sebagai contoh, untuk mengelola risiko kredit dengan lebih efektif, Perseroan telah mengimplementasikan beberapa inisiatif, termasuk mengubah proses persetujuan kredit, sistem penilaian kredit internal, sistem pemeringkatan serta meninjau dan menguji model penilaian kredit. Perseroan juga menerapkan peraturan-peraturan yang terkait dengan Basel II yang diterapkan oleh Bank Indonesia.

- Inovasi dan kesiapan untuk tumbuh dalam area bisnis baru

Sampai dengan 31 Desember 2014, Perseroan telah sukses menawarkan Efek Beragunan Aset (EBA) di Indonesia sebanyak 7 penerbitan dengan jumlah total sebanyak Rp 5.456 miliar. Posisi utama Perseroan di bidang kredit perumahan dan kualitas aset yang kuat telah memberikan kontribusi pada kesuksesan peluncuran EBA tersebut. Pengembangan pasar EBA dapat membantu mendiversifikasi sumber pendanaan Perseroan, meningkatkan kapasitas pemberian kredit dan memaksimalkan neraca Perseroan. Perseroan juga mendirikan unit usaha Syariah pada tahun 2004 yang hingga sekarang telah bertumbuh dengan pesat. Perseroan kini telah mengubah posisinya sebagai bank dengan produk dan jasa ritel yang bervariasi melalui usaha pengembangan dan diversifikasi produk.

- Tim manajemen yang berpengalaman dan implementasi budaya perusahaan yang baru

Tim manajemen senior Perseroan memiliki pengalaman yang luas dalam industri di Indonesia. Kemampuan dalam memberikan arah strategi dan membuat inisiatif bisnis dalam pasar yang kompetitif telah dibuktikan melalui posisi utama Perseroan dalam sektor kredit perumahan di bidang perbankan di Indonesia. Ke-16 orang Terdapat anggota tim manajemen senior Perseroan memiliki pengalaman rata-rata lebih dari 20 tahun dalam industri perbankan. Tim manajemen senior Perseroan telah mengeluarkan sejumlah inisiatif bagi Perseroan, termasuk implementasi dari inisiatif tata kelola perusahaan yang menyeluruh serta penerapan rencana strategis Perseroan, Bank BTN menitikberatkan pada transformasi secara menyeluruh untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkualitas dalam memperkuat bank fokus perumahan. berupa Visi 2012.

Perseroan mengimplementasikan budaya kerja perusahaan yang baru pada tahun 2014 yang memusatkan pada nilai-nilai Perseroan yaitu: *Profesionalism, Competitiveness, Integrity, Lean, Innovation, dan Strive for Excellence*.

9. PERSAINGAN USAHA

Perseroan menghadapi persaingan dalam seluruh lini bisnis yang dijalani. Pesaing utama Perseroan adalah bank-bank domestik, dan dalam cakupan yang lebih sempit, bank-bank asing yang beroperasi di Indonesia. Untuk kredit perumahan, kompetitor utama Perseroan adalah bank-bank domestik karena bank-bank asing tidak diperkenankan memberikan kredit perumahan. Sebagai akibat dari krisis keuangan global, persaingan untuk mendapatkan pendanaan – khususnya pendanaan ritel yang menawarkan biaya pendanaan yang lebih murah – menjadi semakin intens. Perseroan biasanya bersaing dengan bank-bank lain terutama dalam hal ekstensi dan kenyamanan saluran distribusi, rentang produk, harga, pelayanan nasabah dan pencadangan untuk jasa teknologi.

Selain itu, secara tidak langsung Perseroan menghadapi persaingan dari berbagai jenis institusi/lembaga keuangan. Beberapa kompetitor secara substansial lebih besar dari Perseroan, memiliki sumber keuangan dan sumber lain yang lebih besar serta jaringan kantor cabang dan ATM yang lebih luas. Sebagai tambahan, pada tahun 1999, pemerintah Republik Indonesia telah menghapus batas kepemilikan bank asing dan mengizinkan bank-bank asing membuka kantor cabang di Indonesia. Persaingan dari bank-bank yang lebih dulu beroperasi dan bank baru baik domestik maupun asing, di mana bank asing dapat menerapkan *joint venture* atau investasi di bank-bank domestik, dapat mengakibatkan dampak yang negatif bagi kondisi operasional dan keuangan Perseroan.

Karena pembangunan dan reformasi sektor keuangan Indonesia terus berlanjut, Perseroan kemungkinan akan menghadapi persaingan dari sejumlah lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa perbankan yang lebih luas atau peminjaman dengan limit yang lebih besar atau memiliki sumber daya finansial dan lainnya yang lebih besar daripada Perseroan. Banyak lembaga keuangan akan bersaing untuk mendapat target nasabah yang sama dengan target Perseroan, dan banyak institusi yang memiliki akses kepada pemerintah atau grup bisnis dengan sumber finansial yang lebih besar. Beberapa kompetitor Perseroan telah, dan diprediksi akan, membentuk aliansi strategis dengan beberapa bank asing dengan sumber daya manajemen dan finansial yang secara signifikan lebih besar. Kompetisi dalam industri yang dihadapi oleh Perseroan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab V "Risiko Usaha".

Tabel berikut ini memperlihatkan total deposit dan informasi pangsa pasar yang dimiliki oleh Perseroan beserta informasi mengenai pangsa pasar para pesaing pada 31 Desember 2014.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dalam persentase)

Per 31 Desember 2014

No	Bank	Rekening Giro	Pangsa Pasar	Rekening Tabungan	Pangsa Pasar	Rekening Deposito	Pangsa Pasar	Jumlah Dana Pihak Ketiga	Pangsa Pasar
1	Mandiri	123.042.656	22,58%	229.454.611	22,53%	223.828.534	21,85%	576.325.801	22,27%
2	BCA	107.438.938	19,72%	228.992.739	22,48%	11.509.908	1,12%	347.941.585	13,45%
3	BRI	89.075.577	16,35%	232.413.723	22,82%	278.915.070	27,23%	600.404.370	23,20%
4	BNI	82.515.695	15,14%	113.821.715	11,18%	102.683.632	10,03%	299.021.042	11,56%
5	CIMB	38.947.501	7,15%	43.647.930	4,29%	92.439.266	9,03%	175.034.697	6,76%
6	Permata	25.847.633	4,74%	31.525.634	3,10%	90.262.609	8,81%	147.635.876	5,71%
7	BTN	23.231.482	4,26%	32.747.912	3,22%	50.499.266	4,93%	106.478.660	4,11%
8	Danamon	22.028.801	4,04%	36.789.790	3,61%	58.347.110	5,70%	117.165.701	4,53%
9	BII	16.495.250	3,03%	20.193.799	1,98%	59.820.263	5,84%	96.509.312	3,73%
10	Panin	16.313.198	2,99%	48.849.631	4,80%	55.898.069	5,46%	121.060.898	4,68%
		544.936.731	100,00%	1.018.437.484	100,00%	1.024.203.727	100,00%	2.587.577.942	100,00%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia 2014

10. STRATEGI PERSEROAN

Sebagai landasan kerja tahun 2014 yang akan digunakan sebagai usaha mencapai visi dan misi Perseroan, maka Direksi Perseroan menetapkan arah Kebijakan Umum Perseroan dengan "Transformasi bisnis, budaya kerja dan infrastruktur yang didukung oleh implementasi GCG untuk pencapaian bisnis yang berkualitas". Untuk menunjang hal tersebut, telah disusun fokus bisnis dan inisiatif utama yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan program kerja dan anggaran tahun 2014 sebagai berikut:

1. Transformasi bisnis
 - a. Optimalisasi bisnis inti dan eksisting:
 - Pertumbuhan kredit yang tetap fokus pada perumahan dengan memperkuat posisi Bank BTN sebagai *market leader* KPR.
 - Mengembangkan kredit non perumahan yang bermargin tinggi secara selektif.
 - Perbaikan kualitas kredit dengan upaya penanganan secara dini (*early bucket collection*).
 - Peningkatan bisnis syariah
 - b. Menciptakan sumber pertumbuhan (*growth engine*) baru dengan focus :
 - Pengembangan bisnis *wealth management*, *treasury trading*, *trade finance*, remitansi, dan *card business* sebagai kontributor utama peningkatan *fee based income*.
 - Pembentukan anak usaha di bidang asuransi atau *multifinance* yang berkaitan dengan bisnis inti perusahaan (bisnis pada *value chain* perumahan).
 - Mengembangkan aliansi strategi dengan BUMN lainnya.
 - Mengembangkan property portal untuk member kemudahan dan alternative bagi masyarakat dalam mengakses informasi, produk, dana layanan khususnya KPR.
 - c. Pertumbuhan pendanaan yang lebih agresif dari pertumbuhan kredit dengan bertumpu pada peningkatan DPK murah.

2. Transformasi budaya kerja, yaitu :
 - a. Menjadikan budaya kerja sebagai pemicu peningkatan kinerja perusahaan
 - b. Melakukan kajian dan implementasi budaya kerja
 - c. Kajian *Re-branding* sebagai proses awal menuju *world class banking*
3. Transformasi infrastruktur (*foundational transformation*)
 - a. Perbaikan GCG dan penerapannya secara konsisten
 - b. Perbaikan *risk management*, kepatuhan, dan *internal audit* dan penerapannya secara konsisten
 - c. Perbaikan dan peningkatan layanan
 - d. Penataan bisnis dan proses bisnis
 - e. Penguatan *human capital* melalui recruitment, prohire & outsourcing, pengembangan skill, *talent management* dan *knowledge management* serta *carrer path*
 - f. Perbaikan manajemen perkreditan dan *collection* secara integratif
 - g. Peningkatan produktivitas outlet baik jaringan kantor (kantor cabang, KCP, dan kantor kas) maupun elektronik
 - h. Menerapkan efisiensi, termasuk proses otomatisasi untuk menambah kemampuan melayani pasar
 - i. Memperkuat MIS di berbagai level organisasi (korporat, divisi, wilayah, dan cabang)

Adapun strategi pengembangan bisnis yang ditetapkan pada tahun 2015, adalah sebagai berikut:

1. **Mengembangkan organisasi yang efektif**
 Pengembangan struktur organisasi dalam rangka mendukung bisnis terus menerus dilakukan dimana secara umum program yang direncanakan pada tahun 2014 adalah mengembangkan struktur organisasi untuk mendukung strategi pertumbuhan bisnis baik untuk Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang.
2. **Mengoptimalkan Teknologi Informasi (TI)**
 Beberapa proyek TI yang direncanakan akan dilakukan pada tahun 2015 selain melanjutkan proyek-proyek tahun sebelumnya, juga memberikan support kepada divisi lain dalam pengembangan aktivitasnya. Beberapa program kerja yang akan dikembangkan dalam tahun 2015 diantaranya adalah melanjutkan project tahun 2014 dan pengadaan serta implementasi aplikasi strategis dan inovatif tahun 2014, diantaranya adalah pembelian mesin AS 400 baru dalam rangka peremajaan data dan jaringan dan pengembangan kartu chip ATM.
3. **Mengembangkan produk dan fitur**
 Guna mendukung rencana bisnis pada tahun 2015 direncanakan Bank BTN tetap melakukan pengembangan terhadap produk/aktivitas yang telah ada, dan juga direncanakan penerbitan atas beberapa produk/aktivitas baru. Sebagian besar rencana pengembangan produk dan aktivitas baru tahun 2015 ini adalah rencana produk/aktivitas yang telah disiapkan pada tahun sebelumnya namun terkendala dalam peluncurannya.

Pengembangan atas Produk dan Aktivitas yang telah ada

Pengembangan atas produk yang telah ada dilakukan dengan memperbaiki atau menambah fitur/skim terhadap produk/aktivitas tersebut (bukan termasuk dalam kategori produk/aktivitas baru), yaitu :

Pengembangan Produk Kredit.

- a. KPR *fully furnish*, penambahan fitur/skim terhadap produk KPR yang telah ada. Dengan fitur ini, nasabah bisa memiliki rumah beserta isi rumah seperti furniture, barang elektronik dll.
- b. KTA pendidikan, kredit untuk pembiayaan pendidikan dengan pembayaran secara diangsur.
- c. KPR Prioritas, merupakan layanan khusus untuk nasabah dengan nilai KPR diatas Rp. 500 juta ataupun nasabah prioritas dengan pelayanan individu.
- d. Sindikasi Bank Garansi oleh unit syariah.

Pengembangan Produk Dana

Pada tahun 2015 direncanakan pengembangan produk / aktivitas bidang dana sebagai berikut :

- a. Tabungan Berjangka, merupakan produk unit syariah dengan bagi hasil yang lebih baik dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Tabungan valas, giro valas dan deposito valas, merupakan produk simpanan dari unit syariah dengan menggunakan mata uang asing.

Pengembangan/penambahan Fitur atas Aktivitas yang telah ada

Pada tahun 2015 juga direncanakan akan dilakukan pengembangan atas fitur yang sudah ada, yaitu penambahan fitur atas transaksi *electronic payment*, dan *contactless* serta sekuritisasi dengan investor luar negeri.

Rencana Penerbitan Produk Baru dan Pelaksanaan Aktivitas Baru

Penerbitan Produk Baru Kredit/Pembiayaan Syariah

Untuk mendukung komposisi kredit perumahan dan kredit non perumahan menjadi maksimal 85%:15% pada tahun 2015 mendatang, dikembangkan produk/fitur kredit dan pembiayaan yaitu:

- a. Pelayanan ekspor-impor, perdagangan dan transaksi luar negeri, yaitu melalui penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau *Letter of Credit* (L/C).

- b. Anjak piutang, yang dikembangkan diperuntukkan bagi pengembang yang memiliki tagihan atas angsuran pembayaran rumah/apartemen yang dijual kepada end user.
- c. Kepemilikan Logam Mulia, merupakan produk kredit oleh unit syariah dengan tujuan pembelian logam mulia/emas.

Penerbitan Produk Baru Dana

Dalam mendukung penghimpunan dana pihak ketiga, akan dikembangkan skema tabungan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Tabungan BTN Perumahan, adalah tabungan yang ditujukan dalam rangka membantu masyarakat untuk mempersiapkan diri lebih awal dalam menabung dan memperoleh uang muka untuk membeli rumah.
- b. Tabungan BTN Cermat untuk Laku Pandai, adalah tabungan berbasis kartu yang diterbitkan melalui agen bank dengan menggunakan instrument EDC dan kartu jenis magnetik yang bertujuan untuk memberikan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif kepada masyarakat yang belum memiliki akses layanan keuangan.

Pelaksanaan Aktivitas Baru

Dalam rangka mendukung kegiatan bisnis dan pertumbuhan dana pihak ketiga, serta peningkatan pendapatan *fee based*, maka direncanakan melaksanakan aktivitas baru antara lain:

- a. *Internet Banking* dan *Mobile Banking*, adalah fasilitas layanan transaksi perbankan yang dapat diakses nasabah melalui media internet dan telepon bergerak (*mobile phone*).
- b. *Branchless banking* adalah kegiatan jasa layanan sistem pembayaran dan keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik bank, namun dengan menggunakan sarana teknologi, seperti EDC dan telepon seluler, juga jasa pihak ketiga terutama untuk melayani masyarakat *unbanked*.
- c. *Payment Point Online Bank* (PPOB), merupakan kerjasama dengan mitra untuk penyelenggaraan penerimaan transaksi pembayaran tagihan PLN dan tagihan lainnya serta layanan transaksi yang dapat dikembangkan kemudian.
- d. Portal BTN *property.com*, penyediaan layanan informasi dan transaksi jual/beli perumahan/property melalui internet serta proses pengajuan KPR/KPA melalui internet.
- e. Agen penjualan produk non banking berupa kerjasama Bank dengan pihak lain untuk menjual produk asuransi (*Bancassurance*), Obligasi Ritel Indonesia dan Reksadana
- f. *Remittance*
- g. Kartu Prepaid, untuk memberikan kemudahan (akses) bagi nasabah dalam bertransaksi khususnya dalam hal pembayaran

4. Penataan bisnis dan proses bisnis

- a. Pengembangan Bisnis UMKM
Bisnis UMKM perlu terus dikembangkan selain sebagai pengaturan *portfolio mix* khususnya untuk kredit non perumahan yang memberikan margin tinggi, juga dalam rangka persiapan memenuhi ketentuan PBI No. 14/22/PBI/2012 bahwa setiap bank wajib memiliki *portfolio* UMKM sebesar minimal 20% pada tahun 2018.
- b. Penerbitan obligasi/dana *wholesale* lainnya
Sumber dana yang berasal dari *wholesale funding*, khususnya dari mitra-mitra strategis, terus dikembangkan sebagai strategi untuk mengurangi *maturity mismatch* yaitu penerbitan surat berharga atau pinjaman beragunan aset dan sekuritisasi KPR. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan Bank BTN II Tahap I atau Pinjaman *underlying* aset KPR/*Term Purchase Program* atau dana *Wholesale* lainnya sebesar Rp4.000 miliar. Sebagian dari rencana penerbitan ini sebesar Rp1.000 miliar digunakan sebagai *buffer likuiditas* (hanya akan dilaksanakan bila terdapat kebutuhan likuiditas).
- c. Sekuritisasi KPR Rp3.000 miliar
- d. Mengembangkan *trade finance* dan remitansi
- e. Program persiapan *spin off* syariah.
Dalam jangka pendek, strategi bisnis syariah akan diarahkan pada penguatan bisnis syariah melalui peningkatan produktivitas dan mengembangkan model *leveraging* yang memanfaatkan *network* induk untuk efisiensi dan efektifitas, dengan tahapan pada tahun 2015 mengupayakan pembukaan *office channelling* di seluruh Kantor Cabang Konvensional dan Kantor Cabang Pembantu Konvensional, sehingga jumlah *Office Channelling* adalah 288 KLS (OC). Disamping itu pada tahun 2015 ini akan dilakukan uji coba pembukaan *Office Channelling* di 6 Kantor Kas Konvensional, hal ini dikarenakan pada tahun 2015 fokus *office channelling* adalah pada penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK).

5. Memperkuat selling dan komunikasi marketing

Strategi pertumbuhan bisnis korporat perlu didukung oleh pengelolaan *selling* dan komunikasi *marketing* yang baik.

Secara umum promosi dan komunikasi produk-produk dana ritel lebih diarahkan kepada *up selling* dan *cross selling* nasabah eksisting melalui promosi dan akuisisi nasabah baru melalui penjualan oleh *funding officer*. Sedangkan promosi produk-produk kredit difokuskan kepada penguatan *brand* dan *repositioning* produk kredit perumahan pada segmen menengah-atas.

Fungsi *marketing communication* akan dioptimalkan dalam mengelola komunikasi pemasaran baik dari sisi peningkatan *brand* image korporat maupun informasi produk dan layanan, khususnya untuk *above the line*, agar dicapai hasil yang lebih efektif.

Adapun kegiatan program promosi dan komunikasi produk-produk Bank BTN yang akan dilakukan pada tahun 2015 diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Program promosi
 - 1) Program undian berhadiah Tabungan BTN Batara Homebustis.
 - 2) Program hadiah langsung yang ditujukan kepada nasabah sebagai daya tarik untuk melakukan *up selling*.
 - 3) Promosi KPR melalui *Gimmick Marketing Program* antara lain penawaran suku bunga murah, diskon provisi, dan bebas biaya administrasi, serta penawaran produk KPR Digital yang merupakan *bundling* produk KPR dan Digihome Telkom.
 - 4) *Customer gathering*.

- 5) *Customer loyalty program*.
 - b. Promosi melalui media cetak dan elektronik secara terintegrasi baik untuk produk *funding, lending*, layanan prioritas, *elektronik payment* dan ATM.
 - c. *Advertising* melalui *above the line* dan *below the line*.
 - d. Menyelenggarakan BTN *Property Expo* skala nasional dan regional.
 - e. Pengelolaan *selling* yang komprehensif untuk penjualan produk *consumer banking* oleh tenaga penjualan.
 - f. *Marketing* dana komersial secara integrasi yang melibatkan kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor cabang baik *up selling* terhadap nasabah lembaga eksisting maupun akuisisi nasabah lembaga baru.
 - g. Program *Business to Business/B2B (one stop service)* dalam mengelola dana komersial.
- 6. Meningkatkan kualitas pelayanan**
 Kualitas pelayanan adalah salah satu faktor penting dalam peningkatan usaha bisnis bank. Ada beberapa program kerja yang akan dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada tahun 2015 yaitu sebagai berikut:
- a. Program *enforcement* dan pembinaan terkait layanan.
 - b. Pembaruan panduan standar layanan.
- 7. Optimalisasi *delivery channel***
 Strategi pengembangan jaringan kantor tahun 2015 akan diarahkan pada optimalisasi jaringan kantor eksisting agar memberikan kontribusi produktivitas yang lebih baik dengan melakukan relokasi, standarisasi, pemenuhan personil dan gap kompetensi.
- Penempatan mesin baru ATM tahun 2014 tetap akan dilakukan sebanyak 302 unit ATM yang merupakan *carry over* tahun 2013 yang sudah dilakukan pengadaannya. Penempatan ATM baru tersebut diprioritaskan pada lokasi off site yaitu pada lokasi mitra-mitra strategis, lokasi bisnis, dan kawasan perumahan.
- Pada tahun 2015 juga akan terus dikembangkan *e-channel* dan *branchless banking* dalam memperluas aksesibilitas bank dengan melakukan aliansi dengan PT. Telkom Indonesia dalam mengembangkan *agent bank (branchless banking)* dengan melakukan kerjasama pengembangan produk dan promosi bersama. Pengembangan *mobile banking, internet banking* dan ATM, direncanakan peningkatan jumlah transaksi melalui *e-channel* dengan mengalihkan sebagian transaksi loket ke transaksi *e-channel* dengan melakukan pengaturan, edukasi dan promosi kepada nasabah.
- Portal Property BTN btnproperti.co.id dibangun untuk memberikan kemudahan dan alternatif bagi masyarakat dalam mengakses informasi, produk, dan layanan khususnya untuk produk KPR. Manfaat yang diberikan bagi masyarakat dan nasabah adalah kemudahan dalam melakukan pencarian dan pemesanan unit rumah di berbagai wilayah KC Bank BTN di seluruh Indonesia, kemudahan melakukan simulasi kredit, pengajuan aplikasi, dan pemantauan proses kredit permohonan secara *online*. Sedangkan bagi pengembang, selain akan meningkatkan pemasaran melalui pencantuman unit stok rumah pada *website*, juga memberikan kemudahan dalam monitoring stok dan pembayaran.
- 8. Mengembangkan aliansi strategis**
- a. Pola penempatan dana FLPP untuk menunjang realisasi KPR bersubsidi-FLPP perlu dikelola secara baik dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan Kemenpera dan BLU-PPP.
 - b. Kerja sama dengan Kantor Pos akan terus dijaga agar dapat memberikan kinerja yang lebih optimal.
 - c. Melakukan aliansi dengan PT. Telkom Indonesia dan perusahaan lainnya dalam mengembangkan *agent bank (branchless banking)* dengan melakukan kerjasama pengembangan produk dan promosi bersama serta menawarkannya melalui *channel* mitra.
- 9. Optimalisasi *collection dan asset management***
 Secara umum strategi penagihan tahun 2015, tetap diarahkan pada pengurangan debitur *non performing* dan debitur pada kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus serta penyelesaian debitur kolektibilitas macet. Adapun beberapa program kerja tahun 2015 yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Implementasi manajemen *collection dan asset management* secara *monoline*.
 - b. Optimalisasi sistem penagihan yang terintegrasi menggunakan *call collection* dan *field collection* menggunakan *iColl*.
 - c. Program *cleansing* data pada *iColl* untuk meningkatkan efektivitas penagihan.
 - d. Program penyelesaian kredit macet dan bermasalah melalui lelang Hak Tanggungan dan eksekusi SKM.
- 10. Meningkatkan GCG, Risk Management, dan Compliance**
 Rencana kerja peningkatan GCG pada tahun 2015 adalah tahapan pada road map GCG 2013-2017 dimana program pada tahun 2015 diantaranya adalah :
- a. *Refreshment* dan *training* terhadap Dewan Komisaris, Direksi, dan GCG champion pada setiap unit kerja.
 - b. Membangun dan melengkapi GCG *structure, infrastructure*, serta *soft structure*.
 - c. Monitoring dan program *reward* kepatuhan.
 - d. Eksternalisasi GCG secara konsisten melalui partisipasi dalam beberapa even.
 - e. Selain itu juga akan ditingkatkan efektivitas kontrol di kantor cabang melalui BCSO.

11. Memperkuat *corporate culture*

Pengembangan organisasi (*Organization Development*) Bank BTN yang efektif dan efisien serta berdaya saing, melalui dua kegiatan besar: Revitalisasi Budaya Perusahaan, dengan melakukan transformasi tahap kedua dengan melakukan perubahan terhadap budaya Pola Prima menjadi suatu budaya perusahaan yang lebih mendukung terhadap pengembangan bisnis dan organisasi yang mendukung sebagai bank fokus dibidang perumahan yang menuju *world class company*. Langkah-langkah yang dilakukan adalah :

- i. Melakukan penyesuaian nilai-nilai dan perilaku utama budaya perusahaan sehingga membentuk budaya perusahaan yang baru.
- ii. Melakukan sosialisasi nilai-nilai budaya perusahaan yang baru dan program kerja internalisasi dan eksternalisasi budaya perusahaan.
- iii. Memperkuat budaya kerja yang berorientasi *intrapreneurship* (pelayanan & penjualan), kinerja, inovasi dan efisiensi sehingga terdapat perbaikan kinerja bisnis dan perbaikan proses bisnis.

Mulai pada akhir 2014, telah mulai disosialisasikan budaya perusahaan yang baru, yaitu:

Nilai-Nilai dan Budaya Perusahaan

- *Lean*
- *Innovation*
- *Strive for Excellence*

BTN TERDEPAN GCG RUMAHKOE Budaya Perusahaan

- Bankir
- Terunggul yang menerapkan
- Inovasi dengan
- Integritas yang tinggi
- Dan
- Efisien
- Melampaui harapan masyarakat dan lingkungan

for me

- *Great is not good enough*
- *Challenges are accepted*
- *Green is a must*

therefore I

- *Reach for growth and learning opportunities*
- *Utilize environmental friendly technology and innovation*
- *Make interest of clients' and communities happen*
- *Act accountable and dependable*
- *Hate arrogance and dishonesty*
- *Keep communication open*
- *Organize concerted effort as a team player*
- *Embrace lean*

12. Mengembangkan *human capital*

Secara umum inisiatif dan program kerja bidang *human capital* adalah sebagai berikut :

- a. Implementasi sistem manajemen kinerja berbasis *balanced scorecard*.
- b. Internalisasi dan eksternalisasi budaya kerja.
- c. Implementasi *knowledge management* dan program integrasi training seluruh Divisi.
- d. Implementasi *talent management*.
- e. Implementasi *human capital information system* (iHCIS).
- f. Implementasi sistem *reward dan punishment*.

11. MANAJEMEN RISIKO

Perseroan sebagai bank yang portofolio asetnya didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis eksternal seperti inflasi dan tingkat BI *rate*. Upaya meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan dengan pengelolaan risiko secara *day to day risk management activities*, dengan berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan seluruh proses dan mekanisme yang terjadi dalam mencapai tujuan perusahaan, mencegah perusahaan dari penyimpangan dan risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan, serta berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Perseroan yang sehat dan berkesinambungan.

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, Perseroan telah mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan Standardized Approach sesuai dengan SE BI No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar. Selain dari itu Perseroan juga telah melakukan perhitungan kebutuhan modal minimum dengan menggunakan Basic Indicator Approach untuk risiko operasional sesuai dengan SE BI No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional.

Penggunaan Pendekatan Indikator Dasar (PID) dan Standardized Model untuk risiko pasar sesuai dengan SE BI No.9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

Guna melengkapi pengukuran risiko khususnya risiko pasar dan risiko likuiditas, Perseroan melakukan stress test terhadap worst case scenario sebagaimana diatur dalam Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) yaitu minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk risiko kredit dan setiap triwulan untuk risiko likuiditas. Selain melakukan scenario analysis terhadap aktivitas Perseroan secara keseluruhan, Perseroan juga melakukan scenario analysis terhadap aktivitas tertentu, khususnya aktivitas baru, yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko suku bunga. Saat ini, stress test yang dilakukan oleh Perseroan difokuskan pada 3 (tiga) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar (termasuk di dalamnya risiko suku bunga) dan risiko likuiditas.

Perseroan melakukan *stress testing* secara berkala untuk menilai kecukupan modal dalam hal terjadinya kejadian-kejadian risiko yang bersifat ekstrim atau *catastrophy*. Perseroan juga telah melakukan kaji ulang terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) guna meningkatkan fungsi *risk control system* minimal 1 (satu) tahun sekali. Untuk selanjutnya, berkaitan dengan rencana implementasi Basel III Perseroan telah melakukan persiapan penerapan kerangka kerja Basel III dan terlibat di dalam *working group* masing-masing di bawah koordinasi Bank Indonesia.

a. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) berperan aktif dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dirasa kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. KMR terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/ aktivitas baru sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Selain itu apabila dipandang perlu KMR dapat melakukan evaluasi terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR).

b. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Risk Management Division (RMD) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) pada Bank, dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada *Managing Director Risk, Compliance & Strategy*. Struktur Organisasi *Risk Management Division* terdiri dari *Market Risk Management Department*, *Credit Risk Management Department*, *Operational Risk Management Department* dan *Risk Officer Coordination Department*.

Market Risk Management Department berfungsi untuk melakukan pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas. Fungsi *Credit Risk Management Department* melakukan pengelolaan Risiko Kredit sedangkan *Operational Risk Management Department* berfungsi mengelola Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategik, Risiko Reputasi dan Risiko Hukum. Setiap *Departement Head* dibantu oleh *Unit Policy & Procedure* dan *Unit Assessment & Measurement*.

Dalam menjalankan fungsi pemantauan risiko pada tingkat Divisi dan Kantor Cabang, Kepala *Risk Management Division* dibantu oleh *Branch Risk Officer* (BRO), *Regional Risk Superintendent* (RRS), *Risk Superintendent* (RS), dan di bawah koordinasi *Risk Officer Coordination* (ROC) *Departement Head* yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala *Risk Management Division* (RMD).

Branch Risk Officer (BRO) adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada ROC *Departement Head* dan bertugas melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko di Kantor Cabang dengan melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan merekomendasikan pengendalian risiko kepada Kantor Cabang dimana BRO bertugas.

Regional Risk Superintendent (RRS) adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada ROC *Departement Head* dan bertugas melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko di Kantor Wilayah dengan melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan merekomendasikan pengendalian risiko kepada Kantor Wilayah dimana RRS bertugas.

Risk Superintendent (RS) merupakan pejabat yang bertanggung jawab langsung pada ROC *Departement Head* dan bertugas melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko di Divisi dengan melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan merekomendasikan pengendalian risiko kepada Divisi.

Bank telah membentuk *Risk Superintendent* di Kantor Pusat, *Regional Risk Superintendent* (RRS) di Kantor Wilayah dan *Branch Risk Officer* (BRO) di Kantor Cabang dalam rangka pengawasan aktif pengelolaan risiko di Divisi, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang. Per Desember 2014, jumlah *Risk Superintendent* yang ditempatkan di Kantor Pusat ada 4 orang yaitu *Credit Risk Superintendent* (CRS), *Market Risk Superintendent* (MRS), *Operational Risk Superintendent* (ORS) dan *Sharia Risk Superintendent* (SRS). Sementara itu, terdapat 2 (dua) orang RRS (*Regional Risk Superintendent*) yang ditempatkan di Kantor Wilayah I dan Kantor Wilayah III dan 60 orang *Branch Risk Officer* (BRO) ditempatkan di 55 Kantor Cabang Konvensional dan 5 Kantor Cabang Syariah dari 87 Kantor Cabang. Untuk beberapa Kantor Cabang yang belum ditempatkan BRO, pemantauan pengelolaan risiko dilakukan oleh BRO dari Kantor Cabang terdekat.

c. Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Manajemen Risiko

Perseroan telah memiliki panduan kebijakan di bidang manajemen risiko yaitu Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) di mana di dalamnya telah mencakup ketentuan-ketentuan minimal yang disyaratkan di dalam Peraturan Bank Indonesia. Pengkajian ulang terhadap kebijakan internal juga dilakukan agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko. Sistem informasi manajemen risiko pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan *database* risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem teknologi informasi secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu.

d. Profil Risiko

Sesuai PBI No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, RMD menyampaikan laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan per triwulan yang memuat tentang eksposur risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategik. Selanjutnya berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 dan SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, meliputi penilaian faktor profil risiko yang meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional Bank.

Secara umum risiko komposit profil risiko Bank triwulan IV tahun 2014 berada pada peringkat low to moderate, yang tercermin dari tingkat risiko inheren moderate dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko dengan peringkat satisfactory. Risiko Inheren meliputi strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri dimana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

e. Pengelolaan Aset dan Liabilitas

Unit kerja *Supporting Group Asset & Liability* memiliki tugas untuk membantu Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) dalam memaksimalkan profitabilitas dengan mengevaluasi serta mengkaji prospek bisnis Perseroan dengan mengacu kepada RKAP Perseroan dan kondisi terkini dari makro ekonomi yang berpengaruh terhadap kinerja Perseroan. Perseroan akan berupaya untuk mengalokasikan sumber-sumber pendanaan ke dalam aset produktif dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian dan melakukan review terhadap sumber pendanaan, biaya pendanaan, penetapan suku bunga serta risiko likuiditas yang dihadapi Perseroan.

f. Risiko Kredit

Risiko Kredit merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan. Untuk mengantisipasi tereksposnya Risiko Kredit, Perseroan sedang merencanakan penerapan *four eyes principle* (pemisahan fungsi) dalam proses bisnis kredit komersial.

Perseroan telah mereview Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang juga mengatur kebijakan di bidang manajemen risiko kredit, antara lain mengatur mengenai perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) risiko kredit dengan pendekatan standar sesuai dengan SE BI No.13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

Perseroan secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko serta Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan untuk kredit Perseroan dan pembiayaan sebagai bagian dari proses penilaian risiko. Eksposur Risiko Kredit dipantau sejak proses pemberian kredit sampai dengan jatuh tempo kredit. Pemantauan risiko kredit di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko kredit terhadap limit risiko kredit.

Pemantauan risiko secara reguler dilakukan oleh RMD melalui *Risk Superintendent* (RS) di divisi, *Regional Risk Superintendent* (RRS) di Kantor Wilayah dan *Branch Risk Officer* (BRO) di Kantor Cabang untuk memastikan bahwa unit kerja telah melakukan proses manajemen risiko kredit dengan memadai. Langkah strategis lainnya dalam penerapan manajemen risiko kredit Perseroan adalah dengan melakukan penyebaran risiko kredit dan pengendalian risiko konsentrasi kredit dengan meningkatkan portofolio kredit maupun pembiayaan di luar sektor perumahan (*non-housing related*).

g. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima

Proses Manajemen Risiko Likuiditas meliputi Identifikasi Risiko Likuiditas, Pengukuran Risiko Likuiditas, Pemantauan Risiko Likuiditas dengan memperhatikan indikator peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan Risiko Likuiditas Bank dan pengendalian Risiko Likuiditas. Pengendalian Risiko Likuiditas dilakukan melalui beberapa cara yaitu :

- Strategi pendanaan dan strategi pricing
- Pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas harian
- Pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi
- Rencana pendanaan darurat
- Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, serta pelaporan Risiko Likuiditas dalam kondisi normal dan kondisi krisis secara lengkap, akurat, terkini, dan berkesinambungan.

Alat pengukuran yang digunakan dalam pengukuran Risiko Likuiditas antara lain adalah Rasio Likuiditas, Profil Maturitas, Proyeksi arus kas, dan *Stress testing* (pengujian terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis dengan menggunakan skenario stress secara spesifik pada Bank maupun *general market stress scenario*).

h. Risiko Pasar

Risiko Pasar merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Dalam melakukan pengukuran risiko pasar, Perseroan menggunakan perhitungan *Standard Method* untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) untuk Risiko Pasar. Risiko nilai tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dikelola dengan cara menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Gejala eksternal juga diakomodasi dengan melakukan *stress testing* untuk melihat sejauh mana ketahanan Perseroan terhadap beberapa skenario perubahan kondisi eksternal, khususnya perubahan suku bunga pasar. Termasuk di dalam risiko pasar adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan faktor-faktor pasar, seperti perubahan suku bunga dan perubahan nilai tukar.

i. Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Dalam rangka menghitung kebutuhan modal minimum untuk Risiko Operasional, Perseroan menerapkan metode Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*), sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional Dihitung dengan Pendekatan Indikator Dasar (PID).

Dalam rangka melakukan proses identifikasi dan pengukuran risiko, saat ini Perseroan sedang mengembangkan aplikasi *BTN-Loss Event Database* (BTN-LED). Aplikasi BTNLED ini dirancang terhubung dengan kantor wilayah dan kantor cabang. Dengan demikian Kantor Wilayah dan Kantor Cabang dapat secara periodik mengirimkan data *lost event* masing-masing kantor secara online melalui media aplikasi berbasis web (*web based*). Data yang terkumpul selanjutnya akan diolah dan dianalisis. Dari hasil pengolahan dan analisis tersebut akan teridentifikasi peta eksposur risiko dari masing-masing kantor cabang. Berdasarkan peta eksposur risiko yang diperoleh, selanjutnya dilakukan langkah mitigasi terhadap eksposur risiko yang teridentifikasi tersebut. Dalam pemantauan Risiko Operasional dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan mitigasi risiko yang diberikan.

Mitigasi terhadap Risiko Operasional dilakukan oleh seluruh satuan kerja Perseroan. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur merupakan salah satu bentuk mitigasi Risiko Operasional yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja Perseroan. *Risk Management Division* memastikan bahwa Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja operasional dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu. Perseroan juga telah menempatkan *Branch Compliance Supervisory Officer* (BCSO) di 83 di kantor cabang dari 87 kantor cabang yang berfungsi untuk melakukan evaluasi tingkat kepatuhan atas aktivitas operasional (transaksi maupun non transaksi) pada Kantor Wilayah dan Kantor Cabang (konvensional maupun syariah), melakukan koordinasi terhadap unit-unit kerja lainnya atas tindak lanjut aktivitas operasional yang memerlukan penyelesaian serta menumbuhkan budaya kepatuhan dan sadar risiko dan melakukan monitoring terhadap tindak lanjut penyelesaian dan/atau perbaikan hasil evaluasi tingkat kepatuhan maupun hasil temuan audit. Dalam rangka meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional, Perseroan sedang melakukan review terhadap *Business Continuity Plan* sesuai dengan SE BI Nomor : 9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007 perihal Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank umum.

j. Risiko Hukum

Risiko Hukum merupakan risiko akibat tuntutan dan/atau kelemahan aspek yuridis dimana Risiko Hukum dapat bersumber dari perikatan yang dilakukan oleh Perseroan. Perseroan melaksanakan identifikasi Risiko Hukum berdasarkan faktor-faktor risiko yang meliputi tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis.

Pengukuran Risiko Hukum dilaksanakan oleh *Risk Management Division* bersama-sama *Legal Division* (LGD) berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

Pemantauan Risiko Hukum dilaksanakan oleh *Legal Division* dengan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Perseroan (*Risk Appetite dan Risk Tolerance*). Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi Risiko Hukum. Dalam melaksanakan pengendalian Risiko Hukum, LGD memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan review secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan *counterparty*.

Perseroan juga telah menempatkan *Branch Legal Representative* (BLR) di Kantor Cabang yang berfungsi untuk memberikan pendapat hukum maupun konsultasi hukum kepada Kantor Cabang dalam rangka pengamanan aspek hukum yang berkaitan dengan pemberian kredit dan restrukturisasi kredit, melakukan observasi, penelitian dan memberikan saran terhadap operasional di unit kerja Kantor Cabang yang dinilai memiliki potensi risiko hukum serta mendampingi, membantu dan berkoordinasi dengan Kantor Cabang pada proses penyelesaian perkara yang berkaitan dengan hukum.

k. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Identifikasi Risiko Reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan informasi yang material (*disclosure requirement*), keluhan nasabah terhadap pelayanan Perseroan, perilaku karyawan Perseroan dalam melayani nasabah, dan sistem komunikasi Perseroan.

Pengukuran Risiko Reputasi dilakukan berdasarkan hasil *assessment* terhadap faktor-faktor Risiko Reputasi. Risiko Reputasi Bank dikelola oleh *Corporate Secretary Division* (CSD) dan *Customer Care Division* (CCD) dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh *Customer Care Division* (CCD).

Dalam rangka pemantauan Risiko Reputasi, dikembangkan aplikasi Sistem Pengaduan Nasabah (SPN) untuk mendukung layanan dan penanganan pengaduan nasabah yang memungkinkan proses penanganan pengaduan secara online antar pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan di Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Hal ini berguna untuk memastikan terjaganya kepuasan nasabah.

Dalam pengendalian Risiko Reputasi, *Corporate Secretary Division* bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian berita negatif atau menghindari informasi kontra produktif serta menjalankan fungsi *Public Service Obligation* (PSO) dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Kegiatan *Corporate Social Responsibility* tidak terfokus kepada kegiatan charity saja, tetapi juga dalam bentuk program yang berkesinambungan. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pemberian kredit subsidi dan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

I. Risiko Strategik

Risiko Strategik merupakan risiko akibat ketidaktepatan Perseroan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi Risiko Strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor Risiko Strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasuri dan investasi, serta operasional dan jasa melalui business plan yang disusun oleh *Strategy & Performance Management Division* (SPMD) sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Pengukuran Risiko Strategik dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja Perseroan yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Pemantauan Risiko Strategik dilakukan oleh *Strategy and Performance Management Division* (SPMD) secara berkala dengan memonitor pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) dan *Risk Management Division* (RMD) yang memonitor *risk exposure* dibandingkan dengan *risk appetite* bank. Selanjutnya, Dewan Komisaris, Direksi dan Divisi mereview strategi dasar yang fokus pada perubahan-perubahan antara lain struktur organisasi Perseroan, perkreditan komersial, pembiayaan perdagangan, treasuri, operasional dan kekuatan serta kelemahan sistem teknologi informasi. Dalam pengendalian Risiko Strategik, *Strategy & Performance Management Division* (SPMD) berfungsi menganalisis gap antara realisasi dan target bisnis dan menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan kepada Direksi secara berkala.

m. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam mengidentifikasi Risiko Kepatuhan, *Compliance Division* (CMPD) melalui BCSO melakukan evaluasi eksposur Risiko Kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang melekat (*inherent*) pada ketentuan internal. Di samping itu, *Compliance Division* menganalisis kejadian yang menyebabkan timbulnya Risiko Kepatuhan dengan cara :

- Memberikan kajian kepatuhan terhadap produk baru dan konsep peraturan internal yang baru
- Melakukan kajian terhadap peraturan internal yang masih berlaku
- Melakukan sosialisasi kebijakan regulator baru kepada divisi-divisi dan Kantor Cabang.

Dalam rangka meminimalkan dampak Risiko Kepatuhan, *Legal Division* (LGD) telah menyediakan portal khusus yang bernama Akses Internal Manajemen Standar (AIMS) untuk memudahkan seluruh unit kerja melakukan akses terhadap ketentuan internal Perseroan.

Pengukuran Risiko Kepatuhan dilakukan terhadap potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi ketentuan eksternal yang berlaku. Besarnya Risiko Kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk mereview semua penalti, litigasi, dan keluhan nasabah yang pernah diterima Perseroan.

Dalam pemantauan Risiko Kepatuhan, *Risk Management Division* dan *Compliance Division* bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen Risiko Kepatuhan dengan memantau secara berkala seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan Risiko Kepatuhan.

Sampai dengan periode Desember 2014, jumlah pejabat dan staff yang telah lulus uji sertifikasi manajemen risiko sebanyak 919 orang, dengan rincian Level 1 sebanyak 255 orang, Level 2 sebanyak 349 orang, Level 3 sebanyak 289 orang, Level 4 sebanyak 25 orang, Level 5 sebanyak 1 orang.

Untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan di bidang manajemen risiko, Perseroan telah melakukan *internal training* dan mempersiapkan *pre-test* sebagai saringan awal bagi pejabat dan karyawan yang akan mengikuti ujian sertifikasi yang diselenggarakan BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko).

12. KEPATUHAN

Perseroan telah melaksanakan fungsi Kepatuhan dengan mengacu pada PBI No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Perseroan dibawah koordinasi Direktur Kepatuhan yaitu Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan di Perseroan. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan didukung oleh Divisi Kepatuhan (Satuan Kerja Kepatuhan Bank BTN). Direktur Kepatuhan maupun Kepala Divisi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi serta kriteria sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Bank Indonesia dan telah menjalankan tugas dalam mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha dan jenjang organisasi pada Perseroan.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

1. Budaya Kepatuhan
Seluruh manajemen dan pegawai Perseroan bertanggung jawab mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan. Sepanjang tahun 2014 senantiasa telah dilakukan sosialisasi Budaya Kepatuhan secara berkelanjutan kepada pegawai Perseroan yang bertujuan untuk meningkatkan *awareness* tentang Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan aktifitasnya pada masing-masing unit kerja diantaranya melalui pembekalan dan internalisasi kepatuhan dalam pembekalan pegawai baru maupun dalam *training refreshment* bagi pegawai *existing* yang dilakukan melalui metode *in class training*.
2. Pengelolaan Risiko Kepatuhan
Terkait dengan pelaksanaan tugas ini, Divisi Kepatuhan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan berkoordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko yang merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko Perseroan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Efektivitas pengelolaan risiko kepatuhan ditampilkan dalam Laporan Profil Risiko Kepatuhan yang disusun secara bulanan.
3. Tingkat Kepatuhan Terhadap Ketentuan Regulator dan Peraturan Perundang-undangan
Untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan yang berkelanjutan dengan tetap mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan langkah untuk mengharmonisasikan antara kepentingan komersial Bank dengan kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK, Peraturan Perundang-undangan maupun ketentuan otoritas pengawas lainnya.

Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- **Kajian dan Opini Kepatuhan**
Divisi Kepatuhan melakukan kajian atas seluruh draft kebijakan yang akan diterbitkan serta produk dan aktifitas baru yang akan diluncurkan, kajian dimaksud adalah untuk upaya memastikan bahwa kebijakan serta produk dan aktifitas baru dimaksud telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan Regulator dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- **Sosialisasi Ketentuan**
Divisi Kepatuhan senantiasa memberikan sosialisasi atas ketentuan pihak eksternal yang baru dikeluarkan oleh regulator serta Peraturan Perundang-undangan. Materi sosialisasi yang disampaikan adalah ringkasan pokok-pokok ketentuan eksternal serta *gap analysis* dengan ketentuan internal Perseroan. Materi sosialisasi tersebut disampaikan kepada unit kerja terkait untuk memastikan penerapan ketentuan tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak regulator.
- **Review dan Monitoring Ketentuan Internal**
Divisi Kepatuhan juga menjalankan pengkajian dan penilaian terhadap kebijakan dan ketentuan internal Perseroan yang berlaku sebagai bagian dari rangkaian proses untuk menciptakan dan membangun budaya kepatuhan dari setiap unit bisnis di dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, serta untuk memastikan bahwa peraturan regulator yang terkait telah diterapkan dalam aktivitas unit bisnis. Selain itu, Divisi Kepatuhan juga menjalankan fungsi monitoring untuk memastikan agar pelaksanaan suatu produk atau transaksi sesuai dengan kebijakan internal dan peraturan Regulator yang berlaku, salah satu diantaranya adalah dengan menempatkan petugas di Kantor Cabang (*Branch Compliance Supervisory Officer*) yang bertugas untuk melakukan review dan monitoring atas kepatuhan Kantor Cabang terhadap kebijakan internal dan peraturan Regulator yang berlaku.
- **Pemenuhan Komitmen kepada Pihak Regulator dan Otoritas yang Berwenang**
Perseroan senantiasa berupaya untuk memenuhi seluruh komitmen kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa keuangan dan otoritas yang berwenang lainnya. Untuk memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator dan otoritas berwenang tersebut, Divisi Kepatuhan Perseroan secara terus menerus melakukan monitoring kepada unit-unit kerja terhadap seluruh komitmen yang diwajibkan. Bentuk komitmen tersebut dapat berasal dari hasil audit, surat Bank Indonesia, Otoritas Jasa keuangan dan otoritas yang berwenang lainnya maupun kewajiban pelaporan sesuai ketentuan regulator yang berlaku. Hasil dari pemantauan terhadap pemenuhan komitmen dilaporkan secara berkala dalam Laporan Kepatuhan kepada Otoritas Jasa keuangan, Direksi dengan tembusan Dewan Komisaris.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Proses pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan di Perseroan telah dilaksanakan dan diatur sebagai berikut :

- a. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan telah berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Umum, serta PBI No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
- b. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali.
- c. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengundurkan diri atau habis masa jabatannya, maka Perseroan segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, ditunjuk salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

- d. Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, tidak dirangkap oleh Direktur Utama dan atau Wakil Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan fungsi-fungsi yang dapat mempengaruhi independensinya.
- e. Setiap penggantian jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan senantiasa dilaporkan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melalui *Fit & Proper Test* sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Satuan Kerja Kepatuhan

Divisi Kepatuhan adalah satuan kerja kepatuhan Perseroan yang merupakan unit independen yang membantu pelaksanaan tugas dari Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Divisi Kepatuhan dalam menjalankan tugasnya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Divisi kepatuhan Perseroan dipimpin oleh Kepala Divisi yang telah memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. Pengangkatan dan / atau pemberhentian Kepala Divisi Kepatuhan selalu dilaporkan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

Perseroan berkomitmen untuk sepenuhnya mematuhi Undang-Undang dan Peraturan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan terorisme (PPT) yang berlaku di Indonesia, dan berupaya untuk turut mencegah, mendeteksi serta melaporkan kepada pihak berwenang, dalam rangka mendukung penerapan program APU-PPT di Indonesia. Kegiatan terkait pelaksanaan program APU-PPT yang dilaksanakan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan review atas kebijakan ketentuan internal Perseroan tentang Penerapan Program APU dan PPT yang disesuaikan dengan ketentuan PBI No. 14/27/PBI tanggal 28 Desember 2012 dan SE BI No: 15/21/DPNP/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Penerapan Program APU dan PPT bagi Bank Umum.
- b. Melakukan proses penyempurnaan infrastruktur IT dalam mendukung penerapan program APU-PPT di Perseroan yaitu sebagai berikut:
 - Sedang melakukan enhancement atau proses penyempurnaan aplikasi iCDD (*intelligence Customer Due Diligence*) untuk pelaporan APU dan PPT yang akan digunakan oleh operasional outlet Bank (Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas) dan Kantor Pusat untuk disesuaikan dengan ketentuan berlaku.
 - Melakukan pembangunan aplikasi pelaporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL)/*International Funds Transfer Instructions* (IFTI).
- c. Sebagai koordinator pelaksanaan action plan Penerapan program APU dan PPT kepada Bank Indonesia serta melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Unit Kerja terkait untuk memenuhi target action plan tersebut.
- d. Melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK berupa Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)/*Cash Transaction Report* (CTR), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)/*Suspicious Transaction Report* (STR), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL)/*International Funds Transfer Instructions* (IFTI) dan Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPJT).
- e. Menindaklanjuti permintaan informasi/data dan dari pihak eksternal, antara lain Bank Indonesia, PPATK, KPK RI, BNN RI, Kepolisian dan Dirjen Pajak.
- f. Penyampaian materi program APU dan PPT melalui modul *e-learning*, sehingga memungkinkan pegawai dapat memperoleh pelatihan penerapan program APU dan PPT secara mandiri
- g. Pemberian materi APU dan PPT kepada setiap pegawai baru khususnya unit *Frontliner* (*Customer Service dan Teller*), FO (*Funding Officer*), dll.

13. AUDIT INTERNAL

Divisi Audit Internal Perseroan dipimpin oleh Kepala Divisi Internal Audit, dibantu oleh 1 (satu) orang *Auditor Coordination Head*, 1 (orang) *Audit SuperIntendent*, 6 (enam) *Senior Associated Auditor*, 9 (sembilan) *Associated Auditor*, 6 (enam) *Senior Auditor*, 39 orang *Auditor* dan 3 (tiga) Kepala Departemen

Audit internal Perseroan bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan melaporkan setiap hasil audit kepada Direktur Utama dan kepada Dewan Komisaris/Komite Audit dengan tembusan Direktur Kepatuhan.

Audit internal Perseroan mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan dalam pelaksanaan audit ke seluruh objek audit, audit internal telah mengimplementasikan audit berdasarkan risiko (*risk based audit*). Hal tersebut sesuai dengan visi, misi, fungsi utama audit internal dan ruang lingkup audit internal sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Audit Internal Bank BTN (Persero) Tbk. yang merupakan bagian dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 03/DEKOM-DIR/BTN/IAD/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011.

1. Visi

Menjadi mitra kerja yang independen, obyektif, profesional, terpercaya dan tanggap untuk mendukung tugas Direksi dan Jajaran Manajemen dalam usaha mencapai sasaran perusahaan.
2. Misi
 - Menjadi mitra strategis manajemen dalam memberikan nilai tambah pada proses bisnis Perseroan melalui kegiatan audit dengan pendekatan konsultatif dan pro aktif,

- Membantu manajemen mendapatkan penilaian yang objektif dan berkualitas terhadap pelaksanaan kegiatan Perseroan dan sistem pengendalian intern Perseroan,
- Mendorong manajemen meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*),
- Mendorong efektivitas pengelolaan risiko (*risk management*) dan pengendalian internal agar dapat memberi nilai tambah dan meningkatkan kualitas pengelolaan Perseroan dalam rangka mewujudkan bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar, sehingga kepentingan pemegang saham dan stakeholders lainnya dapat terpenuhi.

3. Kedudukan *Internal Audit Division* (IAD)

IAD merupakan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Perseroan yang kedudukannya langsung berada di bawah *President Director/Direktur* Utama. Kepala IAD bertanggung jawab langsung kepada *President Director/Direktur* Utama. Kepala IAD diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris dan dilaporkan kepada Bank Indonesia.

4. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan IAD yang akan dan harus diaudit disusun oleh Kepala IAD berdasarkan arahan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta dimintakan persetujuan Direktur Utama

Ruang lingkup pekerjaan audit oleh IAD mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan organisasi Perseroan, kegiatan badan-badan usaha afiliasi dan anak perusahaan yang secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya secara baik kepentingan Perseroan dan masyarakat melalui pendekatan *risk-based audit* dengan melihat minimal mengacu pada 8 (delapan) risiko yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategis dan Risiko Kepatuhan.

Ruang lingkup pekerjaan IAD mencakup audit dan penilaian atas efektivitas manajemen risiko, kecukupan & efektivitas sistem pengendalian intern, kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah digariskan, serta efektivitas *governance processes* dengan melakukan:

- Audit ketaatan (*compliance audit*) terhadap kebijakan, rencana dan anggaran, prosedur, peraturan, pelaporan Perseroan dibidang keuangan, akuntansi dan kegiatan operasional lainnya;
- Audit keuangan (*financial audit*) dalam rangka terselenggaranya pelaksanaan akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang wajar, handal, tepat waktu, lengkap dan berguna baik bagi kepentingan Perseroan, masyarakat maupun Bank Indonesia, termasuk melakukan verifikasi atas kewajaran penyajian laporan keuangan pada akhir tahun buku;
- Audit operasional (*operational/management audit*) dalam rangka meningkatkan efisiensi, pengamanan sumber daya dan dana, serta konsistensi dan efektivitas atas manfaat suatu kegiatan operasional atau program yang telah ditetapkan;
- Audit rating dalam rangka menilai kinerja suatu unit kerja Perseroan berdasarkan hasil audit dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya.
- Audit teknologi sistem informasi (*information and technology audit*) untuk memastikan terjaminnya integritas data (benar, lengkap, aman dan tepat waktu), efektivitas dan efisiensi prosedur operasi dan kelangsungan teknologi sistem informasi. Termasuk melakukan audit atas setiap implementasi aplikasi TSI untuk memastikan bahwa aplikasi telah sesuai dengan yang ditetapkan, kepatuhan terhadap ketentuan, terdapat kontrol yang memadai dan tersedianya sarana penelusuran kembali (*audit trail/trance*), serta memberi rekomendasi mengenai kontrol yang perlu diterapkan.
- Audit khusus dan investigasi (*special dan investigation audit*) terhadap hal-hal yang diduga atau diperkirakan berindikasi tindak perbuatan kecuranga/penyalahgunaan/manipulasi (*fraud*), penggelapan, penyimpangan terhadap ketentuan/peraturan intern maupun ekstern, dan lain sebagainya berdasarkan Instruksi Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris.
- Pemantauan secara *off-site* atau *monitoring* (*desk audit*) terhadap segala aktivitas di seluruh unit kerja Perseroan melalui analisis terhadap dokumen dan laporan;
- Penilaian atas sistem pengamanan harta kekayaan Perseroan termasuk sumber daya dan dana, serta memastikan eksistensi harta kekayaan Perseroan.

Berperan sebagai *strategic business partner* bagi semua tingkatan manajemen guna mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Perseroan dengan melakukan evaluasi berdasarkan *risk based audit* secara obyektif dan jasa konsultasi (narasumber) terutama yang menyangkut peningkatan dan penyempurnaan *risk management, control* dan *governance processes*.

Hal ini dilakukan dengan melalui pendekatan yang proaktif, antusias dan dinamis, berkomunikasi secara efektif, berorientasi pada bisnis dan *stakeholders*, pemahaman terhadap pokok permasalahan (*root of the problem*) dan area yang memiliki risiko tinggi, penekanan temuan pada kualitas, serta merekomendasikan penyelesaian yang praktis dan *workable*.

5. Fungsi dan Tugas

Fungsi utama *Internal Audit Division* (IAD) adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta seluruh tingkatan manajemen dalam memastikan kecukupan sistem pengendalian intern Perseroan dan memberikan saran-saran yang strategis dan konstruktif terhadap pengelolaan Perseroan dalam kerangka penerapan tata kelola bank yang baik dan sehat dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- Merumuskan perencanaan dan menjabarkan secara operasional pelaksanaan audit, serta pemantauan tindak lanjut atas hasil audit,
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui audit secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, termasuk melakukan audit manajemen terhadap seluruh unit kerja Perseroan,
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit kepada semua tingkatan manajemen,

- Melakukan pemeriksaan, penilaian dan mengidentifikasi segala kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, penggunaan sumber daya, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya yang terkait dengan operasional dan bisnis bank berlandaskan pada semua ketentuan yang berlaku,
- Melakukan pengujian dan evaluasi guna meningkatkan/menyempurnakan efektivitas manajemen risiko, kontrol dan proses pengelolaan (*governance processes*),
- Melakukan pemeriksaan (audit) khusus apabila diperlukan.

6. Pengendalian Intern

Komisaris dan Direksi menyatakan tanggung jawabnya terhadap terselenggaranya kesinambungan Sistem Pengendalian Intern Perseroan yang dirancang untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Sistem Pengendalian Intern yang memadai sekurang-kurangnya mencakup 5 (lima) komponen pengendalian yang satu sama lain saling berkaitan yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) termasuk di dalamnya Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*), Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition & Assessment*), Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*) Sistem Informasi dan Akuntansi serta Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*), Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan (*Monitoring Activities and Correction Deficiencies* yang didalamnya antara lain termasuk kebijakan, organisasi, prosedur dan ketentuan yang terkoordinasi dengan tujuan untuk mengamankan harta kekayaan bank, meyakini akurasi dan kehandalan data akuntansi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan.

Satuan Kerja Audit Internal, yaitu Internal Audit Division (IAD) mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank. Disamping itu, Dewan Komisaris dan Direksi perlu memberikan perhatian kepada pelaksanaan audit internal yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai, dan keahlian auditor intern khususnya praktek dan penerapan penilaian risiko. Pihak-pihak ekstern Bank antara lain otoritas pengawasan Bank, auditor ekstern, dan nasabah turut berkepentingan terhadap terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Bank yang handal dan efektif.

7. Pengendalian Mutu Audit

Program pengendalian mutu yang dilaksanakan oleh IAD dengan tujuan menilai kinerja IAD dan Auditor intern, memberikan kepastian bahwa pelaksanaan audit telah sesuai dengan standar audit dan kode etik Auditor intern yang berlaku, Piagam Audit Internal dan standar lainnya yang berkaitan, sekaligus sebagai dasar perbaikan yang berkesinambungan. Kesesuaian dengan standar yang berlaku lebih dari sekedar kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditentukan, namun juga mencakup efektivitas dan efisiensi IAD.

8. Sertifikasi ISO 9001:2008

Sejak 20 Agustus 2008 IAD telah menerapkan sistem manajemen mutu yang mengacu pada standar ISO9001:2000 dari PT SGS (*United Kingdom Accreditation Service – Quality Management*) untuk *Internal Audit Service* – Sistem Audit Internal. Sebagai komitmen terhadap Sistem Manajemen Mutu maka sejak 3 Juni 2010, IAD telah memenuhi persyaratan verifikasi untuk transisi sertifikasi dari ISO 9001: 2000 ke ISO 9001:2008. Sertifikasi ISO memberikan kepastian mutu proses dan hasil kegiatan audit yang ditujukan untuk kepentingan berbagai pihak disamping Kepala Internal Audit Division, seperti Manajemen, Komisaris, Auditor Ekstern, Regulator dan pihak-pihak lainnya yang memiliki alasan untuk mengandalkan kinerja IAD.

14. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

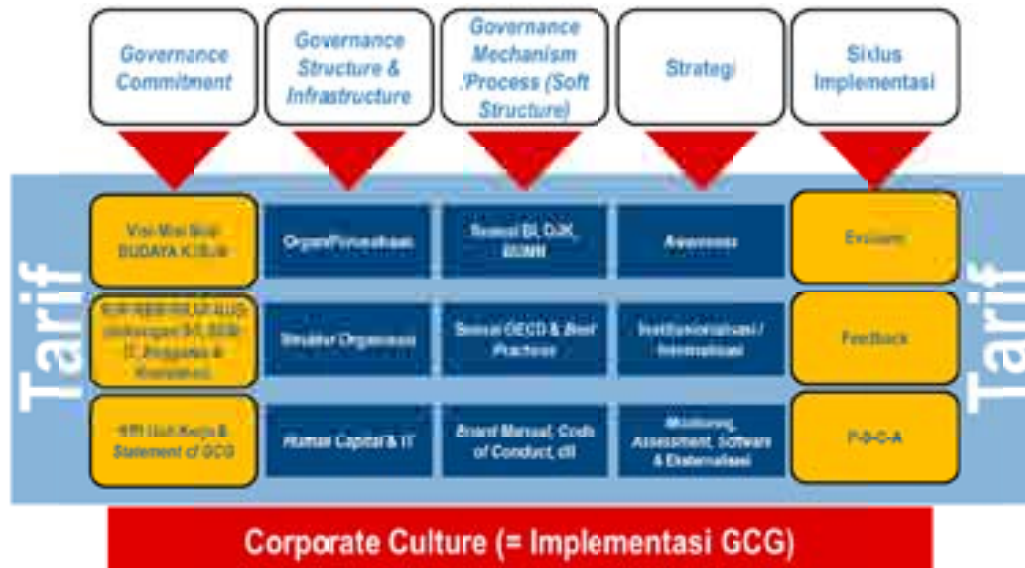
Struktur dan Mekanisme Tata Kelola

Struktur tata kelola Bank BTN merupakan suatu cara bagaimana aktivitas di dalam organisasi dibagi, diorganisir dan dikoordinasikan yang didesain dalam rangka mendukung berjalannya aktivitas organisasi secara bertanggung jawab dan terkendali dengan melakukan pemisahan antara decision making dengan decision control (*who control whom*) melalui organ utama dan organ pendukung yang telah dibangun di Bank BTN. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa governance structure adalah suatu kerangka di dalam organisasi yang menentukan bagaimana berbagai prinsip governance dapat dibagi, dijalankan serta dikendalikan oleh Bank BTN melalui pembagian fungsi, hak, kewajiban dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang berkepentingan atas Bank BTN, mencakup proses kontrol internal dan eksternal yang efektif serta menciptakan keseimbangan internal (antar organ perusahaan) dan keseimbangan eksternal (antar stakeholders) dan kemudian sekaligus mengatur bagaimana Bank BTN diarahkan dan dikendalikan untuk meningkatkan kinerja bisnis secara *accountable* (*Governance Mechanism*).

Penerapan GCG (tata kelola perusahaan yang baik) merupakan suatu proses yang berjalan tanpa henti. Setelah Berupaya melaksanakan road map 2010-2012, Bank BTN menyadari masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Untuk itu, pada awal 2013, Bank BTN melakukan kajian *best practices* terkait peran dan fungsi tata kelola perusahaan yang baik. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang konsep dan praktik implementasi GCG secara sistematis komprehensif, efektif dan efisien yang dapat dijadikan landasan dalam penyusunan *blue print* peningkatan implementasi GCG 2013-2017.

Berdasarkan kajian *best practices* maka Bank BTN telah menetapkan *blue print* dan *road map* implementasi GCG BTN 2013-2017, dengan visi mendukung peran strategis organ perusahaan secara profesional dan mewujudkan Bank BTN menjadi salah satu perusahaan dengan tatakelola terbaik di Indonesia pada tahun 2017, dan dengan misi meningkatkan *corporate value* dan mengelola fungsi *corporate governance* berstandar internasional dengan dukungan IT.

Sesuai dengan visi misi dan strategi di atas, maka Bank BTN menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan GCG tidak hanya sekedar untuk mengikuti aturan. Bank BTN turut memastikan bahwa GCG merupakan kunci sukses untuk meraih keunggulan dalam jangka panjang menuju *World Class Company*. Oleh karena itu, pada tahun 2013, Bank BTN menyusun *blue print* dan *road map* peningkatan tata kelola perusahaan.



BTN merumuskan “*Blue Print* Peningkatan Implementasi GCG periode 2014-2017” dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan fase, sebagai berikut :

- **Fase Foundation**

Terdapat 3 (tiga) hal yang dilakukan pada fase *foundation*, yaitu:

- Mengukuhkan Komitmen, untuk melaksanakan faktor-faktor GCG sesuai ketentuan BI, Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan regulator lainnya serta *best practices*.
- Membangun dan/atau melengkapi *governance structure* dan *infrastructure* yang menjadi kerangka bagaimana prinsip GCG dibagi, dijalankan dan dikendalikan yang diwujudkan dengan cara:
 - 1) Melakukan identifikasi atas GCG *structure* dan *infrastructure* yang dimiliki Bank BTN dan menata ulang kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG;
 - 2) Restrukturisasi internal pada bidang-bidang yang diperlukan sesuai dengan fokus yang dipilih dalam kerangka kerja implementasi GCG yang mencakup aktivitas-aktivitas, seperti: penyempurnaan organisasi yang diperlukan, pembentukan komite-komite, penunjukan GCG *Champion*, pengembangan *Intelligent Governance* (i-Gov) berbasis IT atau *Governance, Risk and Compliance* (GRC) *Application*, dan berbagai aktivitas lainnya yang diperlukan.
- Membangun dan/atau melengkapi GCG *mechanism/process* sebagai aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan kontrol terhadap keputusan tersebut. Tujuannya antara lain:
 - 1) Melengkapi kebijakan pendukung penerapan GCG;
 - 2) Menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan budaya (*corporate culture*) yang diharapkan;
 - 3) Merupakan komitmen tertulis seluruh jajaran perusahaan dalam rangka meningkatkan disiplin dan tanggung jawab organ perusahaan dalam menjaga kepentingan *stakeholders* sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

- **Fase Internalization**

Implementasi GCG harus ditopang dengan dukungan strategi agar dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Strategi dijabarkan dalam berbagai kegiatan, antara lain: *awareness programs*, yang diteruskan dengan proses internalisasi dan institusionalisasi serta monitoring dan pengembangan aplikasi berbasis IT (i-Gov) serta *self assessment* penerapan GCG di lapangan.

Selanjutnya, Bank BTN melaksanakan *assessment* dengan mengundang pihak independen melakukan peratingan. Hasilnya dapat digunakan untuk melakukan eksternalisasi kepada pihak eksternal dalam rangka mengkomunikasikan pelaksanaan GCG dan etika bisnis secara periodik.

- **Fase Excellence**

Dengan adanya road map dan tahapan strategi di atas, Bank BTN siap menghadapi tantangan bisnis ke depan dan meniti jalan menuju *world class banking company*. Untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan program, setiap akhir periode dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan semua program GCG untuk mendapatkan *feedback* pelaksanaan program pada periode berikutnya. Monitoring berkelanjutan senantiasa dilakukan menuju sukses jangka panjang. Implementasi dan internalisasi secara konsisten dan budaya GCG yang beretika dan bermartabat yang sudah disemaikan melalui proses internalisasi harus terus dipertahankan. Untuk itu, diperlukan dikembangkan sistem monitoring yang efektif dan efisien yang kemudian dilanjutkan dengan program penyempurnaan berkelanjutan dengan menggunakan metode *Plan, Do, Check, Action* (PDCA) secara periodik (setiap akhir tahun) dengan memberikan *feedback* penyempurnaan pada setiap periode. Pada fase ini, Bank BTN diharapkan mampu mewujudkan tata kelola unggulan.

15. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan komitmen Bank BTN dalam bentuk pernyataan tertulis dan pengalokasian sumber daya Bank untuk turut berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang guna memenuhi kebutuhannya.

Pelaksanaan Program CSR Bank BTN bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki lingkungan
2. Mengembangkan nilai dan budaya Bank yang sesuai dengan *Good Corporate Governance* (GCG) dan peraturan yang berlaku.
3. Membentuk citra Bank yang positif di masyarakat
4. Meningkatkan kerjasama dan saling menghormati dengan masyarakat dan lingkungan sekitar tempat beroperasi Kantor Bank.

Pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* di Perseroan adalah untuk mewujudkan Misi Kelima Perseroan dalam mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Bidang kegiatan CSR yang terprogram meliputi:
 - 1.1 Bidang Sosial, yaitu kegiatan yang berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya, keagamaan dan kesejahteraan sosial, yang meliputi:
 - 1.1.1 Pendidikan, mencakup peningkatan layanan, kemudahan dan infrastruktur pendidikan
 - 1.1.2 Kesehatan, mencakup peningkatan gizi dan infrastruktur kesehatan
 - 1.1.3 Seni dan budaya, mencakup pelestarian dan peningkatan infrastruktur seni dan budaya
 - 1.1.4 Olahraga, mencakup peningkatan prestasi dan infrastruktur olah raga
 - 1.1.5 Keagamaan, mencakup peningkatan infrastruktur keagamaan
 - 1.2 Bidang Lingkungan, yaitu kegiatan yang berdampak pada peningkatan kenyamanan dan kelestarian lingkungan serta penghematan energi dan penggunaan energi alternatif.
 - 1.3 Bidang Ekonomi, kegiatan yang berdampak pada peningkatan peluang kerja dan peluang usaha, peningkatan pendapatan dan penurunan kemiskinan di masyarakat.
2. Bidang kegiatan CSR yang bersifat insidental meliputi kegiatan untuk meringankan beban masyarakat akibat musibah atau kondisi perekonomian tertentu yang diperuntukkan bagi korban bencana alam atau korban gempa dan bantuan untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga bahan pokok.

Program Community Development

Program Bina Lingkungan Perseroan memfokuskan pada kegiatan yang bertujuan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya di lingkungan perumahan dan pemukiman. Fokus pemberdayaan masyarakat perumahan dipilih terkait dengan bisnis inti (*core business*) Perseroan yang menyalurkan kredit perumahan. Pada pelaksanaannya, kegiatan pemberdayaan masyarakat ditunjukkan melalui kegiatan yang mengandung pendidikan, lingkungan hidup dan pemberdayaan sosial ekonomi.

Mengingat Perseroan adalah Bank yang fokus terhadap pembiayaan perumahan dan tidak terlepas dari lingkungan masyarakat perumahan/pemukiman, dimana dalam lingkungan tersebut terdapat problem-problem masyarakat maka Perseroan mengaplikasikan kegiatan Bina Lingkungan yang difokuskan pada kegiatan pemberdayaan lingkungan.

Program Lingkungan Harmoni BTN yaitu program kegiatan PKBL dan CSR Bank BTN yang memiliki sasaran lingkungan pada pemberdayaan masyarakat dan berfokus pada kegiatan secara terpadu dan berkesinambungan, menuju masyarakat yang sejahtera bersama Bank BTN.

Contoh kegiatan *Community Program* Bank BTN

No	Bidang/Program Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Bidang Ekonomi	2014	Penyaluran dana CSR berupa selimut untuk korban Erupsi Gunung Sinabung	750.000
2	Bidang Ekonomi	2014	Partisipasi Bank BTN pada kegiatan penyaluran bantuan kepada korban banjir di Jakarta bersama Radio Galau FM	5.000.000
3	Bidang Ekonomi	2014	Khitanan missal yang diselenggarakan oleh Yayasan Khoiru Ummah	5.000.000
4	Bidang Ekonomi	2014	Reward Setoran Awal Haji	6.000.000
5	Bidang Ekonomi	2014	Pembelian paket sembako dan air mineral peruntukan korban banjir di Kabupaten Subang	20.000.000
6	Bidang Seni	2014	Partisipasi Bank BTN pada kegiatan seni dan budaya yang diselenggarakan oleh Pemkot Soo	7.500.000
7	Bidang Seni	2014	Partisipasi Bank BTN pada kegiatan bidang seni dan budaya serta kesehatan dalam rangka HUT Kota Jambi ke-58	11.000.000
8	Bidang Olah Raga	2014	Pembinaan atlit berprestasi olahraga karate dalam kejuaraan Nasional Karate Piala Kasad XII-Sulsel 2014	30.000.000
9	Bidang Olah Raga	2014	Partisipasi Bank BTN pada atlit yang berprestasi pada kejuaraan Nasional Karate Tradisional Menpora Cup Tahun 2014	6.750.000
10	Bidang Pendidikan	2014	Penyaluran dana beasiswa untuk mahasiswa	558.000.000
11	Bidang Kesehatan	2014	Penyaluran bantuan sarana kesehatan kepada korban erupsi gunung kelud	29.237.000
12	Bidang Kesehatan	2014	Partisipasi Bank BTN pada penyediaan obat dan alat kesehatan pada Munas alim ulama dan Konferensi Besar NU	25.000.000

1. Pelestarian Alam

Perseroan sebagai anggota masyarakat dunia berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan sejumlah kebijakan. Oleh karena Perseroan bergerak dalam bidang pendanaan/penyaluran kredit, maka langkah yang bisa diambil, antara lain, dengan memasukkan aspek lingkungan dalam pengecekan risiko kredit. Kebijakan itu semakin penting karena layanan kredit dan pembiayaan di sektor ekonomi oleh Perseroan, anatara lain, di bidang perumahan dan pertambangan. Dalam hal ini, aspek lingkungan berpotensi menjadi sorotan.

Untuk meminimalkan kerusakan lingkungan, sekedar gambaran, Perseroan tidak akan mengucurkan kredit apabila nasabah yang skala usahanya mensyaratkan adanya analisis mengenai dampak lingkungan, tapi tidak melampirkan hasil Amdal. Ketegasan Perseroan juga diambil dalam kasus-kasus nasabah yang usahanya memiliki risiko tinggi terhadap aspek lingkungan. Misalnya, area yang digarap atau dibangun mendekati kawasan hutan lindung atau cagar budaya.

Perseroan mengajak masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan sampah, cara pemilahan sampah, pengelolaan sampah organik, dan pembuatan produk dari sampah non-organik. Tahun 2014, Perseroan telah berpartisipasi dalam usaha menjaga dan melestarikan lingkungan di berbagai kegiatan dengan total nilai sebesar Rp239.091.000.

2. Pendidikan dan Pelatihan
Perseroan melakukan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kualitas pendidikan jasmani dan rohani anak beserta orang tua. Dengan mengikuti pelatihan, diharapkan anak dan orang tua dapat mengenali dirinya sehingga dapat membentuk *teamwork* yang sehat dalam hubungan interpersonal. Tahun 2014 Perseroan telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai kegiatan dengan mengeluarkan total bantuan kurang lebih Rp655.700.000
3. Kesehatan
Program ini mendampingi pengembangan kualitas kesehatan masyarakat lewat *workshop* tentang kesehatan anak serta tanaman herbal untuk berbagai penyakit. Tahun 2014, Perseroan telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dalam berbagai macam kegiatan dengan mengeluarkan bantuan sebesar Rp79.237.000
4. Sosial Ekonomi
Program ini diharapkan sebagai pemicu dan peletakan dasar dalam pengentasan kemiskinan melalui beberapa kegiatan misalnya pelatihan wirausaha, manajemen dalam keluarga dan pemberdayaan potensi sekitar. Tahun 2014 Perseroan telah berpartisipasi dalam berbagai macam kegiatan dalam usahanya mendukung pengentasan kemiskinan dengan mengeluarkan bantuan sebesar Rp1.438.700.100 di berbagai macam kegiatan.
5. Religi
Program kegiatan masyarakat harus diimbangi dengan bentuk religi sebagai motivasi dan penguatan serta landasan dalam berinteraksi baik dalam keluarga maupun masyarakat. Untuk mendukung berbagai bentuk kegiatan religi yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di tahun 2014 Perseroan telah melakukan berbagai macam kegiatan dengan total biaya sebesar Rp396.000.000.
6. Sarana Prasarana Umum
Sarana prasarana umum sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat dan lingkungan yang menunjang kegiatan-kegiatan lainnya sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih berdaya. Dengan meningkatkan dan mendukung perbaikan kualitas sarana prasarana umum diharapkan akan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kinerja dan kualitas hidup sehingga akan mendorong pengembangan ekonomi yang lebih baik. Untuk itu Perseroan di tahun 2014 telah melakukan berbagai macam kegiatan yang diharapkan akan membantu tujuan dan perkembangan ekonomi di Indonesia dengan memberikan bantuan dan dukungan melalui berbagai macam kegiatan dengan total biaya sebesar Rp3.393.638.176.

16. TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan meyakini bahwa teknologi informasi merupakan bagian yang penting dalam menentukan posisi persaingan Perseroan dalam industri perbankan, meningkatkan pelayanan dan nasabah, kontrol internal dan sistem manajemen risiko.

Berikut ini merupakan deskripsi atas sistem Perseroan saat ini dan rencana pengembangan aplikasi pada sistem tersebut:

- Perseroan memiliki *Loan Origination System (iLoan)* yang dapat mengefisienkan proses persetujuan kredit. Penggunaan *iLoan* akan berdampak pada standarisasi, efisiensi, kecepatan, ketepatan proses *approval* yang secara langsung akan meningkatkan kualitas dan ekspansi kredit. Sistem *iLoan* saat ini berbasis web yang menggunakan teknologi *workflow* sehingga seluruh proses dapat termonitor secara *real time*.
- *Collection and Recovery Management System (iCollect)* mengotomisasi dan mengefisienkan proses dan kegiatan pengelolaan/pembinaan kredit. Dengan menggunakan sistem ini petugas penagihan memiliki informasi yang cepat dan akurat atas *terms of payment* debitur, tunggakan serta informasi-informasi lain misalnya janji debitur dalam melakukan pembayaran tunggakan yang pada akhirnya akan menekan nilai *Non Performing Loan*.
- Perseroan saat ini memiliki *Management Information System* untuk memfasilitasi pelaporan data baik untuk pihak internal maupun eksternal. Untuk mempercepat akses dan analisa data, Perseroan telah mengimplementasikan *Enterprise Data Warehouse (iDss) System* dan *Business Intelligence(iDaS)*, termasuk di dalamnya *Corporate Regulatory Reporting*, *Performance Measurement* dan *Knowledge Management System*.
- Untuk mempercepat *time to market* terutama untuk produk atau layanan yang bekerja sama dengan pihak ketiga (*Host to Host*), Perseroan telah mengembangkan sistem *Middleware (iBridge)* yang tadinya tidak berbasis *Service Oriented Architecture (SOA)* menjadi sistem yang berbasis pada SOA. Sistem ini akan mempercepat pembangunan *interface* dengan pihak ketiga walaupun pihak ketiga tersebut memiliki sistem komunikasi yang berbeda.
- Perseroan saat ini telah mengimplementasikan sistem *workflow (iFlow)*, di mana sistem ini akan menyederhanakan dan mengotomatisasikan proses bisnis, meningkatkan efisiensi, kontrol yang lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan layanan pada nasabah.
- Perseroan saat ini sedang mengembangkan aplikasi *Banking 2.0* meliputi *internet banking*, *mobile banking* dan *One Stop Service (BTN Property)* yaitu aplikasi *full service banking* yang menawarkan *total customer experience anywhere, anytime and any delivery channel*.
- Perseroan saat ini telah mengimplementasikan *Single Sign On (iIdentify)* yaitu suatu sistem terintegrasi, kebijakan dan teknologi yang memungkinkan perusahaan memfasilitasi dan mengontrol *user akses* terhadap aplikasi *online*, di samping menjaga *personal* dan informasi bisnis sesuai kewenangan yang ditentukan.
- Perseroan telah memiliki *Disaster Recovery Plan (DRP)* sebagai kesiapan jika terjadi *disaster* dan untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan meningkatkan kapasitas *Data Center* serta melakukan pembangunan *Dual Data Center* yang bersifat *mirroring* secara *real time*.

- Perseroan saat ini telah mengimplementasikan Aplikasi HCIS (*Human Capital Information System*) Tahap II dan akan melanjutkan pengembangan ke tahap III, yaitu aplikasi yang dikembangkan untuk mempercepat proses penyajian Human Capital sehingga dapat mengefisienkan biaya dan waktu untuk menganalisa data personal dan talent management.
- Perseroan telah memiliki aplikasi VoIP, yaitu aplikasi yang berguna untuk mendukung proses efisiensi komunikasi baik untuk kantor pusat maupun kantor cabang.
- Perseroan telah memiliki *Video Conference*, yaitu aplikasi yang berfungsi untuk mensubstitusi pertemuan antara kantor pusat dengan kantor cabang ataupun kantor cabang dengan kantor cabang lainnya sehingga dapat mengefisienkan biaya operasional perjalanan dinas.
- Perseroan telah mengimplementasikan Aplikasi *Card Fraud Prevention*, yaitu aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitor terhadap transaksi berbasis kartu (ATM / EDC) dengan tujuan dapat melacak transaksi yang terindikasi kategori *fraud* sesuai dengan parameter yang ditentukan.
- Perseroan telah melakukan implementasi Aplikasi Arsip Dokumen, yaitu aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pencarian, pelestarian, dan pengamanan terutama arsip penting yang informasinya digunakan untuk kelanjutan dan rekonstruksi kegiatan atau transaksi di BTN.
- Untuk memantau kondisi ATM perseroan telah mengimplementasikan Aplikasi ATM Monitoring. Sistem ini akan memantau kondisi ATM yang termasuk didalamnya *cash monitoring* dan *ATM services availability*.
- Perseroan telah melakukan implementasi terhadap Aplikasi Report BI berbasis XBRL (*eXtensible Business Reporting Language*) untuk unit usaha syariah, yaitu aplikasi yang digunakan untuk melakukan *Cleansing Data* terhadap data CIF, *Collateral* dan parameter serta memiliki *engine* validasi data sesuai dengan taksonomi bank.
- Untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan proses pengiriman pelaporan DHN ke Bank Indonesia yang dapat berakibat terjadinya risiko sanksi denda perseroan telah melakukan enhancement terhadap Aplikasi Daftar Hitam Nasional (DHN). Sistem ini akan menaushakan dan memantau setiap penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong yang wajib dilaporkan oleh seluruh kantor cabang dan memonitor penerbitan DHN serta mengambil tindak lanjut langkah yang harus dilakukan Bank seperti menyebarluaskan kepada seluruh kantor cabang untuk melakukan pembekuan hak pengguna cek dan/atau bilyet giro.
- Perseroan sedang melakukan pengembangan Aplikasi *Wealth Management*, yaitu Aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis dari produk-produk Divisi *Wealth Management* (pengelolaan *Fix Income*, *Unit Trusted* dan *Bank Assurance*) dan memberikan kemudahan bagi staf yang terlibat dalam proses bisnis produk *non banking Wealth Management*.
- Perseroan telah mengembangkan Aplikasi *Dash Board Balance Scorecard*, yaitu aplikasi yang digunakan untuk memonitor *Key Performance Indicator (KPI)* dari *corporate* BTN.
- Perseroan telah mengembangkan Aplikasi *Risk Control and Self Assessment (RCSA)* dan *Loss Event Database (LED)*, yaitu aplikasi yang digunakan untuk proses pengumpulan data risiko operasional dari seluruh kantor cabang agar lebih efisien dan mempercepat dalam melakukan konsolidasi yang telah dilakukan secara sistem juga dapat mempercepat proses pelaporan data kepada manajemen dan dapat memastikan tingkat partisipasi seluruh cabang lebih maksimal serta tersusunnya LED untuk kebutuhan pengukuran risiko operasional.
- Perusahaan sedang mengembangkan Aplikasi *Web Branch* Syariah, yaitu aplikasi untuk menyempurnakan atas kelemahan/ gap aplikasi syariah supaya dapat diakses dengan cepat di kantor - kantor Bank BTN, memiliki reliabilitas yang tinggi dengan down-time yang rendah, mempunyai audit trail yang lengkap, mudah digunakan oleh user, aman terhadap serangan dari luar misalnya hacking ataupun dari dalam misalnya akses dari user internal yang tidak mempunyai otoritas dan Aplikasi *Web Branch* Syariah dapat diakses oleh user dengan mudah di manapun dalam jaringan internal BTN.

17. TINGKAT KESEHATAN BANK

Bank Indonesia setiap tahunnya menilai kesehatan bank-bank di Indonesia dengan tujuan membantu manajemen bank, apakah telah dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan sistem perbankan yang sehat, serta sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Bank Indonesia menggunakan penilaian tersebut untuk melaksanakan fungsinya sebagai pembina dan pengawas perbankan di Indonesia. Penilaian dilakukan terutama didasarkan atas faktor kuantitatif dan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank, cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut: Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance (GCG)*, Rentabilitas (*earnings*); dan Permodalan (*capital*) untuk menghasilkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.

Dalam rangka menciptakan iklim perbankan yang sehat dan untuk memonitor setiap perkembangan bank, Bank Indonesia mewajibkan setiap bank untuk melaporkan posisi tingkat kesehatan setiap enam bulan yang diatur dalam SE BI No.13/24/DPNP/2011 tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Perhitungan tingkat kesehatan ini mencakup aspek-aspek Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance (GCG)*, Rentabilitas (*earnings*); dan Permodalan (*capital*).

Berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, maka PBI No. 6110/PB112004 pasal 18 tentang sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sejak penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember 2011.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan Risiko (*Risk-based Bank Rating*). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan terhadap Bank secara individual maupun konsolidasi, dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Penilaian Profil Risiko

Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap (i) risiko inheren dan (ii) kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Perseroan.

Penilaian Risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perseroan, baik yang dapat diquantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Perseroan. Risiko inheren yang wajib dinilai terdiri dari :

1. Risiko Kredit, yaitu risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan;
2. Risiko Pasar, yaitu risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*;
3. Risiko Likuiditas, yaitu risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan;
4. Risiko Operasional, yaitu risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan;
5. Risiko hukum, yaitu risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis;
6. Risiko strategis, yaitu risiko akibat ketidaktepatan Perseroan dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis;
7. Risiko kepatuhan, yaitu risiko yang timbul akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku; dan
8. Risiko reputasi, yaitu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan.

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko Perseroan sesuai prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek, yaitu :

1. Tata kelola risiko;
2. Kerangka manajemen risiko;
3. Proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta
4. Kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

b. Penilaian Good Corporate Governance (GCG)

Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas:

1. *Governance Structure*;
2. *Governance Process*;
3. *Governance Outcome*.

c. Penilaian Rentabilitas

Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap :

1. Kinerja rentabilitas;
2. Sumber-sumber rentabilitas;
3. Kesiambungan (*sustainability*) rentabilitas; dan
4. Manajemen Rentabilitas.

Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, stabilitas Rentabilitas Bank, dan perbandingan kinerja Bank dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

d. Penilaian Permodalan

Parameter/indikator dalam menilai Permodalan meliputi:

1. Kecukupan modal Bank
 Penilaian kecukupan modal Bank perlu dilakukan secara komprehensif, minimal mencakup:
 (1) Tingkat, *trend*, dan komposisi modal Bank;
 (2) Rasio KPMM dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional; dan
 (3) Kecukupan modal Bank dikaitkan dengan Profil Risiko.
2. Pengelolaan Permodalan Bank
 Analisis terhadap pengelolaan Permodalan Bank meliputi manajemen Permodalan dan kemampuan akses Permodalan.

e. Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Kategori penilaian untuk peringkat komposit adalah sebagai berikut:

Peringkat komposit 1 (PK-1) : Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat, sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.

- Peringkat komposit 2 (PK-2) : Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.
- Peringkat komposit 3 (PK-3) : Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat, sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.
- Peringkat komposit 4 (PK-4) : Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat, sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha Bank.
- Peringkat komposit 5 (PK-5) : Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat, sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan Bank.

Untuk penilaian *self assesment* posisi 31 Desember 2014 tingkat kesehatan Perseroan memperoleh nilai akhir sebesar 2 (dua), yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan.

Untuk penilaian *self assesment* posisi 31 Desember 2013 tingkat kesehatan Perseroan memperoleh nilai akhir sebesar 3 (tiga), yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Posisi 31 Desember 2012 tingkat kesehatan Perseroan memperoleh nilai akhir sebesar 2 (dua) yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank, berdasarkan hasil penilaian atas seluruh komponen atas ketentuan baru tersebut, kesimpulan penilaian tingkat kesehatan Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Faktor-Faktor Penilaian	Peringkat	Peringkat
		Individu	Konsolidasi
1	Profil Risiko	2	
2	<i>Good Corporate Governance</i>	3	
3	Rentabilitas	2	
4	Permodalan	1	
	Peringkat Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko	2	

*Bank BTN tidak memiliki perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan

Analisis	
1	Profil Risiko
	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dan risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai, meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.
2	GCG
	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum cukup baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
3	Rentabilitas
	Rentabilitas memadai , laba sedikit dibawah target yang dianggarkan
4	Permodalan
	Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha bank.
	Kesimpulan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko
	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat , sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas dan permodalan yang secara umum baik . Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Tabel berikut merangkum peraturan modal dan rasio kecukupan modal Perseroan yang diukur sesuai dengan peraturan Bank Indonesia:

	31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010
Rasio Kecukupan Modal untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar ⁽¹⁾	14,64%	15,62%	17,69%	15,03%	16,74%
Rasio Kecukupan Modal untuk Risiko Kredit dan Risiko Operasional ⁽²⁾	14,68%	15,69%	17,75%	15,08%	16,83%
LDR	108,86%	104,42%	100,90%	102,56%	108,42%
GWM (Rupiah)	8,09%	9,29%	8,15%	8,20%	8,08%
GWM (Dolar Amerika Serikat)	8,39%	8,03%	8,03%	8,02%	1,33%
GWM (berdasarkan prinsip Syariah)	5,09%	8,10%	8,00%	6,50%	5,69%
ROA	1,12%	1,79%	1,94%	2,03%	2,05%
ROE	10,66%	16,05%	18,23%	17,65%	16,56%
NIM	4,47%	5,44%	5,83%	5,76%	5,99%
BOPO	89,19%	82,19%	80,74%	81,75%	82,39%
Rasio NPL – netto*)	2,79%	3,04%	3,12%	2,23%	2,66%
Rasio NPL – bruto**)	4,01%	4,05%	4,09%	2,75%	3,26%

Catatan:

*) NPL bersih dan bruto termasuk pembiayaan syariah

⁽¹⁾ Dihitung berdasarkan modal Tier I dibandingkan dengan aset tertimbang menurut risiko kredit dan risiko pasar

⁽²⁾ Rasio pada tabel tersebut berdasarkan peraturan Bank Indonesia dan metode kalkulasi untuk setiap 3 (tiga) tahun yang diindikasikan pada tabel.

Jika rasio peraturan ini dihitung sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, maka Tier II modal termasuk semua ketentuan umum yang dimuat dalam laporan keuangan GAAP Indonesia untuk menghindari potensi kerugian kredit di masa depan. Dibutuhkan modal tambahan untuk mendukung pertumbuhan, untuk mempertahankan rasio kecukupan modal Perseroan dalam pedoman Bank Indonesia, dan untuk mempertahankan likuiditas.

18. PERTANGGUNGAN ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan sebagian besar dari harta kekayaan Perseroan pada PT Asuransi Binagriya Upakara. Perseroan meyakini bahwa jumlah pertanggungan nya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

Total nilai pertanggungan asuransi adalah sekitar Rp 2.188.836.035.878,98 dengan perincian sebagai berikut :

Objek Pertanggungan	Harga Pertanggungan	Premi	Keterangan
Bangunan & Inventaris Kantor	2.188.296.035.878,98	3.580.077.178,25	Asuransi Bangunan dan Inventaris Kantor sekitar 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Asuransi kendaraan bermotor paling lama 1 tahun.
Kendaraan	540.000.000,00	8.814.600,00	

Perseroan dalam hal ini terafiliasi secara tidak langsung dengan PT Asuransi Binagriya Upakara secara kepemilikan, dimana Dana Pensiun BTN merupakan salah satu pemegang saham di PT Asuransi Binagriya Upakara sebesar 3,3%.

19. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

1. Perseroan telah mendaftarkan Hak Cipta sebagaimana terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, dengan nomor pendaftaran 008124 tanggal 23 April 1993 dengan judul Seni Lukis "PT Bank Tabungan Negara (Persero), yang tidak memiliki jangka waktu..
2. Perseroan telah mendaftarkan Hak Cipta sebagaimana terdaftar dalam daftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan nomor pendaftaran 020334 tanggal 11 Agustus 1999 dengan judul Logo "Bank BTN" yang berlaku untuk jangka 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan yaitu pada tanggal 9 Pebruari 1998 di Jakarta.
3. Perseroan telah mendaftarkan atas ciptaan "Batara Payroll" berupa Profram Komputer sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Pendaftaran Ciptaan tanggal 7 Nopember 2007 dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan nomor pendaftaran 035373 tanggal 4 Mei 2006 yang berlaku untuk jangka waktu 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal 6 Juli 2005.
4. Perseroan telah mendaftarkan atas ciptaan Seni Logo berjudul "Bank BTN" sebagaimana ternyata dalam Surat Pendaftaran Ciptaan tanggal 23 Pebruari 2011 dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan nomor pendaftaran 049901 tanggal 23 Pebruari 2011 yang berlaku untuk jangka waktu 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal 5 Januari 2009.
5. Perseroan telah melakukan pendaftaran merek untuk merek "Bank BTN" sebagaimana ternyata dalam Surat Pendaftaran Merek tanggal 17 Juni 2011 dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan nomor pendaftaran IDM000310187 tanggal 17 Juni 2011, yang berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 10 Nopember 2009.

IX. INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA

Informasi dan statistik yang ada pada bab ini dan bab-bab lain dalam prospektus ini yang berkenaan dengan latar belakang industri diambil dan diolah dari berbagai sumber publik. Informasi dan statistik yang ada pada bab ini tidak diverifikasi, secara masing-masing maupun bersama-sama, oleh Perseroan, Penjamin Emisi Obligasi, atau pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Perseroan.

Struktur Industri Perbankan

Sebelum Nopember 1988, industri perbankan Indonesia terdiri dari bank umum, bank tabungan dan bank pembangunan. Saat ini, industri perbankan Indonesia terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat ("BPR"). Dalam hal kepemilikan, ada bank-bank milik negara, bank milik pemerintah lokal, bank-bank swasta nasional, bank campuran dan cabang-cabang bank asing. Tabel berikut menunjukkan perubahan dalam komposisi kategori bank di Indonesia selama enam tahun:

Keterangan	31 Desember					
	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Bank Umum						
Bank Persero	4	4	4	4	4	4
Bank Persero Daerah	26	26	26	26	26	26
Bank Swasta	67	66	66	66	67	65
Bank Campuran dan cabang Bank Asing	22	24	24	24	25	26
Total	119	120	120	120	122	121
Bank Umum Syariah						
Bank Syariah	12	11	11	11	11	6
Unit Usaha Syariah	22	23	24	24	23	25
BPR Syariah	163	163	158	155	150	139
Total	197	197	193	190	184	170

Sumber: Bank Indonesia – Statistik Bank Indonesia per 31 Januari 2015

Periode Deregulasi: 1983-1991

Pada awal tahun 1988, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan deregulasi industri perbankan yang berdampak pada meningkatnya persaingan dalam industri perbankan. Langkah-langkah deregulasi yang telah dijalankan antara lain adalah memberikan fleksibilitas bagi bank-bank untuk menetapkan sendiri tingkat suku bunga kredit dan simpanan, menghapuskan pagu kredit, menurunkan GWM dan memperkenalkan instrumen pasar uang, termasuk SBI dan Surat Berharga Pasar Uang.

Sebelum tahun 1988, sektor perbankan Indonesia didominasi oleh 7 (tujuh) bank Pemerintah, yang menguasai lebih dari 60% total kredit perbankan yang ada. Dalam rangka pengembangan sektor industri perbankan Indonesia, mobilisasi simpanan dalam negeri dan pengembangan iklim persaingan antar bank di Indonesia, Pemerintah melalui Menteri Keuangan, telah mengeluarkan beberapa paket deregulasi pada bulan Oktober 1988. Salah satu kebijakan reformasi perbankan yang penting yaitu meringankan persyaratan untuk mendapat izin pendirian bank baru, yang mengakibatkan berdirinya bank-bank baru dengan pesat pada tahun-tahun berikutnya. Kebijakan deregulasi perbankan tersebut telah berhasil meningkatkan persaingan serta jumlah simpanan dan pinjaman secara signifikan pada tahun 1989 dan 1990. Namun demikian, karena berbagai alasan, pertumbuhan industri yang cepat tersebut juga disertai oleh penurunan yang signifikan dalam kualitas aset dan tingkat *non-performing loan* ("NPL") yang signifikan.

Melalui beberapa langkah kebijakan lanjutan, Pemerintah berusaha untuk meningkatkan sistem perbankan dan meningkatkan iklim perbankan yang lebih baik. Pada bulan Februari 1991, Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang lebih rinci untuk melengkapi paket kebijakan deregulasi bulan Oktober 1988. Kebijakan tersebut kemudian diperbaiki dengan paket deregulasi Agustus 1994 yang menerapkan batas Posisi Devisa Neto sebesar maksimal 25,0% dari modal bank. Sesuai dengan peraturan *Bank for International Settlements* (BIS), Pemerintah juga menerapkan peraturan mengenai minimum CAR sebesar 8,0% atas ATMR dan diterapkan di seluruh bank pada bulan Februari 1991.

Periode Pertumbuhan Ekonomi: 1991-1996

Semenjak kebijakan uang ketat diberlakukan pada awal tahun 1991, sektor perbankan Indonesia mengalami periode konsolidasi dan melambatnya pertumbuhan kredit yang terjadi sampai pertengahan tahun 1993. Pada periode ini, beberapa bank Pemerintah dan bank swasta nasional mengalami penurunan tingkat pertumbuhan kredit dan harus meningkatkan modal untuk menaikkan CAR hingga tingkat minimum yang disyaratkan oleh ketetapan Bank Indonesia.

Selama periode tahun 1992 dan 1993, tingkat suku bunga simpanan dan kredit mengalami penurunan secara bertahap. Dimulai pada awal tahun 1994, tingkat suku bunga di Indonesia meningkat kembali sebagai reaksi terhadap naiknya tingkat suku bunga luar negeri yang diakibatkan oleh naiknya tingkat suku bunga diskonto Bank Sentral Amerika Serikat. Namun setelah penurunan tingkat suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat pada bulan Juli 1995, tingkat suku bunga di Indonesia mulai stabil dan kemudian secara perlahan menurun.

Sebagai akibat dari deregulasi pada sektor perbankan pada periode 1988 dan 1991 serta pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia pada periode tahun 1991 dan 1996, peran sektor perbankan swasta pada perekonomian Indonesia meningkat sangat tinggi. Pada periode Desember 1988 dan Juni 1997, jumlah bank-bank swasta di Indonesia meningkat dari 63 menjadi 160, atau meningkat sebesar 254,0%, sementara pangsa pasar sektor perbankan swasta dibandingkan total aset seluruh bank di Indonesia meningkat dari 24,0% menjadi 54,0%.

Krisis Ekonomi dan Proses Pemulihan Perbankan: Tahun 1997 Sampai Sekarang

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberikan beban yang besar bagi industri perbankan di Indonesia dan sebagian besar bank mengalami masalah likuiditas yang serius. Akibat semakin banyaknya bank yang gagal memenuhi ketentuan tingkat GWM, Pemerintah mengambil langkah untuk memberikan BLBI. Bantuan ini berupa pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank yang mengalami masalah likuiditas dalam kegiatan operasi sehari-hari. Selama krisis ekonomi, masalah likuiditas terjadi antara lain karena penarikan dana secara berlebihan dan dalam skala besar oleh nasabah akibat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. Perpanjangan BLBI hanya diberikan kepada bank dengan persyaratan yang ketat.

Sebagian besar BLBI diberikan pada bank yang *non-performing*. Akibat penutupan dan pengambilalihan beberapa bank oleh BPPN, pembayaran kembali atas BLBI tersebut ke Bank Indonesia menjadi kewajiban yang harus ditanggung oleh Pemerintah atau BPPN.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

BPPN yang dibentuk pada tanggal 26 Januari 1998 berdasarkan Keputusan Presiden, merupakan lembaga otonomi dari Departemen Keuangan sebagai reaksi atas krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. BPPN dibentuk untuk menyelesaikan tiga tujuan utama dalam penyehatan perbankan, yaitu: (i) melakukan administrasi program penjaminan Pemerintah kepada bank umum yang diatur dalam Keputusan Presiden; (ii) memonitor dan merestrukturisasi bank yang tidak sehat; (iii) mengambil tindakan hukum yang diperlukan dalam rangka restrukturisasi perbankan. Implementasi dari kewenangan BPPN tersebut adalah melakukan restrukturisasi dan penjualan, penagihan kembali kredit serta pemantauan penjualan aset korporasi. Pemerintah melalui BPPN, telah menjalankan tujuan-tujuan tersebut melalui penutupan bank, rekapitalisasi dan penggabungan dan akuisisi. Tujuan akhir Pemerintah adalah agar mempunyai bank-bank umum yang jumlahnya lebih sedikit namun lebih sehat dengan jaringan cabang yang luas yang memberikan beragam jasa bagi semua lapisan ekonomi dan segmen industri. Secara umum, misi BPPN adalah untuk membantu perbaikan ekonomi Indonesia melalui restrukturisasi perbankan dan merestrukturisasi hutang korporasi serta mengoptimalkan pengembalian uang Pemerintah (yang dipinjamkan kepada bank-bank sebagai bantuan likuiditas dalam bentuk Obligasi Pemerintah) guna mengurangi beban terhadap APBN Pemerintah.

Berdasarkan peraturan-peraturan bidang perbankan, BPPN diberikan wewenang istimewa (termasuk kekuatan hukum tertentu) yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya secara efisien. Hal tersebut meliputi kewenangan untuk membuat perjanjian, mengakuisisi, mengelola, mengalihkan dan menjual aset-aset bank, wewenang untuk merestrukturisasi dan merehabilitasi bank-bank yang ada di bawah pengawasan BPPN, termasuk wewenang untuk melakukan penggabungan atau likuidasi dari bank-bank.

Mandat lima tahun BPPN berakhir pada 27 Februari 2004 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004. BPPN menetapkan tugas-tugas tertentu yang belum terselesaikan, termasuk likuidasi bank non-operasional pada 30 April 2004 dan hal itu dinyatakan bubar pada tanggal tersebut.

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Pemerintah mendirikan perusahaan baru pengelola aset negara bernama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), atau PPA, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tertanggal 27 Februari 2004, setelah berakhirnya mandat BPPN pada tanggal 27 Februari 2004. PPA, perseroan terbatas milik Pemerintah, didirikan untuk melanjutkan program penjualan aset yang belum diselesaikan oleh BPPN selama lima tahun masa jabatan.

PPA berada di bawah pengawasan Departemen Keuangan serta departemen terkait lainnya. PPA resmi dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah untuk mengelola aset pengalihan dari BPPN yang tidak dimasukkan sebagai aset diperdebatkan, berdasarkan Perjanjian Manajemen Aset ("AMA") yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Presiden Direktur PPA, Mohammad Syahril, mantan Wakil Kepala BPPN. Berdasarkan AMA, manajemen aset mencakup semua aset kredit baik direstrukturisasi dan tidak direstrukturisasi. Aset lain-lain untuk penjualan termasuk kepemilikan saham di bank dan non-bank serta properti seperti tanah dan bangunan.

PPA memiliki empat peran, yaitu: 1) restrukturisasi aset; 2) kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan nilai aset; 3) koleksi piutang; dan 4) penjualan aset. PPA memiliki hak untuk mengumpulkan sebagian dividen dari penjualan aset dan akan mengambil sebagian dari hasil penjualan atas perbedaan nilai pengalihan aset dari BPPN sebagai kompensasi untuk biaya yang dikeluarkan untuk mengelola aset.

Program Penjaminan Pemerintah

Dalam menghadapi krisis perekonomian nasional dan dengan maksud untuk memberikan dukungan terhadap sektor perbankan Indonesia yang kondisinya memburuk sejak tahun 1998, Pemerintah, sebagai jawaban atas krisis ekonomi dan dukungan atas menurunnya industri perbankan di Indonesia, menerapkan program penjaminan Pemerintah (*Government Guarantee Program*) dan program penawaran pertukaran (*Exchange Offer Program*), untuk memberikan jaminan kepada deposan bank dan kreditur.

Secara umum, kewajiban yang dijamin oleh Pemerintah dalam program ini adalah pembayaran atas kewajiban bank umum nasional baik yang tercatat di neraca (*on-balance sheet*) maupun yang tidak tercatat dalam neraca (*off-balance sheet*) termasuk kewajiban kantor cabang luar negeri bank-bank tersebut kepada deposan asing dan dalam negeri serta para kreditur, termasuk kewajiban untuk membayar dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing sesuai dengan ketentuan dalam program tersebut.

Sesuai dengan ketentuan dalam Program Penjaminan Pemerintah, jangka waktu penjaminan akan dengan sendirinya terus diperpanjang setiap enam bulan, kecuali Menteri Keuangan sebelum akhir dari jangka waktu enam bulan tersebut menyatakan tidak akan memperpanjang program tersebut.

Sebelumnya Program Penjaminan Pemerintah dilaksanakan dan dikelola oleh BPPN. Sejak pembubaran BPPN pada awal tahun 2004, Program Penjaminan Pemerintah dilaksanakan dan dikelola oleh unit di bawah Menteri Keuangan yang disebut "Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3)". Program Penjaminan Pemerintah berakhir pada bulan September 2005, dengan kebijakan baru Penjamin Simpanan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tanggal 22 September 2004 untuk mengawali asuransi kewajiban pembayaran bank (deposito).

Deposito yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) adalah dana pihak ketiga (non-bank) dan deposito antar bank yang meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang ekuivalen dengan berbagai jenis deposito. Jumlah deposito yang dijamin oleh LPS adalah saldo deposito yang terdiri dari pokok dan bunga akrual/keuntungan pada tanggal pencabutan izin bank. Jumlah saldo deposito tertanggung untuk setiap nasabah di satu bank adalah jumlah dari semua saldo rekening/deposito di bank, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan. Saldo deposito tertanggung untuk setiap nasabah di satu bank adalah maksimal Rp2 miliar efektif sejak 13 Oktober 2008.

Exchange Offer Program

Program penawaran pertukaran diterbitkan setelah adanya 2 (dua) kesepakatan yang dicapai antara Bank Indonesia dengan kreditur tertentu dari bank di Indonesia. Program penawaran pertukaran yang pertama diperkenalkan pada akhir tahun 1998 setelah adanya kesepakatan yang dicapai pada tanggal 18 Agustus 1998, dan yang kedua diperkenalkan pada pertengahan tahun 1999 setelah adanya kesepakatan pada tanggal 25 Mei 1999. Program yang disponsori oleh Pemerintah tersebut bertujuan untuk membantu restrukturisasi hutang dengan mengubah, misalnya, tingkat suku bunga atau jangka waktu. Dalam program penawaran pertukaran, Bank Indonesia memberikan jaminan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali atas kewajiban-kewajiban pihak yang dijamin.

Dalam program penawaran pertukaran yang diadakan pada tahun 1998, pinjaman yang memenuhi syarat dalam program tersebut ditukar menjadi perjanjian kredit baru yang dibagi ke dalam 4 (empat) tahap dengan periode jatuh tempo: satu, dua, tiga dan empat tahun. Peserta dari program penawaran pertukaran pada tahun 1999, menukarkan pinjaman yang memenuhi syarat menjadi pinjaman baru yang dibagi ke dalam 4 (empat) tahap dengan periode jatuh tempo: tiga, empat, lima dan enam tahun.

Pinjaman yang memenuhi syarat dalam program penawaran pertukaran di tahun 1998 didefinisikan sebagai saldo pinjaman non-Rupiah dari (i) liabilitas pinjaman antar bank dan liabilitas jangka pendek obligor yang jatuh tempo sebelum tanggal 1 April 1999, (ii) porsi lancar dari liabilitas jangka menengah dan panjang obligor yang akan jatuh tempo sebelum tanggal 1 April 1999. Pinjaman yang memenuhi syarat dalam program penawaran pertukaran di tahun 1999 didefinisikan sebagai saldo pinjaman non-Rupiah dari (i) liabilitas simpanan antar bank dan liabilitas jangka pendek obligor yang jatuh tempo sebelum tanggal 1 Januari 2002, (ii) porsi lancar dari liabilitas jangka menengah dan panjang obligor yang akan jatuh tempo sebelum tanggal 1 Januari 2002 (selain dari liabilitas yang jatuh temponya dipercepat, kecuali percepatan tersebut terjadi sebelum tanggal 15 Maret 1999 sesuai kontrak yang ada). Obligor didefinisikan sebagai bank Pemerintah dan swasta nasional, dan anak-anak perusahaannya di luar negeri, cabang-cabangnya di luar negeri, maupun kantor perwakilannya di luar negeri.

Program Rekapitalisasi Perbankan

Sesuai Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tertanggal 9 Februari 1999, Program rekapitalisasi perbankan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan CAR para peserta menjadi sekurangnya 4,0%.

Untuk bank yang ikut serta di dalam Program Rekapitalisasi (kecuali untuk Bank Pemerintah, Bank Milik Pemerintah Daerah dan Bank *Take Over/BTO*), pemegang saham pengendali diharuskan untuk menyeter dana tunai sebesar minimum 20% dari kekurangan modal yang diperlukan untuk mencapai CAR sebesar 4,0%. Pemegang saham pengendali dapat bersama-sama dengan mitra strategis untuk menyeter modal yang diperlukan atau penyeteran dilakukan seluruhnya oleh mitra strategis. Yang dimaksud dengan pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki lebih dari 25% dari jumlah saham bank yang dikeluarkan atau pihak yang memiliki kurang dari 25% dari jumlah saham bank tetapi dapat dibuktikan sebagai pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan bank tersebut.

Dalam waktu 3 (tiga) tahun pelaksanaan Perjanjian Investasi (*Investment Agreement*), setiap pemegang saham dapat membeli kembali saham yang dimiliki Pemerintah berdasarkan opsi call. Selain itu, Pemerintah dapat menjual saham yang dimilikinya kepada masyarakat melalui mekanisme Penawaran Umum, setelah saham tersebut ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya.

Pada tanggal 13 Maret 1999, Pemerintah mengumumkan 74 bank yang tergolong cukup sehat untuk meneruskan kegiatan operasionalnya dan tidak perlu mengikuti program rekapitalisasi. Sebanyak 9 (sembilan) bank diperbolehkan untuk terus beroperasi meskipun telah direkapitalisasi melalui Program Rekapitalisasi Perbankan. Bank-bank tersebut adalah Bank Niaga, Bank Lippo, Bank Internasional Indonesia, Bank Bali, Bank Universal, Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin), Bank Prima Express, Bank Artha Media dan Bank Patriot. Pada bulan Juli dan September 1999, Bank Niaga dan Bank Bali tidak berpartisipasi dalam Program Rekapitalisasi Perbankan dan pengendaliannya diambil alih oleh BPPN.

Sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 26 Maret 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Perbankan Bagi Bank Berstatus BTO, Pemerintah melakukan penyertaan sementara dalam bank-bank tertentu untuk jumlah minimum agar memenuhi CAR 4,0%. Besarnya penyertaan sementara Pemerintah ditentukan berdasarkan hasil uji tuntas pihak independen yang ditunjuk oleh BPPN. Bank umum milik Pemerintah juga direkapitalisasi untuk mencapai CAR 4,0% berdasar Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 29 Juli 1999.

Pada bulan Juni 2000, Pemerintah, melalui BPPN, melakukan merger terhadap delapan bank untuk diambil alih (yaitu Bank Duta, Bank Rama, Bank Tamara, Bank Tiara, Bank Nusa Nasional, Bank Pos Nusantara, Jayabank Internasional dan Bank Risjad Salim Internasional) menjadi Bank Danamon.

Pada bulan Desember 2001, Pemerintah mengumumkan rencana penggabungan 5 (lima) bank umum, yaitu Bank Bali, Bank Universal, Bank Arta Media, Bank Prima Express, dan Bank Patriot. Status hukum merger atas kelima bank tersebut secara efektif berlaku pada tanggal 30 September 2002, bank hasil penggabungan kemudian disebut Bank Permata.

Kepemilikan Asing

Bank-bank asing telah diberikan izin untuk beroperasi sebagai cabang kepemilikan penuh (dengan pembatasan operasi) dan sebagai bank usaha patungan atau kantor perwakilan di Indonesia. Beberapa bank asing yang memiliki cabang di Indonesia, antara lain American Express Bank, LTD; Bank of America, N.A.; Bank of China Limited; Citibank N.A.; Deutsche Bank AG.; JP Morgan Chase Bank, N.A.; Standard Chartered Bank; The Bangkok Bank Comp. Ltd; The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd; The Hongkong & Shanghai B.C.; dan The Royal Bank of Scotland, N.V.

Pada tahun 1999, Bank Indonesia menaikkan batas kepemilikan saham asing pada bank-bank di Indonesia hingga 99,0%. Saat ini, pemegang saham strategis asing memiliki partisipasi yang cukup besar dalam sektor perbankan Indonesia, khususnya pada 15 *top bank* di Indonesia. Hal ini timbul karena penjualan saham strategis yang dilakukan oleh BPPN dan PPA di antara tahun 2001 dan 2004, serta transaksi yang dinegosiasikan secara pribadi (dalam kasus Bank Buana dan Bank NISP) selama waktu yang sama. Tabel berikut adalah daftar bank-bank di Indonesia dengan kepemilikan asing per tanggal 31 Desember 2014.

No	Bank	Pemegang Saham	Kepemilikan
1	Bank Danamon Tbk	Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd. JPMCB - Franklin Templeton Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5,0%)	67,37% 6,79% 25,84%
2	Bank Internasional Indonesia (BII) Tbk	Sorak Financial Holdings Pte. Ltd. Maybank Offshore Corporate Service (Labuan) Sdn Bhd UBS AG London Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5,0%)	45,02% 33,96% 18,31% 2,71%
3	Bank CIMB Niaga Tbk	CIMB Group Sdn Bhd Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5,0%)	96,92% 3,08%
4	Bank Panin Tbk	PT Panin Financial Tbk Votrant No. 1103 PTY Limited Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5,0%)	46,04% 38,82% 15,14%
5	Bank Permata Tbk	PT Astra International Tbk Standard Chartered Holding Limited Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5,0%)	44,56% 44,56% 10,88%
6	Bank UOB Buana	UOB International Investment Private Limited United Overseas Bank Limited Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5,0%)	68,94% 30,06% 1,00%
7	Bank OCBC NISP Tbk	OCBC Overseas Investment Pte. Ltd. Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5,0%)	85,08% 14,92%
8	Bank Ekonomi Raharja Tbk	HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited PT Bank Central Asia Tbk Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5,0%)	98,94% 1,00% 0,06%
9	Bank Nusantara Parahyangan Tbk	Acom Co. Ltd. The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd. PT Hermawan Sentral Investama PT Hermawan Ladang Arta Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5,0%)	66,15% 9,35% 6,35% 3,50% 14,65%
10	Bank of India Indonesia Tbk	Bank of India PT Panca Mantra Jaya Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5,0%)	76,00% 17,12% 6,88%
11	Bank QNB Indonesia Tbk	Qatar National Bank SAQ PT Bosowa Kapital Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5,0%)	82,59% 7,60% 9,81%
12	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	Sumitomo Mitsui Bank Corporation TPG Nusantara S.a.r.l. PT Multi Kencana Mulia Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5,0%)	40,00% 25,88% 1,00% 33,12%

Sumber: Publikasi Laporan Keuangan per Desember 2014

Arsitektur Perbankan Indonesia ("API")

Krisis telah menunjukkan bahwa industri perbankan dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia secara keseluruhan perlu ditingkatkan dan diperkuat. Pada tahun 2004, Bank Indonesia berusaha untuk mengatasi hal ini dengan lebih komprehensif melalui peluncuran visi API. API adalah kerangka dasar sistem perbankan di Indonesia yang komprehensif dan akan menetapkan arah, outline dan struktur kinerja industri perbankan selama lima sampai sepuluh tahun ke depan. Dalam API ini, arah kebijakan untuk pembangunan sistem perbankan di masa depan didasarkan pada visi pembangunan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

API terdiri dari enam pilar utama yang berisi tujuan-tujuan berikut:

- 1) Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- 2) Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional;
- 3) Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko;
- 4) Menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka memperkuat kondisi internal industri perbankan nasional;
- 5) Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat, dan
- 6) Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Keenam sasaran yang ingin dicapai API tersebut dituangkan kedalam enam Pilar yang saling terkait satu sama lain guna menunjang pencapaian visi API. Enam Pilar API tersebut akan diimplementasikan kedalam beberapa program sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

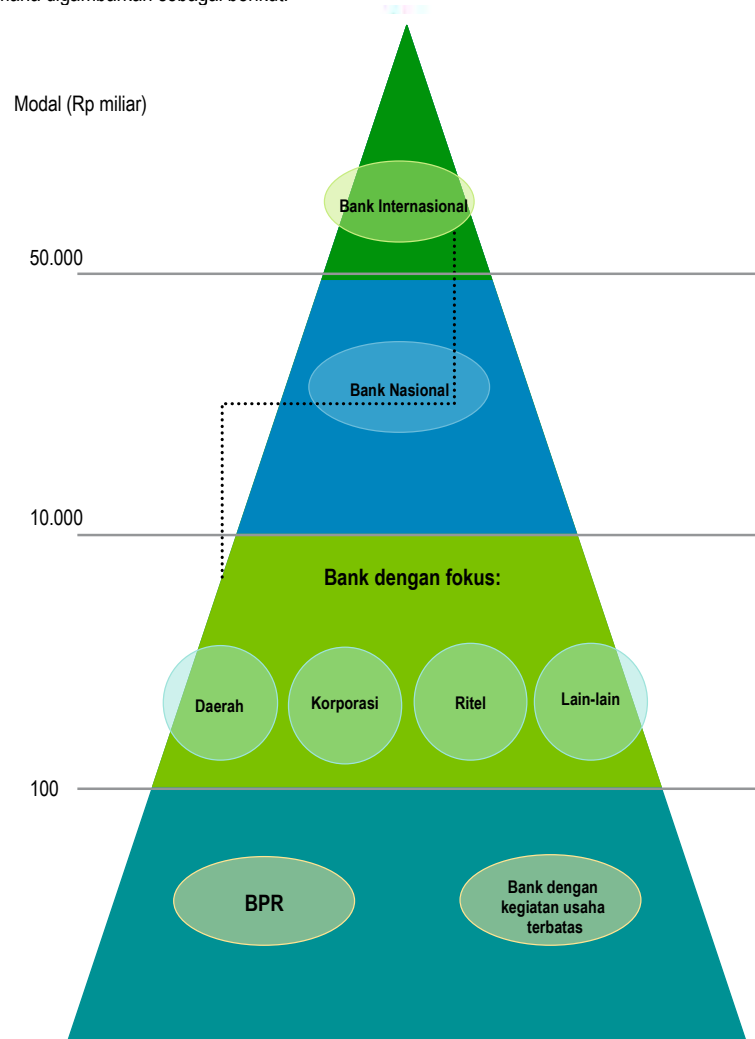
1. Program Penguatan Struktur Perbankan Nasional.

Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan Syariah) dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap.

Upaya peningkatan modal bank-bank tersebut dapat dilakukan dengan membuat rencana bisnis yang memuat target waktu, cara dan tahap pencapaian. Adapun cara pencapaiannya dapat dilakukan melalui: 1) penambahan modal baru dari pemegang saham lama maupun investor baru; 2) penggabungan dengan bank lain (atau beberapa bank) atau *anchor bank* untuk memenuhi persyaratan modal minimum baru; dan/atau 3) menerbitkan saham baru atau penawaran sekunder di pasar modal; dan/atau 4) penerbitan pinjaman subordinasi.

Dengan demikian dalam waktu sepuluh sampai limabelas tahun ke depan program peningkatan permodalan tersebut diharapkan akan mengarah pada terciptanya struktur perbankan yang lebih optimal, yaitu terdapatnya: 1) 2 sampai 3 bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas Rp50 triliun; 2) 3 sampai 5 bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp10 triliun sampai dengan Rp50 triliun; 3) 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara Rp100 miliar sampai dengan Rp10 triliun; 4) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal di bawah Rp100 miliar.

Secara keseluruhan, struktur perbankan Indonesia dalam kurun waktu sepuluh sampai lima belas tahun ke depan diharapkan akan terbentuk sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Bank Indonesia

Mengenai pembangunan bank-bank perkreditan rakyat di bawah struktur program penguatan sistem perbankan nasional, sejumlah strategi dan kegiatan untuk pengembangan bank perkreditan rakyat saat ini sedang berjalan dan direncanakan untuk masa depan. Program itu meliputi: 1) mempelajari jumlah minimum modal disetor yang diperlukan untuk memperkuat permodalan bank perkreditan rakyat dan meningkatkan efisiensi usaha untuk membangun daya saing bank perkreditan rakyat dalam memberikan pelayanan kepada usaha kecil dan menengah. Selain dipersyaratkannya bank perkreditan rakyat untuk meningkatkan modal disetor, Bank Indonesia akan mendorong bank-bank perkreditan rakyat untuk menghadapi masalah dalam meningkatkan modal disetor dengan melakukan *merger*; 2) mendorong pembentukan bank perkreditan rakyat baru di luar Jawa dan Bali melalui relaksasi peraturan persyaratan bagi kandidat manajer bank perkreditan rakyat. Disamping itu, aplikasi untuk pendirian bank perkreditan rakyat baru di Jawa dan Bali akan berdasar pada penilaian yang ketat dan 3) mendukung terciptanya infrastruktur pendukung bagi bank perkreditan rakyat dalam penyediaan likuiditas dukungan melalui fasilitasi pembentukan lembaga jasa bersama yang akan meningkatkan efisiensi operasi perkreditan rakyat, meningkatkan kapasitas mereka untuk mencari sumber pendanaan yang lebih rendah, dan memperluas jaringan bank perkreditan rakyat.

Berbagai kegiatan Bank Indonesia untuk mengembangkan bank perkreditan rakyat yang sekarang sedang berjalan dan direncanakan untuk masa depan merupakan bagian integral dalam upaya untuk memenuhi permintaan *stakeholder* yaitu menciptakan industri bank perkreditan rakyat yang sehat, kuat dan produktif, di mana industri bank perkreditan rakyat mampu menjadi ujung tombak pembiayaan usaha kecil dan menengah. Peningkatan kemampuan pembiayaan ini difokuskan terutama pada sektor pertanian dan komunitas masyarakat dengan pembiayaan dengan tingkat suku bunga yang *reasonable* untuk usaha kecil dan menengah, membangun efisiensi operasional yang lebih baik dengan dukungan sumber daya modal yang kuat dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten serta memiliki integritas tinggi. Rencana ini juga menuntut akses yang adil bagi usaha kecil dan menengah untuk layanan bank perkreditan rakyat di seluruh Indonesia.

2. Program Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada *international best practices*. Program tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* secara bertahap dan menyeluruh. Dalam jangka waktu lima tahun ke depan diharapkan Bank Indonesia telah sejajar dengan negara-negara lain dalam penerapan *international best practices* termasuk *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*. Dari sisi proses penyusunan kebijakan perbankan diharapkan dalam waktu dua tahun ke depan Bank Indonesia telah memiliki sistem penyusunan kebijakan perbankan yang efektif yang telah melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses penyusunannya.

3. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini dapat dicapai dengan peningkatan kompetensi pemeriksa bank, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, pengembangan pengawasan berbasis risiko, peningkatan efektivitas *enforcement*, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia. Dalam jangka waktu dua tahun ke depan diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan lebih efektif dan sejajar dengan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas di negara lain.

4. Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan *good corporate governance* (GCG), kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tingginya standar GCG dengan didukung oleh kemampuan operasional (termasuk manajemen risiko) yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Dalam waktu 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun ke depan diharapkan kondisi internal perbankan nasional akan menjadi semakin kuat.

5. Program Pengembangan Infrastruktur Perbankan

Program ini bertujuan untuk membangun sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti skema biro kredit dan skema penjaminan kredit. Pengembangan *credit bureau* akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya. Demikian pula, pengembangan skema penjaminan kredit akan meningkatkan akses kredit bagi masyarakat. Dalam waktu tiga tahun ke depan diharapkan telah tersedia infrastruktur pendukung perbankan yang mencukupi.

6. Program Peningkatan Perlindungan Nasabah

Program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah. Dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan program-program tersebut dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan.

Fase Implementasi

Program implementasi API dilaksanakan secara bertahap dan dimulai tahun 2004 dengan perincian sebagai berikut:

1. Program penguatan struktur perbankan nasional

No.	Kegiatan (Pilar I)	Periode Pelaksanaan
1	Memperkuat permodalan Bank	
a.	Meningkatkan persyaratan modal minimum untuk Bank Umum dan Bank Syariah (termasuk BPD) menjadi Rp100 miliar	2004 - 2010
b.	Mempertahankan persyaratan modal Rp3 triliun untuk pendirian bank baru sampai dengan 1 Januari 2011	2004 - 2010
2	Memperkuat daya saing Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Daerah	
a.	Meningkatkan <i>linkage program</i> antara bank umum dengan Bank Perkreditan Rakyat	2004
b.	Mempermudah pembukaan kantor cabang BPR	2004
c.	Memfasilitasi pembentukan fasilitas jasa bersama untuk BPR	2004 - 2005
3	Meningkatkan akses kredit	
a.	Memfasilitasi pembentukan skema penjaminan kredit	2004 - 2006
b.	Mendorong penyaluran kredit bagi untuk sektor usaha tertentu	2004 - 2006

2. Program untuk peningkatan kualitas pengaturan perbankan

No.	Kegiatan (Pilar II)	Periode Pelaksanaan
1	Memformalkan proses sindikasi dalam pembuatan kebijakan perbankan	
a.	Melibatkan pihak ketiga dalam setiap pembuatan kebijakan perbankan	2004
b.	Membentuk panel ahli dalam bidang perbankan	2004
c.	Memfasilitasi pembentukan lembaga riset perbankan pada tingkat pusat dan daerah	2004 - 2005
2	Implementasi secara bertahap <i>25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision</i>	2004 - 2013

3. Program peningkatan fungsi pengawasan

No.	Kegiatan (Pilar III)	Periode Pelaksanaan
1	Meningkatkan koordinasi antar lembaga pengawas	2004
	a. Penyusunan MoU dengan agen supervisi institusi perbankan lainnya untuk mengembangkan pola supervisi yang paling efektif bagi bank-bank dan SSK	
2	Me-reorganisasi struktur perbankan di Bank Indonesia	
	a. Memperbaiki <i>High Level Organization Structure</i> (HLOS) dari sektor perbankan di Bank Indonesia	2004 - 2006
	b. Mengkonsolidasikan fungsi pengawasan dan pemeriksaan, termasuk pembentukan tim khusus untuk pemeriksa spesialis (<i>specialist examiners</i>)	2004 - 2006
	c. Konsolidasi antara Direktorat Pengawas Bank Perkreditan Rakyat dan Biro Kredit pada Bank Indonesia, termasuk pengalihan fungsi untuk: 1) penelitian dan pengembangan UMKM dalam Biro Kredit kepada <i>Unit Special Assets Management</i> , 2) Pemeriksaan kredit dari Biro Kredit kepada Direktorat Pengawas Bank Umum	2006 - 2007
	d. Perbaikan struktur organisasi dalam Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR) untuk menunjang pengalihan kegiatan penjaminan dari Bank Perkreditan Rakyat kepada Agen Deposito Asuransi, dan pengalihan perizinan dari Bank-Bank Perkreditan Rakyat yang baru, berikut kegiatan penelitian dan pengawasan dengan unit kerja lainnya di Bank Indonesia	2005 - 2006
	e. Perbaikan pada struktur organisasi Direktorat Perbankan Syariah	2005 - 2006
3	Pengembangan Infrastruktur Pendukung dari Pengawasan Perbankan	
	a. Pengembangan kualitas dari kegiatan pengawasan pada masing-masing bank Syariah dan bank umum, serta Bank Perkreditan Rakyat melalui program sertifikasi dalam agen pengawasan internasional	2004 - 2005
	b. Pelatihan Spesialis Pengawasan	2006 - 2007
	c. Pengembangan Teknologi Informasi untuk pengawasan perbankan	2005 - 2006
	d. Pengembangan sistem pelaporan pada Bank Perkreditan Rakyat	2005 - 2007
	e. Pengembangan pengelolaan proses dokumentasi dari pengawasan perbankan	2005 - 2006
4	Pengembangan implementasi dari sistem pengawasan berdasarkan risiko	
	a. Pengembangan panduan dan instrumen pengawasan untuk meningkatkan implementasi pengawasan berdasarkan risiko di bank-bank umum dan Syariah	2004 - 2005
5	Meningkatkan efektivitas <i>enforcement</i>	
	a. Pengembangan proses investigasi pada kejahatan perbankan	2004 - 2005
	b. Peningkatan transparansi pengawasan dan <i>enforcement</i>	2006
	c. Peningkatan perlindungan hukum bagi pengawas bank	2006

4. Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan

No.	Kegiatan (Pilar IV)	Periode Pelaksanaan
1	Meningkatkan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	
	a. Pembentukan standar minimum untuk GCG pada bank-bank umum dan Syariah, berdasarkan (Pilar IV) Jadwal Implementasi Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Bank	2004 - 2007
	b. Mensyaratkan bank-bank untuk melakukan penilaian internal terhadap implementasi GCG mereka	2007
	c. Mendorong bank-bank untuk menjadi perusahaan terbuka (<i>go public</i>)	2004 - 2007
2	Peningkatan kualitas manajemen risiko perbankan	
	a. Mensyaratkan sertifikasi untuk manajer-manajer risiko pada bank-bank umum dan Syariah	2004 - 2007
	b. Pengembangan kualitas dan standar sumber daya manusia pada Bank-Bank Perkreditan Rakyat dan Bank-Bank Perkreditan Rakyat Syariah melalui program sertifikasi profesional pada seluruh direktur Bank-Bank Perkreditan Rakyat dan Bank-Bank Perkreditan Rakyat Syariah	2005 - 2008
3	Memperkuat kapasitas operasional bank	
	a. Mendorong bank-bank untuk melakukan <i>sharing</i> penggunaan fasilitas operasional untuk meminimalisasi biaya	2006 - 2008
	b. Memfasilitasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas operasional bank	2006 - 2008

5. Program pengembangan infrastruktur perbankan

No.	Kegiatan (Pilar V)	Periode Pelaksanaan
1	Mengembangkan Biro Kredit	
	a. Melakukan inisiatif pembentukan Biro Kredit	2004 - 2005
	b. Mengembangkan Sistem Informasi Debitur untuk Institusi Keuangan Non-Bank	2006 - 2008
2	Mempromosikan pembentukan Pasar Keuangan Islam	
	a. Penyusunan dan pengembangan peraturan pasar keuangan Islam	2006 - 2010
	b. Penyusunan peraturan yang berhubungan dengan instrumen pasar keuangan Islam	2006 - 2010
3	Peningkatan peran institusi kebijakan Syariah dan institusi arbitrase Syariah untuk meningkatkan pemenuhan prinsip-prinsip kebijakan Syariah dalam perbankan Syariah	2004 - 2010

6. Program pengembangan perlindungan nasabah

No.	Kegiatan (Pilar VI)	Periode Pelaksanaan
1	Pembentukan standar untuk mekanisme pengaduan nasabah	
	a. Menetapkan persyaratan minimum mekanisme pengaduan konsumen	2004 - 2005
	b. Mengawasi dan mengevaluasi kepatuhan mekanisme pengaduan konsumen	2006 - 2010
2	Pembentukan agen mediasi independen – memfasilitasi pembentukan agen mediasi independen tersebut	2004 - 2008
3	Penyusunan peraturan untuk transparansi dari informasi produk	
	a. Memfasilitasi penyusunan standar minimum untuk transparansi dari informasi produk perbankan	2004 - 2005
	b. Pengawasan dan evaluasi untuk implementasi dari peraturan mengenai transparansi informasi produk	2006 - 2010
4	Mempromosikan edukasi publik bagi nasabah	
	a. Mendorong bank-bank untuk mendidik nasabah mengenai produk finansial	awal 2004
	b. Meningkatkan efektivitas program pendidikan publik mengenai perbankan Syariah melalui Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES)	awal 2004

Single Presence Policy

Pada tahun 2006, Bank Indonesia memberlakukan *Single Presence Policy* berkaitan dengan bank-bank Indonesia, di mana seorang pemegang saham pengendali di sebuah bank hanya boleh memegang saham di satu bank umum. Seorang pemegang saham pengendali didefinisikan sebagai badan hukum, seorang individu atau suatu kelompok usaha yang: 1) memegang 25,0% atau lebih dari saham yang dikeluarkan bank dan hak suara; atau 2) kurang dari 25,0% dari modal saham yang dikeluarkan dan hak suara bank, tetapi mengontrol bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sejak berlakunya peraturan ini, pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali di lebih dari satu bank diwajibkan untuk menyesuaikan struktur kepemilikan sebagai berikut: 1) mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham mereka dalam satu atau lebih bank di bawah kendali mereka kepada pihak lain, maka mereka hanya menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank; atau 2) melaksanakan merger atau konsolidasi bank-bank di bawah kendali mereka; 3) mendirikan *bank holding company* dengan membentuk badan hukum baru sebagai *bank holding company* atau menugaskan salah satu bank di bawah kendali mereka sebagai *bank holding company*.

Penyesuaian struktur kepemilikan diperlukan untuk dapat diselesaikan selambat-lambatnya akhir Desember 2010. Berdasarkan permintaan dari pemegang saham pengendali dan bank-bank di bawah pengawasan mereka, Bank Indonesia dapat memberikan perpanjangan waktu untuk penyesuaian struktur kepemilikan apabila menurut Bank Indonesia kerumitan masalah yang dihadapi oleh pemegang saham pengendali dan/atau bank-bank di bawah kendali dapat menyebabkan perubahan dalam struktur kepemilikan.

Implementasi Basel II dan Basel III

Basel II akan dilaksanakan secara bertahap dimana pelaksanaannya dimulai pada tahun 2008. Semua bank umum akan diminta untuk memenuhi persyaratan modal oleh awalnya mengadopsi pendekatan yang paling sederhana. Selanjutnya, setiap bank yang mampu membuat perubahan sistem yang diperlukan dan memenuhi semua persyaratan yang memadai akan diizinkan untuk bergerak ke arah pendekatan yang lebih canggih atas persetujuan Bank Indonesia. Perusahaan-perusahaan perbankan yang terhimpun dalam working group Basel II telah melakukan berbagai inisiatif, antara lain berupa studi dampak kuantitatif (*quantitative impact study/QIS*), diskusi national discretions, sosialisasi dan seminar Basel II. Pada tahun 2012 Basel II telah diterapkan di lingkup penuh yang mencakup seluruh pilar.

Untuk menyempurnakan kerangka permodalan perbankan yang ada (Basel II) dan dari pembahasan di berbagai forum internasional, diusulkan inisiatif baru untuk melaksanakan Basel III. Basel III mempunyai fokus pada pengaturan mikro-prudensial yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan individual bank dalam menghadapi krisis. Basel III ditargetkan untuk dapat diimplementasikan secara bertahap hingga 2019.

X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011, dan 2010 berdasarkan laporan keuangan Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (penanggung jawab Benyanto Suherman) berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (penanggung jawab Benyanto Suherman) berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (penanggung jawab Benyanto Suherman) berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (penanggung jawab Hari Purwantono) berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (penanggung jawab Hari Purwantono) berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010
ASET					
Kas	920.482	924.451	694.941	512.399	362.769
Giro pada Bank Indonesia	9.371.509	9.858.758	7.297.835	5.261.418	4.126.152
Giro pada bank lain – neto	1.093.393	400.215	161.993	208.252	151.387
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	1.496.455	4.839.268	11.466.296	9.777.564	2.371.810
Efek-efek- neto	5.436.970	4.201.682	1.013.796	733.953	928.357
Obligasi Pemerintah	8.238.065	8.384.960	7.468.930	7.106.814	7.193.270
Tagihan swap suku bunga – neto	-	-	-	-	-
Kredit yang diberikan – neto	104.905.865	91.378.847	74.621.792	58.533.169	47.977.801
Pembiayaan/piutang syariah – neto	9.433.361	7.951.367	5.808.257	4.086.417	2.691.014
Aset pajak tangguhan – neto	-	-	-	58.188	38.836
Aset tetap – neto	1.488.383	1.522.724	1.582.812	1.497.455	1.450.837
Bunga yang masih akan diterima	1.183.489	923.688	871.985	718.892	580.476
Aset lain-lain	1.007.989	783.770	759.956	626.938	512.830
Total Aset	144.575.961	131.169.730	111.748.593	89.121.459	68.385.539
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Liabilitas segera	1.835.807	1.284.306	1.201.499	1.017.008	781.931
Simpanan dari nasabah	106.470.677	96.207.622	80.667.983	61.970.015	47.546.047
Simpanan dari Bank Lain	1.179.269	275.257	706.703	792.970	558.271
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.817.603	2.652.730	2.335.000	4.450.494	3.463.819
Surat-surat berharga yang diterbitkan - neto	8.519.884	8.836.711	7.136.776	5.438.382	4.139.934
Pinjaman yang diterima	6.998.213	7.073.032	6.737.260	5.695.307	3.399.787
Bunga yang masih harus dibayar	308.996	241.370	193.280	173.587	163.106
Liabilitas Pajak Tangguhan Neto	152.422	152.777	45.009	-	-
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	7.198	6.469	4.403	3.244	60.782
Liabilitas lain-lain	3.079.486	2.882.703	2.441.809	2.258.809	1.824.584
Total Liabilitas	132.369.555	119.612.977	101.469.722	81.799.816	61.938.261
EKUITAS					
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.283.848	5.282.427	5.178.220	4.417.985	4.357.029
Tambahan modal disetor	2.028.136	2.025.764	1.793.503	734.359	639.626
Opsi Saham	9.483	10.600	103.054	60.159	60.845
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual - neto	(90.013)	(90.046)	29.058	35.181	127.641
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	3.859.360	2.765.847	1.811.074	916.587	307.488
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya (defisit)	1.115.592	1.562.161	1.363.962	1.157.372	954.649
Total Ekuitas	12.206.406	11.556.753	10.278.871	7.321.643	6.447.278
Total Liabilitas dan Ekuitas	144.575.961	131.169.730	111.748.593	89.121.459	68.385.539

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010
Pendapatan bunga dan bagi hasil	12.807.328	10.782.877	8.818.579	7.556.104	6.498.752
Beban bunga dan bonus	(7.342.747)	(5.129.554)	(4.091.760)	(3.770.231)	(3.143.934)
Pendapatan bunga dan Bagi Hasil – neto	5.464.581	5.653.323	4.726.819	3.785.873	3.354.818
Pendapatan operasional lainnya	894.820	763.983	571.494	512.017	487.890
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(771.166)	(430.289)	(212.624)	(109.562)	(310.536)
Pemulihan (beban) estimasi kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	(729)	(2.066)	(1.159)	57.538	(21.244)
Beban operasional lainnya	(4.041.294)	(3.849.042)	(3.213.561)	(2.720.117)	(2.247.211)
Laba Operasional	1.546.212	2.135.909	1.870.969	1.525.749	1.263.717
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	1.960	4.862	(7.767)	(3.489)	(13.495)
Laba sebelum manfaat pajak	1.548.172	2.140.771	1.863.202	1.522.260	1.250.222
Manfaat (beban) pajak					
Kini	(431.767)	(431.779)	(392.729)	(392.836)	(374.350)
Tangguhan	(813)	(146.831)	(106.511)	(10.763)	40.066
Laba tahun berjalan	1.115.592	1.562.161	1.363.962	1.118.661	915.938
Pendapatan (beban) komprehensif lain	33	(119.104)	(6.123)	(92.460)	181.880
Laba komprehensif selama tahun berjalan	1.115.625	1.443.057	1.357.839	1.026.201	1.097.818
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	106	148	148	127	105

RASIO-RASIO PERTUMBUHAN DAN KEUANGAN

(dalam persentase)

Keterangan	31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010
Rasio Pertumbuhan					
Pendapatan bunga dan bagi hasil - neto	(3,34)	19,60	24,85	12,85	45,72
Laba operasional	(27,61)	14,16	22,63	20,74	70,90
Laba tahun berjalan	(28,59)	14,53	21,93	22,13	80,93
Jumlah aset	10,22	17,38	25,39	30,32	17,00
Jumlah liabilitas	10,66	17,88	24,05	32,07	16,74
Jumlah ekuitas	5,62	12,43	40,39	13,56	19,55
Permodalan					
CAR untuk risiko kredit dan risiko operasional	14,68	15,69	17,75	15,08	16,83
CAR untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar	14,64	15,62	17,69	15,03	16,74
Aset tetap terhadap modal	12,19	13,18	15,40	20,45	22,50
Aset produktif					
Aset produktif bermasalah	3,57	3,60	3,68	2,34	2,80
NPL – bersih**)	2,79	3,04	3,12	2,23	2,66
NPL – bruto*)	4,01	4,05	4,09	2,75	3,26
Rentabilitas					
ROA	1,12	1,79	1,94	2,03	2,05
ROE	10,66	16,05	18,23	17,65	16,56
NIM	4,47	5,44	5,83	5,76	5,99
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	89,19	82,19	80,74	81,75	82,39
Likuiditas					
LDR	108,86	104,42	100,90	102,56	108,42
Kepatuhan (compliance)					
Persentase pelanggaran BMPK	-	-	-	-	-
Persentase pelanggaran BMPK GWM					
Konvensional Rupiah					
Utama	8,09	9,29	8,15	8,20	8,08
Sekunder	7,85	9,07	2,50	2,50	6,06
Dolar Amerika Serikat	8,39	8,03	8,03	8,02	1,33
Syariah Rupiah	5,09	8,10	8,00	6,50	5,69
PDN	1,92	1,07	0,70	1,73	2,18

Tidak terdapat rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian hutang Perseroan.

XI. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan posisi ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011, dan 2010 berdasarkan laporan keuangan Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011, dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), masing-masing dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.283.848	5.282.427	5.178.220	4.417.985	4.357.029
Tambahan modal disetor	2.028.136	2.025.764	1.793.503	734.359	639.626
Opsi Saham	9.483	10.600	103.054	60.159	60.845
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual	(90.013)	(90.046)	29.058	35.181	127.641
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	3.859.360	2.765.847	1.811.074	916.587	307.488
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	1.115.592	1.562.161	1.363.962	1.157.372	954.649
Jumlah Ekuitas	12.206.406	11.556.753	10.278.871	7.321.643	6.447.278

Pada tahun 2014, dengan adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 7 dan 8, MESOP II tahap 5 dan 6, dan MESOP III tahap 3 dan 4, tambahan modal disetor meningkat masing-masing sebesar Rp1.840 juta, Rp243 juta, dan Rp289 juta yang berasal dari pembelian 2.368.000 lembar saham dengan harga sebesar Rp855 (Rupiah penuh) per lembar saham untuk MESOP I, sejumlah 192.500 lembar saham dengan harga sebesar Rp1.297,44 (Rupiah penuh) per lembar saham untuk MESOP II, dan sejumlah 282.000 lembar saham dengan harga sebesar Rp1.098,36 (Rupiah penuh) per lembar saham untuk MESOP III. Tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.028.136 juta. Dengan adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 7 dan 8, MESOP II tahap 5 dan 6, dan MESOP III tahap 3 dan 4, pada tahun 2014, maka Perseroan menerbitkan saham seri B baru sejumlah 2.842.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham, sehingga meningkatkan jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebesar 2.842.500 lembar saham dan sejumlah Rp1.421 juta. Perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah disetujui dengan Akta No.32 tanggal 28 Agustus 2014 dan Akta No.16 tanggal 8 Oktober 2014 oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang pemberituannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai surat No. AHU-05535.40.21.2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan No. AHU-07159.40.21.2014 tanggal 8 Oktober 2014.

Pada tahun 2013, dengan adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 5 dan 6, MESOP II tahap 3 dan 4, dan MESOP III tahap 1 dan 2, tambahan modal disetor meningkat masing-masing sebesar Rp11.063 juta, Rp117.623 juta, dan Rp103.575 juta yang berasal dari pembelian 14.236.500 lembar saham dengan harga sebesar Rp855 (Rupiah penuh) per lembar saham untuk MESOP I, sejumlah 93.255.000 lembar saham dengan harga sebesar Rp1.297,44 (Rupiah penuh) per lembar saham untuk MESOP II, dan sejumlah 100.921.500 lembar saham dengan harga sebesar Rp1.098,36 (Rupiah penuh) per lembar saham untuk MESOP III. Tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp2.025.764 juta. Dengan adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 5 dan 6, MESOP II tahap 3 dan 4, dan MESOP III tahap 1 dan 2, pada tahun 2013, maka Perseroan menerbitkan saham seri B baru sejumlah 208.413.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham, sehingga meningkatkan jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebesar 208.413.000 lembar saham dan sejumlah Rp104.207 juta. Perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah disetujui dengan Akta No.26 tanggal 16 Maret 2013, Akta No.27 tanggal 8 Mei 2013, dan Akta No.35 tanggal 19 Desember 2013, oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang pemberituannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai surat No. AHU-AH.01.10-12486 tanggal 5 April 2013, No. AHU-AH.01.10-25534 tanggal 24 Juni 2013, dan No. AHU-AH.01.10-56039 tanggal 24 Desember 2013.

Pada tahun 2012, dengan adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 3 dan 4 dan MESOP II tahap 1 dan 2, tambahan modal disetor meningkat masing-masing sebesar Rp5.219 juta dan Rp1.130 juta yang berasal dari pembelian 6.716.500 lembar saham dengan harga sebesar Rp855 (Rupiah penuh) per lembar saham untuk MESOP I dan 896.000 lembar saham dengan harga sebesar Rp1.297,44 (Rupiah penuh) per lembar saham untuk MESOP II. Selain itu, melalui pelaksanaan HMETD di bawah PUT I, tambahan modal disetor Bank meningkat sebesar Rp1.052.795 juta (setelah dikurangi biaya emisi saham sebesar Rp59.154 juta). Tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.793.503 juta. Dengan adanya pelaksanaan opsi pembelian saham MESOP I tahap 3 dan 4 dan MESOP II tahap 1 dan 2 pada tahun 2012, maka Perseroan telah menerbitkan saham seri B baru sejumlah 7.612.500 lembar dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham, sehingga meningkatkan jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebesar 7.612.500 lembar saham dan sejumlah Rp3.806 juta. Perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah disetujui dengan Akta No.32 tanggal 11 Desember 2012 oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang pemberituannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai surat No. AHU-AH.01.10-44595 tanggal 14 Desember 2012.

Pada tahun 2012, Bank telah melaksanakan Penawaran Umum Terbatas (PUT I) dengan tujuan untuk memperkuat permodalan dalam mendukung pertumbuhan kredit Bank. PUT I telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.PW/09116/DPR RI/IX/2012 tanggal 28 September 2012 dan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.87 tahun 2012 dan diundangkan dalam Lembaran Negara No.201 tanggal 20 Oktober 2012. Dengan adanya hasil dari PUT I, Bank telah menerbitkan 1.512.857.500 lembar Saham Biasa Seri B dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia melalui pelaksanaan HMETD pada tahun 2012, sehingga meningkatkan jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh oleh Bank sebesar 1.512.857.500 lembar saham atau sejumlah Rp1.052.796 juta (setelah dikurangi biaya emisi saham sebesar Rp59.154 juta). Perubahan modal saham tersebut telah disetujui dengan Akta No.32 tanggal 11 Desember 2012 oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang pemberituannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai surat No. AHU-AH.01.10-44595 tanggal 14 Desember 2012.

Setelah tanggal Laporan Keuangan 31 Desember 2014 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.

XII. PERPAJAKAN

A. Umum

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh oleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar:

- Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak Penduduk / berkedudukan di luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak Penduduk / berkedudukan di luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak Penduduk/berkedudukan di luar negeri. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih harga jual atau nominal di atas harga perolehan obligasi.
- Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 0% untuk tahun 2009 – 2010, 5% untuk tahun 2011 – 2013 dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
- Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan diluar Bursa Efek dan tidak dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek, tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana berdasarkan pasal 23 atau pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAKNYA MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Per 31 Desember 2014, kewajiban pajak Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan Pasal 29	105.943
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	64.671
Pajak Penghasilan Pasal 21	16.640

Perseroan telah menyetorkan dan melaporkan seluruh kewajiban pajak tersebut.

XIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 No. 28 tanggal 23 April 2015, Akta Addendum I Perjanjian Emisi Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 No 43 tanggal 21 Mei 2015, dan Akta Addendum II Perjanjian Emisi Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 No. 56 tanggal 22 Juni 2015, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) sesuai dengan porsi bagian penjaminannya masing-masing dan mengikat diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dalam Penawaran Umum "Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015" sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya dan setelah itu tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan besarnya porsi serta presentase penjaminan dari anggota Sindikasi Penjaminan Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Seri C (Rp)	Seri D (Rp)	Total	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi							
1.	PT BCA Sekuritas	435.000.000.000	66.000.000.000	140.000.000.000	166.000.000.000	807.000.000.000	26,90
2.	PT CIMB Securities Indonesia	123.000.000.000	115.000.000.000	190.000.000.000	221.000.000.000	649.000.000.000	21,63
3.	PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)	202.000.000.000	149.000.000.000	242.000.000.000	200.000.000.000	793.000.000.000	26,43
4.	PT Trimegah Securities Tbk	140.000.000.000	169.000.000.000	228.000.000.000	213.000.000.000	750.000.000.000	25,00
	Jumlah	900.000.000.000	499.000.000.000	800.000.000.000	800.000.000.000	2.999.000.000.000	99,97
Penjamin Emisi Obligasi							
1.	PT Recapital Securities	-	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	0,03
	Jumlah	-	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	0,03
Jumlah		900.000.000.000	500.000.000.000	800.000.000.000	800.000.000.000	3.000.000.000.000	100,00

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung atau tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dengan Pemegang Saham Utama.

Negara Republik Indonesia memiliki 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Danareksa (Persero), sedangkan PT Danareksa (Persero) memiliki 499.999.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Danareksa Sekuritas.

Dengan demikian PT Danareksa Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Obligasi adalah pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPM sedangkan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Wali Amanat : **PT Bank Mega Tbk.**
Menara Bank Mega
Jl. Kapten Tendean. Kav.12-14A
Jakarta Selatan 12790
Telp. : (62-21) 7917 5000
Fax. : (62-21) 799 0720

Surat Tanda Terdaftar PPPM : No. 20/STTD-WA/PM/2000
Pedoman Kerja : Undang-undang Pasar Modal

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 10A/SPK/IBD/CM/IV/2015 tanggal 7 April 2015.

Tugas Pokok:

Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Akuntan Publik : **KAP Purwanto, Suherman & Surja**
(the Indonesian member firm of Ernst & Young Global Limited)

Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 2, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
Telp. : (62-21) 5289 5000
Fax. : (62-21) 5289 4100

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Akuntan Indonesia

No. Institut Akuntan Publik Indonesia : Registrasi Akuntan Publik No. AP.0685 atas nama Benyanto Suherman.

No. STTD : 16/BL/STTD-AP/2006 tanggal 07 Nopember 2006

Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 16A/SPK/IBD/CM/IV/2015 tanggal 13 April 2015.

Tugas Pokok:

Menerbitkan kembali laporan auditor independen atas laporan keuangan, melakukan penelaahan (*review*) terhadap bagian-bagian prospektus lengkap dan prospektus ringkas dan membuat *comfort letter* berdasarkan hasil audit terhadap laporan keuangan.

Konsultan Hukum : **HKGM & Partners**

Pondok Indah Plaza 3 Blok E/4 & E/5
Jl. TB Simatupang
Jakarta 12310
Telp. : (62-21) 75900215
Fax. : (62-21) 75900225

No. STTD: 388/PM/STTD-KH/2001 atas nama Ruli Fajar Hidayat.

Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPM) No. 200134

Pedoman Kerja: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 15A/SPK/IBD/CM/IV/2015 tanggal 10 April 2015.

Tugas Pokok:

Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

Notaris : Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH,

Jl. Panglima Polim V/11
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160
Telp. : (62-21) 724 4650 / 739 2801 / 720 9542
Fax. : (62-21) 7265090

No. Ikatan Notaris Indonesia: 14/Angg-INI/PD-Jak-Tim/II/2011 atas nama **Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH**

No. STTD: 450/BL/STTD-N/2011, tanggal 23 Maret 2011

Juncto

No : S-5497/BL/2011, tanggal 19 Mei 2011

Pedoman Kerja: Pernyataan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *juncto* Undang-undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 13A/SPK/IBD/CM/IV/2015 tanggal 8 April 2015.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini antara lain adalah membuat akta otentik yang terdiri dari: Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan Wali Amanat, Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta lain sehubungan dengan penerbitan Obligasi berikut perubahan-perubahannya.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015, menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank Mega Tbk., tidak akan :

- (i) Mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-309/BL/2008 Tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dan Emiten; dan/atau
- (ii) Merangkap menjadi penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.
- (iii) Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang, di mana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum HKGM & Partners.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

HKGM & PARTNERS

Law Firm

No. Ref.: 072/HKGM-RL/Ext/VI/2015

23 Juni 2015

Kepada yang terhormat,
PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.
Gedung Menara BTN
Jl. Gajah Mada No.1
Jakarta 10130

u.p. Direksi

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Atas PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015

Dengan hormat,

Sehubungan dengan maksud PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perseroan**") untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp.6.000.000.000.000,00 (enam triliun Rupiah). Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 dengan jumlah pokok pada tanggal emisi sebesar Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) (untuk selanjutnya disebut "**Obligasi**"), yang terbagi dalam 4 (empat) seri Obligasi yaitu:

1. Obligasi Seri A
Jumlah pokok Obligasi sebesar Rp.900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,625% per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi;
2. Obligasi Seri B
Jumlah pokok Obligasi sebesar Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,875% per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi;
3. Obligasi Seri C
Jumlah pokok Obligasi sebesar Rp.800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,000% per tahun, dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi;
4. Obligasi Seri D
Jumlah pokok Obligasi sebesar Rp.800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,500% per tahun, dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal emisi;

HKGM & PARTNERS

Law Firm

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi pada tanggal Emisi dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya yang pada tanggal emisi adalah senilai Rp.1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya dan dengan satuan perdagangan Obligasi di bursa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

Obligasi tersebut telah mendapatkan peringkat *id.AA (double A)* dari PT Pemeringkat Efek Indonesia berdasarkan surat No.601/PEF-Dir/IV/2015 tanggal 17 April 2015 serta akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia yang dijamin oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yang mana dana hasil penerbitan Obligasi yang diperoleh Perseroan seluruhnya akan digunakan untuk sumber pembiayaan kredit.

Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami yang bertandatangan di bawah ini, Ruli Fajar Hidayat, Partner pada, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Kantor Konsultan Hukum HKGM & Partners, berkantor di Pondok Indah Plaza 3, Blok E/4 & E/5, Jl. TB Simatupang, Jakarta 12310, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (sebagaimana telah diubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan) dengan nomor pendaftaran 388/PM/STTD-KH/ 2001 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No.200134, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Perseroan No.15A/SPK/IBD/CM/IV/2015 tanggal 10 April 2015, untuk melaksanakan uji tuntas sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas kami No. Ref.: 048/HKGM-RL/Ext/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 juncto Tambahan atas Laporan Hasil Uji Tuntas No. Ref.: 063/HKGM-RL/Ext/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 juncto Tambahan II atas Laporan Hasil Uji Tuntas No. Ref.: 071/HKGM-RL/Ext/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 (untuk selanjutnya disebut "LHUT"), dengan tembusan kepada Kepala Eksekutif Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, berturut-turut yaitu PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Trimegah Securities Tbk. serta para Penjamin Emisi Obligasi, berturut-turut yaitu PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Securities Tbk. dan PT Recapital Securities

Pelaksanaan uji tuntas tersebut pada pokoknya dilakukan dengan memeriksa dokumen-dokumen Perseroan dengan memperhatikan aspek materialitas dan/atau masih tetap berlaku sampai dengan tanggal LHUT sebagaimana telah kami ungkapkan dalam LHUT.

HKGM & PARTNERS

Law Firm

Dalam melakukan pelaksanaan uji tuntas untuk kepentingan Pendapat Dari Segi Hukum ini, kami menganggap dan mendasarkan pada:

1. Bahwa dokumen, pernyataan, data, fakta, informasi dan keterangan serta konfirmasi baik lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy, sehubungan dengan aspek hukum yang kami peroleh langsung dari Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau konfirmasi Perseroan sebagaimana termuat dalam Surat Konfirmasi Perseroan No.476/DIR/IBD/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 (“Surat Konfirmasi”) dan dokumen, pernyataan, data, fakta, informasi dan keterangan serta konfirmasi yang diberikan pihak ketiga yang berkepentingan kepada kami untuk tujuan pelaksanaan uji tuntas adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak menghilangkan fakta yang penting atau perlu diketahui, serta sampai dengan tanggal LHUT dan Pendapat Dari Segi Hukum tidak mengalami perubahan, dan tidak ada data, fakta, informasi dan keterangan serta konfirmasi material yang tidak diberikan Perseroan dan/atau pihak ketiga lainnya kepada kami dan tidak ada data, fakta, informasi dan keterangan serta konfirmasi yang salah, tidak benar dan/atau keliru yang diberikan kepada kami yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam LHUT dan Pendapat Dari Segi Hukum;
2. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh pihak ketiga yang berkepentingan kepada kami dalam rangka LHUT dan Pendapat Dari Segi Hukum adalah asli dan ditandatangani oleh yang berwenang, dan dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya;
3. Bahwa data, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy, sehubungan dengan aspek hukum yang kami peroleh langsung dari pihak ketiga, termasuk badan eksekutif dan yudikatif yang berhubungan erat dengan pelaksanaan uji tuntas dan untuk maksud pemberian LHUT dan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, lengkap dan tidak menghilangkan fakta yang penting atau perlu diketahui sampai dengan tanggal LHUT dan Pendapat Dari Segi Hukum;
4. Di dalam melakukan pelaksanaan uji tuntas dan pemberian pendapat hukum ini, atas suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait, kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansialnya.

Berdasarkan pemeriksaan dari segi hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asumsi-asumsi tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

HKGM & PARTNERS

Law Firm

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama Postpaarkbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No.653 tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-Undang Darurat No.9 Tahun 1950 jo Undang-Undang No.36 Tahun 1953. Nama Bank Tabungan Pos kembali berubah menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 1964 juncto No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1972. Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara dinyatakan bubar dan pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara yang ada pada saat pembubaran menjadi beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut.

2. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara “PT Bank Tabungan Negara (Persero)” No.136 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Muhani Salim, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No.C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992 dan telah didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No.603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS tanggal 18 Agustus 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.6A.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan terhadap Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No.34 tanggal 11 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No.AHU-53061.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0073226.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.45 tanggal 5 Juni 2009. Tambahan No.14839/2009.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.7 tanggal 12 Oktober 2009, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No.AHU-49309.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan

HKGM & PARTNERS

Law Firm

No.AHU-0066714.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.74 tanggal 14 September 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.1325/2010 (“**Akta PKR No.7/2009**”), yang antara lain merubah seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka menjadi perseroan terbuka dengan menyesuaikan pada Peraturan BAPEPAM dan LK No.IX.J.1 dan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka.

Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.51 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No.AHU-AH.01.03-0926094 tanggal 21 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3495340.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 21 April 2015 (“**Akta PKR No.51/2015**”), yang berisikan mengenai penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dimana dilakukannya perubahan anggaran dasar Perseroan diantaranya dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.25 tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No.AHU-AH.01.03-0932022 tanggal 13 Mei 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3504879.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 13 Mei 2015 (“**Akta PKR No.25/2015**”) yang berisikan mengenai perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 anggaran dasar mengenai modal ditempatkan dan modal setor Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, Akta PKR No.51/2015 dan Akta PKR No/25/2015 belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, namun demikian UUPT tidak mengatur mengenai konsekuensi hukum dalam hal belum diumumkannya perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Akta pendirian Perseroan beserta perubahan-perubahannya adalah benar dan sah serta sesuai dengan anggaran dasar dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HKGM & PARTNERS

Law Firm

3. Sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada anggaran dasar Perseroan, perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur permodalan Perseroan sampai dengan LHUT adalah benar dan sah. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, berdasarkan Akta PKR No.51/2015 juncto Akta PKR No.25/2015, adalah sebagai berikut:
- a. Modal Dasar PERSEROAN sebesar Rp.10.239.216.000.000,00 terbagi atas 20.478.432.000 saham, yang terdiri dari:
 - i. 1 saham seri A Dwiwarna dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp.500,00;
 - ii. 20.478.431.999 saham seri B dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp.10.239.215.999.500,00, dengan nilai nominal masing-masing saham Rp.500,00.
 - b. Modal Ditempatkan PERSEROAN sebesar Rp.5.283.860.250.000,00 yang terbagi atas 10.567.720.500 saham, yang terdiri dari:
 - i. 1 saham seri A Dwiwarna dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp.500,00;
 - ii. 10.567.720.499 saham seri B dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp.5.283.860.249.500,00
 - c. Modal Disetor PERSEROAN sebesar Rp.5.283.860.250.000,00 yang terbagi atas 10.567.720.500 saham, yang terdiri dari:
 - i. 1 saham seri A Dwiwarna dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp.500,00;
 - ii. 10.567.720.499 saham seri B dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp.5.283.860.249.500,00

Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Negara Republik Indonesia	1 saham seri A Dwiwarna 6.353.999.999 saham seri B	500 3.176.999.999.500	60,13
Masyarakat	4.213.720.500 saham seri B	2.106.860.250.000	39,87
Jumlah	1 saham seri A Dwiwarna 10.567.720.499 saham seri B	500 5.283.860.249.500	100,00
Saham Dalam Portepel	9.910.711.500 saham seri B	4.955.355.750.000	

Susunan pemegang saham pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, pada tanggal 31 Mei 2015, adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)*	%
Negara Republik Indonesia	1 saham seri A Dwiwarna 6.353.999.999 saham seri B	500 3.176.999.999.500	60,13
Masyarakat	4.213.720.500 saham seri B	2.106.860.250.000	39,87
Jumlah	1 saham seri A Dwiwarna 10.567.720.499 saham seri B	500 5.283.860.249.500	100,00

Keterangan:

- * nilai nominal saham Rp.500,00 (lima ratus Rupiah) sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 4 anggaran dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta PKR No.51/2015;

HKGM & PARTNERS

Law Firm

** berdasarkan Akta PKR No.25/2015 dilakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor PERSEROAN sebesar Rp.12.250.000,00 yang disetor dengan uang tunai.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah benar dan sah serta telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang berlaku.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.9 tanggal 13 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.AHU-23917.40.22.2014 tanggal 13 Agustus 2014 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan di bawah No.AHU-0081351.40.80.2014 tanggal 13 Agustus 2014 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.26 tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No.AHU-AH.01.03-0932027 tanggal 13 Mei 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3504886.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 13 Mei 2015 (**"Akta PKR No.26/2015"**), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	:	Maryono;
Direktur	:	Irman Alvian Zahiruddin;
Direktur	:	Mansyur Syamsuri Nasution;
Direktur	:	Iman Nugroho Soeko;
Direktur	:	Adi Setianto;
Direktur	:	Sis Apik Wijayanto;
Direktur	:	Sulis Usdoko;
Direktur	:	Oni Febriarto.

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Sukardi Rinakit*);
Komisaris Independen	:	Amanah Abdulkadir.
Komisaris	:	Agung Kuswandono;
Komisaris Independen	::	Kamaruddin Sjam;*)
Komisaris	:	Lucky Fathul Aziz H;*)
Komisaris Independen	:	Catherinawati Hadiman;*)
Komisaris Independen	:	Arie Coerniadi.*)

*) Pengangkatan Sukardi Rinakit selaku Komisaris Utama, Lucky Fathul Aziz H sebagai Komisaris, serta Kamaruddin Sjam, Catherinawati Hadiman dan Arie Coerniadi masing-masing sebagai Komisaris Independen, akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HKGM & PARTNERS

Law Firm

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, Sukardi Rinakit telah mengundurkan diri dari jabatannya selaku komisaris utama Perseroan dengan berdasarkan surat pribadi Sukardi Rinakit tertanggal 1 Juni 2015 yang ditujukan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, Ibu Rini Soemarno. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 juncto Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (POJK No/33/2014), Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri Sukardi Rinakit selambatnya 90 hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri yang bersangkutan.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai jumlah komisaris independen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, dimana jumlah komisaris independen Perseroan adalah 50% (lima puluh persen) dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan telah diangkat secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan tidak melanggar terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No.IX.I.5, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 juncto Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut dengan telah memiliki Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris Perseroan No.02/DEKOM-BTN/2013 dan Direksi Perseroan No.SKB-02/DIR-BTN/2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang Piagam Komite Audit Perseroan dan telah membentuk komite audit berdasarkan Surat Komisaris Perseroan No.35/KOM/IV/2015 tanggal 3 April 2015, susunan Komite Audit Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Ketua	: Amanah Abdulkadir;
Anggota	: Waldy Gutama;
Anggota	: Sondang Gayatri.

Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Renumerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Komisaris Perseroan No.35/KOM/IV/2015 tanggal 3 April 2015, diputuskan untuk meniadakan sementara Komite Renumerasi dan Nominasi sampai ada dua lagi komisaris independen yang telah memenuhi syarat efektif dan fungsi Komite Renumerasi dan Nominasi akan dilaksanakan langsung oleh Dewan Komisaris dengan bantuan dari pihak independen

HKGM & PARTNERS

Law Firm

dan anggota dari pejabat Perseroan, namun demikian Perseroan tidak dapat dinyatakan melakukan pelanggaran dikarenakan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan OJK No.34/2014, dinyatakan bahwa Perseroan sebagai perusahaan publik memiliki kewajiban untuk menyesuaikan dengan peraturan tersebut paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan OJK No.34/2014, yaitu sampai dengan tanggal 8 Desember 2015.

Berdasarkan Surat Komisaris Perseroan No.35/KOM/IV/2015 tanggal 3 April 2015, Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko untuk memenuhi ketentuan Peraturan BI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana diubah oleh PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009, PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah oleh No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003. Susunan Komite Pemantauan Risiko Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Ketua	: Amanah Abdulkadir;
Anggota	: Agung Kuswandono;
Anggota	: Achmadi;
Anggota	: Sri Widodo.

6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, Perseroan telah memiliki piagam audit internal sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.7, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-496/BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008, dengan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PERSEROAN No.SKB-03/DEKOM-DIR/BTN/ IAD/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Piagam Audit Intern. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.176/DIR/2014 tanggal 21 April 2014, telah ditetapkan Dadang Eka Jatnika selaku Kepala Divisi Internal Audit.
7. Sehubungan pemenuhan Peraturan Bapepam dan LK No. IX. I.4, Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan sebagaimana telah digantikan dengan Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik juncto Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No. I-A, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.233/DIR/2015 tanggal 22 April 2015, Perseroan telah menunjuk Eko Waluyo sebagai Kepala Divisi Corporate Secretary.
8. Sehubungan pemenuhan Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum jo Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi

HKGM & PARTNERS

Law Firm

Kepatuhan Bank Umum, Direksi Perseroan telah menunjuk Irman A. Zahiruddin untuk menjabat sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang mana hal tersebut telah dilaporkan kepada OJK – Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan berdasarkan Surat Perseroan No.147/DIR/CSD/IV/2015 tanggal 6 April 2015, Perihal Penyampaian Direktur Kepatuhan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

9. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.166/DIR/2010 tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Dewan Syariah Nasional MUI No.U-330/DSN-MUI/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.927/DIR/2013 tanggal 27 Desember 2013, susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah:

Ketua : A. Nazri Adlani
Anggota : Moh. Hidayat.
Anggota : Muhammad Syakir Sula

10. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta PKR No.51/2015 dan berdasarkan izin yang diperoleh dan dimiliki Perseroan dari badan atau instansi pemerintah yang berwenang, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang perbankan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang dan melakukan pinjaman dengan jaminan aktiva produktif;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko PERSEROAN maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. kertas pembendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e. obligasi;
 - f. surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

HKGM & PARTNERS

Law Firm

5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan PERSEROAN maupun untuk kepentingan nasabahnya;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel atas unjuk, cek atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
11. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada PERSEROAN dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, sekuritisasi asset, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
13. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
14. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan;
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai syarat bahwa PERSEROAN dikemudian hari harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan PERSEROAN berdasarkan peraturan perundang-undangan;
16. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Melakukan kegiatan jasa keuangan, *commercial banking* dan *investment banking* lainnya;
18. Melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan;
19. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

11. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, berdasarkan pelaksanaan uji tuntas yang kami lakukan, Perseroan telah memperoleh dan memiliki izin-izin pokok yang berkaitan dengan usaha perbankan serta izin-izin untuk pembukaan kantor-kantor Perseroan dari Bank Indonesia yang masih tetap berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, sebagaimana pula dimuat dalam Prospektus.

HKGM & PARTNERS

Law Firm

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Bank Indonesia No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum, dinyatakan bahwa pembukaan kantor setingkat kantor kas atau kegiatan pelayanan kas cukup dicantumkan dalam rencana bisnis bank yang wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia dalam laporan realisasi rencana bisnis bank triwulanan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk pembukaan kantor kas dan kegiatan pelayanan kas yang dilakukan Perseroan, Perseroan telah mencantumkannya dalam Rencana Bisnis Perseroan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia.

Perseroan hanya menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang termuat dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perseroan tidak pernah melakukan kegiatan usaha lain yang menyimpang dari maksud dan tujuan tersebut serta Perseroan tidak pernah mendapatkan sanksi dari Bank Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan dari perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut.

12. Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, kantor-kantor Perseroan telah terdaftar dan memperoleh tanda daftar perusahaan, dan kantor-kantor tersebut telah pula memiliki izin tempat usaha dari instansi yang berwenang. Namun demikian masih terdapat beberapa kantor Perseroan yang sedang melakukan proses permohonan pemerolehan dan/atau perpanjangan atas tanda daftar perusahaan. Adapun kantor-kantor Perseroan yang sedang melakukan proses pemerolehan dan/atau perpanjangan atas izin tanda daftar perusahaan adalah Kantor Cabang (KC) Jakarta Kuningan, KC Surabaya, KC Yogyakarta, KC Bandung, KC Denpasar, KC Padang, KC Banjarmasin, KC Manado, KC Malang, KC Bekasi, KC Jayapura, KC Kendari, KC Kupang, KC Palu, KC Palangkaraya, KC Batam, KC Bangkalan, KC Madiun, KC Solo, KC Purwokerto, KC Cirebon, KC Pekanbaru, KC Tangerang, KC Ciputat, KC Balikpapan, KC Kediri, KC Cilegon, KC Depok, KC Gresik, KC Gorontalo, KC Banda Aceh, KC Ternate, KC Cibubur, KC Cimahi, KC Jakarta Kebon Jeruk, KC Jakarta Cawang, KC Cikarang, KC Karawaci, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tebet, KCP Pasar Minggu, KCP Panglima Polim, KCP Cilandak, KCP Arteri Pondok Indah, KCP Mampang, KCP Fatmawati, KCP Mayestik, KCP Kebayoran Lama, KCP Mulyosari, KCP Mojokerto, KCP Rungkut, KCP IAIN Sunan Ampel, KCP Universitas Airlangga, KCP Jemursari, KCP Bubutan, KCP Jombang, KCP Pematang Siantar, KCP Tebing Tinggi, KCP M Yamin, KCP Setiabudi, KCP Johor, KCP Sibolga, KCP Palopo, KCP Panakukang, KCP Parepare, KCP Sultan Alauddin, KCP Antang, KCP Tamalanrea, KCP Maros, KCP RSUP Wahidin, KCP Sungguminasa, KCP Mamuju, KCP Condong Catur, KCP Abdul Rachman Saleh, KCP Sarijadi, KCP Antapani, KCP Peta, KCP Buah Batu, KCP Margahayu Raya, KCP Kopo Mas, KCP Kopo, KCP Setiabudi, KCP Universitaa Padjajaran, KCP Gatot Subroto, KCP Kuta, KCP Sako Kenten, KCP Ilir Barat, KCP Dr. Sutomo, KCP Ulak Karang (Minang Plaza), KCP Pasar Raya Padang, KCP Bukit Tinggi, KCP Kayutangi, KCP Banjarbaru, KCP Batu Licin, KCP Bitung, KCP Universitas Brawijaya, KCP UIN Malang, KCP Sawojajar, KCP Jaksa Agung Suprpto, KCP Probolinggo, KCP Magelang, KCP Ngaliyan, KCP Pati, KCP Pluit, KCP Pantai Kapuk Indah, KCP

HKGM & PARTNERS

Law Firm

Cikini, KCP Tanah Abang, KCP Pasar Tanah Abang, KCP Cibinong, KCP Duta Plaza, KCP Bekasi Jaya Indah, KCP Rawa Lumbu, KCP Pondok Hijau, KCP Setia Mekar, KCP Bintara, KCP Mustika Jaya, KCP Waena, KCP Dr. Sutomo, KCP Bontang, KCP Tarakan, KCP Sampit, KCP Batuaji, KCP Batam Center, KCP Penuin, KCP Sekupang, KCP Tanjung Balai Karimun, KCP Ponorogo, KCP Banyuwangi, KCP Mojosoongo, KCP Klaten, KCP UNS Solo, KCP Tegal, KCP Cilacap, KCP Kuningan, KCP Indramayu, KCP Subang, KCP Marpoyan, KCP Rumbai, KCP Panam, KCP Cipondoh, KCP Cimone, KCP Duta Garden – Daan Mogot, KCP Bintaro, KCP Ciledug, KCP Pamulang, KCP Bintaro Trade Centre, KCP Universitas Terbuka, KCP Cirendeui, KCP Batu Ampar, KCP Tulungagung, KCP Serang, KCP Depok II Timur, KCP Cimanggis, KCP Sawangan, KCP Beji, KCP Cinere, KCP Lhokseumawe, KCP Bantar Gebang, KCP Jati Asih, KCP Pondok Gede, KCP Cileungsi, KCP Green Pramuka, KCP ITC Mangga Dua, KCP Cempaka Mas, KCP Rawamangun, KCP Cakung, KCP Cianjur, KCP Cijerah, KCP Daan Mogot, KCP Palmerah, KCP Tanjung Duren, KCP Taman Palem, KCP Pasar Rebo, KCP Dewi Sartika, KCP Jatinegara, KCP Klender, KCP Tambun, KCP RE Martadinata, KCP Pasar Central, KCP Cikupa, KCP Pondok Ungu, KCP Teluk Pucung, KCP Harapan Baru, KCP Tandes, KCP Mayjen Sungkono, KCP Babatan Wiyung, KCP Satellite Town Square, KCP Ujung Berung, KCP Garut, KCP Rancaekek, KCP Jatininggar, Kantor Kas (KK) Kebagusan, KK Pejaten, KK Kemang, KK Warung Jati, KK Lebak Bulus, KK Pasar Minggu Center, KK Tanjung Barat, KK Supomo, KK KH Mas Mansyur, KK Nginden Semolo, KK Universitas Negeri Surabaya, KK Dharmahasada, KK Kalibutuh, KK Pasar Atum Mall, KK Binjai, KK Pulo Brayan, KK Tanjung Morawa, KK Simpang Limun, KK Universitas Sumatera Utara, KK Petisah, KK Utama, KK Denai, KK Kima, KK Pasar Sentral, KK Katamso, KK Bojong Soang, KK Banjaran, KK Ahmad Yani, KK Sukajadi, KK Gedebage, KK Sindanglaya, KK Tabanan, KK Nusa Dua, KK Monang Maning, KK Sunset Road, KK Sesetan, KK Dempo, KK Bandara Mas, KK Sultan Adam, KK Landasar Ulin, KK Veteran, KK Sungai Andai, KK Universitas Manado, KK RSUP RD Kandau, KK Universitas Sam Ratulangi, KK Pasar 45, KK Taman Dayu, KK Sulfat, KK Kawi, KK Kedung Mundu, KK Glodok Jaya, KK Taman Solo, KK Muara Karang, KK Pangeran Jayakarta, KK Mediterania Palace, KK Murwardi, KK Asemka, KK Ciomas, KK Bandongan, KK Sentul, KK Sukahati, KK Plaza Lido, KK Pandu, KK Villa Bogor, KK Pemkab Cibinong, KK Villa Mutiara Gading II, KK Galaksi, KK Pekayon, KK Dukuh Zambrud, KK Ahmad Yani, KK Kartini, KK Pondok Timur, KK Pasar Segar, KK Blue Plaza, KK Noer Ali, KK Sentani, KK Unhalu, KK Ahmad Yani, KK Banjar, KK Palimanan, KK Sumber, KK Harjamukti, KK Kalijati, KK Sadang, KK Veteran, KK Harapan Raya, KK Arengka, KK Riau, KK Bangkinang, KK Paus, KK Setiabudi, KK Ahmad Yani, KK Hang Tuah, KK Sudirman City Square, KK Srikandi, KK Durian, KK Peninggilan, KK Karang Tengah, KK Pinang, KK Pasar Baru, KK Taman Cibodas, KK Cipadu, KK Neglasari, KK Kampung Utan, KK Jombang, KK Pondok Aren, KK Cinangka, KK UIN, KK Bojongsari, KK Sepinggan, KK Balikpapan Baru, KK Kebun Sayur, KK Soekarno Hatta, KK Mrican, KK Pare, KK Pasar Baru, KK Pondok Cilegon Indah, KK Kukusan, KK Tole Iskandar, KK Kartini, KK Kelapa Dua, KK Sukatani Arcadia, KK Gresik Kota Baru, KK Bungah, KK Semabung, KK Sungai Liat, KK Universitas Syiah Kuala, KK Citra

HKGM & PARTNERS

Law Firm

Indah, KK Bojong Kulur, KK Jati Murni, KK Jatisari, KK Poltekes Jakarta III, KK Metland, KK Lapangan Tembak Cibubur, KK Kranggan, KK Kelapa Hibrida, KK Boulevard Raya, KK Kebon Bawang, KK Danau Sunter, KK Utan Kayu, KK Biz Park, KK Enggano, KK Balai Pustaka, KK BSD Sektor 1.1, KK Meruya Utara, KK Joglo, KK Taman Semanan Indah, KK ITC Permata Hijau, KK Bussiness Park, KK Slipi Jaya, KK Duri Kosambi, KK Puri CBD, KK Mutiara Taman Palem, KK Perumnas Klender, KK Penggilingan, KK Pondok Bambu, KK Atrium Pondok Gede, KK Jatiwaringin, KK Condet Raya, KK Matraman, KK Serang, KK Pilar, KK Pinangsia, KK Taman Aster, KK Setu, KK Sentra Kalimas, KK Mangunjaya, KK Pamor, KK Kelapa Dua, KK Harapan Kita, KK Victora Park, KK Binong Raya, KK Kaliabang, KK Marakas, KK Sultan Agung, KK Babelan, KK Ujung Menteng, KK Tarumajaya, KK Villa Mutiara Gading 3, KK Aralia, KK Lakarsantri, KK HR Muhammad, KK Gunung Sari, KK G-Walk, KK Cibiru, KK Graha Panyileukan, KK Majalaya, KK Fatmawati 2, KK Pondok Indah, KK Gandaria, Paymen Point (PP) PN Jakarta Selatan, PP Universitas Bhayangkara, PP Pengadilan Negeri Medan, PP RSUD Gowa, PP RS Dr. Wahidin Sudirohusodo, PP Universitas Hasanuddin, PP BP2IP Barombong, PP RSU Bethesda, PP Pengadilan Negeri Jakarta Barat, PP Yayasan Marsudi Rini, PP Dispenda Kota Bekasi, PP RS Dirgahayu, PP RS Univ. Tanjung Pura, Kantor Cabang Syariah (KCS) Bandung, KCS Solo, KCS Batam, KCS Medan, KCS Tangerang, KCS Bekasi, KCS Pekanbaru, KCS Banjarmasin, KCS Cirebon, KCS Palembang, KCS Balikpapan, KCS Cilegon, KCS Jakarta Pasar Minggu, Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Surapati Core, KCPS Kertajaya Indah, KCPS Condong Catur, KCPS Batu Aji, KCPS Ciputat, KCPS Kalimas Bekasi, Kantor Kas Syariah,(KKS) Kopo, KKS Antapani, KKS Sidoarjo, KKS UMRI Pekanbaru, Payment Point Syariah (PPS) Yayasan Dikantara, PPS RS Unisma, PPS Stecom RRI, PPS Ar-Rohman Putri, PPS Al Azhar Sentra Timur, dan PPS Jababeka Education Center yang sedang dalam proses permohonan dan/atau perpanjangan dikarenakan telah habis masa berlakunya. Disamping itu kantor-kantor Perseroan telah pula memiliki izin tempat usaha dan/atau domisili dari instansi yang berwenang, kecuali bagi KC Jakarta Kuningan, KC Surabaya, KC Makassar, KC Yogyakarta, KC Denpasar, KC Manado, KC Malang, KC Jakarta Harmoni, KC Bekasi, KC Jayapura, KC Kendari, KC Solo, KC Pekanbaru, KC Ciputat, KC Balikpapan, KC Depok, KC Gorontalo, KC Pangkal Pinang, KC Ternate, KC Cimahi, KC Bumi Serpong Damai, KC Jakarta Kebon Jeruk, KC Jakarta Cawang, KC Cikarang, KC Karawaci, KC Harapan Indah Bekasi, KC Jakarta Melawai, KCP Tebet, KCP Pasar Minggu, KCP Panglima Polim, KCP Cilandak, KCP Arteri Pondok Indah, KCP Mampang, KCP Fatmawati, KCP Mayestik, KCP Kebayoran Lama, KCP Mulyosari, KCP Tebing Tinggi, KCP Panakukang, KCP Sultan Alauddin, KCP Antang, KCP Tamalanrea, KCP RSUP Wahidin, KCP Mamuju, KCP Condong Catur, KCP Peta, KCP Gatot Subroto, KCP Surapati, KCP Singaraja, KCP Bukit Tinggi, KCP Batu Licin, KCP Tanjung, KCP Bitung, KCP Universitas Brawijaya, KCP Sawojajar, KCP Jaksa Agung Suprpto, KCP Pasuruan, KCP Probolinggo, KCP Majapahit, KCP Banyumanik, KCP Salatiga, KCP Kemayoran, KCP Pluit, KCP Sudirman, KCP Roxy Mas, KCP Pantai Indah Kapuk, KCP Cikini, KCP Tanah Abang, KCP Pasar Tanah Abang, KCP Bojong Gede, KCP Bekasi Jaya Indah, KCP Rawa Lumbu, KCP Pondok Hijau, KCP Setia Mekar, KCP Bintara, KCP Mustika Jaya, KCP Tarakan, KCP

HKGM & PARTNERS

Law Firm

Sampit, KCP Tanjung Balai Karimun, KCP Banyuwangi, KCP UNS Solo, KCP Cilacap, KCP Subang, KCP Marpoyan, KCP Rumbai, KCP Panam, KCP Dumai, KCP Cipondoh, KCP Cimone, KCP Duta Garden – Daan Mogot, KCP Bintaro, KCP Pamulang, KCP Bintaro Trade Center, KCP Universitas Terbuka, KCP Cirendeui, KCP Sawangan, KCP Lenteng Agung, KCP Beji, KCP Cinere, KCP Bantar Gebang, KCP Jati Asih, KCP Pondok Gede, KCP Cileungsi, KCP Green Pramuka, KCP ITC Mangga Dua, KCP Cempaka Mas, KCP Kelapa Gading, KCP Sunter, KCP Rawamangun, KCP Cakung, KCP Palmerah, KCP Tanjung Duren, KCP Kembangan, KCP Taman Palem, KCP Pasar Rebo, KCP Dewi Sartika, KCP Jatinegara, KCP Klender, KCP Kalimalang, KCP Duren Sawit, KCP Tambun, KCP RE Martadinata KCP Pasar Central, KCP Cikupa, KCP Pondok Ungu, KCP Teluk Pucung, KCP Harapan Baru, KCP Satelite Town Square, KK Ciganjur, KK Tebet Timur, KK Bangka Raya, KK Jati Padang, KK Pondok Labu, KK Pondok Pinang 2, KK Saharjo, KK Bona Indah, KK Bukit Duri, KK Manggarai, KK Wolter Monginsidi, KK Kebagusan, KK Pejaten, KK Kemang, KK Warung Jati, KK Lebak Bulus, KK Pasar Minggu Center, KK Tanjung Barat, KK Supomo, KK Rungkut Madya, KK Kapas Krampung, KK Klampis Jaya, KK Gubeng, KK Kalirungkut, KK Perak Barat, KK Kapasari, KK Dharmahusada, KK Kalibutih, KK Pasar Atum Mall, KK Petisah, KK Utama, KK Denai, KK Katamso, KK Ahmad Yani, KK Sukajadi, KK Gedebage, K Sindanglaya, KK Nusa Dua, KK Monang Maning, KK Sunset Road, KK Sesetan, KK Bukit Besar, KK Angkatan 45, KK Lemabang, KK Dempo, KK Bandara Mas, KK A. Yani, KK Martapura, KK Veteran, KK Sungai Andai, KK Pasar 45, KK Singosari, KK Kapanjen, KK Widyagama, KK Taman Dayu, KK Sulfat, KK Kawi, KK Ketileng, KK Waterboom Jakarta, KK Percetakan Negara, KK Glodok Jaya, KK Istana Pasar Baru, KK Cempaka Putih Pemas, KK Jembatan Lima, KK Jembatan Dua, KK Telok Gong, KK Bendungan Hilir, KK Biak, KK Wahid Hasyim, KK Gajah Mada, KK Cideng Barat, KK Sawah Besar, KK Mangga Besar, KK Gunung Sahari, KK Hasyim Ashari, KK Tomang, KK Taman Solo, KK Muara Karang, KK Pangeran Jayakarta, KK Mediterania Palace, KK Muwardi, KK Asemka, KK Bandongan, KK Villa Bogor, KK Villa Mutiara Gading II, KK Galaksi, KK Dukuh Zambrud, KK Ahmad Yani, KK Kemang Pratama, KK Jati Bening, KK Harapan Jaya, KK Bulak Kapal, KK Sumber Artha, KK Grand Prima Bintara, KK Kartini, KK Pondok Timur, KK Pasar Segar, KK Noer Ali, KK Grand Wisata, KK Metro, KK Unhalu, KK Universitas Mulawarman, KK Ahmad Yani, KK Tawang Alun, KK Ciamis, KK Palimanan, KK Sumber, KK Harjamukti, KK Kalijati, KK Veteran, KK Universitas Bengkulu, KK Ahmad Yani, KK Hang Tuah, KK Srikandi, KK Durian, KK Peninggilan, KK Pinang, KK Pasar Baru, KK Taman Cibodas, KK Poris Indah, KK Permata Tangerang, KK Batu Ceper, KK Neglasari, KK Kampung Utan, KK Pamulang 2, KK Jombang, KK Pondok Aren, KK Rempoa, KK Karang Tengah Selatan, KK Serua, KK Pondok Pinang, KK Parung, KK Tanah Kusir, KK Cipete, KK Cinangka, KK UIN, KK Bojongsari, KK Kebun Sayur, KK Soekarno Hatta, KK Mrican, KK Pare, KK IAIN SMH, KK Ciracas, KK Cipocok, KK Kukusan, KK Kartini, KK Kelapa Dua, KK Fakultas Psikologi UI, KK Gandul, KK Maharaja, KK Cilodong, KK Gresik Kota Baru, KK Bungah, KK Gading Fajar, KK Universita Syiah Kuala, KK Citra Indah, KK Bojong Kulur, KK Jati Murni, KK Radar AURI, KK Jatisari, KK Gunung Putri, KK Jatirasa, KK Transyogi, KK Cikeas, KK Poltekes

HKGM & PARTNERS

Law Firm

Jakarta III, KK Metland, KK Lapangan Tembak Cibubur, KK Cipayung, KK Kranggan, KK Kelapa Hibrida, KK Boulevard Raya, KK Kebon Bawang, KK Danau Sunter, KK Utan Kayu, KK Gading Nias, KK Pulomas, KK Johar Baru, KK Kampung Ambon, KK Yos Sudarso, KK Taman Sunter Indah, KK Sunan Giri, KK Gading Kirana, KK Sumur Batu, KK Pegangsaan, KK Pademangan, KK Pemuda, KK Biz Park, KK Enggano, KK Balai Pustaka, KK BSD Sektor 1.1, KK Graha Raya, KK Muncul, KK Sutera Niaga, KK Melati Mas, KK Pondok Kacang, KK Pahlawan Seribu, KK Permata Medang, KK Cisauk, KK Alam Sutera, KK Meruya Utara, KK Joglo, KK Taman Semanan Indah, KK Kedoya, KK Cipulir, KK Pos Pengumben, KK Raden Saleh, KK Season City, KK Intercon, KK Shangrila Indah, KK Tubagus Angke, KK Slipi Jaya, KK Duri Kosambi, KK Puri CBD, KK Mutiara Taman Palem, KK Perumnas Klender, KK Penggilingan, KK Pondok Bambu, KK Kramat Jati, KK Cipinang Elok, KK Cililitan, KK Pondok Kelapa, KK Atrium Pondok Gede, KK Kalibata City Square, KK Pinang Ranti, KK Otista, KK Pisangan Lama, KK Taman Malaka, KK Makassar, KK Jatiwaringin, KK Condet Raya, KK Matraman, KK Serang, KK Pilar, KK Pinangsia, KK Taman Aster, KK Setu, KK Sentra Kalimas, KK Mangunjaya, KK Pamor, KK Curug, KK Citra Raya, KK Balaraja, KK Legok, KK Wisma Mas, KK Sepatan, KK Kelapa Dua, KK Harapan Kita, KK Victoria Park, KK Binong Raya, KK Kaliabang, KK Marakas, KK Sultan Agung, KK Babelan, KK Ujung Menteng, KK Taman Harapan Baru, KK Tarumajaya, KK Villa Mutiara Gading 3, KK Titian Kencana, KK Aralia, KK Kepatihan, KK HR Muhammad, KK Gunung Sari, KK G-Walk, KK Graha Penyileukan, KK Majalaya, KK Fatmawati 2, KK Radio Dalam, KK Pondok Indah, KK Gandaria, PP PN Jakarta Selatan, PP Universitas Bhayangkara, PP Pengadilan Negeri Medan, PP RSUD Gowa, PP RS Dr. Wahidin Sudirohusodo, PP Universitas Hasanuddin, PP BP2IP Barombong, PP RSU Bethesda, PP Pengadilan Negeri Jakarta Barat, PP Yayasan Marsudi Rini, PP Dispenda Kota Bekasi, PP RS Dirgahayu, PP RS Univ. Tanjung Pura, KCS Jakarta Harmoni, KCS Bandung, KCS Malang, KCS Solo, KCS Bekasi, KCS Jakarta Pasar Minggu, KCS Tegal, KCPS Kelapa Gading, KCPS Tanah Abang, KCPS Surapati Core, KCPS Kertajaya Indah, KCPS Probolinggo, KCPS Batu Aji, KCPS Ciputat, KCPS Warung Jambu, KCPS Kalimas Bekasi, KCPS Depok, KCPS Fatmawati, KCPS Sekolah Al Azhar, KKS Kopo, KKS Antapani, KKS Sidoarjo, KKS Pasar Besar, KKS Cibinong, KKS UMRI Pekanbaru, PPS Yayasan Dikantara, PPS RS Unisma, PPS Stecom RRI, PPS Ar-Rohman Putri, PPS Al Azhar Sentra Timur, dan PPS Jababeka Education Center

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan jo Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.12/MPP/Kep/1998 dinyatakan apabila perusahaan lalai tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pendaftaran perusahaan maka akan dikenakan sanksi kurungan selama 3 bulan atau denda setingginya Rp.3.000.000,00. Namun demikian, Perseroan tidak pernah memperoleh teguran maupun sanksi dari instansi yang berwenang sehubungan dengan pelaksanaan/pemenuhan izin tersebut.

HKGM & PARTNERS

Law Firm

13. Perseroan telah memenuhi kewajiban perizinan perpajakannya dengan telah dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak, berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-00043/WPJ.07/KP.0103/ 2003 tanggal 4 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah VII Jakarta Khusus – Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah.

Perseroan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak untuk kantor pusat dan kantor-kantor cabang Perseroan, dimana kewajiban perpajakan dari kantor cabang baik konvensional atau syariah Perseroan meliputi pula kewajiban perpajakan dari kantor cabang pembantu, kantor kas dan/atau payment point yang berada di bawah atau di domisili kantor cabang Perseroan tersebut.

14. Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan mengenai ketenagakerjaan seperti pemenuhan terhadap program asuransi/jaminan/sosial ketenagakerjaan, upah minimum, koperasi pegawai, dana pensiun, yayasan kesejahteraan dan serikat pekerja.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, Perseroan sedang melakukan proses perundingan dengan Serikat Pekerja Bank Tabungan Negara (SP-BTN) untuk membuat perjanjian kerja bersama yang baru, sehingga untuk saat ini perjanjian kerja bersama yang berlaku adalah Perjanjian Kerja Bersama tanggal 30 Maret 2012, dan hal tersebut tidak mengakibatkan Perseroan telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, masih terdapat beberapa kantor Perseroan yang sedang melakukan proses pembaruan atas pelaporan ketenagakerjaan dikarenakan pelaporan ketenagakerjaan untuk kantor-kantor tersebut telah wajib dilapor ulang kepada instansi yang berwenang. Adapun kantor-kantor Perseroan yang wajib melaporkan ulang pelaporan ketenagakerjaannya adalah KC Gresik, KC Palangkaraya, KC Bekasi, KC Manado, KC Karawaci, KC Ternate, KC Mataram, KC Cibubur, KC Tasikmalaya, KC Purwokerto, KC Kupang, KCS Makassar dan KCS Pekanbaru.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 Undang-Undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, apabila perusahaan tidak memenuhi ketentuan pelaporan ketenagakerjaan maka akan dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,00. Berdasarkan pelaksanaan uji tuntas, Perseroan tidak pernah memperoleh teguran maupun sanksi dari instansi yang berwenang sehubungan dengan pelaksanaan/pemenuhan kewajiban pelaporan tersebut.

15. Bahwa harta kekayaan Perseroan yang berupa barang tidak bergerak yang ada pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, setelah diteliti bukti pemilikannya dan penguasaannya berdasarkan dokumen Perseroan adalah dimiliki dan dikuasai oleh Perseroan serta tidak ada gugatan dari pihak lain terhadap harta kekayaan yang

HKGM & PARTNERS

Law Firm

dimiliki dan dikuasai oleh Perseroan tersebut, dan terhadap harta kekayaan tersebut tidak ada yang dijadikan jaminan atas hutang Perseroan kepada krediturnya.

16. Perseroan telah melindungi harta kekayaannya dengan penutupan asuransi terhadap resiko kebakaran, kehilangan dan/atau resiko lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi harta kekayaannya tersebut dengan nilai pertanggungan dan jangka waktu asuransi yang memadai.
17. Bahwa sesuai dengan hasil uji tuntas atas dokumen-dokumen perjanjian antara Perseroan dengan pihak ketiga yang material yang hasil pemeriksaannya termuat dalam LHUT adalah sah dan mengikat Perseroan dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan. Penawaran Umum Obligasi dan penandatanganan perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan penerbitan Obligasi tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian material dimana Perseroan berkedudukan sebagai pihak.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dari perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak ketiga yang dapat merugikan hak dari pemegang saham publik dan pemegang Obligasi (*negative covenants*).

18. Berdasarkan pelaksanaan uji tuntas yang telah kami lakukan, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, Perseroan sedang terlibat dalam 21 (dua puluh satu) perkara perdata dan 1 (satu) perkara hubungan industrial, yang mana tidak ada dari perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh Perseroan tersebut yang apabila diputus dengan mengalahkan Perseroan dapat memberi dampak material pada keadaan keuangan serta kelangsungan usaha Perseroan, serta tidak ada dari anggota direksi maupun dewan komisaris Perseroan yang sedang terlibat dalam suatu sengketa dan/atau perkara hukum.

Disamping itu, Perseroan tidak pula terlibat dalam suatu sengketa hukum/perselisihan lain yang terjadi di luar pengadilan dengan atau memperoleh teguran (somasi) dari pihak ketiga, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan.

19. Bahwa berdasarkan pelaksanaan uji tuntas yang telah kami lakukan, Perseroan tidak melakukan pelanggaran atas ketentuan Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) dan atau pelampauan BMPK sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
20. Bahwa pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai penyediaan modal minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang mewajibkan suatu bank untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut resiko.

HKGM & PARTNERS

Law Firm

Berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 rasio kecukupan modal Perseroan adalah sebesar 15.05%.

21. Berdasarkan pelaksanaan uji tuntas yang telah kami lakukan, pada tanggal 31 Maret 2015 tidak ada nilai agunan yang diambil alih (AYDA) oleh Perseroan baik untuk agunan berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang diberikan oleh para debitur kepada Perseroan.
22. Semua Perjanjian yang berkenaan dengan penerbitan Obligasi, yaitu sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN No.26, Tanggal 23 April 2015 yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN No.41, Tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN No.53, Tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
 - b. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 No.27, Tanggal 23 April 2015 yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 No.42, Tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 No.54, Tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
 - c. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 No.55, Tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
 - d. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 No.28 Tanggal 23 April 2015 yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 No.43, Tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 No.56, Tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
 - e. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No.29 tanggal 23 April 2015 yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Agen Pembayaran

HKGM & PARTNERS

Law Firm

- No.57, Tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
- f. Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No.SP-0022/PO/KSEI/0415 tanggal 23 April 2015 yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia juncto Perubahan I Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No.SP-0017/PI-PO/KSEI/0615, tanggal 23 Juni 2015, yang dibuat di bawah tangan antara PERSEROAN dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - g. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.SP-005/BEI.PNG/04-2015 tanggal 24 April 2015 yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan dan PT Bursa Efek Indonesia;
 - h. Surat No.601/PEF-Dir/IV/2015 tanggal 17 April 2015 yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia.
- telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, khususnya peraturan mengenai penawaran obligasi kepada masyarakat, serta tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan perjanjian-perjanjian yang telah ditanda tangani oleh Perseroan dengan pihak lain.
- 23. Tujuan penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi yang diperoleh Perseroan setelah dikurangi biaya-biaya emisi sebagai sumber pembiayaan kredit adalah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Obligasi ini telah mendapatkan peringkat *id.AA (double A)* dari PT Pemeringkat Efek Indonesia berdasarkan surat No.601/PEF-Dir/IV/2015 tanggal 17 April 2015.
 - 24. Sehubungan penerbitan dan penawaran umum Obligasi, Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.11/35/DPNP tanggal 31 Desember 2009 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan – Direktur Direktorat Pengawasan Bank 2 Departemen Pengawasan Bank 1, No.S.24/PB.312/2015 tanggal 16 April 2015 perihal Rencana Persetujuan Rencana Penerbitan Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II Tahap I Tahun 2015 Bank Saudara, yang berisikan disetujuinya rencana penerbitan obligasi PUB II Tahap I Tahun 2015 sebanyak-banyaknya Rp.3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah).
 - 25. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari.
 - 26. Perseroan memiliki hubungan terafiliasi dengan PT Danareksa Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi Obligasi dan penjamin emisi Obligasi dikarenakan adanya kepemilikan saham Negara Republik Indonesia baik pada Perseroan maupun pada PT Danareksa Sekuritas. Namun demikian, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia dan PT Trimegah Securities Tbk. selaku penjamin pelaksana emisi Obligasi dan penjamin

HKGM & PARTNERS

Law Firm

emisi Obligasi serta PT Bank Mega Tbk. selaku wali amanat, para profesi penunjang pasar modal dan PT Pemeringkat Efek Indonesia yang terlibat dalam penerbitan Obligasi dan Perseroan tidak pula telah memiliki hubungan kredit dengan PT Bank Mega Tbk. selaku wali amanat dalam penerbitan Obligasi.

27. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, tidak ada kewajiban-kewajiban yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian perwaliamentan dari penerbitan obligasi terdahulu yang tidak dipenuhi oleh Perseroan kepada wali amanat dan tidak ada kewajiban untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari wali amanat dan/atau pemegang obligasi terdahulu sehubungan dengan penerbitan Obligasi.
28. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
29. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum, tidak ada isi mengenai aspek hukum yang termuat dalam Prospektus yang bertentangan dengan hal-hal yang termuat dalam LHUT.

Adapun Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah menggantikan Pendapat Dari Segi Hukum Atas PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 No. Ref.: 064/HKGM-RL/Ext/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015, yang telah kami sampaikan kepada Kepala Eksekutif Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami buat secara bertanggung jawab dalam profesi kami sebagai konsultan hukum yang bebas dengan penuh kejujuran dan objektif serta tidak dipengaruhi atau terlepas dari kepentingan-kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

HKGM & PARTNERS



Ruli Fajar Hidayat W, SH
Partner

Tembusan:

- Yang terhormat Kepala Eksekutif Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
- Yang terhormat Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dan/atau Penjamin Emisi Obligasi berturut-turut yaitu PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Securities Tbk. serta Penjamin Emisi Obligasi PT Recapital Securities.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

www.btn.co.id
**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER
2014, 2013 DAN 2012
PT BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO) Tbk**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2014, 2013 AND 2012
PT BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO) Tbk**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama **Maryono**
Alamat Kantor PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130
Alamat Domisili Jl. Kartika Pinang SG 2-3 RT 014 RW 016
Kel. Pondok Pinang, Kec. Kuningan
Lama, Jakarta Selatan

Nomor Telepon 021 - 6346784
Jabatan Direktur Utama / President Director

Nama **Iman Nugroho Soeko**
Alamat Kantor PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130
Alamat Domisili Jl. Cidung II No. 10 Petegogan,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Nomor Telepon 021 - 6336789
Jabatan Direktur / Director

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
2. Laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned:

Name
Office Address
Residential Address

Telephone
Title

Name
Office Address

Residential Address

Telephone
Title

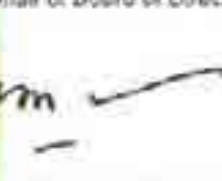
Declare that :

1. We are responsible for the preparation and the presentation of the financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
2. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information in the financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk has been disclosed in a complete and truthful manner;
b. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk's financial statements do not contain any incorrect material information or facts, nor do they omit any material information or facts;
4. We are responsible for PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk internal control system.

This is our declaration, which has been made truthfully.

Jakarta, 21 Mei 2015 / May 21, 2015

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of Board of Directors

Maryono
Direktur Utama / President Director

Iman Nugroho Soeko
Direktur / Director

The original report is issued here in its Indonesian language

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-TA53/P55/2015

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelas lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kekurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk memenuhi kewajiban etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. RPC-TA53/P55/2015

The Stockholders, the Boards of Commissioners and Directors
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("the Bank"), which comprise the statements of financial position as of December 31, 2014, 2013 and 2012, and the statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

The original report described herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditors' Report (continued)

Laporan No. RPC-7853/PSS/2015 (lanjutan)

Report: RPC-7853/PSS/2015 (continued)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Auditors' responsibility (continued)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Opinion

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk as of December 31, 2014, 2013 and 2012, and its financial performance and cash flows for the years then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The original report document herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditors' Report (continued)

Laporan No. RPC-7853/PSS/2015 (lanjutan)

Report, RPC-7853/PSS/2015 (continued)

Hal Lain

Other Matter

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. RPC-7272/PSS/2015 tanggal 23 Februari 2015 atas laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I tahun 2015, seperti yang telah dijelaskan dalam catatan 50 atas laporan keuangan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut di atas dengan beberapa perubahan dan tambahan presentasi dan pengungkapan pada laporan keuangan.

Previously we have issued independent auditors' report No. RPC-7272/PSS/2015 dated February 23, 2015 on the financial statement of the Bank as of December 31, 2014, 2013 and 2012 and for the years then ended, in connection with the Bank's plan to conduct a public offering of Bank BTN Shelf Registration Bonds II Phase I year 2015, as disclosed in Note 50 to the financial statements. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk reissues its financial statements mentioned above with certain changes in the presentation and disclosures of financial statements.

Purwanto, Suherman & Surja



Benyanto Suherman
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0685/Public Accountant Registration No. AP.0685
21 Mei 2015 / May 21, 2015

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0685/Public Accountant Registration No. AP.0685

21 Mei 2015 / May 21, 2015

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
ASET					ASSETS
KAS	2a,2d,4	920.482	924.451	694.941	CASH
GIRO PADA BANK INDONESIA	2a,2d,2f,5	9.371.509	9.858.758	7.297.835	CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA
GIRO PADA BANK LAIN	2a,2c,2d, 2e,2f,6,40	1.063.913	345.951	152.826	CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS
Pihak ketiga		31.051	56.572	10.917	Third parties
Pihak berelasi					Related parties
		1.094.964	402.523	163.743	
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.571)	(2.308)	(1.750)	Allowance for impairment losses
		1.093.393	400.215	161.993	
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN	2a,2c,2d, 2e,2g,7,40	1.496.455	4.834.318	11.267.346	PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS
Pihak ketiga		-	5.000	205.000	Third parties
Pihak berelasi					Related parties
		1.496.455	4.839.318	11.472.346	
Cadangan kerugian penurunan nilai		-	(50)	(6.050)	Allowance for impairment losses
		1.496.455	4.839.268	11.466.296	
EFEK-EFEK	2a,2c,2d, 2e,2h,8,40				SECURITIES
Pihak ketiga					Third parties
Nilai wajar melalui laba rugi		148.588	2.086.973	429.261	Fair value through profit or loss
Tersedia untuk dijual		4.782.433	1.846.575	253.279	Available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo		308.517	191.213	231.621	Held-to-maturity
		5.239.538	4.124.761	914.161	
Pihak berelasi					Related parties
Nilai wajar melalui laba rugi		-	9.660	-	Fair value through profit or loss
Tersedia untuk dijual		71.151	-	2.369	Available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo		135.683	76.019	106.035	Held-to-maturity
		206.834	85.679	108.404	
		5.446.372	4.210.440	1.022.565	
Cadangan kerugian penurunan nilai		(9.402)	(8.758)	(8.769)	Allowance for impairment losses
		5.436.970	4.201.682	1.013.796	

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
OBLIGASI PEMERINTAH	2c,2d,2e, 2h,9,40				GOVERNMENT BONDS
Nilai wajar melalui laba rugi		591.732	696.747	45.748	Fair value through profit and loss
Tersedia untuk dijual		5.994.262	5.990.887	5.772.688	Available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo		1.652.071	1.697.326	1.650.494	Held-to-maturity
		<u>8.238.065</u>	<u>8.384.960</u>	<u>7.468.930</u>	
KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH	2c,2d,2e,2i, 2j,10,40				LOANS AND SHARIA FINANCING/RECEIVABLES
Kredit yang diberikan					Loans
Pihak ketiga		106.138.003	92.090.448	75.277.840	Third parties
Pihak berelasi		133.274	295.860	132.865	Related parties
		<u>106.271.277</u>	<u>92.386.308</u>	<u>75.410.705</u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.365.412)	(1.007.461)	(788.913)	Allowance for impairment losses
		<u>104.905.865</u>	<u>91.378.847</u>	<u>74.621.792</u>	
Pembiayaan/piutang syariah					Sharia financing/receivables
Pihak ketiga		9.643.485	8.080.028	5.998.588	Third parties
Pihak berelasi		1.039	1.055	1.470	Related parties
		<u>9.644.524</u>	<u>8.081.083</u>	<u>6.000.058</u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai		(211.163)	(129.716)	(191.801)	Allowance for impairment losses
		<u>9.433.361</u>	<u>7.951.367</u>	<u>5.808.257</u>	
		<u>114.339.226</u>	<u>99.330.214</u>	<u>80.430.049</u>	
ASET TETAP	2k,2l,11				PREMISES AND EQUIPMENT
Biaya perolehan		3.000.882	2.833.751	2.626.540	Cost
Akumulasi penyusutan		(1.512.499)	(1.311.027)	(1.043.728)	Accumulated depreciation
		<u>1.488.383</u>	<u>1.522.724</u>	<u>1.582.812</u>	
BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA	2d,12	1.183.489	923.688	871.985	INTEREST RECEIVABLE
ASET LAIN-LAIN	2d,2l,2m,13	1.007.989	783.770	759.956	OTHER ASSETS
TOTAL ASET		<u>144.575.961</u>	<u>131.169.730</u>	<u>111.748.593</u>	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS SEGERA	2d,2n,14	1.835.807	1.284.306	1.201.499	LIABILITIES DUE IMMEDIATELY
SIMPANAN DARI NASABAH	2c,2d,2o,40				DEPOSITS FROM CUSTOMERS
Giro	15				Demand deposits
Pihak ketiga		6.517.862	5.909.310	5.070.079	Third parties
Pihak berelasi		15.483.338	12.051.655	7.440.454	Related parties
		22.001.200	17.960.965	12.510.533	
Giro Wadiah	15				Wadiah demand deposits
Pihak ketiga		472.927	441.442	638.709	Third parties
Pihak berelasi		948.491	713.789	121.985	Related parties
		1.421.418	1.155.231	760.694	
		23.422.618	19.116.196	13.271.227	
Tabungan	16				Savings deposits
Pihak ketiga		25.162.761	23.320.833	20.815.891	Third parties
Pihak berelasi		67.975	62.614	63.532	Related parties
		25.230.736	23.383.447	20.879.423	
Tabungan Wadiah dan Mudharabah	16				Wadiah and Mudharabah savings deposits
Pihak ketiga		934.190	849.167	658.618	Third parties
Pihak berelasi		2.988	5.279	2.384	Related parties
		937.178	854.446	661.002	
		26.167.914	24.237.893	21.540.425	
Deposito Berjangka	17				Time deposits
Pihak ketiga		19.405.284	17.238.042	14.612.144	Third parties
Pihak berelasi		31.086.000	31.032.591	26.909.431	Related parties
		50.491.284	48.270.633	41.521.575	
Deposito Berjangka Mudharabah	17				Mudharabah Time Deposits
Pihak Ketiga		2.690.200	3.377.913	2.746.239	Third parties
Pihak berelasi		3.698.661	1.204.987	1.588.517	Related parties
		6.388.861	4.582.900	4.334.756	
		56.880.145	52.853.533	45.856.331	
Total simpanan dari nasabah		106.470.677	96.207.622	80.667.983	Total deposits from customers

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
SIMPANAN DARI BANK LAIN	2c,2d,2p, 18,40				DEPOSITS FROM OTHER BANKS
Pihak ketiga		1.175.970	269.514	668.965	Third parties
Pihak berelasi		3.299	5.743	37.738	Related parties
		<u>1.179.269</u>	<u>275.257</u>	<u>706.703</u>	
EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI	2c,2d,2q, 8,9,19,40				SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENTS
Pihak ketiga		3.423.234	2.652.730	2.335.000	Third parties
Pihak berelasi		394.369	-	-	Related parties
		<u>3.817.603</u>	<u>2.652.730</u>	<u>2.335.000</u>	
SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN	1c,2d,2r, 20	8.519.884	8.836.711	7.136.776	SECURITIES ISSUED
PINJAMAN YANG DITERIMA	2c,2d,2s, 21,40				FUND BORROWINGS
Pihak ketiga		2.919.183	2.953.619	3.165.614	Third parties
Pihak berelasi		4.079.030	4.119.413	3.571.646	Related parties
		<u>6.998.213</u>	<u>7.073.032</u>	<u>6.737.260</u>	
BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	2d,22	308.996	241.370	193.280	INTEREST PAYABLE
LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN - Neto	2aa,35	152.422	152.777	45.009	DEFERRED TAX LIABILITIES - Net
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	2af,23	7.198	6.469	4.403	ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN	2d,2y,2ag,24	3.079.486	2.882.703	2.441.809	EMPLOYEE BENEFITS AND OTHER LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS		<u>132.369.555</u>	<u>119.612.977</u>	<u>101.469.722</u>	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
EKUITAS					EQUITY
Modal saham - nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012					Capital stock - Rp500 par value per share (full amount) as of December 31, 2014, 2013 and 2012, respectively
Modal dasar - 20.478.432.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 20.478.431.999 lembar saham seri B) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012					Authorized capital - 20,478,432,000 shares (full amount) (consisting of 1 share of Series A Dwiwarna and 20,478,431,999 shares of series B) as of, December 31, 2014, 2013 and 2012, respectively
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 10.567.696.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 10.567.695.999 lembar Saham seri B) pada tanggal 31 Desember 2014 dan 10.564.853.500 Saham (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 10.564.853.499 lembar saham seri B) pada tanggal 31 Desember 2013 dan 10.356.440.500 Saham (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 10.356.440.499 lembar saham seri B) pada tanggal 31 Desember 2012					Issued and fully paid capital- 10,567,696,000 shares (full amount) (consisting of 1 share of series A Dwiwarna and 10,567,695,999 shares of series B) as of December 31, 2014 and 10,564,853,500 shares (consisting of 1 share of series A Dwiwarna and 10,564,853,499 shares of series B) as of December 31, 2013 and 10,356,440,500 shares (consisting of 1 share of series A Dwiwarna and 10,356,440,499 shares of series B) as of December 31, 2012
Tambahan modal disetor	2t,25a	5.283.848	5.282.427	5.178.220	Additional paid-in capital
Opsi Saham	25b	2.028.136	2.025.764	1.793.503	Stock Option
Keuntungan (kerugian) neto yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual, setelah pajak tangguhan	26	9.483	10.600	103.054	
Saldo laba*)	2h,8,9 2b,2u	(90.013)	(90.046)	29.058	Net unrealized gain (loss) on available-for-sale securities and Government bonds, net of deferred tax
Telah ditentukan penggunaannya		3.859.360	2.765.847	1.811.074	Retained earnings *)
Belum ditentukan penggunaannya		1.115.592	1.562.161	1.363.962	Appropriated Unappropriated
TOTAL EKUITAS		12.206.406	11.556.753	10.278.871	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		144.575.961	131.169.730	111.748.593	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

*) Accumulated losses amounted to Rp14,226,290 had been eliminated as a result of quasi-reorganization as of May 31, 2007.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2014, 2013 and 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

		Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31			
	Catatan/ Notes	2014	2013	2012	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL					INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil					Interest Income and Income from Profit Sharing
Bunga	2v,27	12.394.564	10.392.786	8.481.318	Interest
Bagi hasil secara syariah	2x	412.764	390.091	337.261	Income from sharia
Total Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil		12.807.328	10.782.877	8.818.579	Total Interest Income and Income from Profit Sharing
Beban Bunga dan Bonus					Interest and Bonus Expenses
Bunga	2v,28	(7.295.733)	(5.115.187)	(4.080.603)	Interest
Beban pendanaan lainnya		(36.685)	(5.656)	(5.159)	Other financing expenses
Bonus	2x	(10.329)	(8.711)	(5.998)	Bonus
Total Beban Bunga dan Bonus		(7.342.747)	(5.129.554)	(4.091.760)	Total Interest and Bonus Expenses
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto		5.464.581	5.653.323	4.726.819	Interest Income and Income from Profit Sharing - Net
Pendapatan Operasional Lainnya					Other Operating Income
Pungutan administrasi dan denda atas simpanan dan kredit yang diberikan		468.951	392.856	355.287	Administration fees and penalties on deposits and loans
Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto	2h,8	61.696	9.061	8.288	Gain on sale of securities - net
Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah - neto	2h,9	47.406	22.528	8.551	Gain on sale of government bonds - net
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto	2h,8	999	12.063	8.620	Unrealized gain on changes in fair value of securities - net
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	2h,9	5.571	-	501	Unrealized gain on changes in fair value of Government Bonds - net
Pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapusbukukan		187.578	191.429	106.570	Income from recovery of loans written-off
Lain-lain	29	122.619	136.046	83.677	Others
Total Pendapatan Operasional Lainnya		894.820	763.983	571.494	Total Other Operating Income
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	2e,2l,30	(771.166)	(430.289)	(212.624)	Provision expense for Impairment Losses on Financial and Non-financial Assets
Beban estimasi penyisihan penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	2l,2af,23	(729)	(2.066)	(1.159)	Provision for impairment losses on commitments and contingencies

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN LABA RUGI
KOMPREHENSIF (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE
INCOME (continued)
For the Years Ended
December 31, 2014, 2013 and 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

		Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31			
	Catatan/ Notes	2014	2013	2012	
Beban Operasional Lainnya					Other Operating Expenses
Umum dan administrasi	31	(2.122.830)	(1.784.062)	(1.462.757)	General and administrative
Gaji dan tunjangan karyawan	2y,32,37	(1.595.409)	(1.613.152)	(1.486.938)	Salaries and employee benefits
Premi program penjaminan Pemerintah	39	(203.451)	(175.419)	(134.876)	Premium on Government's guarantee program
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	2h,9	-	(138.689)	-	Unrealized loss on changes in fair value of Government Bonds- net
Lain-lain	33	(119.604)	(137.720)	(128.990)	Others
Total Beban Operasional Lainnya		(4.041.294)	(3.849.042)	(3.213.561)	Total Other Operating Expenses
LABA OPERASIONAL		1.546.212	2.135.909	1.870.969	INCOME FROM OPERATIONS
PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL - NETO	34	1.960	4.862	(7.767)	NON-OPERATING INCOME - NET
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		1.548.172	2.140.771	1.863.202	INCOME BEFORE TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK	2aa,35	(432.580)	(578.610)	(499.240)	TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN		1.115.592	1.562.161	1.363.962	INCOME FOR THE YEAR
Pendapatan Komprehensif Lain:					Other Comprehensive Income
Aset keuangan tersedia untuk dijual	2h,8,9				Available-for-sale securities
Kerugian tahun berjalan		(3.391)	(155.699)	(9.520)	Loss during the year
Jumlah yang ditransfer ke laba rugi		2.256	(3.430)	1.045	Amount transfer to income statement
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya		1.168	40.025	2.352	Income tax relating to components of other comprehensive income
Total pendapatan Komprehensif lain		33	(119.104)	(6.123)	Total Other Comprehensive Income
Total laba komprehensif tahun berjalan		1.115.625	1.443.057	1.357.839	Total Comprehensive Income for the year
LABA PER SAHAM					EARNINGS PER SHARE
Dasar (nilai penuh)	2ac,26,45	106	148	148	Basic (full amount)
Dilusan (nilai penuh)		106	148	147	Diluted (full amount)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)

For more information on the book, visit www.mhhe.com/9780130352373.

5. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK

© 2006 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 260: 101–107

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 497–507

1. *Das laporan keuangan terdapat beberapa bagian yang*

paying roles to the financial statements form an integral part of

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2014, 2013 and 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

		Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31			
	Catatan/ Notes	2014	2013	2012	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga	27	12.143.344	10.398.833	8.330.255	Interest received
Penerimaan bagi hasil	27	405.596	396.796	326.635	Profit sharing received
Penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan	10	202.373	193.606	107.508	Recoveries from loan debts written-off
Pembayaran bunga, provisi dan komisi	28	(7.258.999)	(5.070.403)	(4.063.720)	Interest, provision and commissions paid
Pembayaran bonus	28	(10.329)	(8.711)	(5.999)	Bonus paid
Pembayaran pajak penghasilan badan	35	(358.876)	(433.569)	(437.556)	Corporate income tax paid
Beban operasional lainnya - neto		(3.238.341)	(3.180.510)	(2.416.132)	Other operating expenses - net
Pendapatan (beban) bukan operasional lainnya - neto		1.960	4.862	(7.767)	Other non-operating Income (expense) - net
Penerimaan kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi		1.886.728	2.300.904	1.833.224	Cash receipts before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:					Changes in operating assets and liabilities:
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi:					Decrease (increase) in operating assets:
Penempatan pada bank lain	7	-	148.041	(127.402)	Placements with other banks
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	8	9.660	419.601	(311.968)	Fair value through profit or loss securities
Obligasi pemerintah untuk nilai wajar melalui laporan laba rugi	9	105.015	(650.999)	(45.247)	Fair value through profit or loss government bonds
Pembiayaan/piutang syariah	10	(1.600.125)	(2.142.427)	(1.803.699)	Sharia/financing receivables
Kredit yang diberikan	10	(14.199.296)	(17.195.657)	(16.214.143)	Loans
Aset lain-lain	13	(217.784)	25.510	(93.127)	Other assets
Kenaikan (penurunan) dalam Liabilitas operasi:					Increase (decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera	14	477.250	85.654	235.420	Current liabilities
Simpanan dari nasabah Giro	15	4.040.235	5.450.432	(204.929)	Deposits Demand deposits
Giro Wadiah	15	266.187	394.537	326.569	Wadiah demand deposits
Tabungan	16	1.847.289	2.504.024	6.468.869	Savings deposits
Tabungan Wadiah dan Mudharabah	16	82.732	193.444	255.643	Wadiah and Mudharabah savings deposits
Deposito berjangka	17	2.220.651	6.749.058	10.494.175	Time deposits
Deposito berjangka Mudharabah	17	1.805.961	248.144	1.357.641	Mudharabah time deposits
Simpanan dari bank lain	18	904.012	(431.446)	(86.267)	Deposits from other banks
Liabilitas lain-lain	24	318.720	467.291	106.807	Other liabilities
Kas Neto (Digunakan untuk Diperoleh dari Aktivitas Operasi)		(2.052.765)	(1.433.889)	2.191.566	Net Cash (Used in) Provided by Operating Activities

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended
December 31, 2014, 2013 and 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

		Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31			
	Catatan/ Notes	2014	2013	2012	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan saat jatuh tempo atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo	8	22.700	113.403	1.069.609	Receipt at maturity of securities classified as held-to-maturity
Pembelian efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo	8	(199.672)	(42.995)	(880.267)	Purchase of held-to-maturity securities
Pembelian aset tetap	11	(191.400)	(219.359)	(352.262)	Acquisitions of premises and equipment
Kenaikan efek-efek tersedia untuk dijual	8	(3.003.080)	(1.589.490)	(250.732)	Increase available-for-sale securities
Kenaikan obligasi pemerintah tersedia untuk dijual	9	(7.271)	(338.740)	(95.896)	Increase in available for-sale government bonds
Jatuh tempo obligasi pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo	9	50.000	223.601	120.000	Maturity of held-to-maturity government bonds
Pembelian obligasi pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo	9	-	(267.243)	(340.748)	Purchase of held-to-maturity government bonds
Kas Neto digunakan untuk Aktivitas Investasi		(3.328.723)	(2.120.823)	(730.296)	Net Cash used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari surat-surat berharga yang diterbitkan	20	577.381	1.997.583	1.996.047	Proceeds from issuance of securities
Pembayaran atas jatuh tempo surat-surat berharga yang diterbitkan	20	(900.000)	(300.000)	(300.000)	Payment of matured securities issued
Penerimaan dari efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	19	5.146.854	2.770.600	1.978.118	Proceeds from securities sold under repurchase agreements
Pembayaran atas jatuh tempo efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	19	(3.981.981)	(2.452.870)	(4.093.612)	Payments of matured securities sold under repurchase agreements
Penerbitan saham	2ad,25	-	-	1.868.378	Stock issuance
Biaya emisi penerbitan saham		-	-	(59.154)	Stock issuance cost
Eksekusi opsi saham karyawan		2.676	244.014	6.905	Employee stock option exercise
Pembayaran dividen	25c	(468.648)	(409.189)	(262.885)	Payments of dividends
Penerimaan pinjaman yang diterima	21	1.207.882	679.984	1.423.419	Proceeds from fund borrowings
Pembayaran pinjaman yang diterima	21	(1.282.701)	(344.212)	(381.465)	Payment of fund borrowings
Kas Neto diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		301.463	2.185.910	2.175.751	Net Cash Provided by Financing Activities
PENURUNAN (KENAIKAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		(5.080.025)	(1.368.802)	3.637.021	NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		18.112.023	19.480.825	15.843.804	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		13.031.998	18.112.023	19.480.825	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENTS OF CASH FLOWS (continued)
For the Years Ended
December 31, 2014, 2013 and 2012
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

		Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31			
	Catatan/ Notes	2014	2013	2012	
Rincian kas dan setara kas akhir tahun adalah sebagai berikut:					The details of cash and cash equivalents at end of year are as follows:
Kas	2a,4	920.482	924.451	694.941	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2f,5	9.371.509	9.858.758	7.297.835	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	2f,6	1.094.964	402.523	163.743	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	2g,7	1.496.455	4.839.318	11.324.306	Placements with Bank Indonesia and other banks - maturing within three months or less since the acquisition date
Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	2h,8	148.588	2.086.973	-	Certificates of Bank Indonesia and Deposits Certificates of Bank Indonesia maturing within three months since acquisition date
Total		13.031.998	18.112.023	19.480.825	Total

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Bank

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank") didirikan sebagai bank milik negara, semula dengan nama "Bank Tabungan Pos" berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1963, nama Bank Tabungan Pos diubah menjadi "Bank Tabungan Negara". Pada tanggal 29 April 1989, Bank mulai beroperasi sebagai bank umum milik negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992, status Bank diubah menjadi perseroan terbatas milik negara (Persero). Akta pendirian Bank sebagai Persero dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H., No. 136 tanggal 31 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-6587.HT.01.01. TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 6A.

Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994, Bank memperoleh status sebagai bank devisa.

Bank telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan umum perbankan berdasarkan prinsip syariah melalui surat No. 6/1350/DPbS tanggal 15 Desember 2004.

Bank mulai melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 14 Februari 2005 dengan mulai beroperasinya cabang syariah pertama di Jakarta - Harmoni.

Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) menjadi Perseroan Terbuka telah diaktakan dengan akta notaris No. 7 tanggal 12 Oktober 2009 dari notaris Fathiah Helmi, S.H. Perubahan anggaran dasar tersebut mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-49309.AH.01.02. tahun 2009.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. GENERAL

a. Bank's establishment

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("the Bank") was originally established as a state-owned bank under the name "Bank Tabungan Pos" based on Martial Law No. 9 of 1950 dated February 9, 1950. Subsequently, the name of the Bank was changed to "Bank Tabungan Negara" based on Government Regulation Amendment of Law No. 4 of 1963. The Bank started operating as a state-owned commercial bank on April 29, 1989.

Based on Government Regulation No. 24 of 1992, the status of the Bank was changed to a state-owned limited liability corporation (Persero). The Bank's deed of establishment as a limited liability corporation was documented under deed No. 136 dated July 31, 1992 of Notary Muhani Salim, S.H. and was approved by the Ministry of Justice in its Decision Letter No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 dated August 12, 1992 and was published in Supplement No. 6A of State Gazette No. 73 dated September 11, 1992.

Based on the Decision Letter No. 27/55/KEP/DIR dated September 23, 1994 of the directors of Bank Indonesia, the Bank obtained the status of a foreign exchange bank.

The Bank obtained approval from Bank Indonesia to conduct commercial banking activities based on sharia principles through letter No. 6/1350/DPbS dated December 15, 2004.

The Bank started its activities based on sharia principles on February 14, 2005 with the operation of its first sharia branch in Jakarta - Harmoni.

The decision of the Extraordinary General Stockholders' Meeting to amend all of the Bank's Articles of Association to become a public company was notarized under notarial deed No. 7 dated October 12, 2009 of Fathiah Helmi, S.H. The amendment was approved by the Ministry of Laws and Human Rights in its letter No. AHU-49309.AH.01.02. of 2009.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank (lanjutan)

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir didokumentasikan dalam akta notaris No. 16 tanggal 8 Oktober 2014 dari notaris Fathiah Helmi, S.H. mengenai pelaksanaan Program Opsi Kepemilikan Saham untuk Manajemen dan Karyawan (MESOP) berdasarkan jumlah lembar opsi saham yang dieksekusi. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-07159.40.21.2014 tanggal 8 Oktober 2014.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan umum perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk melakukan kegiatan Bank berdasarkan prinsip syariah.

Bank berdomisili di Jakarta dan kantor pusat Bank berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat.

Pada tanggal 31 Desember 2014, Bank memiliki 87 kantor cabang (termasuk 22 kantor cabang syariah), 247 kantor cabang pembantu (termasuk 21 kantor cabang pembantu syariah), 486 kantor kas (termasuk 7 Kantor Kas Syariah), dan 2.948 SOPP (System on-line Payment Point/Kantor Pos on-line) (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2013, Bank memiliki 87 kantor cabang (termasuk 22 kantor cabang syariah), 247 kantor cabang pembantu (termasuk 21 kantor cabang pembantu syariah), 486 kantor kas (termasuk 7 Kantor Kas Syariah), dan 2.922 SOPP (System on-line Payment Point/Kantor Pos on-line) (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2012, Bank memiliki 87 kantor cabang (termasuk 22 kantor cabang syariah), 247 cabang pembantu (termasuk 21 kantor cabang pembantu syariah), 422 kantor kas (termasuk 7 Kantor Kas Syariah), dan 2.922 SOPP (System on-line Payment Point/Kantor Pos on-line) (tidak diaudit).

Bank tidak memiliki entitas induk dan entitas induk terakhir.

1. GENERAL (continued)

a. Bank's establishment (continued)

The Articles of Association of the Bank has been amended several times. The last amendment was documented under notarial deed No. 16 dated October 8, 2014 of Notary Fathiah Helmi, S.H. regarding Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) based on the total number of exercised stock options. This amendment was approved by the Ministry of Laws and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-07159.40.21.2014 dated October 8, 2014.

According to Article 3 of the Bank's Articles of Association, the scope of the Bank's activities is to conduct commercial banking activities in accordance with the prevailing laws and regulations, including the Bank's activities based on sharia principles.

The Bank is domiciled in Jakarta and its head office is located at Jalan Gajah Mada No. 1, Central Jakarta.

As of December 31, 2014, the Bank has 87 branch offices (including 22 sharia branch offices), 247 sub-branch offices (including 21 sharia sub-branch offices), 486 cash offices (including 7 sharia cash offices), and 2,948 SOPPs (System on-line Payment Point/on-line Post office) (unaudited).

As of December 31, 2013, the Bank has 87 branch offices (including 22 sharia branch offices), 247 sub-branch offices (including 21 sharia sub-branch office), 486 cash offices (including 7 sharia cash offices), and 2,922 SOPPs (System on-line Payment Point/on-line Post office) (unaudited).

As of December 31, 2012, the Bank has 87 branch offices (including 22 sharia branch offices), 247 sub-branch offices (including 21 sharia sub-branch office), 422 cash offices (including 7 sharia cash offices), and 2,922 SOPPs (System on-line Payment Point/on-line Post office) (unaudited).

The Bank does not has parent nor ultimate parent.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Rekapitalisasi

Pada tanggal 28 Mei 1999, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang penambahan penyertaan Pemerintah pada Bank dalam rangka Program Rekapitalisasi yang dijalankan oleh Pemerintah dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp11.200.000. Pada tanggal 21 Agustus 2000, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2000 tentang penambahan modal Pemerintah pada Bank dalam rangka Program Rekapitalisasi yang dijalankan oleh Pemerintah dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp2.805.000, sehingga tambahan penyertaan Pemerintah keseluruhan menjadi sebesar Rp14.005.000. Penambahan modal tersebut dilakukan melalui penerbitan obligasi rekapitalisasi Pemerintah untuk Bank sebesar Rp9.803.500 dan Rp4.201.500 masing-masing pada tanggal 25 Juli 2000 dan 31 Oktober 2000.

Pada tanggal 28 Februari 2001, Direksi Bank dan Menteri Keuangan menandatangani Kontrak Manajemen yang berisikan antara lain bahwa jumlah kebutuhan rekapitalisasi akhir Bank adalah sebesar Rp13.843.540 dan kelebihan obligasi rekapitalisasi sebesar Rp161.460 harus dikembalikan kepada Pemerintah. Pada tanggal 5 November 2001, kelebihan obligasi rekapitalisasi tersebut dikembalikan kepada Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari Kontrak Manajemen tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.06/2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang penetapan nilai akhir kebutuhan rekapitalisasi Bank sebesar Rp13.843.540 dan pelaksanaan hak-hak pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara dalam rangka program rekapitalisasi bank umum dengan mengkonversi menjadi 13.843.540 lembar saham yang diterbitkan oleh Bank dengan nominal Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per lembar. Peraturan ini berdaya laku surut sejak tanggal 31 Mei 2007.

1. GENERAL (continued)

b. Recapitalization

On May 28, 1999, the Government issued Government Regulation No. 52 of 1999 regarding the increase in the Government's capital participation in the Bank within the framework of the Government's Recapitalization Program for a maximum amount of Rp11,200,000. On August 21, 2000, the Government issued Government Regulation No. 68 of 2000 regarding the increase in the Government's capital participation in the Bank within the framework of the Government's Recapitalization Program for a maximum amount of Rp2,805,000 so that the additional Government capital participation would become Rp14,005,000. The increase in the Government participation was settled through the issuance to the Bank of the government's recapitalization bonds amounting to Rp9,803,500 and Rp4,201,500 on July 25, 2000 and October 31, 2000, respectively.

On February 28, 2001, the Bank's directors and the Ministry of Finance entered into a Management Contract which includes, among others, the total final recapitalization requirement of the Bank of Rp13,843,540 and the excess recapitalization bonds of Rp161,460 should be returned to the Government. On November 5, 2001, the Bank returned such excess recapitalization bonds to the government.

As a result of the Management Contract, the Ministry of Finance issued Regulation No. 40/PMK.06/2008 dated February 29, 2008 regarding the determination of the final amount of the Government's required capital contribution to the Bank amounting to Rp13,843,540 and implementation of the Government's rights as a result of the additional contributed capital by the Republic of Indonesia to the capital of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, as a limited liability company, in relation to the commercial banks' recapitalization program through conversion of additional capital to 13,843,540 shares of stock, which were issued by the Bank with a par value (full Rupiah) of Rp1,000,000 per share. This regulation was applied retroactively since May 31, 2007.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum obligasi Bank

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 19 (sembilan belas) kali penerbitan dan 1 kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Obligasi/ Name of Bonds	Jumlah Nominal/ Nominal Amount	Jangka Waktu/ Term	Tanggal dan Surat efektif/ Effective date and letter	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Tingkat Bunga/ Interest
Obligasi BTN I/ BTN Bonds I	50.000	5 tahun/years	29 Juni/ June 29, 1989	25 Juli/ July 25, 1994 *)	18,75% tetap/ fixed
Obligasi BTN II/ BTN Bonds II	50.000	5 tahun/years	21 April/ April 21, 1990	1 Juni/ June 1, 1995 *)	16,25% tetap/ fixed
Obligasi BTN III/ BTN Bonds III	50.000	5 tahun/years	25 November/ November 25, 1991	11 November/ November 11, 1996 *)	20,00% tetap/ fixed
Obligasi BTN IV/ BTN Bonds IV	100.000	5 tahun/years	31 Desember/ December 31, 1992	23 Januari/ January 23, 1996 *)	17,00% tetap/ fixed
Obligasi BTN V/ BTN Bonds V	150.000	5 tahun/years	29 Januari/ January 29, 1993	31 Juli/ July 31, 1998 *)	15,25% tetap untuk tahun pertama dan kedua, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ 15.25% fixed for first and second years, floating for remaining years until maturity
Obligasi BTN VI/ BTN Bonds VI	350.000	5 tahun/years	8 Desember/ December 8, 1995	21 Desember/ December 21, 2000 *)	17,25% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ 17.25% fixed for first year, floating for remaining years until maturity
Obligasi BTN VII/ BTN Bonds VII	200.000	5 tahun/years	27 Juni 1996/ June 27, 1996	22 Juli/ July 22, 2001 *)	17,125% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ 17.125% fixed for first year, floating for remaining years until maturity
Obligasi BTN VIII/ BTN Bonds VIII	400.000	5 tahun/years	27 Juni 1997/ June 27, 1997	18 Juli/ July 18, 2002 *)	14,15% tetap/ fixed
Obligasi BTN IX/ BTN Bonds IX	750.000	5 tahun/years	18 September/ September 18, 2003 No. S-2289/PM/2003	2 Oktober/ October 2, 2008 *)	12,50% tetap/ fixed
Obligasi BTN X/ BTN Bonds X	750.000	5 tahun/years	10 Mei/ May 10, 2004 No. S-1255/PM/2004	25 Mei/ May 25, 2009 *)	12,20% tetap/ fixed
Obligasi BTN XI/ BTN Bonds XI	750.000	5 tahun/years	28 Juni/ June 28, 2005 No. S-1696/PM/2005	6 Juli/ July 6, 2010 *)	12,00% tetap/ fixed
Obligasi BTN XII/ BTN Bonds XII	1.000.000	10 tahun/years	8 September/ September 8, 2006 No. S-1844/BL/2006	19 September/ September 19, 2016	12,75% tetap/ fixed
Obligasi BTN XIII A/ BTN Bonds XIII A	300.000	3 tahun/years	19 Mei/ May 19, 2009 No. S-4019/BL/2009	29 Mei/ May 29, 2012 *)	11,75% tetap/ fixed
Obligasi BTN XIII B/ BTN Bonds XIII B	300.000	4 tahun/years	19 Mei/ May 19, 2009 No. S-4019/BL/2009	29 Mei/ May 29, 2013 *)	12,00% tetap/ fixed
Obligasi BTN XIII C/ BTN Bonds XIII C	900.000	5 tahun/years	19 Mei/ May 19, 2009 No. S-4019/BL/2009	29 Mei/ May 29, 2014 *)	12,25% tetap/ fixed
Obligasi BTN XIV/ BTN Bonds XIV	1.650.000	10 tahun/years	11 Juni/ June 11, 2010 No. S-4916/BL/2010	11 Juni/ June 11, 2020	10,25% tetap/ fixed
Obligasi BTN XV/ BTN Bonds XV	1.300.000	10 tahun/years	26 Juni/ June 26, 2011 No. S-6928/BL/2011	28 Juni/ June 28, 2021	9,50% tetap/ fixed

*) Bank telah melakukan pelunasan obligasi yang diterbitkan pada tanggal jatuh temponya.

1. GENERAL (continued)

c. Public offering of Bank's bonds

The Bank issued 19 (nineteen) series of bonds and 1 series of subordinated bond instruments from July 25, 1989 to December 31, 2014, with the details as follows:

*) The Bank has made the repayment of bonds issued on maturity date.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum obligasi Bank (lanjutan)

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 19 (sembilan belas) kali penerbitan dan 1 kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

Nama Obligasi/ Name of Bonds	Jumlah Nominal/ Nominal Amount	Jangka Waktu/ Term	Tanggal efektif/ Effective date	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Tingkat Bunga/ Interest
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I BTN/ Shelf Registration Bonds I Phase I BTN	2.000.000	10 tahun/years	5 Juni/ June 5, 2012 No. S-6349/BL/2012	5 Juni/ June 5, 2022	7,90% tetap/ fixed
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II BTN/ Shelf Registration Bonds I Phase II BTN	2.000.000	10 tahun/years	5 Juni/ June 5, 2012 No. S-6349/BL/2012	27 Maret/ March 27, 2023	7,90% tetap/ fixed
Obligasi Subordinasi BTN I/ Subordinated Bonds BTN I	250.000	10 tahun/years	10 Mei/ May 10, 2004 No. S-1255/PM/2004	25 Mei/ May 25, 2014 **)	12,60% tetap untuk tahun pertama sampai tahun kelima, 22,60% tetap untuk tahun ke enam sampai tahun kesepuluh jika Bank tidak melakukan opsi beli pada tahun kelima sejak tanggal penerbitan/ 12.60% fixed for first year until fifth year, 22.60% fixed for sixth year until tenth year if the Bank does not exercise its option to buyback on the fifth year since the issuance date

*) Bank telah melakukan pelunasan obligasi yang diterbitkan pada tanggal jatuh temponya.

**) Bank telah melakukan opsi beli kembali pada 25 Mei 2009

*) The Bank has made the repayment of bonds issued on maturity date.

**) The Bank has exercised the call options on May 25, 2009

d. Penawaran Umum Saham Perdana (IPO)

Bank telah memperoleh izin untuk melakukan Penawaran Umum sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. PW.01/3104/DPR RI/V/2009 tanggal 29 Mei 2009, serta penetapan dari Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2009 dan diundangkan dalam Lembaran Negara No. 167 tanggal 16 November 2009 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero).

1. GENERAL (continued)

c. Public offering of Bank's bonds (continued)

The Bank issued 19 (nineteen) series of bonds and series of subordinated bond instruments from July 25, 1989 to December 31, 2014, with the details as follows (continued):

d. Initial Public Offering (IPO)

The Bank obtained a permit to undertake a Public Offering based on the approval of the House of Representatives of the Republic of Indonesia in its Chairman letter No. PW.01/3104/DPR RI/V/2009 dated May 29, 2009 and was enacted by the Government as stipulated by the Republic of Indonesia Government Regulation No. 66 of 2009 and circulated in State Gazette No. 167 dated November 16, 2009 regarding the amendment of the stock ownership structure of the State through Initial Public Offering of the shares of PT Bank Tabungan Negara (Persero).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) (lanjutan)

Berkaitan dengan penawaran umum saham perdana, Bank telah mengimplementasikan program kepemilikan saham oleh Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation/MESA*). Program MESA diberikan maksimal 9,62% dari saham baru yang diterbitkan kepada karyawan yang tercatat pada tanggal 30 September 2009. Program MESA tersebut telah efektif pada tanggal 17 September 2009 dan seluruh karyawan yang memiliki kualifikasi telah mengambil program tersebut dengan jumlah lembar saham biasa atas nama Seri B sebanyak 226.928.500 lembar (nilai nominal Rp500 per lembar saham) dengan harga beli Rp640 per lembar saham (setelah diskon 20% dari harga penawaran perdana sebesar Rp800 per lembar saham) dengan masa *lockup* selama enam bulan.

Diskon harga saham untuk program MESA menjadi beban Bank di tahun 2009, yaitu sebesar 20% atau Rp41.353, yang termasuk beban pajak penghasilan.

e. Penerapan kuasi reorganisasi

Kondisi ekonomi yang buruk yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, yang disebabkan terutama oleh melemahnya kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat dan tingkat suku bunga yang tidak stabil, sangat langkanya likuiditas serta menurunnya tingkat kepercayaan investor, telah memberikan dampak yang buruk bagi industri perbankan di Indonesia. Kondisi tersebut juga berdampak pada para debitur Bank dalam memenuhi kewajibannya, sehingga Bank mengalami defisit yang cukup besar.

Untuk memperoleh awal yang baik (*fresh start*) dengan laporan posisi keuangan yang menunjukkan nilai sekarang dan tidak dibebani oleh defisit, maka Bank melaksanakan Kuasi-Reorganisasi per 31 Mei 2007 (Catatan 2b). Kuasi-Reorganisasi dilakukan Bank sebagai langkah penting untuk bisa meneruskan usaha secara lebih baik.

1. GENERAL (continued)

d. Initial Public Offering (IPO) (continued)

In relation to the Initial Public Offering of the shares, the Bank implemented the Management and Employee Stock Allocation (MESA) program. MESA program is allocated with a maximum of 9.62% of the newly issued shares for registered employees as of September 30, 2009. The MESA Program became effective on September 17, 2009 and all qualified employees availed of the program consisting of 226,928,500 Series B shares (with par value of Rp500 per share) with a purchase price of Rp640 per share (after share price discount of 20% from the initial public offering price of Rp800 per share) and a lock up period until six months.

In relation to the Initial Public Offering of the The share price discount for MESA program was recognized as the Bank's expense in 2009, amounting to 20% or Rp41,353 including the income tax expense.

e. Implementation of quasi - reorganization

The unfavorable economic condition starting in mid-1997 until 1999, which was caused mainly by the weakening of the rupiah in relation to other foreign currencies such as the United States dollar, the instability of interest rates, liquidity problem and the low level of trust by investors, had an adverse impact to the banking industry in Indonesia. This condition also affected the Bank debtors in fulfilling their obligations. As a result, the Bank suffered a significant amount of deficit.

In order to make a fresh start with a statement of financial position showing present values without the burden of deficit, the Bank conducted a Quasi-Reorganization on May 31, 2007 (Note 2b). The Quasi-Reorganization was recognized by the Bank as a necessary step to positively continue its business.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

e. Penerapan kuasi reorganisasi (lanjutan)

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tanggal 19 Januari 2006, pemegang saham Bank memutuskan antara lain bahwa pemegang saham mendukung rencana Bank untuk melakukan Kuasi-Reorganisasi dalam rangka menetapkan besarnya nilai akhir Penyertaan Modal Negara dalam Bank dan perbaikan struktur modal Bank, dan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai hasil dari Kuasi-Reorganisasi, saldo defisit Bank sebesar Rp14.226.290 dieliminasi ke akun saldo laba.

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank tanggal 21 Mei 2014 yang berita acaranya dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 54, susunan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2014

Komisaris Utama	Mardiasmo*
Komisaris Independen	Amanah Abdulkadir
Komisaris Independen	Maulana Ibrahim
Komisaris Independen	Sahala Lumban Gaol
Komisaris	Agung Kuswandono
Komisaris	Herman Hidayat**

* Sejak tanggal 13 Januari 2015 sudah tidak efektif lagi di Bank.

** Akan efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank tanggal 27 Maret 2013 yang berita acaranya dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 45, susunan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2013

Komisaris Utama	Mardiasmo*
Komisaris Independen	Amanah Abdulkadir
Komisaris Independen	Maulana Ibrahim
Komisaris Independen	Sahala Lumban Gaol**
Komisaris	Agung Kuswandono
Komisaris	Dwijanti Tjahjaningsih

* Efektif sejak tanggal 25 Februari 2014, sesuai surat OJK No. SR-19/PB.12/2014.

** Efektif sejak tanggal 16 Juni 2014, sesuai surat OJK No. SR-98/D.03/2014 tanggal 11 Juni 2014.

1. GENERAL (continued)

e. Implementation of quasi – reorganization (continued)

In the Bank's General Stockholders' Meeting held on January 19, 2006 regarding the Approval of the Bank's Budget and Work Plan, the stockholders approved, among others, the Bank's plan to conduct the Quasi-Reorganization in order to determine the final amount of the Government's capital contribution and to restructure the Bank's capital, which should be implemented according to the prevailing regulations.

As a result of the quasi-reorganization, the Bank's deficit balance amounting to Rp14,226,290 was eliminated against the net amount of the retained earnings.

f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees

Based on the Bank's Extraordinary General Stockholders' Meeting held on May 21, 2014, as recorded under the notarial No. 54 of notary Fathiah Helmi, S.H., the composition of the Bank's Board of Commissioners are as follows:

December 31, 2014

President Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner

* Since January 13, 2015 no longer effective in Bank.

** Will be effective upon approval from OJK based on the Fit and Proper Test and compliance with the prevailing laws and regulations.

Based on the Bank's Annual General Stockholders' Meeting held on March 27, 2013, as recorded under the notarial No. 45 of notary Fathiah Helmi, S.H., the composition of the Bank's Board of Commissioners are as follows:

December 31, 2013

President Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner

* Effective since February 25, 2014, based on the letter of OJK No. SR-19/PB.12/2014.

** Effective since June 16, 2014, based on the letter from OJK No. SR-98/D.03/2014 dated June 11, 2014.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank tanggal 28 Desember 2012 yang diaktakan dengan akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 61, susunan Dewan Komisaris Bank pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2012

Komisaris Utama (merangkap komisaris independen)
 Komisaris Independen
 Komisaris Independen
 Komisaris
 Komisaris
 Komisaris

Zaki Baridwan
 Subarjo Joyosumarto
 Amanah Abdulkadir*
 Sahala Lumban Gaol
 Dwijanti Tjahjaningsih
 Agung Kuswandono **

* Efektif sejak tanggal 28 Juni 2013, sesuai surat OJK No. 15/20/GBI/DPIP/Rahasia.
 ** Efektif sejak tanggal 28 Juni 2013, sesuai surat OJK No. 15/21/GBI/DPIP/Rahasia.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Bank tanggal 25 Februari 2014, dengan berita acara No. 29 dan akta No. 9 tanggal 13 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2014

Direktur Utama Maryono
 Direktur Bidang Keuangan dan Teknologi Informasi Hulmansyah
 Direktur Bidang *Treasury* dan Aset Manajemen Iman Nugroho Soeko
 Direktur Bidang Pendanaan dan Penyaluran Ritel Irman Alvian Zahiruddin
 Direktur Bidang Perumahan dan Pembiayaan Konsumer Mansyur Syamsuri Nasution
 Direktur Bidang Risiko, Kepatuhan, dan Strategi Rico Rizal Budidarmo

Berdasarkan pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank tanggal 28 Desember 2012 yang diaktakan dengan akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 54, susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2013

Direktur Utama Maryono
 Direktur Bidang Keuangan dan Teknologi Informasi Evi Firmansyah*
 Direktur Bidang Pendanaan dan Penyaluran Ritel Irman Alvian Zahiruddin
 Direktur Bidang Perumahan dan Pembiayaan Konsumer Mansyur Syamsuri Nasution
 Direktur Bidang Risiko, Kepatuhan, dan Strategi Mas Guntur Dwi S**

1. GENERAL (continued)

f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

Based on the Bank's Extraordinary General Stockholders' Meeting held on December 28, 2012, as stated under the notarial deed No. 61 of notary Fathiah Helmi, S.H., the composition of the Bank's Board of Commissioners as of December 31, 2012 is as follows:

December 31, 2012

President Commissioner (also acting as Independent Commissioner)
 Independent Commissioner
 Independent Commissioner
 Commissioner
 Commissioner
 Commissioner

* Effective since June 28, 2013, based on the letter of OJK No. 15/20/GBI/DPIP/Rahasia.
 ** Effective since June 28, 2013, based on the letter of OJK No. 15/21/GBI/DPIP/Rahasia.

Based on the Bank's General Stockholders' Meeting held on February 25, 2014, as stated under the notarial No. 29 and the notarial deed No. 9 dated August 13, 2014 by notary Fathiah Helmi, S.H., the composition of the Bank's Board of Directors are as follows:

December 31, 2014

President Director
 Managing Director
 Finance and Information Technology
 Managing Director Treasury and Asset Management
 Managing Director Retail Funding and Distribution
 Managing Director Mortgage and Consumer Lending
 Managing Director Risk, Compliance, and Strategy

Based on the Bank's Extraordinary General Stockholders' Meeting held on December 28, 2012, as stated under the notarial deed No. 54 of notary Fathiah Helmi, S.H., the composition of the Bank's Board of Directors are as follows:

December 31, 2013

President Director
 Managing Director
 Finance and Information Technology
 Managing Director Retail Funding and Distribution
 Managing Director Mortgage and Consumer Lending
 Director Managing Director Risk, Compliance, and Strategy

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank tanggal 28 Desember 2012 yang diaktakan dengan akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 54, susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut (lanjutan):

31 Desember 2013

Direktur Bidang Perbankan Komersial	Poernomo**
Direktur Bidang <i>Treasury</i> dan Aset Manajemen	Saut Pardede*

* Berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 15/124/KEP.GBI/DPG/2013 dan No. 15/125/KEP.GBI/DPG/2013 tanggal 6 Desember 2013, Bapak Evi Firmansyah dan Bapak Saut Pardede tidak dapat melakukan tindakan sebagai anggota Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal 6 Desember 2013.

** Berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 15/126/KEP.GBI/DPG/2013 dan No. 15/127/KEP.GBI/DPG/2013 tanggal 6 Desember 2013, Bank Indonesia belum dapat menyetujui pengangkatan Bapak Mas Guntur Dwi S. dan Bapak Poernomo sebagai Direktur.

Berdasarkan pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank tanggal 28 Desember 2012 yang diaktakan dengan akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 61, susunan Dewan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2012

Direktur Utama	Maryono*
Direktur Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Teknologi	Evi Firmansyah
Direktur Bidang Pendanaan Penyaluran Ritel	Irman Alvian Zahiruddin
Direktur Bidang <i>Treasury</i> dan Penagihan	Saut Pardede
Direktur Bidang Kepatuhan dan Strategi	Mas Guntur Dwi S**
Direktur Bidang Perbankan Komersial	Poernomo**
Direktur Bidang Perumahan dan Pembiayaan Konsumer	Mansyur Syamsuri Nasution***

* Efektif sejak tanggal 18 Maret 2013, sesuai surat OJK No. 15/55/GBI/DPIP/Rahasia.

** Akan efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*** Efektif sejak tanggal 18 Maret 2013, sesuai surat OJK No. 15/56/GBI/DPIP/Rahasia.

1. GENERAL (continued)

f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

Based on the Bank's Extraordinary General Stockholders' Meeting held on December 28, 2012, as stated under the notarial deed No. 54 of notary Fathiah Helmi, S.H., the composition of the Bank's Board of Directors are as follows (continued):

December 31, 2013

Managing Director Commercial Banking
Managing Director Treasury and Asset Management

* Based on the decision letter of Bank Indonesia No. 15/124/KEP.GBI/DPG/2013 and No. 15/125/KEP.GBI/DPG/2013 dated December 6, 2013, Mr. Evi Firmansyah and Mr. Saut Pardede could not act as the Bank's members of Directors, since December 6, 2013.

** Based on the decision letter of Bank Indonesia No. 15/126/KEP.GBI/DPG/2013 and No. 15/127/KEP.GBI/DPG/2013 dated December 6, 2013, Bank Indonesia could not approve the appointment of Mr. Mas Guntur Dwi S and Mr. Poernomo as the members of Directors.

Based on the Bank's Extraordinary General Stockholders' Meeting held on December 28, 2012, as stated under the notarial deed No. 61 of notary Fathiah Helmi, S.H., the composition of the Bank's Board of Directors as of December 31, 2012, follows:

December 31, 2012

President Director
Managing Director Human Capital, Finance, and Technology
Managing Director Retail Funding and Distribution
Managing Director, Treasury and Collection
Managing Director Compliance and Strategy
Managing Director Commercial Banking
Managing Director Mortgage and Consumer Lending

* Effective since March 18, 2013, based on the letter of OJK No. 15/55/GBI/DPIP/Rahasia.

** Will be effective upon approval from OJK based on the Fit and Proper Test and compliance with the prevailing laws and regulations.

*** Effective since March 18, 2013, based on the letter of OJK No. 15/56/GBI/DPIP/Rahasia.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada dewan komisaris adalah sebesar Rp16.721, Rp22.605 dan Rp19.466 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 (Catatan 40b). Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada dewan direksi adalah sebesar Rp37.869, Rp58.283 dan Rp49.247 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 (Catatan 40b).

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Bank yang diadakan pada tanggal 25 Februari 2014, 27 Maret 2013 dan 19 April 2012 Bank membagikan tantiem masing-masing sebesar Rp30.595, Rp54.558 dan Rp44.800 bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang dialokasikan dari laba tahun berjalan yang dibayarkan masing-masing pada tanggal 26 Maret 2014, 11 April 2013 dan 3 Mei 2012.

Sekretaris Perusahaan dan Kepala Divisi Audit Internal Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2014

Sekretaris Perusahaan
Kepala Divisi Audit Internal

Eko Waluyo*
Dadang Eka Jatnika**

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 164/DIR/2014 tanggal 8 April 2014 dan bertindak sebagai pejabat sementara sejak tanggal 14 April 2014.

** Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 176/DIR/2014 tanggal 21 April 2014.

31 Desember 2013

Sekretaris Perusahaan
Kepala Divisi Audit Internal

Viator Simbolon*
Hulmansyah**

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 371/DIR/2013 tanggal 29 Mei 2013.

** Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 134/DIR/2013 tanggal 5 Maret 2013.

31 Desember 2012

Sekretaris Perusahaan
Kepala Divisi Audit Internal

Rakhmat Nugroho*
Mas Guntur Dwi S**

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 136/DIR/2010 tanggal 25 Mei 2010.

** Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 279/DIR/2011 tanggal 15 Juli 2011 dan digantikan oleh Palwoto yang bertindak sebagai pejabat sementara pada Februari 2013.

1. GENERAL (continued)

f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

Salaries and other compensation benefits paid to the Board of Commissioners of the Bank amounted to Rp16,721, Rp22,605 and Rp19,466 for the years ended December 31, 2014, 2013 and 2012, respectively (Note 40b). Salaries and other compensation benefits paid to the Board of Directors of the Bank amounted to Rp37,869, Rp58,283 and Rp49,247 for the years ended December 31, 2014, 2013 and 2012, respectively (Note 40b).

During the Bank's Stockholders' General Meetings held on February 25, 2014, March 27, 2013 and April 19, 2012, the Bank distributed tantiem to the Directors and Commissioners amounting to Rp30,595, Rp54,558 and Rp44,800, respectively, which were charged to current year income and paid on March 26, 2014, April 11, 2013 and May 3, 2012, respectively.

The Bank's Corporate Secretary and the Head of Internal Audit Division are as follows:

December 31, 2014

Corporate Secretary
Head of Internal Audit Division

* Appointed based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No.164/DIR/2014 dated April 8, 2014 and acting Corporate Secretary since April 14, 2014.

** Appointed based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No.176/DIR/2014 dated April 21, 2014.

December 31, 2013

Corporate Secretary
Head of Internal Audit Division

* Appointed based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No.371/DIR/2013 dated May 29, 2013.

** Appointed based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No.134/DIR/2013 dated March 5, 2013.

December 31, 2012

Corporate Secretary
Head of Internal Audit Division

* Appointed based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No.136/DIR/2010 dated May 25, 2010.

** Appointed based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No.279/DIR/2011 dated July 15, 2011 and replaced by Palwoto who is acting as caretaker on February 2013.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No.927/DIR/2013 tanggal 27 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2014

Ketua	Ahmad Nazri Adlani
Anggota	Mohamad Hidayat

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 166/DIR/2010 tanggal 19 Juli 2010 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2013 dan 2012

Ketua	Ahmad Nazri Adlani
Anggota	Mohamad Hidayat
Anggota	Muhammad Syakir Sula

Susunan Dewan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No.294/DIR/2014, tanggal 1 Juli 2014 (menindaklanjuti Ketetapan Komisaris melalui Surat No. 72/KOM/BTN/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014) adalah sebagai berikut:

31 Desember 2014

Ketua	Sahala Lumban Gaol
Wakil Ketua	Maulana Ibrahim
Anggota	Sondang Gayatri
Anggota	Waldy Gutama

Susunan Dewan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 251/DIR/2013 tanggal 24 April 2013 (menindaklanjuti Surat Komisaris No. 29/KOM/BTN/IV/2013 tanggal 3 April 2013), Surat Keputusan Direksi Bank No.736/DIR/2013, tanggal 2 Oktober 2013 (menindaklanjuti Surat Komisaris No.92/KOM/BTN/IX/2013 tanggal 26 September 2013) dan Surat Keputusan Direksi Bank No.870/DIR/2013 tanggal 3 Desember 2013 (menindaklanjuti Surat Komisaris No.118/KOM/BTN/XI/2013 tanggal 27 November 2013) adalah sebagai berikut:

31 Desember 2013

Ketua	Sahala Lumban Gaol
Anggota	Dwijanti Tjahjaningsih
Anggota	Muchammad Syafruddin
Anggota	Sondang Gayatri
Anggota	Waldy Gutama

1. GENERAL (continued)

f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No. 927/DIR/2013 dated December 27, 2013 are as follows:

December 31, 2014

Chairman
Member

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No. 166/DIR/2010 dated July 19, 2010 are as follows:

December 31, 2013 and 2012

Chairman
Member
Member

The composition of the Bank's Audit Committee as of December 31, 2014, based on the Board of Directors' Decision Letter No. 294/DIR/2014 dated July 1, 2014 (followed up of the Bank's Board of Commissioners' Decision No. 72/KOM/BTN/VI/2014 dated June 25, 2014) are as follows:

December 31, 2014

Chairman
Vice Chairman
Member
Member

The composition of the Bank's Audit Committee as of December 31, 2013, based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No.251/DIR/2013, dated April 24, 2013, (followed up of the Bank's Board of Commissioners' Decision No.29/KOM/BTN/IV/2013 dated April 3, 2013), the Bank's Board of Directors' Decision Letter No.736/DIR/2013, dated October 2, 2013, (followed up of the Bank's Board of Commissioners' Decision No.92/KOM/BTN/IX/2013 dated September 26, 2013) and the Bank's Board of Directors' Decision Letter No.870/DIR/2013, dated December 3, 2013, (followed up of the Bank's Board of Commissioners' Decision No. 118/KOM/BTN/XI/2013 dated November 27, 2013) are as follows:

December 31, 2013

Chairman
Member
Member
Member
Member

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Dewan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 244/DIR/2012, tanggal 31 Agustus 2012 (menindaklanjuti Ketetapan Komisaris melalui Surat No. 78/KOM/BTN/VII/2012 tanggal 1 Agustus 2012) adalah sebagai berikut:

31 Desember 2012

Ketua	Zaki Baridwan
Anggota	Muchamad Syafruddin
Anggota	Triana Yuniati

Berdasarkan ketentuan internal Bank, manajemen kunci Bank cakupannya adalah dewan komisaris, komite audit, direksi, kepala kantor wilayah, kepala divisi, dan kepala cabang. Jumlah karyawan tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah 7.513, 6.869 dan 6.048 orang (tidak diaudit).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

1. GENERAL (continued)

f. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

The composition of the Bank's Audit Committee as of December 31, 2012 based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No. 244/DIR/2012 dated August 31, 2012 (followed by the Bank's Board of Directors' Decision No. 78/KOM/BTN/VII/2012 dated August 1, 2012 are as follows:

December 31, 2012

Chairman
Member
Member

Based on Bank's internal regulation, scope of the Bank's key management consist of board of commissioners, audit committee, board of directors, regional office head, division head, and branch manager. The Bank's permanent employees as of December 31, 2014, 2013 and 2012 amounted to 7,513, 6,869 and 6,048 employees, respectively (unaudited).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Measurement and Preparation of the Financial Statements

Statement of Compliance

The financial statements as of and for the years ended December 31, 2014, 2013 and 2012 were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which includes the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board Indonesian Institute of Accountants and Bapepam-LK's Regulation No. VIII.G.7, Appendix of the Decision of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding the "Guidelines on Financial Statements Presentations and Disclosures for Issuers or Public Companies".

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

Laporan keuangan Bank cabang syariah yang didasarkan pada prinsip syariah disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 tentang "Akuntansi Murabahah", PSAK No. 104 tentang "Akuntansi Istishna", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi Mudharabah", PSAK No. 106 tentang "Akuntansi Musyarakah" dan PSAK No. 107 tentang "Akuntansi Ijarah" yang menggantikan PSAK No. 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah" yang berkaitan dengan pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk topik tersebut, PSAK No. 110 tentang "Akuntansi Sukuk" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual, kecuali pendapatan dari *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali dinyatakan lain dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Measurement and Preparation of the Financial Statements (continued)

Statement of Compliance (continued)

The financial statements of the Bank's sharia branches have been presented in conformity with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No. 101 on "Sharia Financial Statements Presentation", SFAS No. 102 on "Accounting for Murabahah", SFAS No. 104 on "Accounting for Istishna", SFAS No. 105 on "Accounting for Mudharabah", SFAS No. 106 on "Accounting for Musyarakah" and SFAS 107 on "Accounting for Ijarah", which supersede SFAS No. 59 on "Accounting for Sharia Banking" associated with recognition, measurement, presentation and disclosure for the respective topics, SFAS No.110 on "Accounting for Sukuk" and the Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI) issued by Bank Indonesia and Indonesian Institute of Accountants (IAI).

The financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for some accounts that were assessed using another measurement basis as explained in the accounting policies of the account. The financial statements have been prepared on accrual basis, except for the revenue from *istishna* and the profit sharing from the *mudharabah* and *musyarakah* financing and the statement of cash flow.

The statement of cash flows have been prepared using direct method and the cash flows have been classified on the basis of operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consists of cash, current accounts with Bank Indonesia and current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, Bank Indonesia Certificates and Deposits Certificates of Bank Indonesia maturing within 3 (three) months or less from the acquisition date provided they are not used as collateral for borrowings nor restricted.

The presentations currency used in the financial statement is the Indonesian Rupiah, which is the Bank's functional currency. Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statement are rounded off to millions of Rupiah.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Kuasi-Reorganisasi

Berdasarkan PSAK No. 51 (Revisi 2003) tentang "Akuntansi Kuasi-Reorganisasi", kuasi-reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan liabilitasnya berdasarkan nilai wajar. Dengan kuasi-reorganisasi, perusahaan mendapatkan awal yang baik (fresh start) dengan laporan posisi keuangan yang menunjukkan nilai sekarang dan tanpa dibebani defisit karena defisit dieliminasi menjadi nihil.

Estimasi nilai wajar aset dan liabilitas dalam rangka kuasi-reorganisasi ditentukan berdasarkan informasi terbaik sesuai dengan karakteristik aset dan liabilitas yang bersangkutan atau nilai pasar aset dan liabilitas yang bersangkutan. Apabila nilai pasar tidak tersedia, estimasi nilai wajar dilakukan dengan mempertimbangkan harga aset sejenis, estimasi nilai sekarang atau arus kas yang didiskontokan. Untuk aset dan liabilitas tertentu, penilaian dilakukan sesuai PSAK terkait.

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank jika:

- a) Suatu pihak yang secara langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;
- b) suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;
- c) suatu pihak yang merupakan ventura bersama di mana Bank sebagai *venturer*;
- d) suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank;
- e) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d);

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Quasi-Reorganization

Based on SFAS No. 51 (Revised 2003), "Accounting for Quasi-Reorganization", a quasi-reorganization is an accounting procedure that enables a company to restructure its equity by eliminating its deficit and revaluing all its assets and liabilities based on their fair values. Under a quasi-reorganization, a company will have a fresh start with its statement of financial position showing figures that represent present values and without the burden of a deficit because the deficit has been eliminated.

The fair value estimate for assets and liabilities under a quasi-reorganization is determined based on the best available information according to the characteristics of the related assets and liabilities or the market value for the related assets and liabilities. If the market value is not available, the fair value estimation is conducted by considering the value of similar assets, present value estimation, or discounted cash flows. For certain assets and liabilities, the valuation is conducted according to the related SFAS.

c. Transactions with related parties

In the normal course of its business, the Bank enters into transactions with related parties which are defined under SFAS No. 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures".

The Bank considers the following as its related parties:

- a) a person who, directly or indirectly through one or more intermediaries, (i) controls, or is controlled by, or under common control with the Bank, (ii) has significant influence over the Bank or (iii) has joint control over the Bank;
- b) an entity which is a member of the same group as the Bank;
- c) an entity which is a joint venture of a third party in which the Bank has ventured in;
- d) a member of key management personnel of the Bank;
- e) a close family member of the person described in clause (a) or (d);

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank jika (lanjutan):

- f) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e);
- g) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas terkait Bank.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan Bank telah memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu", pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 40 atas laporan keuangan. Selanjutnya, saldo dan transaksi yang material antara Bank dan Pemerintah Negara Republik Indonesia (RI) dan entitas lain yang berelasi dengan Bank diungkapkan juga pada Catatan 40 tersebut.

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

Bank menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2010) tentang "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2011) tentang "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan PSAK No. 60 tentang "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

Aset keuangan Bank terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, obligasi Pemerintah, kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, bunga yang masih akan diterima dan aset lain-lain (tagihan kepada pihak ketiga).

Liabilitas keuangan Bank terdiri dari liabilitas segera, simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain, surat-surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, bunga yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain (setoran jaminan dan dana jaminan pengembang).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Transactions with related parties (continued)

The Bank considers the following as its related parties (continued):

- f) an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced, directly or indirectly by the person described in clause (d) or (e);
- g) an entity which is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Bank or an entity related to the Bank.

Transactions with related parties are made on the same term and conditions as those transactions with third parties. All transaction done by Bank have complied with Bapepam-LK Regulation No. IX.E.1 regarding "The affiliate transactions and conflict of interest of certain transactions", at the time the transaction were made. All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the details have been presented in Note 40 of the financial statements. Furthermore, material transactions and balances between Bank and the Government of the Republic of Indonesia (RI) and other entities related to the Bank are also disclosed in Note 40.

d. Financial assets and liabilities

The Bank adopted SFAS No. 50 (Revised 2010), "Financial Instruments: Presentation", SFAS No. 55 (Revised 2011), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", and SFAS No. 60, "Financial Instruments: Disclosures".

The Bank's financial assets consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, securities, Government bonds, loans and sharia financing/receivables, interest receivable and other assets (third party receivables).

The Bank's financial liabilities consist of current liabilities, deposits from customers, deposits from other banks, securities issued, fund borrowings, securities sold under repurchase agreements, interest payable and other liabilities (guarantee deposits and developers' security deposits).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi

Bank mengklasifikasi aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki dua sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasi dalam kelompok yang diperdagangkan;
- Kredit yang diberikan dan piutang;
- Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo;
- Investasi tersedia untuk dijual

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki dua sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Kelompok aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari aset dan liabilitas keuangan yang diperoleh atau dimiliki Bank terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*.

Kredit yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Bank untuk dijual segera dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification

The Bank classifies its financial assets in the following categories at initial recognition:

- Financial assets at fair value through profit or loss, which have two sub-classifications, i.e. financial assets designated as such upon initial recognition and financial assets classified as held-for-trading;
- Loans and receivables;
- Held-to-maturity investments;
- Available-for-sale investments.

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- Financial liabilities at fair value through profit or loss, which have two sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held-for-trading;
- Other financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss are categorized and measured at amortized cost.

The sub-classification of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss consists of financial assets and liabilities that the Bank acquires or incurs principally for the purpose of selling or repurchasing in the near term, or holds as part of a financial instrument portfolio that is managed together for short-term profit or position taking.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and are not quoted in an active market, except:

- those that the Bank intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held-for-trading, and those that the Bank upon initial recognition designates at fair value through profit or loss;

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

(i) Classification (continued)

Kredit yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali (lanjutan):

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and are not quoted in an active market, except (continued):

- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Bank tidak akan memperoleh kembali seluruh investasi awal kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas kredit yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

- those that upon initial recognition are designated as available-for-sale investments; or
- those for which the Bank may not recover substantially all of its initial investment, other than because of loans and receivable deterioration, which are classified as available-for-sale.

Investasi dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif yang dapat dikuotasi dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Investasi yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak dikategorikan dalam klasifikasi ini.

Held-to-maturity investments consist of quoted non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity which the Bank has the positive intention and ability to hold until maturity. Investments intended to be held for an undetermined period of time are not included in this classification.

Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak dikelompokkan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya. Setelah pengukuran awal, investasi tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan laba atau rugi yang diakui sebagai bagian dari ekuitas sampai dengan investasi dihentikan pengakuannya atau sampai investasi dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif. Hasil efektif dan (bila dapat diaplikasikan) hasil dari nilai tukar dinyatakan kembali untuk investasi tersedia dijual dan dilaporkan pada laporan laba rugi komprehensif.

The available-for-sale category consists of non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in one of the other categories of financial assets. After initial recognition, available-for-sale investments are measured at fair value with gains or losses being recognized in equity until the investment is derecognized or until the investment is determined to be impaired at which time the cumulative gains or losses previously reported in equity is included in the statement of comprehensive income. The effective yield and (where applicable) results of foreign exchange restatement for available-for-sale investments are reported in the statement of comprehensive income.

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

Other financial liabilities represent financial liabilities that are neither held for trading nor designated at fair value through profit or loss upon the recognition of the liability.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Pengakuan awal

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal penyelesaian.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Bank, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul; atau

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(ii) Initial recognition

- a. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way purchases) are recognized on the settlement date.
- b. Financial assets and liabilities are initially recognised at fair value plus, for those financial assets not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets and liabilities depends on their classification.

Transaction costs only include costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and an additional charge that would not occur if the instrument is not acquired or issued. For financial assets, transaction costs are added to the amount recognized in the initial recognition of the asset, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized on initial recognition of a liability. The transaction costs are amortized over the terms of the instrument based on the effective interest rate method and recorded as part of interest income for transaction costs related to the financial asset or as part of interest expense for transaction costs related to financial liabilities.

The Bank, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met:

- the application of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise; or

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Pengakuan awal (lanjutan)

Bank, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut (lanjutan):

- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Kredit yang diberikan dan piutang serta investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

- a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:
- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - Bank telah mentransfer hak-nya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (pass through arrangement); dan

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(ii) Initial recognition (continued)

The Bank, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met (continued):

- the financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or
- the financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated.

(iii) Subsequent measurement

Available-for-sale financial assets and financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are subsequently measured at fair value.

Loans and receivables and held-to-maturity investments and other financial liabilities measured at amortized cost are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) Derecognition

- a. Financial assets are derecognized when:
- The contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or
 - The Bank has transferred its rights to receive cash flows from the financial assets or has assumed an obligation to pay the cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass through arrangement'; and

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

- a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika (lanjutan):
- dan antara (a) Bank telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Bank tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset.

Ketika Bank telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki *pass through arrangement* dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Bank yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Kredit yang diberikan atau aset keuangan lain dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal antara Bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi komprehensif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Derecognition (continued)

- a. Financial assets are derecognized when (continued):
- Either (a) the Bank has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Bank has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred the control of the asset.

When the Bank has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a *pass through arrangement*, and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, the asset is recognized to the extent of the Bank's continuing involvement in the asset.

Loans or other financial assets are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between the Bank and the borrowers has ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses. Subsequent recoveries from loans previously written off, are added to the allowance for impairment losses account in the statement of financial position, if recovered in the current year and are recognized in the statements of comprehensive income as other operating income, if recovered after the statement of financial position dates.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

- b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, seperti pertukaran atau modifikasi yang diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset tersedia untuk dijual, serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi diakui pada laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- b. Keuntungan dan kerugian yang belum terealisasi yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual, kecuali keuntungan dan kerugian nilai tukar, diakui secara langsung dalam laba setelah pajak dalam ekuitas, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Derecognition (continued)

- b. Financial liabilities are derecognized when they are extinguished, i.e. liabilities stated in the contract are discharged, cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of comprehensive income.

(v) Income and expense recognition

- a. Interest income and expense on available-for-sale assets and financial assets and liabilities measured at amortized cost are recognised in the statement of comprehensive income using the effective interest method.
- b. Unrealized gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are included in the statement of comprehensive income.

Unrealized gains and losses arising from changes in fair value of available-for-sale, except financial assets other than foreign exchange gains and losses are recognized, net of tax, in equity, until the financial assets are derecognized or impaired.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

Bank tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Bank sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Bank tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

- a. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
- b. terjadi setelah Bank telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Bank telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
- c. terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Bank, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(v) Income and expense recognition (continued)

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity is recognized in the statement of comprehensive income.

(vi) Reclassification of financial assets

Bank is not allowed to reclassify any financial instrument out of or into the fair value through profit or loss, if the initial recognition of financial instruments is determined by Bank as measured at fair value through profit or loss.

The Bank cannot classify financial assets as held-to-maturity investments, if the Bank during the current year or in the two preceeding years, sold or reclassified more than an insignificant amount of held-to-maturity investments before maturity (more than an insignificant amount in relation to the total amount of held-to-maturity investments), other than sales or reclassification:

- a. are so close to maturity or repurchase date that changes in the market rate of interest would not have a significant effect on the financial assets' fair value;
- b. occur after the Bank has collected substantially all of the original principal of the financial assets through scheduled payments or prepayments; or
- c. are attributable to an isolated event, that is beyond the Bank's control, is non-recurring, and could not have been reasonably anticipated by the Bank.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vi) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam ekuitas dan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif selama sisa umur aset keuangan tersebut.

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Bank memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan.

(viii) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu liabilitas dapat diselesaikan, diantara para pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar pada tanggal pengukuran, termasuk didalamnya adalah nilai pasar dari *Interdealer Market Association* (IDMA) atau harga yang diberikan oleh *broker* (quoted price) dari Bloomberg atau Reuters pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasi tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service* atau *regulating agency*) dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) *Reclassification of financial assets (continued)*

Reclassification of financial assets from held-to-maturity to available-for-sale category is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reported in equity and are amortized using effective interest method over the remaining life of the financial assets.

(vii) *Offsetting*

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, the Bank has a legal right to offset the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the Financial Accounting Standards.

(viii) *Fair value measurement*

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable and willing parties in an arm's length transaction on the measurement date, including the market value from the Interdealer Market Association (IDMA) or the price given by brokers (quoted price) from Bloomberg or Reuters on the measurement date.

When available, the Bank measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily available from the stock exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulating agency and represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(viii) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

(viii) Fair value measurement (continued)

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Bank menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto.

If a market for a financial instrument is not active, the Bank determines the fair value using a valuation technique. Valuation techniques include using the recent arm's length transactions between knowledgeable and willing parties (if available), reference to the current fair value of other instruments that are substantially the same and discounted cash flow analysis.

Kuotasi harga pasar yang sesuai bagi aset yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan biasanya sama dengan harga penawaran yang berlaku, sementara untuk aset yang akan diperoleh atau liabilitas yang dimiliki adalah harga permintaannya. Jika Bank memiliki aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, nilai tengah dari pasar dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan nilai wajar posisi risiko yang saling hapus tersebut dan penyesuaian harga penawaran atau harga permintaan diterapkan pada posisi terbuka atau neto (*net open position*) yang sesuai.

The appropriate quoted market price for an asset held or liability to be issued is usually the current bid price and, for an asset to be acquired or liability held, the current offer or asking price. Where the Bank has asset and liability with offsetting market risk, middle-market prices can be used to measure the offsetting risk positions or bid or ask price adjustment is applied to the appropriate net open positions as appropriate.

(ix) Pengukuran biaya diamortisasi

(ix) Amortized cost measurement

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

(x) Aset keuangan sukuk

(x) Sukuk Financial Asset

Pada saat pengakuan awal, entitas menentukan klasifikasi investasi pada sukuk sebagai diukur pada biaya perolehan atau diukur pada nilai wajar.

At initial recognition, the entity determines the classification of investments in sukuk either measured at cost or fair value.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Aset keuangan sukuk (lanjutan)

Investasi pada sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* setelah pengakuan awal, diukur sebagai berikut:

a. Diukur pada biaya perolehan

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi.
- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk.
- Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai rugi penurunan nilai di dalam laporan laba rugi komprehensif.

b. Diukur pada nilai wajar

- Nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada urutan sebagai berikut:
 - Kuotasi harga di pasar aktif
 - Harga yang terjadi dari transaksi terkini, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif
 - Nilai wajar instrumen sejenis, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif dan tidak ada harga yang terjadi dari transaksi terkini
- Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Sukuk Financial Asset (continued)

After the initial recognition, investment in *ijarah* sukuk and *mudharabah* sukuk is measured as follows:

a. Measured at cost

- The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results.
- Sukuk acquisition cost includes transaction cost.
- The difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight-line basis over the period of the sukuk.
- Impairment loss is recognized if the recoverable amount is less than the carrying amount and is presented as an impairment loss in the statement of comprehensive income.

b. Measured at fair value

- The fair value is determined with reference to the following order:
 - Quoted price in active market
 - Price from the current transaction, if there is no available price quotations in an active market
 - Fair value of similar instrument, if there is no available price quotations in an active market and no price from the current transaction
- Sukuk acquisition cost does not include transaction cost

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Aset keuangan sukuk (lanjutan)

b. Diukur pada nilai wajar (lanjutan)

- Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laporan laba rugi komprehensif

Semua investasi sukuk Bank dilakukan dengan akad *ijarah*.

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c. pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Sukuk Financial Asset (continued)

b. Measured at fair value

- The difference between fair value and carrying value is presented in the statement of comprehensive income

All investment in sukuk of Bank was done under *ijarah* contracts.

e. Allowance for impairment losses on financial assets

On each statement of financial position reporting date, Bank assesses whether there is an objective evidence that financial assets not carried at fair value through profit or loss are impaired according to SFAS No. 55 (Revised 2011), "Financial Instruments: Recognition and Measurement".

Financial assets are impaired when an objective evidence demonstrate that a loss event has occurred after the initial recognition of the asset and that the loss event has an impact on the future cash flows of the financial asset that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment are as follows:

- a. significant financial difficulties by the issuer or debtor;
- b. breach of contract, like defaults or deferred principal or interest payments;
- c. the creditor, for economic or legal reasons relating to the financial difficulties of the debtor, provides relief (concession) to the debtor that the creditor would not otherwise consider;
- d. it becomes probable that the debtor will enter into bankruptcy or other financial reorganization;
- e. the loss of an active market for that financial asset due to financial difficulties; or

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut (lanjutan):

- f. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
1. memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
 2. kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) dan 12 (dua belas) bulan dan untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu cadangan kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai;
2. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment are as follows (continued):

- f. observable data has indicated that there is measurable decrease in the estimated future cash flows of the financial assets since the initial measurement, although the decrease cannot be identified to the individual financial assets in the portfolio, including:
1. adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and
 2. national or local economic condition related to defaults on the assets in the portfolio.

The estimated period between the occurrence of events and identification of loss are determined by management for every identified portfolio. Generally, the period varies between 3 (three) and 12 (twelve) months and for specific cases, it may need longer period.

The Bank first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Financial assets that are individually assessed for allowance for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in the collective assessment of impairment.

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criteria is met:

1. Loans which individually have significant value with objective evidence of impairment;
2. Restructured loans which individually have significant value.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Berdasarkan kriteria di atas, Bank melakukan penilaian secara individual untuk: (a) Kredit yang diberikan dengan plafond sama dengan atau lebih besar dari Rp5.000 dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet; atau (b) Kredit yang diberikan dengan plafond sama dengan atau lebih besar dari Rp5.000 yang direstrukturisasi.

Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai;
2. Kredit yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
3. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, penilaian secara kolektif dilakukan untuk: (a) Kredit yang diberikan dengan plafond sama dengan atau lebih besar dari Rp5.000 dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus serta tidak direstrukturisasi; atau (b) Kredit yang diberikan dengan plafond dibawah Rp5.000.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu (historical loss experience). Aset keuangan dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi kredit dan tunggakan debitur.

Bank menggunakan metode *roll rate* analisis yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan secara kolektif. Dengan metode ini, Bank menggunakan data historis 3 (tiga) tahun dalam menghitung *Probability of Default* (PD) dan *Loss Given Default* (LGD).

Bank menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Kredit bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan;
2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Based on the above criteria, the Bank performs individual assessment for: (a) Loans with credit limit equal to or greater than Rp5,000 with collectibility classification of substandard, doubtful and loss; or (b) Restructured loans with credit limit equal to or greater than Rp5,000.

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria is met:

1. Loans which individually have significant value with no objective evidence of impairment;
2. Loans which individually have insignificant value;
3. Restructured loans which individually have insignificant value.

Based on the above criteria, the Bank performs collective assessment for: (a) Loans with credit limit equal to or greater than Rp5,000 with collectibility classification of current and special mention, and have never been restructured; or (b) Loans with credit limit below Rp5,000.

The calculation of allowance for impairment losses on financial assets are collectively evaluated on the basis of historical loss experience. Financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering the credit segmentation and past due status of the debtors, among others.

The Bank uses the roll rate analysis method, which is a statistical model analysis method to collectively assess allowance for impairment losses on loans. Under this method, the Bank uses 3 (three) years of historical data to compute for the Probability of Default (PD) and Loss Given Default (LGD).

The Bank uses the fair value of collateral as the basis for future cash flow if one of the following conditions is met:

1. Loans are collateral dependent, i.e. if the source of loans repayment is only from the collateral;
2. Foreclosure of collateral is most likely to occur and supported by legally binding collateral agreement.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika kredit yang diberikan atau surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo dan obligasi Pemerintah memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap cadangan kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Sebagai panduan praktis, Bank dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi, dimana perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralised financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang terjadi diakui pada laporan laba rugi komprehensif dan dicatat pada akun "Cadangan kerugian penurunan nilai" sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan menyebabkan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai berkurang, cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Allowance for impairment losses on financial assets carried at amortized cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and present value of estimated future cash flows discounted at the financial assets' original effective interest rate. If loans and receivables or held-to-maturity securities and Government bonds have variable interest rate, the discount rate used to measure allowance for impairment loss is the current effective interest rate specified in the contract.

As a practical guidance, the Bank may measure the impairment based on the instrument's fair value by using observable market price, where the calculation of the present value of estimated future cash flows on collateralized financial assets reflects the generated cash flow from the foreclosure of collateral net of costs to acquire and sell the collateral, regardless whether or not foreclosure is probable.

Allowance for impairment losses are recognized in the statements of comprehensive income and reflected in an "Allowance for impairment losses" account as a deduction from financial assets carried at amortized cost.

Interest income on the impaired financial assets continues to be recognized using the original rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the allowance for impairment loss. When a subsequent event causes the amount of allowance for impairment loss to decrease, the allowance for impairment loss is reversed through the statement of comprehensive income.

For financial assets classified as available for sale, Bank assesses on each statement of financial position reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas dibawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan cadangan kerugian penurunan nilai. Cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi komprehensif merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi dengan nilai pelunasan pokok dan amortisasi) dengan nilai wajar kini, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar surat-surat berharga yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan obligasi Pemerintah yang mengalami penurunan nilai meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan cadangan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi komprehensif, maka cadangan kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada tahun terjadinya.

Jika persyaratan kredit yang diberikan, piutang atau efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Jika pada suatu periode berikutnya, jumlah cadangan kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), maka cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah yang terpulihkan diakui pada laporan laba rugi komprehensif periode berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

In the case of equity instruments, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is an objective evidence of impairment resulting in the recognition of an allowance for impairment loss. allowance for impairment losses on available for sale marketable securities are recognized by transferring the cumulative loss that has been recognized directly in equity to the statements of comprehensive income. The cumulative loss that has been removed from equity and recognized in the statement of comprehensive income is the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortization) and the current fair value, less any allowance for impairment loss previously recognized in the statement of comprehensive income.

If in a subsequent period, the fair value of an impaired available-for-sale debt securities and Government bonds increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the allowance for impairment loss was recognized in the statement of comprehensive income, the allowance for impairment loss is reversed and recognized in the year it occurred.

If the terms of the loans and receivables or held-to-maturity securities are renegotiated or modified since the debtor or issuer has financial difficulties, the impairment is measured using the original effective interest rate before the modification of terms.

If in the next period, the amount of allowance for impairment losses is decreased and the decrease can be related objectively to an event that occurred after the recognition of the impairment loss (i.e. upgrade debtor's or issuer's collectibility), the allowance for impairment loss that was previously recognized has to be reversed by adjusting the allowance account. The amount of reversal is recognized in the current period statement of comprehensive income.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas kredit yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya. Penerimaan pembayaran pembiayaan/piutang syariah yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan cadangan kerugian selama tahun berjalan.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Bank Indonesia (OJK), Bank menerapkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" sebagai panduan untuk menghitung minimum cadangan kerugian penurunan nilai yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Sedangkan Unit Usaha Syariah menerapkan PBI No.13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah".

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. 1% dari aktiva produktif yang digolongkan Lancar, di luar penempatan pada Bank Indonesia, Obligasi Pemerintah, instrumen hutang lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan aktiva produktif yang dijamin dengan agunan tunai;
- b. 5% dari aktiva produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan;
- c. 15% dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan;
- d. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan; dan
- e. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses account. Recoveries of written-off loans from previous years are recorded as other operating income. Recovery of Sharia Financing/Receivables previously written off is recorded as an addition to the allowance for impairment losses in the current year.

In compliance with Bank Indonesia (OJK), Bank implements Bank Indonesia Regulation No. 14/15/PBI/2012 dated October 24, 2012 about "Assessment of Commercial Banks' Asset Quality" as a guideline to calculate required minimum allowance for impairment losses based on Bank Indonesia Regulation. Whereas Sharia Business Units applies Bank Indonesia Regulation No.13/13/PBI/2011 dated March 24, 2011 on "Asset Quality Assessment for Sharia Commercial Banks and Business Units".

The minimum allowance to be provided in accordance with Bank Indonesia Regulation is as follows:

- a. 1% of earning assets classified as Current, excluding placements with Bank Indonesia, Government Bonds, other debt instruments issued by the Government of the Republic of Indonesia and earning assets secured by cash collateral;
- b. 5% of earning assets classified as Special Mention, net of deductible collateral;
- c. 15% of earning assets classified as Sub-standard, net of deductible collateral;
- d. 50% of earning assets classified as Doubtful, net of deductible collateral; and
- e. 100% of earning assets classified as Loss, net of deductible collateral.

The criterias for assessment of the value of collateral that can be deducted in the calculation of allowance for impairment losses are based on Bank Indonesia Regulations.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011) tentang "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan Bank lain merupakan diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

g. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011) tentang "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa *deposit facility* dan *deposit facility* syariah, sedangkan penempatan pada bank lain berupa deposito berjangka dan sertifikat investasi *mudharabah*.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

h. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah

Efek-efek terdiri dari surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi dan penyertaan reksadana.

Obligasi Pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia termasuk obligasi rekapitalisasi yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka rekapitalisasi bank umum.

Efek-efek syariah diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo.

Sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011) tentang "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", efek-efek dan obligasi Pemerintah pada awalnya disajikan sebesar nilai wajar. Setelah pengakuan awal, efek-efek dan obligasi Pemerintah dicatat sesuai kategorinya, yaitu dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual atau nilai wajar melalui laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

In accordance with the SFAS No. 55 (Revised 2011), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", Current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses. Current accounts with Bank Indonesia and other banks classified under loans and receivables.

g. Placements with Bank Indonesia and other banks

In accordance with the SFAS No. 55 (Revised 2011), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", placements with Bank Indonesia and other banks represent placements of funds in Bank Indonesia in the form of deposit facility and sharia deposit facility, whereas placement with other banks is in the form of time deposit and investment certificate mudharabah.

Placements with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses. Placements with Bank Indonesia and other banks are classified as loans and receivables.

h. Securities and Government bonds

Securities consist of securities traded in the capital market and money market, such as Bank Indonesia Certificates (SBI), bonds, and mutual funds.

Government bonds are bonds issued by the Indonesian Government including recapitalization bonds that are issued by the Government for general bank recapitalization.

Sharia securities are classified as held-to-maturity investments.

In accordance with the SFAS No. 55 (Revised 2011), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", securities and Government bonds are initially measured at fair value. Subsequently, securities and Government bonds are accounted for depending on their classification as held-to-maturity, available-for-sale or fair value through profit or loss.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Pengukuran efek-efek dan obligasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

1. Efek-efek dan obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Bank tidak mengklasifikasikan efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dan obligasi Pemerintah sebagai aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya Bank telah menjual atau mereklasifikasi efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo dan obligasi Pemerintah dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan (more than insignificant) sebelum jatuh tempo selain dari pada penjualan atau reklasifikasi yang telah dijelaskan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2011) yang dapat diaplikasikan dalam periode yang relevan.

2. Efek-efek dan obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai investasi tersedia untuk dijual dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi komprehensif menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas efek-efek dan obligasi Pemerintah diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Perubahan nilai wajar lainnya diakui langsung dalam ekuitas sampai efek-efek dan obligasi Pemerintah dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana akumulasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

3. Efek-efek dan obligasi Pemerintah dalam kategori nilai wajar melalui laba rugi dinyatakan pada nilai wajar.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun berjalan. Pendapatan bunga dari efek-efek dan obligasi Pemerintah dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif sesuai dengan persyaratan dalam kontrak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Securities and Government bonds (continued)

The measurement of securities and Government bonds are based on the classification of the securities as follows:

1. Held-to-maturity securities and Government bonds are carried at amortized cost using the effective interest method.

The Bank does not classify held-to-maturity securities and Government bonds as held-to-maturity financial assets if the bank has, during the current financial year or during the two preceding years, sold or reclassified more than an insignificant amount of held-to-maturity securities or Government bonds prior to maturity other than sales or reclassifications defined in SFAS No. 55 (Revised 2011) applicable in the relevant period.

2. Securities and Government bonds which are classified under available-for-sale investments are stated at fair value. Interest income is recognized in the statement of comprehensive income using the effective interest method. Foreign exchange gains or losses on available-for-sale securities and Government bonds are recognized in the statement of comprehensive income. Other fair value changes are recognized directly in equity until the securities and Government bonds are sold or impaired, whereby the cumulative gains and losses previously recognized in the equity are recognized in the statement of comprehensive income.

3. Fair value through profit or loss securities and Government bonds are carried at fair value.

Unrealized gains or losses resulting from changes in fair values are recognized in the current year statements of comprehensive income. The interest income from securities and Government bonds is recorded in the statement of comprehensive income according to the terms of the contract.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah (lanjutan)

3. Efek-efek dan obligasi Pemerintah dalam kategori nilai wajar melalui laba rugi dinyatakan pada nilai wajar (lanjutan)

Atas penjualan portofolio efek-efek dan obligasi Pemerintah untuk nilai wajar melalui laba rugi, perbedaan antara harga jual dengan nilai pasar wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan pada tahun dimana efek-efek dan obligasi Pemerintah tersebut dijual.

Efek-efek dan obligasi Pemerintah yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi, nilai wajar tersebut umumnya ditentukan dengan mengacu pada harga penawaran pasar yang terjadi di bursa efek pada tanggal yang terdekat dengan tanggal laporan posisi keuangan, kemudian disesuaikan dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Untuk efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tidak mempunyai harga penawaran pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek dan obligasi Pemerintah ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya adalah sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efek-efek dan obligasi Pemerintah tersebut.

i. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan dengan pihak penerima kredit dan mewajibkan pihak penerima kredit untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

Sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011), tentang "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", kredit yang diberikan (termasuk kredit yang diberikan dalam pinjaman sindikasi) pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut. Setelah pengakuan awal kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Securities and Government bonds (continued)

3. Fair value through profit or loss securities and Government bonds are carried at fair value (continued)

Upon sale of portfolio of fair value through profit or loss securities and Government bonds, the difference between the selling price and the fair value is recognized as a gain or loss in the year when the securities and Government bonds are sold.

Securities and Government bonds that are actively traded in organized financial markets, fair value is generally determined by reference to quoted market bid prices by the stock exchange at the date close to the statement of financial position date, adjusted for transaction costs necessary to realize the assets. For securities and Government bonds where there is no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which is substantially the same or is calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of securities and Government bonds.

i. Loans

Loans represent the lending of money or equivalent receivables under contracts with borrowers, where the borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period of time.

In accordance with the SFAS No. 55 (Revised 2011), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", loans (including loans under syndication) are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable to obtaining the financial asset. After initial recognition, loans are measured at amortized cost using the effective interest method, net of allowance for impairment losses.

Loans are classified under loans and receivables.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Kredit yang diberikan dalam pinjaman sindikasi ataupun penerusan kredit dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

Restrukturisasi kredit

Restrukturisasi kredit meliputi adanya perpanjangan jangka waktu pembayaran dan ketentuan kredit yang baru.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Penjualan Kredit Pemilikan Rumah (Sekuritisasi KPR)

Dalam rangka sekuritisasi atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah ("kumpulan tagihan"), Bank telah melakukan penjualan atas kumpulan tagihan kepada pihak ketiga (sekuritisasi KPR).

Atas sekuritisasi kredit kepemilikan rumah (efek beragunan aset), Bank mengakuinya sebagai penjualan atas tagihan KPR tersebut dikarenakan Bank telah memindahkan risiko dan manfaat atas kepemilikannya kepada pihak lawan. Oleh karena itu, pada tanggal efektif sekuritisasi, Bank menghentikan pengakuan atas kumpulan tagihan KPR yang termasuk dalam sekuritisasi.

j. Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah

Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, yang timbul dari transaksi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil antara bank dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu. Piutang tersebut meliputi piutang *murabahah*, piutang *istishna* dan *rahn*, untuk pembiayaan meliputi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Loans (continued)

Loans under syndication or channelling are stated at the principal amount equal to the risk portion assumed by the Bank.

Loan restructuring

Loan restructuring may involve extending the payment arrangements and new loan conditions.

Restructured loans are stated at the lower of carrying value on the date of restructuring or value of the future cash receipts after the restructuring. Losses resulting from the difference between the carrying value on the date of restructuring the present value of future cash receipts after the restructuring is recognized in the statement of comprehensive income. After the restructuring, all future cash receipts specified by the new terms are recorded as a return of principal loans and interest income in accordance with the terms of the restructuring.

Sales of Housing Loans (Bank's Mortgage Securitization)

In connection with the Bank's mortgage securitization on its housing loans ("pool of receivables"), the Bank sold its pool of receivables to third parties (Bank's mortgage securitization).

For mortgage loan securitization (asset-backed securities), the Bank considered it as a true sale as it transferred the risk and rewards of ownership to counterparty. Hence, at the effective date of the securitization, the Bank derecognized the pool of receivables covered by the securitization.

j. Sharia financing/receivables

*Sharia financing/receivables is receivables from providing funds or other similar form of receivables arising from transactions carried out based on sale or purchase arrangements and profit sharing between the Bank and other parties for a certain period of time. Such receivables consist of receivables arising from *murabahah* transactions, *istishna* transactions dan *rahn* transactions, for financing consist of *mudharabah* financing and *musyarakah* financing.*

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah (lanjutan)

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Bank, dimana Bank membiayai kebutuhan investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Sebelum 1 Januari 2014, sesuai PSAK 102 (2007) tentang Akuntansi *Murabahah*, piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan yakni saldo piutang dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Marjin *murabahah* yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*.

Setelah tanggal 1 Januari 2014, sesuai PSAK 55 (Revisi 2011), tentang "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Mudharabah merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan *nisbah* (pre-determined ratio) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, sesuai PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil review oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Sharia financing/receivables (continued)

Murabahah is a sale or purchase contract between the customer and Bank, whereby Bank finances the investment and working capital needs of the customer sold with a principal price plus a certain margin that is mutually informed and agreed. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

Before January 1, 2014, in accordance with the SFAS 102 (2007), Accounting for *Murabahah*, *murabahah* receivables are stated at net realizable value, which is, the balance of the receivables less allowance for impairment losses. Deferred *murabahah* margin is presented as a contra account of *murabahah* receivables.

After January 1, 2014, In accordance with the SFAS No. 55 (Revised 2011), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", *murabahah* receivables initially measured at fair value plus direct attributable transaction cost and is an additional cost to obtain the respected financial assets, and after the initial recognition *murabahah* receivables are measured at amortized cost using the effective margin method less any allowance for impairment losses.

Mudharabah represents joint financing between the Bank as the owner of the fund (*shahibul maal*) and the customer as the business executor (*mudharib*), during a certain period. Distribution of profit sharing on a project or other business activity is determined in accordance with the mutually agreed *nisbah* (pre-determined ratio). At statement of financial position date, in accordance with the SFAS 105, Accounting for *Mudharabah*, *mudharabah* financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review on the financing quality.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah (lanjutan)

Musarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, sesuai dengan PSAK No. 106 tentang Akuntansi Musarakah, pembiayaan *musarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil review oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Istishna adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Sesuai dengan PSAK No. 104 tentang Akuntansi Istishna, piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Rahn merupakan transaksi menggadaikan barang atau harta dari nasabah kepada Bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta yang digadaikan tersebut dinilai sesuai harga pasar dikurangi persentase tertentu dan sebagai imbalannya Bank mendapatkan *ujrah* (imbalan) dan diakui berdasarkan basis akrual.

k. Aset tetap

Sesuai dengan PSAK No. 16 (Revisi 2011) tentang aset tetap, aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Sharia financing/receivables (continued)

Musarakah is a partnership contract among fund owners (*musarakah partners*) to contribute funds and conduct business on a joint basis through partnership with profit sharing based on a predetermined ratio, while loss is shouldered proportionally based on the capital contribution. At statement of financial position date, in accordance with the SFAS No. 106, Accounting for Musarakah, *musarakah* financing is stated at the outstanding balance of the financing less allowance for impairment losses based on the management's review on the financing quality.

Istishna is a purchase agreement between an *al-mustashni* (buyer) and an *al-shani* (manufacturer also acting as the seller). Based on the contract, the buyer orders the manufacturer to make or to supply *al-mashnu* (goods ordered) according to the specifications required by the buyer and to sell them at an agreed price. In accordance with the PSAK No. 104, Accounting for Istishna, *Istishna* receivables are presented based on the outstanding billings to the final buyer less allowance for impairment losses.

Rahn is the pawn of goods or assets by customers to the Bank with the money as compensation. Goods or assets being pawned are valued in accordance with the market price less a certain percentage and the Bank gets *ujrah* (benefits) in return which are recognized on an accrual basis.

k. Premises and equipment

In accordance with the PSAK No. 16 (Revised 2001), fixed assets, all premises and equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Aset tetap (lanjutan)

k. Premises and equipment (continued)

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Subsequent to initial recognition, premises and equipment are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar, kecuali:

Premises and equipment acquired in exchange for a non-monetary asset or for a combination of monetary and non-monetary assets are measured at fair values, unless:

- (i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau
- (ii) nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

- (i) the exchange transaction lacks commercial substance, or*
- (ii) the fair value of neither the assets received nor the assets given up can be measured reliably*

Penyusutan bangunan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) sedangkan peralatan kantor dan kendaraan bermotor dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (double-declining balance method) berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Depreciation of buildings is computed using the straight-line method while depreciation of office furniture and fixtures, and motor vehicles is computed using the double-declining balance method, based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/ Years	Persentase penyusutan per tahun/ annual depreciation rates	
Bangunan	10 - 20	5% - 10%	<i>Buildings</i>
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	4 - 8	25% - 50%	<i>Office furniture and fixtures, and, motor vehicles</i>

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

The carrying amounts of premises and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

Pada setiap akhir tahun buku, manajemen melakukan pengkajian ulang atas nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of premises and equipment are reviewed by the management and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of each year, if necessary.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diperhitungkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

An item of premises and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of comprehensive income in the period such asset is derecognized.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Aset tetap (lanjutan)

k. Premises and equipment (continued)

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Land are stated at cost and not depreciated.

Jika biaya perolehan tanah termasuk biaya pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi, serta manfaat yang diperoleh dari pembongkaran, pemindahan dan pemugaran tersebut terbatas, maka biaya tersebut disusutkan selama periode manfaat yang diperolehnya. Dalam beberapa kasus, tanah itu sendiri memiliki umur manfaat yang terbatas, dalam hal ini, tanah tersebut disusutkan dengan cara yang mencerminkan manfaat yang diperoleh dari tanah tersebut.

If the cost of land includes the costs of site dismantlement, removal and restoration, and the benefits from the site dismantlement, removal and restoration is limited, that portion of the land asset is depreciated over the period of benefits obtained by incurring those costs. In some cases, the land itself may have a limited useful life, in which case it is depreciated in a manner that reflects the benefits to be derived from it.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

Repairs and maintenance is charged to the profit or loss as incurred. The cost of major renovation and restoration is capitalized to the carrying amount of the related premises and equipment when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Constructions in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Premises and Equipment" account when the construction is completed and available for intended use. Assets under construction are not depreciated as these are not yet available for use.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap". Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak hukum atau umur ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

The legal cost of land rights in the form of Business Usage Rights ("Hak Guna Usaha" or "HGU"), Building Usage Right ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") and Usage Rights ("Hak Pakai" or "HP") when the land was initially acquired are recognized as part of the cost of the land under the "Premises and Equipment". The extension or the legal renewal costs of land rights were recognized as intangible assets and were amortized over the shorter of the rights' legal life and land's economic life.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Bank akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut sesuai dengan PSAK No. 48 tentang Penurunan Nilai Aset.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi komprehensif sebagai "rugi penurunan nilai".

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Bank menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh pengali penilaian atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Cadangan kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi komprehensif sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Impairment of non-financial assets

The Bank assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, Bank makes an estimate of the asset's recoverable amount in accordance with the SFAS No. 48, Impairment of assets.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Unit (CGU)'s fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the statement of comprehensive income as "impairment losses".

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used by Bank to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Allowance for impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the statements of comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method).

n. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau diterimanya perintah pemindahbukuan dari nasabah maupun dari bank lain.

Sesuai PSAK 55 (Revisi 2011), tentang "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", liabilitas segera dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya.

o. Simpanan

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek atau pemindahbukuan dengan bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya. Giro dinyatakan sebesar nilai titipan pemegang giro di Bank.

Giro *Wadiah* merupakan titipan dana pihak ketiga yang setiap saat tersedia untuk dikembalikan dan dapat diberikan bonus sesuai kebijakan Bank. Giro *Wadiah* dinyatakan sebesar nilai titipan pemegang giro di Bank.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan nasabah sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan dinyatakan sebesar nilai kewajiban pada pemilik tabungan.

Tabungan *Wadiah* merupakan simpanan pihak lain yang mendapatkan bonus berdasarkan kebijaksanaan Bank. Tabungan *Mudharabah* merupakan dana pihak ketiga yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati. Tabungan *Wadiah* dan *Mudharabah* dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

n. Current liabilities

This account is recorded at the time the obligations occur or upon receipt of transfer orders from customers or other banks.

In accordance with the SFAS No. 55 (Revised 2011), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", current liabilities are stated at amortized cost and classified as other financial liabilities.

o. Deposits

Demand deposits represent customer funds which can be used as payment instruments, and can be withdrawn at any time through cheque, or transferred through current account drafts and other transfer instruction media. Demand deposits are stated at the amounts entrusted to the Bank by the depositors.

Wadiah demand deposits represent entrusted third party funds which are available for withdrawal at any time and earn bonus based on the Bank's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amounts invested by the depositors in the Bank.

Savings deposits represent customer funds which can be withdrawn by the depositors only under certain conditions. Savings deposits are stated at the agreed amounts due to the depositors.

*Wadiah savings deposits represent third party funds which earn bonus based on the Bank's policy. Mudharabah savings deposits represent third party funds which earn profit sharing from the Bank's revenue for the use of funds in accordance with the agreed *nisbah*. Wadiah and Mudharabah savings deposits are stated at the amounts invested by the depositors in the Bank.*

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Simpanan (lanjutan)

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan nasabah pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Bank, sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

Deposito berjangka *Mudharabah* merupakan simpanan pihak ketiga dengan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati di muka. Pemegang deposito hanya bisa menarik deposito tersebut pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank. Deposito berjangka *Mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Bank, sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya dan sesuai PSAK 55 (Revisi 2011), tentang "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali simpanan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah dan dana *syirkah* temporer yang dinyatakan sebesar kewajiban Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan simpanan nasabah, dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

p. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain merupakan kewajiban kepada bank lain, dalam bentuk tabungan, giro dan deposito berjangka.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain dan sesuai PSAK 55 (Revisi 2011), tentang "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Deposits (continued)

Time deposits represent customer funds which can be withdrawn by the depositors only on specific maturity dates based on the agreements between the depositors and the Bank. Time deposits are stated at the nominal amounts stated in the certificates issued by the Bank in accordance with the agreements between the depositors and the Bank.

Mudharabah time deposits represent third party placements in which the profit sharing is in accordance with the nisbah as determined and agreed in advance. Depositors are entitled to withdraw the funds at specific dates in accordance with agreements between the depositors and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at the amounts stated in the certificates issued by the Bank in accordance with the agreements between the depositors and the Bank.

Deposits from customers are classified as other financial liabilities and in accordance with the SFAS No. 55 (Revised 2011), "Financial Instruments: Recognition and Measurement" are measured at amortized cost using the effective interest method, except for sharia deposits and temporary syirkah fund which are stated at the Bank's liability to the customers. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.

p. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to other banks, in the form of savings deposits, demand deposits and time deposits.

Deposits from other banks are classified as other financial liabilities and in accordance with the SFAS No. 55 (Revised 2011), "Financial Instruments: Recognition and Measurement" are measured at amortized cost using the effective interest method except for sharia deposits which are stated at the Bank's liability amount to the customer. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the total deposits received.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali

Sesuai PSAK 55 (Revisi 2011), tentang "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai biaya dibayar di muka dan diakui sebagai beban selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode suku bunga efektif. Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

r. Surat-surat berharga yang diterbitkan

Surat-surat berharga yang diterbitkan Bank adalah Obligasi dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD).

Sesuai PSAK 55 (Revisi 2011), tentang "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", surat berharga yang diterbitkan diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

s. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima oleh Bank dari Bank Indonesia, Pemerintah dan lembaga pembiayaan lain dengan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian pinjaman.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Securities sold under repurchase agreements

In accordance with the SFAS No. 55 (Revised 2011), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", securities sold under agreements to repurchase are presented as liabilities in the statement of financial position, at the repurchase price, net of unamortized prepaid interest. The difference between the selling price and the repurchase price is treated as prepaid expenses and recognized as expense over the period starting from when those securities are sold until they are repurchased using the effective interest method. Securities sold under agreements to repurchase are classified as other financial liabilities measured at amortized cost.

r. Securities issued

Securities issued by Bank consist of Bonds and *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD).

In accordance with the SFAS No. 55 (Revised 2011), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", securities issued are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method (EIR). Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

s. Fund borrowings

Fund borrowings are funds received by the Bank from Bank Indonesia, the Government and other financing institutions with payment obligation based on borrowing agreements.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Pinjaman yang diterima (lanjutan)

Sesuai PSAK 55 (Revisi 2011), tentang "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

t. Modal saham

Modal saham diukur pada nilai nominal untuk semua saham yang diterbitkan.

u. Saldo laba

Saldo laba merupakan saldo kumulatif dari hasil operasi Bank, pembagian dividen, penyesuaian periode sebelumnya, efek dari perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian modal lainnya.

v. Pendapatan dan beban bunga

Sesuai PSAK 55 (Revisi 2011), tentang "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Fund borrowings (continued)

In accordance with the SFAS No. 55 (Revised 2011), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", fund borrowings are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method (EIR). Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

t. Capital stock

Capital stock is measured at par value for all shares issued.

u. Retained earnings

Retained earnings represent the cumulative balance of the Bank's results of operations, dividend distributions, prior period adjustments, effects of the changes in accounting policy and other capital adjustments.

v. Interest income and expense

In accordance with the SFAS No. 55 (Revised 2011), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", Interest income and expenses are recognised in the statement of comprehensive income using the effective interest rate method. The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument (or, where appropriate, a shorter period) to obtain the carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in the contract that are an integral part of the effective interest rate.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Jika aset keuangan atau nilai kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan sebagai akibat cadangan kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai.

w. Pendapatan provisi dan komisi

Sesuai PSAK 55 (Revisi 2011), tentang "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi komprehensif.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu dan/atau terkait dengan pemberian suatu jasa, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya.

x. Pendapatan bagi hasil dan beban bonus secara syariah

Pendapatan bagi hasil secara syariah merupakan pendapatan *istishna*, margin *murabahah* dan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta aset produktif lainnya yang diakui dengan menggunakan metode akrual. Beban secara syariah merupakan distribusi bonus dan bagi hasil kepada pemilik dana yang diakui berdasarkan metode akrual.

Pendapatan *Istishna* diakui apabila telah terjadi penyerahan barang.

Sebelum 1 Januari 2014, sesuai PSAK 102 (2007) tentang Akuntansi Murabahah, pengakuan pendapatan transaksi *murabahah* dengan pembayaran tangguh atau secara angsuran dilakukan selama periode akad sesuai dengan metode efektif (anuitas).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Interest income and expense (continued)

If a financial asset or group of similar financial assets' value has diminished as a result of allowance for impairment losses, interest income subsequently obtained is recognized based on the interest rate used to discount future cash flows in calculating allowance for impairment losses.

w. Fees and commissions

In accordance with the SFAS No. 55 (Revised 2011), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", fees and commissions directly related to lending activities, or fee and commission income which relates to a specific period, is amortized over the term of the contract using the effective interest method and classified as part of interest income in the statement of comprehensive income.

Fees and commissions that are not related to the credit activity or a period of time and/or associated with the service provided, are recognized as revenue at the time of the transaction and recorded under other operating income.

x. Sharia profit sharing income and bonus expense

Sharia profit sharing income represents income from istishna, margin from murabahah and profit-sharing on mudharabah and musyarakah financing and other earning assets which are recognized on the accrual basis. Sharia expense represents the bonus distribution and profit-sharing to fund owners which are recognized on an accrual basis.

Income from istishna is recognized at the date of transfer of assets.

Prior to January 1, 2014, in accordance with the SFAS 102 (2007), Accounting for Murabahah, murabahah income by deferred payment or by installment is recognized during the period of the contract based on effective method (annuity).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

x. Pendapatan bagi hasil dan beban bonus secara syariah (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2014, sesuai PSAK 55 (Revisi 2011), tentang "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati.

y. Imbalan kerja

Bank menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2010) tentang imbalan kerja.

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank, dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut. Pembayaran dikurangkan dari utang iuran. Iuran terutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

x. Sharia profit sharing income and bonus expense (continued)

Since January 1, 2014, In accordance with the SFAS No. 55 (Revised 2011), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", income from *murabahah* receivables using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the *murabahah* receivables. When calculating the effective margin, Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

Mudharabah and *musyarakah* income are recognized when cash is received or in a period where the right of revenue sharing is due based on agreed portion (nisbah).

y. Employee benefits

The Bank adopted SFAS No. 24 (Revised 2010), employee benefit.

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short-term compensated leaves, bonuses and other non-monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined contribution plan

Contribution payable to a pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan is accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees. Actual payments are deducted from the contribution payable. Contribution payable is measured using undiscounted amounts.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

y. Imbalan kerja (lanjutan)

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pasca-kerja dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang menjadi peserta program pensiun Bank. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan persyaratan minimum Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003, mana yang lebih tinggi.

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

Penyisihan biaya jasa masa lalu ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa kerja rata-rata yang diharapkan dari karyawan yang memenuhi syarat tersebut. Selain itu, penyisihan untuk biaya jasa kini dibebankan langsung pada operasi tahun/periode berjalan. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset dana pensiun, pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang melebihi batas 10% tersebut diakui atas dasar metode garis lurus selama ekspektasi rata-rata sisa masa kerja karyawan yang memenuhi syarat.

Keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu dari imbalan kerja jangka panjang lainnya langsung diakui pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

z. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang terjadi diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Employee benefits (continued)

Defined benefit plan and other long-term employee benefits

The post-employment benefits are accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees. The benefits are determined based on the Bank's regulations and the minimum requirements of Labor Law No. 13/2003, whichever is higher.

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using the Projected Unit Credit Method.

Provisions made pertaining to past service costs are deferred and amortized over the expected average remaining service years of the qualified employees. Furthermore, provisions for current service costs are directly charged to operations of the current year/period. Actuarial gains or losses arising from adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses at the end of the previous reporting period exceed 10% of the present value of the defined benefit obligations or 10% of the fair value of plan assets, at that date. The actuarial gains or losses in excess of the aforementioned 10% threshold are recognized on a straight-line method over the expected average remaining service years of the qualified employees.

Actuarial gains or losses and past service costs from other long-term employee benefits are recognized directly in the statement of comprehensive income of the current period.

z. Foreign currency transactions and balances

Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At statement of financial position dates, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the reporting (closing) rates set by Bank Indonesia that is middle rate which is the average of bid rate and ask rate based on Reuters at 16.00 WIB (West Indonesian local time) prevailing on that date. The resulting gains or losses are recognized in the statement of comprehensive income for the current year.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

z. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, kurs yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):

	2014	2013	2012
1 Dolar Amerika Serikat	12.385,00	12.170,00	9.637,50
1 Poundsterling Inggris	19.288,40	20.110,93	15.514,93
1 Euro Eropa	15.053,35	16.759,31	12.731,62
1 Yen Jepang	103,56	115,75	111,77
1 Dolar Singapura	9.376,19	9.622,08	7.878,61

1 United States Dollar
1 British Poundsterling
1 European Euro
1 Japanese Yen
1 Singapore Dollar

aa. Pajak penghasilan

Bank menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2010) tentang pajak penghasilan.

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Beban Pajak Penghasilan, Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Foreign currency transactions and balances (continued)

As of December 31, 2014, 2013, and 2012, the exchange rates used in translating the foreign currencies into Rupiah are as follows (full Rupiah):

aa. Income tax

The Bank adopted SFAS No. 46 (Revised 2010), income tax.

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to the extent that it is probable for temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to be utilized in deducting future taxable profit. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statement financial position date.

The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as "Income Tax Expense - Deferred" and included in the determination of net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aa. Pajak penghasilan (lanjutan)

Koreksi atas liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

ab. Segmen operasi

Bank menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009) tentang segmen operasi.

Informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana Bank terlibat dalam lingkungan ekonomi dimana Bank beroperasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis dimana Bank terlibat (segmen usaha). Segmen pendapatan, biaya, hasil, aset dan liabilitas, termasuk bagian yang dapat diatribusikan langsung kepada segmen, serta yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Income tax (continued)

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined.

Assets and liabilities on deferred tax and current tax can be offset if there is a legal enforceable right to offset.

ab. Segment reporting

The Bank adopted SFAS No. 5 (Revised 2010), operation segment.

Segment information is disclosed to enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the Bank is involved in and the economic environment where the Bank operates.

An operating segment is a component of an entity:

- a) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);*
- b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and*
- c) for which discrete financial information is available.*

The Bank identifies and discloses financial information based on the business activities in which the Bank engages (business segments) in. Segment revenues, expenses, income, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ac. Laba per saham dasar dan dilusian

ac. Basic and diluted earnings per share

Bank menerapkan PSAK No. 56 (Revisi 2011) tentang laba per saham.

The Bank adopted SFAS No. 56 (Revised 2011), earning per share.

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar.

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year attributable to ordinary equity holders by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Laba per saham dilusian dihitung setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan asumsi bahwa seluruh opsi saham karyawan dieksekusi pada harga yang telah ditentukan pada saat penerbitan opsi saham tersebut.

Diluted earnings per share is computed after making the necessary adjustments to the weighted average number of common shares outstanding assuming full exercise of employee stock options at the time of the issuance using the determined exercise price.

ad. Biaya emisi penerbitan saham

ad. Shares issuance costs

Biaya-biaya emisi efek yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang pada akun "Tambahan Modal Disetor - Neto", sebagai bagian dari Ekuitas pada laporan posisi keuangan.

Costs related to the public offering of shares (including pre-emptive rights issue) are deducted from the proceeds and presented as a deduction from the "Additional Paid-in-Capital - Net" account, under Equity section in the statement of financial position.

ae. Opsi Saham

ae. Stock Options

Bank menerapkan PSAK No. 53 (Revisi 2010) tentang pembayaran berbasis saham.

The Bank adopted SFAS No. 53 (Revised 2010), share based payment.

Bank telah memberikan opsi saham kepada Direksi dan pekerja pada posisi dan jabatan tertentu berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan. Biaya kompensasi saham pada penerbitan dihitung dengan menggunakan nilai wajar dari opsi saham tersebut dan diakui dalam akun "Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan" menggunakan metode garis lurus selama masa tunggu (vesting period). Akumulasi dari biaya kompensasi saham diakui sebagai "Opsi Saham" dalam bagian ekuitas.

The Bank has granted stock options to Directors and employees of certain positions and levels based on established criteria. Cost of stock compensation at the issuance date is calculated using the fair value of the stock options and is recognized as part of "Salaries and Employee Benefits Expense" using the straight-line method over the vesting period. The accumulation of the stock compensation cost is recognized as "Stock Options" in the equity.

Penentuan nilai wajar dari opsi saham yang diberikan dihitung dengan menggunakan model penentuan harga opsi *Binomial-tree* (Binomial-tree option pricing model).

The fair value of the stock options granted are calculated using the Binomial-tree option pricing model.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

af. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif dan komitmen dan kontinjensi

Bank menerapkan PSAK No. 57 (Revisi 2009) tentang provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) No. 13/658/DPNP/DPnP tanggal 23 Desember 2011, Bank tidak diwajibkan lagi untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non-produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi), namun Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku (kecuali Unit Usaha Syariah berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011).

ag. Provisi

Provisi diakui jika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

ah. Perubahan atas kebijakan akuntansi dan pengungkapan

Bank telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2014, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan Bank, yaitu PSAK No. 102 (Revisi 2013), "Murabahah", yang merupakan penyempurnaan dari PSAK No. 102 yang diterbitkan pada tahun 2008, perihal kriteria transaksi murabahah sehubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

Dampak dari penerapan PSAK No. 102 (revisi 2013) terhadap penurunan nilai aset keuangan yang timbul dari transaksi *murabahah* telah dibebankan sepenuhnya dalam laporan laba rugi komprehensif tahun 2014 atas dasar materialitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

af. Allowance for impairment losses on non-earning assets and commitments and contingencies

The Bank adopted SFAS No. 57 (Revised 2009), provision, contingent liability and contingent asset..

In accordance with Bank Indonesia Circular Letter (SE-BI) No. 13/658/DPNP/DPnP dated December 23, 2011, the Bank is not required to provide an allowance for impairment losses on non-earning assets and administrative account transactions (commitments and contingencies), but the Bank should still calculate the allowance for impairment losses in accordance with the applicable accounting standards (except for Sharia Business Units based on Bank Indonesia Regulation No.13/13/PBI/2011 dated March 24, 2011).

ag. Provisions

Provisions are recognized when the Bank has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

ah. Changes in accounting policy and disclosures

The Bank adopted the revised accounting standard on January 1, 2014, which is considered relevant to the Bank's financial statements. The revised standard is SFAS No. 102 (Revised 2013), "Murabahah", which represents improvement of SFAS No. 102 issued in 2008, regarding criteria of murabahah transaction in relation with the recognition, measurement, presentation and disclosure.

The impact of the SFAS No. 102 (revised 2013) on impairment of financial assets arising from murabahah transactions have been fully charged to 2014 statement of comprehensive income on the basis of materiality.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Bank tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Bank menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2011) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Bank seperti diungkapkan pada Catatan 2.

Nilai wajar instrumen keuangan

Saat nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diperoleh dari pasar aktif, maka akan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian intern dengan menggunakan model penilaian pasar yang berlaku umum. Input untuk model ini, jika memungkinkan, diambil dari pasar yang dapat diobservasi, namun jika tidak dapat dilakukan, *judgment* dibutuhkan dalam menentukan nilai wajar.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Bank's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amounts of the asset and liability affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the Bank's financial statements:

Going concern

The Bank's management has made an assessment of the Bank's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Bank has the resources to continue its business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt to the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continues to be prepared on the going concern basis.

Classification of financial assets and financial liabilities

The Bank determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 55 (Revised 2011). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Bank's accounting policies disclosed in Note 2.

Fair value of financial instruments

Where the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the statement of financial position cannot be derived from active markets, these are determined using internal valuation techniques using generally accepted market valuation models. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

Surat berharga dengan klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo membutuhkan *judgment* yang signifikan. Dalam membuat *judgment* ini, Bank mengevaluasi intensi dan kemampuan untuk memiliki investasi tersebut hingga jatuh tempo. Jika Bank gagal untuk memiliki investasi ini hingga jatuh tempo selain dalam kondisi-kondisi tertentu sebagai contoh, menjual dalam jumlah yang insignifikan saat mendekati jatuh tempo, Bank harus mereklasifikasi seluruh portofolio tersebut menjadi surat berharga yang tersedia untuk dijual. Surat berharga yang tersedia untuk dijual tersebut akan diukur pada nilai wajar dan bukan menggunakan biaya yang diamortisasi.

Aset keuangan yang tidak memiliki harga pasar

Bank mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah nilai tersebut dikutip atau tidak di pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi pada apakah aset keuangan yang dikutip di pasar aktif adalah penentuan apakah harga pasar dapat segera dan secara teratur tersedia, dan apakah mereka mewakili harga aktual dan teratur terjadi transaksi pasar secara *arms-length*.

Kontinjensi

Bank sedang terlibat dalam proses hukum. Perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum Bank didasarkan pada analisis hasil yang potensial. Manajemen tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya seperti yang diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued)**

Judgments (continued)

Held-to-maturity securities

The classification under held-to-maturity securities requires significant judgment. In making this judgment, the Bank evaluates its intention and ability to hold such investments to maturity. If the Bank fails to keep these investments to maturity other than in certain specific circumstances for example, selling an insignificant amount close to maturity, it will be required to reclassify the entire portfolio as available-for-sale securities. The available-for-sale securities would therefore be measured at fair value and not at amortized cost.

Financial assets not quoted in an active market

The Bank classifies financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available, and whether those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis.

Contingencies

The Bank is currently involved in legal proceedings. The estimate of the probable cost for the resolution of claims has been developed in consultation with the aid of the external legal counsel handling the Bank's defense in this matter and is based upon an analysis of potential results. Management does not believe that the outcome of this matter will affect the results of operations. It is probable, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates or in the effectiveness of the strategies relating to these proceedings.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimating uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statement were prepared.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit dan pembiayaan/piutang syariah

Bank menelaah portofolio pinjaman dan piutang setiap tahun untuk menilai penurunan nilai dengan memperbaharui cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk selama periode yang diperlukan berdasarkan analisis berkelanjutan dan pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas kredit.

Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi komprehensif, Bank membuat penilaian, apakah terdapat data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang dapat diukur dalam laporan perkiraan arus kas masa depan dari portofolio pinjaman sebelum penurunan tersebut dapat diidentifikasi secara individual dalam portofolio tersebut.

Bukti seperti ini dapat termasuk data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan yang merugikan pada status pembayaran kelompok debitur, atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok. Bank menggunakan perkiraan dalam menentukan jumlah dan waktu dari arus kas masa depan ketika menentukan tingkat cadangan kerugian yang diperlukan. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah cadangan kerugian di masa yang akan datang.

Penurunan nilai untuk surat berharga

Bank menentukan bahwa surat berharga memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables

The Bank reviews its loan portfolio and receivables to assess impairment on an annual basis with updating allowance for impairment losses made during the intervals as necessary based on the continuing analysis and monitoring of individual accounts by credit officers.

In determining whether an impairment loss should be recorded in the statement of comprehensive income, the Bank makes judgments as to whether there is any observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of loans before the decrease can be identified with an individual loan in that portfolio.

This evidence may include observable data indicating that there has been an adverse change in the payment status of borrowers in a group, or national or local economic conditions that correlate with defaults on assets in the group. Bank uses estimates in the amount and timing of future cash flows when determining the level of allowance for losses required. Such estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, resulting to future changes in the amount of allowance for losses.

Impairment of debt securities

The Bank determines that securities are impaired based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Umur ekonomis dari aset tetap

Bank memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut. Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa.

Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas. Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban operasional yang diakui.

Penurunan nilai aset non keuangan

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset non-keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat dipulihkan kembali.

Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) Kinerja yang rendah secara signifikan jika dibandingkan dengan ekspektasi dari hasil operasi historis maupun proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- b) perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- c) Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Useful lives of premises and equipment

The Bank estimates the useful lives of premises and equipment based on the period over which the assets are expected to be available for use. The estimated useful lives of premises and equipment are reviewed periodically and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the assets. In addition, estimation of the useful lives of premises and equipment is based on collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in estimates brought about by changes in factors mentioned above. The amounts and timing of recorded expenses for any period would be affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of premises and equipment would increase the recorded operating expenses.

Impairment of non-financial assets

The Bank assesses impairment of non-financial assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of non-financial asset may not be recoverable.

The factors that the Bank considers important which could trigger an impairment review include the following:

- a) significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;
- b) significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
- c) significant negative industry or economic trends.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset non keuangan (lanjutan)

Bank mengakui cadangan kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Pengakuan aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal yang belum digunakan sejauh terdapat kemungkinan bahwa saldo rugi tersebut dapat dikompensasikan terhadap penghasilan kena pajak di masa yang akan datang. Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan saat dan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang seiring dengan strategi perencanaan pajak.

Bank menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.

Nilai kini atas kewajiban pensiun

Biaya atas program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuaris. Perhitungan aktuaris melibatkan penggunaan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Impairment of non-financial assets (continued)

The Bank recognizes an allowance for impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's (or Cash Generating Unit's) fair value less costs to sell and its value in use. Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the Cash Generating Unit to which the asset belongs.

Recognition of deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses and credits to the extent that it is probable that taxable income will be available against which the losses can be utilized. Significant management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of future taxable income together with future tax planning strategies.

The Bank reviews its deferred tax assets at each statement of financial position date and reduces the carrying amount to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Present value of retirement obligation

The cost of defined retirement pension plan and other post employment benefits is determined using actuarial valuations. The actuarial valuation involves making assumptions about discount rates, expected rates of return on assets, future salary increases, mortality rates and disability rate. Due to the long-term nature of these plans, such estimates are subject to significant uncertainty.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS

	31 Desember/ December 31, 2014		31 Desember/ December 31, 2013		31 Desember/ December 31, 2012	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Rupiah		918.873		923.283		694.147
Mata uang asing						
Dolar Amerika Serikat	120.221	1.489	89.518	1.089	75.270	725
Euro Eropa	4.725	71	4.725	79	5.425	69
Dolar Singapura	5.100	48		-		-
Yen Jepang	10.000	1		-		-
		1.609		1.168		794
		920.482		924.451		694.941

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebesar Rp183.269, Rp145.029, dan Rp122.114, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

The rupiah balance includes cash in ATMs (Automated Teller Machines) of Rp183,269, Rp145,029 and Rp122,114, as of December 31, 2014, 2013 and 2012, respectively.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

	31 Desember/ December 31, 2014		31 Desember/ December 31, 2013		31 Desember/ December 31, 2012	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Rupiah		9.366.753		9.852.253		7.292.939
Mata uang asing						
Dolar Amerika Serikat	384.000	4.756	534.500	6.505	508.000	4.896
		9.371.509		9.858.758		7.297.835

Dalam giro pada Bank Indonesia termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp541.680, Rp668.645, dan Rp540.044, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

Current accounts with Bank Indonesia include current accounts based on sharia banking principles amounting to Rp541,680, Rp668,645, and Rp540,044 as of December 31, 2014, 2013 and 2012, respectively.

Rasio GWM Bank (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The minimum reserve requirement ratios of the Bank (unaudited) of December 31, 2014, 2013 and 2012 are as follows:

	2014	2013	2012	
Konvensional				Conventional
Rupiah				Rupiah
Utama	8,09%	9,29%	8,15%	Primary
Sekunder	7,85%	9,07%	2,50%	Secondary
Dolar Amerika Serikat	8,39%	8,03%	8,03%	United States Dollar

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio GWM Bank (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut (lanjutan):

	2014	2013	2012
Syariah Rupiah	5,09%	8,10%	8,00%

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.

Rasio GWM pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/15/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang "Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional".

Sedangkan rasio GWM tanggal 31 Desember 2012 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang "Perubahan atas PBI No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang GWM Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing".

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, Bank harus memenuhi persyaratan GWM Utama dalam Rupiah dan mata uang asing masing-masing sebesar 8%. Untuk GWM Sekunder pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar 4% dalam Rupiah, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar 2,5% dalam Rupiah.

Rasio GWM berdasarkan prinsip syariah pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/16/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang "Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah".

Sedangkan rasio GWM berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 31 Desember 2012 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang "Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah" sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/23/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan terakhir berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/23/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

The minimum reserve ratios of the Bank (unaudited) of December 31, 2014, 2013 and 2012 are as follows (continued):

	2014	2013	2012
Sharia Rupiah	5,09%	8,10%	8,00%

Current accounts with Bank Indonesia are maintained to comply with Bank Indonesia's Minimum Legal Reserve Requirements (GWM).

The calculation of the GWM ratios as of December 31, 2014 and 2013 is based on Bank Indonesia's regulation (PBI) No. 15/15/2013 dated December 24, 2013, regarding "Reserve Requirement in Rupiah and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks".

While the computation of the GWM ratios as of December 31, 2012, is based on Bank Indonesia's regulation (PBI) No. 13/10/PBI/2011 dated February 9, 2011, regarding "The amendment on PBI No. 12/19/PBI/2010 dated October 4, 2010 regarding GWM of Commercial Banks with Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currency".

As of December 31, 2014, 2013 and 2012, based on the above Bank Indonesia regulations, Bank is required to maintain primary GWM both in Rupiah and in foreign currencies of 8%. For secondary GWM in Rupiah of 4% as of December 31, 2014 and 2013, respectively, while as of December 31, 2012 of 2,5%.

The calculation of the GWM ratios based on sharia principle as of December 31, 2014 and 2013 is based on Bank Indonesia's regulation (PBI) No. 15/16/PBI/2013 dated December 24, 2013, regarding "Reserve Requirement in Rupiah and Foreign Currencies for Sharia Banks and Sharia Business Units".

While the computation of the GWM ratios based on sharia principle as of December 31, 2012, is based on Bank Indonesia Regulation No.6/21/PBI/2004 dated August 3, 2004 regarding "Minimum Statutory Reserve Requirements in Rupiah and Foreign Currencies of Commercial Banks under Sharia Principles" as amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/23/PBI/2006 dated October 5, 2006 and the latest amendment No. 10/23/PBI/2008 dated October 16, 2008.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, berdasarkan prinsip syariah Bank harus memenuhi persyaratan GWM dalam Rupiah dan mata uang asing masing-masing sebesar 5% dan 1%.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum.

Sisa umur jatuh tempo atas giro pada Bank Indonesia dikategorikan sebagai kurang dari satu bulan (Catatan 43).

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

As of December 31, 2014, 2013 and 2012, based on the above Bank Indonesia regulations, based on sharia principle, Bank is required to maintain GWM both in Rupiah and in foreign currencies of 5% and 1%, respectively.

The Bank has complied with Bank Indonesia regulations concerning the minimum reserve requirements.

The remaining period of current accounts with Bank Indonesia is categorized as less than one month (Note 43).

6. GIRO PADA BANK LAIN

a. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/ December 31, 2014		31 Desember/ December 31, 2013		31 Desember/ December 31, 2012	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Rupiah		768.435		304.172		54.332
Mata uang asing						
Dolar Amerika Serikat	24.704.067	305.960	5.986.133	72.851	7.244.071	69.815
Yen Jepang	99.359.104	10.290	93.181.041	10.786	85.263.703	9.529
Euro Eropa	682.842	10.279	877.986	14.714	2.361.562	30.067
		326.529		98.351		109.411
		1.094.964		402.523		163.743
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(1.571)		(2.308)		(1.750)
		<u>1.093.393</u>		<u>400.215</u>		<u>161.993</u>

Rupiah

Foreign currencies
United States Dollar
Japanese Yen
European Euro

Less allowance for
impairment losses

b. Berdasarkan bank

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
<u>Rupiah</u> <u>Pihak Ketiga</u>			
PT Bank Central Asia Tbk	715.930	216.734	16.117
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	39.497	37.268	24.055
Standard Chartered Bank, Jakarta	5.475	1.041	6.211
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	2.507	4.141	5.184
Citibank N.A., Jakarta	925	925	925
PT Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten Tbk	13	14	-
Lainnya	72	1.001	452
	<u>764.419</u>	<u>261.124</u>	<u>52.944</u>

By bank

Rupiah
Third Parties
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Internasional Indonesia, Tbk
Standard Chartered Bank, Jakarta
PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah
Citibank N.A., Jakarta
PT Bank Pembangunan Daerah
Jabar Banten Tbk
Others

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

b. Berdasarkan bank (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			
<u>Pihak Berelasi (Catatan 40)</u>			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.148	263	168
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.288	41.880	281
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	325	798	745
PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk	255	107	188
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	-	-	6
	<u>4.016</u>	<u>43.048</u>	<u>1.388</u>
<u>Mata uang asing</u>			
<u>Pihak Ketiga</u>			
Standard Chartered Bank, Jakarta	236.536	-	-
PT Bank Central Asia Tbk	44.449	66.489	-
Deutsche Bank AG	8.708	12.413	28.319
Citibank N.A., Jakarta	8.230	3.624	10.725
Indonesische Overzeese Bank N.V., Amsterdam	1.571	2.301	1.748
JP Morgan Chase Bank N.A., London	-	-	59.090
	<u>299.494</u>	<u>84.827</u>	<u>99.882</u>
<u>Pihak Berelasi (Catatan 40)</u>			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	13.376	2.738	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13.659	10.786	9.529
	<u>27.035</u>	<u>13.524</u>	<u>9.529</u>
	<u>1.094.964</u>	<u>402.523</u>	<u>163.743</u>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.571)	(2.308)	(1.750)
	<u>1.093.393</u>	<u>400.215</u>	<u>161.993</u>

Bank memiliki giro pada bank lain yang merupakan pihak-pihak berelasi sebesar Rp31.051, Rp56.572, dan Rp10.917, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

Dalam giro pada bank lain termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp255, Rp107 dan Rp194, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

b. By bank (continued)

<u>Rupiah (continued)</u>	
<u>Related Parties (Note 40)</u>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	
<u>Foreign currencies</u>	
<u>Third Parties</u>	
Standard Chartered Bank, Jakarta	
PT Bank Central Asia Tbk	
Deutsche Bank AG	
Citibank N.A., Jakarta	
Indonesische Overzeese Bank N.V., Amsterdam	
JP Morgan Chase Bank N.A., London	
<u>Related Parties (Note 40)</u>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
<u>Less allowance for impairment losses</u>	

The Bank has current accounts with other banks which represent related parties amounting to Rp31,051, Rp56,572, and Rp10,917, as of December 31, 2014, 2013 and 2012, respectively.

Current accounts with other banks include current accounts based on sharia banking principles amounting to Rp255, Rp107 and Rp194, as of December 31, 2014, 2013 and 2012, respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

- c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	2014	2013
Rupiah	0,54%	0,05%
Mata uang asing	0,01%	0,00%

- d. Kolektibilitas

Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, kolektibilitas giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
Lancar	1.093.393	400.222	161.995
Macet	1.571	2.301	1.748
	1.094.964	402.523	163.743
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.571)	(2.308)	(1.750)
	1.093.393	400.215	161.993

- e. Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang digunakan sebagai agunan.

- f. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
Saldo awal tahun	2.308	1.750	2.322
Beban (Pembalikan) penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan (Catatan 30)	(737)	558	(572)
Saldo akhir tahun	1.571	2.308	1.750

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian atas giro pada bank lain yang dibentuk telah memadai.

- g. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 43.

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

- c. Average annual interest rates for current accounts with other banks are as follows:

	2014	2013	2012
Rupiah	0,54%	0,05%	0,03%
Foreign currencies	0,01%	0,00%	0,00%

- d. Collectibility

As of December 31, 2014, 2013 and 2012, the collectibility of current accounts with other banks are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
Lancar	1.093.393	400.222	161.995
Macet	1.571	2.301	1.748
	1.094.964	402.523	163.743
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.571)	(2.308)	(1.750)
	1.093.393	400.215	161.993

- e. As of December 31, 2014, 2013 and 2012, there are no current accounts with other banks which are used as collateral.

- f. The movements in the allowance for impairment losses on current accounts with other banks are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
Saldo awal tahun	2.308	1.750	2.322
Beban (Pembalikan) penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan (Catatan 30)	(737)	558	(572)
Saldo akhir tahun	1.571	2.308	1.750

The management believes that the allowance for impairment losses provided on current accounts with other banks is adequate.

- g. Information with respect to classification of impaired and not impaired of financial assets are disclosed in Note 43.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

a. Berdasarkan mata uang dan jenis

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
<u>Rupiah</u>			
<u>Pihak Ketiga</u>			
<u>Deposit Facility</u>			
Bank Indonesia	924.855	4.269.318	10.593.746
<u>Deposit Facility</u>			
Bank Indonesia Syariah	571.600	565.000	273.600
<u>Deposito berjangka</u>			
<u>Mudharabah</u>			
PT Bank Muamalat Indonesia	-	-	200.000
PT Bank Mega Syariah	-	-	150.000
<u>Sertifikat investasi Mudharabah</u>			
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-	50.000
	1.496.455	4.834.318	11.267.346
<u>Pihak Berelasi (Catatan 40)</u>			
<u>Deposito berjangka Mudharabah</u>			
PT Bank Syariah Mandiri	-	5.000	5.000
PT BRI Syariah	-	-	200.000
	-	5.000	205.000
	1.496.455	4.839.318	11.472.346
<u>Dikurangi cadangan kerugian</u>			
Penurunan nilai	-	(50)	(6.050)
	1.496.455	4.839.268	11.466.296

Terdapat penempatan pada bank lain dengan pihak-pihak berelasi sebesar Nihil, Rp5.000, dan Rp205.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012.

Dalam penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain termasuk penempatan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp571.600, Rp570.000, dan Rp878.600, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012.

b. Berdasarkan Sisa Umur Hingga Jatuh Tempo

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
■ 1 bulan	1.496.455	4.839.318	11.323.760
> 1 bulan ■ 3 bulan	-	-	99.179
> 3 bulan ■ 6 bulan	-	-	49.407
	1.496.455	4.839.318	11.472.346
<u>Cadangan kerugian</u>			
penurunan nilai	-	(50)	(6.050)
	1.496.455	4.839.268	11.466.296

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

a. Based on currency and type

<u>Rupiah</u>	
<u>Third Parties</u>	
<u>Deposit Facility</u>	
Bank Indonesia	10.593.746
<u>Deposit Facility</u>	
Bank Indonesia Sharia	273.600
<u>Mudharabah time deposits</u>	
PT Bank Muamalat Indonesia	200.000
PT Bank Mega Syariah	150.000
<u>Mudharabah investment certificate</u>	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	50.000

<u>Related Parties (Note 40)</u>	
<u>Mudharabah time deposits</u>	
PT Bank Syariah Mandiri	5.000
PT BRI Syariah	200.000

Less allowance
for impairment losses

As of December 31, 2014, 2013, and 2012, placements with other banks which are related parties of the Bank amounted to Nil, Rp5,000 and Rp205,000, respectively.

As of December 31, 2014, 2013, and 2012, placements with Bank Indonesia and other banks include placements based on sharia banking principles amounting to Rp571,600, Rp570,000, and Rp878,600, respectively.

b. Based on Remaining Period Until Maturity

■ 1 month	11.323.760
> 1 month ■ 3 months	99.179
> 3 months ■ 6 months	49.407

Allowance for
impairment losses

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

- c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain:

	2014	2013
Rupiah	6,51%	4,66%

- d. Seluruh penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 diklasifikasikan sebagai lancar.

- e. Perubahan cadangan kerugian penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
Saldo awal tahun	50	6.050	3.051
Beban (Pembalikan) penyisihan kerugian penurunan nilai tahun berjalan (Catatan 30)	(50)	(6.000)	2.999
Saldo akhir tahun	-	50	6.050

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal 31 Desember 2014, karena Manajemen berkeyakinan bahwa penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dapat ditagih. Sedangkan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain yang dibentuk telah memadai.

- f. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 43.

8. EFEK-EFEK

- a. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
Nilai wajar melalui laba rugi			
Rupiah			
Pihak Ketiga			
Sertifikat Deposito			
Bank Indonesia	148.588	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	2.086.973	424.246

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

- c. Average annual interest rates for placements with Bank Indonesia and other banks:

	2014	2013	2012
Rupiah	6,51%	4,66%	3,92%

- d. All placements with other banks and Bank Indonesia as of December 31, 2014, 2013 and 2012 are classified as current.

- e. The movements in the allowance for impairment losses on placements with Bank Indonesia and other banks are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
Saldo awal tahun	50	6.050	3.051
Beban (Pembalikan) penyisihan kerugian penurunan nilai tahun berjalan (Catatan 30)	(50)	(6.000)	2.999
Saldo akhir tahun	-	50	6.050

Management believes that no allowance for impairment losses is necessary as of December 31, 2014, because management believes that placements with Bank Indonesia and other banks are fully collectible. While as of December 31, 2013 and 2012, Management believes that the allowance for impairment losses provided on placements with other banks is adequate.

- f. Information with respect to classification of impaired and not impaired of financial assets are disclosed in Note 43.

8. SECURITIES

- a. Based on currency, type and issuer

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
Fair value through profit or loss			
Rupiah			
Third Parties			
Deposits Certificates of			
Bank Indonesia	148.588	-	-
Bank Indonesia Certificates	-	2.086.973	424.246

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

a. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u> <u>(lanjutan)</u>			
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			
<u>Pihak Ketiga (lanjutan)</u>			
Obligasi			
PT Bank Internasional Indonesia Tbk Tahap II A	-	-	5.015
	148.588	2.086.973	429.261
<u>Dolar Amerika Serikat</u> <u>Pihak Berelasi (Catatan 40)</u>			
Obligasi			
PT Pertamina (Persero) Seri 2043	-	9.660	-
	148.588	2.096.633	429.261
<u>Tersedia untuk dijual</u>			
<u>Rupiah</u>			
<u>Pihak Ketiga</u>			
Sertifikat Bank Indonesia	2.250.227	1.660.670	243.257
Sertifikat Deposito			
Bank Indonesia	2.355.019	-	-
Obligasi			
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Seri B 2010	10.065	-	-
PT Bank Permata Tbk Tahap I A	9.998	9.988	-
PT Bank OCBC NISP Tbk Tahap I Seri C 2013	9.785	-	-
PT Berlian Laju Tanker Tbk Seri III 2007	5.018	5.018	5.018
PT Federal International Finance Tahap II A	-	19.890	-
PT Astra Sedaya Finance Tahap II A	-	9.995	-
PT Toyota Astra Financial Services Seri II A	-	-	5.004
Reksadana			
Reksadana EMCO Terproteksi	82.321	81.014	-
Efek Beragun Aset - KPR			
KIK EBA Danareksa BTN 04 - KPR BTN Kelas B (Catatan 10g)	60.000	60.000	-
	4.782.433	1.846.575	253.279
<u>Pihak Berelasi (Catatan 40)</u>			
Obligasi			
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Tahap I 2014 Seri C	20.062	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahap I 2009	30.945	-	-
PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2014 Seri A	20.144	-	-

8. SECURITIES (continued)

a. Based on currency, type and issuer (continued)

<u>Fair value through profit or loss</u> <u>(continued)</u>	
<u>Rupiah (continued)</u>	
<u>Third Parties (continued)</u>	
Bonds	
PT Bank Internasional Indonesia Tbk Phase II A	
<u>United States Dollar</u> <u>Related Party (Note 40)</u>	
Bonds	
PT Pertamina (Persero) Series 2043	
<u>Available-for-sale</u>	
<u>Rupiah</u>	
<u>Third Parties</u>	
Bank Indonesia Certificates Deposits Certificates of Bank Indonesia	
Bonds	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Series B 2010	
PT Bank Permata Tbk Phase I A	
PT Bank OCBC NISP Tbk Phase I Series C 2013	
PT Berlian Laju Tanker Tbk Series III 2007	
PT Federal International Finance Phase II A	
PT Astra Sedaya Finance Phase II A	
PT Toyota Astra Financial Services Series II A	
Mutual Funds	
Protected EMCO Mutual Funds	
Residential Mortgage Backed Securities	
KIK EBA Danareksa BTN 04 - KPR BTN Class B (Note 10g)	
<u>Related Parties (Note 40)</u>	
Bonds	
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Phase I Series C 2014	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Phase I 2009	
PT Pupuk Indonesia (Persero) Year 2014 Series A	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

a. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
<u>Tersedia untuk dijual</u> <u>(lanjutan)</u> <u>Rupiah (lanjutan)</u> <u>Pihak Berelasi (Catatan 40)</u> <u>(lanjutan)</u> <u>Zero-Coupon Bonds</u> PT Jasa Marga (Persero) Tbk Seri JM-10	- 71.151 4.853.584	- - 1.846.575	2.369 2.369 255.648
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u> <u>Rupiah</u> <u>Pihak Ketiga</u> <u>Obligasi</u> PT Berlian Laju Tanker Tbk Sukuk Ijarah 2007 PT Mayora Indah Tbk Sukuk Mudharabah I 2008 PT Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah I 2008 PT Astra Sedaya Finance Tahap I A Efek Beragunan Aset - KPR KIK EBA Danareksa BTN 05 - KPR BTN Kelas A1 KIK EBA Danareksa BTN 05 - KPR BTN Kelas B (Catatan 10g) KIK EBA Danareksa BTN 03 - KPR BTN Kelas B (Catatan 10g) KIK EBA Danareksa BTN 01 - KPR BTN Kelas B (Catatan 10g) KIK EBA Danareksa BTN 02 - KPR BTN Kelas B (Catatan 10g) KIK EBA Danareksa SMF II - KPR BTN Kelas B (Catatan 10g) KIK EBA Danareksa SMF I - KPR BTN Kelas B (Catatan 10g)	2.000 - - - - 5.000 120.000 60.000 45.000 42.200 31.305 3.012 308.517	2.000 - - - - - - 60.000 45.000 42.200 31.305 10.708 191.213	2.000 14.000 11.000 15.005 - - - 60.000 45.000 42.200 31.305 11.111 231.621

8. SECURITIES (continued)

a. Based on currency, type and issuer (continued)

<u>Available-for-sale (continued)</u> <u>Rupiah (continued)</u> <u>Related Parties (Note 40) (continued)</u> <u>Zero-Coupon Bonds</u> PT Jasa Marga (Persero) Tbk Series JM-10	
<u>Held-to-maturity</u> <u>Rupiah</u> <u>Third Parties</u> <u>Bonds</u> PT Berlian Laju Tanker Tbk Sukuk Ijarah 2007 PT Mayora Indah Tbk Sukuk Mudharabah I 2008 PT Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah I 2008 PT Astra Sedaya Finance Phase I A Residential Mortgage Backed Securities KIK EBA Danareksa BTN 05 - KPR BTN Class A1 KIK EBA Danareksa BTN 05 - KPR BTN Class B (Note 10g) KIK EBA Danareksa BTN 03 - KPR BTN Class B (Note 10g) KIK EBA Danareksa BTN 01 - KPR BTN Class B (Note 10g) KIK EBA Danareksa BTN 02 - KPR BTN Class B (Note 10g) KIK EBA Danareksa SMF II - KPR BTN Class B (Note 10g) KIK EBA Danareksa SMF I - KPR BTN Class B (Note 10g)	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

a. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u> <u>(lanjutan)</u>			
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			
<u>Pihak Berelasi (Catatan 40)</u>			
Obligasi			
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Syariah			
<i>Ijarah I 2006</i>	30.000	30.000	30.000
<i>Sukuk Ijarah II 2007</i>	28.011	28.015	28.019
<i>Sukuk</i>			
<i>Ijarah IV 2010</i>	3.000	3.000	3.000
PT Indosat Tbk			
<i>Sukuk Ijarah II 2007</i>	-	15.004	15.016
<i>Sukuk Ijarah III 2008</i>	-	-	30.000
Medium Term Notes			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			
Tahap I Seri A 2014	25.000	-	-
Tahap II 2014	25.000	-	-
Negotiable Certificate of Deposits			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Seri A 2014	24.672	-	-
	135.683	76.019	106.035
	444.200	267.232	337.656
	5.446.372	4.210.440	1.022.565
Cadangan kerugian penurunan nilai	(9.402)	(8.758)	(8.769)
	5.436.970	4.201.682	1.013.796

Jumlah nosional atas efek-efek dalam mata uang asing per tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebesar Nihil, ASD793.750 (nilai penuh) dan Nihil.

b. Jatuh tempo dan suku bunga

8. SECURITIES (continued)

a. Based on currency, type and issuer (continued)

<u>Held-to-maturity (continued)</u>
<u>Rupiah (continued)</u>
<u>Related Parties (Note 40)</u>
Bonds
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
<i>Syariah Ijarah I 2006</i>
<i>Sukuk Ijarah II 2007</i>
<i>Sukuk Ijarah IV 2010</i>
PT Indosat Tbk
<i>Sukuk Ijarah II 2007</i>
<i>Sukuk Ijarah III 2008</i>
Medium Term Notes
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
<i>Phase I Series A 2014</i>
<i>Phase II 2014</i>
Negotiable Certificate of Deposits
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Series A 2014

Notional amount of securities in foreign currency as of December 31, 2014, 2013 and 2012 amounting to Nil, USD793,750 (full amount) and Nil, respectively.

b. Maturity and interest rate

Penerbit	Jenis/ Type	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ Annual Interest Rate/ Profit Sharing	Issuer
<u>Rupiah</u>				<u>Rupiah</u>
Bank Indonesia	Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia/ <i>Bank Indonesia Certificates, Deposits Certificates Of Bank Indonesia</i>	< 1 tahun/ < 1 year	6,44% sampai 7,18%, 4,89% sampai 7,25%, dan 3,76% sampai 5,00%, untuk periode yang berakhir masing- masing pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012/ 6.44% to 7.18%, 4.89% to 7.25%, and 3.76% to 5.00%, for years ended December 31, 2014, 2013, and 2012, respectively	Bank Indonesia

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

Penerbit	Jenis/ Type	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ Annual Interest Rate/ Profit Sharing	Issuer
<u>Rupiah (lanjutan)</u>				<u>Rupiah (continued)</u>
PT Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah I 2008	Obligasi/Bonds	7 Juli/ July 7, 2013	14,50%	PT Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah I 2008
PT Astra Sedaya Finance Tahap I A	Obligasi/Bonds	3 Maret/ March 3, 2013	6,6% tetap/ fixed	PT Astra Sedaya Finance Phase I A
Tahap II A	Obligasi/Bonds	6 Desember/ December 6, 2014	8,75% tetap/ fixed	Phase II A
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Seri B 2010	Obligasi/Bonds	9 Desember/ December 9, 2015	9,00% tetap/ fixed	PT Bank Danamon Indonesia Tbk Series B 2010
PT Bank International Indonesia Tbk Tahap II A	Obligasi/Bonds	31 Oktober/ October 31, 2015	7,6% tetap/ fixed	PT Bank International Indonesia Tbk Phase II A
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahap I 2009	Obligasi/Bonds	11 Desember/ December 11, 2016	11,85% tetap/ fixed	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Phase I 2009
PT Bank OCBC NISP Tbk Tahap I Seri C 2013	Obligasi/Bonds	19 Februari/ February 19, 2016	7,40% tetap/ fixed	PT Bank OCBC NISP Tbk Phase I Series C 2013
PT Bank Permata, Tbk Tahap I A	Obligasi/Bonds	3 Januari/ January 3, 2015	10,00% tetap/ fixed	PT Bank Permata, Tbk Phase I A
PT Berlian Laju Tanker Tbk Seri III 2007	Obligasi/Bonds	5 Juli/ July 5, 2012	10,35% tetap/ fixed	PT Berlian Laju Tanker Tbk Series III 2007
Sukuk Ijarah 2007	Obligasi/Bonds	7 Mei/ May 7, 2012	10,30%	Sukuk Ijarah 2007
PT Federal International Finance Tahap II A	Obligasi/Bonds	14 April/ April 14, 2014	6,75% tetap/ fixed	PT Federal International Finance Phase II A
PT Indosat Tbk Sukuk Ijarah II 2007	Obligasi/Bonds	29 Mei/ May 29, 2014	10,20%	PT Indosat Tbk Sukuk Ijarah II 2007
Sukuk Ijarah III 2008	Obligasi/Bonds	4 September/ September 4, 2013	10,25%	Sukuk Ijarah III 2008
PT Mayora Indah Tbk Sukuk Mudharabah I 2008	Obligasi/Bonds	6 Mei/ May 6, 2013	13,75%	PT Mayora Indah Tbk Sukuk Mudharabah I 2008
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Syariah Ijarah I 2006	Obligasi/Bonds	21 Juni / June 21, 2016	13,60%	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Syariah Ijarah I 2006
Sukuk Ijarah II 2007	Obligasi/Bonds	10 Juli / July 10, 2017	10,40%	Sukuk Ijarah II 2007
Sukuk Ijarah IV 2010	Obligasi/Bonds	12 Januari / January 12, 2020	12,55%	Sukuk Ijarah IV 2010
PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2014 Seri A	Obligasi/Bonds	8 Juli/ July 8, 2017	9,63% tetap/ fixed	PT Pupuk Indonesia (Persero) Year 2014 Series A
PT Toyota Astra Financial Services Seri II A	Obligasi/Bonds	15 Juni/ June 15, 2013	6,3% tetap/ fixed	PT Toyota Astra Financial Services Series II A
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Tahap I 2014 Seri C	Obligasi/Bonds	5 Juni/ June 5, 2017	9,25% tetap/ fixed	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Phase I Series C 2014

8. SECURITIES (continued)

b. Maturity and interest rate (continued)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

Penerbit	Jenis/ Type	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ Annual Interest Rate/ Profit Sharing	Issuer
Rupiah (lanjutan)				Rupiah (continued)
PT EMCO Asset Management Reksadana EMCO Terproteksi	Reksadana/ Mutual Fund	-	-	PT EMCO Asset Management Protected EMCO Mutual Fund
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahap I Seri A 2014	Medium Term Notes	15 Oktober/ October 15, 2015	8,75% tetap/ fixed	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Phase I Series A 2014
Tahap II 2014	Medium Term Notes	29 Desember/ December 29, 2015	8,90% tetap/ fixed	Phase II 2014
Seri A 2014	Negotiable Certificate of Deposits	2 Maret/ March 2, 2015	8,00% tetap/ fixed	Series A 2014
PT Jasa Marga (Persero) Tbk Seri JM-10	Zero Coupon Bonds	12 Oktober/ October 12, 2013	0,00% tetap/ fixed	PT Jasa Marga (Persero) Tbk Series JM-10
KIK - EBA Danareksa BTN 05 - KPR BTN Kelas A1	Efek Beragunan Aset - KPR/ Residential Mortgage Backed Securities	7 September/ September 7, 2025	10,00%	KIK - EBA Danareksa BTN 05 - KPR BTN Class A1
KIK - EBA Danareksa BTN 05 - KPR BTN (Catatan 10g)	Efek Beragunan Aset - KPR/ Residential Mortgage Backed Securities	7 September/ September 7, 2025	Arus kas tidak tetap/ Variable cash flows	KIK - EBA Danareksa BTN 05 - KPR BTN (Note 10g)
KIK - EBA Danareksa BTN 04 - KPR BTN (Catatan 10g)	Efek Beragunan Aset - KPR/ Residential Mortgage Backed Securities	26 Februari/ February 26, 2022	Arus kas tidak tetap/ Variable cash flows	KIK - EBA Danareksa BTN 04 - KPR BTN (Note 10g)
KIK - EBA Danareksa BTN 03 - KPR BTN (Catatan 10g)	Efek Beragunan Aset - KPR/ Residential Mortgage Backed Securities	7 Januari/ January 7, 2023	Arus kas tidak tetap/ Variable cash flows	KIK - EBA Danareksa BTN 03 - KPR BTN (Note 10g)
KIK - EBA Danareksa BTN 02 - KPR BTN (Catatan 10g)	Efek Beragunan Aset - KPR/ Residential Mortgage Backed Securities	27 Februari/ February 27, 2021	Arus kas tidak tetap/ Variable cash flows	KIK - EBA Danareksa BTN 02 - KPR BTN (Note 10g)
KIK - EBA Danareksa BTN 01 - KPR BTN (Catatan 10g)	Efek Beragunan Aset - KPR/ Residential Mortgage Backed Securities	27 September/ September 27, 2019	Arus kas tidak tetap/ Variable cash flows	KIK - EBA Danareksa BTN 01 - KPR BTN (Note 10g)
KIK - EBA Danareksa SMF II - KPR BTN (Catatan 10g)	Efek Beragunan Aset - KPR/ Residential Mortgage Backed Securities	10 Desember/ December 10, 2019	Arus kas tidak tetap/ Variable cash flows	KIK - EBA Danareksa SMF II - KPR BTN (Note 10g)
KIK - EBA Danareksa SMF I - KPR BTN (Catatan 10g)	Efek Beragunan Aset - KPR/ Residential Mortgage Backed Securities	10 Maret/ March 10, 2018	Arus kas tidak tetap/ Variable cash flows	KIK - EBA Danareksa SMF I - KPR BTN (Note 10g)
Dolar Amerika Serikat PT Pertamina (Persero) Seri 2043	Obligasi/Bonds	20 Mei/ May 20, 2043	5,63% tetap/ fixed	United States Dollar PT Pertamina (Persero) Series 2043

8. SECURITIES (continued)

b. Maturity and interest rate (continued)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

- c. Berdasarkan sisa umur hingga jatuh tempo (efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo)

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
■ 1 tahun	74.672	15.004	70.005
> 1 tahun ■ 5 tahun	137.328	68.723	73.035
> 5 tahun ■ 10 tahun	105.200	181.505	192.616
> 10 tahun	127.000	2.000	2.000
	444.200	267.232	337.656

- d. Peringkat

Daftar peringkat efek-efek seperti yang dilaporkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia dan Moody's Investor Service adalah sebagai berikut:

8. SECURITIES (continued)

- c. Remaining period to maturity (held-to-maturity securities)

■ 1 year
> 1 year ■ 5 years
> 5 years ■ 10 years
> 10 years

- d. Rating

The ratings of securities, as reported by PT Pemeringkat Efek Indonesia and Moody's Investor Service, are as follows:

Penerbit	Jenis/ Type	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	Issuer
PT Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah I 2008	Obligasi/Bonds	-	-	A-(idn)	PT Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah I 2008
PT Astra Sedaya Finance Tahap I A	Obligasi/Bonds	-	-	idAA+	PT Astra Sedaya Finance Phase I A
Tahap II A	Obligasi/Bonds	-	idAA+	-	Phase II A
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Seri B 2010	Obligasi/Bonds	idAAA	-	-	PT Bank Danamon Indonesia Tbk Series B 2010
PT Bank Internasional Indonesia Tbk Tahap II A	Obligasi/Bonds	-	-	idAAA	PT Bank Internasional Indonesia Tbk Phase II A
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahap I 2009	Obligasi/Bonds	idAA+	-	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Phase I 2009
PT Bank OCBC NISP Tbk Tahap I Seri C 2013	Obligasi/Bonds	idAAA	-	-	PT Bank OCBC NISP Tbk Phase I Series C 2013
PT Bank Permata Tbk Tahap I A	Obligasi/Bonds	idAAA	idAA+	-	PT Bank Permata Tbk Phase I A
PT Berlian Laju Tanker Tbk Seri III 2007	Obligasi/Bonds	idD	idD	idD	PT Berlian Laju Tanker Tbk Series III 2007
Sukuk Ijarah 2007	Obligasi/Bonds	idD (Sy)	idD (Sy)	idD (Sy)	Sukuk Ijarah 2007
PT Federal International Finance Tahap II A	Obligasi/Bonds	-	idAA+	-	PT Federal International Finance Phase II A
PT Indosat Tbk Sukuk Ijarah II 2007	Obligasi/Bonds	-	idAA+(Sy)	idAA+(Sy)	PT Indosat Tbk Sukuk Ijarah II 2007
Sukuk Ijarah III 2008	Obligasi/Bonds	-	-	idAA+(Sy)	Sukuk Ijarah III 2008
PT Jasa Marga (Persero) Tbk Seri JM-10	Obligasi/Bonds	-	-	idAA+	PT Jasa Marga (Persero) Tbk Series JM-10
PT Mayora Indah Tbk Sukuk Mudharabah I 2008	Obligasi/Bonds	-	-	idAA+(Sy)	PT Mayora Indah Tbk Sukuk Mudharabah I 2008
PT Pertamina (Persero) Seri 2043	Obligasi/Bonds	-	idBaa3	-	PT Pertamina (Persero) Series 2043
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Syariah Ijarah I 2006	Obligasi/Bonds	idAAA(Sy)	idAAA(Sy)	idAA+(Sy)	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Syariah Ijarah I 2006
Sukuk Ijarah II 2007	Obligasi/Bonds	idAAA(Sy)	idAAA(Sy)	idAA+(Sy)	Sukuk Ijarah II 2007
Sukuk Ijarah IV 2010	Obligasi/Bonds	idAAA(Sy)	idAAA(Sy)	idAA+(Sy)	Sukuk Ijarah IV 2010
PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2014 Seri A	Obligasi/Bonds	idAAA	-	-	PT Pupuk Indonesia (Persero) Year 2014 Series A

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

d. Peringkat (lanjutan)

Daftar peringkat efek-efek seperti yang dilaporkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia dan Moody's Investor Service adalah sebagai berikut (lanjutan):

Penerbit	Jenis/ Type	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	Issuer
PT Toyota Astra Financial Services Tahap II A	Obligasi/Bonds	-	-	idAA	PT Toyota Astra Financial Services Series II A
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Tahap I 2014 Seri C	Obligasi/Bonds	idAAA	-	-	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Phase I Series C 2014
KIK - EBA Danareksa BTN 05 - KPR BTN Kelas A1	Efek Beragun Aset-KPR/Residential	idAAA	-	-	Securities KIK EBA Danareksa BTN 05 - KPR BTN Class A1
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahap I Seri A 2014	Medium Term Notes	idAAA	-	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Phase I Series A 2014
Tahap II 2014	Medium Term Notes	idAAA	-	-	Phase II 2014

e. Kolektibilitas

Kolektibilitas efek-efek adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
Lancar	5.384.383	4.169.939	993.205	Current
Dalam Perhatian Khusus	45.888	28.076	19.514	Special Mention
Kurang Lancar	1.324	1.107	657	Substandard
Diragukan	1.666	1.332	669	Doubtful
Macet	13.111	9.986	8.520	Loss
	5.446.372	4.210.440	1.022.565	
Cadangan kerugian Penurunan nilai	(9.402)	(8.758)	(8.769)	Allowance for impairment losses
	5.436.970	4.201.682	1.013.796	

f. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
Rupiah				Rupiah
Saldo awal tahun	8.758	8.769	5.014	Balance at beginning of year
Beban penyisihan (pembalikan) kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan (Catatan 30)	644	(11)	3.755	Provision expense for (reversal of) impairment losses during the year (Note 30)
Saldo akhir tahun	9.402	8.758	8.769	Balance at end of year

Manajemen berpendapat bahwa jumlah Cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek yang dibentuk telah memadai.

8. SECURITIES (continued)

d. Rating (continued)

The ratings of securities, as reported by PT Pemeringkat Efek Indonesia and Moody's Investor Service, are as follows (continued):

e. Collectibility

The collectibility of securities are as follows:

f. The movements in the allowance for impairment losses on securities are as follows:

Management believes that the allowance for impairment losses provided on securities is adequate.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

- g. Bank mengakui keuntungan bersih atas penjualan efek-efek masing-masing sebesar Rp61.696, Rp9.061, dan Rp8.288, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 yang disajikan dalam akun "Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto" di laporan laba rugi komprehensif.
- h. Bank mengakui keuntungan yang belum direalisasi-neto dari kenaikan nilai efek-efek untuk nilai wajar melalui laba rugi sebesar Rp999, Rp12.063, dan Rp8.620 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, yang disajikan dalam akun "Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto" di laporan laba rugi komprehensif.
- i. Nilai pasar efek-efek yang diklasifikasikan sebagai "Nilai Wajar melalui laporan Laba Rugi dan Tersedia untuk Dijual" pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, masing-masing berkisar dari 96,08% sampai dengan 103,15%, berkisar dari 79,38% sampai dengan 99,95%, dan 94,80% sampai dengan 103,03%.
- j. Bank mengakui keuntungan yang belum direalisasi bersih sebesar Rp5.689, Rp1.760, dan Rp323 dari perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual masing-masing pada posisi 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 dalam akun "Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual - bersih" dalam laporan posisi keuangan.
- k. Mutasi keuntungan/kerugian efek-efek tersedia untuk dijual yang belum direalisasi adalah sebagai berikut:

8. SECURITIES (continued)

- g. The Bank recognized net gain on sale of securities amounting to Rp61,696, Rp9,061, and Rp8,288 for the years ended December 31, 2014, 2013, and 2012, respectively, which is presented in the statement of comprehensive income as "Gain on sale of securities - net".
- h. The Bank unrealized gain - net from the increase in value of fair value through profit or loss securities amounting to Rp999, Rp12,063, and Rp8,620 for the years ended December 31, 2014, 2013, and 2012, respectively, which is presented in the statement of comprehensive income as "Unrealized gain on changes in fair value of securities - net".
- i. As of December 31, 2014, 2013, and 2012, the market values of securities classified as fair value through profit or loss and available for sale ranging from 96.08% to 103.15%, ranging from 79.38% to 99.95%, and ranging from 94.80% to 103.03%, respectively.
- j. The Bank recognized unrealized gain - net of Rp5,689, Rp1,760, and Rp323 from the changes in fair values of available-for-sale securities as of December 31, 2014, 2013, and 2012 which are presented as "net unrealized gain (loss) on available-for-sale securities and government bonds - net" in the statement of financial position.
- k. Movements in unrealized gain/loss on available-for-sale securities are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
Saldo awal tahun	1.760	323	(79)	Balance at beginning of year
Keuntungan tahun berjalan	6.520	2.438	436	Profit during the year
Jumlah yang ditransfer ke laba rugi	(1.281)	(430)	102	Amount transfer to income statement
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya	(1.310)	(571)	(136)	Income tax relating to components of other comprehensive income
Saldo akhir tahun	5.689	1.760	323	Balance at end of year

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

- l. Terdapat investasi surat - surat berharga dengan pihak - pihak berelasi sebesar Rp206.834, Rp85.679, dan Rp108.404 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012.
- m. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 43.
- n. Efek-efek sejumlah nominal Rp550.000, Nihil, dan Nihil, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 telah dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 19).

9. OBLIGASI PEMERINTAH

- a. Berdasarkan mata uang dan jenis

8. SECURITIES (continued)

- l. As of December 31, 2014, 2013, and 2012, investments in securities with related parties amounted to Rp206,834, Rp85,679, and Rp108,404 respectively.
- m. Information with respect to classification of impaired and not impaired financial assets are disclosed in Note 43.
- n. As of December 31, 2014, 2013, and 2012, securities with nominal amounts of Rp550,000, Nil, and Nil, respectively, were sold under repurchase agreements (Note 19).

9. GOVERNMENT BONDS

- a. Based on currency and type

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
<u>Pihak berelasi (Catatan 40)</u>			
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>			
<u>Rupiah</u>			
Zero Coupon Bonds			
SPNS 08042015	248.703	-	-
SPN 12150206	243.675	-	-
SPNS 13022015	99.354	-	-
SPN 12141107	-	272.896	-
SPN 03140207	-	99.412	-
SPN 12140911	-	43.461	-
ZC0005	-	-	19.824
Tingkat bunga tetap			
FR 0064	-	192.147	-
ORI 10	-	19.950	-
FR 0066	-	17.991	15.356
FR 0065	-	-	10.568
	591.732	645.857	45.748
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			
Tingkat bunga tetap			
INDOIS 2022	-	20.050	-
INDON 2043	-	19.411	-
INDON 2023	-	11.429	-
	-	50.890	-
	591.732	696.747	45.748

<u>Related party (Note 40)</u>	
<u>Fair value through profit or loss</u>	
<u>Rupiah</u>	
Zero Coupon Bonds	
SPNS 08042015	
SPN 12150206	
SPNS 13022015	
SPN 12141107	
SPN 03140207	
SPN 12140911	
ZC0005	
Fixed interest rate	
FR 0064	
ORI 10	
FR 0066	
FR 0065	
<u>United States Dollar</u>	
Fixed interest rate	
INDOIS 2022	
INDON 2043	
INDON 2023	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

a. Berdasarkan mata uang dan jenis (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
<u>Pihak berelasi (Catatan 40)</u> <u>(lanjutan)</u>			
<u>Tersedia untuk dijual</u>			
<u>Rupiah</u>			
Tingkat bunga tetap			
FR 0064	250.068	232.392	-
FR 0065	126.008	117.313	-
FR 0062	64.964	60.260	40.009
SR 0004	10.779	10.552	-
FR 0020	-	-	10.906
FR 0033	-	-	10.169
Surat Berharga Syariah Negara PBS 01	-	-	49.250
	451.819	420.517	110.334
Tingkat bunga mengambang			
VR 0031	1.092.836	1.113.986	1.116.788
VR 0023	893.070	894.627	896.409
VR 0028	801.808	802.352	804.464
VR 0020	746.475	744.495	743.835
VR 0029	709.640	707.428	710.885
VR 0027	552.729	555.902	559.266
VR 0026	377.042	382.185	459.716
VR 0021	341.850	342.305	343.844
VR 0022	26.993	27.090	27.147
	5.542.443	5.570.370	5.662.354
	5.994.262	5.990.887	5.772.688
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u>			
<u>Rupiah</u>			
Tingkat bunga tetap			
FR 0063	274.466	267.243	-
FR 0033	-	-	101.480
ORI 007	-	-	101.640
Tingkat Bunga mengambang			
VR 0031	1.122.880	1.125.000	1.122.256
VR 0029	199.660	200.000	199.536
Surat Berharga Syariah Negara IFR 0002	50.065	50.083	50.101
<u>Sukuk Negara</u>			
SR 0004	5.000	5.000	5.000
SR 0003	-	50.000	50.000
SR 0002	-	-	20.481
	1.652.071	1.697.326	1.650.494
	8.238.065	8.384.960	7.468.930

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

a. Based on currency and type (continued)

<u>Related party (Note 40)</u> <u>(continued)</u>
<u>Available-for-sale</u>
<u>Rupiah</u>
Fixed interest rate
FR 0064
FR 0065
FR 0062
SR 0004
FR0020
FR0033
Sharia Government Bonds
PBS 01
Variable interest rate
VR 0031
VR 0023
VR 0028
VR 0020
VR 0029
VR 0027
VR 0026
VR 0021
VR 0022
Held-to-maturity
<u>Rupiah</u>
Fixed interest rate
FR 0063
FR 0033
ORI 007
Variable interest rate
VR 0031
VR 0029
Government sharia bond
IFR 0002
Sukuk Negara
SR 0004
SR 0003
SR 0002

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

b. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date
<u>Nilai wajar melalui laporan laba rugi</u>	
<u>Rupiah</u>	
<u>Tingkat bunga tetap</u>	
FR 0064	15 Mei/ May 15, 2028
FR 0065	15 Mei/ May 15, 2033
FR 0066	15 Mei/ May 15, 2018
ORI 010	15 Oktober/ October 15, 2016
<u>Zero Coupon Bonds</u>	
SPN	Beragam/ Various
ZC0005	20 Februari/ February 20, 2013
<u>Dolar Amerika Serikat</u>	
<u>Tingkat bunga tetap</u>	
INDOIS 2022	21 November/ November 21, 2022
INDON 2023	15 April/ April 15, 2023
INDON 2043	15 April/ April 15, 2043
<u>Tersedia untuk dijual</u>	
<u>Rupiah</u>	
<u>Tingkat bunga tetap</u>	
FR 0020	15 Desember/ December 15, 2013
FR 0033	15 Maret/ March 15, 2013
FR 0062	15 April/ April 15, 2042
FR 0064	15 Mei/ May 15, 2028
FR 0065	15 Mei/ May 15, 2033
SR 0004	21 September/ September 21, 2015
<u>Surat berharga Syariah Negara</u>	
PBS 01	15 Februari/ February 15, 2018
<u>Tingkat bunga mengambang</u>	
VR 0020	25 April/ April 25, 2015
VR 0021	25 November/ November 25, 2015
VR 0022	25 Maret/ March 25, 2016
VR 0023	25 Oktober/ October 25, 2016
VR 0026	25 Januari/ January 25, 2018
VR 0027	25 Juli/ July 25, 2018
VR 0028	25 Agustus/ August 25, 2018
VR 0029	25 Agustus/ August 25, 2019
VR 0031	25 Juli/ July 25, 2020

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

b. Based on maturity and interest rate

Suku Bunga/ Interest Rate	Description
	<u>Fair value through profit or loss</u>
	<u>Rupiah</u>
	<u>Fixed interest rate</u>
6,13% tetap/ fixed	FR 0064
6,63% tetap/ fixed	FR 0065
5,25% tetap/ fixed	FR 0066
8,50% tetap/ fixed	ORI 010
	<u>Zero Coupon Bonds</u>
Beragam/ Various	SPN
-	ZC0005
	<u>United States Dollar</u>
	<u>Fixed interest rate</u>
7,78% tetap/ fixed	INDOIS 2022
3,38% tetap/ fixed	INDON 2023
4,63% tetap/ fixed	INDON 2043
	<u>Available-for-sale</u>
	<u>Rupiah</u>
	<u>Fixed interest rate</u>
14,28% tetap/ fixed	FR 0020
12,50% tetap/ fixed	FR 0033
6,38% tetap/ fixed	FR 0062
6,13% tetap/ fixed	FR 0064
6,63% tetap/ fixed	FR 0065
6,25% tetap/ fixed	SR 0004
	<u>Government Sharia Bond</u>
4,45% tetap/ fixed	PBS 01
	<u>Variable interest rate</u>
SPN 3 bulan/ months	VR 0020
SPN 3 bulan/ months	VR 0021
SPN 3 bulan/ months	VR 0022
SPN 3 bulan/ months	VR 0023
SPN 3 bulan/ months	VR 0026
SPN 3 bulan/ months	VR 0027
SPN 3 bulan/ months	VR 0028
SPN 3 bulan/ months	VR 0029
SPN 3 bulan/ months	VR 0031

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

b. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u>	
<u>Rupiah</u>	
<u>Tingkat bunga tetap</u>	
FR 0033	15 Maret/ May 15, 2013
FR 0063	15 Mei/ May 15, 2023
ORI 007	15 Agustus/ August 15, 2013
<u>Tingkat bunga mengambang</u>	
VR 0029	25 Agustus/ August 25, 2019
VR 0031	25 Juli/ July 25, 2020
<u>Surat berharga Syariah Negara</u>	
IFR 0002	15 Agustus/ August 15, 2018
<u>Sukuk Negara</u>	
SR 0002	10 Februari/ February 10, 2013
SR 0003	23 Februari/ February 23, 2014
SR 0004	21 September/ September 21, 2015

Obligasi pemerintah sejumlah nominal Rp3.910.452, Rp3.065.000, dan Rp2.665.000, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, telah dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 19).

Pembayaran kupon obligasi Pemerintah dengan tingkat bunga tetap dan variabel masing-masing dibayarkan tiap semester dan triwulanan.

Obligasi Pemerintah syariah seri SR dan seri IFR, masing-masing dibayarkan secara bulanan dan semester.

Nilai pasar Obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai "Nilai Wajar melalui laporan Laba Rugi dan Tersedia untuk Dijual" berkisar dari 76,65% sampai dengan 99,53%, 71,10% sampai dengan 99,75%, dan 98,50% sampai dengan 101,69%, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012.

Kerugian yang belum direalisasi akibat penurunan nilai wajar obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp95.702 dan Rp91.806, sedangkan keuntungan yang belum direalisasi akibat kenaikan nilai wajar obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp28.735, yang disajikan dalam akun "Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan" pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

b. Based on maturity and interest rate (continued)

Suku Bunga/ Interest Rate	Description
	<u>Held-to-maturity</u>
	<u>Rupiah</u>
	<u>Fixed interest rate</u>
12,50% tetap/ fixed	FR 0033
5,63% tetap/ fixed	FR 0063
7,95% tetap/ fixed	ORI 007
	<u>Variable interest rate</u>
SPN 3 bulan/ months	VR 0029
SPN 3 bulan/ months	VR 0031
	<u>Government Sharia Bond</u>
11,95% tetap/ fixed	IFR 0002
	<u>Sukuk Negara</u>
8,70% tetap/ fixed	SR 0002
8,15% tetap/ fixed	SR 0003
6,25% tetap/ fixed	SR 0004

As of December 31, 2014, 2013, and 2012, government bonds with nominal amounts of Rp3,910,452, Rp3,065,000, and Rp2,665,000, respectively, were sold under repurchase agreements (Note 19).

Coupon payments of Government bonds with fixed and variable interest rates are payable semi-annually and quarterly, respectively.

SR series and IFR series sharia Government bonds are payable monthly and semi-annually, respectively.

The market values of Government bonds classified as fair value through profit or loss and available for sale ranging from 76.65% to 99.53%, 71.10% to 99.75%, and 98.50% to 101.69% of nominal amounts as of December 31, 2014, 2013, and 2012, respectively.

As of December 31, 2014 and 2013, the unrealized loss due to the decrease in the fair value of available-for-sale government bonds amounted to Rp95,702 and Rp91,806, respectively, while as of December 31, 2012, the unrealized gain due to the increase in the fair value of available-for-sale government bonds amounted to Rp28,735, which are presented as "Net unrealized gains (loss) on available-for-sale securities and government bonds net of deferred tax" in the equity section of the statement of financial position.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

Mutasi keuntungan/kerugian obligasi Pemerintah tersedia untuk dijual yang belum direalisasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
Saldo awal tahun	(91.806)	28.735	35.260	Balance at beginning of year
Kerugian tahun berjalan	(9.911)	(158.137)	(9.956)	Loss during the year
Jumlah yang ditransfer ke laba rugi	3.537	(3.000)	943	Amount transfer to income statement
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya	2.478	40.596	2.488	Income tax relating to components of other comprehensive income
Saldo akhir tahun	(95.702)	(91.806)	28.735	Balance at end of year

Bank mengakui keuntungan bersih atas penjualan obligasi pemerintah masing-masing sebesar Rp47.406, Rp22.528, dan Rp8.551, untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, yang disajikan dalam akun "Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah - neto" di laporan laba rugi komprehensif.

Bank mengakui keuntungan yang belum direalisasi- neto atas perubahan nilai wajar obligasi pemerintah melalui laba rugi sebesar Rp5.571 dan Rp501 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2012, dan kerugian yang belum direalisasi-neto dari perubahan nilai obligasi pemerintah untuk nilai wajar melalui laba rugi sebesar Rp138.689 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang disajikan dalam akun "Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto" di laporan laba rugi komprehensif.

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko Bank, manajemen telah memitigasi risiko dari dampak fluktuasi harga pasar terhadap obligasi yang dimiliki dengan melakukan investasi dalam reksadana terproteksi yang dimiliki hingga jatuh tempo yang mempunyai underlying obligasi pemerintah seri FR63. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Bank merupakan satu-satunya pihak yang memegang unit reksadana tersebut.

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

Movements in unrealized gain/loss on available-for-sale Government bonds are as follows:

The Bank recognized net gain on sale of government bonds amounting to Rp47,406, Rp22,528, and Rp8,551, for the years ended December 31, 2014, 2013 and 2012, respectively, which is presented in the statement of comprehensive income as "Gain on sale of government bonds- net".

The Bank recognized unrealized gain - net from the change in fair value of government bonds classified as fair value through profit or loss amounting to Rp5,571 and Rp501 for the years ended December 31, 2014 and 2012, and unrealized loss - net from the change in value of government bonds classified as fair value through profit or loss amounting to Rp138,689 for the year ended December 31, 2013, which is presented in the statements of comprehensive income as "Unrealized gain (loss) from changes in fair value of government bonds - net".

As part of the Bank's risk management, the management has mitigated the risk of market price fluctuation in relation with the bonds owned by investing in protected mutual fund which held to maturity and has underlying of government bonds series FR63. As of December 31, 2014 and 2013, the Bank is the only party who holds the mutual fund unit.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH

Seluruh kredit yang diberikan oleh Bank, termasuk pembiayaan/piutang syariah adalah dalam Rupiah. Rincian kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diberikan oleh Bank berdasarkan jenis, transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sektor ekonomi, jangka waktu sesuai dengan perjanjian, sisa umur jatuh tempo dan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

a. Jenis Kredit dan Pembiayaan/Piutang Syariah

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
<u>Konvensional</u>			
Konsumsi			
Pemilikan rumah (KPR)	75.465.619	64.689.382	52.445.319
Non-kepemilikan rumah	9.429.630	8.144.940	6.839.485
	84.895.249	72.834.322	59.284.804
Modal kerja	17.113.859	15.445.515	12.864.025
Investasi	3.640.105	3.463.942	2.924.795
Sindikasi	76.978	62.712	28.047
Direksi dan karyawan			
- Pihak ketiga	506.222	535.605	275.878
- Pihak yang berelasi	38.864	44.212	33.156
	106.271.277	92.386.308	75.410.705
<u>Syariah</u>			
Konsumsi			
Pemilikan rumah (KPR)	5.105.187	3.880.462	2.727.823
Non-kepemilikan rumah	500.105	488.057	389.841
	5.605.292	4.368.519	3.117.664
Modal kerja	3.371.785	3.173.857	2.519.372
Investasi	666.408	537.652	361.552
Direksi dan karyawan			
- Pihak yang berelasi	1.039	1.055	1.470
	9.644.524	8.081.083	6.000.058
	115.915.801	100.467.391	81.410.763
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.576.575)	(1.137.177)	(980.714)
	114.339.226	99.330.214	80.430.049

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/RECEIVABLES

All loans provided by the Bank, including sharia financing/receivables are in Rupiah. The details of loans and sharia financing/receivables classified by type, transactions with related parties, economic sector, period based on agreements, remaining period to maturity and collectibility are as follows:

a. Types of Loans and Sharia Financing/Receivables

<u>Conventional</u>	
Consumer	
Housing loan	
Non-housing loan	
Working capital	
Investment	
Syndicated	
Directors and employees	
Third parties -	
Related parties -	
<u>Sharia</u>	
Consumer	
Housing loan	
Non-housing loan	
Working capital	
Investment	
Directors and employees	
Related parties -	
Less allowance for impairment losses	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

b. Sektor Ekonomi

b. Economic Sector

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
<u>Konvensional</u>				<u>Conventional</u>
Perumahan	96.130.622	82.233.929	66.874.714	Property
Perdagangan, restoran, dan hotel	2.583.964	2.224.449	1.599.224	Trading, restaurant and hotel
Konstruksi	2.374.615	2.088.158	2.210.399	Construction
Jasa usaha	932.925	2.290.561	2.263.742	Business service
Jasa-jasa sosial	662.488	327.779	163.637	Social service
Manufaktur	276.059	267.466	199.764	Manufacturing
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	246.435	233.177	213.143	Transportation, warehousing, and communication
Pertanian	165.682	201.363	144.145	Farming
Pertambangan	157.865	160.732	99.235	Mining
Listrik, gas dan air	29.981	30.992	35.613	Electricity, gas and water
Lain-lain*)	2.710.641	2.327.702	1.607.089	Other*)
	106.271.277	92.386.308	75.410.705	
<u>Syariah</u>				<u>Sharia</u>
Perumahan	5.606.331	4.369.463	3.119.135	Property
Jasa usaha	2.570.191	2.527.356	2.109.238	Business service
Konstruksi	1.468.002	1.184.264	771.685	Construction
	9.644.524	8.081.083	6.000.058	
	115.915.801	100.467.391	81.410.763	
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.576.575)	(1.137.177)	(980.714)	Less allowance for impairment losses
	114.339.226	99.330.214	80.430.049	

*) Terdiri dari rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya

*) Consists of household and other economic sectors

c. Kolektibilitas

c. Collectibility

	31 Desember/ December 31, 2014		31 Desember/ December 31, 2013		31 Desember/ December 31, 2012		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Nilai tercatat/ Carrying amount	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Nilai tercatat/ Carrying amount	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	
Konvensional							Conventional
Individual	445.039	107.426	267.985	67.595	411.883	185.897	Individual
Kolektif							Collective
Lancar	86.492.731	17.453	76.703.334	15.753	62.701.520	18.553	Current
Dalam perhatian khusus	15.192.696	17.485	11.565.004	7.915	9.316.880	8.872	Special mention
Kurang lancar	298.237	2.844	437.961	3.697	572.506	16.887	Substandard
Diragukan	418.149	9.349	442.350	10.387	529.302	11.223	Doubtful
Macet	3.424.425	1.210.855	2.969.674	902.114	1.878.614	547.481	Loss
	106.271.277	1.365.412	92.386.308	1.007.461	75.410.705	788.913	
Syariah							Sharia
Lancar	8.715.436	93.686	7.480.182	74.802	5.519.771	55.200	Current
Dalam perhatian khusus	730.313	10.598	507.086	17.739	337.505	18.187	Special mention
Kurang lancar	39.516	2.252	20.288	3.417	21.615	3.488	Substandard
Diragukan	24.626	5.910	14.608	3.777	7.903	4.636	Doubtful
Macet	134.633	98.717	58.919	29.981	113.264	110.290	Loss
	9.644.524	211.163	8.081.083	129.716	6.000.058	191.801	
	115.915.801	1.576.575	100.467.391	1.137.177	81.410.763	980.714	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

d. Transactions with related parties

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
<u>Konvensional</u>				<u>Conventional</u>
Konsumsi				Consumer
Pemilikan rumah (KPR)	963	19.043	11.547	Housing Loan
Non- kepemilikan rumah	5.974	14.212	14.008	Non-housing loan
	6.937	33.255	25.555	
Modal Kerja	122.943	257.006	100.986	Working capital
Investasi	3.394	5.599	6.324	Investment
	133.274	295.860	132.865	
<u>Syariah</u>				<u>Sharia</u>
Konsumsi				Consumer
Pemilikan rumah (KPR)	727	791	1.420	Housing Loan
Non- kepemilikan rumah	312	264	50	Non-housing loan
	1.039	1.055	1.470	
	134.313	296.915	134.335	

e. Jangka waktu (sesuai dengan perjanjian kredit dan pembiayaan/piutang syariah)

e. Loan period (based on agreements covering loan and sharia financing/receivables)

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
<u>Konvensional</u>				<u>Conventional</u>
■ 1 tahun	2.598.761	2.601.733	2.358.649	■ 1 year
> 1 tahun ■ 2 tahun	6.011.742	5.159.064	3.868.299	> 1 year ■ 2 years
> 2 tahun ■ 5 tahun	13.405.912	11.241.978	9.622.435	> 2 years ■ 5 years
> 5 tahun	84.254.862	73.383.533	59.561.322	> 5 years
	106.271.277	92.386.308	75.410.705	
<u>Syariah</u>				<u>Sharia</u>
■ 1 tahun	357.932	474.059	398.906	■ 1 year
> 1 tahun ■ 2 tahun	1.327.515	1.085.194	690.914	> 1 year ■ 2 years
> 2 tahun ■ 5 tahun	2.729.837	2.633.339	2.241.321	> 2 years ■ 5 years
> 5 tahun	5.229.240	3.888.491	2.668.917	> 5 years
	9.644.524	8.081.083	6.000.058	
	115.915.801	100.467.391	81.410.763	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.576.575)	(1.137.177)	(980.714)	Allowance for impairment losses
	114.339.226	99.330.214	80.430.049	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/RECEIVABLES (continued)

f. Sisa Umur Jatuh Tempo

f. Remaining Period to Maturity

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
<u>Konvensional</u>				<u>Conventional</u>
■ 1 tahun	9.335.900	8.689.552	7.823.629	■ 1 year
> 1 tahun ■ 2 tahun	5.531.840	5.280.165	3.813.337	> 1 year ■ 2 years
> 2 tahun ■ 5 tahun	12.265.127	10.629.552	9.197.226	> 2 years ■ 5 years
> 5 tahun	79.138.410	67.787.039	54.576.513	> 5 years
	106.271.277	92.386.308	75.410.705	
 <u>Syariah</u>				 <u>Sharia</u>
■ 1 tahun	1.707.574	1.368.192	984.565	■ 1 year
> 1 tahun ■ 2 tahun	1.127.823	1.044.466	746.440	> 1 year ■ 2 years
> 2 tahun ■ 5 tahun	2.145.708	2.135.735	1.779.373	> 2 years ■ 5 years
> 5 tahun	4.663.419	3.532.690	2.489.680	> 5 years
	9.644.524	8.081.083	6.000.058	
	115.915.801	100.467.391	81.410.763	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.576.575)	(1.137.177)	(980.714)	Allowance for impairment losses
	114.339.226	99.330.214	80.430.049	

g. Informasi pokok lainnya

g. Other significant information

i. Termasuk di dalam kredit yang diberikan adalah pembiayaan/piutang syariah yang diberikan dengan rincian sebagai berikut:

i. Loans include sharia financing/receivables with details, as follows:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
Piutang Murabahah	5.177.394	3.970.180	2.791.724	Murabahah receivables
Pembiayaan Mudharabah	1.579.366	1.711.331	1.601.327	Mudharabah financing
Pembiayaan Musyarakah	2.143.268	1.735.489	1.114.844	Musyarakah financing
Piutang Istishna	428.780	319.819	181.648	Istishna receivables
Pinjaman qardh	315.716	344.264	310.515	Funds of qardh
	9.644.524	8.081.083	6.000.058	
Cadangan kerugian Penurunan nilai	(211.163)	(129.716)	(191.801)	Allowance for impairment losses
	9.433.361	7.951.367	5.808.257	

ii. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk kredit konsumen sebesar 12,01%, 11,03%, dan 11,08% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk kredit komersial masing-masing sebesar 12,13%, 11,61%, dan 12,85% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012.

ii. Average annual interest rates for consumer loans are 12.01%, 11.03%, and 11.08% for the years ended December 31, 2014, 2013, and 2012, respectively. Average annual interest rates for commercial loans are 12.13%, 11.61%, and 12.85% for the years ended December 31, 2014, 2013, and 2012, respectively.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

iii. Kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit yang berkaitan dengan perumahan. Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, KPR masing-masing sebesar Rp6.555.181, Rp6.192.294, dan Rp5.537.574 telah dijadikan jaminan pinjaman yang diterima dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (pihak berelasi), PT Bank Mutiara Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 21).

iii. Consumer loans consist of housing loans and other housing-related loans. As of December 31, 2014, 2013, and 2012, housing loans amounted to Rp6,555,181, Rp6,192,294, and Rp5,537,574, respectively, are used as collateral for loans obtained from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (related party), PT Bank Mutiara Tbk and PT Bank Central Asia Tbk (Note 21).

iv. Kredit yang diberikan dijamin dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, giro, tabungan, deposito berjangka atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh Bank (Catatan 15, 16 dan 17).

iv. The loans are collateralized by registered mortgages or by powers of attorney to mortgage or sell, demand deposits, savings deposits, time deposits, or by other collaterals generally acceptable by the Bank (Notes 15, 16 and 17).

v. Bank telah melakukan sekuritisasi pertama atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah ("kumpulan tagihan") yang dimilikinya dengan menunjuk PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) sebagai *arranger* (penata transaksi) dan Pembeli Siaga serta Pendukung Kredit. Selanjutnya atas kumpulan tagihan yang memenuhi kriteria pemilihan, oleh Bank, sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa SMFI-KPR BTN (KIK-DSMF-I) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 80 tanggal 16 Januari 2009 dan Akta cessione No. 70 tanggal 11 Februari 2009.

v. The Bank conducted the first securitization of its housing loans ("pool of receivables"), by appointing PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) as the Arranger, Standby Buyer and Credit Support. The pool of receivables which met the criteria for selection by the Bank, as the Initial Creditor, were sold and transferred to Collective Investment Contract Asset-Backed Securities Danareksa SMFI-KPR BTN (KIK-DSMF-I) based on sale-purchase deed No. 80 dated January 16, 2009 and Deed of Assignment No. 70 dated February 11, 2009.

vi. KIK-DSMF-I dibentuk berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian berdasarkan Akta No. 79 tanggal 16 Januari 2009.

vi. KIK-DSMF-I was established based on Collective Investment Contract, between PT Danareksa Investment Management as the investment manager and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Custodian Bank based on deed No. 79 dated January 16, 2009.

Nilai pokok kumpulan tagihan yang dijual dan dialihkan tersebut yang merupakan kumpulan tagihan terseleksi adalah sebesar Rp111.111 yang terdiri dari 5.060 debitur dengan harga sebesar nilai pokok kumpulan tagihan pada tanggal 7 Januari 2009 (tanggal *cut-off* final).

On January 7, 2009 (final cut-off date), the pool of receivables, which represent selected receivables totaling Rp111,111 and consisting of 5,060 debtors, were sold and transferred at their total principal values.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

Tingkat suku bunga yang dikenakan pada debitur kumpulan tagihan tersebut pada tanggal penjualan adalah sebesar 15% dengan tanggal jatuh tempo maksimum adalah tanggal 7 Desember 2015. Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kumpulan tagihan tersebut, risiko kredit atas kumpulan tagihan telah beralih dari Bank kepada pembeli.

Selanjutnya, KIK-DSMF-I menerbitkan Efek Beragunan Aset (EBA) yang merupakan bentuk partisipasi dalam kepemilikan bersama atas kumpulan tagihan. EBA diterbitkan dalam dua kelas yaitu:

- (i) EBA Kelas A senilai Rp100.000 yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia dan ditawarkan kepada publik dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas A dengan tingkat bunga tetap sebesar 13% per tahun dengan tanggal jatuh tempo 10 Maret 2018. EBA Kelas A telah mendapatkan hasil pemeringkatan atas efek beragunan aset dari PT Moody's Indonesia yaitu *Aaa_id (triple A; Stable Outlook)*. Surat Pernyataan Pendaftaran dari KIK-DSMF-I telah mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui surat No. S-647/BL/2009 tanggal 29 Januari 2009; dan
- (ii) EBA Kelas B dengan nilai pokok sebesar Rp11.111 yang ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas B dan memiliki tanggal jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2018. EBA Kelas B tidak dicatat pada Bursa Efek Indonesia, namun ditawarkan kepada calon pembeli dengan ketentuan bahwa Bank mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli EBA Kelas B. Pemegang EBA Kelas B berhak atas semua arus kas tersisa sesuai dengan urutan prioritas pembayaran untuk setiap periode bunga. Pada tanggal 10 Februari 2009, Bank telah membeli dan mencatat EBA Kelas B sebagai efek yang dimiliki hingga jatuh tempo pada laporan posisi keuangan Bank (Catatan 8).

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Other significant information (continued)

The interest rate charged to the debtors of the pool of receivables on the date of sale is 15% with a maximum maturity of up to December 7, 2015. With the sale and transfer of the pool of receivables, credit risks on the pool of receivables were transferred from the Bank to the buyer.

Further, KIK-DSMF-I issued Asset-Backed Securities (ABS), which represent instruments of joint ownership on the pool of receivables. ABS were issued in two types or classes as follows:

- (i) Class A ABS amounting to Rp100,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange, and offered to the public at 100% of the nominal value of class A ABS with an annual fixed interest rate of 13% and due on March 10, 2018. The Class A ABS were rated *Aaa_id (triple A; Stable Outlook)* by PT Moody's Indonesia. The Registration Statement Letter from KIK-DSMF-I became effective based on Letter No. S-647/BL/2009 dated January 29, 2009 of the Chairman of Bapepam-LK; and
- (ii) Class B ABS with principal value of Rp11,111 offered at 100% of the nominal value of Class B ABS and will mature on March 10, 2018. The Class B ABS are not registered in the Indonesia Stock Exchange but are offered to prospective buyers with the condition that the Bank has the first priority to purchase such securities. Class B ABS holders have the right to the residual cash flows based on the payment priorities in each interest payment period. On February 10, 2009, the Bank purchased and recorded Class B ABS as held-to-maturity securities in the Bank's statements of financial position (Note 8).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

Transaksi penjualan kumpulan tagihan telah memperoleh opini penjualan putus (*true sale*) dari pihak independen yang terdiri dari pendapat dari segi akuntansi oleh Akuntan Independen dan pendapat dari segi hukum oleh kantor konsultan hukum independen. Atas dasar opini kedua pihak independen tersebut, Bank telah mengeluarkan kumpulan tagihan sebesar Rp111.111 dari laporan posisi keuangan Bank (penghentian pengakuan).

A true sale opinion was rendered on the sale of the pool of receivables from independent parties, which consisted of accounting opinion from an independent accountant and legal opinion from an independent legal consultant. Based on the opinions of the above two independent parties, the Bank derecognized the pool of receivables amounting to Rp111,111 from its statement of financial position.

Atas transaksi sekuritisasi atas kumpulan tagihan tersebut di atas, Bank juga bertindak sebagai Penyedia Jasa sebagaimana tertuang dalam perjanjian penyediaan jasa No. 114/PKS/DIM/08 tanggal 4 Desember 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Kedua Perjanjian Penyediaan Jasa No. 46/ADD/PKS/DIR/2008 tanggal 26 Desember 2008. Peran utama Bank sebagai penyedia jasa antara lain mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga dari para debitur untuk setiap periode penagihan, mentransfer secara bulanan hasil penagihan kepada KIK-DSMF-I dan mengadministrasikannya dengan baik, aman dan teratur serta profesional untuk kepentingan KIK-DSMF-I yang merupakan representasi dari para pemegang EBA.

Based on the Service Provider Agreement No. 114/PKS/DIM/08 dated December 4, 2008 which was last amended by the second Amendment of Service Provider Agreement No. 46/ADD/PKS/DIR/2008 dated December 26, 2008, the Bank also acts as a service provider in the above securitization transaction of the pool of receivables. The Bank's primary role as a service provider, among others, is to collect the principal and interest payments from debtors on each collection period, to transfer monthly the proceeds from collection to the KIK-DSMF-I and to maintain the good, safe, orderly and professional administration of the debtors' accounts for the interest of KIK-DSMF-I, which represents the ABS holders.

Setelah jumlah pokok terhutang atas kumpulan tagihan EBA Kelas A telah berkurang menjadi 10% (atau kurang) dari jumlah pokok terhutang pada tanggal *cut-off* final (7 Januari 2009), Bank sebagai penyedia jasa, mempunyai opsi untuk membeli dari para pemegang EBA Kelas A yang diwakili oleh Bank kustodian, pada tiap tanggal pembayaran, seluruh dan tidak hanya sebagian, kumpulan tagihan yang tersisa dengan harga yang sama dengan, mana yang lebih tinggi, antara (i) jumlah pokok terhutang dari kumpulan tagihan berikut bunganya yang terhutang dikurangi dengan tagihan tertunggak pada saat dilaksanakannya *clean-up call* atau (ii) jumlah pokok terutang dari EBA kelas A berikut bunganya yang terhutang ditambah biaya-biaya senior dan pajak terhutang saat itu yang wajib dibayar.

After the decrease in the outstanding principal amount of the Class A ABS pool of receivables to 10% (or less) from the principal amount on the final cut-off date (January 7, 2009), the Bank as the service provider, has the option to purchase on each payment date, all and not only a part of the residual pool of receivables from the Class A ABS holders, who are represented by the custodian bank, at a price equal to or the higher between (i) the outstanding principal amount of the pool of receivables after deducting the amount of late payments on the receivables at the time of exercising the clean-up call or (ii) the outstanding principal amount of Class A ABS including interest and other senior expenses and taxes payable at that period of time.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

- vii. Bank telah melakukan sekuritisasi kedua atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah ("kumpulan tagihan") yang dimilikinya dengan menunjuk PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) sebagai *arranger* (penata transaksi) dan Pembeli Siaga serta Pendukung Kredit.

- vii. The Bank conducted the second securitization transaction on its housing loans ("pool of receivables"), by appointing PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) as the Arranger, Standby Buyer and Credit Support.

Selanjutnya atas kumpulan tagihan yang memenuhi kriteria pemilihan, oleh Bank, sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa SMFII-KPR BTN (KIK-DSMF-II) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 135 tanggal 19 Oktober 2009 dan Akta cession No. 33 tanggal 10 November 2009. KIK-DSMF-II dibentuk berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian berdasarkan Akta No. 13 tanggal 5 Agustus 2009 dan diamandemen dengan akta No. 134 tanggal 19 Oktober 2009. Nilai pokok kumpulan tagihan yang dijual dan dialihkan tersebut yang merupakan kumpulan tagihan terseleksi adalah sebesar Rp391.305 yang terdiri dari 15.114 debitur dengan harga sebesar nilai pokok kumpulan tagihan pada tanggal 7 Oktober 2009 (tanggal *cut-off final*).

The pool of receivables, which met the criteria for selection by the Bank, as the Initial Creditor, were sold and transferred to Collective Investment Contract Asset-Backed Securities Danareksa SMFII-KPR BTN (KIK-DSMF-II) based on sale-purchase deed No. 135 dated October 19, 2009 and Deed of Assignment No. 33 dated November 10, 2009. KIK-DSMF-II was established based on Collective Investment Contract between PT Danareksa Investment Management as the investment manager and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Custodian Bank based on deed No. 13 dated August 5, 2009, which was amended by deed No. 134 dated October 19, 2009. On the final cut-off date (October 7, 2009), the pool of receivables, which represent selected receivables totaling to Rp391,305 and consisting of 15,114 debtors, were sold and transferred at their total principal values.

Tingkat suku bunga yang dikenakan pada debitur kumpulan tagihan tersebut pada tanggal penjualan adalah sebesar 15% dengan tanggal jatuh tempo maksimum adalah 7 Oktober 2017. Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kumpulan tagihan tersebut, risiko kredit atas kumpulan tagihan telah beralih dari Bank kepada pembeli.

The interest rate charged to the debtors of the pool of receivables on the date of sale is 15% with a maximum maturity of up to October 7, 2017. With the sale and transfer of the pool of receivables, credit risks on the pool of receivables were transferred from the Bank to the buyer

Selanjutnya, KIK-DSMF-II menerbitkan Efek Beragunan Aset (EBA) yang merupakan bentuk partisipasi dalam kepemilikan bersama atas kumpulan tagihan. EBA diterbitkan dalam dua kelas yaitu:

Further, KIK-DSMF-II issued Asset-Backed Securities (ABS), which represent instruments of joint ownership on the pool of receivables. ABS were issued in two types or classes as follows:

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

(i) EBA Kelas A senilai Rp360.000 yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia dan ditawarkan kepada publik dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas A dengan tingkat bunga tetap sebesar 11% per tahun dengan tanggal jatuh tempo 10 Desember 2019. EBA Kelas A telah mendapatkan hasil pemeringkatan atas efek beragun aset dari PT Pemeringkat Efek Indonesia yaitu idAAA. Pada tanggal 30 Oktober 2009, Surat Pernyataan Pendaftaran dari KIK-DSMF-II telah mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui surat No. S-9604/BL/2009 tanggal 30 Oktober 2009; dan

(i) Class A ABS amounting to Rp360,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange, and offered to the public at 100% of the nominal value of Class A ABS with an annual fixed interest rate of 11% and due on December 10, 2019. The Class A ABS were rated idAAA by PT Pemeringkat Efek Indonesia. On October 30, 2009, the Registration Statement Letter from KIK-DSMF-II became effective based on Letter No. S-9604/BL/2009 dated October 30, 2009 of the Chairman of Bapepam-LK; and

(ii) EBA Kelas B dengan nilai pokok sebesar Rp31.305 yang ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas B dan memiliki tanggal jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2019. EBA Kelas B tidak dicatat pada Bursa Efek Indonesia, namun ditawarkan kepada calon pembeli dengan ketentuan bahwa Bank mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli EBA Kelas B. Pemegang EBA Kelas B berhak atas semua arus kas tersisa sesuai dengan urutan prioritas pembayaran untuk setiap periode bunga. Pada tanggal 10 November 2009, Bank telah membeli dan mencatat EBA Kelas B sebagai efek yang dimiliki hingga jatuh tempo pada laporan posisi keuangan Bank (Catatan 8).

(ii) Class B ABS with a principal value of Rp31,305 offered at 100% of the nominal value of Class B ABS and will mature on December 10, 2019. The Class B ABS are not registered in the Indonesia Stock Exchange but are offered to prospective buyer with the condition that the Bank has the first priority to purchase such securities. Class B ABS holders have the right on the residual cash flows based on the payment priorities on each interest payment period. On November 10, 2009, the Bank purchased and recorded Class B ABS as held-to-maturity securities in the Bank's statement of financial position (Note 8).

Transaksi penjualan kumpulan tagihan telah memperoleh opini penjualan putus (true sale) dari pihak independen yang terdiri dari pendapat dari segi akuntansi oleh Akuntan Independen dan pendapat dari segi hukum oleh kantor konsultan hukum independen. Atas dasar opini kedua pihak independen tersebut, Bank telah mengeluarkan kumpulan tagihan sebesar Rp391.305 dari laporan posisi keuangan Bank (penghentian pengakuan).

A true sale opinion was rendered on the sale of the pool of receivables from independent parties, which consisted of accounting opinion from an independent accountant and legal opinion from an independent legal consulting firm. Based on the opinions of the above two independent parties, the Bank derecognized the pool of receivables amounting to Rp391,305 from its statement of financial position.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

Atas transaksi sekuritisasi atas kumpulan tagihan tersebut di atas, Bank juga bertindak sebagai penyedia jasa sebagaimana tertuang dalam perjanjian penyediaan jasa No. 56/PKS/DIR/2009 tanggal 7 Agustus 2009. Peran utama Bank sebagai penyedia jasa antara lain mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga dari para debitur untuk setiap periode penagihan, mentransfer secara bulanan hasil penagihan kepada KIK-DSMF-II dan mengadministrasikannya dengan baik, aman dan teratur serta profesional untuk kepentingan KIK-DSMF-II yang merupakan representasi dari para pemegang EBA.

Based on the Service Provider Agreement No. 56/PKS/DIR/2009 dated August 7, 2009, the Bank also acts as a service provider in the above securitization transaction of the pool of receivables. The Bank's primary role as a service provider, among others, is to collect the principal and interest payments from debtors on each collection period, to transfer monthly the proceeds from collection to the KIK-DSMF-II and to maintain the good, safe, orderly and professional administration of the debtors' accounts for the interest of KIK-DSMF-II, which represents the ABS holders.

Setelah jumlah pokok terhutang atas kumpulan tagihan EBA kelas A telah berkurang menjadi 10% (atau kurang) dari jumlah pokok terhutang pada tanggal *cut-off final* (7 Oktober 2009), Bank sebagai penyedia jasa, mempunyai opsi untuk membeli dari para pemegang EBA Kelas A yang diwakili oleh Bank kustodian, pada tiap tanggal pembayaran, seluruh dan tidak hanya sebagian, kumpulan tagihan yang tersisa dengan harga yang sama dengan, mana yang lebih tinggi, antara (i) jumlah pokok terhutang dari kumpulan tagihan berikut bunganya yang terhutang dikurangi dengan tagihan tertunggak pada saat dilaksanakannya *clean-up call* atau (ii) jumlah pokok terutang dari EBA kelas A berikut bunganya yang terhutang ditambah biaya-biaya senior dan pajak terhutang saat itu yang wajib dibayar.

After the decrease in the outstanding principal amount of the Class A ABS pool of receivables to 10% (or less) from the principal amount on the final cut-off date (October 7, 2009), the Bank as the service provider, has the option to purchase on each payment date, all and not only a part of the residual pool of receivables from the Class A ABS holders, who are represented by the custodian bank, at a price equal to or the higher between (i) the outstanding principal amount of the pool of receivables including interest after deducting the amount of late payments on the receivables at the time of exercising the clean-up call or (ii) the outstanding principal amount of Class A ABS including interest and other senior expenses and taxes payable at that period of time.

viii. Bank telah melakukan sekuritisasi ketiga atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah ("kumpulan tagihan") yang dimilikinya dengan menunjuk PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) sebagai *arranger* (penata transaksi) dan Pembeli Siaga serta Pendukung Kredit. Selanjutnya atas kumpulan tagihan yang memenuhi kriteria pemilihan, oleh Bank, sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa BTN01-KPR BTN (KIK-DBTN-01) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 158 tanggal 16 Desember 2010 dan Akta cession No. 33 tanggal 27 Desember 2010.

viii. The Bank conducted the third securitization transaction on its housing loans ("pool of receivables"), by appointing PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) as the Arranger, Standby Buyer and Credit Support. The pool of receivables, which met the criteria for selection by the Bank, as the Initial Creditor, were sold and transferred to Collective Investment Contract Asset-Backed Securities Danareksa BTN01-KPR BTN (KIK-DBTN-01) based on sale-purchase deed No. 158 dated December 16, 2010 and Deed of Assignment No. 33 dated December 27, 2010.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

KIK-DBTN-01 dibentuk berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian berdasarkan Akta No. 118 tanggal 15 Desember 2010. Nilai pokok kumpulan tagihan yang dijual dan dialihkan tersebut yang merupakan kumpulan tagihan terseleksi adalah sebesar Rp750.000 yang terdiri dari 33.663 debitur dengan harga sebesar nilai pokok kumpulan tagihan pada tanggal *cut-off final* (12 Desember 2010). Tingkat suku bunga yang dikenakan pada debitur kumpulan tagihan tersebut pada tanggal penjualan adalah sebesar 15% dengan tanggal jatuh tempo maksimum adalah 27 September 2019. Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kumpulan tagihan tersebut, risiko kredit atas kumpulan tagihan telah beralih dari Bank kepada pembeli.

KIK-DBTN-01 was established based on Collective Investment Contract between PT Danareksa Investment Management as the investment manager and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Custodian Bank based on deed No. 118 dated December 15, 2010. The pool of receivables, which represents selected receivables totaling to Rp750,000 and consisting of 33,663 debtors, were sold and transferred at their total principal values as of final cut-off date (December 12, 2010). The interest rate charged to the debtors of the pool of receivables on the date of sale is 15% with a maximum maturity of up to September 27, 2019. With the sale and transfer of the pool of receivables, credit risks on the pool of receivables were transferred from the Bank to the buyer.

Selanjutnya, KIK-DBTN-01 menerbitkan Efek Beragunan Aset (EBA) yang merupakan bentuk partisipasi dalam kepemilikan bersama atas kumpulan tagihan. EBA diterbitkan dalam dua kelas yaitu:

Further, KIK-DBTN-01 issued Asset-Backed Securities (ABS), which represent instruments of joint ownership on the pool of receivables. ABS were issued in two types or classes as follows:

- (i) EBA Kelas A senilai Rp688.500 yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia dan ditawarkan kepada publik dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas A dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun dengan tanggal jatuh tempo 27 September 2019. EBA Kelas A telah mendapatkan hasil pemeringkatan atas efek beragun aset dari PT Pemeringkat Efek Indonesia yaitu idAAA. Pada tanggal 30 Oktober 2009, Surat Pernyataan Pendaftaran dari KIK-DBTN-01 telah mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui surat No. S-11491/BL/2010 tanggal 23 Desember 2010; dan

- (i) Class A ABS amounting to Rp688,500, which are registered in the Indonesia Stock Exchange, and offered to the public at 100% of the nominal value of Class A ABS with an annual fixed interest rate of 9.25% and due on September 27, 2019. The Class A ABS were rated idAAA by PT Pemeringkat Efek Indonesia. The Registration Statement Letter from KIK-DBTN-01 dated October 30, 2009 became effective based on Letter No. S-11491/BL/2010 dated December 23, 2010 of the Chairman of Bapepam-LK; and

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

(ii) EBA Kelas B dengan nilai pokok sebesar Rp61.500 yang ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas B dan memiliki tanggal jatuh tempo pada tanggal 27 September 2019. EBA Kelas B tidak dicatat pada Bursa Efek Indonesia namun ditawarkan kepada calon pembeli dengan ketentuan bahwa Bank mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli EBA Kelas B. Pemegang EBA Kelas B berhak atas semua arus kas tersisa sesuai dengan urutan prioritas pembayaran untuk setiap periode bunga. Pada tanggal 27 Desember 2010, Bank telah membeli dan mencatat EBA Kelas B sebagai efek yang dimiliki hingga jatuh tempo pada laporan posisi keuangan Bank (Catatan 8).

(ii) Class B ABS with a principal value of Rp61,500 offered at 100% of the nominal value of Class B ABS and will mature on September 27, 2019. The Class B ABS are not registered in the Indonesia Stock Exchange but are offered to prospective buyers with the condition that the Bank has the first priority to purchase such securities. Class B ABS holders have the right on the residual cash flows based on the payment priorities on each interest payment period. On December 27, 2010, the Bank purchased and recorded Class B ABS as held-to-maturity securities in the Bank's statement of financial position (Note 8).

Transaksi penjualan kumpulan tagihan telah memperoleh opini penjualan putus (true sale) dari pihak independen yang terdiri dari pendapat dari segi akuntansi oleh akuntan independen dan pendapat dari segi hukum oleh kantor konsultan hukum independen. Atas dasar opini kedua pihak independen tersebut, Bank telah mengeluarkan kumpulan tagihan sebesar Rp750.000 dari laporan posisi keuangan Bank (penghentian pengakuan).

A true sale opinion was rendered on the sale of the pool of receivables from independent parties, which consisted of accounting opinion from an independent accountant and legal opinion from an independent legal consulting firm. Based on the opinions of the above two independent parties, the Bank derecognized the pool of receivables amounting to Rp750,000 from its statement of financial position.

Atas transaksi sekuritisasi atas kumpulan tagihan tersebut di atas, Bank juga bertindak sebagai penyedia jasa sebagaimana tertuang dalam perjanjian penyediaan jasa No. 47/PKS/DIR/2010 tanggal 15 November 2010. Peran utama Bank sebagai penyedia jasa antara lain mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga dari para debitur untuk setiap periode penagihan, mentransfer secara bulanan hasil penagihan kepada KIK-DBTN-01 dan mengadministrasikannya dengan baik, aman dan teratur serta profesional untuk kepentingan KIK-DBTN-01 yang merupakan representasi dari para pemegang EBA.

Based on the Service Provider Agreement No. 47/PKS/DIR/2010 dated November 15, 2010, the Bank also acts as a service provider in the above securitization transaction of the pool of receivables. The Bank's primary role as a service provider, among others, is to collect the principal and interest payments from debtors on each collection period, to transfer monthly the proceeds from collection to the KIK-DBTN-01 and to maintain the good, safe, orderly and professional administration of the debtors' accounts for the interest of KIK-DBTN-01, which represents the ABS holders.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

Setelah jumlah pokok terhutang atas kumpulan tagihan EBA Kelas A telah berkurang menjadi 10% (atau kurang) dari jumlah pokok terhutang pada tanggal *cut off final* (12 Desember 2010), Bank sebagai penyedia jasa, mempunyai opsi untuk membeli dari para pemegang EBA Kelas A yang diwakili oleh Bank kustodian, pada tiap tanggal pembayaran, seluruh dan tidak hanya sebagian, kumpulan tagihan yang tersisa dengan harga yang sama dengan, mana yang lebih tinggi, antara (i) jumlah pokok terhutang dari kumpulan tagihan berikut bunganya yang terhutang dikurangi dengan tagihan tertunggak pada saat dilaksanakannya *clean-up call* atau (ii) jumlah pokok terutang dari EBA kelas A berikut bunganya yang terhutang ditambah biaya-biaya senior dan pajak terhutang saat itu yang wajib dibayar.

After the decrease in the outstanding principal amount of the Class A ABS pool of receivables to 10% (or less) from the principal amount on the final cut-off date (December 12, 2010), the Bank as the service provider, has the option to purchase on each payment date, all and not only a part of the residual pool of receivables from the Class A ABS holders, who are represented by the custodian bank, at a price equal to or the higher between (i) the outstanding principal amount of the pool of receivables including interest after deducting the amount of late payments on the receivables at the time of exercising the clean-up call and (ii) the outstanding principal amount of Class A ABS including interest and other senior expenses and taxes payable at that period of time.

- ix. Bank telah melakukan sekuritisasi keempat atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah ("kumpulan tagihan") yang dimilikinya dengan menunjuk PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) sebagai *arranger* (penata transaksi) dan Pembeli Siaga serta Pendukung Kredit. Selanjutnya atas kumpulan tagihan yang memenuhi kriteria pemilihan, oleh Bank, sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa BTN02-KPR BTN (KIK-DBTN-02) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 37 tanggal 25 Oktober 2011 dan Akta cessione No. 31 tanggal 16 November 2011.

- ix. The Bank conducted the fourth securitization transaction on its housing loans ("pool of receivables"), by appointing PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) as the Arranger, Standby Buyer and Credit Support. The pool of receivables, which met the criteria for selection by the Bank, as the Initial Creditor, were sold and transferred to Collective Investment Contract Asset-Backed Securities Danareksa BTN02-KPR BTN (KIK-DBTN-02) based on sale-purchase deed No. 37 dated October 25, 2011 and Deed of Assignment No. 31 dated November 16, 2011.

KIK-DBTN-02 dibentuk berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian berdasarkan Akta No.15 tanggal 15 September 2011.

KIK-DBTN-02 was established based on Collective Investment Contract between PT Danareksa Investment Management as the investment manager and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Custodian Bank based on deed No. 15 dated September 15, 2011.

Nilai pokok kumpulan tagihan yang dijual dan dialihkan tersebut yang merupakan kumpulan tagihan terseleksi adalah sebesar Rp703.450 yang terdiri dari 19.810 debitur dengan harga sebesar nilai pokok kumpulan tagihan pada tanggal *cut-off final* (19 Oktober 2011).

On the final cut-off date (October 19, 2011), the pool of receivables, which represent selected receivables totaling to Rp703,450 and consisting of 19,810 debtors, were sold and transferred at their total principal values.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

Tingkat suku bunga yang dikenakan pada debitur kumpulan tagihan tersebut pada tanggal penjualan adalah sebesar 13,58% dengan tanggal jatuh tempo maksimum adalah 1 Februari 2020. Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kumpulan tagihan tersebut, risiko kredit atas kumpulan tagihan telah beralih dari Bank kepada pembeli.

The interest rate charged to the debtors of the pool of receivables on the date of sale is 13.58% with a maximum maturity of up to February 1, 2020. With the sale and transfer of the pool of receivables, credit risks on the pool of receivables were transferred from the Bank to the buyer.

Selanjutnya, KIK-DBTN-02 menerbitkan Efek Beragunan Aset (EBA) yang merupakan bentuk partisipasi dalam kepemilikan bersama atas kumpulan tagihan. EBA diterbitkan dalam dua kelas yaitu:

Further, KIK-DBTN-02 issued Asset-Backed Securities (ABS), which represent instruments of joint ownership on the pool of receivables. ABS were issued in two types or classes as follows:

(i) EBA Kelas A senilai Rp645.000 yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia dan ditawarkan kepada publik dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas A dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun dengan tanggal jatuh tempo 27 Februari 2021. EBA Kelas A telah mendapatkan hasil pemeringkatan atas efek beragun aset dari PT Pemeringkat Efek Indonesia yaitu idAAA. Pada tanggal 3 November 2011, Surat Pernyataan Pendaftaran dari KIK-DBTN-02 telah mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui surat No. S-11916/BL/2010 tanggal 3 November 2011; dan

(i) Class A ABS amounting to Rp645,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange, and offered to the public at 100% of the nominal value of Class A ABS with an annual fixed interest rate of 8.75% and due on February 27, 2021. The Class A ABS were rated idAAA by PT Pemeringkat Efek Indonesia. The Registration Statement Letter from KIK-DBTN-02 dated November 3, 2011 became effective based on Letter No. S-11916/BL/2010 dated November 3, 2011 of the Chairman of Bapepam-LK; and

(ii) EBA Kelas B dengan nilai pokok sebesar Rp58.450 yang ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas B dan memiliki tanggal jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2021. EBA Kelas B tidak dicatat pada Bursa Efek Indonesia namun ditawarkan kepada calon pembeli dengan ketentuan bahwa Bank mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli EBA Kelas B. Pemegang EBA Kelas B berhak atas semua arus kas tersisa sesuai dengan urutan prioritas pembayaran untuk setiap periode bunga. Pada tanggal 16 November 2011, Bank telah membeli dan mencatat EBA Kelas B sebagai efek yang dimiliki hingga jatuh tempo pada laporan posisi keuangan Bank (Catatan 8).

(ii) Class B ABS with a principal value of Rp58,450 offered at 100% of the nominal value of Class B ABS and will mature on February 27, 2021. The Class B ABS are not registered in the Indonesia Stock Exchange but are offered to prospective buyers with the condition that the Bank has the first priority to purchase such securities. Class B ABS holders have the right on the residual cash flows based on the payment priorities on each interest payment period. On November 16, 2011, Bank purchased and recorded Class B ABS as held-to-maturity securities in the Bank's statement of financial position (Note 8).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

Transaksi penjualan kumpulan tagihan telah memperoleh opini penjualan putus (true sale) dari pihak independen yang terdiri dari pendapat dari segi akuntansi oleh akuntan independen dan pendapat dari segi hukum oleh kantor konsultan hukum independen. Atas dasar opini kedua pihak independen tersebut, Bank telah mengeluarkan kumpulan tagihan sebesar Rp703.450 dari laporan posisi keuangan Bank (penghentian pengakuan).

A true sale opinion was rendered on the sale of the pool of receivables from independent parties, which consisted of accounting opinion from an independent accountant and legal opinion from an independent legal consultant. Based on the opinions of the above two independent parties, the Bank derecognized the pool of receivables amounting to Rp703,450 from its statement of financial position.

Atas transaksi sekuritisasi atas kumpulan tagihan tersebut di atas, Bank juga bertindak sebagai penyedia jasa sebagaimana tertuang dalam perjanjian penyediaan jasa No. 09/PKS/TRSD/2011 tanggal 21 Oktober 2011. Peran utama Bank sebagai penyedia jasa antara lain mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga dari para debitur untuk setiap periode penagihan, mentransfer secara bulanan hasil penagihan kepada KIK-DBTN-02 dan mengadministrasikannya dengan baik, aman dan teratur serta profesional untuk kepentingan KIK-DBTN-02 yang merupakan representasi dari para pemegang EBA.

Based on the Service Provider Agreement No. 09/PKS/TRSD/2011 dated October 21, 2011, the Bank also acts as a service provider in the above securitization transaction of the pool of receivables. The Bank's primary role as a service provider, among others, is to collect the principal and interest payments from debtors on each collection period, to transfer monthly the proceeds from collection to the KIK-DBTN-02 and to maintain the good, safe, orderly and professional administration of the debtors' accounts for the interest of KIK-DBTN-02, which represents the ABS holders.

Setelah jumlah pokok terhutang atas kumpulan tagihan EBA Kelas A telah berkurang menjadi 10% (atau kurang) dari jumlah pokok terhutang pada tanggal *cut-off final* (19 Oktober 2011), Bank sebagai penyedia jasa, mempunyai opsi untuk membeli dari para pemegang EBA Kelas A yang diwakili oleh Bank kustodian, pada tiap tanggal pembayaran, seluruh dan tidak hanya sebagian, kumpulan tagihan yang tersisa dengan harga yang sama dengan, mana yang lebih tinggi, antara (i) jumlah pokok terhutang dari kumpulan tagihan berikut bunganya yang terhutang dikurangi dengan tagihan tertunggak pada saat dilaksanakannya *clean-up call* atau (ii) jumlah pokok terutang dari EBA Kelas A berikut bunganya yang terhutang ditambah biaya-biaya senior dan pajak terhutang saat itu yang wajib dibayar.

After the decrease in the outstanding principal amount of the Class A ABS pool of receivables to 10% (or less) from the principal amount on the final cut-off date (October 19, 2011), the Bank as the service provider, has the option to purchase on each payment date, all and not only a part of the residual pool of receivables from the Class A ABS holders, who are represented by the custodian bank, at a price equal to or the higher between (i) the outstanding principal amount of the pool of receivables including interest after deducting the amount of late payments on the receivables at the time of exercising the clean-up call and (ii) the outstanding principal amount of Class A ABS including interest and other senior expenses and taxes payable at that period of time.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

- x. Bank telah melakukan sekuritisasi kelima, atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah ("kumpulan tagihan") yang dimilikinya dengan menunjuk PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) sebagai *arranger* (penata transaksi) dan Pembeli Siaga serta Pendukung Kredit. Selanjutnya atas kumpulan tagihan yang memenuhi kriteria pemilihan, oleh Bank, sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa BTN03-KPR BTN (KIK-DBTN-03) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 39 tanggal 14 November 2012 dan Akta cessione No. 36 tanggal 12 Desember 2012.

- x. The Bank conducted the fifth securitization transaction on its housing loans ("pool of receivables"), by appointing PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) as the Arranger, Standby Buyer and Credit Support. The pool of receivables, which met the criteria for selection by the Bank, as the Initial Creditor, were sold and transferred to Collective Investment Contract Asset-Backed Securities Danareksa BTN03-KPR BTN (KIK-DBTN-03) based on sale-purchase deed No. 39 dated November 14, 2012 and Deed of Assignment No. 36 dated December 12, 2012.

KIK-DBTN-03 dibentuk berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian berdasarkan Akta No. 38 tanggal 14 November 2012.

KIK-DBTN-03 was established based on Collective Investment Contract between PT Danareksa Investment Management as the investment manager and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Custodian Bank based on deed No. 38 dated November 14, 2012.

Nilai pokok kumpulan tagihan yang dijual dan dialihkan tersebut yang merupakan kumpulan tagihan terseleksi adalah sebesar Rp1.000.000 yang terdiri dari 25.842 debitur dengan harga sebesar nilai pokok kumpulan tagihan pada tanggal *cut-off final* (8 November 2012).

On the final cut-off date (November 8, 2012), the pool of receivables, which represent selected receivables totaling to Rp1,000,000 and consisting of 25,842 debtors, were sold and transferred at their total principal values.

Tingkat suku bunga yang dikenakan pada debitur kumpulan tagihan tersebut pada tanggal penjualan adalah sebesar 11,85% dengan tanggal jatuh tempo maksimum adalah 7 Januari 2023. Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kumpulan tagihan tersebut, risiko kredit atas kumpulan tagihan telah beralih dari Bank kepada pembeli.

The interest rate charged to the debtors of the pool of receivables on the date of sale is 11.85% with a maximum maturity of up to January 7, 2023. With the sale and transfer of the pool of receivables, credit risks on the pool of receivables were transferred from the Bank to the buyer.

Selanjutnya, KIK-DBTN-03 menerbitkan Efek Beragun Aset (EBA) yang merupakan bentuk partisipasi dalam kepemilikan bersama atas kumpulan tagihan. EBA diterbitkan dalam dua kelas yaitu:

Further, KIK-DBTN-03 issued Asset-Backed Securities (ABS), which represent instruments of joint ownership on the pool of receivables. ABS were issued in two types or classes as follows:

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

- (i) EBA Kelas A senilai Rp925.000 yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia dan ditawarkan kepada publik dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas A dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun dengan tanggal jatuh tempo 7 Januari 2023. EBA Kelas A telah mendapatkan hasil pemerinkatan atas efek beragun aset dari PT Pemerinkat Efek Indonesia yaitu idAAA. Pada tanggal 5 Desember 2012, Surat Pernyataan Pendaftaran KIK-DBTN-03 telah mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui surat No. S-13867/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012; dan
- (ii) EBA Kelas B dengan nilai pokok sebesar Rp75.000 yang ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas B dan memiliki tanggal jatuh tempo pada tanggal 7 Januari 2023. EBA Kelas B tidak dicatat pada Bursa Efek Indonesia namun ditawarkan kepada calon pembeli dengan ketentuan bahwa Bank mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli EBA Kelas B. Pemegang EBA Kelas B berhak atas semua arus kas tersisa sesuai dengan urutan prioritas pembayaran untuk setiap periode bunga. Pada tanggal 12 Desember 2012, Bank telah membeli dan mencatat EBA Kelas B sebagai efek yang dimiliki hingga jatuh tempo pada laporan posisi keuangan Bank (Catatan 8).

- (i) Class A ABS amounting to Rp925,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange, and offered to the public at 100% of the nominal value of Class A ABS with an annual fixed interest rate of 7.75% and due on January 7, 2023. The Class A ABS were rated idAAA by PT Pemerinkat Efek Indonesia. The Registration Statement Letter from KIK-DBTN-03 dated December 5, 2012 became effective based on Letter No. S-13867/BL/2012 dated December 5, 2012 of the Chairman of Bapepam-LK; and
- (ii) Class B ABS with a principal value of Rp75,000 offered at 100% of the nominal value of Class B ABS and will mature on January 7, 2023. The Class B ABS are not registered in the Indonesia Stock Exchange but are offered to prospective buyers with the condition that the Bank has the first priority to purchase such securities. Class B ABS holders have the right on the residual cash flows based on the payment priorities on each interest payment period. On December 12, 2012, Bank purchased and recorded Class B ABS as held-to-maturity securities in the Bank's statement of financial position (Note 8).

Transaksi penjualan kumpulan tagihan telah memperoleh opini penjualan putus (true sale) dari pihak independen yang terdiri dari pendapat dari segi akuntansi oleh Akuntan Independen dan pendapat dari segi hukum oleh kantor konsultan hukum independen. Atas dasar opini kedua pihak independen tersebut, Bank telah mengeluarkan kumpulan tagihan sebesar Rp1.000.000 dari laporan posisi keuangan Bank (penghentian pengakuan).

A true sale opinion was rendered on the sale of the pool of receivables from independent parties, which consisted of accounting opinion from an independent accountant and legal opinion from an independent legal consultant. Based on the opinions of the above two independent parties, the Bank derecognized the pool of receivables amounting to Rp1,000,000 from its statement of financial position.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

Atas transaksi sekuritisasi atas kumpulan tagihan tersebut di atas, Bank juga bertindak sebagai Penyedia Jasa sebagaimana tertuang dalam perjanjian penyediaan jasa No. 09/PKS/TRSD/2012 tanggal 14 November 2012. Peran utama Bank sebagai penyedia jasa antara lain mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga dari para debitur untuk setiap periode penagihan, mentransfer secara bulanan hasil penagihan kepada KIK-DBTN-03 dan mengadministrasikannya dengan baik, aman dan teratur serta profesional untuk kepentingan KIK-DBTN-03 yang merupakan representasi dari para pemegang EBA.

Based on the Service Provider Agreement No. 09/PKS/TRSD/2012 dated November 14, 2012, the Bank also acts as a service provider in the above securitization transaction of the pool of receivables. The Bank's primary role as a service provider, among others, is to collect the principal and interest payments from debtors on each collection period, to transfer monthly the proceeds from collection to the KIK-DBTN-03 and to maintain the good, safe, orderly and professional administration of the debtors' accounts for the interest of KIK-DBTN-03, which represents the ABS holders.

Setelah jumlah pokok terhutang atas kumpulan tagihan EBA Kelas A telah berkurang menjadi 10% (atau kurang) dari jumlah pokok terhutang pada tanggal *cut-off final* (8 November 2012), Bank sebagai penyedia jasa, mempunyai opsi untuk membeli dari para pemegang EBA Kelas A yang diwakili oleh Bank kustodian, pada tiap tanggal pembayaran, seluruh dan tidak hanya sebagian, kumpulan tagihan yang tersisa dengan harga yang sama dengan, mana yang lebih tinggi, antara (i) jumlah pokok terhutang dari kumpulan tagihan berikut bunganya yang terhutang dikurangi dengan tagihan tertunggak pada saat dilaksanakannya *clean-up call* atau (ii) jumlah pokok terhutang dari EBA kelas A berikut bunganya yang terhutang ditambah biaya-biaya senior dan pajak terhutang saat itu yang wajib dibayar.

After the decrease in the outstanding principal amount of the Class A ABS pool of receivables to 10% (or less) from the principal amount on the final cut-off date (November 8, 2012), the Bank as the service provider, has the option to purchase on each payment date, all and not only a part of the residual pool of receivables from the Class A ABS holders, who are represented by the custodian bank, at a price equal to or the higher between (i) the outstanding principal amount of the pool of receivables including interest after deducting the amount of late payments on the receivables at the time of exercising the clean-up call and (ii) the outstanding principal amount of Class A ABS including interest and other senior expenses and taxes payable at that period of time.

- xi. Bank telah melakukan sekuritisasi keenam, atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah ("kumpulan tagihan") yang dimilikinya dengan menunjuk PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) sebagai *arranger* (penata transaksi) dan Pembeli Siaga serta Pendukung Kredit. Selanjutnya atas kumpulan tagihan yang memenuhi kriteria pemilihan, oleh Bank, sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa BTN04-KPR BTN (KIK-DBTN-04) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 4 tanggal 4 Desember 2013 dan Akta cession No. 40 tanggal 20 Desember 2013.

- xi. The Bank conducted the sixth securitization transaction on its housing loans ("pool of receivables"), by appointing PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) as the Arranger, Standby Buyer and Credit Support. The pool of receivables, which met the criteria for selection by the Bank, as the Initial Creditor, were sold and transferred to Collective Investment Contract Asset-Backed Securities Danareksa BTN04-KPR BTN (KIK-DBTN-04) based on sale-purchase deed No. 4 dated December 4, 2013 and Deed of Assignment No. 40 dated December 20, 2013.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

KIK-DBTN-04 dibentuk berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian berdasarkan Akta No. 15 tanggal 8 Oktober 2013.

KIK-DBTN-04 was established based on Collective Investment Contract between PT Danareksa Investment Management as the investment manager and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Custodian Bank based on deed No. 15 dated October 8, 2013.

Nilai pokok kumpulan tagihan yang dijual dan dialihkan tersebut yang merupakan kumpulan tagihan terseleksi adalah sebesar Rp1.000.000 yang terdiri dari 34.452 debitur dengan harga sebesar nilai pokok kumpulan tagihan pada tanggal *cut-off final* (2 Desember 2013).

On the final cut-off date (December 2, 2013), the pool of receivables, which represent selected receivables totaling to Rp1,000,000 and consisting of 34,452 debtors, were sold and transferred at their total principal values.

Tingkat suku bunga yang dikenakan pada debitur kumpulan tagihan tersebut pada tanggal penjualan adalah sebesar 12,48% dengan tanggal jatuh tempo maksimum adalah 26 Agustus 2020. Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kumpulan tagihan tersebut, risiko kredit atas kumpulan tagihan telah beralih dari Bank kepada pembeli.

The interest rate charged to the debtors of the pool of receivables on the date of sale is 12.48% with a maximum maturity of up to August 26, 2020. With the sale and transfer of the pool of receivables, credit risks on the pool of receivables were transferred from the Bank to the buyer.

Selanjutnya, KIK-DBTN-04 menerbitkan Efek Beragunan Aset (EBA) yang merupakan bentuk partisipasi dalam kepemilikan bersama atas kumpulan tagihan. EBA diterbitkan dalam dua kelas yaitu:

Further, KIK-DBTN-04 issued Asset-Backed Securities (ABS), which represent instruments of joint ownership on the pool of receivables. ABS were issued in two types or classes as follows:

- (i) EBA Kelas A senilai total Rp928.000 yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia dan ditawarkan kepada publik dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas A1 sebesar Rp403.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% per tahun dan A2 sebesar Rp525.000 sebesar 9,50% per tahun dengan tanggal jatuh tempo final pada 26 Februari 2022. EBA Kelas A telah mendapatkan hasil pemeringkatan atas efek beragun asset dari PT Pemeringkat Efek Indonesia yaitu idAAA. Pada tanggal 4 Desember 2013, Surat Pernyataan Pendaftaran KIK-DBTN-04 telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-433/D.04/2013 tanggal 17 Desember 2013; dan

- (i) Class A ABS amounted to Rp928,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange, and offered to the public at 100% of the nominal value of Class A1 in amount of Rp403,000 ABS with an annual fixed interest rate of 8.90% and A2 in amount of Rp525,000 ABS with annual fixed interest rate of 9.50% and due on February 26, 2022. The Class A ABS were rated idAAA by PT Pemeringkat Efek Indonesia. The Registration Statement Letter from KIK-DBTN-04 dated December 4, 2013 became effective based on Letter No. S-433/D.04/2013 dated December 17, 2013 of OJK; and

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

(ii) EBA Kelas B dengan nilai pokok sebesar Rp72.000 yang ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas B dan memiliki tanggal jatuh tempo final pada tanggal 26 Februari 2022. EBA Kelas B tidak dicatat pada Bursa Efek Indonesia namun ditawarkan kepada calon pembeli dengan ketentuan bahwa Bank mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli EBA Kelas B. Pemegang EBA Kelas B berhak atas semua arus kas tersisa sesuai dengan urutan prioritas pembayaran untuk setiap periode bunga. Pada tanggal 20 Desember 2013, Bank telah membeli dan mencatat EBA Kelas B sebagai efek yang tersedia untuk dijual pada laporan posisi keuangan Bank (Catatan 8).

(ii) Class B ABS with a principal value of Rp72,000 offered at 100% of the nominal value of Class B ABS and will mature on February 26, 2022. The Class B ABS are not registered in the Indonesia Stock Exchange but are offered to prospective buyers with the condition that the Bank has the first priority to purchase such securities. Class B ABS holders have the right on the residual cash flows based on the payment priorities on each interest payment period. On December 20, 2013, Bank purchased and recorded Class B ABS as available-for-sale securities in the Bank's statement of financial position (Note 8).

Transaksi penjualan kumpulan tagihan telah memperoleh opini penjualan putus (true sale) dari pihak independen yang terdiri dari pendapat dari segi akuntansi oleh Akuntan Independen dan pendapat dari segi hukum oleh kantor konsultan hukum independen. Atas dasar opini kedua pihak independen tersebut, Bank telah mengeluarkan kumpulan tagihan sebesar Rp1.000.000 dari laporan posisi keuangan Bank (penghentian pengakuan).

A true sale opinion was rendered on the sale of the pool of receivables from independent parties, which consisted of accounting opinion from an independent accountant and legal opinion from an independent legal consultant. Based on the opinions of the above two independent parties, the Bank derecognized the pool of receivables amounting to Rp1,000,000 from its statement of financial position.

Atas transaksi sekuritisasi atas kumpulan tagihan tersebut di atas, Bank juga bertindak sebagai Penyedia Jasa sebagaimana tertuang dalam perjanjian penyediaan jasa No. 12/PKS/IBD/2013 tanggal 4 Desember 2013. Peran utama Bank sebagai penyedia jasa antara lain mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga dari para debitur untuk setiap periode penagihan, mentransfer secara bulanan hasil penagihan kepada KIK-DBTN-04 dan mengadministrasikannya dengan baik, aman dan teratur serta profesional untuk kepentingan KIK-DBTN-04 yang merupakan representasi dari para pemegang EBA.

Based on the Service Provider Agreement No. 12/PKS/IBD/2013 dated December 4, 2013, the Bank also acts as a service provider in the above securitization transaction of the pool of receivables. The Bank's primary role as a service provider, among others, is to collect the principal and interest payments from debtors on each collection period, to transfer monthly the proceeds from collection to the KIK-DBTN-04 and to maintain the good, safe, orderly and professional administration of the debtors' accounts for the interest of KIK-DBTN-04, which represents the ABS holders.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

Setelah jumlah pokok terhutang atas kumpulan tagihan EBA Kelas A telah berkurang menjadi 10% (atau kurang) dari jumlah pokok terhutang pada tanggal *cut-off final* (2 Desember 2013), Bank sebagai penyedia jasa, mempunyai opsi untuk membeli dari para pemegang EBA Kelas A yang diwakili oleh Bank kustodian, pada tiap tanggal pembayaran, seluruh dan tidak hanya sebagian, kumpulan tagihan yang tersisa dengan harga yang sama dengan, mana yang lebih tinggi, antara (i) jumlah pokok terhutang dari kumpulan tagihan berikut bunganya yang terhutang dikurangi dengan tagihan tertunggak pada saat dilaksanakannya *clean-up call* atau (ii) jumlah pokok terutang dari EBA kelas A berikut bunganya yang terhutang ditambah biaya-biaya senior dan pajak terhutang saat itu yang wajib dibayar.

After the decrease in the outstanding principal amount of the Class A ABS pool of receivables to 10% (or less) from the principal amount on the final cut-off date (December 2, 2013), the Bank as the service provider, has the option to purchase on each payment date, all and not only a part of the residual pool of receivables from the Class A ABS holders, who are represented by the custodian bank, at a price equal to or the higher between (i) the outstanding principal amount of the pool of receivables including interest after deducting the amount of late payments on the receivables at the time of exercising the clean-up call and (ii) the outstanding principal amount of Class A ABS including interest and other senior expenses and taxes payable at that period of time.

- xii. Bank telah melakukan sekuritisasi ketujuh, atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah ("kumpulan tagihan") yang dimilikinya dengan menunjuk PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) sebagai *arranger* (penata transaksi) dan Pembeli Siaga serta Pendukung Kredit. Selanjutnya atas kumpulan tagihan yang memenuhi kriteria pemilihan, oleh Bank, sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa BTN05-KPR BTN (KIK-DBTN-05) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 32 tanggal 21 Oktober 2014 dan Akta cession No. 2 tanggal 2 Desember 2014.

- xii. The Bank conducted the seventh securitization transaction on its housing loans ("pool of receivables"), by appointing PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) as the Arranger, Standby Buyer and Credit Support. The pool of receivables, which met the criteria for selection by the Bank, as the Initial Creditor, were sold and transferred to Collective Investment Contract Asset-Backed Securities Danareksa BTN05-KPR BTN (KIK-DBTN-05) based on sale-purchase deed No. 32 dated October 21, 2014 and Deed of Assignment No. 2 dated December 2, 2014.

KIK-DBTN-05 dibentuk berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian berdasarkan Akta No. 30 tanggal 23 Juli 2014.

KIK-DBTN-05 was established based on Collective Investment Contract between PT Danareksa Investment Management as the investment manager and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Custodian Bank based on deed No. 30 dated July 23, 2014.

Nilai pokok kumpulan tagihan yang dijual dan dialihkan tersebut yang merupakan kumpulan tagihan terseleksi adalah sebesar Rp1.500.000 yang terdiri dari 33.173 debitur dengan harga sebesar nilai pokok Kumpulan Tagihan pada tanggal *cut-off final* (28 November 2014).

On the final cut-off date (November 28, 2014), the pool of receivables, which represent selected receivables totaling to Rp1,500,000 and consisting of 33,173 debtors, were sold and transferred at their total principal values.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

Tingkat suku bunga yang dikenakan pada debitur kumpulan tagihan tersebut pada tanggal penjualan adalah sebesar 12,48% dengan tanggal jatuh tempo maksimum adalah 26 Agustus 2020. Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kumpulan tagihan tersebut, risiko kredit atas kumpulan tagihan telah beralih dari Bank kepada pembeli.

The interest rate charged to the debtors of the pool of receivables on the date of sale is 12.48% with a maximum maturity of up to August 26, 2020. With the sale and transfer of the pool of receivables, credit risks on the pool of receivables were transferred from the Bank to the buyer.

Selanjutnya, KIK-DBTN-05 menerbitkan Efek Beragunan Aset (EBA) yang merupakan bentuk partisipasi dalam kepemilikan bersama atas kumpulan tagihan EBA diterbitkan dalam dua kelas yaitu:

Further, KIK-DBTN-05 issued Asset-Backed Securities (ABS), which represent instruments of joint ownership on the pool of receivables. ABS were issued in two types or classes as follows:

(i) EBA Kelas A senilai total Rp1.371.000 yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia dan ditawarkan kepada publik dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas A1 sebesar Rp723.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% per tahun dan A2 sebesar Rp647.500 sebesar 10,25% per tahun dengan tanggal jatuh tempo final pada 7 September 2025. EBA Kelas A telah mendapatkan hasil pemeringkatan atas efek beragun asset dari PT Pemeringkat Efek Indonesia yaitu idAAA. Pada tanggal 17 Oktober 2014, Surat Pernyataan Pendaftaran KIK-DBTN-05 telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-485/D.04/2014 tanggal 26 November 2014; dan

(i) Class A ABS amounting to Rp1,371,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange, and offered to the public at 100% of the nominal value of Class A1 ABS amounted to Rp723,500 with an annual fixed interest rate of 10.00% and A2 ABS amounted to Rp647,500 with annual fixed interest rate of 10.25% and due on September 7, 2025. The Class A ABS were rated idAAA by PT Pemeringkat Efek Indonesia. The Registration Statement Letter from KIK-DBTN-05 dated October 17, 2014 became effective based on Letter No. S-485/D.04/2014 dated November 26, 2014 of OJK; and

(ii) EBA Kelas B dengan nilai pokok sebesar Rp129.000 yang ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas B dan memiliki tanggal jatuh tempo final pada tanggal 7 September 2025. EBA Kelas B tidak dicatat pada Bursa Efek Indonesia, namun ditawarkan kepada calon pembeli dengan ketentuan bahwa Bank mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli EBA Kelas B. Pemegang EBA Kelas B berhak atas semua arus kas tersisa sesuai dengan urutan prioritas pembayaran untuk setiap periode bunga. Pada tanggal 1 Desember 2014, Bank telah membeli dan mencatat EBA Kelas B sebagai efek yang dimiliki hingga jatuh tempo pada laporan posisi keuangan Bank (Catatan 8).

(ii) Class B ABS with a principal value of Rp129,000 offered at 100% of the nominal value of Class B ABS and will mature on September 7, 2025. The Class B ABS are not registered in the Indonesia Stock Exchange but are offered to prospective buyers with the condition that the Bank has the first priority to purchase such securities. Class B ABS holders have the right on the residual cash flows based on the payment priorities on each interest payment period. On December 1, 2014, Bank purchased and recorded Class B ABS as held-to-maturity securities in the Bank's statement of financial position (Note 8).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**10. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

Transaksi penjualan kumpulan tagihan telah memperoleh opini penjualan putus (true sale) dari pihak independen yang terdiri dari pendapat dari segi akuntansi oleh Akuntan Independen dan pendapat dari segi hukum oleh kantor konsultan hukum independen. Atas dasar opini kedua pihak independen tersebut, Bank telah mengeluarkan kumpulan tagihan sebesar Rp1.500.000 dari laporan posisi keuangan Bank (penghentian pengakuan).

A true sale opinion was rendered on the sale of the pool of receivables from independent parties, which consisted of accounting opinion from an independent accountant and legal opinion from an independent legal consultant. Based on the opinions of the above two independent parties, the Bank derecognized the pool of receivables amounting to Rp1,500,000 from its statement of financial position.

Atas transaksi sekuritisasi atas kumpulan tagihan tersebut di atas, Bank juga bertindak sebagai Penyedia Jasa sebagaimana tertuang dalam perjanjian penyediaan jasa No. 017/PIS/KIK-DBTN05/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014. Peran utama Bank sebagai penyedia jasa antara lain mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga dari para debitur untuk setiap periode penagihan, mentransfer secara bulanan hasil penagihan kepada KIK-DBTN-05 dan mengadministrasikannya dengan baik, aman dan teratur serta profesional untuk kepentingan KIK-DBTN-05 yang merupakan representasi dari para pemegang EBA.

Based on the Service Provider Agreement No. 017/PIS/KIK-DBTN05/VII/2014 dated July 23, 2014, the Bank also acts as a service provider in the above securitization transaction of the pool of receivables. The Bank's primary role as a service provider, among others, is to collect the principal and interest payments from debtors on each collection period, to transfer monthly the proceeds from collection to the KIK-DBTN-05 and to maintain the good, safe, orderly and professional administration of the debtors' accounts for the interest of KIK-DBTN-05, which represents the ABS holders.

Setelah jumlah pokok terhutang atas kumpulan tagihan EBA Kelas A telah berkurang menjadi 10% (atau kurang) dari jumlah pokok terhutang pada tanggal *cut-off final* (14 Oktober 2014), Bank sebagai penyedia jasa, mempunyai opsi untuk membeli dari para pemegang EBA Kelas A yang diwakili oleh Bank kustodian, pada tiap tanggal pembayaran, seluruh dan tidak hanya sebagian, kumpulan tagihan yang tersisa dengan harga yang sama dengan, mana yang lebih tinggi, antara (i) jumlah pokok terhutang dari kumpulan tagihan berikut bunganya yang terhutang dikurangi dengan tagihan tertunggak pada saat dilaksanakannya *clean-up call* atau (ii) jumlah pokok terutang dari EBA kelas A berikut bunganya yang terhutang ditambah biaya-biaya senior dan pajak terhutang saat itu yang wajib dibayar.

After the decrease in the outstanding principal amount of the Class A ABS pool of receivables to 10% (or less) from the principal amount on the final cut-off date (October 14, 2014), the Bank as the service provider, has the option to purchase on each payment date, all and not only a part of the residual pool of receivables from the Class A ABS holders, who are represented by the custodian bank, at a price equal to or the higher between (i) the outstanding principal amount of the pool of receivables including interest after deducting the amount of late payments on the receivables at the time of exercising the clean-up call and (ii) the outstanding principal amount of Class A ABS including interest and other senior expenses and taxes payable at that period of time.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

xiii. Kredit yang diberikan kepada direksi dan karyawan Bank merupakan kredit untuk membeli kendaraan dan keperluan pribadi lainnya yang dibebani bunga dengan suku bunga rata-rata pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, sebesar 6,31%, 5,71%, dan 5,74%, dengan jangka waktu berkisar antara 1 sampai dengan 10 tahun. Kredit ini dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan.

xiii. The loans given to the Bank's directors and employees consist of loans intended for purchase of vehicles and other personal necessities. These loans earn an average interest of 6.31%, 5.71%, and 5.74%, for the years ended December 31, 2014, 2013, and 2012, with term ranging from 1 to 10 years. The loans are settled through monthly payroll deductions.

xiv. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah kepada pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, masing-masing sebesar Rp134.313, Rp296.915, dan Rp134.335 (Catatan 40). Persentase kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, masing-masing sebesar 0,12%, 0,30%, dan 0,17%.

xiv. As of December 31, 2014, 2013, and 2012, the outstanding balances of loans and sharia financing/receivables from related parties amounted to Rp134,313, Rp296,915, and Rp134,335, respectively (Note 40). As of December 31, 2014, 2013, and 2012, the percentage of loans and sharia financing/receivables from related parties represent approximately 0.12%, 0.30%, and 0.17%, respectively, of the total loans and sharia financing/receivables.

xv. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut:

xv. The movements in the allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
Saldo awal tahun	1.137.177	980.714	944.098	Balance at beginning of year
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan (Catatan 30)	775.613	435.742	206.442	Provision for impairment losses during the year (Note 30)
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	14.795	2.177	938	Recovery of loans written-off
Penghapusbukuan kredit	(351.010)	(281.456)	(170.764)	Loans written-off
Saldo akhir tahun	1.576.575	1.137.177	980.714	Balance at the end of year

Termasuk di dalam saldo cadangan kerugian adalah cadangan kerugian pembiayaan/piutang syariah sebesar Rp211.163, Rp129.716, dan Rp191.801, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012.

As of December 31, 2014, 2013, and 2012, the balance of allowance for impairment losses includes allowance for impairment losses on sharia financing/receivables amounting to Rp211,163, Rp129,716, and Rp191,801, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang dibentuk telah memadai.

Management believes that the amount of allowance for impairment losses on the loans and sharia financing/receivables is adequate.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

- xvi. Fungsi pengawasan kredit Bank berfokus pada pencegahan penurunan kualitas portofolio kredit dan aktivitas penyaluran kredit yang tidak sehat yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian. Risiko kredit dikelola dan diatasi dengan membuat pembatasan penyaluran kredit (credit limit) dan kebijakan penyaluran kredit yang seragam, melakukan pengawasan individual portofolio secara periodik dan pengukuran tingkat kolektibilitas portofolio kredit.
- xvii. Dalam laporan Bank ke OJK disebutkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 Bank telah mematuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik terhadap pihak-pihak berelasi maupun kepada pihak yang tidak berelasi.
- xviii. Rasio kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diklasifikasikan *non-performing* terhadap jumlah kredit dan pembiayaan/piutang syariah (metode *gross* dan *net*) adalah seperti yang terlihat pada tabel berikut:

- xvi. The credit control function of the Bank focuses on preventing the deterioration of the quality of credit portfolio and unsound practices in granting credit facilities that may result in losses. Credit risks are managed by establishing credit limits and setting consistent lending policies, periodic monitoring of individual portfolio, and measuring the collectibility level of credit portfolio.
- xvii. Based on the report submitted by the Bank to OJK as of December 31, 2014, 2013, and 2012, the Bank is in compliance with the legal lending limit (BMPK) regulations, both for the related and non-related party borrowers.
- xviii. The ratios of non-performing loans and sharia financing/receivables to total loans and sharia financing/receivables (using the gross and net methods) are shown in the following table:

Kolektibilitas	31 Desember/ December 31, 2014		31 Desember/ December 31, 2013		31 Desember/ December 31, 2012		Collectibility
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	
Kurang Lancar	298.237	39.516	437.962	20.288	663.993	21.615	Substandard
Diragukan	428.994	24.626	442.350	14.608	534.439	7.903	Doubtful
Macet	3.724.282	134.633	3.091.615	58.919	1.985.093	113.264	Loss
	4.451.513	198.775	3.971.927	93.815	3.183.525	142.782	
Cadangan kerugian penurunan nilai atas NPL/NPF	(1.313.631)	(106.879)	(974.963)	(37.175)	(669.901)	(118.414)	Allowance for impairment losses for NPL/NPF
	<u>3.137.882</u>	<u>91.896</u>	<u>2.996.964</u>	<u>56.640</u>	<u>2.513.624</u>	<u>24.368</u>	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	<u>106.271.277</u>	<u>9.644.524</u>	<u>92.386.308</u>	<u>8.081.083</u>	<u>75.410.705</u>	<u>6.000.058</u>	Loans and sharia financing/ receivables
% Non-performing kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah (Gross NPL/NPF)	4,19%	2,06%	4,30%	1,16%	4,22%	2,38%	% of Non-performing loans and sharia financing/receivables (Gross NPL/NPF)
% Non-performing kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah (Net NPL/NPF)	2,95%	0,95%	3,24%	0,70%	3,33%	0,41%	% of Non-performing loans and sharia financing/receivables (Net NPL/NPF)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

NPL/NPF neto dihitung dengan membagi antara jumlah kredit/pembiayaan/piutang syariah bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian dengan jumlah kredit/pembiayaan/piutang syariah keseluruhan.

The net NPL/NPF ratios are computed by dividing the total non-performing loans/sharia financing/receivables, net of allowance for possible losses, by the total loans/sharia financing/receivables.

Rasio NPL/NPF Gross adalah 4,01%, 4,05%, dan 4,09% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012.

The Gross NPL/NPF Ratio is 4.01%, 4.05%, and 4.09% as of December 31, 2014, 2013, and 2012, respectively.

Rasio NPL/NPF neto adalah 2,79%, 3,04%, dan 3,12% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012.

The net NPL/NPF Ratio is 2.79%, 3.04%, and 3.12% as of December 31, 2014, 2013, and 2012, respectively.

xix. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah non-performing berdasarkan sektor ekonomi:

xix. Non-performing loans and sharia financing/receivables by economic sectors:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
<u>Konvensional</u>				<u>Conventional</u>
Perumahan	3.438.750	3.252.736	2.710.819	Property
Konstruksi	394.420	270.394	135.414	Construction
Perdagangan, restoran dan hotel	225.182	152.605	109.570	Trading, restaurant and hotel
Jasa Usaha	100.401	141.459	124.055	Business service
Manufaktur	57.726	24.292	12.975	Manufacturing
Pertambangan	48.900	21.303	18.925	Mining
Pertanian	34.649	18.621	13.036	Farming
Transportasi, pergudangan, dan komunikasi	32.572	17.994	13.223	Transportation, warehousing, and communication
Jasa-jasa sosial	30.315	6.933	387	Social service
Listrik, gas dan air	4.062	4.126	4.048	Electricity, gas and water
Lain-lain*)	84.536	61.464	41.073	Other*)
	4.451.513	3.971.927	3.183.525	
<u>Syariah</u>				<u>Sharia</u>
Jasa usaha	102.992	33.666	85.077	Business service
Perumahan	67.504	46.912	41.722	Property
Konstruksi	28.279	13.237	15.983	Construction
	198.775	93.815	142.782	
	4.650.288	4.065.742	3.326.307	
Dikurangi cadangan penurunan nilai kerugian	(1.420.510)	(1.012.138)	(788.315)	Less allowance for impairment losses
	3.229.778	3.053.604	2.537.992	

*) Terdiri dari rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya

*) Consists of household and other economic sectors

xx. Rasio cadangan kerugian penurunan nilai kredit non-performing terhadap total kredit non-performing adalah 30,55%, 24,89%, dan 23,70% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012.

xx. The ratio of NPL's allowance for impairment losses to total NPLs are 30.55%, 24.89%, and 23.70% as of December 31, 2014, 2013, and 2012, respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

xxi. Rasio kredit *non-performing* terhadap total aset keuangan adalah 3,26%, 3,12%, dan 3,02%, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012.

xxi. The ratio of NPLs to total financial assets are 3.26%, 3.12%, and 3.02% as of December 31, 2014, 2013, and 2012, respectively.

xxii. Rasio kredit usaha kecil (KUK) terhadap total kredit adalah sebesar 1,52%, 2,35%, dan 3,11% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012.

xxii. The ratio of small-scale enterprise loans to total loans is 1.52%, 2.35%, and 3.11% as of December 31, 2014, 2013, and 2012, respectively.

xxiii. Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah di bawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Keikutsertaan Bank sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan sebesar 6,00% dari jumlah kredit sindikasi masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012.

xxiii. Syndicated loans represent loans provided to customers under syndication agreements with other banks. As of December 31, 2014, 2013, and 2012, the Bank's share as a co-lender in syndicated loans is 6.00% for each, respectively, of the total syndicated loans.

xxiv. Kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas dan sektor ekonomi:

xxiv. Restructured loans and sharia financing/receivables by collectibility and economic sector:

31 Desember/December 31, 2014

	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total
Perumahan	329.674	381.982	22.531	11.011	381.031	1.126.229
Konstruksi	58.813	19.942	1.398	-	20.556	100.709
Jasa usaha	15.978	37.791	-	-	1.863	55.632
Perdagangan, restoran dan hotel	10.213	17.621	801	226	11.155	40.016
Listrik, gas dan air	5.841	-	-	-	4.000	9.841
Pertambangan	-	7.263	-	-	18	7.281
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	4.830	-	-	-	4.830
Jasa-jasa sosial	-	3.949	-	-	8	3.957
Pertanian	209	171	-	-	1.941	2.321
Manufaktur	982	232	-	-	-	1.214
Lain-lain*)	521	660	22	-	2.214	3.417
	422.231	474.441	24.752	11.237	422.786	1.355.447

Property
Construction
Business service
Trading, restaurant and hotel
Electricity, gas and water
Mining
Transportation, warehousing and communication
Social services
Farming
Manufacturing
Other*)

31 Desember/December 31, 2013

	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total
Perumahan	301.066	145.342	65.036	14.818	251.157	777.419
Konstruksi	109.831	32.871	-	605	8.515	151.822
Jasa usaha	47.061	31.226	109	4.466	10.990	93.852
Perdagangan, restoran dan hotel	6.718	2.164	33.174	-	6.395	48.451

Property
Construction
Business service
Trading, restaurant and hotel

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

xxiv. Kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas dan sektor ekonomi (lanjutan):

xxiv. Restructured loans and sharia financing/receivables by collectibility and economic sector (continued):

31 Desember/December 31, 2013

	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	
Listrik, gas dan air	12.365	-	-	-	-	12.365	Electricity, gas and water
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	4.114	-	-	-	2.047	6.161	Transportation, warehousing and communication
Manufaktur	615	232	139	14	190	1.190	Manufacturing
Pertanian	546	47	-	-	167	760	Farming
Pertambangan	-	-	-	-	58	58	Mining
Jasa-jasa sosial	38	-	-	-	8	46	Social services
Lain-lain*)	1.318	615	26	261	1.926	4.146	Other*)
	483.672	212.497	98.484	20.164	281.453	1.096.270	

31 Desember/December 31, 2012

	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	
Perumahan	129.838	16.663	67.624	72.169	126.276	412.570	Property
Konstruksi	35.022	738	174	-	50	35.984	Construction
Jasa usaha	15.223	9.744	385	11.026	-	36.378	Business service
Perdagangan, restoran dan hotel	7.317	748	67	22	4.076	12.230	Trading, restaurant and hotel
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	150	-	-	-	-	150	Transportation, warehousing and communication
Manufaktur	2.280	-	-	-	168	2.448	Manufacturing
Pertanian	-	896	1.818	-	-	2.714	Farming
Lain-lain*)	1.215	-	-	-	-	1.215	Other*)
Total	191.045	28.789	70.068	83.217	130.570	503.689	Total

*) Terdiri dari rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya

*) Consists of household and other economic sectors

xxv. Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, Bank memiliki saldo kredit yang dihapusbukukan masing-masing sebesar Rp1.045.303, Rp896.666, dan Rp808.816. Bank terus melakukan usaha-usaha penagihan atas kredit tersebut. Ikhtisar mutasi kredit hapus buku adalah sebagai berikut:

xxv. The Bank has loans written-off as of December 31, 2014, 2013, and 2012 amounted to Rp1,045,303, Rp896,666, and Rp808.816 respectively. The Bank continues to pursue these loans for collection. The summary of the movements of the loans written-off is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
Saldo awal tahun	896.666	808.816	745.560	Balance at beginning of year
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	351.010	281.456	170.764	Write-off during the current year
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukuan	(202.373)	(193.606)	(107.508)	Recovery of loans written-off
Saldo akhir tahun	1.045.303	896.666	808.816	Balance at the end of year

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

xxvi. Jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar Rp2.457.582, Rp2.076.686 dan Rp1.357.219 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang dibentuk telah memadai.

h. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai dan kualitas kredit diungkapkan pada Catatan 43.

10. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Other significant information (continued)

xxvi. Minimum allowance for impairment losses for loans and sharia financing/receivables required by Bank Indonesia amounted to Rp2,457,582, Rp2,076,686 and Rp1,357,219 as of December 31, 2014, 2013 and 2012, respectively.

Management believes that the amount of allowance for impairment losses on the loans and sharia financing/receivables is adequate.

h. Information with respect to classification of impaired and not impaired and credit quality financial assets are disclosed in Note 43.

11. ASET TETAP

Akun ini terdiri dari:

11. PREMISES AND EQUIPMENT

This account consists of:

31 Desember/December 31, 2014					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Reklasifikasi/ Additions/ Reclassifications	Pengurangan/ Reklasifikasi/ Deductions/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<u>Kepemilikan Langsung</u>					<u>Direct Ownership</u>
<u>Biaya</u>					<u>Cost</u>
Tanah	534.079	4.583	688	537.974	Land
Bangunan	871.394	120.584	361	991.617	Buildings
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	1.374.755	97.149	23.220	1.448.684	Office furniture, fixtures and motor vehicles
Aset dalam penyelesaian	2.780.228 53.523	222.316 16.068	24.269 46.984	2.978.275 22.607	Constructions in progress
	2.833.751	238.384	71.253	3.000.882	
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					<u>Accumulated Depreciation</u>
Bangunan	296.077	45.864	345	341.596	Buildings
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	1.014.950	179.877	23.924	1.170.903	Office furniture, fixtures and motor vehicles
	1.311.027	225.741	24.269	1.512.499	
Nilai Buku Neto	1.522.724			1.488.383	Net Book Value

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

11. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

31 Desember/December 31, 2013					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Reklasifikasi/ Additions/ Reclassifications	Pengurangan/ Reklasifikasi/ Deductions/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<u>Kepemilikan Langsung</u>					<u>Direct Ownership</u>
<u>Biaya</u>					<u>Cost</u>
Tanah	532.554	1.525	-	534.079	Land
Bangunan	789.639	83.019	1.264	871.394	Buildings
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	1.232.095	153.544	10.884	1.374.755	Office furniture, fixtures and motor vehicles
Aset dalam penyelesaian	2.554.288 72.252	238.088 28.535	12.148 47.264	2.780.228 53.523	Constructions in progress
	2.626.540	266.623	59.412	2.833.751	
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					<u>Accumulated Depreciation</u>
Bangunan	251.996	45.345	1.264	296.077	Buildings
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	791.732	234.101	10.883	1.014.950	Office furniture, fixtures and motor vehicles
	1.043.728	279.446	12.147	1.311.027	
Nilai Buku Neto	1.582.812			1.522.724	Net Book Value
31 Desember/December 31, 2012					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Reklasifikasi/ Additions/ Reclassifications	Pengurangan/ Reklasifikasi/ Deductions/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<u>Kepemilikan Langsung</u>					<u>Direct Ownership</u>
<u>Biaya</u>					<u>Cost</u>
Tanah	527.414	5.140	-	532.554	Land
Bangunan	749.870	41.956	2.187	789.639	Buildings
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	906.817	326.979	1.701	1.232.095	Office furniture, fixtures and motor vehicles
Aset dalam penyelesaian	2.184.101 94.065	374.075 31.760	3.888 53.573	2.554.288 72.252	Constructions in progress
	2.278.166	405.835	57.461	2.626.540	
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					<u>Accumulated Depreciation</u>
Bangunan	215.526	38.373	1.903	251.996	Buildings
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	565.185	228.248	1.701	791.732	Office furniture, fixtures and motor vehicles
	780.711	266.621	3.604	1.043.728	
Nilai Buku Neto	1.497.455			1.582.812	Net Book Value

Jumlah penyusutan aset tetap yang dibebankan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 masing-masing sebesar Rp225.741, Rp279.446, and Rp266.621 (Catatan 31).

Nilai tercatat bruto dari aset tetap yang telah didepresiasi penuh oleh Bank namun masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp274.704, Rp271.091, dan Rp261.159 pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 (Tidak diaudit).

Depreciation of premises and equipment charged to operations amounted to Rp225,741, Rp279,446, and Rp266,621 for the years ended December 31, 2014, 2013, and 2012, respectively (Note 31).

The gross carrying amount of the Bank's fully depreciated premises and equipment that are still in use amounted to Rp274,704, Rp271,091, and Rp261,159 as of December 31, 2014, 2013, and 2012, respectively (Unaudited).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Nilai tercatat dari aset tetap yang belum digunakan sebesar nihil masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012.

Penilaian nilai wajar tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Bank menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), karena dianggap sebagai estimasi terbaik untuk mencerminkan nilai wajar. NJOP tanah dan bangunan yang dimiliki pada tanggal 31 Desember 2014 masing-masing bernilai Rp1.022.120 dan Rp452.721, pada tanggal 31 Desember 2013 masing-masing bernilai Rp753.261 dan Rp448.071, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2012 masing-masing bernilai Rp695.496 dan Rp431.482. Selain tanah dan bangunan tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai wajar aset dan tercatatnya.

Hak atas tanah terdiri dari hak milik dan hak guna bangunan. Manajemen berpendapat bahwa jangka waktu hak atas tanah dapat diperbaharui atau diperpanjang kembali.

Bank telah mengasuransikan aset tetap kecuali tanah untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran dan pencurian kepada PT Asuransi Bina Griya (pihak berelasi) pada tanggal 31 Desember 2014 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp1.940.370, kepada PT Asuransi Bina Griya (pihak berelasi) dan PT Asuransi Ramayana Tbk pada tanggal 31 Desember 2013 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp1.809.705, dan kepada PT Asuransi Bina Griya (pihak berelasi) dan PT Asuransi Ramayana Tbk pada tanggal 31 Desember 2012 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp1.799.065. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan untuk menutup kemungkinan kerugian dari risiko tersebut adalah cukup.

Rincian aset dalam penyelesaian pada 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2014

	Total	Persentase tingkat penyelesaian/ Percentage of completion	Estimasi tahun penyelesaian/ Estimated completion year
Bangunan	22.568	60% - 75%	2015 - 2016
Peralatan Kantor	39	60% - 75%	2015 - 2016
	22.607		

11. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

The carrying amount of the Bank's temporarily idle premises and equipment amounted to nil as of December 31, 2014, 2013, and 2012, respectively.

Valuation of landrights and buildings owned by Bank are using taxable value, because it is considered as the best estimation to reflect the fair value. Taxable value of landrights and buildings owned by Bank on December 31, 2014 is amounted to Rp1,022,120 and Rp452,721, respectively, on December 31, 2013 is amounted to Rp753,261 and Rp448,071, respectively, while on December 31, 2012 is amounted to Rp695,496 and Rp431,482, respectively. Other than landrights and building there are no significant difference between the fair value of the asset and its carrying value.

Landrights is consist of ownership rights and rights to use. Management has the opinion that the terms of the landrights can be renewed or extended upon their expiration.

Bank insured its premises and equipment except landrights from losses due to risks of fire and theft to PT Asuransi Bina Griya (related party) as of December 31, 2014 with coverage amounted to Rp1,940,370, to PT Asuransi Bina Griya (related party), and PT Asuransi Ramayana as of December 31, 2013 with coverage amounted to Rp1,809,705, and to PT Asuransi Bina Griya (related party) and PT Asuransi Ramayana as of December 31, 2012 with coverage amounted to Rp1,799,065, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risk.

Details of construction in progress as of December 31, 2014, 2013 and 2012 are as follows:

December 31, 2014

Buildings
Office furniture

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Rincian aset dalam penyelesaian pada 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 adalah sebagai berikut (lanjutan):

31 Desember 2013

	Total	Persentase tingkat penyelesaian/ Percentage of completion	Estimasi tahun penyelesaian/ Estimated completion year
Bangunan	52.773	75% - 90%	2014 - 2015
Peralatan Kantor	750	80% - 90%	2014 - 2015
	53.523		

31 Desember 2012

	Total	Persentase tingkat penyelesaian/ Percentage of completion	Estimasi tahun penyelesaian/ Estimated completion year
Bangunan	71.419	75% - 90%	2013-2014
Peralatan Kantor	833	85%-95%	2013-2014
	72.252		

December 31, 2013

*Buildings
Office furniture*

December 31, 2012

*Buildings
Office furniture*

12. BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA

12. INTERESTS RECEIVABLE

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
Kredit yang diberikan	1.088.481	848.203	814.115
Obligasi pemerintah	78.976	67.690	50.201
Efek-efek	16.032	7.795	7.669
	1.183.489	923.688	871.985

*Loans
Government bonds
Securities*

13. ASET LAIN-LAIN

13. OTHER ASSETS

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
Tagihan kepada pihak ketiga	565.705	355.942	370.464
Biaya dibayar di muka	357.118	354.957	302.749
Uang Muka Pajak (Catatan 35)	40.391	36.507	36.507
Aset <i>Istishna</i> dalam penyelesaian	7.530	12.617	29.119
Lainnya	37.245	23.747	21.117
	1.007.989	783.770	759.956

*Third party receivables
Prepaid expenses
Prepaid taxes (Note 35)
Istishna assets in progress
Others*

Tagihan kepada pihak ketiga merupakan tagihan kepada nasabah dan pihak lainnya seperti tagihan kepada Pemerintah Republik Indonesia mengenai pembayaran gaji, tagihan kepada PT Pos Indonesia (Persero) sehubungan dengan kerja sama penyelenggaraan Tabungan Batara Kantor Pos, penagihan angsuran KPR dan tagihan kepada PT Artajasa terkait dengan transaksi ATM bersama dan PT Finnet Indonesia atas transaksi ATM Link.

Third party receivables represent receivables from customers and other parties such as the receivables from the Government of the Republic of Indonesia regarding payroll payments, receivables from PT Pos Indonesia (Persero) regarding collaboration on holding Tabungan Batara Kantor Pos, receiving KPR's installments and receivables from PT Artajasa arising from transactions with ATM Bersama and receivables from PT Finnet Indonesia arising from ATM Link's transactions.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

Lainnya terutama terdiri dari persediaan benda pos, peralatan kantor, barang cetakan dan nota debit dalam penyelesaian.

Rincian biaya dibayar dimuka adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
Biaya sewa	209.995	196.168	187.617
Biaya pemeliharaan gedung dan peralatan kantor	47.633	62.662	65.382
Biaya pendanaan	17.938	18.589	17.010
Biaya promosi	19.435	24.646	11.128
Lainnya	62.117	52.892	21.612
	357.118	354.957	302.749

Persentase penyelesaian aset *istishna* dalam penyelesaian pada 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
0 - 30%	-	-	120
31% - 60%	1.699	4.579	7.423
61% - 100%	5.831	8.038	21.576
	7.530	12.617	29.119

Aset *istishna* dalam penyelesaian terdiri dari rumah yang masih dalam proses pembangunan yang diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu dekat.

13. OTHER ASSETS (continued)

Others consist mainly of postal stationery supplies, office supplies, printed supplies and debit notes in process.

Details of prepaid expenses are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
Rent expenses			
Building and office furniture maintenance expenses			
Financing expenses			
Promotion expenses			
Others			

Percentage of completion for *istishna* assets in progress as of December 31, 2014, 2013 and 2012 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
0 - 30%	-	-	120
31% - 60%	1.699	4.579	7.423
61% - 100%	5.831	8.038	21.576
	7.530	12.617	29.119

Istishna assets in progress consists of under-construction house which are expected to be finished in a short period of time.

14. LIABILITAS SEGERA

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
Kewajiban kepada pihak ketiga	1.609.899	1.143.082	1.049.700
Hutang pajak			
Pajak penghasilan			
Pasal 4 (2)	64.671	56.204	46.289
Pasal 21	16.640	21.118	3.276
Pasal 29 (Catatan 35)	105.943	33.052	34.842
Pasal 25	-	-	18.630
Pajak pertambahan nilai	2.455	2.607	7.883
Deposito berjangka jatuh tempo	7.982	5.272	19.879
Bagi hasil yang belum dibagikan	17.778	11.939	10.752
Bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah	3.172	1.154	2.374
Lainnya	7.267	9.878	7.874
	1.835.807	1.284.306	1.201.499

Third party payables	
Taxes payable	
Income tax	
Article (4) 2	
Article 21	
Article 29 (Note 35)	
Article 25	
Value added tax	
Matured time deposits	
Undistributed profit sharing	
Interest on time deposits not collected by customers	
Others	

14. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. GIRO

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2014		31 Desember/ December 31, 2013		31 Desember/ December 31, 2012	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Pihak ketiga						
Rupiah		6.958.648		6.345.402		5.697.870
Dolar Amerika Serikat	2.595.184	32.141	439.590	5.350	1.132.833	10.918
		6.990.789		6.350.752		5.708.788
Pihak berelasi (Catatan 40)						
Rupiah		16.234.577		12.741.015		7.546.144
Dolar Amerika Serikat	15.926.682	197.252	2.007.333	24.429	1.690.796	16.295
		16.431.829		12.765.444		7.562.439
		23.422.618		19.116.196		13.271.227

Third parties
Rupiah
United States Dollar

Related parties (Note 40)
Rupiah
United States Dollar

Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, saldo giro termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp1.421.418, Rp1.155.231, dan Rp760.694.

As of December 31, 2014, 2013, dan 2012, demand deposits balance include deposits based on sharia banking principles amounted to Rp1,421,418, Rp1,155,231, and Rp760,694, respectively.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk giro rupiah adalah sebesar 2,56%, 3,01%, dan 2,97% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, dan tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk giro Dolar Amerika Serikat adalah sebesar 0,00%, 0,01%, dan 0,00% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012.

The average annual interest rates for Rupiah demand deposits are 2.56%, 3.01%, and 2.97% for the years ended December 31, 2014, 2013, and 2012, respectively, and for United States Dollar denominated demand deposits are 0.00%, 0.01%, and 0.00% for the years ended December 31, 2014, 2013, and 2012, respectively.

Giro yang digunakan sebagai jaminan (diblokir) atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 masing-masing sebesar Rp350, Nihil, dan Rp60. (Catatan 10).

Demand deposits amounted to Rp350, Nil, and Rp60 as of December 31, 2014, 2013, and 2012, respectively, are pledged (blocked) as collateral for loans provided by the Bank (Note 10).

16. TABUNGAN

16. SAVINGS DEPOSITS

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
<u>Rupiah</u>				<u>Rupiah</u>
Tabungan Batara	25.230.736	23.383.447	20.879.423	Batara savings deposits
Tabungan Batara Mudharabah	621.747	558.152	439.038	Batara Mudharabah savings deposits
Tabungan Batara Wadiah	315.431	296.294	221.964	Batara Wadiah savings deposits
	26.167.914	24.237.893	21.540.425	

Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, saldo tabungan termasuk tabungan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp937.178, Rp854.446, dan Rp661.002.

As of December 31, 2014, 2013, and 2012, savings deposits balance include savings deposits based on sharia banking principles amounted to Rp937,178, Rp854,446, and Rp661,002, respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. TABUNGAN (lanjutan)

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk tabungan sebesar 3,73%, 3,43%, dan 3,32%, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012.

Tabungan yang digunakan sebagai jaminan (diblokir) atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, masing-masing sebesar Rp251.707, Rp87.791, dan Rp30.682. (Catatan 10).

Tabungan Batara dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, masing-masing sebesar Rp67.975, Rp62.614, dan Rp63.532. (Catatan 40).

Tabungan wadiah dan mudharabah dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, masing-masing sebesar Rp2.988, Rp5.279, dan Rp2.384 (Catatan 40).

16. SAVINGS DEPOSITS (continued)

The average annual interest rates for savings deposits are 3.73%, 3.43%, and 3.32%, for the years ended December 31, 2014, 2013, and 2012, respectively.

Savings deposits amounted to Rp251,707, Rp87,791, and Rp30,682, as of December 31, 2014, 2013, and 2012, respectively, are pledged (blocked) as collateral for loans provided by the Bank to its customers (Note 10).

As of December 31, 2014, 2013, and 2012, Batara savings deposits from depositors who are related parties of the Bank amounted to Rp67,975, Rp62,614, and Rp63,532, respectively (Note 40).

Wadiah and mudharabah savings deposits from depositors who are related parties of the Bank as of December 31, 2014, 2013, and 2012, amounted to Rp2,988, Rp5,279, and Rp2,384, respectively (Note 40).

17. DEPOSITO BERJANGKA

- a. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka adalah sebagai berikut:

**Suku Bunga Rata-rata Per Tahun (%) /
Average Annual Interest Rate (%)**

	2014	2013	2012
Rupiah			
1 bulan	6,18%	6,16%	4,85%
3 bulan	6,84%	6,75%	5,19%
6 bulan	6,74%	6,17%	5,35%
12 bulan	6,87%	5,78%	5,74%
24 bulan	6,44%	6,78%	5,96%
Dolar Amerika Serikat	0,05%	0,05%	0,05%

- b. Rincian deposito berjangka berdasarkan mata uang dan jangka waktu:

17. TIME DEPOSITS

- a. Average annual interest rates for time deposits are as follows:

Rupiah
1 month
3 months
6 months
12 months
24 months

United States Dollar

- b. The details of time deposits by currency and contract period are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2014		31 Desember/ December 31, 2013		31 Desember/ December 31, 2012	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Rupiah						
1 bulan		27.477.500		27.681.746		25.697.147
3 bulan		14.869.297		12.013.050		12.070.970
6 bulan		2.342.478		2.751.021		3.076.650
12 bulan		5.387.525		5.647.206		4.977.140
24 bulan		6.779.143		4.752.454		25.118
		56.855.943		52.845.477		45.847.025
Dolar Amerika Serikat						
1 bulan	1.926.080	23.855	622.599	7.577	949.306	9.149
3 bulan	19.456	241	20.803	253	10.304	99
6 bulan	-	-	10.000	122	6.003	58
12 bulan	8.538	106	8.538	104	-	-
		24.202		8.056		9.306
		56.880.145		52.853.533		45.856.331

Rupiah
1 month
3 months
6 months
12 months
24 months

United States Dollar
1 month
3 months
6 months
12 months

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

- c. Rincian deposito berjangka berdasarkan mata uang dan sisa umur hingga jatuh tempo:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
<u>Rupiah</u>			
■ 1 bulan	34.165.969	24.294.082	31.716.904
> 1 bulan ■ 3 bulan	11.520.038	10.081.378	7.748.987
> 3 bulan ■ 6 bulan	3.245.347	4.515.804	2.869.631
> 6 bulan ■ 12 bulan	1.156.358	8.545.851	3.496.888
> 12 bulan ■ 24 bulan	6.768.231	5.408.362	14.615
	56.855.943	52.845.477	45.847.025
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			
■ 1 bulan	23.855	4.125	9.149
> 1 bulan ■ 3 bulan	241	235	157
> 3 bulan ■ 6 bulan	-	1.196	-
> 6 bulan ■ 12 bulan	106	2.500	-
	24.202	8.056	9.306
	56.880.145	52.853.533	45.856.331

Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, deposito berjangka yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp6.388.861, Rp4.582.900, dan Rp4.334.756.

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan (diblokir) atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada konsumennya pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 masing-masing sebesar Rp812.912, Rp555.986, dan Rp300.818 (Catatan 10).

Deposito berjangka dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 masing-masing sebesar Rp31.086.000, Rp31.032.591, dan Rp26.909.431 (Catatan 40).

Deposito berjangka *Mudharabah* dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 masing-masing sebesar Rp3.698.661, Rp1.204.987, dan Rp1.588.517 (Catatan 40).

17. TIME DEPOSITS (continued)

- c. Details of time deposits by currency and remaining period to maturity are as follows:

<u>Rupiah</u>	
■ 1 month	
> 1 month ■ 3 months	
> 3 months ■ 6 months	
> 6 months ■ 12 months	
> 12 months ■ 24 months	
<u>United States Dollar</u>	
■ 1 month	
> 1 month ■ 3 months	
> 3 months ■ 6 months	
> 6 months ■ 12 months	

As of December 31, 2014, 2013, dan 2012, time deposits based on sharia banking principles amounted to Rp6,388,861, Rp4,582,900, and Rp4,334,756 respectively.

As of December 31, 2014, 2013, dan 2012, time deposits amounted to Rp812,912, Rp555,986, and Rp300,818 respectively, are pledged (blocked) as collateral for loans provided by the Bank to its customers (Note 10).

As of December 31, 2014, 2013, dan 2012, time deposits from depositors who are related parties of the Bank amounted to Rp31,086,000, Rp31,032,591, and Rp26,909,431, respectively (Note 40).

As of December 31, 2014 and 2013, Mudharabah time deposits from depositors who are related parties of the Bank amounted to Rp3,698,661, Rp1,204,987, and Rp1,588,517, respectively (Note 40).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk simpanan dari bank lain adalah sebagai berikut:

	2014	2013	2012	
Giro	0,86%	0,60%	0,69%	Demand Deposit
Deposito	7,24%	5,32%	3,75%	Time Deposits
Tabungan	2,36%	3,53%	3,35%	Saving Deposits

Rincian simpanan dari bank lain berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

18. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

Average annual interest rates for deposits from other banks are as follows:

Details of deposits from other banks by remaining period to maturity are as follows:

31 Desember/December 31, 2014						
	■ 1 bulan/ month	> 1 - 3 bulan/ months	> 3 - 6 bulan/ months	> 6 - 12 bulan/ months	Total	
Rupiah						Rupiah
Deposito	710.392	450.550	960	1.215	1.163.117	Time deposits
Giro	13.472	-	-	-	13.472	Demand deposits
Tabungan	2.680	-	-	-	2.680	Savings deposits
	726.544	450.550	960	1.215	1.179.269	
31 Desember/December 31, 2013						
	■ 1 bulan/ month	> 1 - 3 bulan/ months	> 3 - 6 bulan/ months	> 6 - 12 bulan/ months	Total	
Rupiah						Rupiah
Deposito	256.348	500	1.715	715	259.278	Time deposits
Giro	14.065	-	-	-	14.065	Demand deposits
Tabungan	1.914	-	-	-	1.914	Savings deposits
	272.327	500	1.715	715	275.257	
31 Desember/December 31, 2012						
	■ 1 bulan/ month	> 1 - 3 bulan/ months	> 3 - 6 bulan/ months	> 6 - 12 bulan/ months	Total	
Rupiah						Rupiah
Deposito	685.719	1.800	1.010	365	688.894	Time deposits
Giro	10.332	-	-	-	10.332	Demand deposits
Tabungan	7.477	-	-	-	7.477	Savings deposits
	703.528	1.800	1.010	365	706.703	

Rincian deposito berdasarkan jangka waktu deposito adalah sebagai berikut:

Details of time deposits by period are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
Rupiah				Rupiah
■ 1 bulan	654.500	253.224	654.500	■ 1 month
> 1 bulan - 3 bulan	504.819	3.929	31.034	> 1 month - 3 months
> 3 bulan - 6 bulan	112	-	900	> 3 months - 6 months
> 6 bulan - 12 bulan	3.686	2.125	2.460	> 6 months - 12 months
	1.163.117	259.278	688.894	

Simpanan dari bank lain yang termasuk pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 masing-masing sebesar Rp3.299, Rp5.743, dan Rp37.738 (Catatan 40).

As of December 31, 2014, 2013, and 2012, deposits from other banks which are related parties of the Bank amounted to Rp3,299, Rp5,743, and Rp37,738, respectively (Note 40).

Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 tidak terdapat simpanan dari bank lain yang dijadikan jaminan (Catatan 10).

As of December 31, 2014, 2013, and 2012, there are no deposits from other banks which are pledged as collateral (Note 10).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

Rincian efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali adalah sebagai berikut:

19. SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENTS

The details of securities sold under repurchase agreements are as follows:

31 Desember/December 31, 2014

Nasabah/ Customer	Jenis surat Berharga/ Type of Securities	Nilai Nominal/ Nominal Amount	Tanggal Dimulai/ Commencement Date	Tanggal Pembelian Kembali/ Repurchase Date	Harga Pembelian Kembali/ Repurchase Price	Beban Bunga yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Interest Expense	Nilai Tercatat/ Carrying Value
<u>Pihak ketiga/Third parties</u>							
Deutsche Bank AG	VR0020	300.000	28 Maret/ March 28, 2005	23 April/ April 23, 2015	260.000	-	260.000
Deutsche Bank AG	VR0020	450.000	29 Maret/ March 29, 2005	23 April/ April 23, 2015	390.000	-	390.000
Deutsche Bank AG	VR0031	575.000	14 Februari/ February 14, 2011	23 Juli/ July 23, 2020	500.000	-	500.000
Deutsche Bank AG	VR0021	345.000	1 Maret/ March 1, 2011	23 November/ November 23, 2015	300.000	-	300.000
Standard Chartered Bank	VR0031	500.000	18 Januari/ January 18, 2011	22 Juli/ July 22, 2020	435.000	-	435.000
Standard Chartered Bank	VR0027	495.000	2 Maret/ March 2, 2011	23 Juli/ July 23, 2018	450.000	-	450.000
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Limited.	VR0023	806.922	25 September/ September 25, 2014	25 September/ September 25, 2015	649.999	-	649.999
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Limited.	VR0028	438.530	25 September/ September 25, 2014	25 September/ September 25, 2015	350.000	-	350.000
PT BPD Sumatera Utara	IDB1100415273S	100.000	24 Oktober/ October 24, 2014	22 Januari/ January 22, 2015	88.580	345	88.235
		4.010.452			3.423.579	345	3.423.234
<u>Pihak berelasi/Related parties</u> <u>(Catatan/Note 40)</u>							
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	IDSD220515182S	300.000	5 Desember/ December 5, 2014	5 Januari/ January 5, 2015	263.093	180	262.913
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	IDSD220515182S	150.000	5 Desember/ December 5, 2014	5 Januari/ January 5, 2015	131.546	90	131.456
		450.000			394.639	270	394.369
		4.460.452			3.818.218	615	3.817.603

31 Desember/December 31, 2013

Nasabah/ Customer	Jenis surat Berharga/ Type of Securities	Nilai Nominal/ Nominal Amount	Tanggal Dimulai/ Commencement Date	Tanggal Pembelian Kembali/ Repurchase Date	Harga Pembelian Kembali/ Repurchase Price	Beban Bunga yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Interest Expense	Nilai Tercatat/ Carrying Value
<u>Pihak ketiga/Third parties</u>							
Deutsche Bank AG	VR0020	300.000	28 Maret/ March 28, 2005	23 April/ April 23, 2015	260.000	-	260.000
Deutsche Bank AG	VR0020	450.000	29 Maret/ March 29, 2005	23 April/ April 23, 2015	390.000	-	390.000
Deutsche Bank AG	VR0031	575.000	14 Februari/ February 14, 2011	23 Juli/ July 23, 2020	500.000	-	500.000
Deutsche Bank AG	VR0021	345.000	1 Maret/ March 1, 2011	23 November/ November 23, 2015	300.000	-	300.000
Standard Chartered Bank	VR0031	500.000	18 Januari/ January 18, 2011	22 Juli/ July 22, 2020	435.000	-	435.000
Standard Chartered Bank	VR0027	495.000	2 Maret/ March 2, 2011	23 Juli/ July 23, 2018	450.000	-	450.000
Standard Chartered Bank	VR0028	400.000	28 November/ November 28, 2013	28 Februari/ February 28, 2014	322.047	4.317	317.730
		3.065.000			2.657.047	4.317	2.652.730

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)

19. SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE
AGREEMENTS (continued)

31 Desember/December 31, 2012

Nasabah/ Customer	Jenis surat Berharga/ Type of Securities	Nilai Nominal/ Nominal Amount	Tanggal Dimulai/ Commencement Date	Tanggal Pembelian Kembali/ Repurchase Date	Harga Pembelian Kembali/ Repurchase Price	Beban Bunga yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Interest Expense	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Pihak ketiga/Third parties							
Deutsche Bank AG	VR0020	300.000	28 Maret/ March 28, 2005	23 April/ April 23, 2015	260.000	-	260.000
Deutsche Bank AG	VR0020	450.000	29 Maret/ March 29, 2005	23 April/ April 23, 2015	390.000	-	390.000
Deutsche Bank AG	VR0031	575.000	14 Februari/ February 14, 2011	23 Juli/ July 23, 2020	500.000	-	500.000
Deutsche Bank AG	VR0021	345.000	1 Maret/ March 1, 2011	23 November/ November 23, 2015	300.000	-	300.000
Standard Chartered Bank	VR0031	500.000	18 Januari/ January 18, 2011	22 Juli/ July 22, 2020	435.000	-	435.000
Standard Chartered Bank	VR0027	495.000	2 Maret/ March 2, 2011	23 Juli/ July 23, 2018	450.000	-	450.000
Total		2.665.000			2.335.000	-	2.335.000

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali yang termasuk pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, masing-masing sebesar Rp394.369, nihil, dan nihil (Catatan 40).

As of December 31, 2014, 2013, and 2012, securities sold under repurchase agreement with related parties amounted to Rp394,369, nil, and nil, respectively (Note 40).

20. SURAT-SURAT
DITERBITKAN

BERHARGA

YANG

20. SECURITIES ISSUED

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
Rupiah				Rupiah
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp2.117 dan Rp2.292 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013	1.997.883	1.997.708	-	Shelf Registration Bonds I Phase II Net of unamortized issuance cost amounted to Rp2,117 and Rp2,292 as of December 31, 2014 and 2013, respectively
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp3.213, Rp3.519 dan Rp3.801 pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012	1.996.787	1.996.481	1.996.199	Shelf Registration Bonds I Phase I Net of unamortized issuance cost amounted to Rp3,213, Rp3,519 and Rp3,801 as of December 31, 2014, 2013 and 2012, respectively
Obligasi BTN XV setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp2.659, Rp2.941 dan Rp3.197 pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012	1.297.341	1.297.059	1.296.803	BTN Bonds XV Net of unamortized issuance cost amounted to Rp2,659, Rp2,941 and Rp3,197 as of December 31, 2014, 2013 and 2012, respectively
Obligasi BTN XIV setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp2.542, Rp2.872 dan Rp3.171 pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012	1.647.458	1.647.128	1.646.829	BTN Bonds XIV Net of unamortized issuance cost amounted to Rp2,542, Rp2,872 and Rp3,171 as of December 31, 2014, 2013 and 2012, respectively
Obligasi BTN XIII setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp384 dan Rp1.404 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012	-	899.616	1.198.596	BTN Bonds XIII Net of unamortized issuance cost amounted to Rp384 and Rp1,404 as of December 31, 2013 and 2012, respectively

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			
Obligasi BTN XII setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing- masing sebesar Rp861, Rp1.281 dan Rp1.651 pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012	999.139	998.719	998.349
Negotiable Certificate of Deposits (NCD) setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp43.724 pada tanggal 31 Desember 2014	581.276	-	-
	8.519.884	8.836.711	7.136.776

a. Obligasi

i. Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II Tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 7,90% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2023. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan BTN I tahun 2013 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-6349/BL/2012 tanggal 28 Mei 2012.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II mendapat penilaian peringkat idAA, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan I BTN tahap II adalah PT Bank Mega Tbk.

20. SECURITIES ISSUED (continued)

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
<u>Rupiah (continued)</u>			
BTN Bonds XII Net of unamortized issuance cost amounted to Rp861, Rp1,281 and Rp1,651, as of December 31, 2014, 2013 and 2012, respectively	999.139	998.719	998.349
Negotiable Certificate of Deposits (NCD) Net of unamortized issuance cost amounted to Rp43,724 as of as of December 31, 2014	581.276	-	-
	8.519.884	8.836.711	7.136.776

a. Bonds

i. Shelf Registration Bonds I Phase II

The Bank issued Shelf Registration Bonds I Phase II 2013 with a total nominal value of Rp2,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 7.90%, payable every three months and are due on March 27, 2023. The issuance of Shelf Registration Bonds I Phase II of 2013 became effective based on Letter No. S-6349/BL/2012 dated May 28, 2012 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all assets of the Bank, both movable and immovable, and those that are existing and will exist in the future, which are attributable to the Bank's bondholders.

As of December 31, 2014 and 2013, Shelf Registration Bonds I Phase II were rated idAA, respectively, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

The trustee for Shelf Registration Bonds I Phase II is PT Bank Mega Tbk.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

a. Obligasi (lanjutan)

ii. Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap I

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap I Tahun 2012 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 7,90% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2022. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap I Tahun 2012 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-6349/BL/2012 tanggal 28 Mei 2012.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Obligasi Berkelanjutan I BTN tahap I mendapat penilaian peringkat idAA, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan I BTN tahap I adalah PT Bank Mega Tbk.

iii. Obligasi BTN XV

Bank menerbitkan Obligasi BTN XV Tahun 31 Desember 2011 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.300.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 9,50% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2021. Penerbitan Obligasi BTN XV tahun 2011 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua Bapepam-LK No. S-6928/BL/2011 tanggal 21 Juni 2011.

20. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Bonds (continued)

ii. Shelf Registration Bonds I Phase I

The Bank issued Shelf Registration Bonds I BTN Phase I 2012 with a total nominal value of Rp2,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 7.90%, payable every three months and are due on June 5, 2022. The issuance of Shelf Registration Bonds I BTN Phase I of 2012 became effective based on Letter No. S-6349/BL/2012 dated May 28, 2012 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all assets of the Bank, both movable and immovable, and those that are existing and will exist in the future, which are attributable to the Bank's bondholders.

As of December 31, 2014, 2013 and 2012, Shelf Registration Bonds I BTN Phase I were rated idAA, respectively, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

The trustee for Shelf Registration Bonds I Phase I is PT Bank Mega Tbk.

iii. BTN Bonds XV

The Bank issued BTN Bonds XV as of December 31, 2011 with a total nominal value of Rp1,300,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 9.50%, payable every three months and are due on June 28, 2021. The issuance of BTN Bonds XV of 2011 became effective based on Letter No. S-6928/BL/2011 dated June 21, 2011 of the Chairman of Bapepam-LK.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

a. Obligasi (lanjutan)

iii. Obligasi BTN XV (lanjutan)

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Obligasi BTN XV mendapat penilaian peringkat idAA, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi BTN XV adalah PT Bank Mega Tbk.

iv. Obligasi BTN XIV

Bank menerbitkan Obligasi BTN XIV Tahun 2010 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.650.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 10,25% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 11 Juni 2020. Penerbitan Obligasi BTN XIV tahun 2010 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua Bapepam-LK No. S-4916/BL/2010 tanggal 3 Juni 2010.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi.

20. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Bonds (continued)

iii. BTN Bonds XV (continued)

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all assets of the Bank, both movable and immovable, and those that are existing and will exist in the future, which are attributable to the Bank's bondholders.

As of December 31, 2014, 2013 and 2012, BTN Bonds XV were rated idAA, respectively, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

The trustee for BTN Bonds XV is PT Bank Mega Tbk.

iv. BTN Bonds XIV

The Bank issued BTN Bonds XIV of 2010 with a total nominal value of Rp1,650,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 10.25%, payable every three months and are due on June 11, 2020. The issuance of BTN Bonds XIV of 2010 became effective based on Letter No. S-4916/BL/2010 dated June 3, 2010 of the Chairman of Bapepam-LK.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all assets of the Bank, both movable and immovable, and those that are existing and will exist in the future, which are attributable to the Bank's bondholders.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

a. Obligasi (lanjutan)

iv. Obligasi BTN XIV (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Obligasi BTN XIV mendapat penilaian peringkat idAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi BTN XIV adalah PT Bank Mega Tbk.

v. Obligasi BTN XIII

Bank menerbitkan Obligasi BTN XIII Tahun 2009 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.500.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 11,75%, 12,00% dan 12,25% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi BTN XIII Seri A, Seri B dan Seri C dan telah jatuh tempo masing-masing pada tanggal 29 Mei 2012, 29 Mei 2013 dan 29 Mei 2014. Penerbitan Obligasi BTN XIII tahun 2009 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua Bapepam-LK No. S-4019/BL/2009 tanggal 19 Mei 2009.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Obligasi BTN XIII mendapat penilaian peringkat idAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi BTN XIII adalah PT Bank Mega Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2014, Obligasi BTN XIII Seri C dengan nilai nominal Rp900.000 telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

20. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Bonds (continued)

iv. BTN Bonds XIV (continued)

As of December 31, 2014, 2013 and 2012, BTN Bonds XIV are rated idAA, respectively, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

The trustee for BTN Bonds XIV is PT Bank Mega Tbk.

v. BTN Bonds XIII

The Bank issued BTN Bonds XIII of 2009 with a total nominal value of Rp1,500,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 11.75%, 12.00%, and 12.25%, payable every three months for BTN XIII Series A, Series B and Series C, respectively, and already matured on May 29, 2012, May 29, 2013, and May 29, 2014, respectively. The issuance of BTN Bonds XIII of 2009 became effective based on Letter No. S-4019/BL/2009 dated May 19, 2009 of the Chairman of Bapepam-LK.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

As of December 31, 2013 and 2012, BTN Bonds XIII are rated idAA by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

The trustee for BTN Bonds XIII is PT Bank Mega Tbk.

As of December 31, 2014, BTN XIII Series C bonds with a total nominal value of Rp900,000 for each, has been redeemed by the Bank on the maturity date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

a. Obligasi (lanjutan)

v. Obligasi BTN XIII (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2013, Obligasi BTN XIII Seri A dan B masing-masing dengan nilai nominal Rp300.000 telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

vi. Obligasi BTN XII

Bank menerbitkan Obligasi BTN XII Tahun 2006 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Surabaya (BES) (dimerger dengan Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 12,75% yang dibayarkan tiap tiga bulanan. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 19 September 2016. Penerbitan Obligasi BTN XII Tahun 2006 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua Bapepam-LK No. S-1844/BL/2006 tanggal 8 September 2006.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit yang diberikan. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Obligasi BTN XII mendapat penilaian peringkat idAA, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi BTN XII adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk.

20. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Bonds (continued)

v. BTN Bonds XIII (lanjutan)

As of December 31, 2013, BTN XIII Series A and B bonds with a total nominal value of Rp300,000 each, has been redeemed by the Bank on the maturity date.

vi. BTN Bonds XII

The Bank issued BTN Bonds XII of 2006 with a total nominal value of Rp1,000,000, which are registered in the Surabaya Stock Exchange (BES) (which merged with the Jakarta Stock Exchange to become the Indonesia Stock Exchange). The bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 12.75%, payable every three months. These bonds are due on September 19, 2016. The issuance of BTN Bonds XII of 2006 became effective based on Letter No. S-1844/BL/2006 dated September 8, 2006 of the Chairman of Bapepam-LK.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditors' rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

As of December 31, 2014, 2013 and 2012, BTN Bonds XII are rated idAA, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo).

The trustee for BTN Bonds XII is PT Bank CIMB Niaga Tbk.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

a. Obligasi (lanjutan)

Perjanjian perwalianamanatan atas seluruh obligasi memuat beberapa pembatasan terhadap Bank dan memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat sebelum melakukan hal-hal berikut:

- Mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% dari seluruh kekayaan Bank.
- Melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Bank atau kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban Bank terhadap pemegang obligasi, kecuali atas permintaan dan/atau perintah Pemerintah dan/atau otoritas yang berwenang.
- Mengubah bidang usaha Bank yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Bank atau kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban Bank terhadap pemegang obligasi, kecuali atas permintaan dan/atau perintah Pemerintah dan/atau otoritas yang berwenang.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Bank telah mengamortisasi biaya emisi obligasi masing-masing sebesar Rp5.793, Rp2.352, dan Rp2.286 yang dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Bank telah memenuhi ketentuan yang ada dalam perjanjian perwalianamanatan tersebut.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Bank telah melakukan pembayaran bunga sesuai nilai kupon kepada pemegang obligasi yang diterbitkan Bank pada saat jatuh tempo pembayaran bunga.

20. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Bonds (continued)

The trusteeship agreements covering all the bonds imposed several restrictive covenants on the Bank and require the trustees' written approval prior to perform the following:

- Transfer, the right to, or pledge as collateral, all or more than 50% of the Bank's total assets.
- Enter into consolidation or merger and/or acquire entities that would result in a material negative impact to the Bank's going concern status or the ability of the Bank to fulfil its obligations to the bondholders, except when required and/or directed by the Government and/or any governing authority.
- Change the main business of the Bank resulting in a material negative impact to the Bank's going concern status or the ability of the Bank to fulfil its obligations to the bondholders, except when required and/or directed by the Government and/or any governing authority.

For years ended December 31, 2014, 2013 and 2012, the Bank has amortized the bonds issuance cost amounting to Rp5,793, Rp2,352 and Rp2,286, respectively, recorded in the statements of comprehensive income.

As of December 31, 2014, 2013 and 2012, the Bank has complied with the existing terms of the above trusteeship agreements.

For years ended December 31, 2014, 2013 and 2012, coupon payments to all bond holders have been made by the Bank on the respective interest payment due dates.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

b. Negotiable Certificate of Deposits

Pada tanggal 5 Desember 2014, Bank menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) dengan nilai pokok sebesar Rp625.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok NCD sebesar Rp280.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun, untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2015. NCD tersebut diterbitkan sebesar 95,67%.
- Seri B: Nilai pokok NCD sebesar Rp45.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 November 2015. NCD tersebut diterbitkan sebesar 91,59%.
- Seri C: Nilai pokok NCD sebesar Rp300.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, untuk jangka waktu 15 (lima belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2016. NCD tersebut diterbitkan sebesar 89,43%.

20. SECURITIES ISSUED (continued)

b. Negotiable Certificate of Deposits

On December 5, 2014, Bank issued *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) with principal value amounted to Rp625,000 within 3 (three) series as follows:

- A Series: NCD principal value amounted to Rp280,000 with a fixed interest rate of 9% per annum, for 6 (six) months period with maturity date on June 4, 2015. The NCD were issued at 95.67%.
- B Series: NCD principal value amounted to Rp45,000 with a fixed interest rate of 9.25% per annum, for 12 (twelve) months period with maturity date on November 27, 2015. The NCD were issued at 91.59%.
- C Series: NCD principal value amounted to Rp300,000 with a fixed interest rate of 9.50% per annum, for 15 (fifteen) months period with maturity date on February 26, 2016. The NCD were issued at 89.43%.

21. PINJAMAN YANG DITERIMA

21. FUND BORROWINGS

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
<u>Rupiah</u>			
<u>Pihak Ketiga</u>			
Bank Indonesia			
Penyalur kredit program	877.271	877.271	877.271
Fasilitas kredit likuiditas	44.361	81.197	141.014
PT Bank Central Asia Tbk	1.997.551	1.995.151	1.997.329
PT Bank Mutiara Tbk	-	-	150.000
	<u>2.919.183</u>	<u>2.953.619</u>	<u>3.165.614</u>
<u>Pihak Berelasi (Catatan 40)</u>			
Pemerintah			
Rekening Dana Investasi	79.813	190.277	322.494
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	3.999.217	3.929.136	3.249.152
	<u>4.079.030</u>	<u>4.119.413</u>	<u>3.571.646</u>
	<u>6.998.213</u>	<u>7.073.032</u>	<u>6.737.260</u>

<u>Rupiah</u>
<u>Third Parties</u>
Bank Indonesia
Loan channeling program
Liquidity loan facility
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mutiara Tbk
<u>Related Parties (Note 40)</u>
Government
Investment Funds Account
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Bank Indonesia

i. Penyalur Kredit Program

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 487/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999, Bank telah ditunjuk sebagai Bank Koordinator penyaluran Kredit Program untuk Kredit Pemilikan Rumah-rumah Sederhana (KPR-RS) dan Rumah Sangat Sederhana (KPR-RSS). BUMN yang ditunjuk sebagai Bank Koordinator dalam penyaluran Kredit Program tersebut, juga ditunjuk untuk menerima pengalihan KLBI dalam rangka kredit program yang belum digunakan dan masih berjalan serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 2/3/PBI/2000 tanggal 1 Februari 2000 dan diperbaharui melalui Peraturan Bank Indonesia No. 5/20/PBI/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Pengalihan Pengelolaan KLBI Dalam Rangka Kredit Program. Meskipun Bank telah ditunjuk sebagai Bank Koordinator, dalam program tersebut Bank tetap berpartisipasi sebagai bank pelaksana.

Berdasarkan perjanjian yang didokumentasikan dalam akta No. 13 oleh Notaris Ismudjadi, S.H., tanggal 15 November 1999 antara Bank dengan Bank Indonesia tentang Pengalihan Pengelolaan KLBI, Bank telah menerima penyerahan pengalihan pengelolaan KLBI yang telah ditarik oleh bank-bank pelaksana sebesar Rp2.539.023 pada posisi tanggal 31 Oktober 1999 dari Bank Indonesia. Bank Indonesia memberi wewenang kepada Bank untuk menagih kepada bank-bank pelaksana sebesar angsuran pokok pada saat jatuh tempo.

Tanggung jawab dalam pengelolaan KLBI tersebut antara lain:

- a) Menerima permohonan pencairan kelonggaran tarik dari Bank Pelaksana;
- b) Menganalisis persyaratan teknis dan keuangan terhadap permohonan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana;
- c) Membuat rekomendasi untuk Bank Indonesia atas pencairan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana;
- d) Menerbitkan Surat Perjanjian Kerja untuk dan atas nama Bank Indonesia;

21. FUND BORROWINGS (continued)

a. Bank Indonesia

i. Loan Channeling Program

Based on Decision Letter No. 487/KMK.017/1999 dated October 13, 1999 of the Ministry of Finance, the Bank was appointed as coordinator in the loan channeling program for Simple Housing Loans (KPR-RS) and Very Simple Housing Loans (KPR-RSS). The state-owned companies which are appointed as coordinator banks in the Loan Channeling Program are also appointed to receive the transfer of KLBI under the loan program for those unused and still outstanding and approved but not yet drawn based on Bank Indonesia Regulation No. 2/3/PBI/2000 dated February 1, 2000 as amended by Bank Indonesia Regulation No. 5/20/PBI/2003 dated September 17, 2003 concerning the "Transfer of Management of KLBI within the Framework of Credit Program". Although the Bank was appointed as a coordinator for channeling loans, the Bank also participates in the program as an executor bank.

Based on an agreement between the Bank and Bank Indonesia which is documented in deed No. 13 dated November 15, 1999 of Notary Ismudjadi, S.H., regarding the transfer of management of KLBI, the Bank accepted from Bank Indonesia the management of KLBI which already drawn by participating banks amounted to Rp2,539,023 on October 31, 1999. Bank Indonesia has given the Bank the authority to bill the executor banks for the principal installments at maturity.

Responsibilities in the management of the KLBI include the following:

- a) Receive application from executor banks to draw down unused facility;
- b) Analyze technical and financial terms submitted by the executor banks to draw down unused facility;
- c) Recommend to Bank Indonesia the draw down of unused facility as proposed by the executor banks;
- d) Issue working agreement letters for and on behalf of Bank Indonesia;

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Bank Indonesia (lanjutan)

i. Penyalur Kredit Program (lanjutan)

Tanggung jawab dalam pengelolaan KLBI tersebut antara lain (lanjutan):

- e) Mengadministrasikan kelonggaran tarik yang dikelola; dan
- f) Mengelola hasil angsuran pokok KLBI yang diterima dari masing-masing Bank Pelaksana untuk disalurkan kembali melalui Bank Pelaksana sampai dengan jatuh tempo. Bank Indonesia tidak mengenakan bunga terhadap angsuran pokok KLBI yang dikelola oleh Bank.

Hak tagih atas KLBI yang pengelolaannya dibawah Bank, sampai KLBI tersebut jatuh tempo atau dilunasi sebelum jatuh tempo, tetap dimiliki oleh Bank Indonesia.

ii. Fasilitas Kredit Likuiditas

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari Bank Indonesia (Kredit Likuiditas Bank Indonesia atau KLBI) pada berbagai tanggal sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1999 untuk menunjang Program Pemerintah. Tingkat suku bunga rata-rata likuiditas pinjaman per tahun adalah sebesar 0,24%, 0,49% dan 0,50% untuk tahun 2014, 2013, dan 2012. Pinjaman ini akan jatuh tempo dalam 10 sampai 20 tahun dan digunakan untuk pembiayaan sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	28.016	54.891	103.943	Housing loans (KPR)
Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPR-RSS)	16.345	26.306	37.071	Very simple housing loans (KPR-RSS)
	44.361	81.197	141.014	

Sesuai Undang-undang No. 23 tanggal 17 Mei 1999, sejak tahun 1999, Bank Indonesia tidak lagi memberikan fasilitas KLBI. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 1/5/PBI/1999 tanggal 1 September 1999, seluruh KLBI yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik, dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan perjanjian tanggal 16 November 1999 antara Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah.

21. FUND BORROWINGS (continued)

a. Bank Indonesia (continued)

i. Loan Channeling Program (continued)

Responsibilities in the management of the KLBI include the following (continued):

- e) Administer unused facility that are managed; and
- f) Manage collection of KLBI principal installments received from each executor banks and to be redistributed through executor banks until maturity period. Bank Indonesia does not charge interest on KLBI principal installments which are managed by the Bank.

The right to bill KLBI under the management of the Bank until KLBI have matured or are repaid before maturity remains with Bank Indonesia.

ii. Liquidity Loan Facility

This account represents borrowing facilities obtained from Bank Indonesia (Bank Indonesia Liquidity Loans or KLBI) on various dates from 1983 through 1999 in line with the Government Program. Liquidity loan facility bears average interest rates are 0.24%, 0.49% and 0.50% per annum in 2014, 2013, and 2012. These borrowings will mature within 10 to 20 years and were used to finance the following:

In accordance with Law No. 23 dated May 17, 1999, since 1999, Bank Indonesia will no longer grant KLBI. Based on Bank Indonesia regulation No. 1/5/PBI/1999 dated September 1, 1999, all outstanding KLBI and those which have not yet matured and which have been approved but not yet drawn down are transferred to state-owned companies based on the agreement dated November 16, 1999 between the Government and the state-owned companies appointed by the Government.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Bank Indonesia (lanjutan)

ii. Fasilitas Kredit Likuiditas (lanjutan)

Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah adalah Bank, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

b. Pemerintah (pihak berelasi)

Akun ini merupakan fasilitas Rekening Dana Investasi (RDI) yang diterima Bank dari Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah-rumah Sangat Sederhana (KPR-RSS) dan Kredit Pemilikan Rumah-rumah Sederhana (KPR-RS).

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebesar 4,19%, 4,05% dan 4,14% untuk tahun 2014, 2013 dan 2012. Jangka waktu pinjaman ini adalah masing-masing 10, 15 dan 20 tahun dan jatuh tempo dalam berbagai tanggal sampai tahun 2016.

Berdasarkan perjanjian pinjaman yang dibuat pada tanggal 19 Maret 1999 antara Pemerintah dan Bank, Bank telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai koordinator dalam penyaluran dana RDI kepada bank pelaksana. Tujuan penyediaan dana ini adalah untuk membiayai program KPR-RSS dan KPR-RS dengan jumlah maksimum sebesar Rp22.000.

c. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF)

Akun ini terdiri dari Fasilitas Pinjaman Refinancing X, IX, VII, VI dan V, *Term Purchase Program* V, dan III, dan Pembiayaan yang diperoleh dari PT SMF yang ditujukan untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada debitur Bank.

Plafon pinjaman untuk Fasilitas Pinjaman *Refinancing* IX adalah Rp1.000.000 dengan jangka waktu pinjaman adalah 12 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2015. Plafon pinjaman untuk Fasilitas Pinjaman *Refinancing* X, VII, VI, dan V masing-masing sebesar Rp500.000 dengan jangka waktu pinjaman masing-masing adalah 12 bulan, 60 bulan, 60 bulan dan 120 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2015, 20 Juni 2018, 14 Desember 2017 dan 20 Juni 2022.

21. FUND BORROWINGS (continued)

a. Bank Indonesia (continued)

ii. *Liquidity Loan Facility (continued)*

The state-owned companies appointed by the Government are the Bank, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

b. Government (related parties)

This account represents Investment Funds Account (Rekening Dana Investasi or RDI) facility obtained from the Government of the Republic of Indonesia which was used to finance Very Simple Housing Loans (KPR-RSS) and Simple Housing Loans (KPR-RS).

These borrowings bear average interest rates are 4.19%, 4.05% and 4.14% per annum in 2014, 2013 and 2012. The loans have terms of 10, 15 and 20 years and have various maturity dates until 2016.

Based on the loan agreement dated March 19, 1999 between the Government and the Bank, the Bank was appointed by the Government as coordinator for the channeling of RDI loans to executor banks. The funds are intended to finance KPR-RSS and KPR-RS with a maximum amount of Rp22,000.

c. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF)

This account represents Refinancing Loan Facility X, IX, VII, VI and V, Term Purchase Program V and III and financing obtained from PT SMF which are intended to finance the Housing Loans (KPR) of the Bank's debtors.

The principal amount of Refinancing Loan Facility IX amounted to Rp1,000,000 with maturity period of 12 months and will mature on May 26, 2015. The principal amount of Refinancing Loan Facility X, VII, VI and V amounted to Rp500,000 each, with maturity period of 12 months, 60 months, 60 months, and 120 months, respectively, and will mature on September 30, 2015, June 20, 2018, December 14, 2017, and June 20, 2022, respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

c. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF) (lanjutan)

Plafon pinjaman untuk *Term Purchase Program* tahap V dan III masing-masing sebesar Rp500.013 dan Rp.500.000, jangka waktu pinjaman masing-masing adalah 36 bulan dan 60 bulan yang akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 20 Juni 2016 dan 20 Februari 2017.

Suku bunga per tahun atas Fasilitas Pinjaman *Refinancing* X, IX, VII, VI dan V, ini masing-masing adalah sebesar 9,63%, 9,69% tetap selama 1 tahun, 7,60%, 7,75% tetap selama 5 tahun, dan 7,85% tetap selama 10 tahun. Pokok Fasilitas Pinjaman *Refinancing* X, IX, VII, VI, dan V dibayar pada tanggal jatuh tempo. Suku bunga *Term Purchase Program* (Repo KPR) tahap V dan III sebesar 7,50% tetap selama 3 tahun dan 7,36% tetap selama 5 tahun. Pembayaran pokok pinjaman Tahap V dan III dilakukan pada akhir periode.

Jaminan atas Fasilitas Pinjaman *Refinancing* X, IX, VII, VI dan V, dan *Term Purchase Program* (Repo KPR) adalah tagihan KPR dengan kriteria tertentu. Hak agunan yang melekat atas tagihan tersebut dengan jumlah minimum masing-masing sebesar 125%, 100%, 110%, 125%, 125% dan 100% dari nilai plafon pinjaman pada saat penandatanganan perjanjian dan wajib dikelola minimum sebesar 100% dari baki debit pinjaman sampai jatuh tempo.

Fasilitas Pembiayaan dari PT SMF merupakan fasilitas pembiayaan *mudharabah murabahah* dan *mudharabah muqayyadah* dengan plafon pembiayaan masing-masing sebesar Rp200.000 dan telah jatuh tempo pada tanggal 13 November 2014 dan 23 Desember 2013.

Pada tanggal 31 Desember 2013 fasilitas pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dengan nominal Rp200.000 telah jatuh tempo dan diperpanjang dengan penambahan pinjaman menjadi Rp230.000 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 dan telah dilunasi pada tanggal jatuh temponya.

Porsi Nisbah atas fasilitas pembiayaan yang bersifat tetap selama tahun pertama, untuk pembiayaan *mudharabah murabahah* adalah sebesar 65,59% untuk PT SMF dan 34,41% untuk Bank.

21. FUND BORROWINGS (continued)

c. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF) (continued)

The principal amount of *Term Purchase Program* for phases V and III amounted to Rp500,013 and Rp500,000 respectively, with maturity period of 36 months and 60 months, respectively and will mature on June 20, 2016 and February 20, 2017, respectively.

The *Refinancing Loan Facility* X, IX, VII, VI and V bears interest at an annual fixed rate are 9.63%, 9.69% for the one-year period, 7.60%, 7.75% for the five-year period and 7.85% for the ten-year period, respectively. The principal payment for *Refinancing Loan Facility* X, IX, VII, VI, and V will be settled on its maturity date. Annual interest rate for the *Term Purchase Program* (Repo KPR) phases V and III are fixed at 7.50% for the three-year period and 7.36% for the five-year period, respectively. Principal payment for phases V and III will be settled on its maturity date.

The guarantees for the *Loan Facility* X, IX, VII, VI and V, and *Term Purchase Program* (Repo KPR) are the Housing Loans (KPR), which are subject to specific criteria. The values of collaterals are equivalent to at least 125%, 100%, 110%, 125%, 125% and 100%, respectively, of the principal at the signing of the agreements and should be maintained at a minimum of 100% of the outstanding loans until the maturity date.

The *Financing Facilities* received from PT SMF are *mudharabah murabahah* and *mudharabah muqayyadah* financing, with financing limits amounting to Rp200,000, and has matured on November 13, 2014 and December 23, 2013, respectively.

As of December 31, 2013 the *mudharabah muqayyadah* financing facility with nominal of Rp200,000 was matured and extended until December 23, 2014 with additional facility value to Rp230,000, and has been settled on its maturity date.

The *Nisbah* portion for *mudharabah murabahah* financing, which is fixed for the first year, are 65.59% and 34.41% for PT SMF and the Bank, respectively.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

c. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF) (lanjutan)

Porsi Nisbah atas fasilitas pembiayaan yang bersifat tetap untuk tahun pertama, untuk pembiayaan *mudharabah muqayyadah* sebesar 67,37% untuk PT SMF dan 32,63% untuk Bank. Besarnya Nisbah akan ditinjau setiap tahun. Sedangkan porsi nisbah untuk perpanjangan fasilitas pembiayaan *mudharabah muqayyadah* adalah 75,48% untuk SMF dan 24,52% untuk Bank. Pembayaran pokok atas kedua fasilitas pembiayaan ini dibayar pada tanggal jatuh tempo.

Jaminan atas ketiga fasilitas pembiayaan adalah tagihan KPR dengan kriteria tertentu. Jumlah minimum jaminan adalah sebesar 125% dari nilai fasilitas pembiayaan pada saat penandatanganan akad dan wajib dikelola minimum sebesar 100% dari nilai fasilitas pembiayaan sampai jatuh tempo.

d. Pinjaman dari PT Bank Mutiara Tbk

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Mutiara Tbk ditujukan untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada debitur Bank.

Plafon pinjaman sebesar Rp150.000 yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 April 2013. Suku bunga per tahun sebesar 7,75% tetap selama 2 tahun. Pokok pinjaman telah dibayarkan pada tanggal jatuh tempo.

Jaminan atas fasilitas pinjaman ini adalah tagihan KPR dengan kriteria tertentu. Hak agunan yang melekat atas tagihan tersebut dengan jumlah minimum 120% dari pokok pembiayaan pada tanggal penandatanganan perjanjian dan wajib dikelola minimal sebesar 100% dari nilai pinjaman sampai tanggal jatuh tempo.

e. Pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk ditujukan untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada debitur Bank.

Plafon pinjaman sebesar Rp2.000.000 telah jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2013. Fasilitas pinjaman tersebut memiliki suku bunga tetap sebesar 7,50% per tahun tetap selama 2 tahun. Pokok pinjaman akan dibayarkan pada tanggal jatuh tempo.

21. FUND BORROWINGS (continued)

c. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF) (continued)

The Nisbah portion for the *mudharabah muqayyadah* financing, which is fixed for the first year, are 67.37% and 32.63% for PT SMF and the Bank, respectively. The Nisbah portion of revenue sharing will be reviewed each year. The Nisbah portion for the extended *mudharabah muqayyadah* financing are 75.48% and 24.52% for PT SMF and the Bank, respectively. The principal payment for those Financing Facilities will be settled on their maturity dates.

The guarantees for the all of the above mentioned financing facilities obtained are the Housing Loans (KPR), which are subject to specific criteria. The value of collaterals is equivalent to at least 125% of the principal at the signing of the agreement and should be maintained at a minimum of 100% of the outstanding principal until the maturity date.

d. Loan from PT Bank Mutiara Tbk

This account represents loan facility obtained from PT Bank Mutiara Tbk, which is intended to finance Housing Loans (KPR) of the Bank's debtors.

The principal of the loan facility amounted to Rp150,000 which matured on April 20, 2013. The loan facility bears interest at an annual fixed rate of 7.75% for 2 years. The principal payment for the loan paid at the maturity date

The guarantees for the financing obtained are the Housing Loans (KPR), which are subject to specific criteria. The value of collaterals is equivalent to at least 120% of the principal at the signing of the agreement and should be maintained at a minimum of 100% of the outstanding principal until the maturity date.

e. Loan from PT Bank Central Asia Tbk

This account represents loan facility obtained from PT Bank Central Asia Tbk which is intended to finance Housing Loans (KPR) of the Bank's debtors.

The principal of the loan facility amounted to Rp2,000,000 has matured on December 7, 2013. The loan facility bears interest at an annual fixed rate of 7.50% for 2 years. The principal payment for the loan will be paid at the maturity date.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Sesuai dengan perubahan Atas Akta Perjanjian Kredit antara PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 311/Add-KCK/2013 tanggal 6 Desember 2013, Bank memperoleh fasilitas perpanjangan *Refinancing* dari PT Bank Central Asia Tbk dengan plafon kredit sebesar Rp2.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2015. Fasilitas pinjaman tersebut memiliki suku bunga tetap sebesar 8,75% per tahun selama 2 tahun. Pokok pinjaman akan dibayarkan pada tanggal jatuh tempo.

Fasilitas pinjaman dijamin oleh Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang memiliki kriteria tertentu. Nilai jaminan pada saat penandatanganan perjanjian tersebut adalah setara dengan minimum 125% dari nilai pokok kredit dan harus dipertahankan minimal sebesar 110% dari saldo pokok kredit sampai dengan jatuh tempo.

f. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Pinjaman yang diterima dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp4.079.030, Rp4.119.413, dan Rp3.571.646 (Catatan 40).

Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Bank telah memenuhi ketentuan yang ada dalam seluruh perjanjian pinjaman yang diterima.

21. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Bank Central Asia Tbk (continued)

Based on amendment of loan agreement between PT Bank Central Asia Tbk and PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 311/Add-KCK/2013 on 6 December, 2013, the Bank acquired an extension Refinancing facility from PT Bank Central Asia Tbk with a credit limit of Rp2,000,000 that will mature on December 7, 2015. The loan facility has a fixed interest rate of 8.75% per annum for 2 years. Loan principal will be settled at the maturity date.

The loan facility is guaranteed by the Bank's Housing Loans (KPR), which are subject to specific criteria. The value of the collaterals at the signing of the agreement is equivalent to at least 125% of the principal amount and should be maintained at a minimum of 110% of the outstanding principal until maturity.

f. Related parties transactions

As of December 31, 2014, 2013 dan 2012, fund borrowings received from related parties amounted to Rp4,079,030, Rp4,119,413, and Rp3,571,646, respectively (Note 40).

As of December 31, 2014, 2013 dan 2012, the Bank has complied with all of the existing terms of the fund borrowing agreements.

22. BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

22. INTEREST PAYABLE

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
Deposito berjangka	222.744	155.418	108.474	Time deposits
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	31.027	26.506	22.827	Securities sold under repurchase agreements
Surat-surat berharga yang diterbitkan	27.842	37.642	39.086	Securities issued
Pinjaman yang diterima	22.528	21.716	22.516	Fund borrowings
Simpanan dari bank lain	4.855	88	377	Deposits from other Banks
	308.996	241.370	193.280	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Bank melakukan penilaian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit secara individual dengan menggunakan bukti obyektif, kecuali transaksi berdasarkan prinsip syariah penilaian dilakukan menggunakan panduan kolektibilitas Bank Indonesia (BI).

Jumlah minimum estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi sesuai BI pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp7.198, Rp6.469, dan Rp4.403.

Kolektibilitas garansi yang diterbitkan dan fasilitas kredit yang belum ditarik yang mempunyai risiko kredit adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2014		31 Desember/ December 31, 2013		31 Desember/ December 31, 2012		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
<u>Lancar</u>							<u>Current</u>
<u>Rupiah</u>							<u>Rupiah</u>
Fasilitas kredit yang belum ditarik (committed)		1.703.825		1.676.657		1.214.572	Unused loan facility (committed)
Garansi yang diterbitkan (Catatan 36)		1.001.561		539.344		412.918	Guarantees issued (Note 36)
		<u>2.705.386</u>		<u>2.216.001</u>		<u>1.627.490</u>	
<u>Mata uang asing</u>							<u>Foreign currencies</u>
Garansi yang diterbitkan (Catatan 36)							Guarantees issued (Note 36)
Dolar Amerika Serikat	28.438.888	352.216	829.355	10.093	915.771	8.826	United States Dollar
Euro Eropa	31.022	467	-	-	-	-	European Euro
Yen Jepang	3.145.000	325	-	-	-	-	Japanese Yen
Pound Sterling Inggris	14.677	283	-	-	-	-	Great Britain Pound Sterling
Dolar Singapura	-	-	340.245	3.274	-	-	Singapore Dollar
		<u>353.291</u>		<u>13.367</u>		<u>8.826</u>	
		<u>3.058.677</u>		<u>2.229.368</u>		<u>1.636.316</u>	
<u>Dalam Perhatian Khusus</u>							<u>Special mention</u>
<u>Rupiah</u>							<u>Rupiah</u>
Fasilitas kredit yang belum ditarik (committed)		40.070		15.398		5.952	Unused loan facility (committed)
		<u>3.098.747</u>		<u>2.244.766</u>		<u>1.642.268</u>	

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 tidak terdapat transaksi dengan pihak-pihak berelasi untuk fasilitas kredit yang belum ditarik.

Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, garansi bank yang diterbitkan kepada pihak-pihak berelasi, masing-masing sebesar Rp82.573, Rp4.972 dan Rp74.449 (Catatan 40).

23. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Bank assessed commitment and contingency transaction which have credit risk individually for impairment based on whether an objective evidence of impairment exists, except transaction based on sharia principles, assessment was performed using a collectability guidance of Bank Indonesia (BI).

The minimum estimated losses on commitments and contingencies based on BI amounted to Rp7.198, Rp6.469, and Rp4.403, as of December 31, 2014, 2013 and 2012, respectively.

The collectability classification of guarantees issued and unused loan facility bearing credit risks are as follows:

As of December 31, 2014, 2013 and 2012, there are no transaction with related parties for unused loan facility.

As of December 31, 2014, 2013 and 2012, guarantees issued from related parties amounted to Rp82,573, Rp4,972 and Rp74,449, respectively (Note 40).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
Saldo awal tahun	6.469	4.403	3.244
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan	729	2.066	1.159
Saldo akhir tahun	7.198	6.469	4.403

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang dibentuk telah memadai.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 43.

23. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

The changes in the estimated losses on commitments and contingencies are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
Balance at beginning of year	6.469	4.403	3.244
Provision during the year	729	2.066	1.159
Balance at end of year	7.198	6.469	4.403

Based on management's judgment, the provision for estimated losses on commitments and contingencies is adequate.

Information with respect to classification of impaired and not impaired financial assets are disclosed in Note 43.

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
<u>Liabilitas imbalan kerja</u>			
Bonus dan tantiem	226.843	346.109	374.120
Imbalan kerja jangka panjang (Catatan 37b)	121.483	115.017	112.463
	348.326	461.126	486.583
<u>Liabilitas lain-lain</u>			
Dana jaminan pengembang	2.272.756	1.919.179	1.483.207
Pendapatan diterima di muka	427.105	458.423	422.591
Biaya yang masih harus dibayar	8.427	19.847	20.785
Setoran jaminan	7.402	12.610	7.095
Kewajiban ATM bersama	5.090	5.254	6.095
Cadangan litigasi	4.232	1.950	1.950
Nota kredit dalam penyelesaian	2.731	2.561	2.462
Lainnya	3.417	1.753	11.041
	2.731.160	2.421.577	1.955.226
	3.079.486	2.882.703	2.441.809

Pendapatan diterima di muka merupakan penerimaan bunga subsidi yang diberikan pemerintah terkait dengan pembiayaan Rumah Sehat Sederhana (RSH).

Cadangan atas bonus merupakan kewajiban atas jasa produksi karyawan pada tahun berjalan yang belum dibagikan pada akhir tahun.

24. EMPLOYEE BENEFITS AND OTHER LIABILITIES

Employee benefits liabilities
Bonuses and tantiem
Long term employee benefits (Note 37b)

Other liabilities
Developers' security deposits
Unearned income
Accrued expenses
Guarantee deposits
ATM sharing liabilities
Provision for litigation
Credit notes in process
Others

Unearned income represents interest income on subsidized fund from the Government relating to Simple Healthy Housing Loans (RSH).

Provision for bonus represents unpaid employees' bonus for the current year which was not yet distributed at the end of the year.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. EKUITAS

a. Modal Saham

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31, 2014					
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Nilai nominal per lembar saham (Rupiah penuh)/ Par value per share (Full Rupiah)	Jumlah nilai saham/ Total value of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage ownership	
Modal Dasar					Authorized Capital
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-	0,00%	Series A Dwiwarna Stock
Saham Biasa atas nama Seri B	20.478.431.999	500	10.239.216	100,00%	Series B Common Stock
	20.478.432.000		10.239.216	100,00%	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					Issued and Fully Paid Capital
Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah	1	500	-	0%	Series A Dwiwarna Stock Government
Saham Seri B Pemerintah	6.353.999.999	500	3.177.000	60,13%	Series B Stock Government
GIC S/A Government Of Singapore	95.597.181	500	47.799	0,90%	GIC S/A Government of Singapore
Maryono (Direktur Utama)*	98.500	500	49	0,00%	Maryono (President Director)*
Mansyur S. Nasution (Direktur)*	375.000	500	188	0,00%	Mansyur S. Nasution (Director)*
Irman A Zahiruddin (Direktur)*	4.922.650	500	2.461	0,05%	Irman A Zahiruddin (Director)*
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	4.112.702.669	500	2.056.351	38,92%	Public (ownership less than 5% each)
	10.567.696.000		5.283.848	100,00%	

* Termasuk dalam program MESOP

* Includes shares arising from the MESOP Programs

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2013					
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Nilai nominal per lembar saham (Rupiah penuh)/ Par value per share (Full Rupiah)	Jumlah nilai saham/ Total value of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage ownership	
Modal Dasar					Authorized Capital
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-	0,00%	Series A Dwiwarna Stock
Saham Biasa atas nama Seri B	20.478.431.999	500	10.239.216	100,00%	Series B Common Stock
	20.478.432.000		10.239.216	100,00%	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					Issued and Fully Paid Capital
Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah	1	500	-	0,00%	Series A Dwiwarna Stock Government
Saham Seri B Pemerintah	6.353.999.999	500	3.177.000	60,14%	Series B Stock Government
GIC S/A Government Of Singapore	541.719.968	500	270.860	5,13%	GIC S/A Government of Singapore
Sahala Lumban Gaol (Komisaris Independen)*	543.500	500	272	0,01%	Sahala Lumban Gaol (Independent Commissioner)*
Maryono (Direktur Utama)*	98.500	500	49	0,00%	Maryono (President Director)*
Mansyur S. Nasution (Direktur)*	375.000	500	188	0,00%	Mansyur S. Nasution (Director)*
Irman A Zahiruddin (Direktur)*	4.922.650	500	2.461	0,05%	Irman A Zahiruddin (Director)*
Evi Firmansyah	3.500.000	500	1.750	0,03%	Evi Firmansyah
Saut Pardede*	3.571.500	500	1.786	0,03%	Saut Pardede*
Mas Guntur Dwi S*	520.000	500	260	0,00%	Mas Guntur Dwi S*
Poernomo*	523.500	500	262	0,00%	Poernomo*
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	3.655.078.882	500	1.827.539	34,61%	Public (ownership less than 5% each)
	10.564.853.500		5.282.427	100,00%	

* Termasuk dalam program MESOP

* Includes shares arising from the MESOP Programs

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2012					
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Nilai nominal per lembar saham (Rupiah penuh)/ Par value per share (Full Rupiah)	Jumlah nilai saham/ Total value of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage ownership	
Modal Dasar					Authorized
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-	0,00%	Series A Stock Dwiwarna
Saham Biasa atas nama Seri B	20.478.431.999	500	10.239.216	100,00%	Common Stock Series B
	20.478.432.000		10.239.216	100,00%	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					Issued and Fully Paid-up
Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah	1	500	-	0,00%	Stock Dwiwarna Series A Government
Saham Seri B Pemerintah	6.353.999.999	500	3.177.000	61,35%	Stock Series B Government
GIC S/A Government Of Singapore	673.294.079	500	336.647	6,50%	GIC S/A Government of Singapore
Evi Firmansyah (Direktur)*	2.072.500	500	1.036	0,02%	Evi Firmansyah (Director)*
Irman A Zahiruddin (Direktur)*	3.996.150	500	1.998	0,04%	Irman A Zahiruddin (Director)*
Saut Pardede (Direktur)*	2.972.000	500	1.486	0,03%	Saut Pardede (Director)*
Mas Guntur Dwi S (Direktur)*	500.000	500	250	0,01%	Mas Guntur Dwi S (Director)*
Poernomo (Direktur)*	405.000	500	203	0,00%	Poernomo (Director)*
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	3.319.200.771	500	1.659.600	32,05%	Public (ownership less than 5% each)
Total Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	10.356.440.500		5.178.220	100,00%	Total Issued and Fully Paid-up

* Termasuk dalam program MESOP

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, perubahan anggaran dasar, menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Bank, pengajuan permohonan agar Bank dinyatakan pailit dan pembubaran Bank.

Saham Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh masyarakat.

* Includes shares arising from the MESOP Programs

Series A Dwiwarna share is the share that gives the shareholder preferential rights to approve the appointment or dismissal of Commissioners and Directors, changes in Articles of Association, approve on Bank's merger, dissolution, acquisition and separation, submission of request for bankruptcy and liquidation of Bank.

Series B shares are common shares that can be owned by the public.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

2014

Dengan adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 7 dan 8, MESOP II tahap 5 dan 6, dan MESOP III tahap 3 dan 4, pada tahun 2014 (Catatan 26), maka Bank menerbitkan saham seri B baru sejumlah 2.842.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham, sehingga meningkatkan jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh Bank sebesar 2.842.500 lembar saham dan sejumlah Rp1.421. Perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah disetujui dengan Akta No.32 tanggal 28 Agustus 2014 dan Akta No.16 tanggal 8 Oktober 2014 oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang pemberituannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai surat No. AHU-05535.40.21.2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan No. AHU-07159.40.21.2014 tanggal 8 Oktober 2014.

2013

Dengan adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 5 dan 6, MESOP II tahap 3 dan 4, dan MESOP III tahap 1 dan 2, pada tahun 2013 (Catatan 26), maka Bank menerbitkan saham seri B baru sejumlah 208.413.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham, sehingga meningkatkan jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh Bank sebesar 208.413.000 lembar saham dan sejumlah Rp104.207. Perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah disetujui dengan Akta No.26 tanggal 16 Maret 2013, Akta No.27 tanggal 8 Mei 2013, dan Akta No.35 tanggal 19 Desember 2013, oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang pemberituannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai surat No. AHU-AH.01.10-12486 tanggal 5 April 2013, No. AHU-AH.01.10-25534 tanggal 24 Juni 2013, dan No. AHU-AH.01.10-56039 tanggal 24 Desember 2013.

2012

Dengan adanya pelaksanaan opsi pembelian saham MESOP I tahap 3 dan 4 dan MESOP II tahap 1 dan 2 pada tahun 2012 (Catatan 26), maka Bank telah menerbitkan saham seri B baru sejumlah 7.612.500 lembar dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham, sehingga meningkatkan jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebesar 7.612.500 lembar saham dan sejumlah Rp3.806.

25. EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

2014

With the exercise of the purchased stock options during phases 7 and 8 of MESOP I, phases 5 and 6 of MESOP II, and phases 3 and 4 of MESOP III in 2014 (Note 26), the Bank issued 2,842,500 new series B shares with a par value of Rp500 (full Rupiah) per share, thereby increasing the total shares issued and fully paid capital of the Bank by 2,842,500 shares and Rp1,421, respectively. The changes in the issued and fully paid capital were approved by notarial deed No. 32 dated August 28, 2014 and notarial deed No. 16 dated October 8, 2014 of Fathiah Helmi, SH., which notice has been received by the Ministry of Laws and Human Rights through the letter No. AHU-05535.40.21.2014 dated August 27, 2014 and AHU-07159.40.21.2014 dated October 8, 2014.

2013

With the exercise of the purchased stock options during phases 5 and 6 of MESOP I, phases 3 and 4 of MESOP II, and phases 1 and 2 of MESOP III in 2013 (Note 26), the Bank issued 208,413,000 new series B shares with a par value of Rp500 (full Rupiah) per share, thereby increasing the total shares issued and fully paid capital of the Bank by 208,413,000 shares and Rp104,207, respectively. The changes in the issued and fully paid capital were approved by notarial deed No. 26 dated March 16, 2013, notarial deed No. 27 dated May 8, 2013 and notarial deed No. 35 dated December 19, 2013 of Fathiah Helmi, SH., which notice has been received by the Ministry of Laws and Human Rights through the letter No. AHU-AH.01.10-12486 dated April 5, 2013, No. AHU-AH.01.10-25534 dated June 24, 2013, and No. AHU-AH.01.10-56039 dated December 24, 2013.

2012

With the exercise of the purchased stock options during phases 3 and 4 of MESOP I and phases 1 and 2 of MESOP II in 2012 (Note 26), the Bank issued 7,612,500 new series B shares with a par value of Rp500 (full Rupiah) per share, thereby increasing the total shares issued and paid up capital of the Bank by 7,612,500 shares and Rp3,806, respectively.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

25. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

2012 (lanjutan)

Perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah disetujui dengan Akta No.32 tanggal 11 Desember 2012 oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang pemberituannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai surat No. AHU-AH.01.10-44595 tanggal 14 Desember 2012.

Pada tahun 2012, Bank telah melaksanakan Penawaran Umum Terbatas (PUT I) dengan tujuan untuk memperkuat permodalan dalam mendukung pertumbuhan kredit Bank. PUT I telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.PW/09116/DPR RI/IX/2012 tanggal 28 September 2012 dan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.87 tahun 2012 dan diundangkan dalam Lembaran Negara No.201 tanggal 20 Oktober 2012.

Berdasarkan surat dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No.S-13001/BL/2012 tanggal 6 November 2012, Bank telah melaksanakan pernyataan pendaftaran untuk PUT I yang telah dinyatakan efektif sejak tanggal 6 November 2012. Syarat dan ketentuan dari PUT I antara lain:

- a. Setiap pemegang 555.000 saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada 21 November 2012 pukul 16.00 WIB berhak atas 94.943 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
- b. Setiap HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) lembar saham dengan harga Rp1.235 per lembar saham, yang akan dilunasi setelah pelaksanaan hak atas saham.
- c. Saham HMETD yang ditawarkan dalam PUT I melalui penerbitan HMETD adalah jumlah maksimal yang dapat diterbitkan dari portofolio Bank dan akan didaftarkan di Bursa Efek Indonesia dengan tetap memperhatikan hukum yang berlaku.

25. EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

2012 (continued)

The changes in the issued and fully paid capital were approved by notarial deed No.32 dated December 11, 2012 of Fathiah Helmi, SH., which notice has been received by the Ministry of Laws and Human Rights through the letter No. AHU-AH.01.10-44595 dated December 14, 2012.

In 2012, the Bank conducted a Limited Public Offering I (LPO I) in order to strengthen its capital structure and support the Bank's loan growth. The LPO I was approved by the House of Representatives of the Republic of Indonesia as stipulated in the letter No. PW/09116/DPR RI/IX/2012 dated September 28, 2012 and the Government of the Republic of Indonesia as stated in the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 87 year 2012 and published in the State Gazette 201 dated October 20, 2012.

Based on the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) Letter No.S-13001/BL/2012 dated November 6, 2012, the Bank filed a registration statement for the LPO I, which became effective on November 6, 2012. The terms and conditions of the LPO I include among others:

- a. Each holder of 555,000 existing shares whose name is registered in the Register of Shareholders of the Bank on November 21, 2012, at 16.00 WIB is entitled to 94,943 Rights.
- b. Each right shall entitle its holder to purchase 1 (one) rights share at an exercise price of Rp1,235 per share, which shall be fully paid upon exercise of the right shares.
- c. The rights shares offered in the LPO I through the issuance of the Rights are the maximum shares that may be issued from the portfolio of the Bank and will be listed at the Indonesia Stock Exchange with due observance to the prevailing statutory regulations.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

d. Saham HMETD yang ditawarkan dalam PUT I harus diperingkat secara pari passu dalam segala hal dengan saham-saham lainnya yang telah dibayar penuh kepada Bank, termasuk yang berkaitan dengan hak untuk menerima dividen.

e. Setiap pecahan HMETD akan dibulatkan kebawah menjadi bilangan bulat yang terdekat.

Dengan adanya hasil dari PUT I, Bank telah menerbitkan 1.512.857.500 lembar Saham Biasa Seri B dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia melalui pelaksanaan HMETD pada tahun 2012, sehingga meningkatkan jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh oleh Bank sebesar 1.512.857.500 lembar saham atau sejumlah Rp1.052.796 (setelah dikurangi biaya emisi saham sebesar Rp59.154). Perubahan modal saham tersebut telah disetujui dengan Akta No.32 tanggal 11 Desember 2012 oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai surat No. AHU-AH.01.10-44595 tanggal 14 Desember 2012.

b. Tambahan modal disetor - Neto

Pada tahun 2014, dengan adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 7 dan 8, MESOP II tahap 5 dan 6, dan MESOP III tahap 3 dan 4, tambahan modal disetor meningkat masing-masing sebesar Rp1.840, Rp243, dan Rp289 yang berasal dari pembelian 2.368.000 lembar saham dengan harga sebesar Rp855 (Rupiah penuh) per lembar saham untuk MESOP I, sejumlah 192.500 lembar saham dengan harga sebesar Rp1.297,44 (Rupiah penuh) per lembar saham untuk MESOP II, dan sejumlah 282.000 lembar saham dengan harga sebesar Rp1.098,36 (Rupiah penuh) per lembar saham untuk MESOP III. Tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.028.136.

25. EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

d. The rights shares offered in the LPO I shall rank pari passu in all respects with the Bank's other fully paid-up shares, including with respect to the right to receive dividends

e. Any fractional rights will be rounded down to the nearest whole number

As a result of the LPO I, the Bank issued 1,512,857,500 new series B common shares with a par value of Rp500 (full Rupiah) per share which is listed on the Indonesia Stock Exchange through the exercise of the preemptive rights in 2012, thereby increasing the total shares issued and paid up capital of the Bank by 1,512,857,500 shares or Rp1,052,796 (net of shares issuance costs of Rp59,154), respectively. The changes in the capital stock were approved by notarial deed No.32 dated December 11, 2012 of Fathiah Helmi, SH., which notice has been received by the Ministry of Laws and Human Rights through the letter No.AHU-AH.01.10-44595 dated December 14, 2012.

b. Additional paid-in capital - Net

In 2014, with the exercise of purchase stock options of MESOP I phases 7 and 8, MESOP II phases 5 and 6, and MESOP III phases 3 and 4, the Bank's additional paid-in capital increased by Rp1,840, Rp243, and Rp289, respectively, as a result of the conversion of 2,368,000 shares at an exercise price of Rp855 (full Rupiah) per share for MESOP I, 192,500 shares at an exercise price of Rp1,297.44 (full Rupiah) per share for MESOP II, and 282,000 shares at an exercise price of Rp1,098.36 (full Rupiah) per share for MESOP III. Additional paid-in capital as of December 31, 2014 amounted to Rp2,028,136.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan modal disetor – Neto (lanjutan)

Pada tahun 2013, dengan adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 5 dan 6, MESOP II tahap 3 dan 4, dan MESOP III tahap 1 dan 2, tambahan modal disetor meningkat masing-masing sebesar Rp11.063, Rp117.623, dan Rp103.575 yang berasal dari pembelian 14.236.500 lembar saham dengan harga sebesar Rp855 (Rupiah penuh) per lembar saham untuk MESOP I, sejumlah 93.255.000 lembar saham dengan harga sebesar Rp1.297,44 (Rupiah penuh) per lembar saham untuk MESOP II, dan sejumlah 100.921.500 lembar saham dengan harga sebesar Rp1.098,36 (Rupiah penuh) per lembar saham untuk MESOP III. Tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp2.025.764.

Pada tahun 2012, dengan adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 3 dan 4 dan MESOP II tahap 1 dan 2, tambahan modal disetor meningkat masing-masing sebesar Rp5.219 dan Rp1.130 yang berasal dari pembelian 6.716.500 lembar saham dengan harga sebesar Rp855 (Rupiah penuh) per lembar saham untuk MESOP I dan 896.000 lembar saham dengan harga sebesar Rp1.297,44 (Rupiah penuh) per lembar saham untuk MESOP II. Selain itu, melalui pelaksanaan HMETD di bawah PUT I, tambahan modal disetor Bank meningkat sebesar Rp1.052.795 (setelah dikurangi biaya emisi saham sebesar Rp59.154). Tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.793.503.

c. Penggunaan Laba

Penggunaan Laba Tahun 2013

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diadakan pada tanggal 25 Februari 2014, pemegang saham menyetujui pembagian dividen sebesar Rp468.648, dan alokasi atas saldo laba sebesar Rp1.093.513 sebagai cadangan umum.

25. EQUITY (continued)

b. Additional paid-in capital – Net (continued)

In 2013, with the exercise of purchase stock options of MESOP I phases 5 and 6, MESOP II phases 3 and 4, and MESOP III phases 1 and 2, the Bank's additional paid-in capital increased by Rp11,063, Rp117,623, and Rp103,575, respectively, as a result of the conversion of 14,236,500 shares at an exercise price of Rp855 (full Rupiah) per share for MESOP I, 93,255,000 shares at an exercise price of Rp1,297.44 (full Rupiah) per share for MESOP II, and 100,921,500 shares at an exercise price of Rp1,098.36 (full Rupiah) per share for MESOP III. Additional paid-in capital as of December 31, 2013 amounted to Rp2,025,764.

In 2012, with the exercise of purchase stock options (the execution) of MESOP I phases 3 and 4 and MESOP II phases 1 and 2, the Bank's additional paid-in capital increased by Rp5,219 and Rp1,130, respectively, as a result of the conversion of 6,716,500 shares at an exercise price of Rp855 (full Rupiah) per share for MESOP I and 896,000 shares at an exercise price of Rp1,297.44 (full Rupiah) per share for MESOP II. Additionally, through the exercise of the pre-emptive rights under the LPO I, the Bank's additional paid-in capital increased by Rp1,052,795 (net of shares issuance costs of Rp59,154). Additional paid-in capital as of December 31, 2012 amounted to Rp1,793,503.

c. Profit Distribution

Profit Distribution for Year 2013

In the Annual General Stockholders' Meeting held on February 25, 2014, the stockholders approved the distribution of dividends amounting to Rp468,648 and the allocation of retained earnings amounted to Rp1,093,513 as general reserve.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

25. EKUITAS (lanjutan)

c. Penggunaan Laba (lanjutan)

Penggunaan Laba Tahun 2012

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diadakan pada tanggal 27 Maret 2013, pemegang saham menyetujui pembagian dividen sebesar Rp409.189, dan alokasi atas saldo laba sebagai berikut:

- i. Rp265.595 sebagai cadangan tujuan, dan
- ii. Rp689.178 sebagai cadangan umum.

Penggunaan Laba Tahun 2011

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diadakan pada tanggal 19 April 2012, pemegang saham menyetujui pembagian dividen sebesar Rp223.732, dan alokasi atas saldo laba sebagai berikut:

- ii. Rp240.107 sebagai cadangan tujuan,
- ii. Rp615.669 sebagai cadangan umum, dan
- iii. Rp16.780 dan Rp22.373 masing-masing sebagai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Berdasarkan akta RUPS, Bank melaporkan bahwa Bank telah melakukan reklasifikasi saldo laba sebesar Rp38.711 yang sebelumnya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya menjadi saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya.

26. PROGRAM KOMPENSASI MANAJEMEN DAN KARYAWAN BERBASIS SAHAM (MESOP)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 6 Oktober 2009 pemegang saham memutuskan untuk menyetujui program kepemilikan saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk oleh Manajemen dan Karyawan melalui penjatahan saham untuk Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Allocation/MESA) dan pemberian hak opsi kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan/MESOP) dalam rangka IPO dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Program MESA diberikan maksimal sebesar 9,62% dari saham baru yang diterbitkan dan program MESOP maksimal sebesar 4% dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh.

25. EQUITY (continued)

c. Profit Distribution (continued)

Profit Distribution for Year 2012

In the Annual General Stockholders' Meeting held on March 27, 2013, the stockholders approved the distribution of dividends amounting to Rp409,189 and the allocation of retained earnings as follows:

- i. Rp265,595 as specific reserve, and*
- ii. Rp689,178 as general reserve.*

Profit Distribution for Year 2011

In the Annual General Stockholders' Meeting held on April 19, 2012, the stockholders approved the distribution of dividends amounting to Rp223,732 and the allocation of retained earnings as follows:

- i. Rp240,107 as specific reserve;*
- ii. Rp615,669 as general reserve; and*
- iii. Rp16,780 and Rp22,373 for Partnership and Environmental Development Programs, respectively.*

Based on the deed of the General Share Holders Meeting, the Bank has reported that the Bank has reclassified retain earnings amounting to Rp38,711 which previously recorded as unappropriated retain earnings to appropriated retain earnings.

26. MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN (MESOP)

Based on the Extraordinary General Shareholders Meeting dated October 6, 2009, the shareholders approved the stock ownership of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk by management and employees through the Management and Employee Stock Allocation (MESA) program and grant of option right to Management and Employees under the Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) in connection with the IPO, subject to the following terms:

- a. MESA program is allocated with a maximum of 9.62% of the newly issued shares and a maximum of 4% of the issued and fully paid-up capital for the MESOP program.*

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

26. PROGRAM KOMPENSASI MANAJEMEN DAN KARYAWAN BERBASIS SAHAM (MESOP) (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 6 Oktober 2009 pemegang saham memutuskan untuk menyetujui program kepemilikan saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk oleh Manajemen dan Karyawan melalui penjabatan saham untuk Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Allocation/MESA) dan pemberian hak opsi kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan/MESOP) dalam rangka IPO dengan ketentuan sebagai berikut (lanjutan):

- b. Peserta program MESA dan MESOP adalah karyawan yang tercatat pada tanggal 30 September 2009 dan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota Komite Audit.
- c. Diskon harga saham untuk program MESA sebesar 20% dengan masa *lockup* selama enam bulan. Diskon dimaksud menjadi beban Bank.
- d. Hak opsi program MESOP dapat dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 30% dan tahap III sebesar 30%. Harga pelaksanaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Umur opsi lima tahun sejak diterbitkan dengan *vesting period* (masa tunggu) satu tahun yang mana dalam periode tersebut hak opsi tidak dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan.
- e. Alokasi saham MESA dan MESOP antara manajemen dan karyawan adalah 5%:95% dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kewajiban, prestasi kerja, masa kerja, jabatan, hak dan kewajiban.
- f. Pengawasan program MESA dan MESOP dilakukan oleh Dewan Komisaris dan pelaksanaannya agar mengikuti ketentuan yang berlaku serta dilaporkan kepada Pemegang Saham.

26. MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN (MESOP) (continued)

Based on the Extraordinary General Shareholders Meeting dated October 6, 2009, the shareholders approved the stock ownership of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk by management and employees through the Management and Employee Stock Allocation (MESA) program and grant of option right to Management and Employees under the Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) in connection with the IPO, subject to the following terms (continued):

- b. Participants of the MESA and MESOP programs are registered employees as of September 30, 2009 and the Board of Directors, the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, Secretary of the Board of Commissioners and members of the Audit Committee.*
- c. Stock price discount in the MESA program amounted to 20% with a lockup period of six months. The discount will be charged as the Bank's expense.*
- d. The MESOP program can be executed in three stages. Stage I amounting to 40%, stage II amounting to 30% and stage III amounting to 30%. The exercise price must comply with the prevailing rules and regulations. The option will expire in five years from the date of issuance with one year vesting period, which is the period the option is not exercisable.*
- e. MESA and MESOP stock allocations to management and employees is 5%:95% and should be implemented by considering equality, fairness, work achievement, work position, rights and obligation concept.*
- f. The implementation of MESA and MESOP is monitored by the Board of Commissioners to be reported to the stockholders and must comply with prevailing regulations.*

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

26. PROGRAM KOMPENSASI MANAJEMEN DAN KARYAWAN BERBASIS SAHAM (MESOP) (lanjutan)

MESOP Tahap I

Jumlah saham yang akan diterbitkan pada opsi saham Tahap I adalah 145.234.500 lembar dengan harga eksekusi adalah Rp855 (Rupiah penuh). Masa berlaku opsi adalah selama lima tahun dihitung dari tanggal pendistribusian hak opsi, 29 Januari 2010. Opsi saham mempunyai masa tunggu (vesting period) selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 1 Februari 2011.

Periode eksekusi yang ditetapkan Bank dimulai pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 setiap bulan Februari dan bulan Oktober selama 30 hari bursa di bulan bersangkutan.

Nilai wajar dari opsi saham tahap pertama yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2010 adalah sebesar Rp422,05 (Rupiah penuh) per lembar saham, sesuai dengan Laporan Penilaian yang dikeluarkan oleh PT Towers Watson pada tanggal 22 September 2010 dengan menggunakan model penentuan harga opsi Binomial (Binomial option pricing model).

Nilai wajar dari opsi yang diberikan merupakan estimasi dengan asumsi sebagai berikut:

Suku bunga bebas risiko
Ekspektasi periode opsi
Ekspektasi ketidakstabilan harga saham
Ekspektasi dividen yang dihasilkan
Tingkat pengunduran diri karyawan

7,808%
5 tahun/years
50%
2%
1%

Risk free rate
Expected option period
Expected volatility rate
Expected dividend yield
Employee resignation rate

MESOP Tahap II

Jumlah saham yang akan diterbitkan pada opsi saham Tahap II adalah 108.925.000 lembar dengan harga eksekusi adalah Rp1.297,44 (Rupiah penuh). Masa berlaku opsi adalah selama lima tahun dihitung dari tanggal pendistribusian hak opsi, 31 Januari 2011. Opsi saham mempunyai masa tunggu (vesting period) selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 1 Februari 2012.

Periode eksekusi yang ditetapkan Bank dimulai pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 setiap bulan Februari dan bulan Oktober selama 30 hari bursa di bulan bersangkutan.

Nilai wajar dari opsi saham tahap kedua yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2011 adalah sebesar Rp463,87 (Rupiah penuh) per lembar saham, sesuai dengan Laporan Penilaian yang dikeluarkan oleh PT Towers Watson pada tanggal 12 Oktober 2011 dengan menggunakan model penentuan harga opsi Binomial (Binomial option pricing model).

26. MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN (MESOP) (continued)

MESOP Stage I

The number of shares, which will be issued during Stage I stock option is 145,234,500 shares with execution price of Rp855 (full Rupiah). The option period is five years from the date of distribution, January 29, 2010. The option has vesting period of one year until February 1, 2011.

The Bank determined that the execution period begins in 2011 until 2014 with execution periods every February and October of each year for 30 working days of the respective months.

The fair value of the option which was distributed on January 29, 2010 amounted to Rp422.05 (full Rupiah) per share, based on the Valuation Report by PT Towers Watson dated September 22, 2010, using the Binomial option pricing model.

The fair value of the option is estimated using the following assumptions:

MESOP Stage II

The number of shares, which will be issued during Stage II stock option is 108,925,000 shares with execution price of Rp1,297.44 (full Rupiah). The option period is five years from the date of distribution, January 31, 2011. The option has vesting period of one year until February 1, 2012.

The Bank determined that the execution period begins in 2012 until 2015 with execution periods every February and October of each year for 30 working days of the respective months.

The fair value of the option, which was distributed on January 31, 2011 amounted to Rp463.87 (Rupiah full amount) per share, based on the Valuation Report by PT Towers Watson dated October 12, 2011, using the Binomial option pricing model.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

26. PROGRAM KOMPENSASI MANAJEMEN DAN KARYAWAN BERBASIS SAHAM (MESOP) (lanjutan)

MESOP Tahap II (lanjutan)

Nilai wajar dari opsi yang diberikan merupakan estimasi dengan asumsi sebagai berikut:

Suku bunga bebas risiko
Ekspektasi periode opsi
Ekspektasi ketidakstabilan harga saham
Ekspektasi dividen yang dihasilkan
Tingkat pengunduran diri karyawan

7,975%
5 tahun/years
50%
2%
1%

Risk free rate
Expected option period
Expected volatility rate
Expected dividend yield
Employee resignation rate

MESOP Tahap III

Jumlah saham yang akan diterbitkan pada opsi saham tahap III adalah 108.925.500 lembar dengan harga eksekusi adalah Rp1.098,36 (Rupiah penuh). Masa berlaku opsi adalah selama lima tahun dihitung dari tanggal pendistribusian hak opsi, 31 Januari 2012. Opsi saham mempunyai masa tunggu (vesting period) selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 1 Februari 2013.

Periode eksekusi yang ditetapkan Bank dimulai pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 setiap bulan Februari dan bulan Oktober selama 30 hari bursa di bulan bersangkutan.

Nilai wajar dari opsi saham tahap ketiga yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2012 adalah sebesar Rp427,93 (Rupiah penuh) per lembar saham, sesuai dengan laporan penilaian yang dikeluarkan oleh PT Towers Watson pada tanggal 28 Juni 2012 dengan menggunakan model penentuan harga opsi Binomial (*Binomial option pricing model*).

Nilai wajar dari opsi yang diberikan merupakan estimasi dengan asumsi sebagai berikut:

Suku bunga bebas risiko
Ekspektasi periode opsi
Ekspektasi ketidakstabilan harga saham
Ekspektasi dividen yang dihasilkan
Tingkat pengunduran diri karyawan

5,023%
5 tahun/years
50%
2%
1%

Risk free rate
Expected option period
Expected volatility rate
Expected dividend yield
Employee resignation rate

Jumlah biaya opsi saham yang diakui untuk MESOP Tahap I, II, III yang tercatat pada akun beban gaji dan upah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, masing-masing sebesar Nihil, Rp3.845, dan Rp42.301 (Catatan 32).

Harga rata-rata tertimbang saham adalah Rp1.115, Rp1.253, dan Rp1.333, untuk tahun yang berakhir masing-masing pada 31 Desember 2014, 2013, dan 2012.

26. MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN (MESOP) (continued)

MESOP Stage II (continued)

The fair value of the option is estimated using the following assumptions:

7,975%
5 tahun/years
50%
2%
1%

Risk free rate
Expected option period
Expected volatility rate
Expected dividend yield
Employee resignation rate

MESOP Stage III

The number of shares, which will be issued during Stage III, is 108,925,500 shares with execution price at Rp1,098.36 (full Rupiah). The option period is five years from the date of distribution, January 31, 2012. The option has vesting period of one year until February 1, 2013.

The Bank determined that the execution period begins in 2013 until 2016 with execution periods every February and October of each year for 30 working days of the respective months.

The fair value of the option, which was distributed on January 31, 2012, amounted to Rp427.93 (full Rupiah) per share, based on the valuation report by PT Towers Watson dated June 28, 2012, using the Binomial option pricing model.

The fair value of the option is estimated using the following assumptions:

5,023%
5 tahun/years
50%
2%
1%

Risk free rate
Expected option period
Expected volatility rate
Expected dividend yield
Employee resignation rate

The compensation costs recognized for MESOP Stages I, II, III as recorded in the Salaries and wages expense for years ended December 31, 2014, 2013, and 2012, amounted to Nil, Rp3,845, and Rp42,301, respectively (Note 32).

The weighted average shares price is Rp1,115, Rp1,253, and Rp1,333, for the years ended December 31, 2014, 2013, and 2012, respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. PROGRAM KOMPENSASI MANAJEMEN DAN KARYAWAN BERBASIS SAHAM (MESOP) (lanjutan)

26. MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN (MESOP) (continued)

MESOP Tahap III (lanjutan)

MESOP Stage III (continued)

Ringkasan MESOP dan mutasi selama periode yang berakhir 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 adalah sebagai berikut:

The summary of the MESOP and its movements during the period ended December 31, 2014, 2013, and 2012 are as follows:

31 Desember/December 31, 2014				
Jumlah Opsi/Number of Options				
MESOP Tahap I/ Stage I	MESOP Tahap II/ Stage II	MESOP Tahap III/ Stage III		
Opsi pada awal tahun	2.149.500	14.774.500	8.004.000	Options outstanding at beginning of the year
Opsi yang diberikan sepanjang tahun	-	-	-	Options granted during the year
Opsi yang dieksekusi sepanjang tahun	(2.149.500)	(192.500)	(282.000)	Options exercised during the year
Opsi yang bisa dieksekusi pada akhir tahun	-	14.582.000	7.722.000	Options that can be exercised at end of the year
31 Desember/December 31, 2013				
Jumlah Opsi/Number of Options				
MESOP Tahap I/ Stage I	MESOP Tahap II/ Stage II	MESOP Tahap III/ Stage III		
Opsi pada awal tahun	16.386.000	108.029.500	108.925.500	Options outstanding at beginning of the year
Opsi yang diberikan sepanjang tahun	-	-	-	Options granted during the year
Opsi yang dieksekusi sepanjang tahun	(14.236.500)	(93.255.000)	(100.921.500)	Options exercised during the year
Opsi yang bisa dieksekusi pada akhir tahun	2.149.500	14.774.500	8.004.000	Options that can be exercised at end of the year
31 Desember/December 31, 2012				
Jumlah Opsi/Number of Options				
MESOP Tahap I/ MESOP Stage I	MESOP Tahap II/ MESOP Stage II	MESOP Tahap III/ MESOP Stage III		
Opsi pada awal tahun	23.102.500	108.925.500	-	Options outstanding at beginning of the year
Opsi yang diberikan sepanjang tahun	-	-	108.925.500	Options granted during the year
Opsi yang dieksekusi sepanjang tahun	(6.716.500)	(896.000)	-	Options exercised during the year
Opsi yang bisa dieksekusi pada akhir tahun	16.386.000	108.029.500	108.925.500	Options that can be exercised at end of the year

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini terdiri dari:

27. INTEREST INCOME

This account consists of:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31				
	2014	2013	2012	
Kredit yang diberikan dan piutang				Loans and receivables
Kredit yang diberikan	11.352.218	9.605.046	7.900.961	Loans
Giro pada Bank Indonesia	53.634	49.760	36.134	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	3.125	1.278	167	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	100.573	189.917	195.405	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	37	-	2.679	Securities purchase under resale agreements
Nilai wajar melalui Laba rugi				Fair value through profit or loss
Obligasi pemerintah	6.834	33.044	2.478	Government bonds
Efek-efek ^{*)}	878	3.141	1.100	Securities ^{*)}
Tersedia untuk dijual				Available-for-sale
Obligasi pemerintah	373.979	299.227	227.018	Government bonds
Efek-efek ^{*)}	361.716	61.031	99	Securities ^{*)}
Dimiliki hingga jatuh tempo				Held-to-maturity
Obligasi pemerintah	78.712	63.312	53.713	Government bonds
Efek-efek ^{*)}	62.858	87.030	61.564	Securities ^{*)}
	12.394.564	10.392.786	8.481.318	

^{*)} Efek-efek terdiri dari sertifikat deposito Bank Indonesia, sertifikat Bank Indonesia, obligasi, reksadana dan efek beragunan aset.

^{*)} Securities consist of Bank Indonesia certificate deposit, Bank Indonesia certificate, mutual fund and residential mortgage backed securities.

28. BEBAN BUNGA

Akun ini terdiri dari:

28. INTEREST EXPENSE

This account consists of:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31				
	2014	2013	2012	
Deposito berjangka	4.600.203	2.728.481	2.151.842	Time deposits
Tabungan	880.815	721.244	507.929	Savings deposits
Surat-surat berharga yang diterbitkan	787.244	825.783	673.625	Securities issued
Pinjaman yang diterima	494.989	418.877	372.176	Fund borrowings
Giro	249.439	225.481	196.316	Demand deposits
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	200.505	157.259	159.189	Securities sold under repurchase agreements
Simpanan dari bank lain	82.538	38.062	19.526	Deposits from other banks
	7.295.733	5.115.187	4.080.603	

29. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN - LAIN

Akun ini terdiri dari:

29. OTHER OPERATING INCOME - OTHERS

This account consists of:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31				
	2014	2013	2012	
Jasa perbankan	64.646	60.607	45.758	Bank services
Jasa penagihan - payment points	4.586	4.146	3.589	Collection services - payment points
Lainnya	53.387	71.293	34.330	Others
	122.619	136.046	83.677	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN - LAIN (lanjutan)

Jasa perbankan terdiri dari pendapatan dari transaksi transfer dana, pendapatan sewa safe deposit box dan pendapatan administrasi layanan ATM.

Lainnya terutama terdiri dari servicing fee dari transaksi sekuritisasi, provisi atas Garansi Bank yang diterbitkan, dan komisi yang diterima dari perusahaan asuransi atas produk asuransi yang terjual.

29. OTHER OPERATING INCOME - OTHERS (continued)

Bank services pertains to income from fund transfer transactions, safety deposit box rentals and ATM service charges.

Others consist mainly of servicing fees from securitization transactions, provision from Guarantee Issued and commission received from insurance companies for insurance products sold by the Bank to its borrowers.

30. BEBAN PENYISIHAN (PEMBALIKAN) KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET KEUANGAN DAN NON- ASET KEUANGAN

Akun ini terdiri dari:

30. PROVISION EXPENSE FOR (REVERSAL OF) IMPAIRMENT LOSSES ON FINANCIAL AND NON-FINANCIAL ASSETS

This account consists of:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31			
	2014	2013	2012	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (Catatan 10)	775.613	435.742	206.442	Loans and sharia financing/receivables (Note 10)
Efek-efek (Catatan 8)	644	(11)	3.755	Securities (Note 8)
Giro pada bank lain (Catatan 6)	(737)	558	(572)	Current accounts with other banks (Note 6)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (Catatan 7)	(50)	(6.000)	2.999	Placements with Bank Indonesia and other banks (Note 7)
Properti terbengkalai	(4.304)	-	-	Abandoned properties
	771.166	430.289	212.624	

31. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

31. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

This account consists of:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31			
	2014	2013	2012	
Promosi	508.539	410.682	274.966	Promotion
Perbaikan dan pemeliharaan	483.956	419.009	304.381	Repairs and maintenance
Sewa	337.687	287.692	236.380	Rent
Penyusutan (Catatan 11)	225.741	279.446	266.621	Depreciation (Note 11)
Listrik, air dan komunikasi	231.737	157.999	169.555	Electricity, water and telecommunications
Beban kantor	124.495	112.212	98.634	Office expenses
Transportasi	95.713	70.065	51.197	Transportation
Jasa profesional	17.680	15.153	23.907	Professional fees
Lainnya	97.282	31.804	37.116	Others
	2.122.830	1.784.062	1.462.757	

Lainnya terutama terdiri dari beban administrasi sekuritisasi aset, dan premi asuransi untuk gedung, kas dalam perjalanan serta kas dalam khasanah.

Others consist mainly of securitization asset administration expense and insurance premium on the building, cash in transit and cash in vault.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2014	2013	2012
Gaji dan upah			
Rutin	898.542	884.558	763.120
Tidak rutin	490.637	540.784	536.931
Pelatihan dan pengembangan	106.964	106.095	112.204
Lainnya	99.266	81.715	74.683
	1.595.409	1.613.152	1.486.938

Lainnya terdiri dari beban imbalan kerja, biaya perekrutan, pesangon dan tunjangan rekreasi karyawan.

32. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS

This account consists of:

Salaries and wages
 Recurring
 Non-recurring
 Training and development
 Others

Others consists mainly of employee benefits expense, recruitment costs, severance costs and employee recreational costs.

33. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2014	2013	2012
Imbalan atas jasa penagihan	64.328	62.776	55.708
Kerugian atas penyelesaian kredit bermasalah	19.687	45.650	32.799
Lainnya	35.589	29.294	40.483
	119.604	137.720	128.990

Lainnya terutama terdiri dari beban representasi dan jamuan makan dan minum rapat, serta beban cadangan litigasi.

33. OTHER OPERATING EXPENSES - OTHERS

This account consists of:

Fees for collection services
 Loss on bad debt settlement
 Others

Others consist mainly of representation and entertainment expense, and provision for litigation expense.

34. PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL - NETO

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2014	2013	2012
Pendapatan sewa gedung	289	223	246
Pendapatan lainnya - neto	1.671	4.639	(8.013)
	1.960	4.862	(7.767)

Building rental income equipment
 Other income - net

34. NON-OPERATING INCOME - NET

This account consists of:

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. PERPAJAKAN

- a. Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan taksiran penghasilan kena pajak, adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2014	2013	2012
Laba sebelum beban pajak	1.548.172	2.140.771	1.863.202
Beda temporer:			
Pembentukan (pembalikan) cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	57.067	(566.390)	(466.334)
Penyisihan untuk imbalan kerja	6.467	2.553	7.167
(Penurunan) kenaikan nilai efek-efek yang dimiliki untuk diperdagangkan	(65.668)	65.120	(5.926)
Kompensasi Berbasis Saham (MESOP)	(1.118)	(88.610)	39.050
	(3.252)	(587.327)	(426.043)
Beda tetap:			
Kenikmatan karyawan	117.699	99.223	54.015
Beban kantor	23.653	18.860	15.460
Sewa	23.433	23.380	22.886
Sumbangan	6.272	10.330	2.137
Perbaikan dan pemeliharaan	5.206	6.131	8.332
Dana sosial dan representasi	3.343	7.204	6.849
Penyusutan atas aset tetap yang tidak dapat disusutkan menurut pajak	2.557	2.791	1.180
Denda pajak	275	150	36
Pendapatan sewa tarif final	(289)	(223)	(246)
	182.149	167.846	110.649
Taksiran penghasilan kena pajak	1.727.069	1.721.290	1.547.808
Beban pajak penghasilan	431.767	430.323	386.952
Beban pajak SKP	-	1.456	5.777
Pajak penghasilan yang dibayar sendiri - Pasal 25	(325.824)	(398.727)	(352.110)
Pembayaran beban pajak SKP	-	-	(5.777)
Hutang pajak penghasilan badan (Catatan 14)	105.943	33.052	34.842

Taksiran penghasilan kena pajak tahun 2013 dan 2012 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan Bank kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sampai dengan tanggal 23 Februari 2015, Bank belum melaporkan SPT tahun 2014 kepada KPP. Namun dasar pelaporan SPT tahun 2014 akan sesuai dengan taksiran penghasilan kena pajak tahun 2014 diatas.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2014, 2013, dan 2012 menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

35. TAXATION

- a. The reconciliation between income before tax expense, as shown in the statement of comprehensive income are as follows:

Income before tax expense
Temporary differences:
Provision for (reversal of) allowance for impairment losses on financial assets and non-financial assets
Provision for employee benefits
(Decrease) increase in fair value of trading securities
Employee stock option (MESOP)
Permanent differences:
Employee welfare
Office expense
Rent
Donations
Repairs and maintenance
Social funds and representation
Depreciation of premises and equipment which are non-depreciable for tax purposes
Tax penalties
Rent income subject to final tax
Estimated taxable income
Income tax expense in Tax expense based on tax assessment letter
Income tax paid - Article 25
Payment of tax expense based on tax assessment letter
Corporate income tax payable (Note 14)

Estimated taxable income in 2013 and 2012 are consistent with Annual Tax Return (SPT) for corporate income tax that reported by Bank to Tax Office (KPP). As of February 23, 2015, Bank has not yet reported the 2014, Tax Return to the Tax Office. However, the reporting base for 2014's Tax Return be in accordance with the estimated taxable income for 2014 above.

Taxable income derived from the 2014, 2013, and 2012 reconciliation become the basis for Annual Tax Return (SPT) for corporate income tax.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. PERPAJAKAN (lanjutan)

- b. Rincian beban pajak tangguhan - neto dengan memperhitungkan pengaruh beda temporer pada tarif pajak adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2014	2013	2012
Pembentukan (pembalikan) atas cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	14.266	(141.597)	(116.584)
Penyisihan untuk imbalan kerja (Penurunan) kenaikan nilai wajar efek-efek yang dimiliki untuk diperdagangkan	1.617	638	1.792
Kompensasi berbasis saham (MESOP)	(16.417)	16.280	(1.482)
	(279)	(22.152)	9.763
Beban Pajak Tangguhan - Neto	(813)	(146.831)	(106.511)

Provision for (reversal of) allowance for impairment losses on financial and non-financial assets
Provision for employee benefits
(Decrease) increase in fair value of trading securities
Employee stock option (MESOP)
Deferred Tax Expense - Net

- c. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan keuangan dan pajak adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - dampak dari laporan laba rugi komprehensif			
Penyisihan untuk imbalan kerja	30.371	28.754	28.116
Kompensasi berbasis saham (MESOP)	2.371	2.650	24.802
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(213.525)	(227.791)	(86.194)
(Penurunan) kenaikan nilai efek-efek yang dimiliki untuk diperdagangkan	(1.643)	14.774	(1.506)
	(182.426)	(181.613)	(34.782)
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - bukan dampak dari laporan laba rugi komprehensif			
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual	30.004	28.836	(11.189)
Kompensasi berbasis saham (MESOP)	-	-	962
	30.004	28.836	(10.227)
Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto	(152.422)	(152.777)	(45.009)

Deferred tax assets (liabilities) - effect from statement of comprehensive income
Provision for employee benefits
Employee stock options (MESOP)
Allowance for impairment losses on financial and non-financial assets
(Decrease) increase in fair value of trading securities
Deferred tax assets (liabilities) - not effect from statement of comprehensive income
Unrealized gain of available-for-sale securities and government bonds
Employee stock option (MESOP)
Deferred Tax liabilities - Net

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, manajemen berkeyakinan bahwa estimasi Bank terhadap penghasilan atas manfaat pajak masa mendatang yang timbul dari perbedaan temporer akan diakui di masa mendatang.

- d. Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak dan beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, and 2012 adalah sebagai berikut:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31			
	2014	2013	2012
Laba sebelum beban pajak	1.548.172	2.140.771	1.863.202
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku	(387.043)	(535.193)	(465.801)
Beda tetap	(45.537)	(41.961)	(27.662)
Beban pajak SKP	-	(1.456)	(5.777)
Beban pajak	(432.580)	(578.610)	(499.240)
			Income before tax expense
			Tax expense at the applicable tax rate
			Permanent differences
			Tax expense based on tax assessment letter
			Tax expense

Pemeriksaan tahun pajak 2010

Pada tanggal 3 Desember 2012, Bank telah menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk tahun pajak 2010 dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ Principal (Rp)	Denda/ Penalty (Rp)	Year 2010
Tahun 2010			
SKPKB PPh Badan No.00004/206/10/093/12	27.799	12.787	TAL Corporate Income Tax No.00004/206/10/093/12
SKP PPN Kurang Bayar No.00199/207/10/093/12	1.022	471	TAL VAT Underpayment No.00199/207/10/093/12
SKP PPN Kurang Bayar No.00113/107/10/092/12	-	205	TAL VAT Underpayment No.00113/107/10/092/12
	28.821	13.463	

Untuk SKP PPN Kurang Bayar No.00199/207/10/093/12 dan SKP PPN Kurang Bayar No.00113/107/10/092/12, Bank telah melakukan pembayaran dan sudah dibebankan sebagai biaya pajak tahun 2012.

35. TAXATION (continued)

c. Deferred tax assets (liabilities) (continued)

As of December 31, 2014, 2013, and 2012, management believes that the Bank's estimates of future taxable income indicate that the future income tax benefits arising from the temporary differences will be realized in the future.

- d. The reconciliation between the tax expense computed by applying the applicable tax rate on the income before tax expense and the tax expense shown in the statement of income for the years ended December 31, 2014, 2013, and 2012 are as follows:

Assessment for fiscal year 2010

On December 3, 2012, the Bank received several Tax Assessment Letters (TAL) for fiscal year 2010 as follows:

For TAL VAT Underpayment No.00199/207/10/093/12 and TAL VAT Underpayment No.00113/107/10/092/12, the Bank has paid and was charged as tax expense in the year 2012.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2010 (lanjutan)

Untuk SKPKB PPh Badan No.00004/206/10/093/12, Bank telah melakukan pembayaran seluruhnya. Atas jumlah sebesar Rp4.079, Bank telah menyetujuinya dan sudah dibebankan sebagai biaya pajak tahun 2012. Sedangkan atas jumlah sisanya Bank belum menyetujuinya, yaitu sebesar Rp36.507 (Catatan 13), karena manajemen berpendapat bahwa perlakuan pajaknya sudah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Pada tanggal 31 Januari 2013, atas SKPKB PPh Badan No.00004/206/10/093/12 tanggal 3 Desember 2012, Bank telah mengajukan permohonan keberatan. Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-162/WPJ.19/2014 tanggal 29 Januari 2014, permohonan tersebut ditolak, kemudian pada tanggal 24 April 2014, Bank mengajukan permohonan banding kepada Badan Pengadilan Pajak dan saat ini masih dalam proses pengadilan pajak.

Pada tanggal 21 November 2013, Bank telah menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No.SPHP-13/WPJ.19/KP.03/2013 mengenai kekurangan pembayaran pajak PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26 dan Pasal 4 ayat (2) untuk tahun pajak 2010. Atas SPHP tersebut, pada tanggal 20 Desember 2013, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ Principal (Rp)	Denda/ Penalty (Rp)
Tahun 2010		
SKPKB PPh Pasal 21 No.00005/201/10/093/13	141	67
SKPKB PPh Pasal 23 No.00008/203/10/093/13	383	184
SKPKB PPh Pasal 26 No.00003/204/10/093/13	11	5
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00008/240/10/093/13	91	44
SKPKB PPh Pasal 21 No.00014/201/10/631/13	326	157
SKPKB PPh Pasal 21 No.00018/201/10/511/13	6	3
SKPKB PPh Pasal 21 No.00014/201/10/441/13	4	2
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00018/240/10/904/13	2	1
SKPKB PPh Pasal 23 No.00097/203/10/904/13	20	9
	984	472

Bank telah melakukan pembayaran atas seluruh tagihan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut dan sudah dibebankan sebagai biaya pajak pada tahun 2013.

35. TAXATION (continued)

Assessment for fiscal year 2010 (continued)

For TAL Corporate Income Tax No.00004/206/10/093/12, the Bank has paid the entire amount. For the amount of Rp4,079, the Bank has already approved and was charged as tax expense in the year 2012. For the remaining amount of Rp36,507, the Bank filed objection (Note 13), the management believes that the treatment is already in accordance with the existing tax regulations.

On January 31, 2013, for TAL Corporate Income Tax No. 00004/206/10/093/12 dated December 3, 2012, the Bank has filed the tax objection. According to a decree of the General Director of Tax No.KEP-162/WPJ.19/2014 dated January 29, 2014, the request was rejected, then on April 24, 2014, Bank filed an appeal to the Tax Court Board and currently is still in the process on the tax court.

On November 21, 2013, the Bank received Notification of Tax Audit Findings No.SPHP-13/WPJ.19/KP.03/2013 regarding tax underpayment for Income Tax Article 21, Article 22, Article 23, Article 26 and Article 4 (2) for fiscal year 2010. Based on Notification of Tax Audit Findings, Bank has received issued Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) on December 20, 2013 as follows:

	Year 2010
TAL Article 21 No.00005/201/10/093/13	
TAL Article 23 No.00008/203/10/093/13	
TAL Article 26 No.00003/204/10/093/13	
TAL Article 4 (2) No.00008/240/10/093/13	
TAL Article 21 No.00014/201/10/631/13	
TAL Article 21 No.00018/201/10/511/13	
TAL Article 21 No.00014/201/10/441/13	
TAL Article 4 (2) No.00018/240/10/904/13	
TAL Article 23 No.00097/203/10/904/13	

The Bank has paid the entire assessed amount in the Tax Assessment Letter of Tax Underpayment and was charged as tax expense in the year 2013.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2012

Pada tanggal 30 September 2014, Bank telah menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No.PHP-201/WPJ.02/KP.10/2014 mengenai kekurangan pembayaran pajak PPh Pasal 4 ayat (2) untuk tahun pajak 2012. Atas SPHP tersebut, pada tanggal 10 November 2014, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ Principal (Rp)	Denda/ Penalty (Rp)	
Tahun 2012			Year 2012
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00095/240/12/218/14	191	92	TAL Article 4 (2) No.00095/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00096/240/12/218/14	191	92	TAL Article 4 (2) No.00096/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00097/240/12/218/14	190	91	TAL Article 4 (2) No.00097/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00098/240/12/218/14	168	81	TAL Article 4 (2) No.00098/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00099/240/12/218/14	214	103	TAL Article 4 (2) No.00099/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00100/240/12/218/14	196	94	TAL Article 4 (2) No.00100/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00101/240/12/218/14	207	99	TAL Article 4 (2) No.00101/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00102/240/12/218/14	245	118	TAL Article 4 (2) No.00102/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00103/240/12/218/14	238	114	TAL Article 4 (2) No.00103/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00104/240/12/218/14	229	110	TAL Article 4 (2) No.00104/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00105/240/12/218/14	250	120	TAL Article 4 (2) No.00105/240/12/218/14
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00106/240/12/218/14	305	146	TAL Article 4 (2) No.00106/240/12/218/14
	2.624	1.260	

Pada tanggal 8 Desember 2014, Bank telah melakukan pembayaran atas seluruh tagihan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut yaitu sebesar Rp3.884 (Catatan 13).

Pada tanggal 20 Januari 2015, Bank mengajukan surat keberatan atas seluruh SKPKB tersebut di atas. Sampai dengan tanggal 23 Februari 2015, pengajuan keberatan tersebut masih dalam proses.

35. TAXATION (continued)

Assessment for fiscal year 2012

On September 30, 2014, the Bank received Notification of Tax Audit Findings No.PHP-201/WPJ.02/KP.10/2014 regarding tax underpayment for Income Tax Article 4 (2) for fiscal year 2012. Based on Notification of Tax Audit Findings, Bank has received issued Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) on November 10, 2014 as follows:

On December 8, 2014, the Bank has paid the entire amount in the Tax Assessment Letter of Tax Underpayment amounted to Rp3,884 (Note 13).

On January 20, 2015, the Bank filed letters of tax objection on all of the aforementioned underpayment TAL. Until February 23, 2015, the objection is still in the process.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Saldo komitmen dan kontinjensi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
KOMITMEN			
Liabilitas Komitmen			
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	11.224.658	9.495.098	7.738.191
KONTINJENSI			
Tagihan Kontinjensi			
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	1.644.444	1.276.214	880.877
Liabilitas Kontinjensi			
Garansi yang diterbitkan (Catatan 23)	1.354.852	552.711	421.744
Tagihan Kontinjensi - neto	289.592	723.503	459.133

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

The outstanding commitments and contingencies as of December 31, 2014, 2013, and 2012, are as follows:

COMMITMENTS
Commitments payable
Unused loan facility commitments
CONTINGENCIES
Contingent receivables
Interest income on non-performing assets
Contingent payables
Guarantees issued (Note 23)
Contingent receivables - net

37. IMBALAN KERJA

Program pensiun imbalan pasti

Efektif tanggal 1 Januari 2004, semua pekerja yang baru diangkat sebagai pekerja tetap tidak diikutsertakan dalam program pensiun imbalan pasti ("Program Pensiun") dan hak atas manfaat pensiun diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan dengan memperhatikan faktor penghargaan per tahun masa kerja dan penghasilan dana pensiun. Program dana Pensiun diadministrasikan dan dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (DPBTN).

Sesuai dengan ketentuan, Program Pensiun dibiayai dari iuran karyawan dan iuran Bank. Iuran karyawan adalah sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan iuran Bank adalah sesuai dengan perhitungan aktuaris.

Program pensiun iuran pasti

Karyawan Bank diikutsertakan dalam program pensiun iuran pasti yang berlaku efektif sejak bulan Januari 2004. Program Pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK).

37. EMPLOYEE BENEFITS

Defined benefit pension plan

Effective January 1, 2004, all newly appointed permanent employees are not included in the defined benefit pension plan ("Pension Plan") and the right to pension benefits is given based on the established conditions which are stated in the regulations with consideration to the yearly gratuity factor over the working period and income on the Pension Fund. The Pension Plan's assets are being administered and managed by Dana Pensiun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (DPBTN).

According to the regulation, the pension plan is funded through contributions from both the employees and the Bank. Employees' contributions are computed at 5% of the employees' basic pension salaries and the Bank contributions are based on actuarial computations.

Defined contribution plan

The employees of Bank are included in the defined contribution pension plan which was effective since January 2004. This defined contribution pension plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

37. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Bank memberikan imbalan kerja kepada pegawai berupa penghargaan masa kerja dan Masa Persiapan Pensiun (MPP) yaitu 1 tahun sebelum pegawai mencapai usia pensiun normal (usia 56 tahun).

Karyawan Bank juga memperoleh manfaat dari pemberian program kesejahteraan, mulai 2 Januari 2013 kontribusi karyawan terhadap dana kesejahteraan sebesar 2,57% dikali gaji bersih dan kontribusi Bank sebesar 8,93%, sedangkan sebelum 2 Januari 2013 kontribusi karyawan sebesar 1,35% dikali gaji bersih dan kontribusi Bank sebesar 4,73%. Aset program diadministrasikan dan dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Bank Tabungan Negara (YKPBTN).

Perhitungan aktuaris atas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah berdasarkan laporan aktuaris tanggal 29 Januari 2015, 10 Januari 2014, dan 14 Januari 2013 dari aktuaris independen Bestama Aktuaris.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

37. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Other long-term employee benefits

The Bank provides employee benefits in the form of allowance for gratuity for services and retirement preparation period (MPP), which is within one year from the normal pension age (56 years old).

Bank employees are also given welfare program, since January 2, 2013, employees' contributions are 2.57% of their net wages for welfare program benefits and the Bank contributions are 8.93%, while before January 2, 2013, employees' contributions are 1.35% of their net wages and the Bank contribution are 4.73%. The plan assets are being administered and managed by Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Bank Tabungan Negara (YKPBTN).

The actuarial valuation of employee benefits as of December 31, 2014, 2013 and 2012 is based on the actuarial reports dated January 29, 2015, January 10, 2014, and January 14, 2013, of Bestama Aktuaris, an independent actuary.

The key assumptions used in the actuarial calculations are as follows:

	31 Desember/ December 31			
	2014	2013	2012	
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	6,00%	6,00%	6,00%	Basic pensionable annual salary increase rate
Tingkat mortalita (kematian)	GAM-1971	GAM-1971	GAM-1971	Mortality rate
Tingkat cacat	1,00%	1,00%	1,00%	Disability rate
Tingkat Diskonto				Discount rate
Imbalan Jangka Panjang Lainnya -				Other long-term benefits -
Penghargaan Masa Kerja	8,30%	9,00%	5,50%	Gratuity
Program Pesangon Pensiun -				Retirement severance program -
Selisih DPLK	8,50%	9,00%	5,50%	Difference from DPLK
Masa Persiapan Pensiun	8,00%	9,00%	5,50%	Retirement Preparation Period
Program Pensiun Imbalan Pasti	8,00%	8,50%	5,14%	Deferred Benefit Pension Plan
Program Kesejahteraan	7,90%	8,50%	5,14%	Welfare Program

Penghargaan masa kerja, program pesangon pensiun-selisih DPLK, masa persiapan pensiun dan program kesejahteraan dicantumkan dalam program lainnya.

Gratuity for services, retirement severance program-difference from DPLK, retirement preparation period and welfare program are included in other benefits.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

37. IMBALAN KERJA (lanjutan)

37. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

a. Biaya imbalan kerja

a. Employee benefits expense

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014/
Year Ended December 31, 2014

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Biaya jasa kini	21.621	26.819	48.440	Current service cost
Beban bunga	77.541	57.303	134.844	Interest cost
Tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program	(159.165)	(44.717)	(203.882)	Expected return on plan assets
Kerugian aktuarial yang diakui	3.358	12.670	16.028	Recognized actuarial loss
Biaya jasa lalu yang diakui (non-vested)	-	5.687	5.687	Recognition of past service cost (non vested)
Beban imbalan kerja - neto	(56.645)	57.762	1.117	Employee benefits expense - net

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013/
Year Ended December 31, 2013

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Biaya jasa kini	18.677	26.521	45.198	Current service cost
Beban bunga	77.932	39.886	117.818	Interest cost
Tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program	(106.212)	(38.892)	(145.104)	Expected return on plan assets
Kerugian aktuarial yang diakui	34.969	30.736	65.705	Recognized actuarial loss
Biaya jasa lalu yang diakui (non-vested)	-	5.687	5.687	Recognition of past service cost (non vested)
Beban imbalan kerja - neto	25.366	63.938	89.304	Employee benefits expense - net

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012/
Year Ended December 31, 2012

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Biaya jasa kini	28.712	36.652	65.364	Current service cost
Beban bunga	84.470	45.558	130.028	Interest cost
Tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program	(127.848)	(35.387)	(163.235)	Expected return on plan assets
Kerugian aktuarial yang diakui	39.757	767	40.524	Recognized actuarial loss
Biaya jasa lalu yang diakui (non-vested)	-	5.687	5.687	Recognition of past service cost (non vested)
Beban imbalan kerja - neto	25.091	53.277	78.368	Employee benefits expense - net

b. Mutasi atas kewajiban imbalan kerja

b. Movements of liabilities for employee benefits

31 Desember/ December 31, 2014

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo pada awal tahun	(131.518)	115.017	(16.501)	Balance at beginning of year
Beban imbalan kerja tahun berjalan	(56.645)	57.762	1.117	Employee benefits expense during the year
Kontribusi Bank tahun berjalan	(33.389)	(26.411)	(59.800)	Contribution by the Bank during the year
Pembayaran manfaat aktual	-	(24.885)	(24.885)	Actual benefit paid
Saldo (aset)/kewajiban pada akhir tahun (Catatan 24)	(221.552)	121.483	(100.069)	Balance (assets)/liabilities at end of year (Note 24)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

37. IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Mutasi atas kewajiban imbalan kerja (lanjutan)

31 Desember/ December 31, 2013			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total
Saldo pada awal tahun	(123.721)	102.605	(21.116)
Beban imbalan kerja tahun berjalan	25.366	63.938	89.304
Kontribusi Bank tahun berjalan	(33.163)	(26.490)	(59.653)
Pembayaran manfaat aktual	-	(25.036)	(25.036)
Saldo (aset)/kewajiban pada akhir tahun (Catatan 24)	(131.518)	115.017	(16.501)

31 Desember/ December 31, 2012			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total
Saldo pada awal tahun	(117.011)	83.733	(33.278)
Beban imbalan kerja tahun berjalan	25.091	53.277	78.368
Kontribusi Bank tahun berjalan	(31.801)	(13.723)	(45.524)
Pembayaran manfaat aktual	-	(20.682)	(20.682)
Saldo (aset)/kewajiban pada akhir tahun (Catatan 24)	(123.721)	102.605^{*)}	(21.116)

Balance at beginning of year
Employee benefits expense during the year
Contribution by the Bank during the year
Actual benefit paid

Balance (assets)/liabilities at end of year (Note 24)

Balance at beginning of year
Employee benefits expense during the year
Contribution by the Bank during the year
Actual benefit paid

Balance (assets)/liabilities at end of year (Note 24)

^{*)} termasuk aset imbalan kerja dari program kesejahteraan sebesar 9.858

^{*)} Including employee benefit assets of welfare program amounting to 9,858

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, Bank tidak mengakui aset pada laporan posisi keuangan dikarenakan manajemen Bank tidak memiliki keuntungan (benefit) atas aset tersebut dan saat ini belum memiliki rencana untuk menambah *benefit* kepada karyawan.

As of December 31, 2014, 2013, and 2012, Bank did not recognized retirement assets in the statement of financial position as Bank management has no benefits on those assets and currently has no plans to increase employee benefits yet.

c. Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

c. The movements in the present value of liabilities for employee benefits are as follows:

31 Desember/ December 31, 2014			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total
Saldo pada awal tahun	912.253	667.680	1.579.933
Biaya jasa kini	29.016	34.420	63.436
Beban bunga	77.541	57.303	134.844
Manfaat yang dibayarkan	(59.213)	(72.700)	(131.913)
Kerugian aktuarial	189.009	67.184	256.193
Saldo pada akhir tahun	1.148.606	753.887	1.902.493

Balance at beginning of year
Current service cost
Interest cost
Benefits paid
Actuarial loss

Balance at end of year

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

37. IMBALAN KERJA (lanjutan)

37. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

- c. Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut (lanjutan):

- c. The movements in the present value of liabilities for employee benefits are as follows (continued):

31 Desember/ December 31, 2013				
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo pada awal tahun	1.516.188	758.459	2.274.647	Balance at beginning of year
Biaya jasa kini	26.094	34.141	60.235	Current service cost
Beban bunga	77.932	39.886	117.818	Interest cost
Manfaat yang dibayarkan	(54.892)	(58.745)	(113.637)	Benefits paid
Keuntungan aktuarial	(653.069)	(106.061)	(759.130)	Actuarial gain
Saldo pada akhir tahun	912.253	667.680	1.579.933	Balance at end of year

31 Desember/ December 31, 2012				
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo pada awal tahun	1.407.838	669.016	2.076.854	Balance at beginning of year
Biaya jasa kini	35.972	40.563	76.535	Current service cost
Beban bunga	84.470	45.558	130.028	Interest cost
Manfaat yang dibayarkan	(37.769)	(49.079)	(86.848)	Benefits paid
Keuntungan aktuarial	25.677	52.401	78.078	Actuarial gain
Saldo pada akhir tahun	1.516.188	758.459	2.274.647	Balance at end of year

- d. Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

- d. The movements in the fair value of plan assets are as follows:

31 Desember/ December 31, 2014				
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo pada awal tahun	1.187.799	597.024	1.784.823	Balance at beginning of year
Tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program	159.165	44.717	203.882	Expected return on plan assets
Kontribusi Bank	33.389	26.411	59.800	Contributions by the Bank
Kontribusi pegawai	7.394	7.600	14.994	Employees contribution
Manfaat yang dibayarkan	(59.213)	(47.815)	(107.028)	Benefits paid
Keuntungan aktuarial	57.069	14.933	72.002	Actuarial gain
Saldo pada akhir tahun	1.385.603	642.870	2.028.473	Balance at end of year

31 Desember/ December 31, 2013				
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo pada awal tahun	1.180.129	560.408	1.740.537	Balance at beginning of year
Tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program	106.212	38.892	145.104	Expected return on plan assets
Kontribusi Bank	33.163	26.490	59.653	Contributions by the Bank
Kontribusi pegawai	7.416	7.619	15.035	Employees contribution
Manfaat yang dibayarkan	(54.892)	(33.709)	(88.601)	Benefits paid
Kerugian aktuarial	(84.229)	(2.676)	(86.905)	Actuarial loss
Saldo pada akhir tahun	1.187.799	597.024	1.784.823	Balance at end of year

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

37. IMBALAN KERJA (lanjutan)

37. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

- d. Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut (lanjutan):

- d. The movements in the fair value of plan assets are as follows (continued):

	31 Desember/ December 31, 2012			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo pada awal tahun	1.012.255	509.908	1.522.163	Balance at beginning of year
Tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program	127.848	35.387	163.235	Expected return on plan assets
Kontribusi Bank	31.801	13.723	45.524	Contributions by the Bank
Kontribusi pegawai	7.260	3.911	11.171	Employees contribution
Manfaat yang dibayarkan	(37.769)	(28.397)	(66.166)	Benefits paid
Kerugian aktuaria	38.734	25.876	64.610	Actuarial loss
Saldo pada akhir tahun	1.180.129	560.408	1.740.537	Balance at end of year

- e. Saldo imbalan kerja untuk posisi 31 Desember 2014 dan posisi selama empat tahun sebelumnya:

- e. Balance of employee benefits as of December 31, 2014 and previous four years are as follows:

Program Pensiun/Pension Plan						
	2014	2013	2012	2011	2010	
Nilai kini dari kewajiban pensiun	1.148.606	912.253	1.516.188	1.407.838	816.433	Present value of retirement obligation
Nilai wajar aset program	1.385.603	1.187.799	1.180.129	1.012.255	836.983	Fair value of plan assets
Status pendanaan	(236.997)	(275.546)	336.059	395.583	(20.550)	Funded status
Keuntungan (kerugian) aktuaria yang belum diakui	15.445	144.028	(459.780)	(524.826)	(125.002)	Unrecognized actuarial gain (loss)
Batasan aktiva	-	-	-	-	20.549	Assets limitation
(Aset)/kewajiban imbalan kerja	(221.552)	(131.518)	(123.721)	(129.243)	(125.003)	Employee benefits (assets)/liabilities

Program Lainnya/Other Benefits						
	2014	2013	2012	2011	2010	
Nilai kini dari kewajiban pensiun	753.887	667.680	758.459	669.016	535.653	Present value of retirement obligation
Nilai wajar aset program	642.870	597.024	560.408	509.908	472.761	Fair value of plan assets
Status pendanaan	111.017	70.656	198.051	159.108	62.892	Funded status
Keuntungan (kerugian) aktuaria yang belum diakui	9.984	29.216	(77.023)	(51.265)	28.387	Unrecognized actuarial gain (loss)
Biaya jasa lalu yang belum diakui (non-vested)	(7.049)	(12.736)	(18.423)	(24.110)	(29.797)	Unrecognized past service cost (non-vested)
Batasan aktiva	7.531	27.881	-	-	21.805	Assets limitation
Kewajiban imbalan kerja	121.483	115.017	102.605	83.733	83.287	Employee benefits liabilities

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

37. IMBALAN KERJA (lanjutan)

- e. Saldo imbalan kerja untuk posisi 31 Desember 2014 dan posisi selama empat tahun sebelumnya (lanjutan):

	Total Program Pensiun dan Program Lainnya/ Total of Pension Plan and Other Benefits					
	2014	2013	2012	2011	2010	
Nilai kini dari kewajiban pensiun	1.902.493	1.579.933	2.274.647	2.076.854	1.352.086	Present value of retirement obligation
Nilai wajar aset program	2.028.473	1.784.823	1.740.537	1.522.163	1.309.744	Fair value of plan assets
Status pendanaan	(125.980)	(204.890)	534.110	554.691	42.342	Funded status
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang belum diakui	25.429	173.244	(536.803)	(576.091)	(96.615)	Unrecognized actuarial gain (loss)
Biaya jasa lalu yang belum diakui (non-vested)	(7.049)	(12.736)	(18.423)	(24.110)	(29.797)	Unrecognized past service cost (non-vested)
Batasan aktiva	7.531	27.881	-	-	42.354	Assets limitation
(Aset)/ kewajiban imbalan kerja	(100.069)	(16.501)	(21.116)	(45.510)	(41.716)	Employee benefits (assets)/liabilities

- f. Portofolio investasi aset program yang ditempatkan dalam bentuk instrumen keuangan Bank terdiri dari Surat Berharga Negara, Obligasi, Deposito Berjangka dan Saham.

- e. Balance of employee benefits as of December 31, 2014 and previous four years are as follows (continued):

- f. The asset program's investment portfolio that placed in the form of Bank's financial instruments consist of government securities, bonds, time deposits and shares of stocks.

38. SEGMENT OPERASI

Informasi segmen berdasarkan segmen geografis:

38. OPERATING SEGMENT

Segment information based on geographical segments are as follows:

	Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut/ as of December 31, 2014 and for the Year Then Ended						
	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others**)	Total	
Pendapatan segmen	1.122.963	4.631.833	3.128.961	1.794.604	2.128.967	12.807.328	Segment income
Beban segmen	(1.537.735)	(4.300.126)	(929.404)	(285.900)	(289.582)	(7.342.747)	Segment expenses
Pendapatan segmen - neto	(414.772)	331.707	2.199.557	1.508.704	1.839.385	5.464.581	Segment Income - net
Pendapatan operasional lainnya	109.454	305.630	248.126	112.125	119.485	894.820	Other operating income
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(30.655)	(217.280)	(258.719)	(103.174)	(161.338)	(771.166)	Provision expense for impairment losses on financial assets and non-financial assets
Beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	(2.165)	443	523	(127)	597	(729)	Estimated losses on commitments and contingencies
Beban operasional lainnya	(2.278.682)	(703.238)	(528.598)	(265.068)	(265.708)	(4.041.294)	Other operating expenses
Laba (rugi) operasional	(2.616.820)	(282.738)	1.660.889	1.252.460	1.532.421	1.546.212	Income (loss) from operations
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	(527.520)	2.788.996	(647.439)	(702.825)	(909.252)	1.960	Non-operating income (expenses) - net
Beban pajak	(432.580)	-	-	-	-	(432.580)	Tax expense
Laba tahun berjalan	(3.576.920)	2.506.258	1.013.450	549.635	623.169	1.115.592	Income for the year
Total aset	23.545.728	87.168.466	19.592.424	7.125.658	7.143.695	144.575.961	Total assets
Total liabilitas	19.167.542	62.950.042	24.098.565	12.198.809	13.954.597	132.369.555	Total liabilities

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

38. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Informasi segmen usaha berdasarkan segmen geografis (lanjutan):

38. OPERATING SEGMENT (continued)

Segment information based on are geographical segments as follows (continued):

Tanggal 31 Desember 2013 dan untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut/ as of December 31, 2013 and for the Year Then Ended							
	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others**)	Total	
Pendapatan segmen	941.524	3.768.182	2.672.126	1.564.169	1.836.876	10.782.877	Segment income
Beban segmen	(1.418.672)	(2.652.241)	(615.277)	(224.873)	(218.491)	(5.129.554)	Segment expenses
Pendapatan segmen - neto	(477.148)	1.115.941	2.056.849	1.339.296	1.618.385	5.653.323	Segment Income - net
Pendapatan operasional lainnya	89.941	253.121	227.426	98.202	95.293	763.983	Other operating income
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	70.746	(180.248)	(165.145)	(75.982)	(79.660)	(430.289)	Provision expense for impairment losses on financial assets and non-financial assets
Beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	(749)	(273)	(1.291)	271	(24)	(2.066)	Estimated losses on commitments and contingencies
Beban operasional lainnya	(2.295.507)	(591.714)	(476.021)	(249.142)	(236.658)	(3.849.042)	Other operating expenses
Laba (rugi) operasional	(2.612.717)	596.827	1.641.818	1.112.645	1.397.336	2.135.909	Income (loss) from operations
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	(829.479)	2.577.579	(488.272)	(546.726)	(708.240)	4.862	Non-operating income (expenses) - net
Beban pajak	(578.610)	-	-	-	-	(578.610)	Tax expense
Laba tahun berjalan	(4.020.806)	3.174.406	1.153.546	565.919	689.096	1.562.161	Income for the year
Total aset	22.758.518	59.689.397	22.998.866	11.852.321	13.870.628	131.169.730	Total assets
Total liabilitas	20.794.166	54.218.059	21.102.486	10.847.844	12.650.422	119.612.977	Total liabilities

Tanggal 31 Desember 2012 dan untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut/ as of December 31, 2012 and for the Year Then Ended							
	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others**)	Total	
Pendapatan segmen	826.290	3.138.927	2.063.516	1.303.724	1.486.122	8.818.579	Segment income
Beban segmen	(1.207.417)	(2.057.573)	(438.502)	(216.903)	(171.365)	(4.091.760)	Segment expenses
Pendapatan segmen - neto	(381.127)	1.081.354	1.625.014	1.086.821	1.314.757	4.726.819	Segment Income - net
Pendapatan operasional lainnya	20.698	199.130	160.982	87.008	103.676	571.494	Other operating income
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(32.343)	(115.625)	(1.769)	(14.865)	(48.022)	(212.624)	Provision expense for impairment losses on financial assets and non-financial assets
Beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	(2.165)	443	523	(127)	167	(1.159)	Estimated losses on commitments and contingencies
Beban operasional lainnya	(1.903.336)	(508.679)	(426.565)	(222.280)	(152.701)	(3.213.561)	Other operating expenses
Laba operasional	(2.298.273)	656.623	1.358.185	936.557	1.217.877	1.870.969	Income from operations
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	(1.190.787)	2.362.832	(300.372)	(359.088)	(520.352)	(7.767)	Non-operating income (expenses) - net
Beban pajak	(499.240)	-	-	-	-	(499.240)	Tax expense
Laba tahun berjalan	(3.988.300)	3.019.455	1.057.813	577.469	697.525	1.363.962	Income for the year
Total aset	17.987.399	66.045.547	15.097.364	6.438.524	6.179.759	111.748.593	Total assets
Total liabilitas	19.058.697	45.368.725	16.908.418	9.717.616	10.416.266	101.469.722	Total liabilities

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

38. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Informasi segmen usaha berdasarkan jenis usaha:

38. OPERATING SEGMENT (continued)

Segment information based on business type are as follows:

Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut/ as of December 31, 2014 and for the Year Then Ended					
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination	Total	
Pendapatan segmen	12.394.564	412.764	-	12.807.328	Segment income
Beban segmen	(7.332.418)	(10.329)	-	(7.342.747)	Segment expenses
Pendapatan segmen - neto	5.062.146	402.435	-	5.464.581	Segment Income - net
Pendapatan operasional lainnya	860.284	34.536	-	894.820	Other operating income
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(693.604)	(77.562)	-	(771.166)	Provision expense for impairment losses on financial assets and non-financial assets
Beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	(729)	-	(729)	Estimated losses on commitments and contingencies
Beban operasional lainnya	(3.863.139)	(178.155)	-	(4.041.294)	Other operating expenses
Laba operasional	1.365.687	180.525	-	1.546.212	Income from operations
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	(19.652)	21.612	-	1.960	Non-operating income (expenses) - net
Beban pajak	(432.580)	-	-	(432.580)	Tax expense
Laba tahun berjalan	913.455	202.137	-	1.115.592	Income for the year
Total aset	135.076.817	11.144.718	(1.645.574)	144.575.961	Total assets
Total liabilitas	124.719.838	9.295.291	(1.645.574)	132.369.555	Total liabilities

Tanggal 31 Desember 2013 dan untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut/ as of December 31, 2013 and for the Year Then Ended					
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination	Total	
Pendapatan segmen	10.392.786	390.091	-	10.782.877	Segment income
Beban segmen	(5.120.843)	(8.711)	-	(5.129.554)	Segment expenses
Pendapatan segmen - neto	5.271.943	381.380	-	5.653.323	Segment Income - net
Pendapatan operasional lainnya	713.736	50.247	-	763.983	Other operating income
Pembalikan (beban penyisihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(439.694)	9.405	-	(430.289)	Reversal of (provision expense for) for impairment losses on financial assets and non-financial assets
Beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	(2.066)	-	(2.066)	Estimated losses on commitments and contingencies
Beban operasional lainnya	(3.698.472)	(150.570)	-	(3.849.042)	Other operating expenses
Laba operasional	1.847.513	288.396	-	2.135.909	Income from operations
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	63.948	(59.086)	-	4.862	Non-operating income (expenses) - net
Beban pajak	(578.610)	-	-	(578.610)	Tax expense
Laba tahun berjalan	1.332.851	229.310	-	1.562.161	Income for the year
Total aset	123.698.844	9.551.176	(2.080.290)	131.169.730	Total assets
Total liabilitas	112.360.864	9.332.403	(2.080.290)	119.612.977	Total liabilities

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

38. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Informasi segmen usaha berdasarkan jenis usaha (lanjutan):

38. OPERATING SEGMENT (continued)

Segment information based on business type are as follows (continued):

	Tanggal 31 Desember 2012 dan untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut/ as of December 31, 2012 and for the Year Then Ended				
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination	Total	
Pendapatan segmen	8.481.318	337.261	-	8.818.579	Segment income
Beban segmen	(4.085.762)	(5.998)	-	(4.091.760)	Segment expenses
Pendapatan segmen - neto	4.395.556	331.263	-	4.726.819	Segment Income - net
Pendapatan operasional lainnya	517.484	54.010	-	571.494	Other operating income
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(127.730)	(84.894)	-	(212.624)	Provision expense for impairment losses on financial assets and non-financial assets
Beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	(1.159)	-	(1.159)	Estimated losses on commitments and contingencies
Beban operasional lainnya	(3.090.128)	(123.433)	-	(3.213.561)	Other operating expenses
Laba operasional	1.695.182	175.787	-	1.870.969	Income from operations
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	28.010	(35.777)	-	(7.767)	Non-operating income (expenses) - net
Beban pajak - neto	(499.240)	-	-	(499.240)	Tax expense - net
Laba tahun berjalan	1.223.952	140.010	-	1.363.962	Income for the year
Total aset	105.351.325	7.664.400	(1.267.132)	111.748.593	Total assets
Total liabilitas	96.314.178	6.422.676	(1.267.132)	101.469.722	Total liabilities

39. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 tahun 2004 tentang pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, dinyatakan dalam pasal 8 bahwa dengan diakhirinya tugas dan dibubarkannya BPPN, Program Penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum yang semula dilakukan oleh BPPN berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 tahun 1998 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 tahun 1998, selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3) sebagaimana diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 2004, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 179/KMK.017/2000 tentang Syarat, Tatacara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

39. GOVERNMENT GUARANTEES ON THE OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

Based on Article 8 of the Decision No. 15 year 2004 of the President of the Republic of Indonesia regarding the termination of the role and winding-up of IBRA, the Government Guarantee Program on the obligations of domestic banks which was originally handled by IBRA based on the Decisions of the President of the Republic of Indonesia No. 26 year 1998 and No. 27 year 1998 would be handled by the Ministry of Finance, specifically by the Government Guarantee Implementation Unit ((Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah) (UP3)) as provided in the Decision of the President of the Republic of Indonesia No. 17 year 2004, which was further regulated by the Decision No. 84/KMK.06/2004 dated February 27, 2004 of the Ministry of Finance regarding the Amendment of Decision No. 179/ KMK.017/2000 of the Ministry of Finance on the Terms, Implementation Guidelines, and Conditions of the Government Guarantees on the obligations of commercial banks.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

39. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM (lanjutan)

Program Penjaminan Pemerintah melalui UP3 telah berakhir pada tanggal 22 September 2005, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Perhitungan Dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Terhadap Pembayaran Bank Umum untuk periode 1 Juli sampai 21 September 2005.

Sebagai pengganti UP3 Pemerintah telah membentuk Lembaga Independen, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dimana LPS menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan salinan Peraturan LPS No. 1/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang "Program Penjaminan Simpanan" diatur besarnya saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling tinggi sebesar Rp100 juta (angka penuh).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang "Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan" maka nilai simpanan setiap nasabah pada satu bank yang dijamin oleh Pemerintah naik menjadi sebesar Rp2 miliar (angka penuh) dari semula Rp100 juta (angka penuh), efektif sejak tanggal tersebut di atas.

Suku bunga penjaminan LPS pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 masing-masing adalah sebesar 7,75%, 7,25%, dan 5,50% untuk simpanan dalam mata uang Rupiah. Untuk simpanan dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar 1,50%, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar 1,00%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, Bank telah membayar premi program penjaminan masing-masing sebesar Rp203.451, Rp175.419, dan Rp134.876.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. GOVERNMENT GUARANTEES ON THE OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS (continued)

The Guarantee Program by the Government through UP3 ended on September 22, 2005, as stated in Regulation No. 68/PMK.05/2005 dated August 10, 2005 of the Ministry of Finance concerning the Calculation and Payments of Premium on Guarantee Program from Commercial Banks for the period July 1 to September 21, 2005.

The Government established the Deposit Insurance Corporation (LPS), an independent agency, to replace UP3, based on Law No. 24 year 2004 dated September 22, 2004 of the Republic of Indonesia regarding the establishment Deposit Insurance Corporation (LPS) to guarantee public funds including funds from other banks in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposit, savings deposits and/or other equivalent form.

Based on LPS regulation No. 1/PLPS/2006 dated March 9, 2006 regarding "Government Guarantee Program on Saving Account", the balance of saving accounts guaranteed for each customer is at a maximum of Rp100 million (full amount).

In accordance with Government Regulation No. 66 of 2008, dated October 13, 2008 regarding "The Amount of Public Savings Guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation", the total amount of customers' saving accounts in banks which is guaranteed by the Government has increased to Rp2 billion (full amount), from the previous Rp100 million (full amount), effective on the date stated above.

LPS interest rates guarantee as of December 31, 2014, 2013, and 2012 were 7.75%, 7.25%, and 5.50%, respectively, for deposits in Rupiah. For deposits in foreign currencies as of December 31, 2014 and 2013 were 1.50%, respectively, while as of December 31, 2012 were 1.00%.

The Bank paid a premium on the guarantee program amounting to Rp203,451, Rp175,419, and Rp134,876, for the years ended December 31, 2014, 2013, and 2012, respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi tersebut dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, kecuali untuk kredit yang diberikan pada para karyawan kunci.

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 2014, 2013 dan 2012:

40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Bank entered into transactions with related parties. Transactions with related parties were conducted under terms and conditions similar to those granted to third parties, with the exception of loans granted to the Bank's key management personnel.

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during 2014, 2013 and 2012:

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia	Efek-efek/ Securities
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Kepemilikan saham mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI/ Ownership of majority shares through the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia	Pinjaman yang diterima dan Obligasi Pemerintah/ Fund borrowings and Government Bonds
PT Adhi Realty	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ Loans and sharia financing/receivables
PT Askindo (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia	Garansi yang diterbitkan/ Guarantees issued
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia	Giro pada bank lain dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali/ Current accounts with other banks and securities sold under repurchase agreements
PT BNI Life Insurance	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia	Garansi yang diterbitkan/ Guarantees issued
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia	Giro pada bank lain dan efek-efek/ Current accounts with other banks and securities

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 2014, 2013 dan 2012 (lanjutan):

40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during 2014, 2013 and 2012 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia	Giro pada bank lain, efek-efek dan simpanan dari bank lain/ Current accounts with other banks, securities and deposits from other banks
PT Bank BRISyariah	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia	Giro pada bank lain dan penempatan pada bank lain / Current accounts with other banks and placements with other banks
PT Bank Syariah Bukopin	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia	Simpanan dari Bank lain/ Deposits from other Banks
PT Bank Syariah Mandiri	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia	Giro pada bank lain dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ Current accounts with other banks and placement with Bank Indonesia and other banks
PT Brantas Abipraya (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ Loans and sharia financing receivables
PT Indosat Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia	Efek-efek/ Securities
PT Indra Karya (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ Loans and sharia financing/receivables
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia	Efek-efek/ Securities
PT Jasaraharja Putera	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia	Garansi yang diterbitkan/ Guarantees issued
PT Nindya Karya (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ Loans and sharia financing/receivables

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 2014, 2013 dan 2012 (lanjutan):

40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties with of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during 2014, 2013 and 2012 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ Loans and sharia financing/receivables
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia	Efek-efek/ Securities
PT Pertamina (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia	Efek-efek/ Securities
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia	Efek-efek/ Securities
PT Sarana Multigriya Finance	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia	Pinjaman yang diterima/ Fund borrowings
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Kepemilikan melalui pemerintah pusat/ Ownership through the Central Government of the Republic of Indonesia	Garansi yang diterbitkan/ Guarantees issued
Manajemen Kunci/ Key Management	Hubungan pengendalian kegiatan perusahaan/ Control on company's activities	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Simpanan dari nasabah/ Loans and sharia financing/receivables and Deposit from customers

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

a. Transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia:

a. Transactions with related parties due to ownership relation with government of the Republic of Indonesia:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
Aset				Assets
Giro pada bank lain (Catatan 6)	31.051	56.572	10.917	Current accounts with other banks (Note 6)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (Catatan 7)		5.000	205.000	Placements with Bank Indonesia and other banks (Note 7)
Efek-efek (Catatan 8)	206.834	85.679	108.404	Securities (Note 8)
Obligasi pemerintah (Catatan 9)	8.238.065	8.384.960	7.468.930	Government bonds (Note 9)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (Catatan 10)	94.420	251.648	99.709	Loans and sharia financing/receivables (Note 10)
Total aset untuk pihak-pihak berelasi	8.570.370	8.783.859	7.892.960	Total assets to related parties
Cadangan kerugian penurunan nilai dari pihak-pihak berelasi	(65)	(891)	(3.244)	Allowance for impairment losses for related parties
Total dari aset pihak-pihak berelasi - neto	8.570.305	8.782.968	7.889.716	Total assets from related parties - net
Persentase total aset pihak berelasi terhadap total aset	5,92%	6,70%	7,06%	Percentage of total assets from related parties to total assets
Liabilitas				Liabilities
Simpanan dari nasabah (Catatan 15, 16 dan 17)	51.273.337	45.047.844	36.098.225	Deposits from customers (Notes 15, 16, and 17)
Simpanan dari bank lain (Catatan 18)	3.299	5.743	37.738	Deposits from other banks (Note 18)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 19)	394.369	-	-	Securities sold under repurchase agreements (Note 19)
Pinjaman yang diterima (Catatan 21)	4.079.030	4.119.413	3.571.646	Fund borrowings (Note 21)
Total liabilitas untuk pihak-pihak berelasi	55.750.035	49.173.000	39.707.609	Total liabilities to related parties
Persentase total liabilitas pihak berelasi terhadap total liabilitas	42,12%	41,11%	39,13%	Percentage of total liabilities from related parties to total liabilities
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember / Year Ended December 31				
	2014	2013	2012	
Pendapatan bunga dan bagi hasil				Interest income and income from profit sharing
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	9.450	21.543	14.990	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	10.476	10.284	2.355	Securities
Obligasi pemerintah	466.517	405.946	306.658	Government bonds
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	19.544	16.215	20.188	Loans and sharia financing/receivables
Total pendapatan bunga dan bagi hasil dari pihak-pihak berelasi	505.987	453.988	344.191	Total interest income and income from profit sharing from related parties
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	3,95%	4,21%	3,90%	Percentage to total interest income and income from profit sharing

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

- a. Transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia (lanjutan):

- a. Transactions with related parties due to ownership relation with government of the Republic of Indonesia (continued):

Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember / Year Ended December 31				
	2014	2013	2012	
Beban bunga dan bonus				Interest and bonus expenses
Simpanan dari nasabah	1.515.247	961.414	716.027	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	-	-	468	Deposits from other banks
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	5.294	-	9.363	Securities sold under repurchase agreements
Pinjaman yang diterima	312.933	289.828	233.202	Fund borrowings
Total beban bunga dan bonus dari pihak berelasi	1.833.474	1.251.242	959.060	Total interest and bonus expenses from related parties
Persentase terhadap total beban bunga dan bonus	24,97%	24,39%	23,44%	Percentage to total interest and bonus expense
	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
Komitmen dan Kontinjensi pada Rekening Administratif				Commitments and contingencies in administrative accounts
Garansi yang diterbitkan (Catatan 23)	82.573	4.972	74.449	Guarantees issued (Note 23)
Persentase terhadap total komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif	2,66%	0,22%	4,53%	Percentage to total commitments and contingencies in administrative accounts

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, Bank telah mengasuransikan aset tetap kepada PT Asuransi Bina Griya (Catatan 11).

As of December 31, 2014, 2013, and 2012, Bank insured certain premises and equipment to PT Asuransi Bina Griya (Note 11).

- b. Transaksi dengan manajemen kunci:

- b. Transactions with key management personnel:

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
Aset				Assets
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah (Catatan 10)	39.903	45.267	34.626	Loan and sharia financing/receivables (Note 10)
Cadangan kerugian Penurunan nilai dari pihak-pihak berelasi	(10)	(32)	(19)	Allowance for impairment losses for related parties
Total kredit yang diberikan Dan piutang/pembiayaan Syariah dari manajemen kunci	39.893	45.235	34.607	Total loan and sharia financing/ receivables from key management personnel
Persentase terhadap total aset	0,03%	0,03%	0,03%	Percentage to total assets

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

b. Transaksi dengan manajemen kunci (lanjutan):

b. Transactions with key management personnel
(continued):

	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012	
Liabilitas				Liabilities
Simpanan dari nasabah (Catatan 15,16 dan 17)	14.116	23.071	28.078	Deposits from customers (Notes 15, 16, and 17)
Kompensasi karyawan kunci (Catatan 37)	146.296	143.945	125.833	Compensation of key employees (Note 37)
Total liabilitas dari manajemen kunci	160.412	167.016	153.911	Total liabilities from key management personnel
Persentase terhadap total liabilitas	0,12%	0,14%	0,15%	Percentage to total liabilities
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember / Year Ended December 31				
	2014	2013	2012	
Pendapatan bunga dan bagi hasil				Interest income and income from profit sharing
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	629	3.519	2.081	Loans and sharia financing/ receivables
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	0,01%	0,03%	0,02%	Percentage to total interest income and income from profit sharing
Beban bunga dan bonus				Interest and bonus expenses
Simpanan dari nasabah	426	650	954	Deposits from customers
Persentase terhadap total beban bunga dan bonus	0,01%	0,01%	0,02%	Percentage to total interest and bonus expense
Beban gaji dan tunjangan:				Salaries and employee benefits:
Direksi (Catatan 1f)	37.869	58.283	49.247	Board of Directors (Note 1f)
Dewan Komisaris (Catatan 1f)	16.721	22.605	19.466	Board of Commissioners (Note 1f)
Karyawan Kunci	74.612	71.197	59.028	Key Employees
Total	129.202	152.085	127.741	Total
Persentase terhadap total beban gaji dan tunjangan karyawan	8,10%	9,43%	8,59%	Percentage to total salaries and employee benefits

c. Kompensasi manajemen kunci:

c. Compensation of key management personnel:

Jumlah agregat dari kompensasi terhadap
manajemen kunci Bank pada 2014, 2013, dan
2012 adalah sebagai berikut:

The aggregate compensation of key
management personnel of the Bank in 2014,
2013, and 2012 follows:

	2014	2013	2012	
Imbalan kerja jangka pendek	129.202	152.085	127.741	Short-term employee benefits
Imbalan pasca kerja	273.752	141.435	124.079	Post employment benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	6.161	2.511	1.754	Other long-term employee benefits
Total	409.115	296.031	253.574	Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Posisi Devisa Neto

Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN laporan posisi keuangan dan secara keseluruhan maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam Rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing.

PDN Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012:

41. ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

Net Open Position

The Net Open Position (NOP) is calculated based on Bank Indonesia Regulation No. 6/20/ PBI/2004 dated July 15, 2004 which was last amended by Bank Indonesia Regulation No. 12/10/PBI/2010 dated July 1, 2010. Based on this regulation, the Bank is required to maintain Net Open Position ratio of the overall statement of financial position at a maximum of 20% of the total capital. The NOP is the sum of the absolute values, which are stated in Rupiah, of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference of the receivables and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each foreign currency.

The Bank's NOP as of December 31, 2014, 2013, and 2012, are as follows:

31 Desember/December 31, 2014			
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position
<u>Laporan posisi keuangan dan</u>			
<u>Rekening administratif</u>			
Dolar Amerika Serikat	809.553	613.964	195.589
Euro Eropa	8.780	467	8.313
Yen Jepang	10.291	326	9.965
Pound Sterling Inggris	-	283	283
Dolar Singapura	48	-	48
			214.198
Modal (Catatan 42)			11.171.458
Rasio PDN			1,92%

Statement of financial position
Administrative accounts
United States Dollar
European Euro
Japanese Yen
Great Britain Poundsterling
Singapore Dollar

Capital (Note 42)

NOP ratio

31 Desember/December 31, 2013			
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position
<u>Laporan posisi keuangan dan</u>			
<u>Rekening administratif</u>			
Dolar Amerika Serikat	142.315	57.642	84.673
Euro Eropa	12.494	1	12.493
Yen Jepang	10.786	-	10.786
Dolar Singapura	-	3.274	3.274
			111.226
Modal (Catatan 42)			10.353.005
Rasio PDN			1,07%

Statement of financial position
Administrative accounts
United States Dollar
European Euro
Japanese Yen
Singapore Dollar

Capital (Note 42)

NOP ratio

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

PDN Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 (lanjutan):

31 Desember/December 31, 2012			
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position
<u>Laporan posisi keuangan dan</u>			
<u>Rekening administratif</u>			
Dolar Amerika Serikat	76.520	48.500	28.020
Euro Eropa	28.388	17	28.371
Yen Jepang	9.529	-	9.529
			65.920
Modal (Catatan 42)			9.433.162
Rasio PDN			0,70%

Statement of financial position
Administrative accounts
United States Dollar
European Euro
Japanese Yen

Capital (Note 42)

NOP ratio

42. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Bank secara aktif mengelola modalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat Bank dapat menjaga kecukupan modalnya untuk menutup risiko bawaan (inherent risk) pada kegiatan perbankan tanpa mengurangi optimalisasi nilai pemegang saham.

CAR adalah rasio modal terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), perhitungannya didasarkan pada peringkat profil risiko Bank Umum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 dimana jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Selain itu bank dengan kriteria tertentu harus memasukkan risiko pasar dan risiko operasional dalam perhitungan CAR dengan memasukkan komponen modal pelengkap tambahan.

Pada tanggal 31 Desember 2012, Bank belum menerapkan PBI No.14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum berdasarkan Peringkat Profil Risiko, yang merupakan perubahan dari PBI No. 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008, karena peraturan tersebut baru efektif diterapkan pertama kali untuk pelaporan posisi bulan Maret 2013 dengan menggunakan profil risiko bulan Desember 2012.

41. ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

The Bank's NOP as of December 31, 2014, 2013, and 2012, are as follows (continued):

42. MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR)

Bank actively manages its capital in accordance with the regulatory requirements. The primary objective of which is to ensure that Bank, at all times, maintains adequate capital to cover inherent risks to its banking activities without prejudice to optimizing shareholder's value.

CAR is the ratio of capital to Risk Weighted Assets (RWA), the computation is based on Bank Indonesia Regulation PBI No.14/18/PBI/2012 dated November 28, 2012, whereby the total capital for credit risk consists of core capital and supplementary capital. Banks which meet certain criteria have to consider market and operational risk in the computation of CAR by including additional supplementary capital component.

On December 31, 2012 Bank has not implemented PBI No.14/18/PBI/2012 dated November 28, 2012 on Minimum Capital Reserve for General Bank based on Risk Profile Rating, which is the amendment to PBI No.10/15/2008 dated September 24, 2008, as the aforementioned regulation is initially effective March 2013 reporting position by using December 2012 risk profile.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (lanjutan)

Sejak tanggal 1 Januari 2014, Bank telah menerapkan PBI No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum pasal 11 ayat 2 terkait ketentuan penyediaan modal inti paling rendah sebesar 6% dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi.

Berdasarkan profil risiko Bank masing-masing per 30 Juni 2014 dan 2013, yaitu *satisfactory* dan *fair*, maka CAR minimum per 31 Desember 2014 dan 2013 ditetapkan masing-masing sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10% dan 10% sampai dengan kurang 11%. Sedangkan CAR minimum per 31 Desember 2012 ditetapkan sebesar 8% sesuai PBI No. 10/15/PBI/2008.

Selama periode 2014, 2013 dan 2012, Bank telah memenuhi rasio sesuai yang disyaratkan BI untuk rasio kecukupan modal.

Perhitungan CAR Bank pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 adalah sebagai berikut:

		31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
Modal Inti	a	10.735.782	9.878.541	9.038.283
Modal Pelengkap (Maksimal 100% dari Modal Inti)	b	435.676	474.464	394.879
Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko Pasar	c	-	-	-
Jumlah Modal Inti dan Modal Pelengkap	d=a+b	11.171.458	10.353.005	9.433.162
Jumlah Modal Inti, Modal Pelengkap dan Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko Pasar	e=c+d	11.171.458	10.353.005	9.433.162
Penyertaan	f	-	-	-
Jumlah Modal untuk Risiko Kredit	g=d-f	11.171.458	10.353.005	9.433.162
Jumlah Modal untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar	h=e-f	11.171.458	10.353.005	9.433.162
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit	i	66.250.928	57.748.566	46.581.762
ATMR untuk Risiko Pasar	j	226.010	283.944	182.400
ATMR untuk risiko operasional	k	9.855.703	8.229.190	6.557.227
Jumlah ATMR untuk Risiko Kredit dan Risiko operasional	l=i+k	76.106.631	65.977.756	53.138.989
Jumlah ATMR untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar	m=i+j+k	76.332.641	66.261.700	53.321.389

42. MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) (continued)

Since January 1, 2014, Bank has implement the Bank Indonesia Regulation No. 15/12/PBI/2013 about Minimum Capital Requirement for Banks article 11 paragraph 2 related to minimal core capital of 6% from RWA, both individually and on consolidated basis.

Based on the Bank's risk profile as of June 30, 2014 and 2013, which is *satisfactory* and *fair*, the minimum CAR as of December 31, 2014 and 2013 is set at 9% to less than 10% and at 10% to less than 11%, respectively. While minimum CAR as of December 31, 2012 is set at 8% according to PBI No. 10/15/PBI/2008.

During the year ended December 31, 2014, 2013 and 2012, Bank has complied with the BI required capital adequacy ratio.

The computation of the Bank's CAR as of December 31, 2014, 2013, and 2012, follows:

Core Capital Supplementary Capital (Maximum of 100% of Core Capital)
Additional Supplementary Capital Allocated for Anticipation of Market Risk
Total Core Capital and Supplementary Capital
Total Core Capital, Supplementary Capital and Additional Supplementary Capital Allocated for Anticipation of Market Risk Investment
Total Capital for Credit Risk
Total Capital for Credit Risk and Market Risk
Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk
Risk Weighted Assets (RWA) for Market Risk
Risk Weighted Assets (RWA) for Operational Risk
Total Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk and Operational Risk (RWA) for Credit Risk, Operational Risk and Market Risk

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (lanjutan)

		31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
CAR untuk Risiko Kredit dan Risiko Operasional	n=g/l	14,68%	15,69%	17,75%
CAR untuk Risiko Kredit Risiko Operasional dan Risiko Pasar	o=h/m	14,64%	15,62%	17,69%
CAR Minimum yang Diwajibkan		9%	10%	8%

CAR for Credit Risk and Operational Risk
CAR for Credit Risk, Operational Risk and Market Risk
Minimum CAR

43. MANAJEMEN RISIKO

Bank portofolio asetnya didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis eksternal seperti inflasi dan tingkat BI rate. Upaya meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan dengan pengelolaan risiko secara *day to day risk management activities*, dengan berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan seluruh proses dan mekanisme yang terjadi dalam mencapai tujuan perusahaan, mencegah perusahaan dari penyimpangan dan risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan, serta berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, Bank telah mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach* sesuai dengan SE BI No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar. Selain dari itu Bank juga telah melakukan perhitungan kebutuhan modal minimum dengan menggunakan *Basic Indicator Approach* untuk risiko operasional sesuai dengan SE BI No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional. Penggunaan Pendekatan Indikator Dasar (PID) dan *Standardized Model* untuk risiko pasar sesuai dengan SE BI No.9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar, sebagaimana telah diubah dengan SE BI No. 14/21/DPNP tanggal 18 Juli 2012.

42. MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) (continued)

43. RISK MANAGEMENT

The bulk of the Bank's loan portfolio consists of mortgage loans (KPR) that are affected by changes in the external business environment such as inflation and the BI rate. Efforts to minimize the negative impact is being done through risk management activities on a daily basis, with the principles of Good Corporate Governance (GCG) as the basis to ensure that all the processes and mechanisms in connection to achieve the Bank's objectives, to prevent the bank from deviations and risks that can lead to failure in achieving corporate objectives. The principle of prudence is the basis of risk management activities to ensure the healthy growth of the Bank's performance and sustainability.

As a follow up to the implementation of Pillar 1 of Basel II, the Bank has implemented a credit risk measurement using the Standardized Approach in accordance with SE BI No.13/6/DPNP dated February 18, 2011 regarding the Guidelines for Calculation of Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk by Using Standardized Approach. Apart from that, the Bank has been doing the calculation of minimum capital requirements using the Basic Indicator Approach for operational risk in accordance with SE BI No. 11/3/DPNP dated January 27, 2009 regarding the calculation of risk weighted assets (RWA) for Operational Risk. The use of Basic Indicator Approach (BIA) and the Standardized Model for market risk are in accordance with SE BI No. 9/33/DPNP dated December 18, 2007 regarding the Guidelines for the Use of Standardized Method in the Calculation of Capital Adequacy Ratio on Market Risk for Commercial Banks, which was changed with SE BI No. 14/21/DPNP dated July 18, 2012.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Guna melengkapi pengukuran risiko khususnya risiko pasar dan risiko likuiditas, bank melakukan *stress test* dengan *worst case scenario* sebagaimana diatur dalam Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) yaitu minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk risiko kredit dan setiap triwulan untuk risiko likuiditas. Selain melakukan *scenario analysis* terhadap aktivitas bank secara keseluruhan, bank juga melakukan *scenario analysis* terhadap aktivitas tertentu, khususnya aktivitas baru, yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko suku bunga. Saat ini, *stress test* yang dilakukan oleh bank difokuskan pada 3 (tiga) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar (termasuk di dalamnya risiko suku bunga) dan risiko likuiditas.

Bank melakukan *stress testing* secara berkala untuk menilai kecukupan modal dalam hal terjadinya kejadian-kejadian risiko yang bersifat ekstrim atau *catastrophy*. Bank juga telah melakukan kaji ulang terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) guna meningkatkan fungsi *risk control system* minimal 1 (satu) tahun sekali. Untuk selanjutnya, berkaitan dengan rencana implementasi Basel III Bank telah melakukan persiapan penerapan kerangka kerja Basel III dan terlibat di dalam *working group* masing-masing jenis risiko di bawah koordinasi Otoritas Jasa Keuangan.

Struktur Manajemen Risiko

Tata kelola risiko Bank yang berlandaskan prinsip GCG terwujud dari terlibatnya seluruh organ Bank dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Bank. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank. Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Bank melalui Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

43. RISK MANAGEMENT (continued)

In measuring risks, particularly market risk and liquidity risk, the Bank conducts stress testing using worst case scenario as set forth in the Risk Management Policy Manual (RMPM), which is being carried out at least once a year for credit risk and quarterly for liquidity risk. In addition to scenario analysis of the Bank's activities as a whole, the Bank also performs scenario analysis on specific activities, especially new activity, which could potentially increase the interest rate risk exposure. Currently, the stress tests conducted by the Bank is focused on 3 (three) types of risks, namely, credit risk, market risk (including interest rate risk) and liquidity risk.

The Bank conducts periodic stress testing to assess capital adequacy in anticipation of the occurrence of risk events that are extreme or catastrophic. The Bank also conducts a review of the RMPM at least once a year in order to improve the function of the risk control system. Henceforth, with regard to the implementation of Basel III, the Bank has a plan to implement the Basel III framework by involving in each types of risk working group in coordination with the Financial Services Authority.

Risk Management Structure

The Bank's risk governance, which is based on the principles of GCG, involves the entire Bank in managing risks. This can be seen in the composition of the Bank's risk management organizational structure. The Board of Commissioners (BOC) and Board of Directors (BOD) are responsible for ensuring the proper implementation of risk management in accordance to the characteristics, complexity and risk profile of the Bank. The BOC and BOD play an active role in the risk management process in order to mitigate the risk of the Bank through Quality of Risk Management Implementation which covers risk governance, risk management framework, risk management process, the adequacy of human resources and risk management information systems, as well as the adequacy of risk management systems.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Struktur Manajemen Risiko (lanjutan)

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) berperan aktif dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. KMR terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Selain itu apabila dipandang perlu KMR dapat melakukan evaluasi terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR).

Risk Management Division (RMD) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) pada Bank, dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada *Risk, Compliance & Strategic Director*. Struktur organisasi *Risk Management Division* terdiri dari *Market Risk Management Department*, *Credit Risk Management Department*, *Operational Risk Management Department* dan *Risk Officer Coordination Department*.

Market Risk Management Department berfungsi untuk melakukan pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas. Fungsi *Credit Risk Management Department* melakukan pengelolaan Risiko Kredit sedangkan *Operational Risk Management Department* berfungsi mengelola Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategik, Risiko Reputasi dan Risiko Hukum. Setiap *Departement Head* dibantu oleh Unit *Policy & Procedure* dan Unit *Assessment & Measurement*.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Risk Officer Coordination (ROC) bertanggung jawab melakukan koordinasi dan supervisi terhadap *Risk Officer* dalam melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko di Bank. Dalam menjalankan fungsi pemantauan risiko, ROC dibantu oleh *Risk Superintendent (RS)* pada tingkat Divisi, *Regional Risk Superintendent (RRS)* pada tingkat Kantor Wilayah dan *Branch Risk Officer (BRO)* di Kantor Cabang di bawah koordinasi *Risk Officer Coordination (ROC)* yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala *Risk Management Division (RMD)*.

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Management Structure (continued)

Risk Management Committee

The Bank's Risk Management Committee (RMC) is actively involved in providing advice on the inherent risks associated to new policies to be established by the BOD and providing evaluation to the regulations that are considered to be outdated and require updating. The RMC is also actively involved in conducting risk measurement of the risks associated to new products and/or services to enable the Bank to take the necessary mitigating actions. The RMC may evaluate the RMPM, if necessary.

Risk Management Division (RMD) is a Risk Management Working Unit (RMWU) at the Bank, led by a Division Head that is responsible directly to the Risk, Compliance & Strategic Director. The organizational structure of the RMD consists of the Market Risk Management Department, Credit Risk Management Department, Operational Risk Management Department and Risk Officer Coordination Department.

Market Risk Management Department is responsible for managing market risk and liquidity risk. Credit Risk Management Department is responsible for credit risk management, while Operational Risk Management Department is responsible for managing operational risk, compliance risk, strategic risk, reputational risk and legal risk. The Department Head is assisted by Policy & Procedure Unit and Assessment & Measurement Unit.

Risk Management Division

Risk Officer Coordination (ROC) has a responsibility in coordinating and supervising the Risk Officer during monitoring the implementation of risk management in the Bank. In performing risk monitoring functions, ROC assisted by the Risk Superintendent (RS) at the Division level, the Regional Risk Superintendent (RRS) at the level of the Regional Office and Branch Risk Officer (BRO) in the Branch Office under the coordination of Risk Coordination Officer (ROC) which is directly responsible to the Head of Risk Management Division (RMD).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Struktur Manajemen Risiko (lanjutan)

Satuan Kerja Manajemen Risiko (lanjutan)

RS dan RRS merupakan pejabat yang bertanggung jawab langsung pada ROC dan bertugas melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko di Divisi dan Kantor Wilayah (Regional Office) dengan melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan merekomendasikan pengendalian risiko kepada Divisi dan Kantor Wilayah dimana RS dan RSS bertugas. BRO adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada ROC dan bertugas melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko di Kantor Cabang dengan melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan merekomendasikan pengendalian risiko kepada Kantor Cabang dimana BRO bertugas.

Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Manajemen Risiko

Bank telah memiliki panduan kebijakan di bidang manajemen risiko yaitu Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) di mana di dalamnya telah mencakup ketentuan-ketentuan minimal yang disyaratkan di dalam Peraturan Bank Indonesia. Pengkajian ulang terhadap kebijakan internal juga dilakukan agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

Sistem informasi manajemen risiko pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan *database* risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem teknologi informasi secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu.

Profil Risiko

Sesuai PBI No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, RMD menyampaikan laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan per triwulan yang memuat tentang eksposur risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategis. Selanjutnya berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 dan SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, meliputi penilaian faktor profil risiko yang meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional Bank.

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Management Structure (continued)

Risk Management Division (continued)

RS and RRS is directly responsible to the ROC and is responsible for the monitoring of the implementation of risk management in the Division and Regional Office, including the process of identification, measurement, monitoring and recommending risk controls to the Division and Regional office where the RS and RSS is assigned. The BRO is also directly responsible to the ROC and is responsible for the monitoring of the implementation of risk management at branch offices, including the process of identification, measurement, monitoring and recommending risk controls to the branch office where the BRO is assigned.

Risk Management Policies and Procedures

The Bank's risk management policies are formalized in the RMPM. RMPM sets out the minimum requirements based on Bank Indonesia regulations. A regular review is conducted on internal policies to comply with the prevailing regulations from regulatory bodies. Gap analysis are performed and best practices are applied to enhance the quality of the risk management implementation.

The Bank also performs risk management on information systems which focuses on risk database collection and improvement. The data is gradually developed and applied in the information technology system so that risk measurement and monitoring can be integrated into the Bank's risk management on a timely basis.

Risk Profile

In accordance with PBI No.11/25/PBI/2009 dated July 1, 2009 regarding the Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 on Risk Management for Commercial Banks, RMD submits on a quarterly basis a risk profile report to the Financial Services Authority, which contains exposure to credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputational risk and strategic risk. Furthermore, based on PBI No. 13/1/PBI/2011 dated January 5, 2011 and SE BI No. 13/24/DPNP dated October 25, 2011 regarding a Bank's health level, the assessment of the risk profile will cover the inherent risk and quality of risk management implementation through the operational activities of the Bank.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil Risiko (lanjutan)

Secara umum risiko komposit profil risiko Bank triwulan IV tahun 2014 berada pada peringkat *low to moderate*, yang tercermin dari tingkat risiko inheren *moderate* dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko dengan peringkat *satisfactory*. Risiko Inheren meliputi strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri dimana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Risiko Kredit

Pengelolaan risiko kredit merupakan bagian dari pengelolaan manajemen risiko secara keseluruhan, yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dimana Risiko Kredit merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban mereka kepada Bank.

Bank secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko serta Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan

Eksposur Risiko Kredit dipantau sejak proses pemberian kredit sampai dengan jatuh tempo kredit. Pemantauan risiko diantaranya adalah memastikan kepatuhan dengan persyaratan kredit, kecukupan agunan dan penanganan kredit bermasalah.

Pemantauan risiko secara reguler dilakukan oleh RMD, RS, RRS dan BRO untuk memastikan bahwa unit kerja melakukan kegiatan kredit secara konsisten menerapkan ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh Bank.

Langkah strategis lainnya dalam penerapan manajemen risiko kredit Bank adalah dengan melakukan penyebaran risiko kredit dan pengendalian konsentrasi kredit dengan meningkatkan portofolio kredit maupun pembiayaan di luar sektor perumahan (non-housing related).

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Profile (continued)

In general, the Bank's composite risk profile during the fourth quarter of 2014 is low to moderate, which is reflected in the moderate inherent risk level and satisfactory level of quality of risk management implementation. Inherent risks include business strategy, business characteristics, complexity of products and activities of the Bank, the industry in which the Bank conducts business, as well as macroeconomic conditions. The quality of risk management implementation covers risk governance, risk management framework, risk management process, the adequacy of human resources and risk management information systems, as well as the adequacy of the risk management system.

Credit Risk

Credit risk management is part of the overall risk management, which is defined in Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/25/PBI/2009 dated July 1, 2009 regarding the Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 regarding Risk Management Implementation for Commercial Banks, as the risk arising from the failure of debtors and/or other parties to fulfill their obligations to the Bank.

The Bank regularly reviews and updates the RMPM Guidelines as well as the Credit and Financing Manual Policy.

Credit risk exposure is monitored from the credit granting process until the maturity of the credit. Credit risk monitoring includes, among others, ensuring compliance with the terms of the loan, adequacy of collateral and handling of non-performing loans.

Regular risk monitoring is undertaken by RMD, RS, RRS, and BRO to ensure that the business units carrying out credit activities are consistently implementing regulation and Standard Operating Procedures (SOP) based on the limits set by the Bank.

Another strategic step in the implementation of the Bank's credit risk management is to distribute credit risk and minimize credit concentration by increasing the loan portfolio as well as financing non-housing related sectors.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- (i) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya:

Nilai tercatat dari aset keuangan Bank selain kredit yang diberikan menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.

Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminan sesuai skema kredit dan perkiraan tingkat risiko kredit dari *counterparty* sebagai *second way out* yang ditetapkan. Jenis dari agunan terdiri dari:

- a) *Physical collateral*, berupa tanah dan bangunan.
- b) *Financial collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro dan deposito), surat berharga, dan lain-lain.
- c) Lainnya berupa garansi, lembaga penjamin, dan lain-lain.

Pemberian kredit yang dilaksanakan oleh Bank diatur dalam kebijakan dan prosedur perkreditan dimana untuk setiap jenis atau skema kredit telah ditentukan agunan minimal yang harus dipenuhi.

Untuk segmen kredit komersial yang umumnya merupakan kredit jasa griya, sesuai ketentuan perkreditan wajib dijamin oleh agunan yang memadai. Agunan dapat berupa *physical collateral*, *financial collateral* atau lainnya berupa tagihan usaha atau garansi. Untuk seluruh agunan khususnya *physical collateral* akan dilakukan retaksasi dimana nilai likuidasi atas agunan tersebut yang akan dipergunakan dalam menentukan kecukupan nilai agunan (coverage ratio).

Selain aspek agunan untuk meminimalkan risiko kredit, pemberian kredit oleh Bank selalu dilakukan berdasarkan evaluasi dan analisa kelayakan sehingga kemampuan pengembalian kredit (*first way out*) dapat dipastikan.

Adanya keharusan bagi debitur untuk memenuhi agunan yang dipersyaratkan, evaluasi atas kelayakan kredit, pengikatan kredit secara legal dan prosedur *pre screening* akan menurunkan *credit risk* eksposur Bank ke tingkat yang layak dan dapat diterima.

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

- (i) Analysis on maximum exposures against credit risks considering the impact of collateral and other credit risks mitigation:

The carrying value of the Bank's financial assets other than loans represents its maximum exposure to credit risk.

The Bank determined the type and value of collateral according to the loan scheme as well as estimated credit risk level from the counterparty as a determined second way out. The types of collateral are as follows:

- a) *Physical collateral*, such as land and buildings.
- b) *Financial collateral*, such as third party funds (saving deposits, demand deposits and time deposits), securities, etc.
- c) Others, such as guarantees, guarantee institution, etc.

The loan granting conducted by the Bank is stipulated in the loan policy and procedure in which every loan type or scheme has minimum determinable collaterals that should be fulfilled.

For commercial loans segment which generally represent griya loan, according to the loan policy has to be collateralized adequately. The collaterals can be physical collateral, financial collateral or others such as accounts receivable or guarantees. All collaterals particularly for physical collateral will be assessed in which the collateral's liquidation value will be use in determining the coverage ratio.

In addition collateral aspect to minimize credit risk, loan granting is conducted based on evaluation and feasibility analysis so that the loan repayment ability (*first way out*) can be ascertained.

The necessity for debtors to comply with collaterals requirement, loan feasibility evaluation, notarial agreement and pre screening procedures will decrease the Bank's credit risk exposure to the acceptable level.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- (ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

a) Sektor geografis

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat, yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012. Untuk tabel ini, Bank telah mengalokasikan eksposur area berdasarkan wilayah geografis tempat mereka beroperasi.

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

- (ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure

a) Geographical sectors

The following tables provide details of the Bank's credit exposures at their carrying amounts, as categorized by geographical region as of December 31, 2014, 2013, and 2012. For these tables, the Bank has allocated exposures to the regions based on the geographical area where activities are undertaken.

31 Desember/December 31, 2014							
	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others**)	Total	
Giro pada							Current accounts with
Bank Indonesia	9.371.509	-	-	-	-	9.371.509	Bank Indonesia
Giro pada bank lain	1.091.705	72	2.867	255	65	1.094.964	Current accounts with other banks
Penempatan pada							Placements with
Bank Indonesia dan							Bank Indonesia and
bank lain	1.496.455	-	-	-	-	1.496.455	other banks
Efek-efek	5.446.372	-	-	-	-	5.446.372	Securities
Obligasi Pemerintah	8.238.065	-	-	-	-	8.238.065	Government bonds
Kredit yang diberikan							
dan piutang/pembiayaan							Loans and sharia financing/ receivables
syariah							Consumer
Konsumer							
Pemilikan rumah	-	34.027.786	21.078.271	12.154.164	13.310.585	80.570.806	Housing loan
Non-kepemilikan rumah	-	2.839.898	3.389.806	1.382.802	2.317.229	9.929.735	Non-housing loan
Modal kerja	-	9.768.807	4.862.718	2.764.057	3.090.062	20.485.644	Working capital
Investasi	-	1.826.442	1.279.860	405.170	795.041	4.306.513	Investment
Sindikasi	-	76.978	-	-	-	76.978	Syndicated
Direksi dan karyawan	-	271.838	142.726	68.860	62.701	546.125	Directors and employees
Bunga yang masih							
akan diterima	95.008	450.108	279.372	163.464	195.537	1.183.489	Interest receivable
Aset lain-lain*)	540.829	3.935	15.947	2.092	2.902	565.705	Other assets*)
Total kotor	26.279.943	49.265.864	31.051.567	16.940.864	19.774.122	143.312.360	Total gross
Cadangan kerugian							Allowances for
penurunan nilai						(1.587.548)	impairment losses
Neto						141.724.812	Net

31 Desember/December 31, 2013							
	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others**)	Total	
Giro pada							Current accounts with
Bank Indonesia	9.858.758	-	-	-	-	9.858.758	Bank Indonesia
Giro pada bank lain	396.117	72	5.950	286	98	402.523	Current accounts with other banks
Penempatan pada							Placements with
Bank Indonesia dan							Bank Indonesia and
bank lain	4.834.318	-	5.000	-	-	4.839.318	other banks
Efek-efek	4.210.440	-	-	-	-	4.210.440	Securities
Obligasi Pemerintah	8.384.960	-	-	-	-	8.384.960	Government bonds
Kredit yang diberikan							
dan piutang/							Loans and sharia financing/ receivables (continued)
pembiayaan							Consumer
syariah (lanjutan)							
Konsumer							
Pemilikan rumah	-	29.321.756	17.516.646	10.437.204	11.294.238	68.569.844	Housing loan
Non-kepemilikan rumah	-	2.202.957	3.033.328	1.307.422	2.089.290	8.632.997	Non-housing loan

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

a) Sektor geografis (lanjutan)

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

a) Geographical sectors (continued)

31 Desember/December 31, 2013							
	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others**)	Total	
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah (lanjutan)							Loans and sharia financing/receivables (continued)
Modal kerja	-	7.916.096	4.880.676	2.609.707	3.212.893	18.619.372	Working capital
Investasi	-	1.577.866	1.180.028	444.363	799.337	4.001.594	Investment
Sindikasi	-	62.712	-	-	-	62.712	Syndicated
Direksi dan karyawan	-	288.847	155.894	70.439	65.692	580.872	Directors and employees
Bunga yang masih akan diterima	75.485	337.216	216.456	135.682	158.849	923.688	Interest receivable
Aset lain-lain*)	324.568	4.211	20.075	4.164	2.924	355.942	Other assets*)
Total kotor	28.084.646	41.711.733	27.014.053	15.009.267	17.623.321	129.443.020	Total gross
Cadangan kerugian penurunan nilai						(1.148.293)	Allowances for impairment losses
Neto						128.294.727	Net

31 Desember/December 31, 2012							
	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others**)	Total	
Giro pada Bank Indonesia	7.297.835	-	-	-	-	7.297.835	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	156.965	72	5.529	428	749	163.743	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11.467.346	-	5.000	-	-	11.472.346	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	1.022.565	-	-	-	-	1.022.565	Securities
Obligasi Pemerintah	7.468.930	-	-	-	-	7.468.930	Government bonds
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah							Loans and sharia financing/receivables
Konsumer							Consumer
Pemilikan rumah	-	23.701.204	13.380.569	8.946.797	9.144.572	55.173.142	Housing loan
Non-kepemilikan rumah	-	1.671.583	2.590.076	1.178.745	1.788.922	7.229.326	Non-housing loan
Modal kerja	-	6.192.203	4.220.832	2.213.219	2.757.143	15.383.397	Working capital
Investasi	-	1.220.579	913.031	402.092	750.645	3.286.347	Investment
Sindikasi	-	28.047	-	-	-	28.047	Syndicated
Direksi dan karyawan	-	152.569	91.911	36.063	29.961	310.504	Directors and employees
Bunga yang masih akan diterima	57.870	371.659	178.187	132.488	131.781	871.985	Interest receivable
Aset lain-lain*)	340.804	3.559	19.777	3.682	2.642	370.464	Other assets*)
Total kotor	27.812.315	33.341.475	21.404.912	12.913.514	14.606.415	110.078.631	Total gross
Cadangan kerugian penurunan nilai						(997.283)	Allowances for impairment losses
Neto						109.081.348	Net

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga
 **) Lain-lain terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua.

*) Consists of third party receivables
 **) Others consists of Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku and Papua.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

a) Sektor geografis (lanjutan)

Eksposur risiko kredit atas rekening administratif pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 adalah sebagai berikut:

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

a) Geographical sectors (continued)

Credit risk exposure related to administrative accounts as of December 31, 2014, 2013, and 2012, are as follows:

31 Desember/December 31, 2014						
	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others*)	Total
Fasilitas kredit yang belum ditarik **)	-	951.199	496.952	177.714	118.030	1.743.895
Garansi yang diterbitkan	-	1.158.851	69.134	17.387	109.480	1.354.852
Total	-	2.110.050	566.086	195.101	227.510	3.098.747
31 Desember/December 31, 2013						
	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others*)	Total
Fasilitas kredit yang belum ditarik **)	-	941.038	411.865	200.361	138.791	1.692.055
Garansi yang diterbitkan	-	451.175	59.747	15.849	25.940	552.711
Total	-	1.392.213	471.612	216.210	164.731	2.244.766
31 Desember/December 31, 2012						
	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others*)	Total
Fasilitas kredit yang belum ditarik **)	-	787.462	210.697	121.206	101.159	1.220.524
Garansi yang diterbitkan	-	330.477	50.507	26.579	14.181	421.744
Total	-	1.117.939	261.204	147.785	115.340	1.642.268

*) Lain-lain Terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua
 **) Hanya fasilitas kredit komitmen yang belum ditarik

*) Others consists of Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku and Papua
 **) Only for committed unused loan facility

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- (ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012:

31 Desember/December 31, 2014							
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies**)	Perseorangan/ Individuals	Total	
Giro pada Bank Indonesia	9.371.509	-	-	-	-	9.371.509	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	1.094.964	-	-	-	1.094.964	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.496.455	-	-	-	-	1.496.455	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	4.753.834	135.464	468.901	88.173	-	5.446.372	Securities
Obligasi Pemerintah	8.238.065	-	-	-	-	8.238.065	Government bonds
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	-	33.533	569.576	21.293.880	94.018.812	115.915.801	Loans and sharia financing/receivables
Bunga yang masih akan diterima	78.976	1.308	13.494	125.786	963.925	1.183.489	Interest receivable
Aset lain-lain*)	14.592	231.376	-	152.586	167.151	565.705	Other assets*)
Total kotor	23.953.431	1.496.645	1.051.971	21.660.425	95.149.888	143.312.360	Total gross
Cadangan kerugian penurunan nilai						(1.587.548)	Allowances for impairment losses
Neto						141.724.812	Net

31 Desember/December 31, 2013							
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies**)	Perseorangan/ Individuals	Total	
Giro pada Bank Indonesia	9.858.758	-	-	-	-	9.858.758	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	402.523	-	-	-	402.523	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4.834.318	5.000	-	-	-	4.839.318	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	3.747.643	9.988	360.112	92.697	-	4.210.440	Securities
Obligasi Pemerintah	8.384.960	-	-	-	-	8.384.960	Government bonds
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	-	42.051	742.708	18.001.315	81.681.317	100.467.391	Loans and sharia financing/receivables
Bunga yang masih akan diterima	67.690	63	8.025	66.411	781.499	923.688	Interest receivable
Aset lain-lain*)	16.486	91.384	-	155.652	92.420	355.942	Other assets*)
Total kotor	26.909.855	551.009	1.110.845	18.316.075	82.555.236	129.443.020	Total gross
Cadangan kerugian penurunan nilai						(1.148.293)	Allowances for impairment losses
Neto						128.294.727	Net

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri (lanjutan)

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Industry sectors (continued)

	31 Desember/December 31, 2012						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies**)	Perseorangan/ Individuals	Total	
Giro pada Bank Indonesia	7.297.835	-	-	-	-	7.297.835	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	163.743	-	-	-	163.743	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	10.867.346	605.000	-	-	-	11.472.346	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	667.503	5.015	209.625	140.422	-	1.022.565	Securities
Obligasi Pemerintah	7.468.930	-	-	-	-	7.468.930	Government bonds
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	1.318	34.942	269.556	15.042.213	66.062.734	81.410.763	Loans and sharia financing/receivables
Bunga yang masih akan diterima	-	41	746	67.176	804.022	871.985	Interest receivable
Aset lain-lain*)	17.910	68.513	-	234.153	49.888	370.464	Other assets*)
Total kotor	26.320.842	877.254	479.927	15.483.964	66.916.644	110.078.631	Total gross
Cadangan kerugian penurunan nilai						(997.283)	Allowances for impairment losses
Neto						109.081.348	Net

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga.

**) Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, pergudangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.

*) Consists of third party receivables.

**) Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.

Eksposur risiko kredit yang terkait dengan unsur rekening administratif pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 adalah sebagai berikut:

Credit risk exposure relating to administrative account items as of December 31, 2014, 2013, and 2012, are as follows :

	31 Desember/December 31, 2014						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies*)	Perseorangan/ Individuals	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik **)	-	-	388	1.617.652	125.855	1.743.895	Unused loan facilities **)
Garansi yang diterbitkan	-	-	-	1.354.852	-	1.354.852	Guarantees issued
Total	-	-	388	2.972.504	125.855	3.098.747	Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri (lanjutan)

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Industry sectors (continued)

31 Desember/December 31, 2013

	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies*)	Perseorangan/ Individuals	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik **)	-	-	627	1.558.300	133.128	1.692.055	Unused loan facilities **)
Garansi yang diterbitkan	-	-	-	552.711	-	552.711	Guarantees issued
Total	-	-	627	2.111.011	133.128	2.244.766	Total

31 Desember/December 31, 2012

	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies*)	Perseorangan/ Individuals	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik **)	-	-	19.357	1.092.851	108.316	1.220.524	Unused loan facilities **)
Garansi yang diterbitkan	-	-	-	421.744	-	421.744	Guarantees issued
Total	-	-	19.357	1.514.595	108.316	1.642.268	Total

*) Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, perdagangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.
 **) Hanya fasilitas kredit komitmen yang belum ditarik

*) Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.
 **) Only for committed unused loan facility

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai

(iii) Information about impaired and not impaired financial assets

1. Giro pada Bank Lain

1. Current Accounts with Other Banks

31 Desember/December 31, 2014

	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not Impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total	
Rupiah	768.435	-	768.435	Rupiah
Mata Uang Asing	324.958	1.571	326.529	Foreign currencies
Total	1.093.393	1.571	1.094.964	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai			(1.571)	Allowance for impairment losses
Neto			1.093.393	Net

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan)

1. Giro pada Bank Lain (lanjutan)

	31 Desember/December 31, 2013		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not Impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total
Rupiah	304.172	-	304.172
Mata Uang Asing	96.050	2.301	98.351
Total	400.222	2.301	402.523
Cadangan kerugian penurunan nilai			(2.308)
Neto			400.215

	31 Desember/December 31, 2012		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not Impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total
Rupiah	54.332	-	54.332
Mata Uang Asing	107.663	1.748	109.411
Total	161.995	1.748	163.743
Cadangan kerugian penurunan nilai			(1.750)
Neto			161.993

2. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif, kecuali untuk Unit Usaha Syariah pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang mengalami penurunan nilai sesuai ketentuan Bank Indonesia masing-masing sebesar Rp50 dan Rp6.050.

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iii) Information about impaired and not impaired financial assets (continued)

1. Current Accounts with Other Banks (continued)

Rupiah	
Foreign currencies	
Total	
Allowance for impairment losses	
Net	

2. Placements with Bank Indonesia and other banks

As of December 31, 2014, 2013, and 2012, these financial assets are not impaired individually as well as collectively, except for Sharia Business Unit as of December 31, 2013 and 2012 which are impaired according to Bank Indonesia regulations amounted to Rp50 and Rp6,050, respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan)

3. Efek-efek

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iii) Information about impaired and not impaired financial assets (continued)

3. Securities

31 Desember/December 31, 2014				
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not Impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total	
Sertifikat Bank Indonesia	2.250.227	-	2.250.227	Certificates of Bank Indonesia
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	2.503.607	-	2.503.607	Deposits Certificates of Bank Indonesia
Obligasi	162.010	7.018	169.028	Bonds
Medium term notes	50.000	-	50.000	Medium term notes
Negotiable certificate of deposits	24.672	-	24.672	Negotiable certificate of deposits
Reksadana	82.321	-	82.321	Mutual Fund
Efek Beragunan Aset	366.517	-	366.517	Residential Mortgage-Backed Securities
Total	5.439.354	7.018	5.446.372	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai			(9.402)	Allowance for impairment losses
Neto			5.436.970	Net

31 Desember/December 31, 2013				
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not Impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total	
Sertifikat Bank Indonesia	3.747.643	-	3.747.643	Certificates of Bank Indonesia
Obligasi	125.552	7.018	132.570	Bonds
Efek Beragunan Aset	249.213	-	249.213	Residential Mortgage-Backed Securities
Reksadana	81.014	-	81.014	Mutual Fund
Total	4.203.422	7.018	4.210.440	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai			(8.758)	Allowance for impairment losses
Neto			4.201.682	Net

31 Desember/December 31, 2012				
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not Impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total	
Sertifikat Bank Indonesia	667.503	-	667.503	Certificates of Bank Indonesia
Obligasi	158.428	7.018	165.446	Bonds
Efek Beragunan Aset	189.616	-	189.616	Residential Mortgage-Backed Securities
Total	1.015.547	7.018	1.022.565	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai			(8.769)	Allowance for impairment losses
Neto			1.013.796	Net

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan)

4. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

Per 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, rekening administratif tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif kecuali untuk Unit Usaha Syariah sesuai ketentuan Bank Indonesia masing-masing sebesar Rp7.198, Rp6.469 dan Rp4.403.

5. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah

Per 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif sesuai ketentuan dalam PSAK No. 55 dan Peraturan Bank Indonesia.

Ikhtisar kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang diberikan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 adalah sebagai berikut:

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iii) Information about impaired and not impaired financial assets (continued)

4. Estimated losses on commitments and contingencies

As of December 31, 2014, 2013, and 2012, these administrative account items are not impaired individually as well as collectively, except for Sharia Business Unit based on Bank Indonesia regulations amounted to Rp7,198, Rp6,469 and Rp4,403, respectively.

5. Loans and sharia financing/receivables

As of December 31, 2014, 2013, and 2012, these financial assets are impaired subject to individual and collective impairment according to SFAS No. 55 and Bank Indonesia regulations.

Loans and sharia financing/receivables, as of December 31, 2014, 2013, and 2012, are summarized as follows:

31 Desember/December 31, 2014						
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/Neither past due nor impaired		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ Past-due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total	
	Tingkat tinggi/ High grade	Tingkat standar/ Standard grade				
Perumahan	61.265.366	23.266.764	16.981.506	223.317	101.736.953	Property
Konstruksi	1.264.173	1.804.684	645.560	128.200	3.842.617	Construction
Jasa-jasa dunia usaha	576.625	2.363.102	562.219	1.170	3.503.116	Business services
Perdagangan, restoran dan hotel	1.426.372	511.673	607.189	38.730	2.583.964	Trading, restaurants and hotels
Jasa-jasa sosial	420.194	132.632	99.258	10.404	662.488	Social services
Manufaktur	143.552	36.138	85.796	10.573	276.059	Manufacturing
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	94.491	80.452	52.939	18.553	246.435	Transportation, warehousing and communications
Pertanian	38.962	27.294	91.632	7.794	165.682	Farming
Pertambangan	46.142	20.580	84.845	6.298	157.865	Mining
Listrik, gas dan air	12.435	10.234	7.312	-	29.981	Electricity, gas and water
Lain-lain	2.400.377	197.748	112.516	-	2.710.641	Others
Total	67.688.689	28.451.301	19.330.772	445.039	115.915.801	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai					(1.576.575)	Allowance for impairment losses
Neto					114.339.226	Net

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan)

5. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (lanjutan)

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iii) Information about impaired and not impaired financial assets (continued)

5. Loans and sharia financing/receivables (continued)

31 Desember/December 31, 2013						
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/Neither past due nor impaired		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/Past-due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/Impaired	Total	
	Tingkat tinggi/High grade	Tingkat standar/Standard grade				
Perumahan	53.287.913	19.435.859	13.722.561	157.059	86.603.392	Property
Jasa-jasa dunia usaha	1.567.726	2.643.084	589.042	18.065	4.817.917	Business services
Konstruksi	1.290.936	1.441.101	478.293	62.092	3.272.422	Construction
Perdagangan, restoran dan hotel	1.512.325	375.674	329.477	6.973	2.224.449	Trading, restaurants and hotels
Jasa-jasa sosial	262.974	53.191	5.511	6.103	327.779	Social services
Manufaktur	168.983	54.700	43.783	-	267.466	Manufacturing
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	128.079	77.273	17.925	9.900	233.177	Transportation, warehousing and communications
Pertanian	143.440	18.521	31.609	7.793	201.363	Farming
Pertambangan	73.876	39.914	46.942	-	160.732	Mining
Listrik, gas dan air	20.771	823	9.398	-	30.992	Electricity, gas and water
Lain-lain	2.024.121	160.915	142.666	-	2.327.702	Others
Total	60.481.144	24.301.055	15.417.207	267.985	100.467.391	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai					(1.137.177)	Allowance for impairment losses
Neto					99.330.214	Net

31 Desember/December 31, 2012						
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/Neither past due nor impaired		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/Past-due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/Impaired	Total	
	Tingkat tinggi/High grade	Tingkat standar/Standard grade				
Perumahan	42.749.388	15.220.562	11.698.037	325.862	69.993.849	Property
Jasa-jasa dunia usaha	1.793.709	2.330.451	224.109	24.711	4.372.980	Business services
Konstruksi	1.702.182	1.135.457	114.142	30.303	2.982.084	Construction
Perdagangan, restoran dan hotel	1.209.206	302.160	87.858	-	1.599.224	Trading, restaurants and hotels
Jasa-jasa sosial	160.993	2.143	501	-	163.637	Social services
Manufaktur	151.654	40.581	2.392	5.137	199.764	Manufacturing
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	167.459	38.661	552	6.471	213.143	Transportation, warehousing and communications
Pertanian	96.053	46.229	1.863	-	144.145	Farming
Pertambangan	58.941	26.216	78	14.000	99.235	Mining
Listrik, gas dan air	30.435	2.199	2.979	-	35.613	Electricity, gas and water
Lain-lain	1.389.851	177.968	33.871	5.399	1.607.089	Others
Total	49.509.871	19.322.627	12.166.382	411.883	81.410.763	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai					(980.714)	Allowance for impairment losses
Neto					80.430.049	Net

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iv) Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (cadangan kerugian penurunan nilai bruto):

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iv) The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses):

31 Desember/December 31, 2014						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>neither past due nor impaired</i>		Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Total	
	Tingkat Tinggi/ <i>High Grade</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>				
Nilai wajar melalui laba rugi						<i>Fair value through profit or loss</i>
Efek-efek	148.588	-	-	-	148.588	<i>Securities</i>
Obligasi Pemerintah	591.732	-	-	-	591.732	<i>Government bonds</i>
Tersedia untuk dijual						<i>Available for sale</i>
Efek-efek	4.848.566	-	-	5.018	4.853.584	<i>Securities</i>
Obligasi Pemerintah	5.994.262	-	-	-	5.994.262	<i>Government bonds</i>
Dimiliki hingga jatuh tempo						<i>Held to maturity</i>
Efek-efek	442.200	-	-	2.000	444.200	<i>Securities</i>
Obligasi Pemerintah	1.652.071	-	-	-	1.652.071	<i>Government bonds</i>
Kredit dan piutang						<i>Loans and receivables</i>
Giro pada bank Indonesia	9.371.509	-	-	-	9.371.509	<i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
Giro pada bank lain	1.093.393	-	-	1.571	1.094.964	<i>Current accounts with other banks</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.496.455	-	-	-	1.496.455	<i>Placements with Bank Indonesia and other banks</i>
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah						<i>Loans and sharia financing/ receivables</i>
Konsumer						<i>Consumer</i>
Pemilikan rumah	47.053.444	19.920.262	13.597.100	-	80.570.806	<i>Housing loan</i>
Non kepemilikan rumah	6.505.390	1.868.364	1.555.981	-	9.929.735	<i>Non-housing loan</i>
Modal kerja	11.572.276	5.303.066	3.352.600	257.702	20.485.644	<i>Working capital</i>
Investasi	1.966.244	1.336.186	816.746	187.337	4.306.513	<i>Investment</i>
Sindikasi	76.978	-	-	-	76.978	<i>Syndicated</i>
Direksi dan karyawan	514.357	23.423	8.345	-	546.125	<i>Directors and employees</i>
Bunga yang masih akan diterima	95.008	1.088.481	-	-	1.183.489	<i>Interests receivable</i>
Aset lain-lain ³⁾	-	565.705	-	-	565.705	<i>Other assets³⁾</i>
Total	93.422.473	30.105.487	19.330.772	453.628	143.312.360	Total
Cadangan kerugian nilai					(1.587.548)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto					141.724.812	Net

31 Desember/December 31, 2013						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>neither past due nor impaired</i>		Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not Impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Total	
	Tingkat Tinggi/ <i>High Grade</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>				
Nilai wajar melalui laba rugi						<i>Fair value through profit or loss</i>
Efek-efek	2.096.633	-	-	-	2.096.633	<i>Securities</i>
Obligasi Pemerintah	696.747	-	-	-	696.747	<i>Government bonds</i>
Tersedia untuk dijual						<i>Available for sale</i>
Efek-efek	1.841.557	-	-	5.018	1.846.575	<i>Securities</i>
Obligasi Pemerintah	5.990.887	-	-	-	5.990.887	<i>Government bonds</i>
Dimiliki hingga jatuh tempo						<i>Held to maturity</i>
Efek-efek	265.232	-	-	2.000	267.232	<i>Securities</i>
Obligasi Pemerintah	1.697.326	-	-	-	1.697.326	<i>Government bonds</i>

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- (iv) Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (cadangan kerugian penurunan nilai bruto) (lanjutan):

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

- (iv) The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses) (continued):

31 Desember/December 31, 2013						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>neither past due nor impaired</i>	Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>		Total	
	Tingkat Tinggi/ <i>High Grade</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>				
Kredit dan piutang						Loans and receivables
Giro pada bank Indonesia	9.858.758	-	-	-	9.858.758	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	400.222	-	-	2.301	402.523	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4.839.318	-	-	-	4.839.318	Placements with Bank Indonesia and other banks
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah						Loans and sharia financing/ receivables
Konsumer						Consumer
Pemilikan rumah	40.472.421	16.649.271	11.448.152	-	68.569.844	Housing loan
Non kepemilikan rumah	5.869.418	1.565.863	1.197.716	-	8.632.997	Non-housing loan
Modal kerja	11.313.119	4.982.862	2.094.339	229.052	18.619.372	Working capital
Investasi	2.218.714	1.079.890	664.057	38.933	4.001.594	Investment
Sindikasi	62.712	-	-	-	62.712	Syndicated
Direksi dan karyawan	544.760	23.169	12.943	-	580.872	Directors and employees
Bunga yang masih akan diterima	75.485	848.203	-	-	923.688	Interests receivable
Aset lain-lain*)	-	355.942	-	-	355.942	Other assets*)
Total	88.243.309	25.505.200	15.417.207	277.304	129.443.020	Total
Cadangan kerugian nilai					(1.148.293)	Allowance for impairment losses
Neto					128.294.727	Net

31 Desember/December 31, 2012						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>neither past due nor impaired</i>	Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>		Total	
	Tingkat Tinggi/ <i>High Grade</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>				
Nilai wajar melalui laba rugi						Fair value through profit or loss
Efek-efek	429.261	-	-	-	429.261	Securities
Obligasi Pemerintah	45.748	-	-	-	45.748	Government bonds
Tersedia untuk dijual						Available for sale
Efek-efek	250.630	-	-	5.018	255.648	Securities
Obligasi Pemerintah	5.772.688	-	-	-	5.772.688	Government bonds
Dimiliki hingga jatuh tempo						Held to maturity
Efek-efek	335.656	-	-	2.000	337.656	Securities
Obligasi Pemerintah	1.650.494	-	-	-	1.650.494	Government bonds
Kredit dan piutang						Loans and receivables
Giro pada bank Indonesia	7.297.835	-	-	-	7.297.835	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	161.995	-	-	1.748	163.743	Current accounts with other banks

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- (iv) Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (cadangan kerugian penurunan nilai bruto) (lanjutan):

31 Desember/December 31, 2012					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ neither past due nor impaired		Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total
	Tingkat Tinggi/ High Grade	Tingkat standar/ Standard grade			
Kredit dan piutang (lanjutan)					
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11.472.346	-	-	-	11.472.346
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah					
Konsumer					
Pemilikan rumah	32.113.499	13.311.824	9.747.819	-	55.173.142
Non kepemilikan rumah	5.129.933	1.242.697	851.296	5.400	7.229.326
Modal kerja	9.702.123	4.061.524	1.270.398	349.352	15.383.397
Investasi	2.248.707	686.156	294.353	57.131	3.286.347
Sindikasi	28.047	-	-	-	28.047
Direksi dan karyawan	287.562	20.426	2.516	-	310.504
Bunga yang masih akan diterima	-	871.985	-	-	871.985
Aset lain-lain*)	-	370.464	-	-	370.464
Total	76.926.524	20.565.076	12.166.382	420.649	110.078.631
Cadangan kerugian nilai					(997.283)
Neto					109.081.348

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

Tingkat tinggi

- (a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.
- (b) Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang sangat baik dan tidak pernah menunggak sepanjang jangka waktu kredit, debitur dengan tingkat stabilitas dan keragaman yang tinggi, memiliki akses setiap saat untuk memperoleh pendanaan dalam jumlah besar dari pasar terbuka, memiliki kemampuan membayar yang kuat dan rasio-rasio neraca yang konservatif.

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

- (iv) The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses) (continued):

Loans and receivables (continued)
Placements with Bank Indonesia and other banks
Loans and sharia financing/ receivables
Consumer Housing loan
Non-housing loan
Working capital
Investment
Syndicated
Directors and employees
Interests receivable
Other assets*)
Total
Allowance for impairment losses
Net

*) Consists of third party receivables

The credit quality are defined as follows:

High grade

- (a) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with government institution transaction with reputable banks with low probability of default for its liabilities.
- (b) Loans and sharia financing/receivables, interests receivables and third party receivables are receivables from borrowers with very satisfactory track record of loan repayment and whose accounts did not turn past due during the term of the loan, borrowers with high degree of stability and diversity, has access to raise substantial amounts of funds through public market at any time, very strong debt service capacity and has conservative statement of financial position ratios.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- (iv) Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (cadangan kerugian penurunan nilai bruto) (lanjutan):

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut (lanjutan):

Tingkat tinggi (lanjutan)

- (c) Efek-efek dan obligasi Pemerintah yaitu efek-efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam *investment grade* dengan rating minimal BBB- (Pefindo) atau Baa3 (Moody's).

Tingkat standar

- (a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank lokal yang tidak terdaftar di bursa.
- (b) Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang baik dan tidak pernah menunggak 90 hari atau lebih, akses terbatas ke pasar modal atau ke pasar keuangan lainnya, tingkat pendapatan dan kinerja keseluruhan tidak stabil, memiliki kemampuan membayar yang cukup.
- (c) Efek-efek dan obligasi Pemerintah yaitu efek-efek dan obligasi dengan rating antara idBB+ sampai dengan idB (Pefindo) atau Ba1 sampai dengan B2 (Moody's).

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

- (iv) The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses) (continued):

The credit quality are defined as follows (continued):

High grade (continued)

- (c) Securities and Government bonds are Sovereign securities, investment grade securities and bonds with a rating of at least BBB- (Pefindo) or Baa3 (Moody's).

Standard grade

- (a) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with the local banks not listed in the stock exchange.
- (b) Loans and sharia financing/receivables, interests receivables and third party receivables are receivables from borrowers who have an average track record of loan repayment and whose account did not turn past due for 90 days and over, smaller corporations with limited access to public capital markets or to alternative financial market, volatility of earnings and overall performance, debt service capacity is adequate.
- (c) Securities and Government bonds with a rating between idBB+ to idB (Pefindo) or Ba1 to B2 (Moody's).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- (v) Analisis umur pinjaman yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 sebagai berikut:

31 Desember/December 31, 2014					
	1 sampai 90 hari/ 1 to 90 days	91 sampai 120 hari/ 91 to 120 days	121 sampai 180 hari/ 121 to 180 days	lebih dari 180 hari/ More than 180 days	Total
Konsumer					
Pemilikan rumah	11.148.816	204.873	259.324	1.984.087	13.597.100
Non kepemilikan rumah	1.230.038	32.177	29.398	264.368	1.555.981
Modal kerja	2.192.584	46.529	108.168	1.005.319	3.352.600
Investasi	558.448	11.732	42.595	203.971	816.746
Direktur dan karyawan	5.490	185	507	2.163	8.345
	15.135.376	295.496	439.992	3.459.908	19.330.772

Consumer
Housing Loan
Non housing loan
Working capital
Investment
Directors and employees

31 Desember/December 31, 2013					
	1 sampai 90 hari/ 1 to 90 days	91 sampai 120 hari/ 91 to 120 days	121 sampai 180 hari/ 121 to 180 days	lebih dari 180 hari/ More than 180 days	Total
Konsumer					
Pemilikan rumah	8.966.576	259.681	314.678	1.907.217	11.448.152
Non kepemilikan rumah	939.555	33.758	36.956	187.447	1.197.716
Modal kerja	1.362.637	41.110	82.514	608.078	2.094.339
Investasi	400.211	12.639	11.775	239.432	664.057
Direktur dan karyawan	11.993	-	93	857	12.943
	11.680.972	347.188	446.016	2.943.031	15.417.207

Consumer
Housing Loan
Non housing loan
Working capital
Investment
Directors and employees

31 Desember/December 31, 2012					
	1 sampai 90 hari/ 1 to 90 days	91 sampai 120 hari/ 90 to 120 days	121 sampai 180 hari/ 120 to 180 days	lebih dari 180 hari/ More than 180 days	Total
Konsumer					
Pemilikan rumah	7.953.757	280.323	315.393	1.196.346	9.747.819
Non kepemilikan rumah	660.295	27.332	29.242	134.427	851.296
Modal kerja	708.971	72.236	63.425	425.766	1.270.398
Investasi	180.246	14.177	22.135	77.795	294.353
Direktur dan karyawan	1.159	286	108	963	2.516
	9.504.428	394.354	430.303	1.837.297	12.166.382

Consumer
Housing Loan
Non housing loan
Working capital
Investment
Directors and employees

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(vi) Mutasi cadangan berdasarkan jenis kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(vi) Movements in allowance for impairment losses by type of loans are as follows:

31 Desember/December 31, 2014							
	Konsumsi/Consumer						
	Pemilikan Rumah/ Housing Loan	Non-kepemilikan rumah/ Non-Housing Loan	Modal Kerja/ Working Capital	Investasi/ Investment	Sindikasi/ Syndicated	Direksi dan Karyawan/ Directors and Employess	
Saldo awal tahun	670.219	45.867	371.601	49.351	3	136	Balance at beginning of year
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	143.992	30.534	463.354	137.724	9	-	Provision expense for impairment losses during the year
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus bukukan	421	-	12.303	2.071	-	-	Recovery of loans written-off
Penghapusbukuan kredit	(33.090)	(32)	(246.658)	(71.230)	-	-	Loans written-off
Saldo akhir tahun	781.542	76.369	600.600	117.916	12	136	Balance at end of year
Penurunan nilai secara individual	-	-	72.910	34.516	-	-	Individual impairment
Penurunan nilai secara kolektif	781.542	76.369	527.690	83.400	12	136	Collective impairment
Jumlah kotor kredit yang secara individu ditentukan sebagai mengalami penurunan nilai sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai atas penilaian secara individual	-	-	257.702	187.337	-	-	Gross amount of loans individually determined to be impaired, before deducting any individually assessed of allowance for impairment losses

31 Desember/December 31, 2013							
	Konsumsi/Consumer						
	Pemilikan Rumah/ Housing Loan	Non-kepemilikan rumah/ Non-Housing Loan	Modal Kerja/ Working Capital	Investasi/ Investment	Sindikasi/ Syndicated	Direksi dan Karyawan/ Directors and Employess	
Saldo awal tahun	412.328	35.579	495.794	36.849	-	164	Balance at beginning of year
Beban penyisihan (pembalikan) kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	270.317	10.327	79.223	75.900	3	(28)	Provision expense for (reversal of) impairment losses during the year
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus bukukan	1.213	-	454	510	-	-	Recovery of loans written-off
Penghapusbukuan kredit	(13.639)	(39)	(203.870)	(63.908)	-	-	Loans written-off
Saldo akhir tahun	670.219	45.867	371.601	49.351	3	136	Balance at end of year
Penurunan nilai secara individual	-	-	52.778	14.817	-	-	Individual impairment
Penurunan nilai secara kolektif	670.219	45.867	318.823	34.534	3	136	Collective impairment
Jumlah kotor kredit yang secara individu ditentukan sebagai mengalami penurunan nilai sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai atas penilaian secara individual	-	-	229.052	38.933	-	-	Gross amount of loans individually determined to be impaired, before deducting any individually assessed of allowance for impairment losses

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- (vi) Mutasi cadangan berdasarkan jenis kredit yang diberikan adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember/December 31, 2012						
	Konsumsi/Consumer						
	Pemilikan Rumah/ Housing Loan	Non-kepemilikan rumah/Non-Housing Loan	Modal Kerja/ Working Capital	Investasi/ Investment	Sindikasi/ Syndicated	Direksi dan Karyawan/ Directors and Employess	
Saldo awal tahun	505.859	71.204	294.851	52.956	16.649	2.579	Balance at beginning of year
Beban penyisihan (pembalikan) kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	(78.566)	(32.251)	301.856	34.467	(16.649)	(2.415)	Provision expense for (reversal of) impairment losses during the year
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus bukukan	-	938	-	-	-	-	Recovery of loans written-off
Penghapusbukuan kredit	(14.965)	(4.312)	(100.913)	(50.574)	-	-	Loans written-off
Saldo akhir tahun	412.328	35.579	495.794	36.849	-	164	Balance at end of year
Penurunan nilai secara individual	-	5.400	160.824	19.673	-	-	Individual impairment
Penurunan nilai secara kolektif	412.328	30.179	334.970	17.176	-	164	Collective impairment
Jumlah kotor kredit yang secara individu ditentukan sebagai mengalami penurunan nilai sebelum dikurangi cadangan <i>individually determined to be impaired, before deducting any individually assessed of allowance for impairment losses</i>	-	5.400	349.352	57.131	-	-	Gross amount of loans

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:

- ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
- ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk arising from the inability of the Bank to meet the maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high-quality liquid assets that can be pledged, without disturbing the activities and financial condition of the Bank. The inability to obtain funding for cash flows resulting to liquidity risk can be contributed, among others, by:

- inability to generate cash flows from productive assets as well as from the sale of assets, including liquid assets; and/or
- inability to generate cash flows from funding, interbank transactions and fund borrowings.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Secara umum, tujuan utama manajemen risiko untuk risiko likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Dengan demikian bank dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, dan agar senantiasa dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal. Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas antara lain mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang pada intinya mengatur penerapan Manajemen Risiko likuiditas pada Bank, Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit yang secara umum mencakup strategi manajemen risiko likuiditas, tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dan Sistem Informasi Manajemen Risiko serta Sistem Pengendalian Intern dengan menerapkan pengendalian intern dan kaji ulang independen yang memadai terhadap penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang dilaksanakan oleh *Internal Audit Division* (IAD) dan *Risk Management Division* (RMD).

Pengendalian Risiko Likuiditas melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan pemantauan risiko likuiditas harian, pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat serta penerapan sistem informasi manajemen risiko secara wajar untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, serta pelaporan risiko likuiditas dalam kondisi normal dan kondisi krisis secara lengkap, akurat, terkini dan berkesinambungan.

Alat pengukuran yang digunakan dalam pengukuran Risiko Likuiditas antara lain adalah Rasio Likuiditas, Profil Maturitas, Proyeksi arus kas, dan *Stress testing* (pengujian terhadap kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis dengan menggunakan skenario *stress* secara spesifik pada Bank maupun skenario *stress* pada faktor pasar).

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

In general, the main objective of risk management for liquidity risk is to minimize the possibility of the Bank's inability to obtain source of cash flow funding. Thus, the bank can meet some financial obligations that have been agreed upon in a timely manner, and to always be able to maintain adequate and optimal levels of liquidity. Liquidity risk management policies include the active supervision of the BOC and BOC who basically set the implementation of the Bank's liquidity risk management, policy, procedures and determination of limits, which generally includes the liquidity risk management strategy, level of risk to be taken (risk appetite) and risk tolerance, and risk management process, information systems and internal control systems by implementing internal controls and adequate independent review of the risk management implementation for liquidity risk which are being carried out by the Management and conducted by the Internal Audit Division (IAD) and Risk Management Division (RMD).

Liquidity risk management is being carried out through funding strategy, liquidity positions and monitoring of daily liquidity, management of high quality liquid assets, planning the emergency funding as well as implementation of a sound risk management information system to support the process of identification, measurement, monitoring and control, as well as reporting of liquidity risk under normal and extreme conditions in a comprehensive, accurate, timely and sustainable manner.

The tools used in the measurement of liquidity risk among others are liquidity ratio, maturity profile, cash flow projection, and stress testing (testing the Bank's ability to meet liquidity needs on a state of crisis by using the specific stress scenarios on the Bank as well as on the market factor).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan:

31 Desember/December 31, 2014						
	Total	Lainnya/ Others *)	1 Bulan/ 1 Month	> 1 - 6 Bulan/ > 1 - 6 Months	> 6 - 12 Bulan/ > 6 - 12 Months	> 12 Bulan/ > 12 Months
ASET						
Kas	920.482	-	920.482	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	9.371.509	-	9.371.509	-	-	-
Giro pada bank lain	1.093.393	(1.571)	1.094.964	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.496.455	-	1.496.455	-	-	-
Efek-efek	5.436.970	(9.402)	5.002.172	24.672	50.000	369.528
Obligasi Pemerintah	8.238.065	-	6.585.994	-	5.000	1.647.071
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	114.339.226	(1.576.575)	1.024.958	4.580.431	4.586.680	105.723.732
Bunga yang masih akan diterima	1.183.489	-	1.183.489	-	-	-
Aset lain-lain**)	565.705	-	565.705	-	-	-
Total	142.645.294	(1.587.548)	27.245.728	4.605.103	4.641.680	107.740.331
LIABILITAS						
Liabilitas segera ***)	1.638.831	-	1.638.831	-	-	-
Simpanan nasabah	106.470.677	-	83.780.356	14.765.627	1.156.463	6.768.231
Simpanan dari bank lain	1.179.269	-	726.544	451.510	1.215	-
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.817.603	-	482.604	650.000	1.299.999	1.385.000
Surat berharga yang diterbitkan	8.519.884	-	-	269.686	41.494	8.208.704
Pinjaman yang diterima	6.998.213	-	-	1.025.195	2.506.968	3.466.050
Bunga yang masih harus dibayar	308.996	-	308.996	-	-	-
Liabilitas lain-lain****)	2.280.158	-	2.280.158	-	-	-
Total	131.213.631	-	89.217.489	17.162.018	5.006.139	19.827.985
Perbedaan jatuh tempo	11.431.663	(1.587.548)	(61.971.761)	(12.556.915)	(364.459)	87.912.346

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The following maturity tables provide information about the expected maturities of the Bank's financial assets and liabilities:

ASSETS
Cash
Current accounts with Bank Indonesia
Current accounts with other banks
Placements with Bank Indonesia and other banks
Securities
Government bonds
Loans and sharia financing/receivables
Interest receivable
Other assets**)
Total
LIABILITIES
Liabilities due immediately***)
Deposits from customers
Deposits from other banks
Securities sold under repurchase agreements
Securities issued
Fund borrowings
Interest payables
Other liabilities****)
Total
Maturity gap

*) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.

**) Terdiri dari tagihan pihak ketiga.

***) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

****) Terdiri dari setoran jaminan dan dana jaminan pengembang.

*) Allowance for impairment losses on financial assets.

**) Consists of third party receivables.

***) Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.

****) Consists of guarantee deposits and developers' security deposits.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan (lanjutan):

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The following maturity tables provide information about the expected maturities of the Bank's financial assets and liabilities (continued):

31 Desember/December 31, 2013							
	Total	Lainnya/ Others *)	1 Bulan/ 1 Month	> 1 - 6 Bulan/ > 1 - 6 Months	> 6 - 12 Bulan/ > 6 - 12 Months	> 12 Bulan/ > 12 Months	
ASET							ASSETS
Kas	924.451	-	924.451	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	9.858.758	-	9.858.758	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	400.215	(2.308)	402.523	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4.839.268	(50)	4.839.318	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	4.201.682	(8.758)	3.943.208	15.004	-	252.228	Securities
Obligasi Pemerintah	8.384.960	-	6.687.634	50.000	-	1.647.326	Government bonds
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syaria	99.330.214	(1.137.177)	1.282.726	4.573.568	4.201.450	90.409.647	Loans and sharia financing/receivables
Bunga yang masih akan diterima	923.688	-	923.688	-	-	-	Interest receivable
Aset lain-lain**)	355.942	-	355.942	-	-	-	Other assets**)
Total	129.219.178	(1.148.293)	29.218.248	4.638.572	4.201.450	92.309.201	Total
LIABILITAS							LIABILITIES
Liabilitas segera ***)	1.161.447	-	1.161.447	-	-	-	Liabilities due immediately***)
Simpanan nasabah	96.207.622	-	67.652.296	14.598.613	8.548.351	5.408.362	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	275.257	-	22.125	102.317	150.815	-	Deposits from other banks
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2.652.730	-	-	317.730	-	2.335.000	Securities sold under repurchase agreements
Surat berharga yang diterbitkan	8.836.711	-	-	899.616	-	7.937.095	Securities issued
Pinjaman yang diterima	7.073.032	-	5.930	569.828	995.606	5.501.668	Fund borrowings
Bunga yang masih harus dibayar	241.370	-	241.370	-	-	-	Interest payables
Liabilitas lain-lain****)	1.931.789	-	1.931.789	-	-	-	Other liabilities****)
Total	118.379.958	-	71.014.957	16.488.104	9.694.772	21.182.125	Total
Perbedaan jatuh tempo	10.839.220	(1.148.293)	(41.796.709)	(11.849.532)	(5.493.322)	71.127.076	Maturity gap

*) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.

**) Terdiri dari tagihan pihak ketiga.

*** Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

**** Terdiri dari setoran jaminan dan dana jaminan pengembang.

*) Allowance for impairment losses on financial assets.

**) Consists of third party receivables.

*** Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.

**** Consists of guarantee deposits and developers' security deposits.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan (lanjutan):

31 Desember/December 31, 2012						
	Total	Lainnya/ Others *)	■ 1 Bulan/ ■ 1 Month	> 1 - 6 Bulan/ > 1 - 6 Months	> 6 - 12 Bulan/ > 6 - 12 Months	> 12 Bulan/ > 12 Months
ASET						
Kas	694.941	-	694.941	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	7.297.835	-	7.297.835	-	-	-
Giro pada bank lain	161.993	(1.750)	163.743	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	11.466.296	(6.050)	11.323.760	148.586	-	-
Efek-efek	1.013.796	(8.769)	61.699	433.574	256.626	270.666
Obligasi Pemerintah	7.468.930	-	-	151.954	112.546	7.204.430
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	80.430.049	(980.714)	1.037.755	3.670.893	4.099.546	72.602.569
Bunga yang masih akan diterima	871.985	-	871.985	-	-	-
Aset lain-lain**)	370.464	-	370.464	-	-	-
Total	109.776.289	(997.283)	21.822.182	4.405.007	4.468.718	80.077.665
LIABILITAS						
Liabilitas segera ***)	1.082.705	-	1.082.705	-	-	-
Simpanan nasabah	80.667.983	-	66.537.705	10.618.775	3.496.888	14.615
Simpanan dari bank lain	706.703	-	703.528	2.810	365	-
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2.335.000	-	-	-	-	2.335.000
Surat berharga yang diterbitkan	7.136.776	-	-	299.849	-	6.836.927
Pinjaman yang diterima	6.737.260	-	5.930	1.099.169	2.299.790	3.332.371
Bunga yang masih harus dibayar	193.280	-	193.280	-	-	-
Liabilitas lain-lain****)	1.490.302	-	1.490.302	-	-	-
Total	100.350.009	-	70.013.450	12.020.603	5.797.043	12.518.913
Perbedaan jatuh tempo	9.426.280	(997.283)	(48.191.268)	(7.615.596)	(1.328.325)	67.558.752

*) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.

**) Terdiri dari tagihan pihak ketiga.

*** Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

**** Terdiri dari setoran jaminan dan dana jaminan pengembang.

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada arus kas yang tidak didiskonto (pokok dan bunga) (tidak diaudit):

31 Desember/December 31, 2014						
	Total	On demand	■ 1 Bulan/ ■ 1 Month	> 1 - 6 Bulan/ > 1 - 6 Months	> 6 - 12 Bulan/ > 6 - 12 Months	> 12 Bulan/ > 12 Months
LIABILITAS						
Liabilitas segera *)	1.638.831	-	1.638.831	-	-	-
Simpanan nasabah						
Deposito berjangka	61.535.348	-	36.610.033	16.309.723	1.301.177	7.314.415
Tabungan	27.053.044	27.053.044	-	-	-	-
Giro	23.871.795	23.871.795	-	-	-	-
Simpanan dari bank lain	1.186.695	16.153	712.122	457.201	1.219	-
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.374.678	-	538.369	744.430	1.378.313	1.713.566

LIABILITIES
Liabilities due immediately)*
Deposits from customers
Time deposits
Savings deposits
Demand deposits
Deposits from other banks
Securities sold under repurchase agreements

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The following maturity tables provide information about the expected maturities of the Bank's financial assets and liabilities (continued):

31 Desember/December 31, 2012						
	Total	Lainnya/ Others *)	■ 1 Bulan/ ■ 1 Month	> 1 - 6 Bulan/ > 1 - 6 Months	> 6 - 12 Bulan/ > 6 - 12 Months	> 12 Bulan/ > 12 Months
ASSETS						
Cash	694.941	-	694.941	-	-	-
Current accounts with Bank Indonesia	7.297.835	-	7.297.835	-	-	-
Current accounts with other banks	161.993	(1.750)	163.743	-	-	-
Placements with Bank Indonesia and other banks	11.466.296	(6.050)	11.323.760	148.586	-	-
Securities	1.013.796	(8.769)	61.699	433.574	256.626	270.666
Government bonds	7.468.930	-	-	151.954	112.546	7.204.430
Loans and sharia financing/receivables	80.430.049	(980.714)	1.037.755	3.670.893	4.099.546	72.602.569
Interest receivable	871.985	-	871.985	-	-	-
Other assets**)	370.464	-	370.464	-	-	-
Total	109.776.289	(997.283)	21.822.182	4.405.007	4.468.718	80.077.665
LIABILITIES						
Current liabilities***)	1.082.705	-	1.082.705	-	-	-
Deposits from customers	80.667.983	-	66.537.705	10.618.775	3.496.888	14.615
Deposits from other banks	706.703	-	703.528	2.810	365	-
Securities sold under repurchase agreements	2.335.000	-	-	-	-	2.335.000
Securities issued	7.136.776	-	-	299.849	-	6.836.927
Fund borrowings	6.737.260	-	5.930	1.099.169	2.299.790	3.332.371
Interest payables	193.280	-	193.280	-	-	-
Other liabilities****)	1.490.302	-	1.490.302	-	-	-
Total	100.350.009	-	70.013.450	12.020.603	5.797.043	12.518.913
Maturity gap	9.426.280	(997.283)	(48.191.268)	(7.615.596)	(1.328.325)	67.558.752

*) Allowance for impairment losses on financial assets.

**) Consists of third party receivables.

*** Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.

**** Consists of guarantee deposits and developers' security deposits.

The tables below show the remaining contractual maturities of financial liabilities based on undiscounted cashflows (principal and interest) (unaudited):

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada arus kas yang tidak didiskonto (pokok dan bunga) (tidak diaudit) (lanjutan):

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The tables below show the remaining contractual maturities of financial liabilities based on undiscounted cashflows (principal and interest) (unaudited) (lanjutan):

31 Desember/December 31, 2014						
Total	On demand	■ 1 Bulan/ Month	> 1 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ Months	> 12 Bulan/ Months	
LIABILITAS (lanjutan)						LIABILITIES (continued)
Surat berharga yang diterbitkan	13.019.563	-	-	648.063	413.062	11.958.438
Pinjaman yang diterima	7.493.202	-	-	1.093.193	2.681.055	3.718.954
Bunga yang masih harus dibayar	308.996	-	308.996	-	-	-
Liabilitas lain-lain**)	2.280.158	-	2.280.158	-	-	-
Total	142.762.310	50.940.992	42.088.509	19.252.610	5.774.826	24.705.373

31 Desember/December 31, 2013						
Total	On demand	■ 1 Bulan/ Month	> 1 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ Months	> 12 Bulan/ Months	
LIABILITAS						LIABILITIES
Liabilitas segera *)	1.161.447	-	1.161.447	-	-	-
Simpanan nasabah						
Deposito berjangka	55.582.014	-	34.276.782	12.231.986	4.085.205	4.988.041
Tabungan	24.963.358	24.963.358	-	-	-	-
Giro	19.346.167	19.346.167	-	-	-	-
Simpanan dari bank lain	283.862	15.979	6.155	105.412	156.316	-
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.395.275	-	34.061	365.117	77.131	2.918.966
Surat berharga yang diterbitkan	14.085.813	-	-	1.323.188	368.062	12.394.563
Pinjaman yang diterima	7.491.909	-	-	594.354	583.990	6.313.565
Bunga yang masih harus dibayar	241.370	-	241.370	-	-	-
Liabilitas lain-lain**)	1.931.789	-	1.931.789	-	-	-
Total	128.483.004	44.325.504	37.651.604	14.620.057	5.270.704	26.615.135

31 Desember 2012/December 31, 2012						
Total	On demand	■ 1 Bulan/ Month	> 1 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ Months	> 12 Bulan/ Months	
LIABILITAS						LIABILITIES
Liabilitas segera *)	1.082.705	-	1.082.705	-	-	-
Simpanan nasabah						
Deposito berjangka	48.578.748	-	35.604.045	9.586.586	3.372.868	15.249
Tabungan	22.051.590	22.051.590	-	-	-	-
Giro	13.276.464	13.276.464	-	-	-	-
Simpanan dari bank lain	708.951	17.809	687.958	2.819	365	-
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.005.242	-	28.323	36.344	64.667	2.875.908
Surat berharga yang diterbitkan	11.630.689	-	-	662.188	344.188	10.624.313
Pinjaman yang diterima	7.980.626	-	41.286	1.242.982	3.359.919	3.336.439
Bunga yang masih harus dibayar	193.280	-	193.280	-	-	-
Liabilitas lain-lain**)	1.490.302	-	1.490.302	-	-	-
Total	109.998.597	35.345.863	39.127.899	11.530.919	7.142.007	16.851.909

*) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.
 **) Terdiri dari setoran jaminan dan dana jaminan pengembang

*) Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.
 **) Consists of guarantee deposits and developers' security deposits.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar

Risiko Pasar merupakan risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

Dalam melakukan pengukuran risiko pasar, Bank menggunakan perhitungan *Standard Method* yang digunakan untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk Risiko Pasar. Risiko nilai tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dikelola dengan cara menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Gejala eksternal juga diakomodasi dengan dilakukan *stress testing* untuk melihat sejauh mana Bank dapat bertahan dengan beberapa skenario perubahan kondisi eksternal, khususnya perubahan suku bunga pasar.

Termasuk di dalam risiko pasar adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan faktor-faktor pasar, seperti perubahan suku bunga dan perubahan nilai tukar.

i. Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat bunga timbul dari adanya kemungkinan bahwa perubahan tingkat suku bunga akan mempengaruhi arus kas di masa yang akan datang dari nilai wajar instrumen keuangan.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012:

Aset	2014		2013		2012		Assets
	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign currencies	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign currencies	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign currencies	
Giro pada bank lain	0,54%	0,01%	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	Current accounts with other Bank
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	6,51%	-	4,66%	-	3,92%	-	Placements with Bank Indonesia and other Banks
Efek-efek	6,68%	5,62%	6,09%	5,62%	4,93%	-	Securities
Obligasi Pemerintah							Government bonds
Tingkat bunga tetap	7,09%	-	6,40%	4,26%	7,80%	3,64%	Fixed interest rate
Tingkat bunga Mengambang	5,86%	-	4,53%	-	3,86%	-	Variable interest rate
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	12,01%	-	11,03%	-	11,08%	-	Loans and sharia financing/receivables

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk

Market risk is the risk on statement of financial position and administrative accounts, due to changes in overall market conditions.

In measuring market risk, the Bank uses the *Standardized Method* in calculating CAR for market risk. Exchange rate risk arises from fluctuations in exchange rates maintained by keeping the net open position in accordance with Bank Indonesia regulations. External shocks are also being considered by stress testing, which is done to measure the extent to which the Bank can survive some scenario changes in external conditions, particularly changes in market interest rates.

Market risk includes the risk of price changes of financial instruments due to changes in market factors, such as changes in interest rates and exchange rates.

i. Interest rate risk

Interest rate risks arise from the possibility that changes in interest rates will affect future cash flows from the fair values of financial instruments.

The following table presents information on the average annual interest rates for significant financial assets and liabilities for the year ended December 31, 2014, 2013, and 2012:

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 (lanjutan):

Liabilitas	2014		2013		2012		Liabilities
	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign currencies	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign currencies	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign currencies	
Simpanan nasabah							Deposits from customers
Giro	2,56%	0,00%	3,01%	0,01%	2,97%	0,00%	Demand deposits
Tabungan	3,73%	-	3,43%	-	3,32%	-	Savings deposits
Deposito Berjangka	6,61%	0,05%	6,13%	0,05%	3,08%	0,05%	Time deposits
Simpanan dari Bank lain							Deposits from other banks
Giro	0,86%	-	0,60%	-	0,69%	-	Demand deposits
Deposito Berjangka	7,24%	-	5,32%	-	3,75%	-	Time deposits
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	7,44%	-	7,35%	-	5,49%	-	Securities sold under repurchase agreements
Surat berharga yang diterbitkan	9,26%	-	9,56%	-	10,52%	-	Securities issued
Pinjaman yang diterima							repurchase agreements
							Fund Borrowings
Kredit Likuiditas Bank Indonesia	0,24%	-	0,49%	-	0,50%	-	Bank Indonesia Liquidity Loans
Rekening dana investasi	4,19%	-	4,05%	-	4,14%	-	- Investment funds account

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (gross) (tidak diaudit):

The following table presents information on the average annual interest rates for significant financial assets and liabilities for the year ended December 31, 2014, 2013, and 2012 (continued):

The tables below summarize the Bank's exposure to interest rate risk (gross) (unaudited):

31 Desember/December 31, 2014						
Suku bunga mengambang/Variable interest rate						
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/syariah Non-interest bearing/sharia	Total
Aset Keuangan						
Kas	-	-	-	-	920.482	920.482
Giro pada Bank Indonesia	8.829.829	-	-	-	541.680	9.371.509
Giro pada bank lain	1.094.709	-	-	-	255	1.094.964
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	924.855	571.600	1.496.455
Efek-efek	361.517	-	-	4.939.523	145.332	5.446.372
Obligasi Pemerintah	7.456.715	-	-	715.506	65.844	8.238.065
Kredit yang diberikan dan piutang /pembiayaan syariah	2.478.994	6.005.500	74.277.487	23.509.296	9.644.524	115.915.801
Bunga yang masih akan diterima	-	-	-	-	1.183.489	1.183.489
Aset lain-lain*)	-	-	-	-	565.705	565.705
Total aset keuangan	20.221.764	6.005.500	74.277.487	30.089.180	13.638.911	144.232.842
Liabilitas Keuangan						
Liabilitas segera**)	-	-	-	-	1.638.831	1.638.831
Simpanan dari nasabah						
Giro	22.001.200	-	-	-	1.421.418	23.422.618
Tabungan	24.887.165	-	-	343.571	937.178	26.167.914
Deposito berjangka	-	-	-	50.491.284	6.388.861	56.880.145
Simpanan dari bank lain	12.289	-	-	1.157.282	9.698	1.179.269
Surat-surat berharga diterbitkan	-	-	-	8.519.884	-	8.519.884
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2.817.603	-	-	1.000.000	-	3.817.603
Pinjaman yang diterima	-	-	-	6.998.213	-	6.998.213
Bunga yang masih harus dibayar	-	-	-	-	308.996	308.996
Liabilitas lain-lain***)	-	-	-	-	2.280.158	2.280.158
Total liabilitas keuangan	49.718.257	-	-	68.510.234	12.985.140	131.213.631
Gap repricing suku bunga-kotor	(29.496.493)	6.005.500	74.277.487	(38.421.054)	653.771	13.019.211

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (gross) (tidak diaudit) (lanjutan):

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

i. Interest rate risk (continued)

The tables below summarize the Bank's exposure to interest rate risk (gross) (unaudited) (continued):

31 Desember/December 31, 2013

Suku bunga mengambang/Variable interest rate								
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/syariah Non-interest bearing/sharia	Total		
Aset Keuangan							Financial Assets	
Kas	-	-	-	-	924.451	924.451		Cash
Giro pada Bank Indonesia	9.190.113	-	-	-	668.645	9.858.758		Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	402.299	-	-	-	224	402.523		Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	4.269.318	570.000	4.839.318		Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	249.213	-	-	3.802.194	159.033	4.210.440		Securities
Obligasi Pemerintah	7.311.139	-	-	938.136	135.685	8.384.960		Government bonds
Kredit yang diberikan dan piutang /pembiayaan syariah	1.988.101	6.361.098	66.957.152	17.079.957	8.081.083	100.467.391		Loans and sharia financing/receivables
Bunga yang masih akan diterima	-	-	-	-	923.688	923.688		Interest receivable
Aset lain-lain*)	-	-	-	-	355.942	355.942		Other assets*)
Total aset keuangan	19.140.865	6.361.098	66.957.152	26.089.605	11.818.751	130.367.471		Total financial assets
Liabilitas Keuangan							Financial Liabilities	
Liabilitas segera**)	-	-	-	-	1.161.447	1.161.447		Liabilities due immediately**)
Simpanan dari nasabah								Deposits from customers
Giro	17.960.965	-	-	-	1.155.231	19.116.196		Demand deposits
Tabungan	23.142.997	-	-	240.450	854.446	24.237.893		Savings deposits
Deposito berjangka	-	-	-	48.270.633	4.582.900	52.853.533		Time deposits
Simpanan dari bank lain	9.302	-	-	254.224	11.731	275.257		Deposits from other banks
Surat-surat berharga diterbitkan	-	-	-	8.836.711	-	8.836.711		Securities issued
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2.335.000	-	-	317.730	-	2.652.730		Securities sold under repurchase agreements
Pinjaman yang diterima	-	-	-	6.643.032	430.000	7.073.032		Fund Borrowings
Bunga yang masih harus dibayar	-	-	-	-	241.370	241.370		Interest payables
Liabilitas lain-lain***)	-	-	-	-	1.931.789	1.931.789		Other liabilities***)
Total liabilitas keuangan	43.448.264	-	-	64.562.780	10.368.914	118.379.958		Total financial liabilities
Gap repricing suku bunga-kotor	(24.307.399)	6.361.098	66.957.152	(38.473.175)	1.449.837	11.987.513		Gross interest repricing gap

31 Desember/December 31, 2012

Suku bunga mengambang/Variable interest rate								
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/syariah Non-interest bearing/sharia	Total		
Aset Keuangan							Financial Assets	
Kas	-	-	-	-	694.941	694.941		Cash
Giro pada Bank Indonesia	6.757.791	-	-	-	540.044	7.297.835		Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	163.550	-	-	-	193	163.743		Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	10.593.746	878.600	11.472.346		Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	189.616	-	-	32.406	800.543	1.022.565		Securities
Obligasi Pemerintah	6.984.147	-	-	290.208	194.575	7.468.930		Government bonds
Kredit yang diberikan dan piutang /pembiayaan syariah	2.073.804	5.532.396	55.893.983	11.910.522	6.000.058	81.410.763		Loans and sharia financing/receivables
Bunga yang masih akan diterima	-	-	-	-	871.985	871.985		Interest receivable
Aset lain-lain*)	-	-	-	-	370.464	370.464		Other assets*)
Total aset keuangan	16.168.908	5.532.396	55.893.983	22.826.882	10.351.403	110.773.572		Total financial assets

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (gross) (tidak diaudit) (lanjutan):

31 Desember/December 31, 2012						
Suku bunga mengambang/Variable interest rate						
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/syariah Non-interest bearing/sharia	Total
Liabilitas Keuangan						
Liabilitas segera**)	-	-	-	-	1.082.705	1.082.705
Simpanan dari nasabah						
Giro	12.510.533	-	-	-	760.694	13.271.227
Tabungan	20.746.908	-	-	132.515	661.002	21.540.425
Deposito berjangka	-	-	-	41.521.575	4.334.756	45.856.331
Simpanan dari bank lain	10.332	-	-	655.186	41.185	706.703
Surat-surat berharga diterbitkan	-	-	-	7.136.776	-	7.136.776
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2.335.000	-	-	-	-	2.335.000
Pinjaman yang diterima	-	-	-	6.337.260	400.000	6.737.260
Bunga yang masih harus dibayar	-	-	-	-	193.280	193.280
Liabilitas lain-lain***)	-	-	-	-	1.490.302	1.490.302
Total liabilitas keuangan	35.602.773	-	-	55.783.312	8.963.924	100.350.009
Gap repricing suku bunga-kotor	(19.433.865)	5.532.396	55.893.983	(32.956.430)	1.387.479	10.423.563

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga.

**) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

***) Terdiri dari setoran jaminan dan dana jaminan pengembang.

Analisis sensitivitas untuk beberapa faktor pasar menunjukkan bagaimana laba atau rugi dan ekuitas dapat dipengaruhi oleh perubahan dari beberapa faktor risiko sesuai dengan tabel dibawah ini. Secara umum, sensitivitas diestimasi dengan membandingkan suatu nilai awal ke nilai tertentu setelah perubahan tertentu dari faktor pasar, dengan mengasumsikan seluruh variabel lainnya tetap. Sensitivitas atas laporan laba rugi komprehensif merupakan efek atas perubahan estimasi suku bunga atas laba rugi untuk suatu periode, berdasarkan nilai suku bunga mengambang atas aset dan liabilitas yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan yang dimiliki Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Analisis sensitivitas atas ekuitas dihitung dengan menilai kembali perubahan estimasi suku bunga tetap atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Jumlah sensitivitas atas ekuitas didasarkan pada asumsi bahwa terdapat perubahan paralel dalam kurva imbal hasil.

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

i. Interest rate risk (continued)

The tables below summarize the Bank's exposure to interest rate risk (gross) (unaudited) (continued):

31, 2012

bunga tap/ xed est rate	Tidak dikenakan bunga/syariah Non-interest bearing/sharia	Total
-	1.082.705	1.082.705
-	760.694	13.271.227
132.515	661.002	21.540.425
521.575	4.334.756	45.856.331
655.186	41.185	706.703
7.136.776	-	7.136.776
-	-	2.335.000
6.337.260	400.000	6.737.260
-	193.280	193.280
-	1.490.302	1.490.302
5.783.312	8.963.924	100.350.009
(2.956.430)	1.387.479	10.423.563

Financial Liabilities

Current liabilities**)

Deposits from customers

Demand deposits

Savings deposits

Time deposits

Deposits from other banks

Securities issued

Securities sold under repurchase agreements

Fund Borrowings

Interest payables

Other liabilities***)

Total financial liabilities

Gross interest repricing gap

*) Consists of third party receivables.

**) Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.

***) Consists of guarantee deposits and developers' security deposits.

Sensitivity analyses for several market factors showing how profit or loss and equity could be affected by changes in the relevant risk factor are shown in the tables below. In general, sensitivity is estimated by comparing an initial value to the value derived after a specified change in the market factor, assuming all other variables are constant. The sensitivity of the statement of comprehensive income is the effect of the assumed changes in interest rates on the profit or loss for a period, based on the variable rate trading and non-trading financial assets and liabilities held by the Bank as of December 31, 2014, 2013 and 2012. The sensitivity of equity is calculated by revaluing fixed rate available-for-sale financial assets as of December 31, 2014, 2013 and 2012 for the effects of the assumed changes in interest rates. The total sensitivity of equity is based on the assumption that there are parallel shifts in the yield curve.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi komprehensif dan ekuitas Bank terhadap kemungkinan perubahan wajar atas suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga tetap (tidak diaudit) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012:

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

i. Interest rate risk (continued)

The tables below demonstrate the sensitivity of the Bank's statement of comprehensive income and equity to reasonably possible changes in interest rates for fixed rate financial assets and liabilities (unaudited) as of December 31, 2014, 2013, and 2012:

2014			
	Perubahan basis poin/Change in basis point	Dampak ke laporan laba rugi komprehensif/ Impact to Statement of Comprehensive Income	Dampak ke ekuitas/ Impact to Equity
Rupiah	+50	(522)	(20.810)
	-50	523	22.215
	+125	(1.302)	(49.627)
	-125	1.309	58.432
Dollar Amerika Serikat	+50	-	-
	-50	-	-
	+125	-	-
	-125	-	-
2013			
	Perubahan basis poin/Change in basis point	Dampak ke laporan laba rugi komprehensif/ Impact to Statement of Comprehensive Income	Dampak ke ekuitas/ Impact to Equity
Rupiah	+50	(8.696)	(18.700)
	-50	9.206	20.023
	+125	(20.852)	(44.378)
	-125	24.051	52.673
Dollar Amerika Serikat	+50	(3.109)	-
	-50	3.380	-
	+125	(7.327)	-
	-125	9.028	-
2012			
	Perubahan basis poin/Change in basis point	Dampak ke laporan laba rugi komprehensif/ Impact to Statement of Comprehensive Income	Dampak ke ekuitas/ Impact to Equity
Rupiah	+50	(943)	(2.569)
	-50	1.001	2.842
	+125	(2.258)	(5.978)
	-125	2.624	7.697
Dollar Amerika Serikat	+50	(3.109)	-
	-50	3.380	-
	+125	(7.327)	-
	-125	9.028	-

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi terhadap kemungkinan perubahan wajar atas suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga variable (tidak diaudit) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012:

2014		Pengaruh ke laporan laba rugi komprehensif/ Impact to Statement of comprehensive income	
Perubahan basis poin/ Change in basis point			
Rupiah	±50	±107.105	Rupiah
	±125	±267.764	
2013		Pengaruh ke laporan laba rugi komprehensif/ Impact to Statement of comprehensive income	
Perubahan basis poin/ Change in basis point			
Rupiah	±50	±120.290	Rupiah
	±125	±300.725	
2012		Pengaruh ke laporan laba rugi komprehensif/ Impact to Statement of comprehensive income	
Perubahan basis poin/ Change in basis point			
Rupiah	±50	±349.750	Rupiah
	±125	±874.375	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

ii. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar adalah kemungkinan kerugian yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Bank mengelola paparan terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar dengan Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan OJK.

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

ii. Exchange rate risk

Exchange rate risk is the probability of loss to earnings arising from changes in foreign exchange rates. The Bank manages exposure to effects of fluctuations in exchange rates with Net Open Position based on OJK regulations.

2014		
	Perubahan persentase nilai tukar mata uang asing/ Percentage change in foreign currency rate	Pengaruh ke laporan laba rugi komprehensif/ Impact to Statement of comprehensive income
Dolar Amerika Serikat	±0,30%	±232
	±0,35%	±270
2013		
	Perubahan persentase nilai tukar mata uang asing/ Percentage change in foreign currency rate	Pengaruh ke laporan laba rugi komprehensif/ Impact to Statement of comprehensive income
Dolar Amerika Serikat	±0,30%	±368
	±0,35%	±430
2012		
	Perubahan persentase nilai tukar mata uang asing/ Percentage change in foreign currency rate	Pengaruh ke laporan laba rugi komprehensif/ Impact to Statement of comprehensive income
Dolar Amerika Serikat	±0,30%	±114
	±0,35%	±133

Sensitivitas atas laporan laba rugi komprehensif merupakan dampak yang diestimasi atas perubahan yang diasumsikan atas perubahan nilai tukar berdasarkan aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing.

The sensitivity of the statement of comprehensive income is the estimated effect of the assumed change in foreign currency exchange rates on income, based on foreign currency denominated assets and liabilities.

Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, dampak atas perubahan nilai tukar mata uang lainnya seperti Pound Sterling Inggris, Euro Eropa, Yen Jepang, Dolar Singapura, Dolar Australia dan Dolar Hongkong tidak material.

As of December 31, 2014, 2013 and 2012, the effect of fluctuations in exchange rates of other currencies, such as British Pound Sterling, European Euro, Japanese Yen, Singapore Dollar, Australian Dollar and Hongkong Dollar, is not material.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Risiko Operasional yang timbul harus segera diantisipasi. Pencadangan modal yang dilakukan Bank dihitung berdasarkan kebutuhan modal minimum (CAR) merupakan salah satu langkah antisipasi agar eksposur Risiko Operasional tidak sampai mengganggu permodalan.

Dalam rangka menghitung kebutuhan modal minimum (CAR) untuk risiko operasional, Bank menerapkan Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*), sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan Aset tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional Dihitung dengan Pendekatan Indikator Dasar (PID).

Dalam pemantauan risiko operasional, fungsi *Internal Audit* melaksanakan penilaian terhadap implementasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko pada setiap aktivitas fungsional, produk atau layanan baru dan *Risk Management Division (RMD)* berfungsi memastikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko berjalan dengan efektif pada setiap aktivitas fungsional, produk atau layanan baru.

Dalam rangka melakukan proses identifikasi risiko, saat ini Bank sedang mengembangkan aplikasi *BTN Loss Event Database (BTN-LED)*. Aplikasi BTN LED ini dirancang terhubung dengan Kantor Wilayah dan Kantor Cabang. Dengan demikian Kantor Wilayah dan Kantor Cabang dapat secara periodik mengirimkan data *loss event* masing-masing kantor secara *online* melalui media *web* (*web based*).

Data yang terkumpul selanjutnya akan diolah dan dianalisis. Dari hasil pengolahan dan analisis tersebut diharapkan akan teridentifikasi peta eksposur risiko yang diperoleh, selanjutnya akan dilakukan langkah mitigasi terhadap eksposur risiko yang teridentifikasi tersebut.

Pengendalian dan mitigasi risiko operasional dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja Bank. *Risk Management Division* bertugas untuk memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian dan mitigasi risiko operasional yang memadai yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu.

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Operational Risk

Operational risk is a risk arising from the inadequacy and/or failure of internal processes, human error, system failure, and/or the presence of external events that can affect the operations of the Bank.

Operational risk arising should be anticipated. Provision of capital held by bank is calculated based on minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) which is one of anticipatory measures in order the operational risk exposure not interfere Bank's capital structure.

In order to calculate the minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) for operational risk, the Bank applies the Basic Indicator Approach, in accordance with Bank Indonesia Circular Letter No. 11/3/DPNP dated January 27, 2009 regarding the calculation of Risk Weighted Assets (RWA) for Operational Risk Calculated using Basic Indicator Approach (PID).

In monitoring operational risk, Internal Audit performs an assessment of the implementation of risk management policies and procedures at each functional activity, product or new service and the RMD also ensures that the identification, measurement, monitoring and risk control, work effectively on any functional activity, product or new services.

In order to make the process of identifying risks, the Bank is currently developing applications BTN Loss Event Database (BTN-LED). The application of LED was designed BTN connected with regional offices and branch offices. Thus regional offices and branch offices can periodically send data loss event each office online through media web (web based).

The Data collected will be processed and analyzed. Processing and analysis of the results are expected to be identified as a risk exposure maps are obtained, further mitigation measures will be performed against the identified risk exposures.

Controlling and mitigating operational risk is conducted by risk taking units within the Bank. The Risk Management Division ensures that the Bank has adequate policies and procedures, which must be complied and carried out by each risk taking unit in conducting its daily transactions and activities accurately, efficiently and in a timely manner.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Hukum

Bank melaksanakan identifikasi risiko hukum berdasarkan faktor-faktor penyebab timbulnya risiko yang meliputi tuntutan hukum, tidak adanya peraturan atau regulasi yang mendukung dan kelemahan perjanjian atau perikatan. Di samping itu, setiap divisi bersama-sama dengan *Risk Management Division* dan *Legal Division* secara berkala menganalisis dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur risiko hukum.

Pengukuran risiko hukum dilaksanakan oleh *Risk Management Division* bersama-sama *Legal Division* berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap liabilitas kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

Pemantauan risiko hukum dilaksanakan oleh *Legal Division* untuk mengevaluasi efektivitas dari implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Bank. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi risiko hukum.

Dalam melaksanakan pengendalian risiko hukum, *Legal Division* memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan *review* secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan *counterparty*.

Risiko Reputasi

Identifikasi risiko reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan (*disclosure requirement*), keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank, perilaku karyawan Bank dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi Bank.

Pengukuran risiko reputasi dilakukan berdasarkan hasil *assessment* terhadap faktor-faktor risiko reputasi. Risiko reputasi Bank dikelola oleh *Corporate Secretary Division* (CSD) dan dilaporkan ke Bank Indonesia oleh *Customer Care Division* (CCD).

Dalam rangka pemantauan risiko reputasi, dikembangkan aplikasi Sistem Pengaduan Nasabah (SPN) untuk mendukung layanan dan penanganan pengaduan nasabah yang memungkinkan proses penanganan pengaduan secara *online* antar pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan di Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Hal ini berguna untuk memastikan terjaganya kepuasan nasabah.

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Legal Risk

The Bank identifies legal risk based on its causes which include legal litigation, absence of support in policy or regulation and weak agreement or engagement. At the same time, each division together with Risk Management Division and Legal Division, analyzes periodically the impact of changes in certain rules and regulations on the Bank's legal risk exposures.

Legal risk measurement is conducted together by Risk Management Division and Legal Division based on the evaluation report resulting from the analysis of individual legal cases on contingent liabilities arising from legal litigation.

Legal risk monitoring is conducted by Legal Division to evaluate the effectiveness of policies, procedures and compliance with the Bank's policies and prevailing laws and regulations. Periodic monitoring is conducted on all legal risk exposures.

To mitigate legal risk, Legal Division provides legal advice and recommendation to each division and risk taking units and also conducts a regular review of agreements and partnership contracts with counterparties.

Reputational Risk

Reputational risk is identified on inherent risk factors associated to functional activities including disclosure requirements, customer complaints against the Bank, employee attitude when providing services to customers and the Bank's communication systems.

Reputation risk measurement is based on the results of assessment on the reputation risk factors. Bank reputation risk is managed by CSD and being reported to Bank Indonesia by Customer Care Division (CCD).

In order to monitor reputational risk, the Bank developed an application called Customer Complaint System (NES) to support customer service and complaint handling that allows online complaints handling process between the parties related to the issues at branch offices and head office. This will be useful to ensure sustained customer satisfaction.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Reputasi (lanjutan)

Dalam pengendalian risiko reputasi, satuan kerja yang berfungsi sebagai *corporate secretary* bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian berita negatif atau menghindari informasi kontra produktif serta untuk menjalankan fungsi *Public Service Obligation* (PSO) dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Kegiatan *Corporate Social Responsibility* tidak terfokus kepada kegiatan *charity* saja, tetapi juga dalam bentuk program yang berkesinambungan. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian kredit subsidi dan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Risiko Strategik

Risiko Strategik merupakan risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasury dan investasi, serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh *Strategy and Performance Management Division* (SPMD) sebagaimana yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Pengukuran Risiko Strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Pemantauan risiko strategik dilakukan oleh SPMD secara berkala dengan memonitor pencapaian *Key Performance Indicator* dan *risk exposure* dibandingkan dengan *risk appetite* bank.

Selanjutnya, Dewan Komisaris, Direksi, Divisi dan Kantor Cabang mereview strategi dasar yang fokus pada perubahan-perubahan antara lain struktur organisasi Bank, perkreditan komersial, pembiayaan perdagangan, treasury, operasional dan kekuatan serta kelemahan sistem teknologi informasi.

Dalam pengendalian risiko strategik, *Strategy & Performance Management Division* (SPMD) berfungsi menganalisa laporan aktual dan target rencana bisnis dan menyampaikannya kepada Direksi secara berkala.

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Reputational Risk (continued)

CSD is responsible for implementing policies related to managing and settling negative issues or avoiding counter-productive information and performs the *Public Service Obligation* (PSO) function in connection with carrying out corporate social responsibility.

Corporate Social Responsibility is not focused only on charity, but also in the form of a sustainable program. This can be realized in the form of credit subsidies and implementation of the Partnership and Community Development Program (PCDP).

Strategic Risk

Strategic risk is the risk arising from the inaccuracies in the decision making and/or the execution of a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment. Strategic Risk identification is based on the strategic risk factors on specific functional activities, such as lending, treasury and investment activities, as well as operations and services through a business plan prepared by the Strategy and Performance Management Division (SPMD) as elaborated in the General Policy of the BOD.

Strategic risk and parameter measurement are based on the Bank's performance by comparing actual results with targets that have been set. Strategic risk monitoring is carried out by SPMD periodically to monitor the achievement of Key Performance Indicator and risk exposure compared to the Bank's risk appetite.

Furthermore, the BOC, BOD, Divisions and Branch Offices are reviewing the basic strategy that focuses on changes in among others, the organizational structure of the Bank, commercial lending, trade finance, treasury, operations and the strengths and weaknesses of information technology systems.

In controlling strategic risk, the Strategy & Performance Management Division (SPMD) analyzes actual results against target and periodically reports to the BOD.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam mengidentifikasi risiko kepatuhan, *Compliance Division* (CMPD) melakukan kajian terkait dengan eksposur Risiko Kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang melekat pada ketentuan internal. Di samping itu, CMPD menganalisis kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dan menginformasikan hal tersebut ke RMD dan RMC untuk direviu.

Dalam rangka meminimalkan timbulnya Risiko Kepatuhan, *Legal Division* (LGD) telah menyediakan portal khusus yang bernama Akses Internal Manajemen Standar (AIMS) untuk memudahkan seluruh unit bisnis melakukan akses terhadap ketentuan internal Bank. Di samping itu, *Compliance Division* melakukan monitoring terhadap kejadian-kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dan menginformasikan hal tersebut ke RMD.

Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan ini termasuk mereview semua penalti, litigasi, dan keluhan yang pernah diterima Bank.

Dalam pemantauan risiko kepatuhan, RMD dan CMPD bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen risiko dengan memantau secara berkala seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan.

Secara berkala, IAD melakukan pemantauan terhadap hasil tindak lanjut audit baik dari intern maupun ekstern. BRO memastikan bahwa kantor cabang telah menyelesaikan temuan/hasil pemeriksaan tersebut.

43. RISK MANAGEMENT (continued)

Compliance Risk

Compliance risk is the risk arising from the Bank's inability to comply and/or carry out laws and regulations. In identifying compliance risks, Compliance Division (CMPD) conducts a review regarding compliance risk associated with exposure to external provision inherent in internal regulations. In addition, CMPD analyzes the events that led to the emergence of risk, which are reported to and reviewed by RMD and RMC.

In order to minimize the Compliance Risk, Legal Division (LGD) has provided a special access called Internal Access Management Standards (AIMS) for easy access to the internal regulations of the Bank for the entire business units. In addition, CMPD monitors the events that contributed to compliance risk and reports these matters to RMD.

Compliance risk is assessed by measuring the potential loss caused by the Bank's non-compliance or inability to comply with prevailing regulations. The level of compliance risk is estimated based on the Bank's ability to comply with prevailing and upcoming regulations. These activities include reviewing all penalties, litigations and complaints received by the Bank.

In monitoring compliance risk, RMD and CMPD are responsible to evaluate the effectiveness of the implementation of risk management by monitoring regularly all kinds of activities that could potentially pose a compliance risk.

Periodically, IAD monitors and follow-up results of both internal and external audits. BRO ensures that the branch offices have completed the findings/results of the related audit.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

44. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

44. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The table below summarizes the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities of the Bank. The fair values disclosed are based on relevant information available as of December 31, 2014, 2013 and 2012, and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after these dates.

	31 Desember/ December 31, 2014		31 Desember/ December 31, 2013		31 Desember/ December 31, 2012		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai wajar/ Fair value	
<u>Aset Keuangan</u>							<u>Financial Assets</u>
Kas	920.482	920.482	924.451	924.451	694.941	694.941	Cash
Nilai wajar melalui laba rugi							Fair value through profit or loss
Efek-efek	148.588	148.588	2.096.633	2.096.633	429.261	429.261	Securities
Obligasi Pemerintah	591.732	591.732	696.747	696.747	45.748	45.748	Government bonds
Tersedia untuk dijual							Available for sale
Efek-efek	4.848.414	4.848.414	1.841.538	1.841.538	250.630	250.630	Securities
Obligasi Pemerintah	5.994.262	5.994.262	5.990.887	5.990.887	5.772.688	5.772.688	Government bonds
Dimiliki hingga jatuh tempo							Held to maturity
Efek-efek	439.968	442.410	263.511	272.361	333.905	353.436	Securities
Obligasi Pemerintah	1.652.071	1.596.638	1.697.326	1.693.894	1.650.494	1.662.537	Government bonds
Kredit yang diberikan dan piutang							Loans and Receivable
Giro pada Bank Indonesia	9.371.509	9.371.509	9.858.758	9.858.758	7.297.835	7.297.835	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	1.093.393	1.093.393	400.215	400.215	161.993	161.993	Current accounts with other Bank
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	1.496.455	1.496.455	4.839.268	4.839.268	11.466.296	11.466.296	Placements with Bank Indonesia and other Banks
Kredit yang diberikan dan Piutang Syariah							Loans and sharia financing/receivables
Konsumer	79.789.264	79.789.264	67.899.625	67.899.625	54.760.814	54.760.814	Konsumer
Pemilikan rumah	9.853.366	9.853.366	8.587.130	8.587.130	7.193.747	7.193.747	Housing loan
Non-kepemilikan Rumah	19.885.044	19.885.044	18.247.771	18.247.771	14.887.603	14.887.603	Non-housing loan
Modal kerja	4.188.597	4.188.597	3.952.243	3.952.243	3.249.498	3.249.498	Working capital
Investasi	76.966	76.966	62.709	62.709	28.047	28.047	Investment
Sindikasi	545.989	545.989	580.736	580.736	310.340	310.340	Syndicated
Direksi dan karyawan	1.183.489	1.183.489	923.688	923.688	871.985	871.985	Directors and employees
Bunga yang masih akan diterima	565.705	565.705	355.942	355.942	370.464	370.464	Interest receivable
Aset lain-lain*)							Other assets*)
Total aset keuangan	142.645.294	142.592.303	129.219.178	129.224.596	109.776.289	109.807.863	Total financial assets
<u>Liabilitas Keuangan</u>							<u>Financial Liabilities</u>
Liabilitas segera**)	1.638.831	1.638.831	1.161.447	1.161.447	1.082.705	1.082.705	Current liabilities**) Deposits from customers
Simpanan nasabah							Demand deposits
Giro	23.422.618	23.422.618	19.116.196	19.116.196	13.271.227	13.271.227	Savings deposits
Tabungan	26.167.914	26.167.914	24.237.893	24.237.893	21.540.425	21.540.425	Time deposits
Deposito Berjangka	56.880.145	56.880.145	52.853.533	52.853.533	45.856.331	45.856.331	Deposits from other banks
Simpanan dari Bank Lain							Demand deposits
Giro	13.472	13.472	14.065	14.065	10.332	10.332	Savings deposits
Tabungan	2.680	2.680	1.914	1.914	7.477	7.477	Time deposits
Deposito Berjangka	1.163.117	1.163.117	259.278	259.278	688.894	688.894	Securities sold under repurchase agreements
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.817.603	3.817.603	2.652.730	2.652.730	2.335.000	2.335.000	Securities issued
Surat berharga yang diterbitkan	8.519.884	8.110.974	8.836.711	9.011.338	7.136.776	7.136.776	Fund Borrowings
Pinjaman yang diterima	6.998.213	6.998.213	7.073.032	7.073.032	6.737.260	6.737.260	Interest payables
Bunga yang masih harus dibayar	308.996	308.996	241.370	241.370	193.280	193.280	Other liabilities***)
Liabilitas lain-lain***)	2.280.158	2.280.158	1.931.789	1.931.789	1.490.302	1.490.302	
Total liabilitas keuangan	131.213.631	130.804.721	118.379.958	118.554.585	100.350.009	100.350.009	Total financial liabilities

*) Terdiri dari tagihan pihak ketiga.

**) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

***) Terdiri dari setoran jaminan dan dana jaminan pengembang.

*) Consists of third party receivables.

**) Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.

***) Consists of guarantee deposits and developers' security deposits.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

44. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

- (i) Tingkat 1: dikutip dari harga pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
- (ii) Tingkat 2: yang melibatkan input selain dari harga pasar aktif yang dikutip yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (seperti harga) atau tidak langsung (turunan dari harga);
- (iii) Tingkat 3: input untuk aset dan liabilitas yang tidak didasarkan pada data yang dapat diobservasi di pasar (input yang tidak dapat diobservasi).

44. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The tables below show the financial instruments recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments:

- (i) Level 1: quoted (unadjusted) prices in active markets for identical financial assets or liabilities;
- (ii) Level 2: those involving inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices);
- (iii) Level 3: those with inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

31 Desember/December 31, 2014					
	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	Total	
Aset Keuangan					Financial Assets
Nilai wajar melalui laba rugi					Fair value through profit or loss
Efek-efek	148.588	-	-	148.588	Securities
Obligasi Pemerintah	591.732	-	-	591.732	Government bonds
Total nilai wajar melalui laporan laba rugi	740.320	-	-	740.320	Total fair value through profit or loss
Tersedia untuk dijual					Available-for-sale
Efek-efek	4.853.584	-	-	4.853.584	Securities
Obligasi Pemerintah	5.994.262	-	-	5.994.262	Government bonds
Total tersedia untuk dijual	10.847.846	-	-	10.847.846	Total available-for-sale investments

31 Desember/December 31, 2013					
	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	Total	
Aset Keuangan					Financial Assets
Nilai wajar melalui laba rugi					Fair value through profit or loss
Efek-efek	2.096.633	-	-	2.096.633	Securities
Obligasi Pemerintah	696.747	-	-	696.747	Government bonds
Total nilai wajar melalui laporan laba rugi	2.793.380	-	-	2.793.380	Total fair value through profit or loss
Tersedia untuk dijual					Available-for-sale
Efek-efek	1.846.575	-	-	1.846.575	Securities
Obligasi Pemerintah	5.990.887	-	-	5.990.887	Government bonds
Total tersedia untuk dijual	7.837.462	-	-	7.837.462	Total available-for-sale investments

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

44. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan (lanjutan):

31 Desember/December 31, 2012					
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Total	
Aset Keuangan					Financial Assets
Nilai wajar melalui laporan laba rugi					Fair value through profit or loss
Efek-efek	429.261	-	-	429.261	Securities
Obligasi Pemerintah	45.748	-	-	45.748	Government bonds
Total nilai wajar melalui laporan laba rugi	475.009	-	-	475.009	Total fair value through profit or loss
Tersedia untuk dijual					Available-for-sale
Efek-efek	255.648	-	-	255.648	Securities
Obligasi Pemerintah	5.772.688	-	-	5.772.688	Government bonds
Total tersedia untuk dijual	6.028.336	-	-	6.028.336	Total available-for-sale investments

- a. Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan tertentu, kecuali efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo, kredit yang diberikan, pinjaman yang diterima, dan surat berharga yang diterbitkan, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

Estimasi nilai wajar terhadap aset keuangan tertentu ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

Estimasi nilai wajar terhadap kewajiban keuangan tertentu yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

- b. Kredit yang diberikan

Portofolio kredit Bank secara umum terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan kredit yang diberikan dengan jangka pendek dengan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan *amortized cost*. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank dengan menggunakan suku bunga pasar saat ini.

Nilai tercatat dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan nilai tercatat atas kredit jangka pendek dengan suku bunga tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

44. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The tables below show the financial instruments recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments (continued):

- a. The fair values of certain financial assets and liabilities, except for securities and Government Bonds classified as held to maturity, loans, fund borrowings, and marketable securities issued approximate their carrying values due to their short-term maturities.

The estimated fair values of certain financial assets are determined based on discounted cash flows using money market interest rates for instruments with similar credit risk and remaining maturities.

The estimated fair values of certain financial obligations which are not quoted in an active market are determined based on discounted cash flows using interest rates of instruments with similar remaining maturities.

- b. Loans

Generally, the Bank's portfolio consists of loans with variable interest rate and short-term loans with fixed interest rate. Loans are stated at amortized cost. The estimated fair value of loans represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received by the Bank using the current market rates.

The carrying amounts of variable rate loans and short-term fixed rate loans are the reasonable approximation of their fair values.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

44. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

c. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah

Nilai wajar untuk surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker)/pedagang efek (dealer). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian internal.

d. Surat-surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima

Nilai wajar agregat berdasarkan model diskonto arus kas menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk sisa periode jatuh temponya.

44. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

c. Securities and Government Bonds

The fair values of held-to-maturity marketable securities and Government Bonds are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation model.

d. Securities issued and fund borrowings

The aggregate fair values are based on discounted cash flow model using current market rate for the remaining term to maturity.

45. LABA PER SAHAM

Rekonsiliasi faktor-faktor penentu perhitungan laba per saham dasar dan dilusi untuk tahun yang berakhir tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, adalah sebagai berikut:

45. EARNINGS PER SHARE

The reconciliation of the factors used in calculating the basic and diluted earnings per share, for the years ended December 31, 2014, 2013, and 2012, are as follows:

	31 Desember/ December, 31 2014		
(i) Laba tahun berjalan	1.115.592	(a)	Income for the year (i)
(ii) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	10.566.112.074	(b)	Weighted average number of shares outstanding (ii)
(iii) Laba per saham dasar	106	(a/b)	Basic earnings per share (iii)
(iv) Dampak dilusi dari MESOP I	335.539	(c)	Effects of dilution from: (iv) MESOP I
MESOP II	-		MESOP II
MESOP III	117.164		MESOP III
(v) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar setelah dilusi	10.566.564.777	(d = b + c)	Weighted average number of shares outstanding after dilution (v)
(vi) Laba per saham dilusi	106	(a/d)	Diluted earning per share (vi)
	31 Desember/ December, 31 2013		
(i) Laba tahun berjalan	1.562.161	(a)	Income for the year (i)
(ii) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	10.532.278.548	(b)	Weighted average number of shares outstanding (ii)
(iii) Laba per saham dasar	148	(a/b)	Basic earnings per share (iii)
(iv) Dampak dilusi dari MESOP I	1.351.893	(c)	Effects of dilution from: (iv) MESOP I
MESOP II	-		MESOP II
MESOP III	2.838.632		MESOP III
(v) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar setelah dilusi	10.536.469.073	(d = b + c)	Weighted average number of shares outstanding after dilution (v)
(vi) Laba per saham dilusi	148	(a/d)	Diluted earning per share (vi)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

45. LABA PER SAHAM (lanjutan)

Rekonsiliasi faktor-faktor penentu perhitungan laba per saham dasar dan dilusi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember/ December, 31 2012
(i) Laba tahun berjalan	1.363.962
(ii) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	9.235.378.989
(iii) Laba per saham dasar	148
(iv) Dampak dilusi dari MESOP I	6.680.572
MESOP II	2.891.858
MESOP III	17.602.407
(v) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar setelah dilusi	9.262.553.826
(vi) Laba per saham dilusi	147

45. EARNINGS PER SHARE (continued)

The reconciliation of the factors used in calculating the basic and diluted earnings per share, for the years ended December 31, 2014, 2013, and 2012, are as follows (continued):

(a)	Income for the year	(i)
(b)	Weighted average	(ii)
(a/b)	number of shares outstanding	
	Basic earnings per share	(iii)
(c)	Effects of dilution from:	(iv)
	MESOP I	
	MESOP II	
	MESOP III	
(d = b + c)	Weighted average number of	(v)
(a/d)	shares outstanding after dilution	
	Diluted earning per share	(vi)

46. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN

a. Perjanjian Signifikan

Pada tanggal 24 September 2014, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Wincor Nixdorf Indonesia sehubungan dengan pengadaan Jasa Pengelolaan Terminal Layanan Mandiri (jasa pengisian ATM) sejumlah 370 unit untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp20.335.

Pada tanggal 27 September 2013, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Sigma Cipta Caraka sehubungan dengan pengadaan sewa 500 Unit Mesin ATM untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp71.100.

Pada tanggal 15 Februari 2013, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Mastersystem Infotama sehubungan dengan pengadaan Lisensi Produk Microsoft dengan nilai kontrak sebesar ASD2.350.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 10 September 2012, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Binareka Tatamandiri sehubungan dengan pengadaan upgrade hardware dan backup core banking dengan nilai kontrak sebesar Rp19.350.

Pada tanggal 10 September 2012, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Sigma Cipta Caraka sehubungan dengan pengadaan sewa 262 unit mesin ATM untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp30.625.

46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTINGENCIES

a. Significant Agreements

On September 24, 2014, Bank signed an agreement with PT Wincor Nixdorf Indonesia in relation to provide "Self Service Terminal Management" (replenishment ATM Services) amounted to 370 units for 2 (two) years period with a contract value amounted to Rp20,335.

On September 27, 2013, Bank signed an agreement with PT Sigma Cipta Caraka in relation to provide 500 units ATM machines for 5 (five) years period with a contract value amounted to Rp71,100.

On February 15, 2013, Bank signed an agreement with PT Mastersystem Infotama in relation to provide Microsot License products with a contract value amounted to USD2,350,000 (full amount).

On September 10, 2012, Bank signed an agreement with PT Binareka Tatamandiri to upgrade hardware and core banking backup with a contract value amounted to Rp19,350.

On September 10, 2012, Bank signed an agreement with PT Sigma Cipta Caraka to provide 262 units ATM machine for 5 (five) years with a contract value amounted to Rp30,625.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

b. Liabilitas Kontinjensi

Dalam melakukan usahanya, Bank menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan dimana Bank sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, Bank berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, Bank telah membentuk cadangan (disajikan dalam akun "Liabilitas Imbalan Kerja dan Lain-lain") untuk sejumlah tuntutan hukum yang belum diputuskan masing-masing adalah sebesar Rp4.232, Rp1.950, dan Rp1.950 (Catatan 24). Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat tuntutan hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai.

**46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

b. Contingent Liabilities

In conducting its business, Bank is a defendant with various litigation proceedings and legal claims mainly with respect to matters of contractual compliance. Although there is no clear assurance yet, Bank believes that based on information currently available, the ultimate resolution of these legal proceedings and legal claims will not likely have a material effect on the operations, financial position or liquidity level of Bank.

As of December 31, 2014, 2013, and 2012, Bank has established an allowance (included in "Employee Benefits and Other Liabilities") for several pending lawsuits filed against Bank amounted to Rp4,232, Rp1,950, and Rp1,950, respectively (Note 24). Management believes that the allowance is adequate to cover possible losses arising from pending litigations or legal claims that are currently in progress.

**47. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN YANG DIKELUARKAN DAN
DIREVISI**

Berikut ini ikhtisar PSAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - IAI yang relevan untuk Bank, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan 31 Desember 2014:

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal
1 Januari 2015:**

- a. PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan", yang diadopsi dari IAS 1, mengatur perubahan penyajian kelompok pos-pos dalam Penghasilan Komprehensif Lain. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi disajikan terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.
- b. PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang diadopsi dari IAS 19, yang menghapus mekanisme koridor dan pengungkapan atas informasi liabilitas kontinjensi untuk menyederhanakan klarifikasi dan pengungkapan.

**47. REVISED AND ISSUED STATEMENTS OF
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS**

The following summarizes the SFAS which were issued by the Financial Accounting Standards Board (FASB) and are relevant to the Bank, but not yet effective to the Bank on financial statements as of December 31, 2014:

Effective on or after January 1, 2015:

- a. SFAS No. 1 (Revised 2013), "Presentation of Financial Statement", adopted from IAS 1, which regulates the amendments presentation to group items of Other Comprehensive Income. Items which reclassified to income statement are presented separately from items not reclassified to income statement.
- b. SFAS No. 24 (Revised 2013), "Employee Benefits", adopted from IAS 19, which eliminates corridor approach and disclosure about contingent liability information to simplify clarification and disclosure.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**47. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN YANG DIKELUARKAN DAN
DIREVISI (lanjutan)**

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal
1 Januari 2015 (lanjutan):**

- c. PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan", yang diadopsi dari IAS 12. PSAK ini memberikan tambahan pengaturan untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari aset yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi, dan yang berasal dari properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar.
- d. PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset", yang diadopsi dari IAS 36. PSAK ini memberikan tambahan persyaratan pengungkapan untuk setiap aset individual atau unit penghasil kas yang mana cadangan kerugian penurunan nilai telah diakui atau dibalik selama periode.
- e. PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", yang diadopsi dari IAS 32. PSAK ini mengatur lebih dalam kriteria mengenai hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan kriteria penyelesaian secara neto.
- f. PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang diadopsi dari IAS 39. PSAK ini, antara lain, menambah pengaturan kriteria instrumen lindung nilai yang tidak dapat dianggap telah kedaluarsa atau telah dihentikan, serta ketentuan untuk mencatat instrumen keuangan pada tanggal pengukuran dan pada tanggal setelah pengakuan awal.
- g. PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", yang diadopsi dari IFRS 7. PSAK ini, antara lain, menambah pengaturan pengungkapan saling hapus dengan informasi kuantitatif dan kualitatif, serta pengungkapan mengenai pengalihan instrumen keuangan.
- h. PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar", yang diadopsi dari IFRS 13, memberikan panduan tentang bagaimana pengukuran nilai wajar ketika nilai wajar disyaratkan atau diizinkan.

Penerapan dini sebelum 1 Januari 2015 tidak diijinkan. Saat ini Bank sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari PSAK yang dikeluarkan tersebut terhadap laporan keuangan.

**47. REVISED AND ISSUED STATEMENTS OF
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS
(continued)**

**Effective on or after January 1, 2015
(continued):**

- c. SFAS No. 46 (Revised 2014), "Income Taxes", adopted from IAS 12. This SFAS now provides additional provision for deferred tax asset or deferred tax liability arises from a non-depreciable asset measured using the revaluation model, and those arises from investment property that is measured using the fair value model.
- d. SFAS No. 48 (Revised 2014), "Impairment of Assets", adopted from IAS 36. This SFAS provides additional disclosure terms for each individual asset (including goodwill) or a cash-generating unit, for which an allowance for impairment loss has been recognized or reversed during the period.
- e. SFAS No. 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation", adopted from IAS 32. This SFAS provides deeper about criterion on legally enforceable right to set off the recognized amounts and criterion to settle on a net basis.
- f. SFAS No. 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", adopted from IAS 39. This SFAS, among other, provides additional provision for the criteria of not an expiration or termination of the hedging instrument, and provision to account financial instruments at the measurement date and after initial recognition.
- g. SFAS No. 60 (Revised 2014), "Financial Instruments: Disclosures", adopted from IFRS 7. This SFAS, among other, provides additional provision on offsetting disclosures with quantitative and qualitative information, and disclosures on transfers of financial instruments.
- h. SFAS No. 68, "Fair Value Measurement", adopted from IFRS 13, provides guidance on how to determine fair value and requires disclosures about fair value measurement.

Early implimentation before January 1, 2015 are not permitted. The Bank is currently evaluating and has not yet determined the impact of these issued SFAS on its financial statements.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2014, 2013 and 2012
and for the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

48. INFORMASI TAMBAHAN

- a. Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, rasio aset produktif yang diklasifikasikan *non-performing* terhadap jumlah aset produktif (*non-performing ratio*) masing-masing adalah sebesar 3,57%, 3,60%, dan 3,68%.
- b. Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, Rasio jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan yang telah dibentuk berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2011) terhadap jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan sesuai ketentuan Bank Indonesia masing-masing sebesar 63,68%, 54,69%, dan 71,93%.

48. ADDITIONAL INFORMATION

- a. As of December 31, 2014 and 2013, the Bank's non-performing assets to total earning assets ratios are 3.57%, 3.60%, and 3.68%, respectively.
- b. As of December 31, 2014, 2013, and 2012, the ratio of allowance for impairment losses on financial assets based on PSAK No. 55 (Revised 2011) to minimum allowance for impairment losses based on Bank Indonesia regulation is 63.68%, 54.69%, and 71.93%, respectively.

49. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Pada bulan Januari 2015 dan April 2015, terdapat efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali yang telah jatuh tempo masing-masing sebesar Rp483.219 dan Rp650.000. Bank telah melunasi seluruh kewajiban saat jatuh tempo transaksi tersebut.

49. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

In January 2015 and April 2015, there are securities sold under repurchase agreement which have matured amounting to Rp483,219 and Rp650,000, respectively. The Bank has fully paid all of its liabilities at due date of those transactions.

50. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan rencana Bank untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN tahap I Tahun 2015 (PUBOB) dan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Direksi Bank No. S-234/PM.221/2015 tanggal 12 Mei 2015 perihal perubahan dan/atau tambahan informasi atas pernyataan pendaftaran dalam rangka PUBOB, Bank telah menerbitkan kembali laporan keuangannya tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disertai beberapa perubahan penyajian pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas serta pengungkapan pada Catatan 1a, 1c, 1f, 2a, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 2l, 2n, 2o, 2p, 2q, 2r, 2s, 2v, 2w, 2x, 2y, 2z, 2aa, 2ab, 2ac, 2ae, 2af, 3, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 25, 27, 35, 38, 40, 43, 47, 49 pada laporan keuangan.

50. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS

Pursuant to the Bank's plan to conduct a public offering of Bank BTN shelf registration bonds II phase I (PUBOB) year 2015 and Otoritas Jasa Keuangan (OJK) letter to the Bank's Directors No. S-234/PM.221/2015 dated May 12, 2015 on the changes and/or additional information for the registration statement in relation with the PUBOB, the Bank reissued its financial statements as of December 31, 2014, 2013 and 2012 and for the years ended, with certain changes in the presentation of statements of financial position, statements of cashflows and disclosures in Notes 1a, 1c, 1f, 2a, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 2l, 2n, 2o, 2p, 2q, 2r, 2s, 2v, 2w, 2x, 2y, 2z, 2aa, 2ab, 2ac, 2ae, 2af, 3, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 25, 27, 35, 38, 40, 43, 47, 49 to the financial statements.

51. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab penuh terhadap penyajian laporan keuangan terlampir yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2015.

51. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Bank is fully responsible for the preparation of the accompanying financial statements which were completed and authorized for issue on May 21, 2015.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

XVII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

1. UMUM

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwalianan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi sebagai bukti hutang, yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis dan jumlah pokok yang tercantum pada Sertifikat Jumbo Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI, selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan, seperti yang tertera pada Bab ini. Bilamana tanggal pembayaran oleh KSEI jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek yang lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan setiap Pemegang Obligasi sebagai pemegang obligasi yang sah sebagaimana dibuktikan dalam Konfirmasi Tertulis untuk menerima pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Obligasi. Penarikan Obligasi ke luar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia dan keputusan RUPO.

2. JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).

Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwalianan, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalianan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini terdiri dari 4 (empat) seri Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,625% (sembilan koma enam dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah).
- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,875% (sembilan koma delapan tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).
- Seri C : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,000% (sepuluh persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah).
- Seri D : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,500% (sepuluh koma lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah).

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2015 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 8 Juli 2018 untuk Obligasi Seri A, 8 Juli 2020 untuk Obligasi Seri B, 8 Juli 2022 untuk Obligasi Seri C, dan 8 Juli 2025 untuk Obligasi Seri D.

Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwalianan.

Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga Ke	Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Seri A	Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Seri B	Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Seri C	Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Seri D
1	8 Oktober 2015	8 Oktober 2015	8 Oktober 2015	8 Oktober 2015
2	8 Januari 2016	8 Januari 2016	8 Januari 2016	8 Januari 2016
3	8 April 2016	8 April 2016	8 April 2016	8 April 2016
4	8 Juli 2016	8 Juli 2016	8 Juli 2016	8 Juli 2016
5	8 Oktober 2016	8 Oktober 2016	8 Oktober 2016	8 Oktober 2016
6	8 Januari 2017	8 Januari 2017	8 Januari 2017	8 Januari 2017
7	8 April 2017	8 April 2017	8 April 2017	8 April 2017
8	8 Juli 2017	8 Juli 2017	8 Juli 2017	8 Juli 2017
9	8 Oktober 2017	8 Oktober 2017	8 Oktober 2017	8 Oktober 2017
10	8 Januari 2018	8 Januari 2018	8 Januari 2018	8 Januari 2018
11	8 April 2018	8 April 2018	8 April 2018	8 April 2018
12	8 Juli 2018	8 Juli 2018	8 Juli 2018	8 Juli 2018
13	-	8 Oktober 2018	8 Oktober 2018	8 Oktober 2018
14	-	8 Januari 2019	8 Januari 2019	8 Januari 2019
15	-	8 April 2019	8 April 2019	8 April 2019
16	-	8 Juli 2019	8 Juli 2019	8 Juli 2019
17	-	8 Oktober 2019	8 Oktober 2019	8 Oktober 2019
18	-	8 Januari 2020	8 Januari 2020	8 Januari 2020
19	-	8 April 2020	8 April 2020	8 April 2020
20	-	8 Juli 2020	8 Juli 2020	8 Juli 2020
21	-	-	8 Oktober 2020	8 Oktober 2020
22	-	-	8 Januari 2021	8 Januari 2021
23	-	-	8 April 2021	8 April 2021
24	-	-	8 Juli 2021	8 Juli 2021
25	-	-	8 Oktober 2021	8 Oktober 2021
26	-	-	8 Januari 2022	8 Januari 2022
27	-	-	8 April 2022	8 April 2022
28	-	-	8 Juli 2022	8 Juli 2022
29	-	-	-	8 Oktober 2022
30	-	-	-	8 Januari 2023
31	-	-	-	8 April 2023
32	-	-	-	8 Juli 2023
33	-	-	-	8 Oktober 2023
34	-	-	-	8 Januari 2024
35	-	-	-	8 April 2024
36	-	-	-	8 Juli 2024
37	-	-	-	8 Oktober 2024
38	-	-	-	8 Januari 2025
39	-	-	-	8 April 2025
40	-	-	-	8 Juli 2025

3. JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

4. HAK SENIORITAS ATAS HUTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

5. DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Emisi.

6. PEMBATAAN-PEMBATAAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

6.1. Pembatasan-pembatasan Perseroan

Sebelum dilunasinya Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, serta pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, maka tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (di mana ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar oleh Wali Amanat, dan jika Wali Amanat tidak memberikan jawaban dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan ijin tersebut oleh Wali Amanat dan Wali Amanat menganggap dokumen yang dibutuhkan telah lengkap selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak surat permohonan permintaan dokumen tersebut diterima oleh Perseroan, maka persetujuan tersebut dianggap telah diberikan), Perseroan berjanji serta mengikat diri untuk tidak :

- a. Mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan utang yang diikat secara khusus lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam sub 6.3 butir t dibawah ini;
- b.
 - Melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi; atau
 - Mengijinkan atau memberikan persetujuan kepada Entitas Anak (jika ada) untuk melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi;

yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan atau kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban Perseroan terhadap Pemegang Obligasi kecuali atas permintaan dan/atau perintah dan/atau persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK, Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia dan/atau otoritas moneter maupun otoritas penyesuaian di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Bapepam dan LK atau OJK;

- c. Mengubah bidang usaha utama Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap kelangsungan usaha dan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban Perseroan terhadap Pemegang Obligasi, kecuali atas permintaan dan/atau perintah dan/atau persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK, Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia dan/atau otoritas moneter maupun otoritas penyesuaian di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Bapepam dan LK atau OJK;

6.2. Kewajiban-kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya seluruh Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan berkewajiban untuk :

- a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- b. Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti-bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang tersebut di atas, maka Perseroan harus membayar Denda;
- c. Mengupayakan mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong "Cukup Baik", sesuai penilaian internal berdasarkan peraturan perbankan yang berlaku;
- d. Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya serta wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kesehatan dan usaha bank umum;
- e. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi secara umum di Indonesia;
- f. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap perubahan dalam sifat dan/atau ruang lingkup Perseroan dan tentang setiap kejadian atau keadaan yang secara material dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan;
- g. Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya;
- h. Menyerahkan kepada Wali Amanat dari laporan keuangan, yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
- i. Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah diterima baik oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan telah didaftar di Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, kepada Wali Amanat;
- j. Dengan tidak mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk Wali Amanat dengan ketentuan pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian-perjanjian, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan pada saat jam kerja Perseroan, dalam keadaan/kondisi di mana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
- k. Memberitahukan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan hasil RUPS tersebut oleh Perseroan;

- l. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan perubahan-perubahannya yang mungkin ada di kemudian hari dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam peraturan pemerintah, surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, surat keputusan yang dikeluarkan oleh OJK (dahulu Bank Indonesia) dan peraturan OJK (dahulu Bank Indonesia) serta surat edaran yang dikeluarkan oleh OJK (dahulu Bank Indonesia).
- m. Memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
- n. Memelihara asuransi-asuransi yang telah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- o. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, kepailitan, tata usaha negara dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di mana menurut anggapan Perseroan akan mempengaruhi pemenuhan kewajiban pembayaran Perseroan terhadap Pemegang Obligasi;
- p. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut pada pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau setiap peristiwa yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;
- q. Mempertahankan bidang usaha utama Perseroan;
- r. Menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dan/atau Denda (jika ada) selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran;
- s. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11 berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipenuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.
- t. Menjaga jumlah aset yang tidak diagunkan secara khusus minimal sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari hutang Perseroan yang tidak ada jaminan khusus, yang belum dibayar lunas (*outstanding*) dalam bentuk obligasi yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau Bursa Efek Luar Negeri dan surat hutang jangka menengah/*Medium Term Notes* (MTN).

6.3. Merger atau Akuisisi

Apabila terjadi merger atau akuisisi terhadap Perseroan yang mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham mayoritas Perseroan menjadi bukan Pemerintah Republik Indonesia lagi, baik sebagian maupun seluruh saham-saham Perseroan, yang didasarkan atas permintaan dan/atau perintah dan/atau persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang sesuai dengan keputusan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka atas adanya merger atau akuisisi tersebut tidak perlu persetujuan Pemegang Obligasi melalui RUPO namun diberitahukan kepada Pemegang Obligasi dengan memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan hak dan/atau kewajiban serta tugas Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan tetap melekat pada Perseroan dan/atau pengantainya.

7. KELALAIAN PERSEROAN

- a. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :
 - i. Butir b huruf i, ii, iii, iv, v, vi dan vii di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - ii. Butir b huruf viii di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - iii. Butir b huruf ix di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata-cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.
- b. Kelalaian atau cedera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - i. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - ii. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau

- iii. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- iv. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari OJK atau lembaga otoritas keuangan lain yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau
- v. Apabila Perseroan dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) sehubungan dengan suatu perjanjian hutang, yang berupa pinjaman (*debt*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan hutang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah); atau
- vi. Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- vii. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- viii. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
- ix. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain butir b poin i).
- c. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat putusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

8. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- b. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- c. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penyatahan;
- d. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- e. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- f. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia;
- g. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- h. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- i. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir h, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - i. Periode penawaran pembelian kembali;
 - ii. Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - iii. Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - iv. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - v. Tata cara penyelesaian transaksi;
 - vi. Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - vii. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - viii. Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - ix. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi (tidak termasuk hubungan Perseroan dengan Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
- j. Perseroan wajib melakukan penyatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas dengan ketentuan:
 - i. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penyatahan;
 - ii. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan

- iii. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - i. Jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - ii. Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - iii. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - iv. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- n. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin.
- o. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut.
- p. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian obligasi tersebut.
- q. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - i. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - ii. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

9. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- a. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - i. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4;
 - ii. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - iii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - iv. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4; dan
 - v. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- b. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - i. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - ii. Perseroan;
 - iii. Wali Amanat; atau
 - iv. OJK.
- c. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir b poin i, ii dan iv wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- d. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- e. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - i. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - ii. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - iii. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai quorum.
 - iv. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (i) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;

- (ii) Agenda RUPO;
- (iii) Pihak yang mengajukan usulan RUPO;
- (iv) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
- (v) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
- v. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari kalender dari RUPO sebelumnya.
- f. Tata cara RUPO;
 - i. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - ii. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundangan yang berlaku.
 - iii. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - iv. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - v. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - vi. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - vii. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - viii. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - (i) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat.
 - (ii) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - (iii) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi (termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dengan Perseroan.
 - ix. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - x. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - xi. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - xii. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- g. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir f poin vii di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
 - i. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas diatur sebagai berikut:
 - (i) Apabila RUPO dimintakan Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

- (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
- (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (iii) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- ii. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- h. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- i. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
- j. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- k. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung Perseroan.
- l. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
- m. Dalam hal terjadinya perubahan susunan pemegang saham mayoritas Perseroan dimana Negara Republik Indonesia telah melepaskan hak kepemilikannya atas saham-saham Perseroan baik seluruh maupun sebagian kepada pihak lain, yang didasarkan kepada keputusan dan/atau peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka atas peristiwa tersebut tidak diperlukan RUPO dan hak dan/atau kewajiban serta tugas Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan tetap melekat pada Perseroan dan/atau penggantinya.
- n. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- o. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

10. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- b. Yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- c. Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi menerima pembayaran denda untuk setiap ketiadaan pembayaran sebesar 1% (satu persen) di atas Bunga Obligasi yang berlaku atas jumlah yang terhutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Nilai denda dihitung perhari, terhitung sejak tanggal pembayaran sehingga jumlah terhutang terbayar sepenuhnya, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.
- e. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - i. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4;
 - ii. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - iii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - iv. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4;
 - v. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

11. PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

PERSEROAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Divisi Treasury

Gedung Menara BTN, Lantai 10

Jl. Gajah Mada No. 1

Jakarta 10130

Tel.: (021) 633-6733, 633-6789 Fax.: (021) 633-6737

WALI AMANAT

PT Mega Bank Tbk.

Menara Bank Mega Lantai 16

Jl. Kapt. Tendean Kav. 12 – 14 A

Jakarta 12790

Telp: (021) 7917-5000, Fax.: (021) 7990720

Up.: *Capital Market Services*

12. HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

XVIII. KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN OBLIGASI

1. HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 Nomor: Kep-42/PM/2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No.601/PEF-Dir/IV/2015 tanggal 17 April 2015, hasil pemeringkatan atas Penawaran Umum Berkelanjutan ini untuk periode 17 April 2015 sampai dengan 1 April 2016 adalah:

^{id}AA
(Double A)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas.

2. SKALA PEMERINGKATAN EFEK HUTANG JANGKA PANJANG

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek hutang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2014:

- ^{id}AAA Efek Hutang dengan peringkat ^{id}AAA merupakan Efek Hutang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- ^{id}AA Efek Hutang dengan peringkat ^{id}AA memiliki kualitas kredit sedikit di bawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.
- ^{id}A Efek Hutang dengan peringkat ^{id}A memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.
- ^{id}BBB Efek Hutang dengan peringkat ^{id}BBB didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.
- ^{id}BB Efek Hutang dengan peringkat ^{id}BB menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.
- ^{id}B Efek Hutang dengan peringkat ^{id}B menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.
- ^{id}CCC Efek Hutang dengan peringkat ^{id}CCC menunjukkan Efek Hutang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal.
- ^{id}D Efek Hutang dengan peringkat ^{id}D menandakan Efek Hutang yang macet atau Perseroannya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari "AA" hingga "CCC". Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

3. RATING RATIONALE

Di bawah ini uraian atas hasil pemeringkatan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 (*rating rationale*) sebagaimana diumumkan oleh Pefindo dalam *press release* dan disajikan secara lengkap:

Pefindo menetapkan peringkat “**idAA**” untuk Perseroan dan Obligasi XII Tahun 2006, Obligasi XIV Tahun 2010, Obligasi XV Tahun 2011, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012 dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 yang diterbitkan Perseroan dengan total nilai sebesar Rp7,95 triliun. Pada saat yang sama Pefindo juga memberikan peringkat “**idAA**” untuk rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahun 2015 dengan nilai sebesar-besarnya mencapai Rp6 triliun. Prospek “**stabil**” diberikan kepada peringkat-peringkat tersebut. Peringkat tersebut mencerminkan dukungan yang kuat dari Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham pengendali, posisi usaha yang sangat kuat di segmen Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan profil permodalan yang kuat.

Perseroan adalah Bank milik Pemerintah yang fokus pada segmen Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Perseroan juga memberikan KPR bersubsidi untuk mendukung program Pemerintah dalam pembangunan perumahan bagi debitur berpenghasilan rendah hingga menengah. Per 31 Desember 2014 (FY2014), Pemerintah memegang 60,1% saham Perseroan dan sisanya sebesar 39,9% dimiliki oleh masyarakat.

Peringkat tersebut mencerminkan:

- **Dukungan yang kuat dan terbukti dari pemegang saham pengendali.** PEFINDO memandang Perseroan mempunyai peran kritical bagi Pemerintah dan oleh karena itu, PEFINDO percaya bahwa Pemerintah akan memberikan dukungan bagi Perseroan - jika dibutuhkan. PEFINDO juga memandang Perseroan memiliki peran penting dalam usaha Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Pada tahun 2014, Perseroan membiayai hampir 100% dari total KPR bersubsidi nasional. Kegagalan Perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangannya dapat secara signifikan mempengaruhi reputasi Pemerintah dan menciptakan gangguan dalam ekonomi nasional.
- **Posisi usaha yang kuat pada segmen pembiayaan perumahan.** Perseroan adalah bank pembiayaan perumahan terbesar di Indonesia, mengendalikan sekitar 25% dari total KPR di Indonesia pada FY2014. Total aset Perseroan tumbuh sebesar 10,2% dipicu oleh pertumbuhan kredit yang cukup baik sebesar 15,4%, menjadi Rp115,9 triliun pada FY2014 dari Rp100,5 triliun pada FY2013. Pertumbuhan kredit Perseroan lebih tinggi daripada rata-rata industri sebesar 11,6%. PEFINDO memandang bahwa Perseroan akan dapat mempertahankan posisi usahanya dengan didukung dana Pemerintah untuk KPR bersubsidi dan jangkauan jaringan Perseroan yang luas.
- **Profil permodalan yang kuat.** Profil permodalan Perseroan diharapkan tetap kuat. Rasio kecukupan modal (CAR) dan rasio kecukupan modal inti (CAR tier 1) adalah sebesar 14,6% dan 14,1% pada FY2014, sejalan dengan bank-bank besar lainnya. Didukung oleh permintaan yang tinggi untuk perumahan, Perseroan berencana untuk menjaga CAR di sekitar 14,5% dengan meningkatkan ekuitasnya sebesar 17% di tahun 2015. PEFINDO memandang Perseroan akan memiliki keleluasaan untuk melakukan ekspansi bisnis dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan permodalannya yang kuat.

Faktor yang membatasi peringkat di atas adalah:

- **Tingkat profitabilitas yang moderat.** Angka profitabilitas BBTN dianggap moderat sejalan dengan fokus di segmen pembiayaan perumahan. Pembiayaan perumahan dianggap memiliki profil risiko yang lebih rendah karena basis jaminannya yang kuat, menyebabkan tingkat bunga yang lebih kompetitif. Biaya dana dan provisi yang tinggi telah menekan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dan rasio tingkat pengembalian rata-rata aset (ROAA) menjadi 88,6% dan 0,8% pada FY2014 dari 81,1% dan 1,3% pada FY2013. Pada FY2014, BOPO Perusahaan lebih tinggi daripada rata-rata industri sebesar 76,3%. Untuk meningkatkan kinerja profitabilitas, Perusahaan merencanakan untuk meningkatkan porsi kredit KPR dan non KPR terutama di segmen dengan pengembalian yang lebih tinggi yaitu segmen konsumen dan komersial yang terkait dengan properti dengan memanfaatkan database pelanggan Perseroan. PEFINDO memandang bahwa strategi ini masih belum terbukti mengingat tingkat persaingan yang ketat di segmen tersebut, sementara kondisi suku bunga yang tinggi saat ini dan kenaikan provisi kredit karena tekanan pada profil kualitas aset dapat membatasi keuntungan Bank.
- **Rasio kredit bermasalah yang tinggi.** PEFINDO memandang rasio kredit bermasalah Perseroan relatif tinggi, sekitar 4% dalam tiga tahun terakhir, lebih tinggi dari rata-rata industri yang berada dalam kisaran 1,8%-2,2% selama periode tersebut. Rasio kredit bermasalah yang tinggi terutama berasal dari segmen komersial dan konstruksi yaitu sebesar 10,2% dan 5,1%. Untuk mengatasi hal ini, Perseroan telah berhenti melakukan ekspansi di segmen komersial yang terkait dengan sektor non-properti dan melakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap proses restrukturisasi kredit, persetujuan kredit, penagihan dan penjualan aset. Kedepannya, Perseroan akan tetap menjalankan inisiatif tersebut. Kebijakan ini telah menurunkan rasio kredit bermasalah menjadi 4,0% pada FY2014 dari 5,0% pada FY2013. Walaupun strategi Perseroan menuju ke arah perbaikan, akan menjadi tantangan bagi Perseroan untuk mencapai perbaikan yang signifikan pada kualitas asetnya, karena target pasar Perseroan adalah segmen masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah yang lebih sensitif terhadap perubahan ekonomi. Oleh karena itu, PEFINDO memandang bahwa rasio kredit bermasalah Perseroan akan tetap lebih tinggi daripada rata-rata industri dalam jangka waktu menengah.

4. RATING OUTLOOK

Berikut ini adalah penjelasan *Rating Outlook* yang diberikan Pefindo untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi peringkat Perseroan.

<i>Positive</i>	Prospek yang berpotensi untuk dapat menaikkan peringkat
<i>Negative</i>	Prospek yang berpotensi untuk dapat menurunkan peringkat
<i>Stable</i>	Indikasi prospek yang stabil sehingga hasil pemeringkatan juga akan stabil
<i>Developing</i>	Prospek yang belum jelas keterbatasan informasi, sehingga hasil pemeringkatan juga dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan perkembangan selanjutnya

Rating Outlook Pefindo merupakan penilaian atas prospek jangka menengah dan panjang atas entitas/atau efek hutang yang diperingkat, yang mencakup penilaian atas potensi perubahan keadaan perekonomian dan bisnis mendasar. Rating Outlook bukanlah merupakan prasyarat untuk perubahan suatu hasil pemeringkatan atau untuk menetapkan tindakan Rating Alert di masa yang akan datang. Rating Alert dilakukan karena terjadi perubahan yang mungkin secara material akan berpengaruh *positive*, *negative* atau *developing* terhadap kinerja entitas dan/atau efek hutang yang diperingkat.

PERSEROAN AKAN MELAKUKAN PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI YANG DITERBITKAN SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI SELAMA LIABILITAS ATAS EFEK TERSEBUT BELUM LUNAS, SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.C.11.

PERUSAHAAN PEMERINGKAT DALAM PENAWARAN UMUM INI BUKAN MERUPAKAN PIHAK TERAFILIASI DENGAN PERSEROAN BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIX. ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.51 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No.AHU-AH.01.03-0926094 tanggal 21 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3495340.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 21 April 2015 ("Akta PKR No.51/2015"), yang berisikan mengenai penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dimana dilakukannya perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.25 tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No.AHU-AH.01.03-0932022 tanggal 13 Mei 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3504879.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 13 Mei 2015 ("Akta PKR No.25/2015") yang berisikan mengenai perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 anggaran dasar mengenai modal ditempatkan dan modal setor Perseroan.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara" disingkat "PT. Bank Tabungan Negara (Persero)" Tbk, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di kota Jakarta Pusat.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan atau jaringan kantor lainnya di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 31-07-1992 (tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 12-08-1992 (dua belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang perbankan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha:
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk -lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. Memberikan kredit;
 - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang dan melakukan pinjaman dengan jaminan aset produktif;
 - d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko Perseroan maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. Surat surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. Kertas perbendaharaan Negara dan surat Jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi;
 6. Surat Dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan Perseroan maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

- k. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - l. Melakukan kegiatan anjak piutang, sekuritisasi aset, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
 - n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain dibidang keuangan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai syarat bahwa Perseroan dikemudian hari harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - p. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
 - q. Melakukan kegiatan jasa keuangan, *commercial banking* dan *investment banking* lainnya;
 - r. Melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan;
 - s. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

MODAL **Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp10.239.216.000.000,00 (sepuluh triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus enam belas juta Rupiah) terbagi atas 20.478.432.000 (dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu) saham, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah).
 - b. 20.478.431.999 (dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp10.239.215.999.500,00 (sepuluh triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).
2. Dari modal tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta telah disetor penuh 10.567.696.000 (sepuluh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 10.567.695.999 (sepuluh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.283.848.000.000,- (lima triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta Rupiah).
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp 5.283.848.000.000,- (lima triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta Rupiah) telah disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham dengan penyetoran sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp5.282.630.250.000,- (lima triliun dua ratus delapan puluh dua miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sebagaimana dimuat dalam akta Nomor : 32 tanggal 27-08-2014 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu empat belas) yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggarannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-05535.40.21.2014 tanggal 27-08-2014 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu empat belas) merupakan setoran lama.
 - b. sebesar Rp1.217.750.000,- (satu miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) disetor dengan uang tunai yang merupakan hasil pelaksanaan *Management Stock Option Plan* (MESOP).
4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS).
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau penggantinya (selanjutnya dapat pula disebut "OJK") dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 1.
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

5. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari.
6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - b.1. ditujukan kepada pegawai Perseroan;
 - b.2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - b.3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - b.4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan di bidang Pasar Modal.
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf d pasal ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri (Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia atau penggantinya).
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri, dengan ketentuan:
 - a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - a.2. telah memperoleh persetujuan Menteri;
 - a.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri.
 - a.4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 butir a.3 tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas (UUPT), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7 butir a.3 tidak terpenuhi;
 - a.5. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 butir a.1 termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 huruf b.
 - b. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
8. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek menentukan lain.
9. RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

SAHAM
Pasal 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari:
 - Saham Seri A Dwiwarna;
 - Saham Seri B;
2. Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan hanya khusus dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
 - a. Pemegang saham Seri A Dwiwarna, mempunyai hak-hak istimewa untuk:
 - a.1. mencalonkan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perseroan;
 - a.2. menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;
 - a.3. menyetujui perubahan Anggaran Dasar termasuk perubahan modal;
 - a.4. menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran; dan
 - a.5. meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;
 - b. Kecuali hak-hak istimewa sebagaimana tersebut dalam huruf a ayat ini, pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 26.
 - c. Saham Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh Masyarakat.
3. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan "saham" ialah saham Seri A Dwiwarna, saham Seri B, yang dimaksud dengan "pemegang saham" ialah pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.
4. Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri A Dwiwarna, pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
5. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab-sebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.
6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.
7. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.
8. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM
Pasal 6

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham.

5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham;
 - e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan.
6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tandatangan-tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

PENGGANTI SURAT SAHAM
Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan
 - c. asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.
 - d. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
4. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF
Pasal 8

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu:
 - a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
 - c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
 - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
 - f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;

- g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
 - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
 - j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
 - k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS;
 - l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS;
 - m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
 - n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS **Pasal 9**

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat:
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;
 - b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di Kantor Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja.

7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
8. Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 10

- a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
- b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat yang ditentukan oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
5. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek, kecuali untuk hak atas Saham Seri A Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.
8. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 5 butir (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau dilepaskan oleh pengadilan.

DIREKSI
Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan seorang diantara mereka dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.
2. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:
 - a. UUPT;
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan
 - f. memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 pasal ini.
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
5. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 pasal ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini kecuali ayat 3 huruf f.
8. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dari calon atau calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
9.
 - a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.
 - b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
 - c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.
10. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
11. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
12. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 11 pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
 - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
13. Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf a sampai dengan d pasal ini, Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
14. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
15. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf c dan d pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

16. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).
17. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 16 pasal ini, RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
18. Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/ atau tunjangan lainnya termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
19. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Perseroan lowong yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang atau tidak adanya Direktur Utama sebagaimana ditentukan dalam ayat 1, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut.
20. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut. Selama jabatan seluruh anggota Direksi tersebut lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat ini, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
21.
 - a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - i. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a. ayat ini.
 - ii. dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
 - e. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.
22. Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
23. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.
24. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris mengambil keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi, dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi.
 - c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.
 - d. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
 - e. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - i. terdapat keputusan RUPS yang membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f; atau
 - ii. lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g.
 - f. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS oleh Dewan Komisaris yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

- g. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, atau RUPS membatalkan pemberhentian sementara tersebut, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal.
 - h. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 - i. RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang Saham yang hadir.
 - j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
 - k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS, setelah dipanggil secara tertulis untuk hadir dan membela diri, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS.
 - l. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini.
 - m. Apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
 - n. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:
 - i. Keputusan pemberhentian sementara; dan
 - ii. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
25. Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sebagaimana dimaksud ayat 9 huruf a Pasal ini, kecuali RUPS menentukan lain.
 26. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi maka masa jabatan anggota Direksi tersebut adalah sebagaimana dimaksud ayat 9 huruf a Pasal ini, kecuali RUPS menentukan lain.
 27. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:
 - a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; dan/atau
 - b. anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara; dan/atau
 - c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
 - d. pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
 - e. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
 28. Untuk perangkatan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat 26 pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris.
 29. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI **Pasal 12**

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka:
 - a. Direksi berwenang untuk:
 - a.1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan;
 - a.2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain;
 - a.3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, jasa produksi dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - a.4. Mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan;
 - a.5. Membentuk fungsi Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*);
 - a.6. Menghapus buku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;
 - a.7. Tidak menagih lagi sebagian atau seluruh piutang diluar pokok dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian kredit namun dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

- a.8. Menghapus tagih piutang bunga, denda, ongkos-ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan;
- a.9. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengelolaan maupun pemilihan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada optimalisasi pemanfaatan aset Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
- b. Direksi berkewajiban untuk:
 - b.1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
 - b.2. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya, berikut perubahannya serta menyampaikannya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
 - b.3. Memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan.
 - b.4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;
 - b.5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
 - b.6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
 - b.7. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
 - b.8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
 - b.9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri;
 - b.10. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b.4 dan b.5 ayat ini, dan dokumen Perseroan lainnya;
 - b.11. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;
 - b.12. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengelolaan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
 - b.13. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;
 - b.14. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
 - b.15. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;
 - b.16. Menyusun dan menetapkan *blue print* organisasi Perseroan.
 - b.17. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
5. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.
 - a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
 - b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, apabila dapat membuktikan:
 - 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - 2) telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
7. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal, perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

- a. memindahtangankan dan menghapuskan aset tetap milik Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - b. mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own/BOO*) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun atau perpanjangannya yang mengakibatkan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - c. melakukan penyertaan modal pada perseroan lain;
 - d. mendirikan anak perusahaan dan atau perusahaan patungan;
 - e. melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan atau perusahaan patungan;
 - f. menetapkan dan merubah logo Perseroan;
 - g. membentuk yayasan, organisasi dan atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak finansial bagi Perseroan;
 - h. membebaskan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan;
 - i. mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota direksi dan dewan komisaris pada perusahaan patungan dan atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
8. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 pasal ini.
9. Direksi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melakukan perbuatan mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas:
- a. piutang pokok macet yang telah dihapus buku dalam rangka penyelesaian kredit baik untuk sebagian maupun keseluruhan; atau
 - b. Selisih antara nilai piutang pokok macet yang telah dihapus buku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak;
- yang pelaksanaannya berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS.
10. Perbuatan-perbuatan dibawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, untuk:
- a. melakukan transaksi material sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di Pasar Modal;
 - b. melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di Pasar Modal;
 - c. melakukan transaksi lain, guna memenuhi peraturan perundang-undangan di Pasar Modal.
11. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
- a. mengalihkan kekayaan Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
12. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan, yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Apabila tidak ada keputusan Direksi tersebut, maka Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan
- Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada, tidak hadir atau berhalangan hadir, maka salah seorang Direktur yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
13. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
15. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan keputusan yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.
16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
- a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

17. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 16 huruf b pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

RAPAT DIREKSI
Pasal 13

1. Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
2. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Apabila dipandang perlu Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis Dewan Komisaris.
3. Direksi dapat mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris setiap waktu bilamana dipandang perlu dengan ketentuan bahwa Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan
5. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis atau sarana lainnya oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
6. Dalam panggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini harus menjelaskan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
7. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, 6 dan 7 pasal ini, kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
9. Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
10. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
11. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama memimpin rapat Direksi.
12. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.
13. Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
14. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
15. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
16. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2, (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.
17. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.
18. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2, (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2, (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
19. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat dan bertanggung jawab atas hasil keputusan rapat.
20. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
21. a. Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah Rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Direksi, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.

- b. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris apabila diminta untuk diketahui.
 - c. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
 - e. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
22. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
23. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
24. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

DEWAN KOMISARIS
Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama dan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama, dan harus diangkat Komisaris independen dengan jumlah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan :
 - a. UUPT;
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
 - c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii) anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK .
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan
 - f. khusus untuk Komisaris Independen selain harus memenuhi ketentuan tersebut di atas wajib memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku ; dan
 - g. syarat lain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana tersebut pada ayat 3
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan, Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan
6. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 pasal ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini, kecuali ayat 4 huruf f dan 9 pasal ini.
8. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
9. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, dari calon atau calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
10.
 - a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya dengan memperhatikan peraturan perundangundangan dibidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.
 - b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
 - c. Setelah masa jabatannya berakhir para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan
11. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mula; berlakunya pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
12. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara; dan/atau
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
13. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf a sampai dengan d pasal ini, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan
14. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 10 pasal ini diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.
15. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
16. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf c dan d pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
17. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).
18. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 17 pasal ini, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
19. Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris. Bagi Sekretaris Dewan Komisaris yang bukan pegawai Perseroan, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas yang jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
21. Apabila oleh suatu sebab, jabatan anggota Dewan Komisaris lowong sehingga menyebabkan anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, atau tidak adanya Komisaris Utama sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 pasal ini, maka RUPS harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan tersebut.
22. Apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong tersebut;
23.
 - a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.

- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
24. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
25. Ketentuan sebagaimana di maksud ayat 24 huruf D pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.
26. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.
27. Apabila seorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sebagaimana dimaksud ayat 10 huruf a pasal ini, kecuali RUPS menentukan lain.
28. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah sebagaimana dimaksud ayat 10 huruf a pasal ini, kecuali RUPS menentukan lain.
29. Anggota Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
- a. Anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah, Badan usaha Milik Swasta;
 - b. Pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang - undangan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka :
 - a. Dewan Komisaris berwenang untuk:
 - a.1. memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
 - a.2. memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan;
 - a.3. meminta keterangan/penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan dan Direksi harus memberikan semua keterangan/penjelasan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Komisaris;
 - a.4. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
 - a.5. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
 - a.6. mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris, atas usul pemegang saham Seri A Dwi Warna;
 - a.7. memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - a.8. membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
 - a.9. menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
 - a.10. melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - a.11. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
 - a.12. melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS;
 - b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

- b.1. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perseroan ;
 - b.2. memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Ke-a dan Anggaran Tahunan Perseroan, serta rencana lainnya, yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - b.3. mengikuti, mengawasi perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - b.4. melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - b.5. mengusulkan kepada RUPS menunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
 - b.6. meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
 - b.7. memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
 - b.8. membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
 - b.9. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya *dan/atau* keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
 - b.10. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
 - b.11. melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS;
 - b.12. memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham Seri A DWIwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang Pasar Modal
3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar
5.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
 - b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini apabila dapat membuktikan :
 1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 2. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
 3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
 4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

RAPAT DEWAN KOMISARIS **Pasal 16**

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris.
2. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Apabila dipandang perlu, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu atas permintaan seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi
3. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat bersama dengan Direksi setiap waktu bilamana dianggap perlu dengan memperhatikan bahwa Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
4. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan
5. Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis atau sarana lainnya oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
6. Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini harus menjelaskan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
7. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat.

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris, kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
9. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
10. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
11. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.
12. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
13. Dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Komisaris Utama yang mengetuai Rapat Dewan Komisaris.
14. Dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak ada, tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat mengetuai Rapat Dewan Komisaris.
15. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
16. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2, (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.
17. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.
18. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2, (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2, (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
19. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2, (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2, (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
20. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
21.
 - a. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah Rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.
 - b. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini wajib diluahkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - c. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
 - e. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
23. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
24. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Pasal 17

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Perseroan menempatkan Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha Perseroan berdasarkan prinsip syariah, dimana penempatan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS atau memberikan wewenang kepada Direksi untuk menempatkan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut, dengan memperhatikan ketentuan otoritas yang berwenang dan Dewan Syariah Nasional.
2. Dewan Pengawas Syariah mempunyai fungsi antara lain:
 - a. sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
 - b. sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.
 - c. sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan, Dewan Pengawas Syariah wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
Pasal 18

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
 - b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan
 - d. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
2. Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini.
3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah ditandatangani oleh Direksi selanjutnya disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran Perseroan berjalan.
5. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan Perusahaan belum disetujui Dewan Komisaris dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan sebelumnya yang diberlakukan.

TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 19

1. Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim, dan pada akhir bulan Desember dari tiap-tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas Laporan Keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
 - g. gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau (tahun buku yang bersangkutan)
3. Rancangan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.
4. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan.

5. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.
6. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS
7. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, dilakukan oleh RUPS paling lambat pada akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir.
8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS persetujuannya untuk kepentingan Pemegang Saham.
10. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

**PELAPORAN
Pasal 20**

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan.
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini meliputi Laporan triwulanan dan Laporan Tahunan.
3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 21**

1. RUPS dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
 - b. RUPS lainnya yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 23.
2. Yang dimaksud dalam RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. RUPS dengan mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
4. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya. RUPS tersebut juga dapat diselenggarakan atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham. Permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya, permintaan RUPS oleh pemegang saham dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam ayat 5 pasal ini.
5. Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham:
 - (1). Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga dilakukan atas permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran
 - (2). Dasar ini dan peraturan perundang-undangan. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - (3). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan

- (4). Sepanjang berdasarkan pertimbangan Direksi permintaan penyelenggaraan RUPS telah memenuhi ketentuan ayat 3 Pasal ini, maka Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 1 ayat ini diterima Direksi.
- (5). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 4 ayat ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- (6). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 5) ayat ini diterima Dewan Komisaris.
- (7). Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 4) ayat ini dan butir 6) ayat ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir 1) ayat ini; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (8). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir 7) ayat ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir 4) dan butir 6) ayat ini.
- (9). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir 7) ayat ini paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (10). Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir 9 huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (11). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir 10 ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- (12). Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir 9 huruf a ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 2) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
- (13). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 6) ayat ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir 1) ayat ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS
- (14). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 13) ayat ini wajib:
 - a. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan.
 - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK.
 - c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penelapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
- (15). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN **Pasal 22**

1. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun.
2. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan.
3. Dalam RUPS Tahunan tersebut Direksi menyampaikan:
 - a. Laporan Tahunan, sebagaimana tersebut pada Pasal 19 ayat 2;
 - b. usulan penggunaan laba Perseroan;
 - c. usulan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik;

Dalam RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

4. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 23

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 24

1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
2. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
3. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa didahului oleh Pemberitahuan RUPS kepada OJK, Pengumuman RUPS dan Pemanggilan RUPS sebagaimana dilenlukan dalam pasal ini.
4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:
 - (1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - (2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci
 - (3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
 - (4). Ketentuan butir (1), (2), (3) ayat 4 ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.5.14).
5. Pengumuman RUPS:
 - (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat:
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
 - (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 5, selain memuat hal yang disebut pada butir 2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.
 - (4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir 1) ayat ini, paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
 - (5) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf c ayat ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia
 - (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
 - (7) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 5 butir (2).
 - (8) Pengumuman RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
 - (9) Ketentuan butir 1 sampai dengan butir 9 ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 5 butir 14).

6. Usulan Mata Acara Rapat:
 - (1) Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
 - (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir 1) ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir 1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - (4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir 1) ayat ini merupakan mata acara yang membulatkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam butir 3).
 - (5) Perseroan wajib mencanumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir 1) ayat ini sampai dengan butir (4) ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.
7. Pemanggilan RUPS:
 - (1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
 - (2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi :
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
 - (3). Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web bursa efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris
 - (4). Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - (5). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
 - (6). Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
 - (7). Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
 - (8). Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dan dapat juga dilakukan oleh pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 ayat 5 Anggaran Dasar dan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
 - (9). Ketentuan butir (1) sampai dengan butir (6) ayat ini mutatis mutandis-berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 5. butir 13).
8. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.
 - (2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - (3) Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan
 - (4) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
 - (5) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 3) sampai dengan butir 6) ayat 7 pasal ini dan ayat 11 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.
9. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
 - (1). Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - (2). Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
10. Bahan Mata Acara Rapat:
 - (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham;
 - (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

- (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
- (4) Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir 2) ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.
- (5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir 4) ayat ini diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
- (6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
- (7) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi *dan/atau* anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi *dan/atau* anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

11. Ralat Pemanggilan:

- (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 butir (2) pasal ini.
- (2) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS *dan/atau* penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 7 pasal ini.
- (3) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 2) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS *dan/atau* penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.
- (4) Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir 3) ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.
- (5) Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 3) sampai dengan butir 6) ayat 7 pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 1) ayat ini.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 25

1. Pimpinan RUPS

- (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (3) Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (5) Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.
- (6) Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

2. Tata Tertib RUPS:

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
- (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. mata acara rapat;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan *dan/atau* pendapat.

3. Risalah RUPS:

- (1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS.
- (2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (4) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.
- (5) Risalah RUPS yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam butir 3) ayat ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dalam RUPS.

- (6). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari
 - (7). setelah RUPS diselenggarakan.
 - (8). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
4. Ringkasan Risalah RUPS:
- (1) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS.
 - (2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:
 - a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan RUPS; dan
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
 - (3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 1 ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
 - (4) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir 3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir 3) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.
 - (6) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 3) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
 - (7) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
 - (8) Ketentuan pada butir 5) dan butir 6) ayat 3 serta butir 3) dan butir 6) ayat ini, mutatis mutandis berlaku untuk:
 - a. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan
 - b. pengumuman ringkasan risalah RUPS, dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 5 butir 14).

**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 26**

1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.
2. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS;
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari seluruh kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak berkaitan, harus mendapat persetujuan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS; dan
 - c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
4. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
5. Perubahan Direksi dan/atau perubahan Dewan Komisaris dan/atau Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dan perubahan anggaran dasar yang tidak meminta persetujuan Menteri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diikuti oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna
6. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili sedikit-dikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.
7. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan disetujui oleh para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.
8. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 11 pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
10. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
11. Pimpinan RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.
12. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
13. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
14. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dan/atau pegawai Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun dalam pemungutan suara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dan/atau pegawai Perseroan sebagai kuasa dari pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara.
15. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

Ketentuan tersebut dikecualikan bagi:

 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
16. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 15 wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
17. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
18. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

PENGUNAAN LABA
Pasal 27

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh RUPS.
2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS.
3. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
4. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi, Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, dan bonus untuk pegawai, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perseroan yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha Perseroan yang persentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh RUPS.
5. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini; hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
6. Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini, dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan
7. Apabila Perseroan menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pelampauan target yang harus dicapai, meskipun belum mempunyai saldo laba yang positif, maka Perseroan dapat memberikan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk pegawai sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
8. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan dan dalam tahun-tahun yang akan datang Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan.
9. Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara Republik Indonesia, dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
11. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.
12. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 11 pasal ini.
13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
14. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 13 pasal ini.

PENGUNAAN DANA CADANGAN
Pasal 28

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal.
2. Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.
3. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS yang harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 dan perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri harus pula dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam UUPT.

5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT.
6. Ketentuan mengenai pengurangan modal mengikuti peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 29

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal.
2. Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.
3. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS yang harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 dan perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri harus pula dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam UUPT
5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT.
6. Ketentuan mengenai pengurangan modal mengikuti peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PENGGAJABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN
Pasal 30

1. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat 6 .
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM
Pasal 31

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat 6.
2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator.
3. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya alas likuidasi Perseroan yang dilakukan.
4. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah Pengadilan menerima pertanggungjawaban Likuidator yang ditunjukkannya.
5. Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan adalah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.

PERATURAN PENUTUP
Pasal 32

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.

XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab XXIII Prospektus ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Obligasi adalah pada tanggal 1 Juli 2015 dimulai pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 3 Juli 2015 pukul 16.00 WIB.

5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sebelum Masa Penawaran Obligasi ditutup, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XXIII Prospektus ini, pada tempat di mana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. PENJATAHAN OBLIGASI

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Penjatahan akan dilakukan pada tanggal 6 Juli 2015.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 dan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT CIMB Securities Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.12 Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-17/PM/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Obligasi atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.7 Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-691/BL/2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi, yaitu PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Securities Tbk, selambat-lambatnya pada tanggal 7 Juli 2015 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

Bank BCA	Bank CIMB Niaga	Bank Permata	Bank BCA
Cabang Korporasi Menara BCA	Cabang Graha Niaga	Cabang Sudirman	Cabang KH Mas Mansyur
No. Rekening:	No. Rekening :	No. Rekening :	No. Rekening :
205 003 003 5	146 0101 085 009	400-1763682	1793030308
Atas Nama :	Atas Nama :	Atas Nama :	Atas Nama :
PT BCA Sekuritas	PT CIMB Securities Indonesia	PT Danareksa Sekuritas	PT Trimegah Securities Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

9. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2015, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

10. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 8 Juli 2015. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan sebelum Tanggal Efektif setelah para pihak berkonsultasi, dapat mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi apabila:

- Perseroan lalai secara material untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dan kelalaian itu tidak diperbaiki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kalender terhitung sejak tanggal terjadinya kelalaian, sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi atau apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, atau terjadi perubahan penting yang dapat merugikan (atau suatu perkembangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan penting yang dapat merugikan) berkenaan dengan usaha, kekayaan atau keadaan keuangan Perseroan yang mungkin dapat-- mempengaruhi secara berarti kualitas investasi dalam Obligasi.

- b. Penjamin Emisi Obligasi lalai secara material untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini, dan kelalaian itu tidak diperbaiki dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kalender terhitung sejak tanggal terjadinya kelalaian, sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Perseroan atau apabila karena sebab apapun juga Penjamin Pelaksana Emisi tidak dapat melaksanakan kewajiban kewajibannya menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luarkemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu :

- a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2.

Dalam hal Penawaran Umum ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.4.i Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sesuai ketentuan Pasal 16 (kecuali karena ketentuan pasal 16.1. huruf e) Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dan;

- a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang telah menerima uang pemesanan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;
- b. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya;
- c. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 2% (dua persen) di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian.
- d. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perseroan dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

12. LAIN-LAIN

Penjamin Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XXI. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Sehubungan dengan emisi Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 telah ditandatangani akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 No.27 tanggal 24 April 2015, akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 No. 42 tanggal 21 Mei 2015, dan akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 No. 54 tanggal 22 Juni 2015, yang semuanya dibuat dihadapan IR. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT. Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum "Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015" adalah

PT Bank Mega Tbk. yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.4, dan telah menandatangani surat pernyataan bahwa Wali Amanat telah melakukan penelaahan uji tuntas dengan surat No. 0368/CAMS-WA/15 tanggal 21 April 2015, Wali Amanat saat ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan afiliasi dengan perseroan sesuai dengan surat pernyataan Wali Amanat No. 0367/CAMS-WA/15 tanggal 21 April 2015, Wali Amanat tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan VI.C.3 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-309/BL/2008 Tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten, selain itu Wali Amanat juga tidak akan merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang efek yang diterbitkan oleh Perseroan sesuai dengan surat pernyataan Wali Amanat No. No. 0369/CAMS-WA/15 tanggal 21 April 2015.

1. Riwayat Singkat

PT Bank Mega Tbk, didirikan dengan nama PT Bank Karman berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Februari 1970. Tambahan No. 55/1970. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman di ubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No.741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No.S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Perubahan Anggaran Dasar PT Mega Bank dalam rangka penawaran umum (*go public*) untuk disesuaikan dengan UUPM dan peraturan pelaksanaannya tercantum dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240/2000. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. PT Bank Mega Tbk memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk, telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Masjuki, SH, pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah. SH. Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 27 Mei 2015 No. 21, dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, SH, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0935760 tanggal 29 Mei 2015.

2. PERMODALAN

Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk, per 30 April 2015 berdasarkan Laporan Bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Mega Tbk, berdasarkan Surat No.DE/V/2015-1270 tanggal 4 Mei 2015 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Jumlah Penuh)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	27.000.000.000	500	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
- PT Mega Corpora	4.026.599.755	500	2.013.299.877.500	57,82
- Publik (masing-masing di bawah 5%)	2.937.175.451	500	1.468.587.725.500	42,18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.963.775.206	500	3.481.887.603.000	100,00
Portepel	20.036.224.794	500	10.018.112.397.000	

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Mega berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk tertanggal No. 10 tanggal 12 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, SH, Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yungky Setiawan*)
 Komisaris (Independen) : Achjadi Ranuwisastra
 Komisaris : Darmadi Sutanto*)
 Komisaris (Independen) : Lambock V. Nahattands*)

Direksi

Direktur Utama : Kostaman Thayib
 Direktur : Max Kembuan
 Direktur : Madi Darmadi Lazuardi
 Direktur : Tati Hartawan
 Direktur : Indivara Erni
 Direktur : YB Hariantono
 Direktur : Martin Mulwanto
 Direktur : Wiweko Probojakti**)
 Direktur : Lay Diza Larentie**)
 Direktur Independen : Yuni Lastianto

*) Pengangkatan Yungky Setiawan, Darmadi Sutanto dan Lambock V. Nahattands masing-masing sebagai Komisaris Utama, Komisaris dan Komisaris (Independen) tersebut berlaku terhitung sejak saat yang bersangkutan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan.

**) Pengangkatan Wiweko Probojakti dan Lay Diza Larentie masing-masing sebagai Direktur tersebut berlaku terhitung sejak saat yang bersangkutan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan.

4. KEGIATAN USAHA

Selaku Bank Umum, PT Bank Mega Tbk. menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk. juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI), Mega Visa Card, Debit and ATM Card (MegaPass), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega O, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk. berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

5. KANTOR CABANG PT BANK MEGA TBK

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk terus meluas, sehingga pada akhir 31 Desember 2014 PT Bank Mega Tbk telah memiliki Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 344 Cabang.

6. DALAM PENGEMBANGAN PASAR MODAL SELAMA 12 TAHUN TERAKHIR (2003-2015), PT. BANK MEGA TBK. IKUT BERPERAN AKTIF, ANTARA LAIN BERTINDAK SEBAGAI :

a. Wali Amanat (*Trustee*)

- Obligasi II Adhi Karya Tahun 2003
- Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003
- Obligasi Arpeni Pratama Ocean Line I Tahun 2003
- Obligasi Unggul Indah Cahaya I Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi I Indo Jasa Pratama Tahun 2003
- Obligasi Central Sari Finance I Tahun 2003
- Obligasi I Waskita Karya Tahun 2003
- Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003
- Obligasi Clipan Finance I Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi Plaza Adika Lestari I Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi Beta Inti Multifinance I Tahun 2004
- Obligasi Ultrajaya III Tahun 2004
- Obligasi Semen Baturaja I Tahun 2004
- Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004
- Obligasi III Adhi Karya Tahun 2004
- Obligasi Konversi Suba Indah I Tahun 2004
- Obligasi Inti Fasindo International I Tahun 2002
- Obligasi Great River International I Tahun 2003
- Obligasi Clipan Finance II Tahun 2004
- Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004
- Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005
- Obligasi Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005
- Obligasi Syariah Ijarah Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005
- Obligasi Bank Ekspor Indonesia II Tahun 2005
- Obligasi Citra Marga Nusaphala Persada III Tahun 2005
- Obligasi PLN VIII Tahun 2006
- Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006
- Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006
- Obligasi BCA Finance II Tahun 2007
- Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002
- Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007
- Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007
- Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007
- Obligasi I BNI Securities Tahun 2007
- Obligasi I Bank Danamon Indonesia Tahun 2007
- Obligasi Kresna Graha Sekurindo I Tahun 2007
- Obligasi Bank Mayapada II Tahun 2007
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada II Tahun 2007
- Obligasi Panin Sekuritas III Tahun 2007
- Obligasi Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007
- Obligasi I Radiant Utama Interinsco Tahun 2007
- Obligasi IV Adhi Tahun 2007
- Sukuk *Mudharabah* I Adhi Tahun 2007
- Obligasi Japfa I Tahun 2007
- Obligasi Jasa Marga VIII Seri M Tahun 2000
- Obligasi Jasa Marga X Seri O Tahun 2002
- Obligasi Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003
- Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007
- Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007
- Obligasi II Danareksa Tahun 2007
- Obligasi Bhakti Finance II Tahun 2007
- Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008
- Obligasi Subordinasi II Bank NISP Tahun 2008

- Obligasi V Bank DKI Tahun 2008
- Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008
- Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004
- Obligasi Lautan Luas III Tahun 2008
- Obligasi Bhakti Securities I Tahun 2008
- Obligasi III Danareksa Tahun 2008
- Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008
- Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008
- Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008
- Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009
- Obligasi IV Danareksa Tahun 2009
- Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009
- Obligasi Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009
- Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009
- Obligasi Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009
- Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009
- Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009
- Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009
- Obligasi Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009
- Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006
- Obligasi SMS Finance I Tahun 2009
- Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009
- Obligasi BCA Finance III Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010
- Obligasi IX Perum Pegadaian Tahun 2002
- Obligasi X Perum Pegadaian Tahun 2003
- Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006
- Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007
- Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi Bank Sulut I Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010
- Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010
- Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010
- Obligasi XIV Jasa Marga Seri JM-10
- Obligasi I Jasa Marga Seri JM-10 Tanpa Bunga
- Obligasi V Danareksa Tahun 2010
- Obligasi VII Bank BJB Tahun 2011
- Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011
- Obligasi Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011
- Obligasi BCA Finance IV Tahun 2011
- Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011
- Obligasi MNC Securities II Tahun 2011
- Obligasi Serasi Autoraya II Tahun 2011
- Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap I Tahun 2011
- Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap II Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011
- Obligasi Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Medco Energi Internasional III Tahun 2012
- Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012
- Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012
- Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012
- Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012

- Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012
- Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap III Tahun 2012
- Obligasi I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012
- Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012
- Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012
- Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2012
- Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013
- Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013
- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013
- Obligasi II PNM Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014
- Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014
- Obligasi Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015

b. Agen Jaminan (*Security Agent*)

- Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003
- Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005
- Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004
- Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002
- Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007
- Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008

- Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004
- Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012
- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013

7. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat adalah :

- Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir a sejak penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi.
- Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

8. PENGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- Ijin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.
- Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.
- Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal .
- Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- Atas permintaan pemegang Obligasi
- Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat.
- Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep- 309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten.

9. LAPORAN KEUANGAN

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk yang merupakan informasi keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono. Suherman & Surja firma anggota Ernst & Young Global Limited (penanggung jawab: Sinarta), auditor independen dengan opini audit wajar tanpa pengecualian dalam laporannya masing-masing tertanggal 12 Maret 2015 dan 28 Februari 2014.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PT BANK MEGA Tbk & ENTITAS ANAK Per 31 Desember 2014 dan 2013

POS - POS	(dalam jutaan rupiah)	
	31 Desember 2014	2013
ASET		
Kas	1.274.528	1.430.545
Penempatan pada Bank Indonesia	6.472.008	15.067.847
Penempatan pada bank lain	7.601.701	2.332.039
Tagihan spot dan derivatif	8.104	2.163
Surat berharga		
- Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	4.298.359	4.461.911
- Tersedia untuk dijual	5.246.690	6.484.068
- Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-
- Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	-
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	4.241.631	3.284.925
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	432.714	-
Tagihan akseptasi	554.725	235.362

POS - POS	31 Desember	
	2014	2013
Kredit		
- Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-
- Tersedia untuk dijual	-	-
- Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-
- Pinjaman yang diberikan dan piutang	33.679.790	30.172.864
Pembiayaan syariah	-	-
Penyertaan	621	688
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		
- Surat berharga	-	-
- Kredit	(472.178)	(393.562)
- Lainnya	-	-
Aset tidak berwujud	349.037	303.018
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(253.131)	(185.117)
Aset tetap dan inventaris	3.039.105	2.989.165
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1.248.022)	(1.118.465)
Aset non produktif		
- Properti terbengkalai	-	-
- Aset yang diambil alih	27.735	6.274
- Rekening tunda	-	-
- Aset antar kantor*		
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	(886)	(4.813)
Sewa pembiayaan	-	-
Aset pajak tangguhan*	-	27.827
Aset lainnya	1.395.360	1.378.959
TOTAL ASET	66.647.891	66.475.698

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

Giro	5.534.751	7.317.018
Tabungan	10.652.102	11.797.642
Simpanan berjangka	34.835.022	33.257.383
Dana investasi revenue sharing	-	-
Pinjaman dari Bank Indonesia	-	-
Pinjaman dari bank lain	2.790.575	3.449.125
Liabilitas spot dan derivatif	2.149	646
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3.818.632	2.940.474
Utang akseptasi	554.725	235.362
Surat berharga yang diterbitkan	-	-
Pinjaman yang diterima		
Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal	-	-
Pinjaman yang diterima lainnya	92.888	121.700
Setoran jaminan	78.875	68.002
Liabilitas antar kantor*		
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-
Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-
Liabilitas pajak tangguhan*	47.655	-
Liabilitas lainnya	1.283.842	1.169.841
Dana investasi profit sharing	-	-
TOTAL LIABILITAS	59.691.216	60.357.193

EKUITAS

Modal disetor		
- Modal dasar	13.500.000	13.500.000
- Modal yang belum disetor -/-	(10.018.112)	(10.018.112)
- Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	-
Tambahan modal disetor		
- Agio	2.048.761	2.048.761
- Disagio -/-	-	-
- Modal sumbangan	-	-
- Dana setoran modal	-	-
- Lainnya	-	-

POS - POS	31 Desember	
	2014	2013
Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya		
- Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-
- Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	283.795	44.863
- Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	-
- Selisih penilaian kembali aset tetap	-	-
- Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-
- Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	-	-
- Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	-
- Lainnya	-	-
Selisih kuasi reorganisasi	-	-
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-	-
Ekuitas lainnya	-	-
Cadangan		
- Cadangan umum	1.043	993
- Cadangan tujuan	-	-
Laba/rugi		
- Tahun-tahun lalu	541.950	17.220
- Tahun berjalan	599.238	524.780
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	6.956.675	6.118.505
Kepentingan non pengendali	-	-
TOTAL EKUITAS	6.956.675	6.118.505
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	66.647.891	66.475.698

* Disajikan secara neto

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
PT BANK MEGA Tbk. & ENTITAS ANAK
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

POS-POS	31 Desember	
	2014	2013
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan dan Beban Bunga		
Pendapatan Bunga		
- Rupiah	5.630.952	4.489.040
- Valuta asing	347.720	376.397
Beban Bunga		
- Rupiah	3.092.717	2.086.483
- Valuta asing	140.906	82.903
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	2.745.049	2.696.051
Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
Pendapatan Operasional Selain Bunga		
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan*		
i. Surat berharga	-	-
ii. Kredit	-	-
iii. Spot dan derivatif	-	1.606
iv. Aset keuangan lainnya	-	-
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-
c. Keuntungan penjualan aset keuangan*		
i. Surat berharga	-	-
ii. Kredit	-	-
iii. Aset keuangan lainnya	-	-
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)*	4.438	-
e. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-	-
f. Dividen	-	-
g. komisi/provisi/fee dan administrasi	1.349.396	1.148.670
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	3.927	19.210
i. Pendapatan lainnya	42.520	40.194
Beban Operasional Selain Bunga		
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan*		
i. Surat berharga	6.138	200.458
ii. Kredit	-	-
iii. Spot dan derivatif	-	-
iv. Aset keuangan lainnya	-	-
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-
c. Kerugian penjualan aset keuangan*		
i. Surat berharga	10.001	83.994
ii. Kredit	-	-
iii. Aset keuangan lainnya	-	-

POS-POS	31 Desember	
	2014	2013
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)*	-	2.371
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)		
i. Surat berharga	-	-
ii. Kredit	670.341	362.730
iii. Pembiayaan syariah	-	-
iv. Aset keuangan lainnya	-	-
f. Kerugian terkait risiko operasional	-	-
g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-	-
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	18.879	23.906
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	-
j. Beban tenaga kerja	1.098.074	1.122.177
k. Beban promosi	34.295	24.861
l. Beban lainnya	1.662.222	1.477.374
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(2.099.669)	(2.088.191)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	645.380	607.860
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	8.123	1.091
Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	33.441	48.140
Pendapatan (beban) non operasional lainnya	11.037	(24.541)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	52.601	24.690
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	697.981	632.550
Pajak penghasilan		
Taksiran pajak tahun berjalan	(82.993)	(82.979)
Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(15.750)	(24.791)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH	599.238	524.780
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN		
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	238.932	23.636
Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-	-
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-
Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	-	-
Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	-
Lainnya	-	-
Pendapatan Komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait	238.932	23.636
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	838.170	548.416
Laba yang dapat diatribusikan kepada :		
Pemilik	599.238	524.780
Kepentingan Non Pengendali	-	-
Total Laba Tahun Berjalan	599.238	524.780
Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :		
Pemilik	838.170	548.416
Kepentingan Non Pengendali	-	-
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	838.170	548.416
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-	-
DIVIDEN	-	-
LABA BERSIH PER SAHAM *)	86	75

*) Khusus bagi bank yang telah go publik.

* Disajikan secara neto

PT BANK MEGA Tbk.

Direksi

S.E & O.

Alamat PT Bank Mega Tbk. adalah sebagai berikut :

PT BANK MEGA Tbk.

Menara Bank Mega, Lantai 16
 Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A
 Jakarta 12790
 Telepon : (021) 79175000
 Faksimili : (021) 7990720
 Up : Capital Market Services

XXII. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 5299-1099
Fax.: (021) 5299-1199

Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana Tanggal Pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BCA SEKURITAS	PT CIMB SECURITIES INDONESIA	PT DANAREKSA SEKURITAS (Terafiliasi)	PT TRIMEGAH SECURITIES TBK
Menara BCA – Grand Indonesia Lantai 41 Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta 10310 Tel. (021) 2358 7222 Fax. (021) 2358 7250	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Tel. : (021) 515-4660 Fax.: (021) 515-4661	Gedung Danareksa Jl. Merdeka Selatan No.14 Jakarta 10110 Tel. (021) 2955 5777 Fax. (021) 350 1724/350 1725	Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia Tel. : (021) 2924-9088 Fax. : (021) 2924-9150

PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT RECAPITAL SECURITIES
 Gedung Recapital Lantai 10
 Jl. Adityawarman No. 55
 Jakarta 12160
 Tel : (021) 2702277
 Fax : (021) 7246881

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan